KONSERVASI EKOSISTEM ALAM NUSANTARA

GRAND DESIGN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN di TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK PERIODE TAHUN 2022-2027



Oleh:

Yogi Prasetio
Ahmad Munawir
Septi Dewi Cahaya
Angga Supriatna
Haegel Alif

Yayasan Konservasi Ekosistem Alam Nusantara (KIARA)
2023

GRAND DESIGN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN di TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK PERIODE TAHUN 2022-2027

Oleh:

Yogi Prasetio
Ahmad Munawir
Septi Dewi Cahaya
Angga Supriatna
Haegel Alif

Yayasan Konservasi Ekosistem Alam Nusantara (KIARA)
2023

GRAND DESIGN

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Tahun Periode 2022-2027

©2023

ISBN: 978-623-96033-8-0

Diterbitkan oleh

Yayasan Konservasi Ekosistem Alam Nusantara (KIARA)
Komplek Laladon Indah, Jl. Kamojang C3/14 Bogor-Jawa Barat 16610, Indonesia
website: https://kiara-indonesia.org/

Bekerja sama dengan

Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS)
Jl. Raya Cipanas Kec. Kabandungan Sukabumi 43368 Jawa Barat
email: tnhalimunsalak@menlhk.go.id
website: www.tnhalimunsalak.go.id

Tim Penulis
Yogi Prasetio, S.Hut
Ahmad Munawir, S.Hut, M.Si
drh. Septi Dewi Cahaya
Angga Supriatna
Haegel Alif

Editor
Rahayu Oktaviani, S.Hut, M.Sc

Desain dan Tata Letak
Angga Supriatna

Kontributor Foto
M. Misbah Satria Giri
Haegel Alif
Rahmat Hidayat
Senjaya Mercusiana
Yopi Suhendar

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

KONSERVASI EKOSISTEM ALAM NUSANTARA



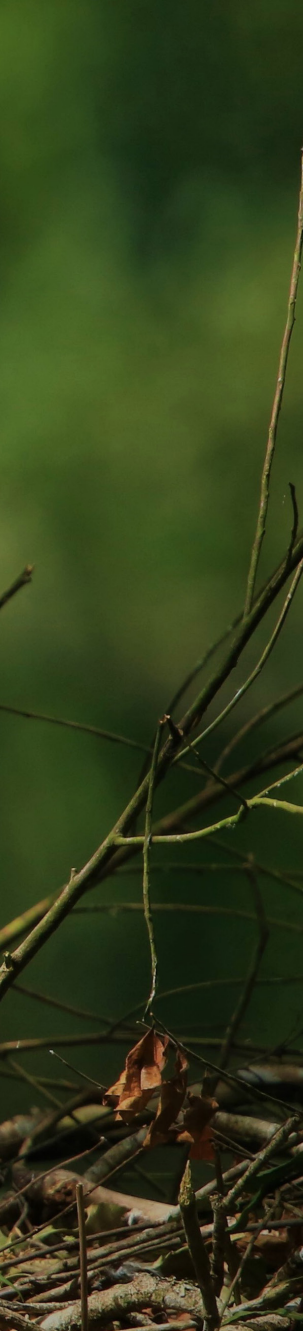


Macan Tutul Jawa (*Panthera pardus melas*)
Foto : Senjaya Mercusiana (Camera Jebak)



Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*)

Foto : Rahmat Hidayat



SAMBUTAN
DIRJEN KSDAE

Upaya Pak Munawir sebagai Kepala Balai menggerakkan stafnya untuk menyusun riset agenda TNGHS adalah inovasi yang sangat penting.

Dalam upaya itu telah dapat mengidentifikasi "riset gap" yang diperlukan untuk ditawarkan kepada lembaga riset dan peneliti. Inilah hal yang sangat menarik dari inovasi ini.

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) sebagaimana kawasan konservasi lain, adalah ruang penuh dengan rahasia. Natural capital ini adalah ciptaan Tuhan, yang patut disyukuri dengan cara meneliti apa isinya dan manfaatnya untuk masyarakat, manusia dan kemanusiaan dalam jangka panjang.

Selamat atas terbitnya Grand Design Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS periode tahun 2022-2027 dan semoga menginspirasi Balai-Balai Taman Nasional di seluruh Indonesia.

Dirjen KSDAE

Ir. Wiratno, M.sc

PENGANTAR
KEPALA BALAI TNGHS

Tiga dekade pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dapat dikatakan bukan waktu yang sebentar dalam sebuah organisasi. TNGHS sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kawasan konservasi di Indonesia memegang amanah undang-undang sebagai wahana penelitian bagi para peneliti ataupun Lembaga penelitian. Selama periode tersebut, tentu telah banyak penelitian dari segala aspek di TNGHS. Namun, hasil penelitian tentang potensi kawasan TNGHS sampai dengan saat ini tidak banyak tersedia di perpustakaan kantor Balai TNGHS. Padahal dari hasil-hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan input bagi pengelolaan Kawasan. Di sisi lain, aktivitas penelitian merupakan upaya untuk membuka "kotak pandora" potensi dari Kawasan TNGHS sehingga pengambilan kebijakan pengelolaan Kawasan TNGHS bersifat "*Based on Science*".

Dalam jangka panjang perlu disusun sebuah rancangan penelitian di TNGHS. TNGHS akan berupaya mendorong semakin banyaknya penelitian yang aplikatif sehingga potensi Kawasan TNGHS baik dari sumber daya genetik keane-karagaman hayati serta kearifan tradisional masyarakat di TNGHS dapat dikembangkan untuk dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Berdasarkan cita-cita itulah maka buku ini disusun. Buku "Grand Design Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS Periode Tahun 2022-2027" telah mencatat setidaknya terdapat 391 judul laporan penelitian yang pernah dilakukan di TNGHS pada periode tahun 2001-2021 dari aspek *Biodiveristy*, Sosial Ekonomi dan Budaya, Jasa Lingkungan dan Mineral, serta Kebijakan Pengelolaan yang telah dilakukan oleh 64 Lembaga Penelitian dalam negeri maupun luar negeri. Buku ini juga memuat empat aspek penelitian yang dibutuhkan di TNGHS, antara lain aspek ekosistem, flora dan fauna, jasa lingkungan, serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Empat aspek tersebut terbagi ke dalam 111 butir objek penelitian yang akan menjadi sebuah panduan berupa *roadmap* penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di TNGHS periode tahun 2022-2027.

Kami ingin ucapkan terima kasih kepada para pihak dan mitra kerja TNGHS ,antara lain : Yayasan Botani Tropika Indonesia/BOTANIKA (Fatkurrahman, Peniwidiyanti, & Daniyan Aulia Rahman), Yayasan Konservasi Ekosistem Alam Nusantara/KIARA (Rahayu Oktaviani), Hafidz Zufitrianto (IPB), Luthfi Salam (ITERA), dan Tim Kontributor Foto hingga buku ini dapat disusun. Harapan kami, dengan adanya buku ini, para peneliti akan semakin dimudahkan untuk mencari topik atau tema penelitian serta pengembangan penelitian di TNGHS dapat dilakukan di masa mendatang.

Kepala Balai TNGHS



Ahmad Munawir, S,Hut, M.Si

DAFTAR ISI

SAMBUTAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GRAFIK viii

I. PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Tujuan 4
1.3 Output 4
1.4 Outcome 4
II. KONDISI UMUM TNGHS 8
2.1 Letak dan Luas Kawasan 8
2.2 Sejarah Kawasan 8
2.3 Aksebilitas 11
2.4 Iklim 11
2.5 Geologi dan Tanah 12
2.6 Tofografi 14
2.7 Hidrologi 15
2.8 Potensi Flora 15
2.9 Potensi Fauna 20
2.10 Kondisi Sosekbud 23

III. NILAI PENTING DAN ISU STRATEGIS PENGELOLAAN TNGHS 28
3.1 Nilai Penting Pengelolaan 28
3.2 Isu-isu Strategis Pengelolaan 32
IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN TNGHS 38
4.1 Visi 38
4.2 Misi 38
4.3 Tujuan Pengelolaan 38
4.4 Kondisi yang diharapkan 10 Tahun ke Depan 38
4.5 Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaa 39
V. ZONASI KAWASAN 48
5.1 Zona Inti 48
5.2 Zona Rimba 51
5.3 Zona Pemanfaatan 53
5.4 Zona Rehabilitasi 53
5.4 Zona Tradisional 54
5.5 Zona Khsusus 55
5.6 Zona Budaya, Religi dan Sejarah 57
VI. LANDASAN DAN ISU-ISU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI TNGHS PERIODE TAHUN 2001-2021 62
6.1. Peraturan Pelaksanaan Penelitian 62
6.2. Isu Strategis Terkait Penelitian di TNGHS 66
VII. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI TNGHS PERIODE TAHUN 2001-2021 70
VIII. *ROADMAP* PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI TNGHS PERIODE TAHUN 2022-2027 88
8.1. Langkah-langkah Penyusunan Roadmap..... 89
8.2. Roadmap Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS..... 110
8.3. Isu dan Arah Tranformasi Kehutanan Tahun 2011-2030..... 115
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Aksesibilitas Menuju Kawasan TNGHS 11
Gambar II.2 Peta Curah Hujan di Kawasan TNGHS 11
Gambar II.3 Peta Geologi Kawasan TNGHS 13
Gambar II.4 Peta Jenis Tanah di Kawasan TNGHS 14
Gambar II.5 Keanekaragaman Hayati Flora di TNGHS 17
Gambar II.6 Keaneakaragaman Jamur di TNGHS 19
Gambar II.7 Tiga Spesies Kunci TNGHS 22
Gambar V.1 Peta Pembagian Zona Pengelolaan TNGHS Tahun 2020 59

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rincian Perubahan Status Kawasan TNGHS 10
Tabel II.2 Referensi Kelas Curah Hujan 12
Tabel II.3 Referensi Jenis Tanah 14
Tabel II.4 Keanekaragaman Fauna di TNGHS 21
Tabel IV.1 Rencana Strategi dan Rencana Aksi RPJP TNGHS Periode Tahun 2018-2027 40
Tabel VI.1 Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Kawasan TNGHS Periode tahun 2018 - 2027 63
Tabel VII.1 Penelitian yang Dilakukan di TNGHS Periode Tahun 2001-2021 74
Tabel VIII.1 Rencana Strategi dan Rencana Aksi Berpeluang Untuk Dilakukan Kegiatan Penelitaian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS Periode Tahun 2022-2027 88
Tabel VIII.2 Kebutuhan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS Periode Tahun 2022-2027 90

DAFTAR GRAFIK

Grafik VII.1 Kategori Penelitian di TNGHS Periode Tahun 2001-2021 73
Grafik VII.2 Jenis Laporan/Publikasi Penelitian di TNGHS Periode Tahun 2001-2021 74
Grafik VII.3 Presentase Penelitian di TNGHS Berdasarkan Asal Intitusi 75





HABITAT SATWA ENDEMIK

terdapat spesies yang endemik Pulau Jawa dan spesies-spesies terancam punah yang masih hidup di TNGHS. Spesies-spesies terancam punah yang masih dapat dijumpai pada saat ini, antara lain Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*) Macan Tutul Jawa (*Panthera pardus melas*), Kucing Hutan (*Prionailurus bengalensis*), Owa Jawa (*Hylobates moloch*), Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*), Ajag atau Anjing Hutan (*Cuon alpinus javanicus*) dan Sigung (*Mydaus javanensis*).

Foto : Rachmat Hidayat



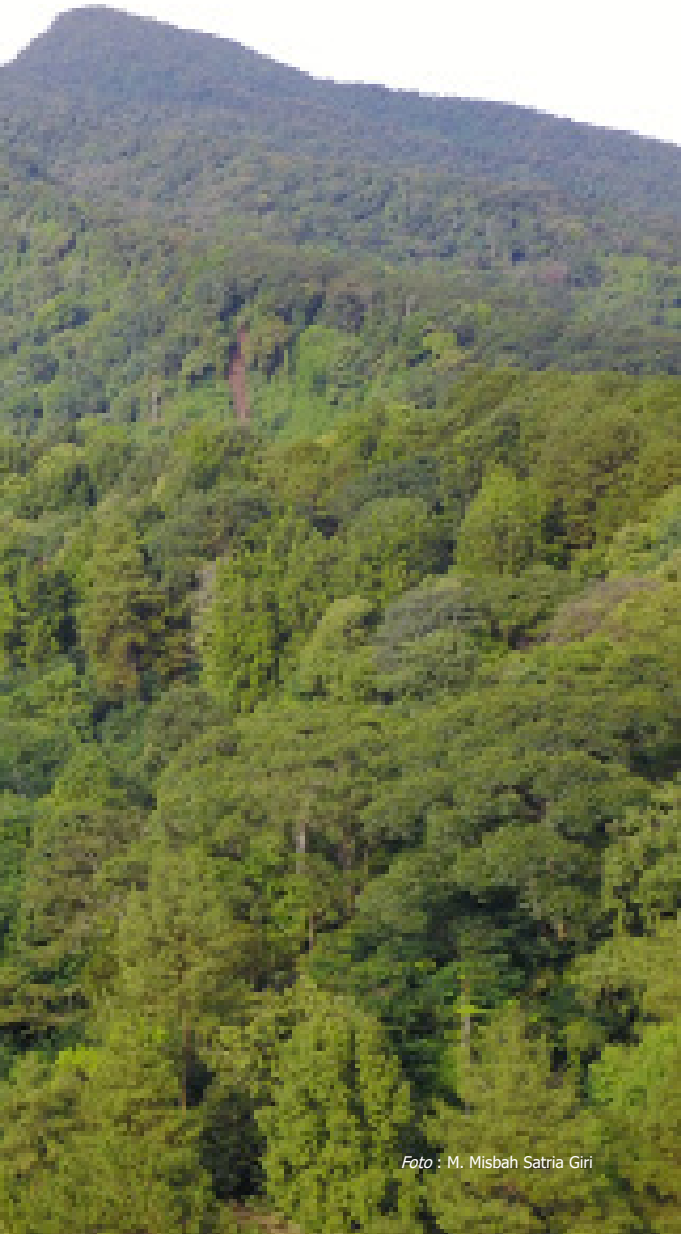


Foto : M. Misbah Satria Giri

Landscape Gunung Salak

Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan hutan hujan tropis terluas yang masih tersisa di Pulau Jawa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Terdapat tiga pilar penting dari konservasi sumber daya alam hayati, yaitu: 1) perlindungan sistem penyangga kehidupan, 2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan 3) pemanfatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Indonesia memiliki kawasan konservasi yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi, sebanyak 556 unit dengan luas mencapai 27,14 juta hektar, dimana seluas 5,32 juta hektar merupakan kawasan konservasi perairan atau sekitar 21% (Wiratno, 2018). Kawasan konservasi di Indonesia terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Penyelenggaraan KSA dan KPA di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Bentuk kegiatan penyelenggaraan KSA dan KPA di Indonesia, yaitu: perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, evaluasi kesesuaian fungsi, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta kerjasama penyelenggaraan. Bentuk kegiatan pemanfaatan KSA dan KPA salah satunya adalah sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Salah satu KPA di Indonesia adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Berdasarkan sejarahnya, bahwa kawasan taman nasional ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi atas pertimbangan nilai-nilai penting dan strategisnya, antara lain sebagai kawasan hutan hujan tropis terluas yang tersisa di Pulau Jawa, sebagai habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan endemik Pulau Jawa, pendukung keberlanjutan nilai-nilai budaya masyarakat kasepuhan, sebagai menara air bagi kota-kota besar disekitarnya termasuk Bogor, Sukabumi, Banten, Jakarta dan Tangerang.

Sejarah pengelolaan TNGHS diawali pada tahun 1992, dimulai dengan penunjukan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) dengan luas 40.000 ha, kemudian pada tahun 2016 kawasan hutan Gunung Halimun digabungkan dengan kawasan hutan Gunung Salak sebagai taman nasional dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dengan luas 87.699 ha. Pada awal penetapan kawasan TNGHS, kegiatan explorasi, penelitian, sangat banyak dilakukan oleh berbagai institusi baik dalam maupun luar negeri. Kegiatan ini berjalan atas kerjasama Departemen Kehutanan dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) Proyek "Gunung Halimun Salak National Park Management Plan", yang dilaksanakan pada tahun 1998 sampai dengan 2009.

Melalui proyek ini tentunya banyak sekali data dan informasi yang diperoleh tentang kawasan hutan Gunung Halimun dan Gunung Salak, dan ini sangat penting untuk dikompilasi dengan hasil-hasil penelitian terkini, yaitu periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2021 ini. Tentunya banyak sekali hasil-hasil kajian dan riset di TNGHS, namun demikian masih sangat dibutuhkan penelitian-penelitian terutama terkait dengan kebutuhan pengelolaan kawasan TNGHS.

Menurut Wiratno (2018), terdapat sepuluh cara baru kelola kawasan konservasi di Indonesia, salah satunya adalah "**Pengambilan Keputusan Berbasis Sains**", bahwa pengelolaan kawasan konservasi harus berbasiskan pada: (1) data dan informasi yang sahih, tidak dipalsukan, yang berasal dari fakta lapangan, (2) metode pengambilan data dan analisisnya harus benar dan berdasarkan sains, (3) penerapan teknologi tinggi dalam rangka menemukan nilai manfaat nyata sumber daya genetik untuk kemanusiaan.

Selanjutnya apabila melihat fakta di lapangan, masih banyak potensi yang belum dikenali dan digali di dalam kawasan konservasi khususnya di taman nasional, yang memiliki luas mencapai 60% dari luas total kawasan konservasi di Indonesia. Sebagaimana pengertian disebutkan didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Maka dari itu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di kawasan konservasi termasuk TNGHS patut untuk diprioritaskan sehingga diharapkan potensi yang ada dapat digali dan dikembangkan untuk manfaat yang seluas-luasnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Buku "Grand Design Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS Periode Tahun 2022-2027" diharapkan dapat menjadi pegangan dan memberikan pandangan bagi Balai TNGHS selaku pengelola, dan para pihak yang berkepentingan khususnya kalangan peneliti tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan di TNGHS, dan penelitian-penelitian yang dibutuhkan atau perlu dilakukan di TNGHS. Sehingga penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang dapat sesuai dengan kebutuhan pengelolaan serta dapat bermanfaat, sebagai bahan pertimbangan utama dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan TNGHS untuk terwujudnya kelestarian potensi dan fungsi serta kemanfaatan kawasan TNGHS bagi masyarakat sekitar kawasan.

Bagi kepentingan pengelolaan, buku ini merupakan upaya untuk mencapai pengambilan keputusan dalam pengelolaan TNGHS yang berbasis sains serta dalam rangka menggali potensi yang ada di TNGHS untuk selanjutnya dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

1.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari Buku "Grand Design Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS Periode Tahun 2022-2027" adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya daftar penelitian yang pernah dilakukan di TNGHS pada periode tahun 2001-2021
2. Tersedianya *roadmap* penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai panduan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan di TNGHS periode tahun 2022-2027.

1.3. Output

Output yang diharapkan adalah Buku "Grand Design Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS Periode Tahun 2022-2027"

1.4. Outcome

Capaian yang diharapkan dari penyusunan buku ini adalah tersedianya *roadmap* atau peta jalan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS Periode Tahun 2022-2027 sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan.



CANOPY TRAIL
Didirikan pada tahun 1998 oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan yang saat itu dijabat oleh Dr. IR. Muslim Nasution. Sebuah jembatan pohon yang terletak sekitar 200 meter dari Stasiun Penelitian Cikaniki yang dibangun untuk kepentingan penelitian.
Foto : Rachmat Hidayat





Air Terjun (Curug) Macan di Resort PTNW Cikaniki

Foto : Haegel Alif

Terdata lebih dari 115 sungai dan anak sungai berhulu dari dalam kawasan TNGHS. Di bagian utara Gunung Halimun Salak terdapat 3 DAS penting, yaitu Sungai Ciberang (Ciujung), Sungai Cidurian dan Cikaniki (Cisadane). Di bagian selatan terdapat 9 DAS sungai penting, yaitu: Cimadur, Cihara, Cisiih, Cibareno, Cisolok, Cimaja, Cikasomayang, Citepus dan Cimandiri (Cicatih/Citarik).

BAB II

KONDISI UMUM TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

2.1. Letak dan Luas Kawasan

Lokasi TNGHS secara geografis terletak antara 06°32'14" LS - 06°55'12" LS dan 106°12'58"BT–106°45'50"BT. Secara administratif wilayah kerja TNGHS termasuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak di Provinsi Banten, dengan batas-batas wilayah meliputi :

1. Sebelah utara dibatasi oleh Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor serta Kecamatan Cipanas di Kabupaten Lebak.
2. Sebelah barat dibatasi oleh Kecamatan Leuwiliang di Kabupaten Bogor dan Kecamatan Kabandungan di Kabupaten Sukabumi.
3. Sebelah selatan dibatasi oleh Kecamatan Cikidang dan Kecamatan Cisolok di Kabupaten Sukabumi, serta Kecamatan Bayah di Kabupaten Lebak.
4. Sebelah timur dibatasi oleh Kecamatan Cibeber di Kabupaten Lebak.

2.2. Sejarah Kawasan

Kawasan TNGHS ditetapkan sebagai salah satu taman nasional di Indonesia, berawal dari proses penunjukkan taman nasional dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.282/Kpts-II/1992 tanggal 28 Februari 1992 dengan luas 40.000 hektar sebagai Taman Nasional Gunung Halimun

(TNGH) dan resmi ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1997 sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan (UPT BTNGH). Selanjutnya, atas dasar kondisi sumber daya alam hutan yang semakin terancam rusak dan adanya desakan para pihak yang peduli akan konservasi alam, pada tahun 2003 kawasan Halimun ditambah area dengan memasukkan kawasan hutan Gunung Salak, Gunung Endut yang status sebelumnya merupakan hutan produksi terbatas dan hutan lindung yang dikelola Perum Perhutani diubah fungsinya menjadi hutan konservasi, dimasukkan ke dalam satu kesatuan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) melalui SK Menteri Kehutanan dengan No. 175/Kpts-II/2003 dengan luas total ± 113.357 ha pada tanggal 10 Juni 2003. Dengan masuknya kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas menjadi satu kesatuan kawasan konservasi TNGHS, maka potensi munculnya berbagai masalah dalam pengelolaan sangat besar. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan peraturan dan kebijakan yang menjadi acuan dalam pengelolaan antara Perum Perhutani dan Balai TNGHS. Pada masa-masa peralihan pengelolaan kawasan, hal yang dilakukan oleh Balai TNGHS adalah melaksanakan sosialisasi kepada para pihak serta melaksanakan penggalian potensi dan permasalahan yang fokus di kawasan perluasan dengan menggandeng para pihak terkait agar pengelolaan dapat berjalan efektif, efisien dan optimal. Akan tetapi dalam perjalanannya, kondisikawasan TNGHS terutama di kawasan perluasan terdapat banyak potensi permasalahan yang salah satunya adalah dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdapat adanya ketidaksesuaian dengan SK Menteri Kehutanan No.75/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan TNGHS.

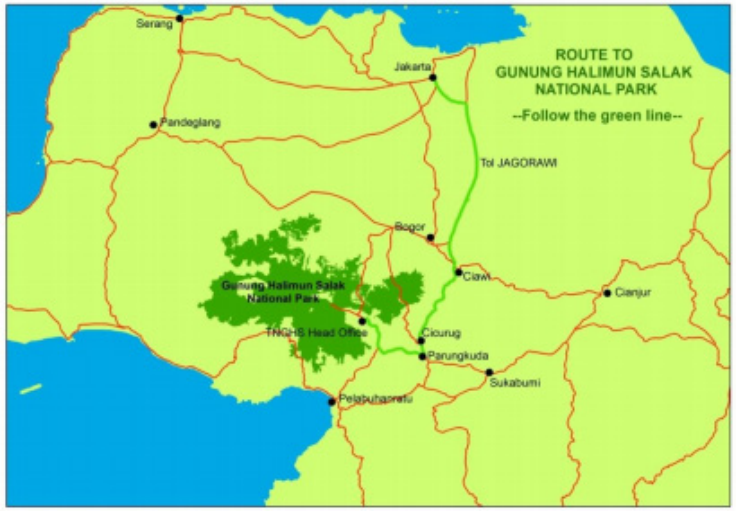
Pada tahun 2016 luas kawasan TNGHS kembali mengalami perubahan menjadi +87.699 ha sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.327/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan TNGHS. Sebagian kawasan TNGHS tersebut berubah fungsi menjadi hutan lindung, hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas serta pengembalian areal penggunaan lain (*enclave*). Dengan berubahnya ebagian fungsi kawasan tersebut, maka akan berdampak kepada pengelolaan kawasan secara keseluruhan karena satu kesatuan pengelolaan antara hutan konservasi, hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas harus dengan bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), yang sampai dengan saat ini belum ada *guide line yang dapat dijadikan acuan* untuk melaksanakan pengelolaan KPHK tersebut. Seperti halnya taman nasional lain di Indonesia, TNGHS lahir dari perkembangan perubahan beberapa status (lihat Tabel 1).

Tabel II.1. Rincian Perubahan Status Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Tahun	Perubahan Status Kawasan
1935 - 1961	Cagar Alam di bawah pengelolaan Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia/Djawatan Kehutanan Jawa Barat
1961 - 1978	Cagar Alam di bawah pengelolaan Perum Perhutani Jawa Barat
1979 - 1990	Cagar Alam di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam III, yaitu Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat I
1990 - 1992	Cagar Alam dikelola oleh Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
1992 - 1997	Taman Nasional dibawah pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
1997 - 2003	Taman Nasional dibawah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Halimun setingkat Eselon III dengan luas 40.000 ha
2003 - 2016	Penunjukkan kawasan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak seluas 113.357 ha (memasukkan eks hutan produksi/ lindung)
2016 - sekarang	Penunjukkan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak seluas +87.699 ha (perubahan fungsi sebagian kawasan TNGHS menjadi hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan pengembalian areal penggunaan lain)

2.3. Aksesibilitas

Kawasan TNGHS terletak tidak jauh dari beberapa kota yang relatif besar yaitu Bogor, Sukabumi dan Lebak. Rute perjalanan menuju kantor pengelola yaitu: Parung-kuda–Kabandungan (kantor TNGHS) berjarak 30 km dengan kondisi jalan cukup baik (beraspal). Namun terdapat juga enam jalan masuk ke kawasan TNGHS lainnya dengan kondisi jalan yang sangat bervariasi dengan dapat dilalui menggunakan roda empat, roda dua sampai hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki (lihat Gambar II.1).



Gambar II.1. Peta aksesibilitas menuju kawasan TNGHS

2.4. Iklim

Menurut Klasifikasi Schmidt dan Ferguson, iklim di wilayah kawasan TNGHS dan sekitarnya tergolong ke dalam tipe iklim B, dengan perbandingan antara rata-rata bulan kering dan bulan basah (Q = 24,7), yaitu tipe iklim tanpa musim kering dan tergolong ke dalam hutan hujan tropika yang selalu basah. Jumlah curah hujan bulanan tertinggi sebesar 374 mm dan curah hujan bulanan terendah sebesar 65 mm yang biasanya terjadi pada bulan Juli. Namun ada sumber lain menyatakan bahwa berdasarkan tumpang tindih antara peta penutupan lahan dan peta tipe iklim kawasan TNGHS dan sekitarnya terdiri dari tipe iklim A, B1 dan B2 (lihat Gambar II.2)



Gambar II.2. Peta curah hujan di kawasan TNGHS

Tabel II.2. Referensi Kelas Curah Hujan

Kelas Intensitas Hujan	Intensitas Hujan (mm/hari hujan)	Keterangan
1	1,00 - 13,6	Sangat Rendah
2	13,6 – 20,7	Rendah
3	20,7 – 27,7	Sedang
4	27,7 – 34,8	Tinggi
5	34.8 ke atas	Sangat Tinggi

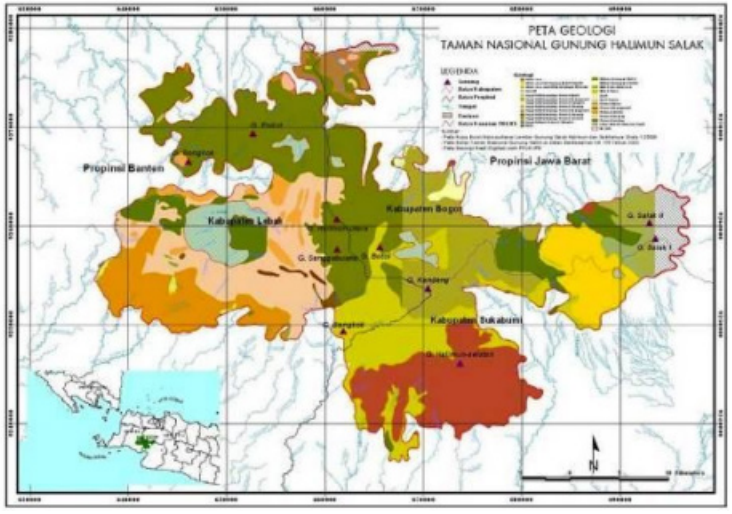
Variasi curah hujan rata-rata yang terjadi di TNGHS berkisar antara 4.000–6.000 mm/tahun. Bulan Oktober-April merupakan musim hujan dengan curah hujan antara 400-600 mm/bulan, sedangkan musim kemarau berlangsung dari bulan Mei-September dengan curah hujan sekitar 200 mm/bulan. Suhu udara rata-rata bulanan 31,5 °C dengan suhu terendah 19,7 °C dan suhu tertinggi 31,8 °C. Kelembaban udara rata-rata 88%. Dengan iklim yang basah, dari kawasan ini mengalir beberapa sungai yang tak pernah kering dan mensuplai air ke wilayah sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain Ciberang, Ciujung, Cidurian, Cisadane, Cimadur dan Citarik maupun Citatih yang jauh lebih dikenal sebagai tempat wisata arung jeram. Apabila dibandingkan dengan curah hujan rata-rata di Pulau Jawa, wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki musim hujan pada bulan November-April. Sedangkan musim keringnya rata-rata terjadi pada bulan Mei hingga Oktober.

Dengan demikian, wilayah kawasan TNGHS mempunyai curah hujan dengan kategori termasuk sangat tinggi (lihat Tabel II.2).

2.5. Geologi dan Tanah

Sejarah geologi menunjukkan bahwa TNGHS dulunya merupakan salah satu rangkaian gunung berapi bagian selatan yang memanjang dari Pegunungan Bukit Barisan Selatan Sumatera ke Gunung Honje di Taman Nasional Ujung Kulon dan seterusnyake Gunung Halimun Salak yang dipengaruhi oleh kondisi Samudera Hindia. Selama periode *Miocene* dan *Pleostean* (sekitar 10-20 juta tahun yang lalu) permukaan pegunungan tersebut terdorong ke atas. Gerakan ke atas kemudian membentuk wilayah Bayah, sedangkan bagian yang rendah runtuh sebagai dataran menjadi Selat Sunda yang memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

Dua pulau ini mulai terpisah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sebagian besar kawasan TNGHS terdiri dari batuan vulkanik seperti breksi, lava basah dan andesit dari masa *Pliocene-lower Pleistocene* dan beberapa strata dari masa *pra-Pliocene*.



Gambar II.3. Peta Geologi kawasan TNGHS

Selain itu terdapat batuan sedimen di bagian utara yang awalnya merupakan kubah, terutama terdiri dari batuan debu *calcareous*. Hal yang menarik serta luar biasa di daerah sekitar TNGHS ini adalah adanya kandungan emas dan perak.

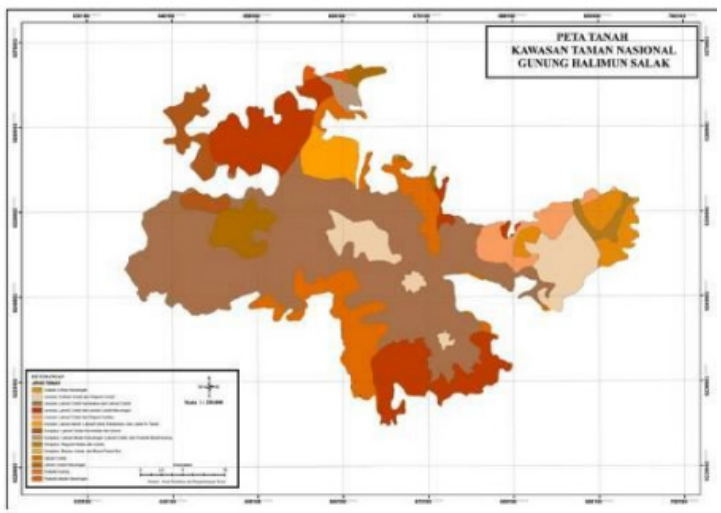
Biji emas dan perak mungkin terangkat pada saat timbulnya kubah bawah pertama yang menghasilkan retakan-retakan tegangan yang kemudian terisi oleh batuan kwarsa, seperti yang ditemukan di DAS Ciburial dan Cihara (lihat Gambar II.3).

Khusus untuk Gunung Salak merupakan gunung api strata tipe A. Semenjak tahun 1600-an tercatat terjadi beberapa kali letusan, diantaranya rangkaian letusan antara 1668-1699, 1780, 1902-1903, dan 1935. Letusan terakhir terjadi pada tahun 1938, berupa erupsi freatik yang terjadi di Kawah Cikuluwung Putri. Menurut Hartman (1938). Gunung Salak I merupakan bagian gunung yang paling tua. Disusul oleh Gunung Salak II dan kemudian muncul Gunung Sumbul, sedangkan Kawah Ratu diperkirakan merupakan produk akhir dari Gunung Salak. Kawah Cikuluwung Putri dan Kawah Hirup masih merupakan bagian dari Kawah Ratu.

Berdasarkan peta tanah Provinsi Jawa Barat skala 1 : 250.000 dari Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1966, sebagian jenis tanah di kawasan TNGHS terdiri dari asosiasi andosol coklat dan regosol coklat; latosol coklat; asosiasi latosol coklat kekuningan; asosiasi latosol coklat kemerahan dan latosol coklat, asosiasi latosol merah; latosol coklat kemerahan dan literit air tanah; kompleks latosol coklat kemerahan dan litosol; asosiasi latosol coklat dan regosol kelabu (lihat Gambar II.4).

Untuk tujuan pertanian, tanah di kawasan TNGHS mempunyai kesuburan kimiawi yang minim sampai cukup, namun sifat-sifat fisiknya cukup bagus. Tanah dan batuannya dapat dikatakan mempunyai porositas dan permeabilitas yang baik sebagai daerah tangkapan.

Tanah di kawasan TNGHS juga peka terhadap erosi. Tekstur tanah umumnya didominasi oleh partikel seukuran debu yang mudah tercuci. Sifat-sifat tanah juga menunjukkan sifat vulkanik tua. Perkembangan tanah menunjukkan adanya evolusi tanah dan vulkanik tua yang sebenarnya sedang mengalami proses transisi dari andosol dan latosol.



Gambar II.4. Peta jenis tanah di kawasan TNGHS

Tabel II.3. Referensi Jenis Tanah

Kelas Tanah	Jenis Tanah	Keterangan
1	Aluvial Tanah Glei, Planosol, Hidromorf Kelabu, Literit Air Tanah	Tidak Peka
2	Latosol	Agak Peka
3	Brown Forest Soil, Non Calcic Brown, Mediteran	Kurang Peka
4	Andosol, Laterit, Grumosol, Podsol, Podsolik	Peka
5	Regosol, Litosol, Organosol, Renzina	Sangat Peka

2.6. Topografi

Berdasarkan Peta Topografi, kawasan TNGHS sebagian besar datarannya terletak pada ketinggian di bawah 1.400 mdpl, dengan sebaran 1.000-1.400 mdpl (40,3 %). Bentang alam kawasan TNGHS secara umum memiliki topografi berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Berdasarkan analisa kemiringan lahannya kawasan TNGHS terdiri dari perbukitan dengan kemiringan terbanyak lebih dari 45 % (75,7 % dari luas areal) (Irwan, 2008).

TNGHS memiliki ketinggian tempat berkisar antara 500–2.211 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini

dapat dikatakan sebagai luasan terbesar bagi sekelompok hutan pegunungan (sub montana) yang masih utuh di Pulau Jawa. Di dalam kawasan TNGHS terdapat gunung-gunung yang memiliki ketinggian antara lain, Gunung Salak 1 (2.211 mdpl), Gunung Salak 2 (2.180 mdpl), Gunung Halimun Utara (1.929 mdpl), Gunung Halimun Selatan (1.758 mdpl) dan Gunung Kendeng (1.680 mdpl).

2.7. Hidrologi

Kawasan TNGHS mempunyai nilai penting sebagai daerah tangkapan air. Banyak sungai berasal dari kawasan ini yang bermuara ke Laut Jawa di sebelah utara maupun ke Lautan Hindia di sebelah selatan. Air sungai tersebut menjadikan lahan-lahan pertanian di sekitar TNGHS yang berkembang dengan cukup baik. Sungai-sungai di sekitar TNGHS selalu berair sepanjang musim. Berdasarkan pengamatan di lapangan, lebih dari 115 sungai dan anak sungai yang berhulu dari dalam kawasan TNGHS. Di bagian utara Gunung Halimun Salak terdapat 3 DAS penting, yaitu Sungai Ciberang (Ciujung), Sungai Cidurian dan Cikaniki (Cisadane). Di sebelah selatan terdapat 9 DAS sungai penting, yaitu: Cimadur, Cihara, Cisiih, Cibareno, Cisolok, Cimaja, Cikasomayang, Citepus dan Cimandiri (Cicatih/Citarik).

Sungai-sungai ini mengalir melintasi wilayah Bogor, Tangerang, Rangkas bitung, Pelabuhan ratu dan Bayah. Pada umumnya aliran sungai di kawasan TNGHS mengalir sepanjang tahun dengan debit relatif tetap dan dengan tingkat fluktuasi yang rendah. Aliran air sungai-sungai ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mengairi lahan pertanian, kegiatan rumah tangga, pembangkit listrik mikrohidro, industri dan wisata arung jeram yang sangat popular.

2.8. Potensi Flora

Lebih dari 700 spesies tumbuhan berbunga hidup di hutan alam di dalam TNGHS, yang meliputi 391 marga dari 119 suku. Tipe hutan alam di kawasan TNGHS dibagi menjadi hutan hujan dataran rendah (100-1.000 mdpl) yang didominasi oleh zona collin (500-1.000 mdpl), hutan hujan pegunungan bawah atau sub Montana (1000-1.500 mdpl) dan hutan hujan pegunungan tengah atau hutan Montana (1.500-1.929 mdpl). Khusus di Gunung Salak juga ditemukan ekosistem alpin (lebih dari 2000 mdpl) dan ekosistem kawah yang memiliki vegetasi spesifik.

Pada setiap ketinggian tersebut mempunyai beberapa ciri khas terutama menyangkut keanekaragaman spesies tumbuhan. Pada ketinggian 500–1.000 mdpl dapat dijumpai spesies Rasamala (*Altingia excelsa*), Puspa (*Schima wallichii)*, Saninten (*Castanopsis javanica*), Kiriung Anak (*C.acuminatissima*), Pasang (*Quercus gemelliflora*).

Pada ketinggian 600-700 mdpl terdapat beberapa spesies dari anggota suku dipterocarpaceae yang merupakan ciri hutan hujan dataran rendah seperti *Dipterocarpus trinervis, D.gracilis dan D.hasseltii*. Pada ketinggian 1,000–1.500 mdpl dapat dijumpai spesies *Acer Iaurinum*, ganitri (*Elaeocarpus ganitrus*), *Eurya acuminatissima*, *Antidesma bunius*, *Ficus spp*, kayu manis (*Cinnamomum sp.*), kileho (*Saurauia pendula*), dan kimerak (*Weinmannia blumei)*.

Pada ketinggian ini dapat dijumpai pohon-pohon yang memiliki tinggi hingga 40 m dengan diameter 120 cm dari spesies rasamala (*Altingia excelsa*), saninten (*Castanopsis argentea*), pasang (*Quercus sp.*) dan huru (*Litsea sp.*). Sedangkan pada ketinggian yang lebih rendah, dijumpai pohon-pohon yang lebih tinggi lagi.

Sedangkan pada ketinggian di atas 1.500 mdpl didominasi oleh spesies jamuju (*Dacrycarpus imbricartus*), kibima (*Podocarpus blumei*), dan kiputri (*Podocarpus neriifolius*). Spesies menarik lainnya seperti *Vernonia arborea* (hamirung) yang merupakan satu-satunya anggota suku Asteraceae yang berbentuk pohon. Kilemo (*Litsea cubeba*), yang lebih banyak dijumpai di Gunung Botol; spesies *Schefflera rigida* dan kiramo giling (*Trevesia sundaica*) lebih banyak dijumpai pada tempat yang agak terbuka, maupun tepi jalan. Sedangkan khusus di area sekitar Kawah Ratu, puncak Gunung Salak (2.211 mdpl) juga terdapat beberapa spesies tumbuhan kawah dan hutan lumut.

Selain berbagai spesies vegetasi tumbuhan di atas juga telah tercatat beberapa spesies anggrek (261 spesies, 47 spesies diantaranya tercatat sebagai spesies endemik dan 5 spesies merupakan rekaman baru untuk Pulau Jawa), bambu (12 spesies, antara lain bambu cangkore (*Dinochola scandens*) dan bambu tamiang (*Schyzostchyum sp.*) yang merupakan tumbuhan asli Jawa Barat, rotan (13 spesies), Kantung Semar (*Nepenthes sp.*), palahlar (*Dipterocarpus hasseltii*), bahkan pernah ditemukan bunga *Rafflesia rochussenii* di Gunung Salak yang merupakan spesies tumbuhan unik dan langka yang terdapat di TNGHS (lihat gambar II.5)



Kantong Semar (*Nephentes gymnaphora)*



Ki Aksara (*Macodes petola*)



Bunga Raflesia (*Raflesia rouchussenii*



Anggrek Phaius (*Phaius indigoferus*)



Pining (*Hornstedtia sp.*)



Anggrek Natal Ungu (*Calente ceciliae*)

Semua Foto : Haegel Alif

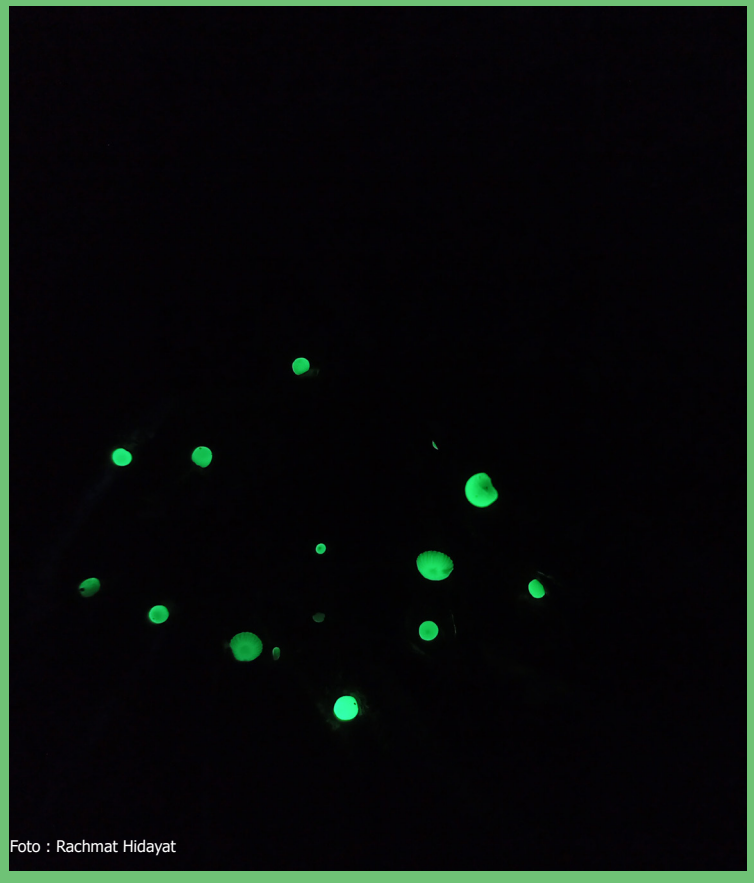
Gambar II.5. Keanekaragaman Hayati Flora di TNGHS

Lebih dari 100 spesies tumbuhan hutan dimanfaatkan untuk obat tradisional, upacara adat, bahan bangunan dan manfaat penting lainnya oleh masyarakat di sekitar kawasan TNGHS (Harada, *et. al*, 2002). Jika ditinjau dari sebaran jenis vegetasi TNGHS memiliki beberapa tipe ekosistem, yaitu: tipe homogen yang terdiri dari tanaman teh terdapat di dalam *enclave* di dalam kawasan. *Enclave* terbesar yaitu Perkebunan Teh Nirmala dan Cianten. Tipe ekosistem yang heterogen terdiri dari perwakilan hutan hujan tropis sekitar 80% relatif masih utuh. Dua puluh persen (20%) lainnya sudah terbuka oleh perambahan. Dari tipe ekosistem heterogen tersebut kemudian dapat dilihat menurut strata tumbuhan, terdiri dari pohon, perdu, herba, liana, efipit, palem, pandan dan pisang-pisangan.

Hutan tanaman di dalam kawasan TNGHS terdapat di areal yang sebelumnya berstatus sebagai kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dikelola Perum Perhutani, diantaranya: hutan tanaman rasamala (*Altingia excelsa*), pinus (*Pinus merkusii*), damar (*Agathis sp.*), dan puspa (*Schima wallichii*). Selain hutan tanaman, terdapat areal yang telah menjadi lahan garapan masyarakat dengan berbagai jenis tanaman budidaya, antara lain: padi, pisang, ketela pohon, jagung, dan cabai.

Selain itu juga ditemukan, berbagai spesies tanaman buah-buahan dan tanaman hutan yang dibudidayakan oleh masyarakat antara lain: durian, nangka, melinjo, pala, alpukat, mangga, aren, kelapa, sengon dan kayu afrika (manii).

Di TNGHS juga dapat dijumpai berbagai spesies jamur yang menarik. Dalam kelembaban hutan TNGHS, umumnya jamur dapat dilihat setiap waktu sepanjang tahun khususnya selama musim hujan antara bulan September-Mei. Terdapat beberapa tipe jamur yang tidak umum, salah satunya adalah fenomena jamur bercahaya yang terdapat di sekitar Cikaniki dan hanya pada waktu-waktu tertentu (lihat gambar II.6)



Jamur Menyala *(Mycena silvaelucens)*



Galeria marginata



Ganoderma lucidum



Pluteus boudieri

Gambar II.6. Keaneakaragaman Jamur di TNGHS

2.9. Potensi Fauna

Kawasan TNGHS dengan berbagai tipe ekosistem yang terdapat didalamnya merupakan habitat dari berbagai jenis satwa langka dan dilindungi. Berdasarkan sejarahnya, kawasan taman nasional pernah menjadi habitat badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*), harimau jawa (*Panthera tigris sondaicus*). Di kawasan TNGHS telah diketahui terdapat spesies dari taksa mamalia sebanyak 61 spesies, dimana terdapat spesies yang endemik Pulau Jawa dan spesies-spesies terancam punah. Spesies-spesies terancam punah yang masih dapat dijumpai pada saat ini, antara lain macan tutul jawa (*Panthera pardus melas*), kucing hutan (*Prionailurus bengalensis*), owa jawa (*Hylobates moloch*), surili (*Presbytis comata*), lutung jawa (*Trachypithecus auratus*), ajag atau anjing hutan (*Cuon alpinus javanicus*) dan sigung (*Mydaus javanensis*). Untuk kelompok burung tercatat 276 spesies burung, dimana 32 spesies diantaranya adalah endemik di Pulau Jawa dengan penyebaran yang terbatas/endemik, bahkan beberapa spesies terancam punah dengan kategori kritis (*Critical endangered*) seperti ekek geleng (*Cissa thalasina*), poksai kuda (*Garrulax rufifrons*), jalak putih (*Sturnus melanopterus*).

Beberapa spesies dengan status Endangered seperti elang jawa (*Nisaetus bartelsi*), ciung-mungkal jawa (*Cochoa azurea*), celepuk jawa (*Otus angelinae*) dan luntur gunung (*Apalharpactes reinwardtii)*. Jumlah ini setara dengan 50% dari jumlah spesies burung yang hidup di Jawa dan Bali. Kawasan TNGHS merupakan habitat yang sangat penting untuk konservasi elang jawa, sehingga menjadi tempat yang menarik untuk kegiatan pengamatan burung. Pengunjung juga dapat mengamati burung-burung terancam punah lainnya seperti rangkong dan burung-burung yang indah seperti luntur gunung (*Apalharpactes reinwardtii*), srigunting ekor-raket (*Dicurus remifer*), kipasan merah (*Ripidura phoen*) dan lain-lain.

Di dalam kawasan TNGHS juga tercatat 30 spesies Amfibi, 49 spesies reptil dan berbagai spesies serangga yang menarik dan indah, seperti berbagai spesies kupu-kupu, capung dan kumbang. Diduga masih banyak spesies kehidupan liar yang belum teridentifikasi, terutama serangga dan organisme mikro. Adapun yang menjadi spesies penciri (*Flagship Species*) TNGHS yang disepakati para pakar keanekaragaman hayati adalah owa jawa (*Hylobates moloch*), macan tutul jawa (*Panthera pardus melas*) dan elang jawa (*Nisaetus bartelsi*). Jumlah spesies yang ditemukan di TNGHS untuk setiap kelompok satwa selengkapnya disajikan pada Tabel 4 (Lihat gambar II.7)

Tabel II.4. Keaneakaragaman Fauna di TNGHS

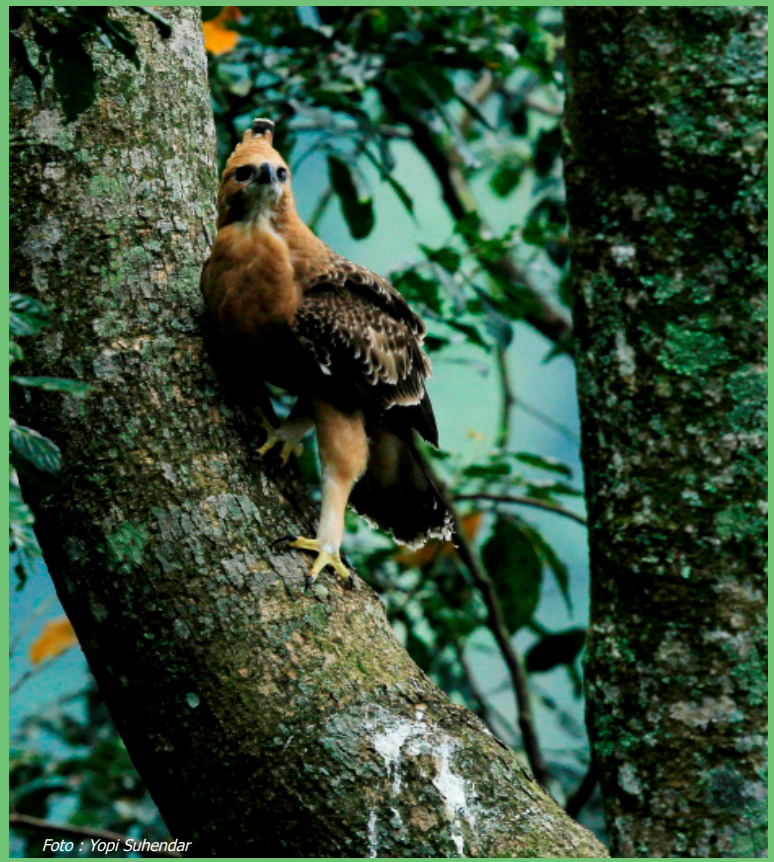
Kelompok	Jumlah Jenis Yang Ditemukan
Mamalia	70
Burung	276
Amfibia	30
Reptilia	49
Ikan	50
Moluska	36
Kupu-kupu	>100
Semut, Tawon	2000
Capung	26
Kumbang	150
Belalang dan Kecoa	35



1). Macan Tutul Jawa (*Panthera pardus melas*)



2). Owa Jawa (*Hylobates moloch*)



3). Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*)

Gambar II.7. Tiga spesies kunci TNGHS

2.10. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat

Wilayah kerja TNGHS terletak dalam 27 kecamatan, dimana 10 kecamatan terdapat di Kabupaten Bogor, 8 kecamatan di Kabupaten Sukabumi dan 9 kecamatan di Kabupaten Lebak. Secara keseluruhan terdapat 116 desa yang sebagian/seluruh wilayahnya berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan TNGHS. Komposisi jumlah penduduk dari ke-116 desa tersebut terdiri dari: 510.441 jiwa di Kabupaten Sukabumi, 1.049.342 jiwa di Kabupaten Bogor dan 301.100 jiwa di Kabupaten Lebak (Referensi BPS Tahun 2020). Berdasarkan survei kampung yang dilakukan oleh GHSNP MP-JICA pada tahun 2005 dan 2007, tercatat ada 348 kampung yang berada di dalam kawasan TNGHS.

Masyarakat lokal yang ada umumnya adalah suku sunda, yang terbagi ke dalam kelompok masyarakat kasepuhan dan bukan kasepuhan. Untuk masyarakat kasepuhan, secara historis penyebarannya terpusat di Kampung Urug, Citorek, Bayah, Ciptamulya, Cicarucub, Cisungsang, Sirnaresmi, Ciptagelar dan Cisitu. Masyarakat kasepuhan masih memiliki susunan organisasi secara adat yang terpisah dari struktur organisasi pemerintahan formal (desa).

Berdasarkan wilayah hidupnya, masyarakat Kasepuhan Banten Kidul tersebar di Banten, Sukabumi dan Bogor. Di daerah Banten Selatan (Banten Kidul) warga Kasepuhan (incu putu) bermukim di sekitar Kecamatan Bayah yang antara lain terkonsentrasi di kampung Tegal Lumbu, Cicarucub, Cisungsang, Cicemet, Sirnagalih dan banyak lagi perkampungan tersebar di sekitar Desa Mekarsari, Sirnagalih, Sukamulya, Neglasari, Hergamanah, Warung Banten, Cihambali, Cikuda dan Citorek. Di Kecamatan Jasinga antara lain tersebar di sekitar kampung Gajrug, Sajira, Guradog dan berbagai kampung lain di sekitar wilayah tersebut. Di daerah Bogor Selatan, mereka bermukim di sekitar Kecamatan Cigudeg tepatnya di kampung Urug, Pabuaran dan Cipatat Kolot di wilayah Desa Kiara Pandak. Di daerah Sukabumi Selatan mereka tersebar di sekitar wilayah pedalaman Kecamatan Cisolok dan sepanjang Sungai Cibareno Girang (Adimihardja, 1992). Selebihnya adalah daerah-daerah yang ditempati oleh urang sunda asli non kasepuhan dan baduy (masyarakat lokal).

Berdasarkan fungsi yang harus dijalankan dari tatali piranti karuhun, sebaran masyarakat kasepuhan tersebut, Kasepuhan Sinaresmi, Ciptagelar, Cisungsang, Cisitu, Cicarucup, Citorek dan Bayah merupakan kelompok Kasepuhan utama. Salah satu indikasi yang menunjukan tentang ”keutamaan” kelompok Kasepuhan tersebut adalah banyaknya perwalian. Sebagai contoh Kasepuhan Ciptagelar, dulu dikenal sebagai Kasepuhan Ciptarasa yang membawahi 560 perwalian Kasepuhan dari tiap- tiap desa di tiga kabupaten (Lebak, Sukabumi dan Bogor).

Selain dari Bogor, Sukabumi dan Lebak, pengikut kasepuhan juga berasal dari beberapa daerah lain. Banyak tidak nya pengikut dalam suatu kelompok kasepuhan sangat mungkin juga dipengaruhi oleh kebiasaan berpindahnya Kampung Gede Kasepuhan (sebagai pusat orientasi sosiokultural dan politik masyarakat kasepuhan) tersebut.

Bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat lokal adalah bahasa sunda dan mayoritas penduduknya beragama Islam walau masih terdapat yang menganut kepercayaan lama (sunda wiwitan). Masyarakat kasepuhan di TNGHS merupakan bagian dari warisan budaya nasional. Mereka masih memegang teguh adat kebudayaan nenek moyangnya, terlihat dalam keseragaman kehidupan sehari-hari, arsitektur rumah, sistem pertanian dan interaksi dengan hutan. Masyarakat setempat memanfaatkan hutan dan lahan sekitarnya dalam berbagai cara, yaitu seperti huma/ladang (*swidden cultivation*), sawah (*rice growing*), kebun (*garden*), kebuntalun (*mixed garden*) dan talon (*mixed forest*).

Masyarakat memiliki kearifan tradisional yang sifatnya tutun temurun dalam pemanfaatan dan konservasi hutan, melalui pembagian wilayah berhutan berdasarkan intensitas pemanfaatan dan tingkat perlindungannya yaitu adanya 'leuweung titipan' (*protected forest*), 'leuweung tutupan' (*conservation forest*), atau 'leuweung sampalan' (*opened forest*). Mereka masih memiliki interaksi yang kuat dengan hutan sekitarnya. Masyarakat juga memiliki pengetahuan etnobotani dan menggunakan tanaman atau tumbuh-tumbuhan di sekitar mereka berdasarkan pengetahuan tersebut, serta mempertahankan pola pertanian yang mampu melestarikan sumber daya genetik padi (*Oryza sativa*) lokal. Pada saat ini sebagian anggota masyarakat kasepuhan mulai meninggalkan kearifan tradisional yang mereka miliki akibat dinamika proses sosial yang terjadi.

Kemampuan ekonomi masyarakat sekitar TNGHS cenderung rendah, walaupun sebagian besar tidak termasuk dalam kategori Rumah Tangga (RT) miskin. Secara umum di Kabupaten Sukabumi jumlah RT miskin pada tahun 2020 mencapai 175.100 orang (Data BPS Kabupten Sukabumi). di Kabupaten Bogor mencapai 465.700 orang (Data BPS Kabupten Bogor tahun 2020). Sedangkan di Kabupaten Lebak mencapai 120.830 orang (Data Kementerian Pembangunan Daerah dan Tertinggal, serta data BPS Tahun 2020).

Degradasi ekosistem hutan banyak terjadi di desa-desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan TNGHS dan diduga terkait erat dengan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Sumber penghidupan masyarakat sangat didominasi dari sektor pertanian, sedangkan sumber penghidupan lainnya dari kegiatan pertambangan ilegal (PETI) serta penyadapan pinus dan damar.



Gambar II.8 Potrait perbatasan antara perkampungan dan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak





Potrait Rumah Adat Penduduk Kasepuhan Cipta Gelar

Penopang Kemurnian dan Kelestarian Budaya, terdapat 11 Kasepuhan yang tersebar di sekitar kawasan TNGHS Mereka memanfaatkan hutan dan lahan sekitarnya sebagai penopang kehidupan sehari-hari yaitu seperti huma/ladang (*swidden cultivation*), sawah (*rice growing*), kebun (*garden*), kebuntalun (*mixed garden*) dan talon (*mixed forest*).

Foto : M. Misbah Satria Giri (Drone)

BAB III

NILAI PENTING DAN ISU STRATEGIS PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

3.1. Nilai Penting Pengelolaan

3.1.1. Hutan Hujan Tropis Terluas Tersisa di Pulau Jawa

Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) merupakan hutan hujan tropis terluas yang tersisa di Pulau Jawa. Kondisi iklim di wilayah kawasan TNGHS tergolong ke dalam tipe iklim tanpa musim kering dimana jumlah curah hujan termasuk dalam kategori sangat tinggi yaitu berkisar antara 4.000-6.000 mm/tahun. Curah hujan yang sangat tinggi akan mendukung produktivitas vegetasi dan menjadi sumber air. Kondisi tanah dan batuan di kawasan ini mempunyai daya permeabilitas yang baik sehingga TNGHS berperan penting sebagai wilayah tangkapan air.

Sebagian besar kondisi hutan di kawasan ini termasuk dalam hutan primer dimana keanekaragaman hayati yang terdapat didalamnya masih sangat tinggi baik flora, fauna, maupun jasad renik. Oleh karena itu, kawasan TNGHS sangat potensial untuk dikembangkan agar dapat memberikan manfaat secara optimal, terutama bagi masyarakat yang berada disekitar kawasan dengan tetap memperhatikan kaidah–kaidah konservasi.

3.1.2. Sebagai Menara Air

Lokasi Kawasan TNGHS berada di ketinggian berkisar antara 500–2.211 mdpl dengan kondisi hutan yang masih bagus menjadikan TNGHS berperan penting sebagai daerah tangkapan air bagi kabupaten–kabupaten di sekelilingnya. Terdata lebih dari 115 sungai dan anak sungai berhulu dari dalam kawasan TNGHS. Di bagian utara Gunung Halimun Salak terdapat 3 DAS penting, yaitu Sungai Ciberang (Ciujung), Sungai Cidurian dan Cikaniki (Cisadane). Di bagian selatan terdapat 9 DAS sungai penting, yaitu: Cimadur, Cihara, Cisiih, Cibareno, Cisolok, Cimaja, Cikasomayang, Citepus dan Cimandiri (Cicatih/Citarik). Sungai-sungai ini mengalir melintasi wilayah Bogor, Tangerang, Rangkasbitung, Palabuhan ratu dan Bayah. Pada umumnya aliran sungai di kawasan TNGHS mengalir sepanjang tahun dengan debit relatif tetap dan dengan tingkat fluktuasi yang rendah. Aliran air sungai-sungai ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mengairi lahan pertanian, kegiatan rumah tangga, pembangkit listrik mikrohidro, industri dan wisata arung jeram yang sangat popular.

3.1.3. Pendukung Keberlanjutan Budaya Masyarakat Kasepuhan

Secara administrasi kawasan TNGHS berada di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Salah satu kelompok masyarakat lokal di sekitar kawasan adalah masyarakat kasepuhan. Masyarakat kasepuhan di TNGHS merupakan bagian dari warisan budaya nasional. Secara historis, penyebaran masyarakat kasepuhan terpusat di Kampung Urug, Citorek, Bayah, Ciptamulya, Cicarucub, Cisungsang, Sirnaresmi, Ciptagelar dan Cisitu. Masyarakat kasepuhan masih memegang teguh adat kebudayaan nenek moyangnya terlihat dalam keseragaman kehidupan sehari-hari, arsitektur rumah, sistem pertanian dan interaksi dengan hutan. Mereka memanfaatkan hutan dan lahan sekitarnya sebagai penopang kehidupan sehari-hari yaitu seperti huma/ladang (s*widden cultivation*), sawah (r*ice growing*), kebun (*garden*), kebuntalun (*mixed garden*) dan talon (*mixed forest*).

3.1.4. Penopang Perekonomian Masyarakat Sekitar

Secara keseluruhan terdapat 116 desa yang sebagaian/seluruh wilayahnya berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan TNGHS. Komposisi jumlah penduduk lokal dari ke-116 desa tersebut terdiri dari: 510.441 jiwa dan 175.713 KK di Kabupaten Sukabumi (Tahun 2020), 1.049.342 jiwa dan 310.990 KK di Kabupaten Bogor (Tahun 2020) dan 301.100 jiwa dan 175.713 KK di Kabupaten Lebak (Tahun 2020). Sebagian besar sumber penghidupan masyarakat sekitar kawasan tersebut didominasi pada sektor pertanian, sumber penghidupan lainnya adalah dari kegiatan pertambangan illegal (PETI) serta penyadapan pinus dan damar. Hal ini menunjukkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat setempat masih cederung rendah, sehingga BTNGHS berupaya melaksanakan program peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan serta adanya bantuan usaha ekonomi, dengan harapan apabila kemampuan ekonomi masyarakat meningkat maka tingkat ketergantungan terhadap hutan akan berkurang. Upaya tersebut juga bertujuan untuk menjaga kelestarian kawasan.

3.1.5. Penghasil Geotermal Sebagai Energi Listrik

Kawasan TNGHS merupakan gunung api strata tipe A yang memiliki potensi panas bumi (*geothermal*) yang dapat dioptimalkan. Energi panas bumi di TNGHS telah dimanfaatkan sejak tahun 1982 untuk pengembangan energi listrik yang saat ini dikelola oleh Star Energy Geothermal Salak, Ltd. (SEGS) dan PT. Indonesia Power (IP), Kamojang POMU – Unit PLTP Gunung Salak (PT. IP). Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Gunung Salak menghasilkan energi listrik sebesar 377 MW per tahun, terbesar di Indonesia. Energi listrik tersebut telah dialirkan ke berbagai wilayah di sekitar kawasan TNGHS bahkan sampai ke perkotaan Kota Bogor. Saat ini Kementeriaan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang melakukan eksplorasi di wilayah Resort Gunung Koneng, Kabupaten Sukabumi dan wilayah Resort Gunung Bongkok, Kabupaten Lebak terkait potensi panas bumi. Upaya pemanfaatan potensi tersebut merupakan bentuk komitmen agar keberadaan hutan konservasi dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.

3.1.6. Habitat Spesies Endemik Flora dan Fauna

Kawasan TNGHS memiliki berbagai tipe ekosistem yang terdapat di dalamnya sehingga berpotensi tinggi sebagai habitat dari berbagai jenis flora dan fauna yang langka dan dilindungi. Tercatat lebih dari 700 spesies tumbuhan berbunga hidup di hutan alam di dalam TNGHS, yang meliputi 391 marga dari 119 suku. Salah satu tumbuhan unik dan langka yang pernah ditemukan di Gunung Salak adalah bunga *Rafflesia rouchussenii*. Tercatat juga 47 spesies anggrek sebagai spesies endemik dan 5 spesies merupakan rekaman baru untuk Pulau Jawa. Di TNGHS juga dapat ditemukan spesies jamur yang menarik dan tidak umum ditemukan yaitu jamur bercahaya (*Mycena silvaelucens*). Jamur tersebut hanya dapat dijumpai pada waktu – waktu tertentu. Selain itu, Pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat telah diketahui lebih dari 100 spesies tumbuhan hutan yang dimanfaatkan untuk obat tradisional, upacara adat, bahan bangunan dan manfaat penting lainnya oleh masyarakat di sekitar kawasan TNGHS.

Selain berbagai spesies tumbuhan diatas juga telah diketahui keanekaragaman fauna terdapat taksa mamalia sebanyak 61 spesies, dimana terdapat spesies – spesies yang endemik Pulau Jawa dan spesies-spesies terancam punah. Spesies-spesies terancam punah yang masih dapat dijumpai pada saat ini, antara lain macan tutul jawa (*Panthera pardus melas*), kucing hutan (*Prionailurus bengalensis*), owa jawa (*Hylobates moloch*), surili (*Presbytis comata*), lutung jawa (*Trachypithecus auratus*), ajag atau anjing hutan (*Cuon alpinus javanicus*) dan sigung (*Mydaus javanensis*).

Untuk kelompok burung tercatat 276 spesies burung, dimana 32 spesies diantaranya adalah endemik di Pulau Jawa dengan penyebaran yang terbatas/endemik, bahkan beberapa spesies terancam punah dengan kategori kritis (*Critical endangered*) seperti ekek geleng (*Cissa thalasina*), poksai kuda (*Garrulax rufifrons*), jalak putih (*Sturnus melanopterus*). Beberapa spesies dengan status *Endangered* seperti elang jawa (*Nisaetus bartelsi*), ciung-mungkal jawa (*Cochoa azurea*), celepuk jawa (*Otus angelinae*) dan luntur gunung (*Harpactes reinwardtii*). Di dalam kawasan TNGHS juga tercatat 30 spesies Amfibi, 49 spesies reptil dan berbagai spesies serangga yang menarik dan indah, seperti berbagai spesies kupu-kupu, capung dan kumbang.

3.1.7. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) telah ditetapkan menjadi bagian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan nomor urut 69 dan menjadi bagian/beririsan dengan pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu yang sudah mendapatkan pengakuan UNESCO dan beririsan dengan Geopark Pongkor yang baru mendapatkan pengakuan nasional. Keberadaan kawasan TNGHS yang strategis telah menjadi tujuan rekreasi/ wisata penting bagi warga Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, Sukabumi dan Banten–Lebak. Pengembangan usaha pariwisata di kawasan merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat lokal. Saat ini di TNGHS sudah dikelola sebanyak 13 obyek wisata alam yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten, yaitu Lebak (Provinsi Banten), Bogor dan Sukabumi (Provinsi Jawa Barat).

3.2. Isu – Isu Strategis Pengelolaan

Berdasarkan identifikasi dan analisis permasalahan yang dilakukan BTNGHS bersama para pihak ditemukan 4 (empat) permasalahan pokok pengelolaan TNGHS yaitu :

3.2.1. Rendahnya kemantapan kawasan

Kemantapan kawasan terkait dengan aspek legal kemantapan kawasan TNGHS dan pengakuan masyarakat secara aktual di lapangan. Rendahnya kemantapan kawasan TNGHS disebabkan oleh belum adanya penetapan batas kawasan TNGHS akibat belum selesainya proses tata batas kawasan sampai dengan temu gelang dan penetapan. Panjang keseluruhan batas TNGHS adalah ± 1.280 km. Panjang yang telah ditata batas 1.210 km dan yang belum ditata batas sepanjang ± 70 km, yakni di Blok Ciladaeun dan Cisimeut, Kabupaten Lebak. Selain itu, rekonstruksi batas masih perlu dilakukan agar penetapan kawasan TNGHS bebas konflik. Seiring dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.327/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan TNGHS, maka diperlukan kembali penataan batas di sebagian kawasan yang beralih fungsi menjadi hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan pengembalian areal penggunaan lain (*enclave*) tersebut serta perlu adanya pengelolaan di kawasan alih fungsi tersebut melalui KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi).

3.2.2. Dikeluarkannya hutan adat dari hutan negara

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara turut berdampak pada keutuhan kawasan TNGHS. Dengan diterbitkannya putusan MK tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melakukan identifikasi keberadaan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Lebak. Legalitas keberadaan masyarakat adat tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kasepuhan. Terdapat 522 MHA Kasepuhan yang diakui dalam Peraturan Daerah tersebut. Balai TNGHS mencoba menggabungkan (*overlay*) peta wilayah MHA Kasepuhan tersebut dengan kawasan TNGHS, dan hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah MHA tersebut berada di dalam kawasan TNGHS. Jika putusan MK Nomor. 35/PUUX/2012 dan Perda Kabupaten Lebak Nomor. 8 tahun 2015 ini diimplementasikan maka luasan kawasan TNGHS akan berkurang cukup signifikan.

3.2.3. Rendahnya ekonomi masyarakat sekitar TNGHS

Rendahnya ekonomi masyarakat sekitar TNGHS ditunjukkan oleh jumlah Rumah Tangga (RT) miskin di desa-desa yang ada dapat mengancam pembukaan lahan di dalam/sekitar kawasan TNGHS. Di Kabupaten Sukabumi jumlah RT miskin pada tahun 2020 berjumlah 175.100 orang (data BPS Kabupaten Sukabumi), di kabupaten Bogor berjumlah 465.700 orang (data BPS Kabupaten Bogor tahun 2020), sedangkan di Kabupaten Lebak berjumlah 120.830 orang (data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan BPS tahun 2020). Degradasi ekosistem hutan banyak terjadi di desa-desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan TNGHS dan diduga terkait erat dengan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat.

Salah satu upaya BTNGHS untuk menjaga kelestarian kawasan adalah dengan melaksanakan program peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan serta adanya bantuan usaha ekonomi, dengan harapan apabila kemampuan ekonomi masyarakat meningkat maka tingkat ketergantungan terhadap hutan akan berkurang.

3.2.4. Degradasi sumber daya alam dan lingkungan

Deforestasi menyebabkan kerusakan habitat dan ekosistem secara signifikan di kawasan TNGHS. Secara kumulatif kerusakan habitat dan ekosistem disebabkan oleh berbagai kegiatan ilegal dan bencana alam. Kegiatan ilegal mencakup: Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI), penebangan liar, perburuan satwa liar dan eksploitasi flora yang bernilai ekonomi tinggi, serta perluasan pemanfaatan lahan untuk pemukiman, lahan pertanian, dan kebutuhan lainnya. Bencana alam di kawasan TNGHS mencakup kebakaran hutan, longsor dan banjir. Beberapa kasus longsor dan banjir di kawasan TNGHS dilaporkan mempunyai kaitan erat dengan aktivitas penambangan emas dan penebangan liar. Selain itu dengan adanya aktifitas PETI di dalam kawasan yang terdapat di semua Seksi PTN Wilayah menyebabkan adanya penurunan kualitas lingkungan terutama dengan tercemarnya tanah dan air. Selain itu aktifitas illegal yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya longsor dan banjir adalah adanya aktifitas perambahan yang tidak terkendali yang sebagian besar berada di kawasan perluasan yang sudah ada dari sebelum kawasan ditunjuk menjadi kawasan TNGHS. Untuk kedua hal tersebut, BTNGHS telah dan sedang berupaya untuk mencari solusi terbaik untuk mengatasinya, antara lain dengan melakukan pengumpulan data primer dan menganalisanya dengan melibatkan para pihak, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak–pihak terkait serta menindaklanjuti rekomendasi–rekomendasi yang telah disepakati. Khusus untuk penanganan aktifitas PETI di dalam kawasan, pada tahun 2018 menjadi salah satu role model pengelolaan BTNGHS. Menurut Lilik B. Prasetyo (Analisis Penutupan Lahan TNGHS Menggunakan Citra Landsat Tahun 2007-2008, Tahun 2009), Luas hutan alam di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) pada periode tahun 2004-2007-2008 secara terus-menerus mengalami penurunan, sedangkan hutan tanaman relatif lebih stabil dengan fluktuasi naik dan turun tidak signifikan. Bekerjasama dengan Mabes Polri, TNI, Polda Jabar, Polda Banten, Satpol PP, Gakkum KLHK dan Masyarakat Lokal. Penanganan PETI Tahun 2020 (wilayah Sukabumi, Bogor dan Lebak) dengan melakukan penutupan 102 lubang PETI, Penghancuran 171 gubuk/tenda PETI, Penghancuran 130 Glundung dan Penanaman 6000 Pohon pada eks Lokasi PETI.



Photo : *Landscape* Rumah Penduduk di Perbatasan Dengan kawasan TNGHS

Foto : Rachmat Hidayat



Penyangga Kehidupan dan Ekonomi Taman Nasional Gunung Halimun Salak dikelilingi oleh 115 Desa, 344 Kampung, 3 Wilayah Kabupaten (Bogor, Sukabumi dan Lebak) dan 2 Wilayah Provinsi (Jawa Barat dan Banten)

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK PERIODE TAHUN 2018-2027

4.1. Visi

"Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai pusat konservasi keanekaragaman hayati hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa"

4.2. Misi

a. Memantapkan perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
b. Membangun kesepakatan ruang kelola dengan para pihak.
c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam TNGHS secara berkelanjutan.

4.3. Tujuan Pengelolaan

Berdasarkan mandat pengelolaan TNGHS dan visi yang akan dicapai pada 10 tahun ke depan, maka tujuan pengelolaan TNGHS pada periode tahun 2018–2027 adalah :

a. Mempertahankan kualitas habitat satwa kunci TNGHS.
b. Mempertahankan populasi satwa kunci TNGHS.
c. Meningkatkan kualitas tata air.
d. Menyelesaikan tata batas kawasan TNGHS yang diakui para pihak.
e. Memberikan akses ruang kelola dan pemanfaatan sumber daya alam kepada masyarakat.
f. Memberikan akses pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

4.4. Kondisi yang Diharapkan SepuluhTahun Kedepan

Kondisi yang diharapkan TNGHS untuk periode tahun 2018–2027 adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan status kawasan TNGHS dari penunjukan menjadi penetapan.

b. Terjaminnya kelestarian ekosistem kawasan yang menjadi daya dukung kelestarian habitat satwa kunci TNGHS.
c. Terjaganya keanekaragaman hayati TNGHS.
d. Terbangunnya sistem *data base* dan sistem informasi manajemen yang handal.
e. Menurunnya tingkat gangguan kawasan sebesar 5%.
f. Optimalnya peran aktif masyarakat dan mitra lainnya dalam mendukung pengelolaan TNGHS.
g. Berkembangnya pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan lainnya yang memberi manfaat/ mendukung konservasi alam dan masyarakat lokal.

4.5. Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan

Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Sebagaimana diuraikan didalam peraturan pemerintah yang dimaksud bahwa strategi penyelenggaraan KSA dan KPA terdiri dari :

1). Perencanaan kawasan, meliputi kegiatan inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan,
2). Perlindungan dan Pengamanan, meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama dan penyakit serta melakukan penjagaan kawasan secara efektif,
3). Pengawetan keanekaragaman hayati, meliputi kegiatan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan,
4). Pemanfaatan secara berkelanjutan, meliputi kegiatan pemanfaatan pemanfaatan kondisi lingkungan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar,
5). Evaluasi kesesuaian fungsi, meliputi kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi KSA dan KPA dilakukan secara periodik 5 tahun sekali atau sesuai kebutu han pengelolaan,
6). Kerjasama pengelolaan kawasan, meliputi kegiatan kerjasama penguatan fungsi dan kerjasama kepentingan strategis nasional dan
7). Pembinaan daerah penyangga, meliputi kegiatan penetapan wilayah daerah penyangga, penyusunan rencana pengelolaan daerah penyangga, rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan, dan pengamanan serta pembinaan fungsi daerah penyangga.

Tabel IV.1. Rencana Strategi dan Rencana Aksi RPJP TNGHS Periode Tahun 2018-2027

No	Strategi	Rencana Kegiatan	Tahun Ke-										Mitra
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Pengendalian kerusakan ekosistem	1.1. Mengendalikan penggunaan lahan di dalam kawasan											Ditjen KSDAE, Ditjen PSKL, Dinas Kehutanan, Camat, Kepala Desa, Kel. Masy. Adat dan lainnya, LSM, Lembaga Penelitian dan Pendidikan, Lembaga Peradilan (kepolisian, kehakiman, kejaksaan), serta Swasta/BUMN/BUMD.
		1.2. Melaksanakan pengamanan dan pemantauan kegiatan illegal											Ditjen KSDAE, Ditjen Gakkum, Dinas Kehutanan, Kepala Desa, Kel. Masy. Adat dan lainnya, Lembaga Peradilan (kepolisian, kehakiman, kejaksaan), LSM serta Swasta/BUMN/BUMD
		1.3. Melaksanakan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan											Ditjen KSDAE, Ditjen PDASHL, Dinas Kehutanan, Kepala Desa, Kel. Masy. Adat dan lainnya, Lembaga Penelitian dan Pendidikan, LSM serta Swasta/BUMN/BUMD
2.	Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS	2.1. Menyusun strategi dan rencana aksi konservasi spesies penting											Ditjen KSDAE, Lembaga Penelitian dan Pendidikan, LSM
		2.2. Melaksanakan pengelolaan spesies penting											Ditjen KSDAE, Lembaga Penelitian dan Pendidikan, LSM serta Swasta/BUMN/BUMD.
		2.3. Melaksanakan pemantauan ekosistem penting											Ditjen KSDAE, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Kepala Desa, Kelompok Masyarakat Adat dan lainnya, Lembaga Penelitian dan Pendidikan, LSM serta Swasta/BUMN/BUMD
3.	Percepatan penataan batas kawasan TNGHS	3.1. Mendorong percepatan penataan batas kawasan TNGHS											Ditjen KSDAE, Ditjen PKTL, BPKH, Perum Perhutani, Bappeda, Dinas Tata Ruang, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Camat, Kepala Desa, Kelompok Masyarakat Adat, Kel. Masyarakat lainnya, LSM

No.	Strategi	Rencana Kegiatan	Tahun Ke-										Mitra
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.	Pengimplementasian regulasi zona berdasarkan tata ruang kesepakatan	4.1. Menyusun arahan program dan mekanisme tata ruang mikro di dalam zona khusus dan zona tradisional											Ditjen KSDAE. Ditjen PSKL, PEMDA, Kel. Masy.adat dan lainnya, perusahaan dalam kawasan, perguruan tinggi,LSM
5.	Penyusunan regulasi pemanfaatan sumber daya alam TNGHS	5.1. Menyusun rencana pengelolaan pemanfaatan SDA secara partisipatif											Direktorat Jenderal KSDAE, Pemerintah Daerah, LSM, Kepala Desa sekitar kawasan dan perwakilan kelompok masyarakat.
		5.2. Menyusun SOP pemanfaatan sumber daya alam lestari di TNGHS											Direktorat Jenderal KSDAE, Akademisi/Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, LSM, Kepala Desa sekitar kawasan dan perwakilan kelompok masyarakat.
6.	Identifikasi ruang kelola pemanfaatan sumber daya alam TNGHS	6.1. Melaksanakan pendataan potensi pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola bersama masyarakat											Direktorat Jenderal KSDAE, LSM, Kepala Desa sekitar kawasan dan kelompok masyarakat
7.	Pembentukan dan penguatan kelembagaan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam TNGHS	7.1. Fasilitasi pembentukan kelompok kerja Balai TNGHS											Direktorat Jenderal KSDAE, Pemerintah Daerah, LSM, Camat, Kepala Desa sekitar kawasan dan kelompok masyarakat

No.	Strategi	Rencana Kegiatan	Tahun Ke-										Mitra
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		7.2. Pembinaan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat											Direktorat Jenderal KSDAE, Pemerintah Daerah, LSM, Camat, Kepala Desa sekitar kawasan dan kelompok masyarakat
		7.3. Pembinaan kapasitas teknis masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya alam secara lestari di TNGHS											Direktorat Jenderal KSDAE, Pemerintah Daerah, LSM, Perusahaan/Perum Perhutani, Kepala Desa sekitar kawasan dan kelompok masyarakat
		7.4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia											Direktorat Jenderal KSDAE dan Perum Perhutani
		7.5. Pelaksanaan kerjasama langsung antara BTNGHS dan kelompok masyarakat											Direktorat Jenderal KSDAE, Pemerintah Daerah, LSM, Camat, Kepala Desa sekitar kawasan dan kelompok masyarakat
8.	Mendorong berkembangnya wisata alam yang memberi manfaat bagi konservasi alam dan masyarakat lokal	8.1. Menyusun strategi dan regulasi penyelenggaraan usaha wisata alam											Ditjen KSDAE, Pemerintah Provinsi, Bappeda, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kepala Desa,Kelompok Masyarakat Adat dan lainnya, Lembaga Penelitian dan Pendidikan LSM serta Swasta/BUMN/BUMD.
		8.2. Mengembangkan produk wisata alam											Ditjen KSDAE, Pemerintah Provinsi, Bappeda, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kepala Desa,Kelompok Masyarakat Adat dan lainnya, Lembaga Penelitian dan Pendidikan LSM serta Swasta/BUMN/BUMD

No.	Strategi	Rencana Kegiatan	Tahun Ke-										Mitra
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		8.3. Meningkatkan layanan dan pengelolaan wisata alam											Ditjen KSDAE, Pemerintah Provinsi, Bappeda, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kepala Desa, Kelompok Masyarakat Aat dan lainnya, Lembaga Penelitian dan Pendidikan LSM serta Swasta/BUMN/BUMD.
8.	Mendorong berkembangnya wisata alam yang memberi manfaat bagi konservasi alam dan masyarakat lokal	8.4. Promosi dalam rangka meningkatkan investasi dan pengusahaan wisata alam											Ditjen KSDAE, Pemerintah Provinsi, Bappeda, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kepala Desa,Kelompok Masyarakat Adat dan lainnya, Lembaga Penelitian dan Pendidikan LSM serta Swasta/BUMN/BUMD.
9.	Mendorong berkembangnya industri pemanfaatan jasa lingkungan yang mendukung konservasi dan pengelolaan TNGHS	9.1. Menyusun strategi dan regulasi penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan											Ditjen KSDAE, Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi, Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas PU/Kimpraswil/Pengelolaan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Camat, Kepala Desa, Kelompok Masyarakat Adat dan lainnya, Lembaga Penelitian dan Pendidikan LSM serta Swasta/BUMN/BUMD.
		9.2. Mengembangkan produk jasa lingkungan											Ditjen KSDAE, PemerintahProvinsi,Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas PU/Kimpraswil/Pengelolaan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Camat, Kepala Desa, Kelompok Masyarakat Adat dan lainnya, Lembaga Penelitian dan Pendidikan LSM serta Swasta/BUMN/BUMD.

No.	Strategi	Rencana Kegiatan	Tahun Ke-										Mitra
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		9.3. Meningkatkan layanan dan pengelolaan jasa lingkungan											Ditjen KSDAE, Pemerintah Provinsi, Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas PU/Kimpraswil/Pengelolaan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Camat, Kepala Desa, Kelompok Masyarakat Adat dan lainnya, Lembaga Penelitian dan Pendidikan LSM serta Swasta/BUMN/BUMD.
		9.4. Promosi dalam rangka Meningkatkan investasi dan pengusahaan jasa lingkungan											Ditjen KSDAE, Pemerintah Provinsi, Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas PU/Kimpraswil/Pengelolaan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Camat, Kepala Desa, Kelompok Masyarakat Adat dan lainnya, Lembaga Penelitian dan Pendidikan LSM serta Swasta/BUMN/BUMD.
10.	Tersusunnya regulasi penelitian dan pendidikan publik di TNGHS	10.1. Reviu protokol penelitian dan pendidikan publik											Ditjen KSDAE, Lembaga Penelitian dan Pendidikan serta LSM
		10.2. Mengembangkan jaringan penelitian											Ditjen KSDAE, Pemerintah Daerah, Lembaga Penelitian dan Pendidikan serta LSM
		10.3. Mengembangkan jaringan pendidikan publik											Ditjen KSDAE, Pemerintah Daerah, Lembaga Penelitian dan Pendidikan serta LSM





Potensi panas bumi di kawasan TNGHS telah terbit 3 (tiga) Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), yaitu Kawasan Gunung Endut di Kabupaten Lebak, Chevron Geothermal Salak/ Star energy Geothermal Salak, Ltd di Kabupaten Bogor dan Sukabumi serta Kawasan Cisolok Cisukarame di Kabupaten Sukabumi. *Geothermal* di TNGHS yang menghasilkan Listrik 377 Mega Watt

Foto : Dokumentasi PT Indonesia Power PLTP Gunung Salak Kamojang POMU

BAB V

ZONASI KAWASAN
TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya, taman nasional di Indonesia dikelola dengan sistem zonasi yang pada hakikatnya adalah pembagian ruang-ruang kelola dalam lanskap taman nasional dengan tujuan agar kegiatan pengelolaannya sesuai dengan amanat penunjukan taman nasional.

Zonasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak telah disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) No. SK. 10 /KSDAE/SET.3/KSA.0/1/2021 tanggal 22 Januari 2021. Zonasi dibuat berdasarkan berbagai aspek kajian meliputi: biofisik kawasan (topografi, geologi, geomorfologi, iklim, jenis tanah), keanekaragaman hayati, nilai obyek daya tarik wisata, nilai potensi jasa lingkungan, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Pada awal tahun 2020 telah terjadi perubahan peruntukan zona pengelolaan yang diakibatkan oleh keadaan tertentu yaitu terjadinya bencana alam (*force majure*). Berdasarkan hasil kajian dan beberapa pertimbangan pengelolaan, hasil revisi zona pengelolaan TNGHS tahun 2021 adalah sebagai berikut :

5.1. Zona Inti Seluas 35.479,94 ha (40,46%)

Zona inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota ataupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas.

5.1.1. Luas Wilayah

Sebaran spasial zona inti terletak di hampir seluruh wilayah resort pengelolaan, kecuali di Resort PTNW Gn. Bongkok, SPTNW I Lebak dan Resort PTNW Gn. Talaga, SPTNW II Bogor. Zona inti TN Halimun Salak mengalami sedikit perubahan, yaitu ada penambahan luas dari ± 35.434,23 ha menjadi ± 35.479,94 ha.

5.1.2. Deskripsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.76/Menlhk-Setjen/2015, kriteria zona inti adalah sebagai berikut:

1) Memiliki ekosistem atau merupakan perwakilan tipe ekosistem atau fenomena/gejala alam dan formasi geologi yang masih asli dan alami;
2) Merupakan konsentrasi komunitas tumbuhan/ biota target dan/atau merupakan area dengan keragaman jenis yang tinggi;
3) Merupakan lokasi tempat kawin dan bersarang satwa target dan/atau tempat berpijah dan pembesaran satwa/biota target;
4) Empat singgah satwa migran secara periodik;

5.1.3. Potensi Sumber Daya

Berdasarkan ciri fisik dari zona inti di wilayah tersebut maka fungsi utama dari zona tersebut untuk perlindungan habitat tiga spesies kunci (elang jawa, owa jawa dan macan tutul) dan ekosistem hutan hujan tropis dataran pegunungan.

Perlindungan mutlak atas flora langka hutan dataran rendah, sub pegunungan dan pegunungan diantaranya *Dipterocarpus trinervis*, *D. Gracilis* dan *D. Hasseltii*, rasamala (*Altingia excelsa*), puspa (S*chima wallichii*), saninten (*Castanopsis javanica*), kiriung anak (*C. acuminatissima*), pasang (*Quercus gemelliflora*), Acer Iaurinum, ganitri (*Elaeocarpus ganitrus*), *Eurya acuminatissima, Antidesma bunius*, kayu manis (*Cinnamomum sp.*), kileho (*Saurauia pendula*), dan kimerak (*Weinmannia blume*i), jamuju (*Dacrycarpus imbricartus*), kibima (*Podocarpus blumei*) dan kiputri (*Podocarpus neriifolius*), serta hamirung (*Vernonia arborea*) yang merupakan satu-satunya anggota suku Asteraceae yang berbentuk pohon.

5.1.4. Ketentuan Aturan

Regulasi zona inti meliputi :

1) Peruntukkan di zona inti mencakup:
   - ☐ Perlindungan ekosistem;
   - ☐ Pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya;
   - ☐ Pengembangan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan penunjan budidaya.
2) Aktivitas yang dapat diperkenankan di zona inti, diantaranya :
   - ☐ Perlindungan dan pengamanan;
   - ☐ Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;

- ☐ Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi kehidupan liar;
- ☐ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- ☐ Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- ☐ Pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan/atau
- ☐ Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan seperti pada poin diatas
- ☐ Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon

5.2. Zona Rimba Seluas 18.274,60 ha (20,84%)

Zona rimba merupakan kawasan bagian dari taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.

5.2.1. Luas Wilayah

Zona rimba Taman Nasional Gunung Halimun Salak tidak mengalami perubahan yang signifikan dari ± 18.208,45 Ha menjadi ± 18.274,60 ha.

Sebaran spasial zona rimba hampir di seluruh resort kecuali di Resort PTNW Gunung Bongkok. Zona rimba yang terluas berada di Resort PTNW Cibedug, sedangkan sisanya sebagian besar berupa penyangga yang memisahkan zona inti dengan zona pemanfaatan dan zona lainnya.

5.2.2. Deskripsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.76/Menlhk-Setjen/2015, zona rimba adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.

Kriteria zona rimba sebagai berikut :

1) Merupakan daerah sebaran tumbuhan dan daerah jelajah satwa serta perkembangbiakan jenis target;
2) Berbatasan dengan zona inti dan atau zona pemanfaatan/batas fungsi;
3) Merupakan lokasi tempat kawin/berpijah dan pembesaran satwa/biota target;
4) Memiliki ekosistem yang masih asli dan alami; dan/
5) Masih ditemukan tumbuhan dan satwa/biota utama dalam jumlah yang cukup.

5.2.3. Ketentuan Aturan

Regulasi zona rimba meliputi

1) Peruntukkan di zona rimba mencakup:
   - ☐ Pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya;
   - ☐ Pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan, pendidikan konservasi dan penunjang budidaya;
   - ☐ Perlindungan habitat satwa migran dan pendukung zona inti.
2) Aktivitas yang dapat diperkenankan di zona rimba, diantaranya:
   - ☐ Perlindungan dan pengamanan;
   - ☐ Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
   - ☐ Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
   - ☐ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   - ☐ Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
   - ☐ Wisata alam terbatas;
   - ☐ Penyimpanan dan penyerapan karbon;
   - ☐ Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
   - ☐ Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan seperti pada poin diatas

5.3 Zona Pemanfaatan Seluas 14.730,68 ha (16,80%)

Zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya, yang terutama dinamfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya.

5.3.1 Luas Wilayah

Sebaran spasial zona pemanfaatan berada di seluruh wilayah resort pengelolaan, yang paling luas berada di Resort PTNW Gunung Bongkok, Seksi PTNW I lebak. Zona pemanfaatan mengalami perubahan dan penambahan yang cukup signifikan dari ± 11.107,69 ha menjadi ± 14.730,68 ha.

5.3.2 Deskripsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.76/ Menlhk-Setjen/2015, zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya.

Kriteria zona pemanfaatan sebagai berikut:

1) Merupakan wilayah yang memiliki keindahan alam/daya tarik alam atau nilai sejarah dan/ atau wilayah dengan aksesibilitas yang mampu

2) Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana antara lain untuk menunjang pemanfaatan dan pengelolaan;
3) Bukan merupakan konsentrasi komunitas tumbuhan/biota utama;
4) Bukan merupakan areal dengan keragaman jenis yang tinggi; dan/atau
5) Terdapat potensi jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan.

5.3.3 Potensi

Zona ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata alam, sumber mata air yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi.

5.3.4 Ketentuan Peraturan

Regulasi zona pemanfaatan meliputi:

1). Peruntukkan zona pemanfaatan mencakup:
- ☐ Pengembangan pariwisata alam dan rekreasi,
- ☐ Pemanfaatan jasa lingkungan;
- ☐ Pengembangan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
- ☐ Penunjang budidaya.

2). Aktivitas yang dapat dilakukan di zona pemanfaatan diantaranya :
- ☐ Perlindungan dan pengamanan;
- ☐ Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- ☐ Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi satwa liar;
- ☐ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- ☐ Pendidikan dan peningkatan kesadarta huan konservasi alam;
- ☐ Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
- ☐ Pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- ☐ Pengembangan potensi dan daya Tarik wisata alam;
- ☐ Pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin;
- ☐ Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan seperti pada poin diatas
- ☐ Pemulihan ekosistem.

5.4. Zona Rehabilitasi Seluas 14.353,47 ha (16,37%)

Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya

5.4.1 Luas Wilayah

Zona rehabilitasi mengalami pengurangan luasan dari + 17.327,25 ha menjadi ± 14.353,47 ha. Sebaran spasial zona rehabilitasi berada di Sebagian besar resort wilayah pengelolaan, kecuali Resort PTNW Gunung Bongkok (Seksi PTNW I Lebak), Resort PTNW Gunung Salak I dan Gunung Salak II (Seksi PTNW II Bogor). Zona rehabilitasi yang paling luas berada di Resort PTNW Gunung Talaga, Seksi PTNW II Bogor.

5.4.2. Deskripsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.76/Menlhk-Setjen/2015, zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.

Kriteria zona rehabilitasi sebagai berikut:

- ☐ Merupakan wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem;

5.4.2 Ketentuan Peraturan

Regulasi zona rehabilitasi meliputi :

1) Peruntukkan zona rehabilitasi mencakup:
   - ☐ Pemulihan ekosistem;
   - ☐ Penunjang budidaya;
   - ☐ Pengembangan pendidikan, penelitian dan pengembangan.

2) Aktivitas yang dapat dilakukan di zona rehabilitasi diantaranya:
   - ☐ Perlindungan dan pengamanan;
   - ☐ Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
   - ☐ Penelitian dan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan;
   - ☐ Penyerapan dan penyimpanan jasa lingkungan karbon;
   - ☐ Pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
   - ☐ Pemulihan ekosistem;
   - ☐ Pelepasliaran dan/atau reintroduksi satwa liar;
   - ☐ Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan seperti tersebut pada poin diatas

5.5 Zona Tradisisional Seluas 419,79 ha (0,48%)

Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun–temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.

5.5.1 Luas Wilayah

Zona tradisional seluas ± 419,79 ha dari sebelumnya seluas + 823,40 ha. Sebaran spasial zona tradisional berada di Resort Pengelolaan TN Wilayah Gunung Bedil, Gunung Butak, Gunung Salak II, Gunung Salak I, Cimantaja, Gunung Koneng, Gunung Bodas dan Kawah Ratu.

5.5.2 Deskripsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.76/Menlhk-Setjen/2015, zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun–temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.

Kriteria zona tradisional sebagai berikut:

- ☐ Merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional masyarakat secara turun – temurun.

5.5.3 Ketentuan Peraturan

Regulasi zona tradisional meliputi:

1) Peruntukkan zona tradisional mencakup:
   - ☐ Pemanfaatan potensi hasil hutan bukan kayu yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat;
   - ☐ Penunjang budidaya dan wisata alam;
   - ☐ Pemanfaatan jasa lingkungan lainnya;
   - ☐ Pengembangan pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan.
2) Berbagai aktivitas yang diperkenankan di zona tradisional diantaranya:
   - ☐ Perlindungan dan pengamanan;
   - ☐ Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
3) Berbagai aktivitas yang diperkenankan di zona tradisional diantaranya:
   - ☐ Perlindungan dan pengamanan;
   - ☐ Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
   - ☐ Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
   - ☐ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan;
   - ☐ Wisata alam terbatas;
   - ☐ Pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya;

- ☐ Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan seperti tersebut pada poin diatas
- ☐ Pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional.

5.6. Zona Khusus Seluas 4.431,85 ha (5,05%)

Zona khusus adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktifitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain – lain yang bersifat strategis.

5.6.1 Luas Wilayah

Zona khusus seluas + 4.431,85 ha dari sebelumnya seluas + 4.783,34 ha. Sebaran spasial Zona Khusus tersebar di hampir seluruh Resort, antara lain Resort PTNW Cibedug, Cisoka, Gn. Bedil, Panggarangan, Gunung Bongkok, Gunung Talaga, Gunung Kencana, Gunung Butak, Cikaniki, Gunung Kendeng, Gunung Botol, Gunung Salak II, Gunung Koneng, Cimantaja dan Gunung Bodas.

5.6.2 Deskripsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.76/Menlhk-Setjen/2015, zona khusus adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktifitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain – lain yang bersifat strategis.

Kriteria zona khusus mencakup:

- ☐ Terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dielakkan;
- ☐ Merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai taman nasional; dan/
- ☐ Memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

5.6.3. Ketentuan Peraturan

Regulasi zona khusus meliputi:

1) Peruntukkan di zona khusus mencakup:
   - ☐ Keberadaan ruang kelola/pemanfaatan kawasan kepada komunitas masyarakat adat (zona khusus kasepuhan);

- ☐ Keberadaan pemukiman masyarakat dan sarana/fasilitas penunjang lainnya seperti fasilitas transportasi, listrik, dan telekomunikasi (zona khusus pemukiman)
- ☐ Keberadaan kawasan yang telah dimanfaatkan masyarakat sebagai penunjang kehidupan berupa lahan pertanian intensif seperti sawah dan ladang (zona khusus pertanian intensif);
- ☐ Keberadaan kebutuhan masyarakat dan para pihak yang menyangkut perubahan lingkungan strategis baik nasional dan internasional (zona khusus kepentingan strategis)

2) Aktivitas yang dapat diperkenankan di zona khusus, diantaranya:
   1) Zona khusus kasepuhan:
      - ☐ Perlindungan dan pengamanan;
      - ☐ Bermukim pada areal zona tersebut sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku di kasepuhan dan atas kesepakatan dengan pengelola;
      - ☐ Pemanfaatan sumber daya alam secara Terbatas sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku di kasepuhan;
      - ☐ Aktivitas pengembangan sosial, budaya dan ekonomi;
      - ☐ Aktivitas wisata budaya, pendidikan dan penelitian;
      - ☐ Pemulihan kawasan dapat dilakukan secara alami dan/atau mekanis, bila terjadi bencana dan kerusakan ekosistem pada zona tersebut.
   2) Zona khusus pemukiman:
      - ☐ Perlindungan dan pengamanan;
      - ☐ Bermukim pada areal zona tersebut sesuai kesepakatan dengan pengelolaan;
      - ☐ Pembangunan fasilitas penunjang dan harus menempuh prosedur yang sesuai dengan kesepakatan;
      - ☐ Aktivitas pengembangan sosial, budaya dan ekonomi;
      - ☐ Aktivitas wisata berbasis masyarakat, pendidikan dan penelitian;
      - ☐ Pemulihan kawasan dapat dilakukan secara alami dan/atau mekanis, bila terjadi bencana dan kerusakan ekosistem pada zona tersebut.
   3) Zona khusus pertanian intensif :
      - ☐ Perlindungan dan pengamanan;
      - ☐ Pertanian intensif untuk tujuan penunjang kehidupan, sesuai dengan ketentuan yang disepakati;
      - ☐ Aktivitas wisata, pendidikan dan penelitian

- ☐ Pemulihan kawasan dapat dilakukan secara alami dan/atau mekanis, bila terjadi bencana dan kerusakan ekosistem pada zona tersebut.

4) Zona khusus kepentingan strategis:
   - ☐ Perlindungan dan pengamanan
   - ☐ Menjalankan kegiatan operasional pada areal yang telah ditentukan sesuai dengan peruntukkannya;
   - ☐ Pengembangan aktivitas operasional yang mendukung keamanan fasilitas strategis serta konservasi sumber daya alam hayati;
   - ☐ Pendidikan dan penelitian;
   - ☐ Pemulihan kawasan dapat dilakukan secara alami dan/atau mekanis, bila terjadi ben cana dan kerusakan ekosistem pada zona tersebut;

5) Zona khusus dapat diberlakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
   - ☐ Seluruh aktivitas diwadahi melalui kesepakatan dan perjanjian kerjasama berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
   - ☐ Penataan ruang mikro di dalam zona khusus melalui pemetaan partisipatif dengan para pihak;
   - ☐ Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pengelola kawasan terhadap seluruh aktivitas di zona khusus;

5.7. Zona Budaya, Religi, Sejarah Seluas 8,69 ha (0,01%)

Zona religi, budaya dan sejarah adalah bagian taman nasional yang ditetapkan sebagai areal untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.

5.7.1. Luas Wilayah

Sebaran spasial zona budaya, religi, sejarah terdapat di beberapa lokasi, antara lain di Resort PTNW Cibedug (SPTNW I Lebak), Gunung. Salak II, Gunung. Salak I (SPTNW II Bogor) dan Gunung Koneng, Kawah Ratu (SPTNW III Sukabumi).

5.7.2. Deskripsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.76/Menlhk-Set-jen/2015, zona budaya, religi, sejarah adalah bagian taman nasional yang ditetapkan sebagai areal untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.

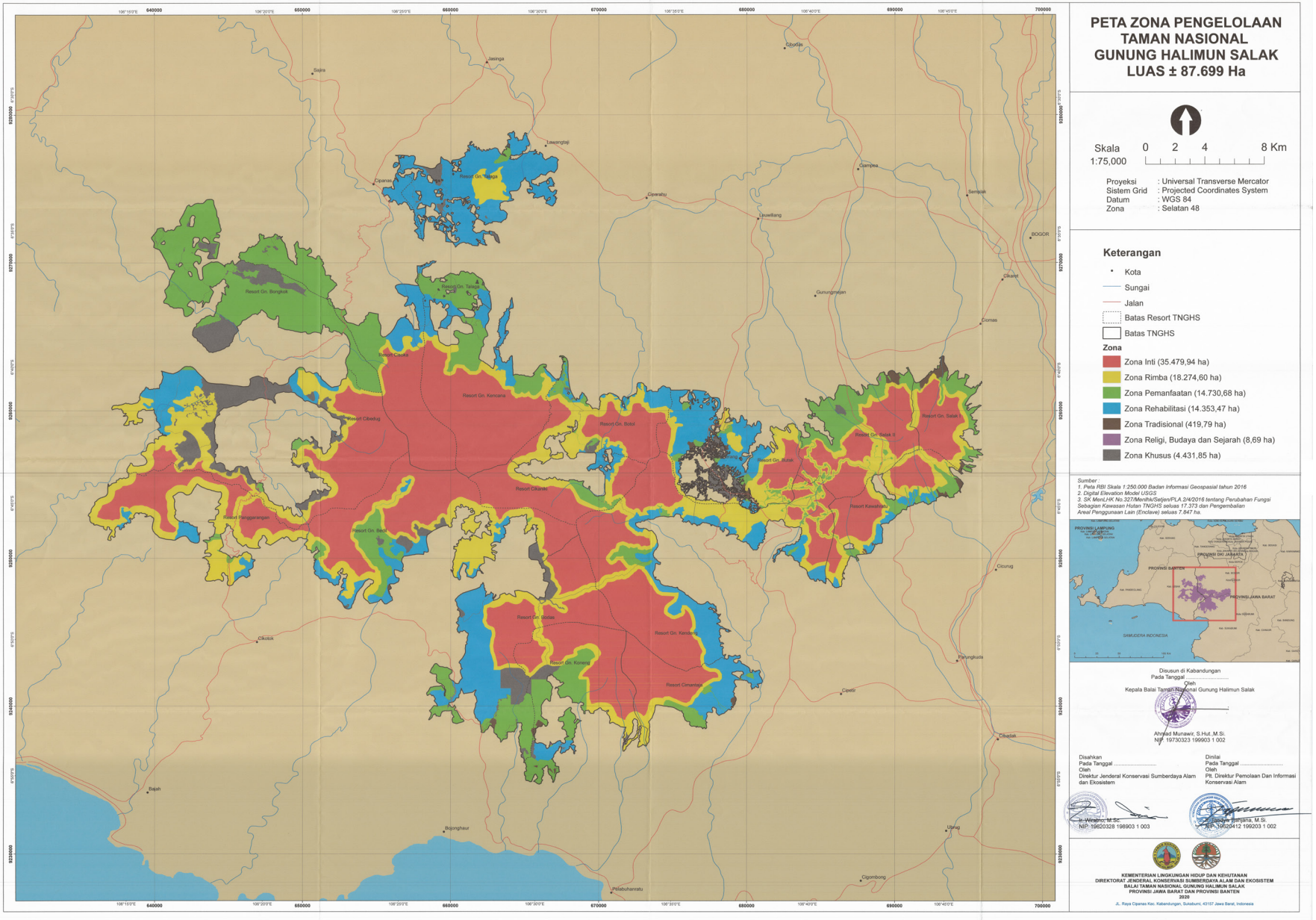
Kriteria zona budaya, religi, sejarah mencakup :

- ☐ Merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai – nilai budaya atau sejarah.

5.7.3 Ketentuan Peraturan
Regulasi zona budaya,
Religi, Sejarah meliputi:

1) Peruntukkan di zona budaya, religi, sejarah mencakup:
   - ☐ Perlindungan kawasan yang memperlihatkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan arkeologi;
   - ☐ Pengembangan wahana penelitian, pendidikan, wisata sejarah, dan arkeologi.

2) Aktivitas yang dapat diperkenankan di zona budaya, religi, sejarah diantaranya:
   - ☐ Perlindungan dan pengamanan;
   - ☐ Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
   - ☐ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   - ☐ Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
   - ☐ Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
   - ☐ Penyelenggaraan upacara adat budaya dan/ atau keagamaan;
   - ☐ Pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah;
   - ☐ Wisata alam terbatas;
   - ☐ Pemulihan ekosistem.



Gambar V.1. Peta pembagian zona pengelolaan TNGHS Tahun 2020



Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*) di 'Rumahnya'
Perjumpaan sarang elang jawa (*Nisaetus bartelsi*) di kawasan TNGHS menunjukkan bahwa daya dukung habitat untuk populasi elang jawa di TNGHS dalam kondisi baik
Foto : Yopi Suhendar



Rumah untuk flora dan fauna langka, endemik dan dilindungi oleh Undang-Undang. Tercatat lebih dari 700 spesies tumbuhan berbunga hidup di hutan alam di dalam TNGHS, yang meliputi 391 marga dari 119 suku. Selain itu keanekaragaman fauna terdapat taksa mamalia sebanyak 61 spesies, dimana terdapat spesies – spesies yang endemik Pulau Jawa dan spesies-spesies terancam punah.

BAB VI

LANDASAN DAN ISU-ISU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan salah satu pemanfaatan dari taman nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Berdasarkan RPJP TNGHS Tahun 2018–2027, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilakukan di semua zona kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tersebut telah melibatkan berbagai pihak seperti Ditjen KSDAE, lembaga penelitian dan pendidikan serta LSM. Semua pihak harus memperhatikan regulasi dan isu strategis terkait pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di kawasan TNGHS pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di Kawasan TNGHS sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan mengancam kelestarian alam.

6.1. Peraturan Pelaksanaan Penelitian

Payung hukum tertinggi dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Strategi pengelolaan kawasan konservasi mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Adapun Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahauan di kawasan TNGHS telah diuraikan dalam RPJP TNGHS Tahun 2018–2027 Tabel berikut :

Tabel VI.1. Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Kawasan TNGHS Periode tahun 2018 - 2027

Strategi	Rencana Kegiatan	Tahun Ke										Mitra
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tersusunnya regulasi penelitian dan pendidikan publik di TNGHS	1. *Review* Protokol penelitian dan pendidikan publik											Ditjen KSDAE, Lembaga Penelitian dan Pendidikan serta LSM
	2. Mengembangkan jaringan penelitian											Ditjen KSDAE, Pemerintah Daerah, Lembaga Penelitian dan Pendidikan serta LSM
	3. Mengembangkan jaringan pendidikan											Ditjen KSDAE, Pemerintah Daerah, Lembaga Penelitian dan Pendidikan serta LSM

Penelitian di taman nasional secara teknis telah dituangkan didalam peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) No. P.7/IV-SET/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Burung.

Dalam peraturan Dirjen PHKA tersebut, secara jelas diuraikan tentang :

6.1.1. Jenis-jenis kegiatan memasuki kawasan konservasi.

Salah satu jenis kegiatan yang boleh dilakukan di dalam kawasan konservasi (Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru) adalah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

6.1.2. Kewenangan penerbitan SIMAKSI

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahaun di dalam kawasan konservasi harus mendapatkan Surat Izin Memasuki Kawasan Konservasi (SIMAKSI) oleh pihak yang berwenang. SIMAKSI bagi Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki keterkaitan kerja dengan pihak asing untuk lebih dari 1 (satu) unit pelaksana teknis, diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA (saat ini bernama KSDAE).

Apabila SIMAKSI habis masa berlakunya dapat diperpanjang oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA.

6.1.3. Tata cara permohonan dan perpanjangan SIMAKSI

Permohonan SIMAKSI diajukan kepada penerbit SIMAKSI, untuk WNA permohonan dilampiri dengan:

1) surat keterangan jalan dari kepolisian
2) Prosposal kegiatan
3) Fotokopi paspor
4) Surat pernyataan tentang kesanggupan untuk mematuhi ketentuan undang-undang
5) Surat izin penelitian dari Kementerian Negara Riset dan Teknokogi
6) Surat pemberitahuan penelitian dari Kementeian Dalam Negeri
7) Surat rekomendasi dari mitra kerja

Permohonan SIMAKSI diajukan kepada penerbit SIMAKSI, untuk WNI permohonan dilampiri dengan :

1) Proposal kegiatan
2) Fotokopi tanda pengenal
3) Surat pernyataan tentang kesanggupan untuk mematuhi ketentuan undang-undang

Tata cara perpanjangan SIMAKSI adalah

1) Permohonan perpanjangan SIMAKSI diajukan oleh pemohon kepada penerbit SIMAKSI, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum SIMAKSI berakhir
2) Permohonan perpanjangan dengan melampirkan laporan hasil kegiatan dan perizinan dari instansi terkait yang masih berlaku
3) Permohonan perpanjang untuk WNA juga menambahkan lampiran rekomendasi dari kepala unit pelaksana teknis.

Rekomendasi tersebut diterbitkan setelah peneliti melakukan presentasi dan dinilai dapat diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

6.1.4. Masa berlaku SIMAKSI

1) Masa berlaku SIMAKSI dan perpanjangan untuk penelitian dan pengembangan paling lama 3 bulan
2) Masa berlaku SIMAKSI dan perpanjangan untuk kegiatan ilmu pengetahuan dan pendidikan paling lama 1 bulan

6.1.5. Kewajiban pemegang SIMAKSI

1) Sebelum melakukan kegiatan pemegang SIMAKSI wajib membayar pungutan sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan
2) Selama melakukan kegiatan harus didampingi oleh petugas dari Unit Pelaksana Teknis
3) Dalam hal SIMAKSI berakhir, wajib melakukan: presentasi hasil kegiatan, menyerahkan laporan hasil kegiatan.
4) Dalam hal terdapat kegiatan mengambil dan mengangkut spesimen tumbuhan dan satwa liar, harus memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan
5) Segala resiko yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan merupakan tanggung jawab pemegang SIMAKSI, seperti luka ringan, luka berat, cacat, dan meninggal dunia
6) Selama melaksanakan kegiatan pemegang simaksi dilarang melakukan kegiatan antara lain; penebangan pohon, menggangu kesejahteraan satwa, dan memberikan makanan kepada satwa yang menjadi objek kegiatan
7) Pemegang SIMAKSI yang melakukan kegiatan wajib mencantumkan logo Kementerian Kehutanan dan Nomenklatur PHKA pada setiap produk hasil kegiatan.

6.2. Isu Strategis Terkait Penelitian di TNGHS

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahun di TNGHS belum sepenuhnya berjalan efektif dan optimal memberikan hasil. Banyak hal yang masih menjadi hambatan dan tantangan bagi pihak pengelola untuk mencari solusinya. Isu-isu strategis yang menjadi hambatan dan tantangan tersebut adalah :

1) Pengetahuan, data dan informasi yang dihasilkan oleh para peneliti masih menjadi milik masing-masing lembaga/institusi. BTNGHS dan pihak-pihak yang membutuhkan data dan informasi tersebut belum sepenuhnya memahami dan mengetahui mekanisme mengakses data dan informasi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga/institusi.
2) Secara umum, tema penelitian yang dilakukan selama ini merupakan kepentingan lembaga/ individu peneliti sedangkan diharapkan tema penelitian yang dilakukan dapat mendukung kebutuhan pengelolaan TNGHS.
3) BTNGHS belum mengindentifikasi dan mempub likasikan kebutuhan-kebutuhan atau tema-tema penelitian yang dibutuhkan untuk mensuplai data dan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan TNGHS.

4) Belum teralokasikan dana khusus untuk melakukan penelitian dalam menunjang pegelolaan TNGHS, mengingat Pengelola kawasan konservasi tidak memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terkait penelitian, sehingga kerjasama antara BTNGHS dengan lembaga/institusi penelitian perlu ditingkatkan.
5) Secara umum penelitian yang dilakukan saat ini masih pada tataran penelitian dasar belum pada penelitian terapan untuk menemukan suatu potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi nilai ekonomi
6) Hasil penelitian di dalam kawasan TNGHS, belum sepenuhnya diterapkan dalam pengembangan potensi kawasan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7) Kegiatan penelitian masih didominasi atas kepentingan dan kebutuhan peneliti, belum sepenuhnya mengakomodir penelitian yang menjadi kebutuhan pengelola, hal ini dikarenakan pihak pengelola belum menyusun daftar tema/topik yang menjadi kebutuhannya untuk dilakukan penelitian/
8) Lokasi kegiatan penelitian belum menyebar secara merata di seluruh kawasan TNGHS, hal ini dikarenakan kurangnya informasi dan data terkait lokasi penelitian yang pernah (sering) atau yang kurang/belum dilakukan penelitian.



Negeri di Atas Awan Resort PTNW Citorek, Seksi PTNW I LebaK, Banten.
Foto : Rachmat Hidayat



Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) telah ditetapkan menjadi bagian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan nomor urut 69 dan menjadi bagian/beririsan dengan pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu yang sudah mendapatkan pengakuan UNESCO dan beririsan dengan Geopark Pongkor yang baru mendapatkan pengakuan nasional. Saat ini di TNGHS sudah dikelola sebanyak 13 obyek wisata alam yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten, yaitu Lebak (Provinsi Banten), Bogor dan Sukabumi (Provinsi Jawa Barat).

BAB VII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI TNGHS PERIODE TAHUN 2001-2021

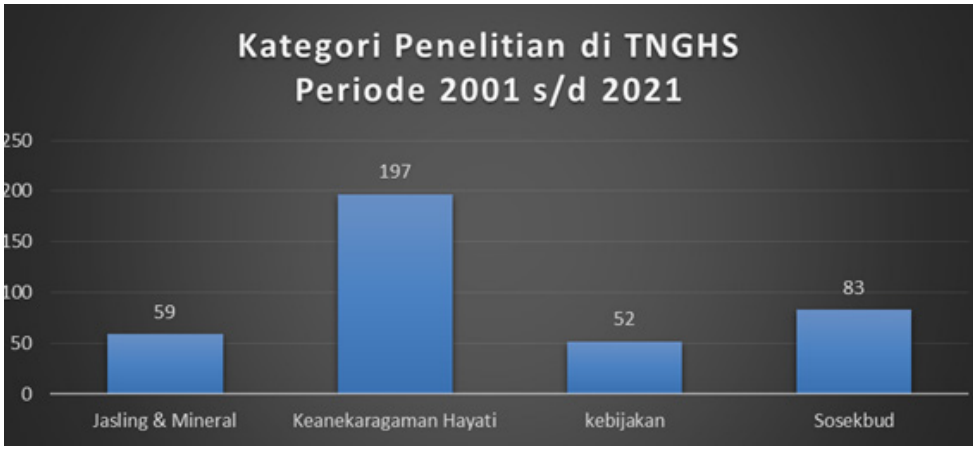
Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) memiliki visi pengelolaan "Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai Pusat Konservasi Keanekaragaman Hayati Hutan Hujan Tropis Pegunungan di Pulau Jawa". Untuk mencapai visi tersebut ditetapkanlah beberapa misi pengelolaan antara lain sebagai berikut :

1. Memantapkan perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
2. Membangun kesepakatan ruang kelola dengan para pihak.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam TNGHS secara berkelanjutan.

Upaya penyusunan strategi dan rencana teknis telah dituangkan pada dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) TNGHS Periode Tahun 2018-2027. Dokumen ini menjadi acuan pengelolaan TNGHS selama 10 tahun untuk mencapai Visi-Misi TNGHS.

Salah satu hal penting dalam pengelolaan TNGHS adalah kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti intistusi pendidikan, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, ataupun lembaga lainnya yang berkepentingan terhadap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di TNGHS diharapkan menjadi dasar intervensi kebijakan pengelolaan yang akan dilakukan oleh Balai TNGHS.

Buku ini mencatat berbagai penelitian yang pernah dilakukan di TNGHS selama kurun waktu 11 Tahun, yaitu periode tahun 2001-2021. Terkumpul 391 judul penelitian yang pernah dilakukan selama periode waktu tersebut dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal dari 64 institusi nasional maupun internasional yang dilakukan di seluruh wilayah Pengelolaan TNGHS. Secara lebih jelas tersaji pada Lampiran. Beberapa kategori penelitian yang berhasil dirangkum seperti tersaji pada grafik berikut :



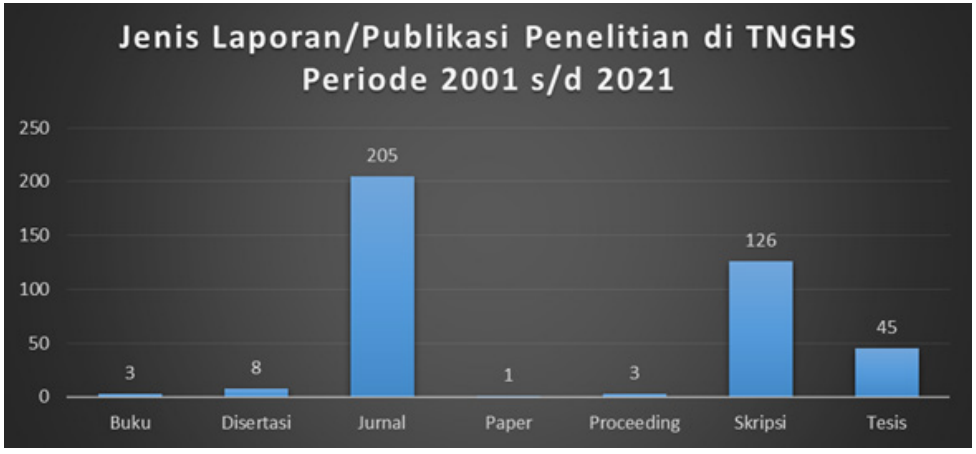
Grafik 1. Kategori penelitian di TNGHS periode tahun 2001-2021

Dari gambar grafik tersebut keanekaragaman hayati (Fauna, Flora, Fungi, Perifiton, dan Prokariota), Sosial Ekonomi dan Budaya, serta Jasa Lingkungan dan Mineral merupakan kategori penelitian yang paling banyak dilakukan selama periode tahun 2001-2021.

Berdasarkan data potensi keanekaragaman hayati TNGHS yang terdapat pada RPJP TNGHS periode tahun 2018-2027, tercatat setidaknya terdapat 700 jenis tumbuhan, 475 jenis fauna vertebrata, 36 jenis moluska, >1000 jenis kupu-kupu, 2000 jenis semut dan tawon, 26 jenis capung, 150 jenis kumbang, dan 35 jenis belalang dan kecoa.

TNGHS juga memiliki potensi sosial budaya masyarakat karena tercatat setidaknya terdapat 115 desa yang berada di dalam dan di sekitar Kawasan TNGHS yang 'bergantung' pada hutan TNGHS. Potensi yang ada di TNGHS tersebut dibuktikan oleh banyakanya penelitian pada periode tahun 2001-2021 mengenai keanekaragaman hayati juga sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

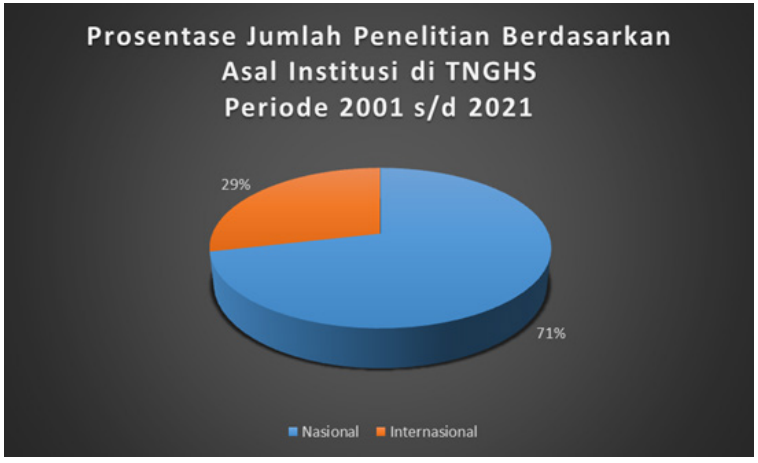
Berdasarkan data kategori/topik penelitian di TNGHS periode tahun 2001-2021 diperoleh bahwa penelitian yang telah dilakukan di TNGHS telah dilaporkan dalam bentuk buku, disertasi, tesis, skripsi, dan jurnal. Dapat dikatakan bahwa untuk berbagai tingkat/strata pendidikan dan penelitian ilmiah, TNGHS dan potensi yang dimiliki di dalamnya cukup menarik untuk menjadi objek penelitian ilmiah.



Grafik 2. Jenis laporan/publikasi penelitian di TNGHS periode tahun 2001-2021

Minat penelitian di TNGHS dari berbagai intitusi juga cukup banyak. Terdapat 64 institusi nasional maupun internasional yang pernah melakukan penelitian di TNGHS pada periode tahun 2001-2021. Berdasarkan data penelitian yang berhasil dikumpulkan untuk dokumen ini, pada periode tahun 2001-2021 bahwa institusi internasional melakukan penelitian di TNGHS sejak tahun 2003. Belum diketahui secara jelas alasan yang mendasari cukup banyaknya penelitian dari dalam maupun luar negeri dilakukan di TNGHS. Bisa jadi ada beberapa alasan peneliti melakukan penelitian di TNGHS, seperti TNGHS merupakan kawasan konservasi hutan hujan tropis pegunungan terluas di Pulau Jawa dengan

berbagai tipe ekosistem hutan dari tipe ekosistem hutan dataran rendah sampai dengan hutan pegunungan (montana), aksesibilitas lokasi TNGHS yang relatif cukup dekat dari ibu kota negara, TNGHS juga kaya akan kultur budaya masyarakat.



Grafik 3. Prosentase Penelitian di TNGHS Berdasarkan Asal Intitusi

Dengan semakin banyaknya penelitian yang dilakukan di TNGHS diharapkan makin banyak pula catatan tentang kondisi terkini Kawasan TNGHS dari sudut pandang ilmiah. Hasil ini akan dikombinasikan dengan pengumpulan data lapangan yang dilakukan secara rutin oleh petugas TNGHS berupa kegiatan *Resort Based Management* (RBM). Data-data ini diharapkan akan menjadi sebuah masukan bagi pengelolaan TNGHS yang akan disusun melalui rencana strategi pengelolaan TNGHS. Jumlah penelitian sebanyak 391 judul penelitian selama periode tahun 2001-2021 juga menunjukkan bahwa banyak hal yang dapat digali lebih dalam mengenai kawasan TNGHS dan semua unsur yang ada di dalamnya. Selain itu, dapat dikatakan bahwa TNGHS telah memenuhi mandat dari peraturan perundangan yang menyatakan bahwa taman nasional salah satu dasar penunjukkannya adalah untuk tujuan kegiatan penelitian dan ilmu pengetahuan. Undang - Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya). Adapun ringkasan uraian penelitian di TNGHS Periode Tahun 2001–2021, dapat dilihat pada Tabel VII.1.

Tabel VII.1. Penelitian yang dilakukan di TNGHS Periode Tahun 2001-2021

No	Kategori/Objek	Frekuensi	Lokasi	Aspek Kajian
1	**Keanekaragaman Hayati**			
1	Argostemma	2	TNGHS	Biodiversitas, Gastra Taksonomi
	Badak Jawa	1	TNGHS	Penilaian Habitat
	Bakteri	4	TNGHS	Karakteristik, Aktivitas
	Balonophora	1	Resort Cikaniki	Biodiversitas
	Begonia	1	Resort Cikaniki	Biodiversitas
	Belalang	1	Resort Cikaniki	Biodiversitas, Kelimpahan
	Bioprospeksi	1	Resort Salak II	Eksplorasi
	Capung Jarum	1	Resort Cikaniki	Ekologi
	Cellulolytic Yeast	1	TNGHS	Biodiversitas
	Chiromantis vittiger	1	Resort Gn Kendeng	Morfologi dan Ekologi
	Cicak	1	TNGHS	Biodiversitas dan Distribusi
	Collembola	1	TNGHS	Persebaran
	Diameter Pohon	1	Resort Salak II	Dsitribusi Pohon
	Diptera	1	Resort Gn Kendeng	Biodiversitas
	Diversity	55	Koridor Halimun Salak, Resort Cibedug, Resort Cikaniki, Resort Cisoka, Resort Gn Bedil, Resort Gn Botol, Resort Gn Kendeng, Resort Gn Koneng, Resort Salak I, Resort Salak II, Resort Kawah Ratu	Biodiversitas, Perbandingan Komunitas, Distribusi, Kelimpahan, Klasifikasi Vegetasi, Komposisi Jenis dan Potensi Ancaman, Pengaruh Jalan Terhadap SDA, Persebaran Biodiversitas, Populasi, Potensi Jenis Invasif
	DNA	1	Resort Gn Bodas	Koleksi Sampel DNA Burung
	Ekologi	1	Resort Gn Kendeng	Ekologi interaksi burung dan tumbuhan

1	**Keanekaragaman Hayati**			
	Elang Jawa	9	TNGHS, Resort Salak I	Distribusi dan Karakteristik Pohon Sarang, Ekologi dan Konservasi, Karakteristik landscape, Ekologi Pakan, Pemetaan Area Prioritas, Kesesuaian Habitat, Perkembangan Perilaku dan Populasi,
	Endophytic Fungi	3	TNGHS, Resort Cikaniki	Dampak Domestikasi, Biodiversitas,
	Hymenoptera	1	Koridor Halimun-Salak	Biodiversitas
	Jamur Makro	1	TNGHS	Identifikasi
	Kadal	1	Resort Gn Salak II	Inventarisasi Tungau pada Kadal
	Kandungan Flavonoid	1	Resort Kawah Ratu	Pengaruh kadar kimia tanah
	Kantung Semar	1	Resort Gn Kendeng	Biodiversitas, Persebaran
	Keong Darat	1	Resort Cikaniki	Biodiversitas dan Ekologi
	Khamir	1	Resort Gn Koneng	Karateristik
	Komunitas	14	Resort Cikaniki, Resort Gn Kencana, Resort Gn Koneng, Resort Gn Kendeng, Resort Salak II dan TNGHS	Komunitas Arthropod, Fluktuasi Curah Hujan dan Komunitas Serangga, Eksistensi Biodiversitas, Komunitas Burung dan Serangga, Struktur Komunitas Tumbuhan, Dampak Aktivitas Manusia
	Kukang	1	TNGHS	Perdagangan Ilegal
	Kukang Jawa	4	Resort Salak I, TNGHS	Aktivitas Perilaku Harian dan Wilayah Jelajah, Penggunaan Ruang, Pelepasliaran
	Kumbang Cerambycidae	1	Resort Salak II	Biodiversitas
	Kumbang Lucanid	1	TNGHS	Biekologi dan Konservasi

1	**Keanekaragaman Hayati**			
	Kupu-kupu	1	Resort Salak I	Biodiversitas
	Laju Fotosintesis	1	Resort Kawah Ratu	Laju fotosintesis
	Lumut	1	TNGHS	Biodiversitas
	Lumut Hati	1	Resort Cikaniki	Biodiversitas
	Macan Tutul Jawa	7	Koridor-Halimun Salak, Resort Cikaniki, Resort Gn Botol, Resort Gn Kendeng, TNGHS	Analisis kesuaian habitat, keselarasan antara satwa liar dan *geothermal*, Kajian karateristik habitat, Status Populasi, Potensi keberadaan mangsa
	Mycoheterotrophic Plants	1	Resort Cikaniki	Biodiversitas
	Myriapoda	1	TNGHS	Biodiversitas
	New Records	2	Resort Cianiki, TNGHS	Penambahan Catatan Baru
	Ngengat	1	Resort Cikaniki	Biodiversitas
	Nyali	1	TNGHS	Keberadaan nyali
	Nyamuk	1	TNGHS	Morfologi, Biologi dan Ekologi
	Owa Jawa	27	Koridor-Halimun Salak, Resort Cikaniki, Resort Kawah Ratu, TNGHS	Aktivitas Harian, Perilaku dan Penggunaan Ruang, Karateristik Wilayah Jelajah, Pakan dan Perilaku Berkisar, Analisis Karakteristik Wilayah Jelajah, Perilaku Bersuara Owa betina, Kesesuaian Habitat, Jenis Pakan dan Pola Pemanfaatan tajuk, Komposisi Nutrisi, Pemetaan Area Restorasi, Persebaran Dan Preferensi Pohon Tidur, Studi Lokomotor Dan Postur Owa Jawa,
	Pakan Ungulata	1	Resort Gn Kendeng	Distribusi habitat dan Biodiversitas

1	**Keanekaragaman Hayati**			
	Palem	1	Resort Gn Kencana	Biodiversitas
	Pemanfaatan Tumbuhan	2	Resort Gn Koneng, Resort Kawah Ratu	Bioprospeksi, Potensi dan Pengembangan Jenis-jenis tumbuhan
	Penggunaan Nitrogen	1	Resort Cikaniki	Efisiensi Penggunaan Nitrogen
	Penilaian Tegakan	1	Resort Gn Botol	Tegakan Vegetasi Pasca Tambang
	Permudaan Alami	1	Resort Kawah Ratu	Permudaan Alami
	Phytocemical screening	1	Resort Cikaniki	Skrining Fitokimia
	Pinanga coronata	1	Resort Cikaniki	Allometri dan Sejarah Hidup
	Preferensi Ekologis Tumbuhan Dominan	1	Resort Gn Salak I	Ekologi Tumbuhan
	Raptor	7	Koridor-Halimun Salak, Resort Gn Salak I, TNGHS	Kesesuaian dan Kriteria Habitat, Siklus Sarang dan Perkembangan sarang, Lokasi Bersarang, Evaluasi Nutrisi,
	Rasamala	2	Resort Cikaniki	Penyebaran dan Karakteristik Habitat
	Rayap Tanah	1	TNGHS	Persebaran dan Karakter Morfologi
	Rotan	1	Resort Gn Kencana	Biodiversitas Rotan dan Prospek Budidayanya
	Scutellaria discolor colebr. And Plectranthus galeatus vahl. (Lamiaceae)	1	Resort Kawah Ratu	Penurunan Populasi
	Selaginella	1	Resort Cikaniki	Biodiversitas, Etnobotani, dan Kemampuan Antioksidan
	Serangga Air	1	Resort Cikaniki	Ekologi

1	**Keanekaragaman Hayati**			
	Serangga Air	1	Resort Cikaniki	Ekologi
	Serangga Penyerbuk	3	Resort Gn Kendeng, TNGHS	Biodiveristas, Aktivitas Perilaku
	Snails	1	TNGHS	Komposisi Silang
	Surili	1	Resort Cikaniki	Kesesuaian Habitat
	Tipe Vegetasi	1	Resort Cikaniki	Tipe Vegetasi
	Trenggiling	1	Resort Gn Botol	Model Habitat
	Tumbuhan Eksotis	1	Resort Gn Kendeng	Biodiversitas
	Tumbuhan Invasif	1	Resort Gn Butak	Biodiversitas dan Pola sebaran
	Yeast	2	TNGHS	Biodiversitas, Aktivitas Perilaku
	Zingiberaceae	1	Resort Cikaniki	Biodiversitas
2	**Sosekbud**			
	Tumbuhan Eksotis	1	Resort Kawah Ratu	Persebaran
	Wisata	1	Resort Salak II	Sosial Ekonomi
	Perubahan Penutupan Lahan	1	Resort Cibedug	Tutupan Lahan
	Perubahan persepsi	1	TNGHS	Pertambangan Emas
	Perubahan Struktur	1	TNGHS	Struktur Agraria
	Sumber daya hutan	4	TNGHS, Resort Gn Botol	Konflik, Kajian Pemanfaatan SDA, Sistem Pengelolaan
	Tumbuhan Eksotis	1	Resort Kawah Ratu	Persebaran
	Wisata	1	Resort Gn Salak II	Sosial Ekonomi

2	**Sosekbud**			
	Agararia	1	Resort Gn Butak	Struktur Agararia
	Agroforesty	1	Resort Gn Salak I	Etnobotani
	Angklung Dogdodg Lojor	1	Resort Gn Koneng	Musik Tradisional
	Bioprospeksi Tumbuhan Edibel	1	Resort Gn Salak II	Bioprospeksi
	Ekoliterasi	1	TNGHS	Kearifan Lokal
	Energi	1	TNGHS	Model Desa berbasis Mikrohydro
	Hasil Hutan	1	Resort Gn Butak	Perubahan Pemanfaatan HHBK
	Kasepuhan	25	Resort Cibedug, Resort Gn Bedil, Resort Gn Bodas, Seksi 1 Lebak, TNGHS	Kelembagaan Masyarakat Adat Kasepuhan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan, Sistem Sosial berdasarkan konsep agil, Artikulasi Prinsip Hak Penentuan Nasib Sendiri, Sosial, Budaya dan Ekonomi, Filosofi, Pola Kampung dan Arsitektur Rumah Tinggal, Pewarisan Pengetahuan dan Keterampilan, Lanskap Budaya, Perjuangan Hak Hutan Adat, Tradisi Upacara
	Kawasan Hutan	3	TNGHS	Manfaat Ekonomi dalam Pemanfaatan Hutan, Peran Hutan di Masyarakat
	Komunikasi	1	TNGHS	Pendidikan Lingkungan
	Konservasi	1	Resort Gn Kendeng	Konservasi Sumber Daya Hutan
	Literasi	1	TNGHS	Literasi Sosial Budaya Masyarakat

2	**Sosekbud**			
	Masyarakat	20	Resort Cisoka, Resort Gn Bongkok, Resort Gn Kendeng, Resort Gn Koneng, Resort Gn Salak II, TNGHS	Manfaat Ekonomi Model Kampung Konservasi, Sikap Masyarakat Lokal terhadap Konservasi, Kebijakan dampak penetapan TN, Perkembangan Aktivitas Masyarakat Sekitar TN, Interaksi dan Presepsi Masyarakat, Sosial Ekonomi Masyarakat, Media Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Stakeholder dan Masyarakat, Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat,
	Modal Sosial	1	TNGHS	Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
	Panduan	1	TNGHS	Pedoman Pendidikan Konervasi
	Pemanfaatan Lahan	1	TNGHS	Konflik Pemanfaatan Lahan
	Pemanfaatan Sumberdaya	1	Resort Gn Bodas	Konflik Sumberdaya Hutan
	Pemanfaatan Tumbuhan	4	Resort Gn Bedil, Resort Gn Kendeng, Resort Kawah Ratu	Etnobotani, Penyebaran, Analisis Vegetasi
	Pembangunan Partisipatif	1	Resort Gn Bodas	Sosial Budaya
	Pencemaran	1	TNGHS	Hidrologi
	Pendidikan Konservasi	1	Resort Gn Salak II	Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku
	penggunaan lahan	2	TNGHS	Konflik Landuse
	Penguasaan Agraria	1	Resort Gn Kendeng	
	Peran Tumbuhan	1	Resort Gn Koneng	Etnobotani
	Persepsi	1	Resort Gn Salak II	Penerapan Pendidikan Lingkungan
	Perubahan Penutupan Lahan	1	Resort Cibedug	Tutupan Lahan
	Perubahan persepsi	1	TNGHS	Pertambangan Emas
	Perubahan Struktur	1	TNGHS	Struktur Agraria
	Sumber daya hutan	4	TNGHS, Resort Gn Botol	Konflik, Kajian Pemanfaatan SDA, Sistem Pengelolaan

2	**Jasling dan Mineral**			
	Andisol	1	Resort Gn Salak II	Karateristik Mineralogi
	Dampak Ekonomi	2	Resort Gn Salak II	Estimasi Nilai dan Dampak Ekonomi
	Dampak Merkuri	1	TNGHS	Pertambangan Emas
	Daya Dukung Ekologi	1	Resort Gn Salak II	Ekologi Ekowisata
	Daya Dukung Psikol-ogis	3	Resort Gn Salak I, Resort Gn Salak II	Variabel Potensial
	Distribusi Merkuri	1	TNGHS	Distribusi
	Identifikasi konflik	1	Resort Gn Salak II	Identifikasi Konflik pengelolaan wisata
	IPA	1	TNGHS	Efektivitas Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Air (IPA)
	Kantung Semar	1	Resort Kawah Ratu	Laju Penyerapan CO2
	Karakteristik	1	Resort Gn Botol	Karakteristik Vegetasi dan Tanah
	Kasepuhan	1	Resort Gn Bodas	Pariwisata dan Tradisi
	Kinerja Pengelolaan	1	Resort Gn Salak II	Kinerja Pengelolaan Wisata
	Konservasi Air	1	TNGHS	Kajian Konservai Air
	Kontaminasi	1	Resort Gn Botol	Pertambangan Emas
	Korelasi	1	Resort Cikaniki	Hubungan Model Arsitektur Pohon, tanah dan air
	Kualitas Air	1	TNGHS	Status kualitas Air
	Manajemen Kolabo-ratif	1	Resort Cikaniki	Management Ekowisata
	Manfaat Ekonomi	4	Resort Gn Salak II, TNGHS	Manfaat Ekonomi, Pengembangan dan Pemanfaatan Ekowisata
	Masyarakat	9	Resort Gn Bedil, Resort Gn Butak, Resort Gn Kendeng, Resort Gn Koneng, Resort Gn Salak II, Resort Kawah Ratu, TNGHS	Analisis Tekno Ekonomi Mikrohidro, Dampak Kegiatan Wisata Alam, Pemanfaatan HHBK, Pemberdayaan Masyar-akat, Tantangan Membangun Wisata Alam

3	**Jasling dan Mineral**			
	Mercury Level	1	TNGHS	Pertambangan Emas
	Pemasaran Wisata	1	TNGHS	Strategi Pemasaran Ekowisata
	Pengelolaan	2	Resort Gn Salak II	Management Ekowisata, Dampak Ekonomi
	Pengelolaan Reservoir	1	TNGHS	ManagementReservoir
	Pengelolaan wisata	1	TNGHS	Management Ekowisata
	Pengembangan	1	TNGHS	Pengembangan Produk Wisata
	Pengembangan Cluster	1	TNGHS	Pengembangan Cluster Wisata Alam
	Pengembangan Institusi	1	TNGHS	Model Pengembangan Istitusi Ekowisata
	Pengembangan Wisata	1	Resort Gn Salak II	Pengembangan Wisata
	Perancangan Lanskap	1	TNGHS	Perencanaan Wisata
	Perencanaan Agrowisata	1	TNGHS	Perencanaan Agrowisata
	Perencanaan Lanskap	2	Resort Gn Bodas, Resort Gn Botol	Perencanaan Ekowisata
	Perspektif Hukum Lingkungan	1	TNGHS	Pengelolaan Sumber Daya Air
	Perubahan Lahan	1	TNGHS	Analisis Dampak Perubahan Penggunaan Lahan
	Pinus merkusii	1	Resort Gn Salak II	Etnobotani
	Potensi Lanskap	1	Resort Gn Salak II	Perencanaan Ekowisata
	Sistem Pengembangan	1	Resort Gn Salak II	Sistem Sosial Pengembangan Wisata
	Solusi Kepentingan	2	TNGHS	Ekologi dan Ekonomi
	Strategi Pengelolaan	1	Resort Cikaniki	Strategi Pengembangan Wisata
	Strategi Pengembangan	1	Resort Gn Salak II	Strategi Pengembangan Wisata
	Struktur Manajemen	1	Resort Gn Salak II	Management Ekowisata
	Tegakan Hutan	1	Resort Gn Kendeng	Potensi Simpanan Cadangan Karbon
	Tumbuhan Bawah	1	Resort Gn Bedil	Adaptasi Tumbuhan

4	**Kebijakan**			
	Areal Konservasi	1	TNGHS	Kebijakan Pengelolaan
	Data dan Informasi	1	TNGHS	Evaluasi Data dan Informasi Ekologi
	Degradasi Hutan	2	TNGHS	Strategi Pengendalian Degradasi
	Deliniasi Lahan	1	TNGHS	Delinasi dan Arahan Penggunaan Lahan
	Efektivitas pengelolaan	1	TNGHS	Kebijakan Pengelolaan
	Implikasi	1	TNGHS	Ekologi
	Karakteristik	1	Resort Gn Kendeng	Struktur Vegetasi
	Kasepuhan	1	Resort Cibedug	Sumber Daya Sosial
	Kawasan Hutan	2	Koridor Halimun-Salak, TNGHS	Kebijakan Pengelolaan
	Kelembagaan	1	TNGHS	Pengembangan Kelembagaan
	Kinerja Pengelolaan	2	TNGHS	Kebijakan Pengelolaan
	Konservasi partisipatif	1	TNGHS	Kebijakan Pengelolaan
	Konservasi spesies	1	Resort Cikaniki	Biaya Konservasi Sumber Daya
	Konversi Lahan	1	TNGHS	Kajian Ekologi Spasial
	Masyarakat	4	Resort Gn Bodas, Resort Kawah Ratu, TNGHS	Kebijakan Pengelolaan, Sosial Masyarakat, Pengembangan Taman Nasional
	Metode Deteksi	1	Resort Gn Bodas	Metode Deteksi Degradasi
	MKK	2	Resort Gn Botol, Resort Gn Kendeng	Manfaat Ekonomi, Dampak Sosial
	Modal Sosial	1	TNGHS	Implikasi Modal Sosial Masyarakat terhadap Pengelolaan
	Pemanfaatan Lahan	1	Resort Gn Salak II	Pengembangan Taman Nasional
	Pendidikan Konservasi	1	Resort Gn Botol	Pelaksanaan dan Capaian
	Penetapan Kawasan	1	Resort Gn Koneng	Kebijakan Pengelolaan

4	**Kebijakan**			
	penggunaan lahan	2	Resort Gn Bongkok, Resort Gunung Kendeng	Perubahan dan Sejarah Penggunaan Lahan
	Pengukuhan Kawasan Hutan	1	TNGHS	Kebijakan Pengelolaan
	Penutupan Vegetasi	1	TNGHS	Tutupan Vegetasi
	Perubahan Penutupan Lahan	1	TNGHS	Deteksi Perubahan Penutupan Lahan
	Perubahan tatakelola	1	TNGHS	Kebijakan Pengelolaan
	Politik Konservasi Alam	1	TNGHS	Kebijakan Pengelolaan
	Rapid Land Tenure Assesment	1	TNGHS	Biodiversitas
	Restorasi	1	Resort Gn Bodas	Model Restorasi
	Sosial Ekonomi	1	TNGHS	Identifikasi Sosial Ekonomi
	Stakeholder	3	TNGHS	*Stakeholders* dan Tenurial
	Strategi Kebijakan	1	TNGHS	Startegi Kebijakan Pengelolaan
	Strategi Komunikasi	2	TNGHS	Pendidikan Konservasi
	Strategi Penyelesaian Konflik	1	TNGHS	Konflik Tenurial
	Tata Ruang	2	Resort Gn Botol, TNGHS	Sejarah Penggunaan Lahan
	Tingkat Rawan Bencana	1	TNGHS	Startegi Pengelolaan
	TNGHS	1	TNGHS	Kelembagaan
	Tutupan Vegetasi	2	Koridor Halimun-Salak, Resort Gn Kendeng	Pemetaan Tutupan Vegetasi
	Zonasi	1	Resort Cisoka	Perubahan Penggunaan Lahan

BAB VIII

ROADMAP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI TNGHS PERIODE TAHUN 2022-2027

8.1. Langkah-langkah Penyusunan Roadmap

Roadmap secara istilah dapat dikatakan sebagai panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan suatu program pada kurun waktu tertentu. *Roadmap* Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS periode tahun 2022-2027 diharapkan dapat menjadi sebuah panduan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di TNGHS dan tentunya Balai TNGHS sebagai pengelola. Dalam hal pengelolaan kawasan konservasi, setiap bentuk kebijakan secara ideal harus berdasarkan kajian ilmiah/*scientific* dan fakta-fakta dilapangan. Itulah mengapa kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di sebuah kawasan konservasi sangat memegang peranan penting dan dibutuhkan.

Kebutuhan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di sebuah kawasan konservasi harus bermanfaat tidak hanya untuk ilmu pengetahuan dan dunia sains tetapi juga bagi pengelolaan kawasan yang nantinya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan secara khusus dan masyarakat global secara luas.

Oleh Karena itu, dalam mencapai penyusunan Roadmap Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS periode tahun 2022-2027 harus bisa menjawab kebutuhan pengelolaan kawasan TNGHS. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di TNGHS diharapkan menjadi solusi untuk mengungkap potensi yang belum tergali di TNGHS ataupun permasalahan dan isu strategis di TNGHS. Sehingga tujuan pengelolaan TNGHS yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang tahun 2018-2027 apat terwujud dengan dukungan dari kalangan peneliti maupun ilmuwan. Dalam menyusun *roadmap* Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS periode tahun 2022-2027 ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

8.1.1 Prakondisi

1. Penyusunan Grand Design Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Dokumen ini adalah merupakan Grand Design yang dimaksud. Penyusunan dokumen ini melibatkan seluruh unsur internal Balai TNGHS khususnya tenaga fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), fungsional Polisi Hutan (Polhut), fungsional penyuluh, pejabat eselon III dan IV sampai kepada kepala-kepala resort. Selain pihak internal juga melibatkan unsur pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, serta Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga melibatkan beberapa perguruan tinggi, Lembaga penelitian dan mitra-mitra lembaga swadaya masyarakat.

Melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) maka tersusunlah dokumen ini dan siap untuk dipublikasikan dan disebarkan, disosialisasikan ke berbagai pihak baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional. Salah satu aspek yang paling penting dalam dokumen ini yang akan di sebarkan ke publik adalah tema-tema penelitian yang ditawarkan di TNGHS periode tahun 2022-2027. Setidaknya ada beberapa point dari rencana strategi dan rencana aksi RPJP TNGHS periode 2018-2027 yang melibatkan lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat yang berpeluang untuk dilakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Poin-poin tersebut seperti yang ditampilkan pada tabel berikut

Tabel VIII.1 Rencana strategi dan rencana aksi berpeluang untuk dilakukan kegiatan Penelitaian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS Periode Tahun 2022-2027

No	Strategi	Aksi		Periode Waktu
1	Pengendalian ekosistem hutan	1.1	Mengendalikan penggunaan lahan di dalam kawasan	2022-2027
		1.2	Melaksanakan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan	2022-2027
2	Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS	2.1	Menyusun strategi dan rencana aksi konservasi spesies penting	2022-2027
		2.2	Melaksanakan pengelolaan spesies penting	2022-2027
		2.3	Melaksanakan pemantauan ekosistem penting	2022-2027
3	Mendorong berkembangnya wisata alam yang memberi manfaat bagi konservasi alam dan masyarakat lokal	3.1	Menyusun strategi dan regulasi penyelenggaraan usaha wisata alam	2022-2027
		3.2	Mengembangkan produk wisata alam	2022-2027
		3.3	Meningkatkan layanan dan pengelolaan wisata alam	2022-2027
		3.4	Promosi dalam rangka meningkatkan investasi dan pengusahaan wisata alam	2022-2027
4	Mendorong berkembang-nya industri pemanfaatan jasa lingkungan yang mendukung konservasi dan pengelolaan TNGHS	4.1	Mengembangkan produk jasa lingkungan	2022-2027
		4.2	Meningkatkan layanan dan pengelolaan jasa lingkungan	2022-2027
		4.3	Promosi dalam rangka meningkatkan investasi dan pengusahaan jasa lingkungan	2022-2027
5	Tersusunnya regulasi pene-litian dan pendidikan publik di TNGHS	5.1	Mengembangkan jaringan penelitian	2022-2027
		5.2	Mengembangkan jaringan pendidikan publik	2022-2027

Tabel VIII.1 diatas akan menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di TNGHS periode tahun 2022-2027. Rencana strategi dan aksi pada tabel diatas dipilih berdasarkan pada mitra yang terlibat yaitu lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Rencana strategi dan rencana aksi yang ada pada Tabel 8 diatas diambil dari rencana pengelolaan jangka panjang TNGHS periode tahun 2018-2027. Rencana strategi dan rencana aksi bisa dianggap sebagai tema penelitian yang mungkin dikembangkan sehingga objek-objek ataupun kategori penelitian dapat dikembangkan dari tema-tema tersebut walupun tidak menutup kemungkinan dari objek atau kategori yang lainnya.

Tabel VIII.2. Kebutuhan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS Periode Tahun 2022-2027

No	Strategi & Aksi	Kategori/Subkategori/Objek
1	**Pengendalian Ekosistem Hutan**	
	Mengendalikan penggunaan lahan di dalam kawasan	Gangguan kawasan/Penambangan illegal/Penambangan emas tanpa ijin
		Sosekbud/Kemasyarakatan/Penggunaan lahan
	Melaksanakan pemantauan dan pengelolaan sumber daya lingkungan	Gangguan kawasan/Polutant/Merkuri
		Gangguan kawasan/Polutant/Sianida
		Jasling & Mineral/Sumber daya lingkungan/Geologi
		Jasling & Mineral/Sumber daya lingkungan/Tanah
		Jasling & Mineral/Sumber daya lingkungan/Air
		Jasling & Mineral/Karbon
	Melaksanakan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan	Kebijakan/Rehabilitasi/Pemulihan ekosistem

Tema Kajian	Tahun						Kebutuhan Lokasi Penelitian
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Pengendalian Ekosistem Hutan							
Persepsi/Dampak/Subtitusi/Determinan							Panggarangan, Gn Bedil, Cibedug, Cisoka, Gn Kencana, Gn Talaga, Gn Butak, Gn Botol, Gn Bodas
Konflik tenurial/Kearifan tradisional/Persepsi/Determinan							Seluruh Resort di TNGHS
Dampak/Pencemaran/Sebaran							Seluruh wilayah Resort yang terdapat Aktivitas PETI
Dampak/Pencemaran/Sebaran							Seluruh wilayah Resort yang terdapat Aktivitas PETI
Identifikasi/Keanekaragaman/Potensi/Kebencanaan							Seluruh Resort di TNGHS
Erosi/Identifikasi/Konservasi Tanah							Seluruh Resort di TNGHS
Nilai dan dampak ekonomi/Potensi/Ketersediaan/Kualitas							Seluruh Resort di TNGHS
Penghitungan/Rosot/*Carbon Pool*							Seluruh Resort di TNGHS
Inovasi /Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS yang memiliki zona rehabilitasi

No	Strategi & Aksi	Kategori/Subkategori/Objek
2	**Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS**	
	Menyusun strategi dan rencana aksi konservasi spesies penting	Keanekaragaman hayati/Mamalia/Macan Tutul Jawa(Javan Leopard/*Panthera pardus melas*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Owa Jawa(Silvery Gibbon/*Hylobates moloch*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Elang Jawa(Javan Hawk-eagle/*Nisaetus bartelsi*)
	Melaksanakan pengelolaan spesies penting	Keanekaragaman hayati/Flora/*Balanophora sp.*
		Keanekaragaman hayati/Flora/Tumbuhan Hias
		Keanekaragaman hayati/Flora/Tabat Barito
		Keanekaragaman hayati/Flora/Nyali/Gall
		Keanekaragaman hayati/Flora/Zingiberaceae
		Keanekaragaman hayati/Flora/Pakis Sayur (*Dyplazium esculentum* (Retz.) Sw)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Raja Udang Kalung-Biru (Javan Blue Banded Kingfisher/*Alcedo euryzona*)

Tema Kajian	Tahun						Kebutuhan Lokasi Penelitian
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS							
Kebijakan Konservasi/Strategi konservasi							Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak
Kebijakan Konservasi/Strategi konservasi							Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak
Kebijakan Konservasi/Strategi konservasi							Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak
Bioprospeksi/Budidaya/Asosiasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Potensi/Ancaman/Distirbusi/Populasi							Seluruh Resort di TNGHS
Populasi/Sebaran/Bioprospeksi/Budidaya							Seluruh Resort di TNGHS
Identifikasi/Potensi/Bioprospeksi/Asosiasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Identifikasi/Potensi/Bioprospeksi/Asosiasi/Ekologi/ Budidaya							Seluruh Resort di TNGHS, Kecuali Resort Cikaniki
Identifikasi/Potensi/Bioprospeksi/Asosiasi/Ekologi/ Budidaya							Seluruh Resort di TNGHS
Potensi/Ancaman/Distirbusi/Populasi							Seluruh Resort di TNGHS

No	Strategi & Aksi	Kategori/Subkategori/Objek
2	**Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS**	
	Melaksanakan pengelolaan spesies penting	Keanekaragaman hayati/Aves/Raja Udang Punggung Merah(Rufous-backed Kingfisher/*Ceyxrufidorsa*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Ekek Geling(*Javan Green Magpie*/*Cissa thalassina*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Julang Emas(*Wreathed Hornbill*/*Rhyticeros undulatus*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Kangkareng Perut-Putih(*Oriental Pied Hornbill*/*Anthracoceros albirostris*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Luntur Harimau(*Orange-breasted Trogon*/*Harpactes oreskios*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Luntur Jawa (*Javan Trogon*/*Apalharpactes reindwartii*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Ayam Hutan Merah(*Red Junglefowl*/*Gallus gallus*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Alap-alap Capung(*Black-thighed Falconet*/*Microhierax Fringillarius*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Celepuk Jawa(*Javan Scops-owl*/*Otus angelinae*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Celepuk Reban(*Sunda Scops-Owl*/*Otus lempiji*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Kacamata Biasa(*Oriental White-eye*/*Zosterops palpebrosus*)

Tema Kajian	Tahun						Kebutuhan Lokasi Penelitian
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS							
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi/Perburuan							Seluruh Resort di TNGHS

No	Strategi & Aksi	Kategori/Subkategori/Objek
2	**Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS**	
	Melaksanakan pengelolaan spesies penting	Keanekaragaman hayati/Aves/Kacamata Gunung(*Mountain White-eye*|*Zosterops montanus*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Tepekong Jambul(*Grey-rumped Treeswift*|*Hemiprocne longipennis)*
		Keanekaragaman hayati/Aves/Beluk Jambuk(*Barred Eagle-owl*|*Bubo sumatranus*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Beluk Ketupa(*Buffy Fish-Owl*|*Ketupa Ketupu*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Puyuh Gonggong Jawa(*Chestnut-bellied*|*Arborophila javanica*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Cica Daun Besar (*Greater Green Leafbird*|*Chloropsis sonnerati*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Burung Madu Jawa (*Javan Sunbird*|*Aethopyga mystacalis*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Paok Panca Warna (*Javan Banded Pitta*|*Hydrornis guajanus*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Kipasan Bukit (*White-Bellied Fantail*|*Rhipidura euryura*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Kipasan Ekor Merah (*Rufous-tailed Fantail*|*Rhipidura phoenicura*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Ciung Mungkal Jawa (*Javan Cochoa*|*Cochoa azurea*)

Tema Kajian	Tahun						Kebutuhan Lokasi Penelitian
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS							
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi/Perburuan							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS

No	Strategi & Aksi	Kategori/Subkategori/Objek
2	**Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS**	
	Melaksanakan pengelolaan spesies penting	Keanekaragaman hayati/Aves/Elang Jawa (*Javan Hawk-eagle*|*Nisaetus bartelsi*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Elang Brontok (*Changeable Hawk-eagle*|*Nisaetus cirrhatus*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Elang Ular Bido (*Crested Serpent-eagle*|*Spilornis cheela*)
		Keanekaragaman hayati/Aves/Elang Hitam (*Black Eagle*|*Ictinaetus malaiensis*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Macan Tutul Jawa (*Javan Leopard*|*Panthera pardus melas*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Owa Jawa (*Silvery Gibbon*|*Hylobates moloch*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Ajag Jawa (*Dhole*|*Cuon alpinus*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Muncak Jawa (*Southern Red Muntjac*|*Muntiacus muntjak*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Babi Hutan (*Wild Boar*|*Sus scrofa*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Lutung (*Spangled Ebony Langur*|*Trachypithecus auratus*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Monyet Ekor Panjang (*Crab-eating Macaque*|*Macaca fascicularis*)

Tema Kajian	Tahun						Kebutuhan Lokasi Penelitian
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS							
Pasca Release/Rehabilitasi/Nutrisi/Karakteristik sarang/Preferensi Pakan							Seluruh Resort di TNGHS
Pasca Release/Rehabilitasi/Nutrisi/Karakteristik sarang/Populasi/Sebaran							Seluruh Resort di TNGHS
Pasca Release/Rehabilitasi/Nutrisi/Karakteristik sarang/Populasi/Sebaran							Seluruh Resort di TNGHS
Pasca Release/Rehabilitasi/Nutrisi/Karakteristik sarang/Populasi/Sebaran							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS, Kecuali Resort Cikaniki
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS

No	Strategi & Aksi	Kategori/Subkategori/Objek
2	**Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS**	
	Melaksanakan pengelolaan spesies penting	Keanekaragaman hayati/Mamalia/Surili (*Javan Surili*/*Presbytis comata*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Kukang Jawa (*Javan Slow Loris*/*Nycticebus javanicus*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Trenggiling (*Sunda Pangolin*/*Manis javanica*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Landak (*Sunda Porcupine*/*Hystrix javanica*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Pelanduk Jawa (*Javan Chevrotain*/*Tragulus javanicus*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Musang Akar Jawa (*Small-toothed Palm Civet*/*Arctogalidia trivirgata)*
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Biul Slentek (*Javan Ferret Badger*/*Melogale orientalis*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Musang Lingsang (*Banded Linsang*/*Prionodon linsang*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Kucing Hutan (*Leopard Cat*/*Prionailurus bengalensis*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Binturong (Binturong/*Arctictis binturong*)
		Keanekaragaman hayati/Mamalia/Kelelawar Oranye (*Painted Wooly Bat*/*Kerivoula picta*)

Tema Kajian	Tahun						Kebutuhan Lokasi Penelitian
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS							
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS

No	Strategi & Aksi	Kategori/Subkategori/Objek
2	**Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS**	
	Melaksanakan pengelolaan spesies penting	Keanekaragaman hayati/Herpetofauna/Kodok Merah (*Bleeding Toad*/*Leptophryne cruentata*)
		Keanekaragaman hayati/Herpetofauna/Katak Mutiara (*Java Indonesian Treefrog*/*Nyctixalus margaritifer*)
		Keanekaragaman hayati/Herpetofauna/Katak Hias Emas (*Golden Dwarf Tree Frog*/*Chirixalus vittiger)*
		Keanekaragaman hayati/Herpetofauna/Katak Pohon Emas (*Java Bubble-nest Frog*/*Philautus aurifasciatus*)
		Keanekaragaman hayati/Herpetofauna/Katak Pohon Jawa (*Java Flying Frog*/*Rhacophorus margaritifer*)
		Keanekaragaman hayati/Herpetofauna/Katak Pohon Terbang (*Reinwardt's Flying Frog*/*Rhacophorus reinwardtii*)
		Keanekaragaman hayati/Herpetofauna/Katak Pucat Trilaksono (*Chirixalus trilaksonoi*)
		Keanekaragaman hayati/Herpetofauna/Kodok Jam Pasir (*Hourglass Toad*/*Leptophryne borbonica*)
		Keanekaragaman hayati/Herpetofauna/Kodok Batu (*Fanged River Frog*/*Limnonectes macrodon*)
		Keanekaragaman hayati/Herpetofauna/Sesilia (Caecilian/*Ichtyophis hypocyaneus*)
		Keanekaragaman hayati/Herpetofauna/Kobra Palsu (*False Cobra*/*Pseudoxenodon inornatus*)

Tema Kajian	Tahun						Kebutuhan Lokasi Penelitian
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS							
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi/Perburuan							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Perburuan/Populasi/Habitat							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS

No	Strategi & Aksi	Kategori/Subkategori/Objek
2	**Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS**	
	Melaksanakan hengelolaan spesies penting	Keanekaragaman hayati/Herpetofauna/Cabai Besar (*Blue Coral Snake*| *Calliophis bivirgata*)
		Keanekaragaman hayati/Herpetofauna/Ular Lanang (*King Cobra*| *Ophiophagus hannah*)
		Keanekaragaman hayati/Herpetofauna/Labi-labi Hutan (*Malayan Soft-shelled Turtle*| *Dogania Subplana)*
		Keanekaragaman hayati/Herpetofauna/Gecko Terbang (*Kuhl's Flying Gecko*| *Gekko kuhli*)
		Keanekaragaman Hayati/Herpetofauna/Biawak Air (*Common Water Monitor*| *Varanus salvator*)
		Keanekaragaman hayati/Insecta/Lebah/Kumbang/Kupu-kupu/Capung
		Keanekaragaman hayati/Crustacea/Udang (*Deacpoda*)
		Keanekaragaman hayati/Crustacea/Kepiting (*Brachyura*)
		Keanekaragaman hayati/Pisces/Ikan Endemik
		Keanekaragaman hayati/Pisces/Ikan Invasif
		Keanekaragaman hayati/Flora/Raflesia (*Rafflesia sp*)

Tema Kajian	Tahun						Kebutuhan Lokasi Penelitian
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS							
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Habitat/Populasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Keanekaragaman/Habitat/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Keanekaragaman/Habitat/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Keanekaragaman/Habitat/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Keanekaragaman/Habitat/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Keanekaragaman/Habitat/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Sebaran/Ekologi/Konservasi/Identifikasi							Seluruh Resort di TNGHS, Terutama Gn Salak I, Gn Salak II, Kawah Ratu

No	Strategi & Aksi	Kategori/Subkategori/Objek
2	**Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS**	
	Melaksanakan pengelolaan spesies penting	Keanekaragaman hayati/Flora/Kantung Semar (*Nephentes sp.*)
		Keanekaragaman hayati/Flora/Anggrek (*Orhcidaceae*)
		Keanekaragaman hayati/Flora/Saninten (*Castanopsis Argentea*)
		Keanekaragaman hayati/Flora/Ficus (*Ficus sp.*)
		Keanekaragaman hayati/Flora/Palahlar (*Dipetrocarpus sp.*)
		Keanekaragaman hayati/Flora/Aren (*Arenga pinnata*)
		Keanekaragaman hayati/Flora/Bambu (*Poales*)
		Keanekaragaman hayati/Flora/Hoya (*Hoya sp.*)
		Keanekaragaman hayati/Flora/Canar/Anggur Hutan (*Smilax Leucophylla*)
		Keanekaragaman hayati/Flora/Ki Aksara (*Macodes petola*)
		Keanekaragaman hayati/Flora/Ki Lemo (*Litsea cubeba*)

Tema Kajian	Tahun						Kebutuhan Lokasi Penelitian
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS							
Sebaran/Ekologi/Konservasi/Identifikasi							Seluruh Resort di TNGHS
Teknik Budidaya/Sebaran/Identifikasi/Ekologi							Seluruh Resort di TNGHS
Budidaya/Bioprospeksi/Sebaran/Populasi/ Ekologi/Konservasi							Seluruh Resort di TNGHS
Keanekaragaman/Sebaran/Ekologi/Fenologi							Seluruh Resort di TNGHS
Identifikasi/Sebaran/Ekologi/Konservasi/Pop-ulasi							Seluruh Resort di TNGHS
Teknik Budidaya/Ekologi/Sebaran/Populasi							Seluruh Resort di TNGHS
Keanekaragaman/Sebaran/Ekologi/Budidaya/ Etnobotani/Bioprospeksi							Seluruh Resort di TNGHS
Keanekaragaman/Sebaran/Ekologi/Budidaya							Seluruh Resort di TNGHS
Etnobotani/Bioprospeksi/Ekologi/Budidaya							Seluruh Resort di TNGHS
Keanekaragman/Sebaran/Ekologi/Budidaya/ Habitat/Ancaman							Seluruh Resort di TNGHS
Bioprospeksi/Sebaran/Etnobotani/Ekologi/Bu-didaya/Ancaman							Seluruh Resort di TNGHS

No	Strategi & Aksi	Kategori/Subkategori/Objek
2	**Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS**	
	Melaksanakan pengelolaan spesies penting	Keanekaragaman hayati/Flora/Rotan (*Calameae*)
		Keanekaragaman hayati/Fungi/Jamur Pangan
		Keanekaragaman hayati/Mikroba
		Keanekaragaman hayati/Flora/Invasive alien species
	Melaksanakan pemantauan ekosistem penting	Jasling & Mineral/Ekosistem/Karst
		Jasling & Mineral/Ekosistem/Ekosistem penting
3	**Mendorong Berkembangnya Wisata Alam yang Memberi Manfaat Bagi Konservasi Alam dan Masyarakat Lokal**	
	Menyusun strategi dan regulasi penyelenggaraan usaha wisata alam	Jasling & Mineral/Wisata/Strategi dan Regulasi usaha wisata alam
	Mengembangkan produk wisata alam	Jasling & Mineral/Wisata/Produk wisata alam
	Meningkatkan layanan dan pengelolaan wisata alam	Jasling & Mineral/Wisata/Peningkatan layanan dan pengelolaan wisata alam
	Promosi dalam rangka meningkatkan investasi dan pengusahaan wisata alam	Jasling & Mineral/Wisata/Promosi dalam rangka meningkatkan investasi dan pengusahaan wisata alam

Tema Kajian	Tahun						Kebutuhan Lokasi Penelitian
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menjamin terjaganya populasi spesies penting TNGHS							
Keanekaragaman/Ekologi/Etnobotani							Seluruh Resort di TNGHS
Keanekaragaman/Teknik budidaya/Etnobotani/ Bioprospeksi/Kandungan nutrisi							Seluruh Resort di TNGHS
Genetika/Keanekaragaman/Bioprospeks							Seluruh Resort di TNGHS
Keinvasifan/Dampak/Distribusi							Seluruh Resort di TNGHS
Identifikasi/Sebaran/Pemetaan							Resort Gn Bongkok, Panggarangan, Gn Bedil, Gn Koneng, Gn Bodas, dan Tiap Resort yang berpotensi
Keanekaragaman/Penilaian Fungs/Pemanfaatan							Seluruh Resort di TNGHS
Mendorong Berkembangnya Wisata Alam yang Memberi Manfaat Bagi Konservasi Alam dan Masyarakat Lokal							
Strategi Pengembangan/Identifikasi Potensi/ Kolaborasi/Nilai Dampak Ekonomi/Konflik							Seluruh ODTWA di TNGHS,Kecuali Gn Bunder dan Curug Cigamea (Nilai dan Dampak Ekonomi)/Konflik (GSE)
Pengembangan Produk/Identifikasi Potensi/ Strategi pengembangan							Seluruh Resort di TNGHS yang memiliki ODTWA
Sistem Informasi/Evaluasi Pengelolaan/Strategi pengelolaan/Determinan							Seluruh Resort di TNGHS yang memiliki ODTWA
Strategi pemasaran/Kelayakan usaha							Seluruh Resort di TNGHS yang memiliki ODTWA

No	Strategi & Aksi	Kategori/Subkategori/Objek
4	**Mendorong Berkembangnya Industri Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang Mendukung Konservasi dan Pengelolaan TNGHS**	
	Mengembangkan produk jasa lingkungan	Jasling & Mineral/Sumber daya lingkungan/Pengembangan produk jasa lingkungan
	Meningkatkan layanan dan pengelolaan jasa lingkungan	Kebijakan/Sumber daya lingkungan/Peningkatan layanan dan pengelolaan jasa lingkungan
	Promosi dalam rangka meningkatkan investasi dan pengusahaan jasa lingkungan	Jasling & Mineral/Sumber daya lingkungan/Promosi dalam rangka meningkatkan investasi dan pengusahaan jasa lingkungan
5	**Pengoptimalan Sosial dan Budaya Masyarakat di Sekitar Kawasan TNGHS**	
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat	Sosekbud/Kemasyarakatan/Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
	Pemberian akses terhadap masyarakat sekitar kawasan	Sosekbud/Kemasyarakatan/Pemberian akses terhadap masyarakat
	Pengembangan sejarah budaya masyarakat	Sosekbud/Budaya/Situs keramat

Tema Kajian	Tahun						Kebutuhan Lokasi Penelitian
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Mendorong Berkembangnya Industri Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang Mendukung Konservasi dan Pengelolaan TNGHS							
Identifikasi Potensi/Identifikasi Potensi/Penilaian ekonomi/Kualitas dan kuantitas							Seluruh Resort di TNGHS
Kebijakan/Pemanfaatan/Strategi pengawasan							Seluruh Resort di TNGHS yang memiliki ijin pemanfaatan jasa lingkungan
Kajian kelayakan usaha pengusahaan jasa lingkungan/Strategi promosi pengusahaan jasa lingkungan							Seluruh Resort di TNGHS yang memiliki ijin pemanfaatan jasa lingkungan
Pengoptimalan Sosial dan Budaya Masyarakat di Sekitar Kawasan TNGHS							
Pengembangan Potensi/Pemberdayaan/ Pengembangan usaha ekonomi							Seluruh Resort di TNGHS
Identifikasi potensi produk/Dampak ekonomi/ Efektivitas							Seluruh Resort di TNGHS yang memiliki PKS kemitraan konservasi atau berpotensi dilakukaan kemitraan konservasi
Identifikasi/Sejarah/Wisata spiritual							Resort Cibedug, Gn Salak I, Gn Salak II, Kawah Ratu, Gn Koneng

2. Sosialisasi dan Publikasi.

Secara rutin pihak Balai TNGHS akan melakukan kunjungan atau *road show* ke beberapa lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk mensosialisasikan konsep pengelolaan Kawasan TNGHS sekaligus mengundang dan menawarkan para pihak untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan tema-tema penelitian sebagaimana tertuang di dalam Grand Design.

Selain melakukan kunjungan, publikasi dan sosialisasi juga akan dilakukan secara aktif melalui media-media online seperti **Facebook**, **Instagram**, dan **Website** milik Balai TNGHS.

8.1.2 Pelaksanaan

1. Kerjasama Para Pihak

Collaborative management merupakan strategi yang cukup efektif di dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kerjasama penyelenggaraan taman nasional dipayungi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.85 Tahun 2014 dan P.44 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kerjasama Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Sebagaimana dalam ketentuan tersebut aspek-aspek pengelolaan taman nasional yang dapat dikerjasamakan adalah:

a. Kerjasama penguatan kelembagaan, meliputi peningkatan kapasitas SDM dan bantuan teknis serta penelitian dan pengembangan
b. Kerjasama perlindungan kawasan, meliputi perlindungan dan pengamanan, antara lain dapat berupa kerjasama inventarisasi dan pembuatan peta kerawanan hutan, pencegahan gangguan, identifikasi tanda batas, penguatan tenaga pengamanan termasuk pembentukan pengamanan swakarsa, patroli dan penanggulangan kebakaran.
c. Kerjasama pemulihan ekosistem, meliputi antara lain dapat kerjasama rehabilitasi dan restorasi kawasan.
d. Kerjasama pengawetan flora dan fauna, meliputi kerjasama identifikasi, inventarisasi, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian penelitian dan pengembangan.
e. Kerjasama pengembangan wisata alam, antara lain kerjasama promosi, pembangunan sarana dan prasarana wisata alam, pembangunan pusat informasi dan pembinaan masyarakat, serta
f. Kerjasama pemberdayaan masyarakat

Sampai tahun 2021, Balai TNGHS telah melakukan kerjasama penguatan fungsi, Kerjasama kepentingan strategis dan Kerjasama kemitraan konservasi dengan berbagai instansi atau kelompok. Adapun Mitra-mitra Kerjasama tersebut adalah :

a. Kerjasama Penguatan Fungsi
   1) PT. Indonesia Power Kamojang POMU
   2) PT. Star Energy Geothermal Salak, Ltd.
   3) PT. Antam, Tbk. UBPE Pongkor
   4) Yayasan IAR Indonesia
   5) Yayasan KEHATI
   6) Perkumpulan Absolute Indonesia
   7) Yayasan Konservasi Alam Nusantara (KIARA)
   8) Yayasan PUTER Indonesia

b. Kejasama Kepentingan Strategis Nasional
   1) Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
   2) Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

c. Kerjasama Kemitraan Konservasi
   1) KTH Getah Lestari
   2) KTH Wana Lestari
   3) KTH Alam Jaya
   4) KTH Rimba Lestari
   5) KMPHHBK Wana Lestari
   6) KMPHHBK Harapan
   7) KTHK Malasari Lestari
   8) KTM Garehong Cianten
   9) KTSH Garehong Cianten
   10) KTH Mandiri Taman Nasional Pohpohan
   11) KT Mandiri 2 Taman Nasional

12) KT Rindu Alam I
13) KT Rindu Alam II
14) KTH Cikaniki Lestari
15) KTH Giri Catur

Guna memaksimalkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, Balai TNGHS sedang melakukan inisiasi kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di sekitar kawasan TNGHS, dan tidak menutup kemungkinan akan diperluas pada perguruan tinggi yang ada diluar negeri.

2. Meningkatkan Sinergitas Program.

Pemerintah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat memiliki kepentingan yang cukup tinggi terhadap keberadaan TNGHS. Berbagai program terkait penelitian dan pengembangan telah dicanangkan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kedua pemerintahan tersebut. Karena itu, pihak Balai TNGHS akan melakukan sinergitas program terkait penelitian dan pengembangan dengan ke dua pemerintahan tersebut. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam mensinergikan program dan kegiatan dengan pemerintah daerah dengan cara ikut terlibat didalam rapat koordinasi pembangunan mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Selain itu secara rutin juga akan dilakukan *expose* rencana-rencana dan hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Balai TNGHS. Hal penting lainnya adalah mensosialisasikan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) TNGHS pada level pemerintah kecamatan sampai dengan pemerintah ditingkat kabupaten dan Provinsi.

3. Meningkatkan Penelitian Terapan

Berdasarkan data penelitian yang pernah dilakukan di TNGHS, hampir seluruh kegiatan penelitian masih bersifat penelitian dasar. Karena itu perlu dilakukan upaya dan dorongan kepada para peneliti dan lembaga peneliti untuk lebih meningkatkan upayanya guna pelaksanaan penelitian sampai pada level penelitian terapan (pengembangan nilai manfaat).

Keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam Kawasan TNGHS memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah yang akan dilakukan guna mendorong para peneliti dan lembaga peneliti untuk melakukan penelitian tingkat terapan adalah mensuplai data dan informasi tentang potensi-potensi apa saja yang memiliki peluang untuk dikembangkan dan secara faktual telah dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam dan disekitar kawasan TNGHS. Hasil penelitian terapan akan sangat berguna di dalam pengelolaan kawasan konservasi dan yang tak kalah pentingnya hasil tersebut akan dijadikan dasar dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

4. Dukungan Pelaksanaan Penelitian

Seringkali muncul keluhan para peneliti apabila melakukan penelitian di kawasan konservasi. keluhan-keluhan tersebut antara lain; aksesibilitas yang sangat sulit, sulit menjangkau lokasi, transportasi terbatas, butuh biaya besar, sarana pendukung yang tidak memadai, birokrasi perijinan yang berbelit-belit, sulit membawa specimen, dll. Pada dasarnya keluhan tersebut dapat dipahami dengan melihat kondisi dan tipologi kawasan konservasi di Indonesia. Bahwa hampir seluruh kawasan konservasi berada di daerah terpencil (*remote area*) dan sulit untuk dijangkau. Namun kendala tersebut sebenarnya dapat di kurangi apabila melibatkan pihak pengelola dalam pelaksanaan penelitian. Sebagai gambaran, wilayah TNGHS yang berada pada dua Provinsi dan tiga Kabupaten menunjukkan cukup luasnya wilayah pengelolaan TNGHS.

Beberapa lokasi yang representatif untuk dilakukan penelitian juga cukup sulit dijangkau karena butuh kendaraan dengan spesifikasi khusus seperti 4 *wheel drive* atau motor *trail.* Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam mengurangi kendala-kendala tersebut adalah memberikan dukungan fasilitas transportasi. Peneliti dapat menggunakan sarana yang dimiliki oleh Balai TNGHS seperti mobil 4 *wheel drive* dan kantor resort serta stasiun riset (untuk penginapan).

Kemudahan lain yang akan diberikan adalah dalam hal pengurusan adminitrasi perijinan berupa penerbitan surat ijin memasuki kawasan konservasi (Simaksi). Selain itu juga akan diberikan kemudahan dalam pengurusan pembawaan sampel penelitian. Kemudahan-kemudahan yang diberikan tentunya tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan.

5. Program Magang/Praktek Lapang

Patut disyukuri bahwa saat ini telah banyak putra dan putri di kampus di kota sekitar TNGHS yang memiliki jurusan terkait lingkunga/hutan/biologi jarang sekali dari mereka yang mau melakukan program magang atau praktek lapangnya di kawasan TNGHS. Keberadaan TNGHS haruslah dimaksimalkan oleh generasi-generasi muda, dengan melakukan program magang atau praktek kerja, sehingga para mahasiswa dapat melihat dan merasakan langsung riil pengelolaan kawasan

konservasi, mahasiswa dapat terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan. Pengalaman yang mereka dapatkan adalah modal utama untuk penyelesaian tugas kuliahnya dan paling penting adalah akan menjadi bekal penting dalam dunia kerjanya pada suatu saat nanti. Pada sisi lain, hal positif yang didapatkan pihak Balai TNGHS dari pelaksanaan program magang atau praktek kerja mahasiswa adalah adanya masukan dan saran-saran kongkrit oleh para mahasiswa untuk perbaikan pengelolaan kawasan konservasi.

Langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan untuk meningkatkan minat para mahasiswa melakukan program magang atau praktek lapang di TNGHS adalah secara aktif mensosialisasikan kondisi, potensi, fasilitas yang disediakan dan informasi lainnya kepada perguruan tinggi melalui media sosial atau kunjungan langsung ke kampus.

6. Optimalisasi Stasiun Penelitian

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian para peneliti untuk pelaksanaan penelitiaannya adalah keberadaan stasiun penelitian. Saat ini di dalam Kawasan TNGHS terdapat satu stasiun penelitian yang berada di Resort Cikaniki dan Stasiun penelitian di Resort Cikaniki, awal didirikan pada saat TNGHS bekerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) pada tahun 1998-2009. Lokasi stasiun penelitian di Cikaniki yang berada pada ketinggian 1000 mdpl dianggap representatif mewakili kondisi hutan di TNGHS.

Stasiun penelitian kedua adalah Pusat Suaka Satwa Elang Jawa (PSSEJ) yang berada di Kampung Loji, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk. Sejarah berdirinya PSSEJ dari kesepakatan antara Balai TNGHS dengan 12 lembaga

(Pemerintah, Swasta dan LSM) pada tanggal 21 November 2007 untuk membentuk perukumpulan Suaka Elang di kawasan TNGHS. Pada tahun 2015 melalui keputusan Direktur Jenderal KSDAE SK No. 30/KSDAE-KKH/2015 tanggal 28 Desember 2015 Suaka Elang ditetapkan sebagai Pusat Suaka Satwa Elang Jawa dengan otoritas pengelolaan sepenuhnya berada dibawah tanggung jawab TNGHS. PSSEJ memiliki fungsi sebagai Pusat Penelitian, konservasi, dan rehabilitasi burung pemangsa (*Raptor*).

8.1.3 Monitoring, Evaluasi, dan Publikasi

1. Reguler Meeting

Ruang untuk melakukan komunikasi secara rutin dan intens antara pengelola TNGHS dengan para peneliti atau lembaga peneliti dapat dikatakan sangat minim atau bahkan tidak ada. Guna mendukung efektifitas pengelolaan, banyak aspek yang perlu dilakukan kajian oleh peneliti di TNGHS, namun tidak terlaksana, disisi lain banyak peneliti yang ingin melakukan penelitiannya di TNGHS namun juga tidak terlaksana. Satu hal yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya komunikasi diantara kedua belah pihak.

Salah satu upaya yang akan dilakukan guna meningkatkan kesempatan berkomunikasi dengan para pihak, maka akan dilakukan agenda tahunan berupa simposium hasil-hasil penelitian di TNGHS. Pelaksanaan kegiatan ini akan mengundang para peneliti, perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian, dll.

2. Publikasi Hasil

Salah satu kelemahan pemerintah khususnya para pengelola kawasan konservasi adalah kurangnya publikasi terhadap hal-hal positif atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan. Sering sekali ada anggapan bahwa pengelolaan yang dilakukan adalah sesuatu yang rutin dan cukup dipahami dan diketahui pihak internal saja. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat serius menggalakkan 10 cara baru pengelolaan kawasan konservasi.

Salah satu cara baru tersebut adalah para pengelola kawasan harus aktif mempublikasikan seluruh program dan kegiatan yang mereka lakukan, agar dalam setiap momen-momen penting membuat *pers release* dan melibatkan pihak media, agar seluruh unit pengelola kawasan membuat *group whats app* dengan media setempat, agar para pengelola kawasan membuat buku yang menjadi *success story* suatu program, agar pengelolaan kawasan membuat *facebook, twitter, Instagram, website* sebagai media untuk menunjukan capaian pengelolaannya.

Terhadap hal tersebut, Balai TNGHS telah menindaklanjuti dengan membuat **website** : halimunsalak.org, **Instagram** : btn_gn_halimunsalak, **Youtube** : btn_gn_halimunsalak.

Upaya kedepan yang akan dilakukan guna mengoptimalkan publikasi hasil-hasil penelitian adalah memposting hasil-hasil tersebut kedalam media-media yang telah dibuat. Selain itu akan dilakukan penyampaian hasil-hasil penelitian bersamaan pada saat regular meeting.

8.2. Roadmap Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS

Roadmap Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS tidak terlepas dan mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) yang tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030.

Target capaian pembangunan sektor kehutanan dalam RKTN 2011-2030 adalah pembangunan kehutanan berkelanjutan (*Sustainable Forest Development*) yang berbasis ekologi, ekonomi, dan sosial.

Untuk Kawasan Konservasi di Indonesia orientasi pengelolaannya ditujukan untuk konservasi sumberdaya hutan yang berprinsip pada perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Kawasan konservasi merupakan sumber plasma nutfah atau sumber daya genetik, oleh karena itu upaya perlindungan dan pengawetan merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu produk hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan serta wisata alam harus menjadi komoditas unggulan sektor kehutanan dalam arahan kawasan untuk konservasi.

Pemanfaatan dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu seperti tumbuhan dan satwa liar baik jenis maupun genetik, produk jasa lingkungan seperti karbon, air dan energi panas bumi di kawasan konservasi khususnya di taman nasional harus menjadi prioritas dan perlu didukung oleh regulasi yang tepat dan efektif.

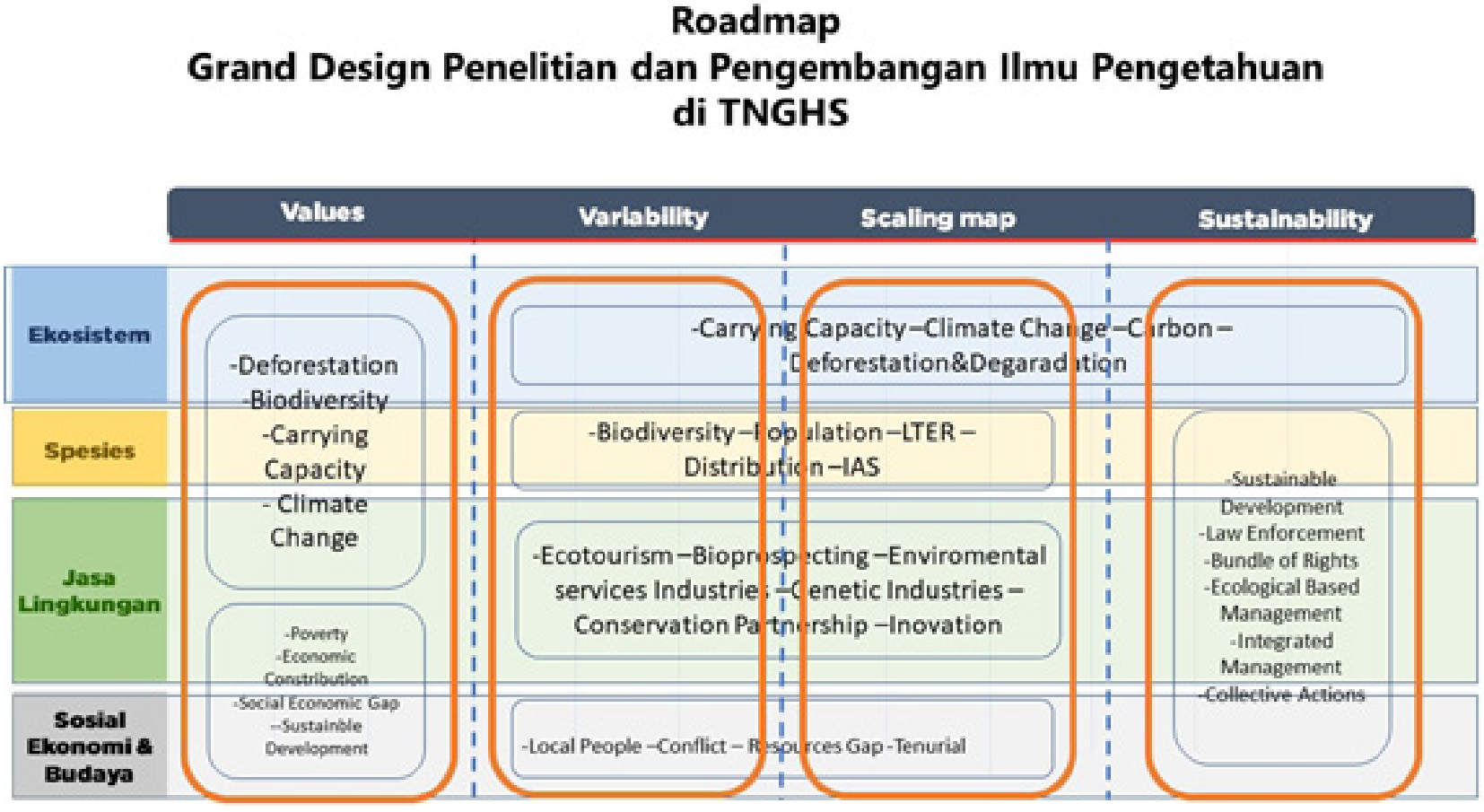
Taman Nasional				
Karbon	**Air**	**Wisata Alam**	**Panas Bumi**	**Tumbuhan dan Satwaliar**
2,96 Gigaton Karbon	*** 1300 Juta m^3** *** 3,2 Mega Watt**	**1,2 Juta Ha (Zona Pemanfaatan di Taman Nasional)**	**1.134 Mega Watt**	*** Dana Konservasi 236 Species** *** Genetik dan Mikroba**

Source : Roadmap 2010-2030 Pembangunan Kehutanan Berbasis Taman Nasional

Pemanfaatan di kawasan konservasi juga harus tetap memperhatikan perlindungan dan pengawetan, sebagai bagian dalam pencegahan kerusakan sistem penyangga kehidupan. Biaya pemulihan dari rusaknya sistem penyangga kehidupan akibat banjir, longsor, erosi atau bencana lainnya harus diperhitungkan sebagai nilai ekonomi dari kawasan konservasi.

Dalam mencapai target nasional tersebut di wilayah kawasan konservasi tentu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sangat berperan penting dalam menyingkap semua potensi yang ada sekaligus diharapkan muncul sebuah inovasi dari pengembangan potensi yang ada di dalam kawasan konservasi yang berdayaguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Maka dari itu, *roadmap* penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di TNGHS sangat bersifat fleksibel dan tidak terbatas pada topik/tema/objek tertentu saja, karena akan sangat memungkinkan lintas disiplin ilmu dan kombinasi antar objek penelitian namun masih dalam koridor kebutuhan penelitian untuk kepentingan pengelolaan TNGHS. Bila digambarkan roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan seperti disajikan pada gambar berikut.



Gambar VIII.1 Road Map Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS Tahun 2021 – 2027.

8.3. Isu dan Arah Tranformasi Kehutanan Tahun 2011-2030

Penyusunan *roadmap* penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di TNGHS tidak terlepas dari isu dan arah transformasi kehutanan seperti yang tertuang pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

8.3.1. Isu Pengurusan Hutan

Isu pengurusan hutan berisi tiga aspek besar, yaitu Isu sosial, lingkungan, ekonomi dan lintas aspek dalam pengurusan hutan:

8.3.1.1. Aspek Sosial

a. Keberdayaan masyarakat adat/lokal di dalam dan sekitar hutan
b. Konflik atas kawasan hutan dan pengelolaan hutan
c. Ketimpangan struktur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan
d. Tenurial kehutanan

8.3.1.2. Aspek Lingkungan

a. Deforestasi, degradasi hutan dan kerusakan sumberdaya hutan
b. Kelestarian keanekaragaman hayati dan ekositem
c. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan
d. Perubahan iklim

8.3.1.3 Aspek Ekonomi

a. Kemiskinan masyarakat di sekitar hutan dan perdesaan
b. Kontribusi kehutanan dalam perekenomian
c. pembangunan nasional dan daerah
d. Ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi
e. Keberlangsungan pembangunan berbagai sektor dan pengembangan wilayah

8.3.1.4 Lintas Aspek

a. Tata kelola dan sumberdaya hutan dan ekosistem
b. Desentralisasi pengurusan hutan dan penyelenggaraan kehutanan
c. Penegakan hukum dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan ekosistem
d. Peran penting kehutanan Indonesia dalam geopolitik regional dan global

8.3.2. Arah Transformasi Tata Kelola Kehutanan

a. Pergeseran fokus tata kelola kehutanan tidak hanya aspek produksi, konservasi dan lindung, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan sosial.
b. Pergeseran dari tata kelola hutan negara menjadi hutan negara dan hutan hak
c. Pergeseran pelaku utama pemanfaatan hutan dari pemerintah dan usaha skala besar menjadi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat lokal/adat, Perorangan dan Badan Usaha.
d. Pergeseran peran pemerintah dari regulator dan pelaksana menjadi regulator, fasilitasi, dan pengendalian pengelolaan hutan serta monitoring dan evaluasi.
e. Pengembangan kriteria penilaian kinerja dari yang berbasis jumlah kriteria parsial, standar nasional, statis dan indicator fisik menjadi sistem fungsional, multistandar berbasis tipologi kawasan, dinamis fungsional serta indikator fungsi dan fisik
f. Pergeseran satuan tata kelola kehutanan dari yang berbasis unit fungsional vertikal dan DAS menjadi yang berbasis unit fungsi, unit pengelola kawasan hutan (pengarusutamaan KPH) dan wilayah ekologis (DAS, KHG, dll.)
g. Penguatan instrumen tata kelola tidak hanya berbasis zonasi, sanksi dan izin tetapi juga sistem imbal jasa, insentif/disinsentif dan ragam hak akses (*bundle of rights*).

8.3.3 Arah Transformasi Usaha Kehutanan

a. Pengembangan usaha kehutanan tidak hanya berbasis pada nilai pasar dan produksi komoditas, tetapi juga jasa lingkungan, jasa sosial, dan fungsi penyangga kehidupan

b. Pengembangan multi usaha kehutanan yang tidak hanya berbasis kayu tetapi juga kawasan, jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu termasuk industri genetik.
c. Pergeseran industri kehutanan dari yang berbasis komoditas biomass menjadi industri komoditas bio masa, industri jasa lingkungan dan industri genetik.
d. Pergeseran prioritas usaha dari yang berskala besar menjadi usaha yang berbasis skala keekonomian, kemitraan dan inovasi.
e. Pergeseran komoditas unggulan dari yang berbasis bahan mentah dan produk olahan kayu menjadi ragam komoditas yang bernilai tambah tinggi.
f. Pengembangan industri kehutanan yang terintegrasi dengan pengelolaan hutan dan pembangunan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 2017. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Gunung Halimun Salak Tahun 2018-2027. Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 2020. Rencana Strategis Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak Tahun 2020-2024. Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 2020. Zona Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Luas ± 87.699 Hektar. Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Giri, M Misbah Satria, dan Ahmad Munawir. 2021. Rumah Kembali Kajian Kesesuaian Habitat dan Penentuan Lokasi Pelepasliaran Lima Jenis Satwa di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Periode Tahun 2021-2025. Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Wiratno. 2018. Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia: Membangun "Organisasi Pembelajar". Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LAMPIRAN: REKAPITULASI PENELITIAN DI TNGHS TAHUN 2001-2021

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
1	Sri Sulandari,dkk;2001;Jurnal	Collection Of Material DNA Samples From Birds In The Gunung Halimun National Park (GHNP) For Establishing Of Dna Bank	The 19- endemic birds found in GHNP are important species in term of conservation. Results observed from this initial effort may be useful for further genetic studies involving collaboration between Indonesia and Japanese institutions or other worldwide. 19 burung endemik yang ditemukan di TNGHS adalah spesies penting dalam hal konservasi. Hasil observasi dari upaya awal ini mungkin berguna untuk studi genetik lebih lanjut yang melibatkan kolaborasi antara Indonesia dan institusi Jepang atau lainnya di seluruh dunia.	
2	Sih Kahono,dkk;2001;Jurnal	Fluktuasi Curah Hujan Dan Komunitas Serangga Di Hutan Tropis Taman Nasional Gunung Halimun	1. Fluktuasi curah hujan di TNGH tidak menunjukkan pola pergantian musim yang jelas (*non seasonal*), namun curah hujan cenderung menurun pada bulan Juni sampai September. 2. Pada umumnya tidak pernah terjadi bulan kering (bulan <100 mm), kecuali pada saat terjadi fenomena El Nino. 3. Komunitas serangga yang dikoleksi dengan LT berfluktuasi seirama dengan fluktuasi curah hujan, sebaliknya yang dikoleksi dengan PFT berfluktuasi tidak teratur atau cenderung berbalikan dengan irama fluktuasi curah hujan.	Penelitian lanjutan tentang fenologi diharapkan dapat memperjelas terjadinya pola fluktuasi komunitas serangga tersebut. Perubahan lingkungan lokal dan global yang akan datang akan dapat diketahui dengan melakukan penelitian dengan metode yang sama dengan data dasar yang telah terkumpul ini.
3	Tri Atmowidi,dkk;2001;Jurnal	Keanekaragaman Diptera (Insecta) Di Gunung Kendeng Dan Gunung Botol, Taman Nasional Gunung Halimun, Jawa Barat	Keragaman Diptera di Gunung Kendeng lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Botol. Kesamaan Diptera antara Gunung Kendeng dan Gunung Botol sebesar 60%. Kesamaan Diptera antar lokasi di Gunung Kendeng lebih kecil (63%) dibandingkan dengan Gunung Botol (73%). Diptera yang ditemukan dominan di Gunung Kendeng dan Gunung Botol adalah Sciaridae, Chironomidae, Mycetophilidae, Tipulidae (*Subordo nematocera*), Phoridae, Dolichopodidae, Milichidae, dan Sphaerocerida (*Subordo brachycera*).	
4	Heryanto;2001;Jurnal	Snails Composition In The Southern Part Of Gunung Halimun National Park	It can be concluded that in a location of various habitat the snail composition is also diverse. Most of the snails are live in the habitat that conform with their foremost requirement such as moisture, food and protection.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
5	Dewi M. Prawiradilaga;2001;-Jurnal	Diversity And Distribution Of Raptors At Gunung Halimun Salak National Park With Particular Reference To Javan Hawk Eagle.	1. There were 17 raptor species recorded at Gunung Halimun National Park. (Ada 17 Jenis Burung Pemangsa yang tercatat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak) 2. The Crested Serpent-eagle, Black Eagle and Javan Hawk-eagle were common and recorded in many locations. (Elang Ular Bido, Elang Hitam dan Elang Jawa adalah Jenis yang biasa dijumpai dan tercatat dibanyak lokasi) 3. The Javan Hawk Eagle distributed widely and was recorded at 14 locations: G. Halimun Utara, G. Buligir Putih, Pasir Cangkuang, G. Malang, West Halimun, G. Bodas, G. Tumpeng, G. Citimur, G. Bengreng, G. Batu, Cadas Mahpar, G. Kempul, G. Kendeng and G. Botol. (Elang Jawa memiliki distribusi yang luas dan tercatat di 14 Lokasi) 4. The total number of Javan Hawk-eagles in the studied areas excluding West Halimun ranged between 36 and 37 individuals (16 pairs and 4 or 5 young). (Total jumlah Elang Jawa dalam penelitian termasuk di Halimun Barat antara 36 individuu dan 37 individu yang terdiri dari 16 Pasang, 4 atau 5 elang remaja)	
6	Dewi M Prawiradilaga, dkk;2001;Jurnal	Feeding Ecolgy of The Java Hawk Eagle (*Spizaetus bartelsi*) during the nestling food	Small mammals in particular squirrels and treeshrews were the most important prey for the Javan Hawk eagle during nestling period, Both parents brought prey to the nest for their nestling. However, the male did it more often in the morning and the female in the afternoon. The estimated number of prey brought to the nest during nestling period ranged between 109 and 116 individuals of small mammals. Mamalia kecil khususnya tupai dan pohon adalah yang paling penting bagi Elang Jawa selama periode bersarang, Keduanya indukan membawa mangsa ke sarang. Namun, jantan membawa mangsa lebih sering di pagi hari dan betina di sore hari. diperkirakan jumlah mangsa yang dibawa kesarang selama periode bersarang berkisar antara 109 dan 116 individu mamalia kecil.	
7	Farni Joan Patricia Kastanya;2001;Skripsi	Landscape Characteristic of Java Hawk Eagle Habitat Using Remote Sensing and GIS in Western Part of Java	1. According to the 29 sites of locality records from the existed data, habitat of javan haw-eagle in western part of java are distributed at the mouitainous and forested areas. Habitat distibution are clustered in 3 landscapes are include : (1) Gede - Pangrango NP, Halimun NP, and Salak MT. at central mountain complex (Lamdscape A). with 15 existed locality records. (2) Burangrang and Tangkuban Prahu, Mts. at Southern Bandung (Landscape B) with existed locality records. (3) Situ Patengan, Malabar, Patuha and Tilu Mts. at northern Bandung (Landsacpe C) with 12 existed locality records 2. Result of Hbaitat preference analysis, using landscape structure and principal component Analysis reinforce the interpretation of most desirable habitat of javan hawk eagle, which are : Forest, Tea Palntation, and Mix Vegetation elevation and slope condition The Dygital nature of land cover information from satelite imagery in remote sensing enables a potentially large number of landscape matrices to be derived and cover large covered area, at relatively fine spatial (typically 10 - 30 meters). GIS is used for storing, retrieving, maintaining, manipulating, analyzing, and producing the digital and hard copy format of spatial data. GIS improve remote sensing information in extraction capabilities. its also support spatial statistical analysis of ecological distribution	1. Study the level of human disturbance on javan hawk eagle habitat's that can be tolerance by the species 2. Collect data of locality records more manageable with complete information of the time, location and place 3. Provide complete digital, as basic geographic information system (GIS) layers, about physical condition of the habitat such as hydrography, soil types, stream locations, elevations, slope, and aspect which used to characterize the area

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
8	Ike Rachmatika,dkk;2002;-Jurnal	Fish Diversity in Cibareno River, Gunung llalimun National Park: its unique assemblage, management, and conservation consideration	There were 29 fish species found, consisting of primary marine, estuarine, secondary and primary freshwater. These mostly belong to Gobioids (30 %), then followed by Cyprinidae (6.6%), Eleohididae (6.6%), Syngnathidae (6.6%), Anguillidae (6.6 o/o). The others are Apogonidae, Carangidae, Elopidae, Mugilidae, Muraenidae, Scorpaenidae, Teraponidae, Belontidae, Channidae, Sisoridae, Poecilidae, Rhyacichthydae that each represent one species or 3.33 %	In line with the effort to increase individual income in the area, segment of the river (for instance stretching for l0 - 20 km) from the mouth of the river could function as scientific and/ or adventurous tourism. It is attributable to the fact that Cibareno River meanders throughout deep, nanow valley with a natural, beautiful landscape, Fishing angling with lisence in this area could be performed. Providing guidance, producing unique fish product from this area (such as fried impun that is wrapped by material available in site such as bambo- handycraft etc.) could be one of alternatives. Cultural heritage existing at the middle/upsfieam area could enhance the natural beauty.
9	Dewi M Prawiradilaga, dkk;2002;Jurnal	Monitoring The Bird Community At G. Kendeng-Gunung Halimun National Park	1. The diversity of arboreal species was similar with the ground species. 2. *Cinclidium diana*, *Ficedula dumetoria*, and *Arachnothera longirostra* were found almost at any time. 3. *Arachnothera longirostra* was more abundant than any other species in the area.	
10	Agus P Kartono,dkk;2002;-Jurnal	Variasi Aktivitas Harian *Hylobates Moloch* (Audebert, 1798) Menurut Kelas Umur di Tn Gunung Halimun, Jawa Barat	Owa jawa di TNGH melakukan aktivitas hariannya yang berlangsung antara pukul 06.00 hingga 17.15 WIB. Rata-rata alokasi waktu untuk aktivitas makan terbesar dilakukan oleh individu muda; sedangkan bergerak paling banyak dilakukan oleh individu anak. Aktivitas istirahat paling banyak dilakukan oleh individu bayi dan untuk aktivitas sosial paling banyak dilakukan oleh individu anak dalam bentuk aktivitas bermain. Alokasi waktu bagi owa jawa di TNGH dipcnganihi oleh kelas umur dan kondisi habitatnya. Perbedaan kelas umur dan kondisi habitat ini selanjutnya mempengaruhi sebaran jumlah individu aktif pada ketiga lokas yang berbeda dari waktu ke waktu. Sebaran individu aktif di Cikaniki berpola bifasik, di Ciawitali berpola multifasik dan di Pasir Bivak berfluktuasi. Rata-rata jumlah individu aktif paling banyak ditemukan adalah pada periode 06.30 sampai 09.00.	1. Pengamatan terhadap *Hylobates moloch* untuk tujuan inventarisasi sebaiknya dilakukan pada pagi hari (06.30-12.00) atau sore hari (15.00-17.00) karena pada periode tersebut dapat ditemukan jumlah individu aktif terbanyak, 2. kunjungan wisatawan untuk tujuan pengamatan *H. moloch* sebaiknya dilakukan pada saat satwa sedang istirahat (13.00-15.00) agar tidak mengganggu aktivitasnya dan pengunjung dapat melihat keberadaan satwa dengan jela, 3. Pelestarian owa jawa di TNGH diprioritaskan pada pengelolaan habitat, dan 4. Penggalian informasi tentang jalur pergerakan dan mengusahakan agar jalur tersebut terhindar dari rumpang cara penanaman vegetasi yang mendukung pergerakan dan aktivitas harian owa jawa.
11	Dewi M Prawiradilaga, dkk;2004;Jurnal	Additional New Records of Birds of Gunung Halimun National Park Based on Bunding Studies	Terdapat tiga catatan baru jenis burung yang berhasil diidentifikasi di TNGHS wilayah Resort Cikaniki yaitu : 1. Rajah Scopsowl (*Otus brookii*); 2. Sunda Frogmouth (*Batrachostomus cornutus*); 3. Blue-banded Kingfisher (*Alcedo euryzona*); 4. Banded Broadbill (*Eurylaimus javanicus*); 5. Siberian Blue Robin (*Erithacus cyane*); 6. Eastern Reed-warbler (*Acrocephalus orientalis*); 7. Golden-bellied Gerygone (*Gerygone sulphurea*); 8. Brown-chested Jungle-flycatcher (*Rhinomyias brunneata*); 9. Asian Brown Flycatcher (*Muscicapa dauurica*); 10. Ferruginous Flycatcher (*Muscicapa ferruginea*); 11. Scarlet-backed Flowerpecker (*Dicaeum cruentatum*); 12. Mountain White-eye (*Zosterops montanus*) and 13. Javan Grey-throated White-eye (*Lophozopterops javanicus*).	Catatan: Jenis Sunda Frogmouth (*Batrachostomus cornutus*), Brown-chested Jungleflycatcher (*Rhinomyias brunneata*) and Asian Brown Flycatcher (*Muscicapa dauurica*) are the new record species for Java island merupakan catatan jenis baru di Pulau Jawa Jenis Siberian Blue Robin and Eastern Reed-warbler adalah jenis burung migran (Mac Kinnon, 1988) Saran: Perlu dilakukan penelitian dengan wilayah penelitian yang lebih luas di wilayah TNGHS

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
12	Pudji Aswari;2004;Jurnal	Ekologi Capung Jarum Calopterygidae: *Neurobasis Chinensis* Dan *Vestalis Luctuosa* Di Sungai Cikaniki, Taman Nasional Gunung Halimun	1. Di TNGH terdapat dua jenis capung jarum Calopterygidae yaitu jenis *N. chinensis* dan *V.luctuosa* 2. Dari pengamatan diketahui bahwa capung jenis *chinensis* ditemukan pada ketinggian 700 - 1200 m, dengan habitat hanya pada ruas-ruas tertentu dari sungai dan cenderung di tempat-tempat terbuka. Capung jenis *V. luctuosa* bisa ditemukan hingga ketinggian 1500 m, dan hampir pada keseluruhan ruas sungai yang diamati baik pada tempat-tempat terbuka maupun terlindung.	
13	Ike Rachmatika;2004;Jurnal	Fauna Ikan Di Sungai Cimadur, Ciujungdan Ciberang Di Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun, Kabupaten Lebak, Banten	Ditemukan 30 Jenis Ikan di DAS Ciujung, Ciberang, dan Cimadur, Terdapat tambahan 6 Jenis baru yang menambah keanekaragaman ikan di TNGH menjadi 60 Jenis. Terdapat aktivitas yang menggangu kelestarian fauna akuatik (ikan) yaitu penggalian pasir dan PETI	
14	Agustinus Suyanto,dkk;2004;-Jurnal	Keragaman Mamalia di sekitar daerah Penyangga Taman Nasional Gunung Halimun, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak	Dijumpainya empat jenis catatan baru bagi TNGH serta satu jenis koleksi baru bagi Museum Zoologicum Bogoriense menunjukkan bahwa di daerah penyangga masih sangat potensil untuk didapatkan berbagai jenis mamalia yang belum tercatat. Total 16 jenis di lokasi penelitian	Adanya penangkapan berlebihan terhadap kelompok Eonycteris perlu ditindak lanjuti dengan penelitian mengenai tingkat pemanfaatan serta laju reproduksi jenis satwa yang menjadi target buruan
15	Fiqoh Walida Shofwan;2006;Skripsi	Interaksi Burung dan Tumbuhan Di Kawasan Koridor Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	Terdapat 58 jenis burung yang berinteraksi dengan tumbuhan di kawasan koridor TNGHS yang berhasil diamati. Umumnya burung-burung tersebut lebih sering berinteraksi dengan jenis-jenis tumbuhan yang banyak dijumpai di kawasan koridor, seperti puspa (*Schima wallichii*), kaliandra (*Caliandra calothyrsus*), rasamala (*Altingia excelsa*), dan semak. Keanekaragaman jenis tumbuhan di suatu kawasan akan sangat berpengaruh terhadap keanekaragaman jenis burung yang ada. Aktifitas makan dan bermain burung lebih banyak terjadi pada pagi hari kisaran pk. 07.00-09.00, sedangkan aktifitas istirahat cenderung terjadi pada sore hari sekitar pk. 14.00-15.00. Aktifitas bersarang akan banyak dijumpai pada kondisi lingkungan yang cocok untuk berbiak.	Perlu dilakukan pengamatan lanjutan terhadap aktivitas bersarang pada burung-burung di kawasan koridor TNGHS pada waktu pengamatan yang berbeda untuk memperoleh data pembanding terhadap interaksi yang terkadi.
16	Sutomo;2006;Skripsi	Potensi Keberadaan Mangsa Macan Tutul (*Panthera pardus melas* Cuvier, 1809) di Koridor Antara Gunung Halimun dan Gunung Salak	1. Dijumpai dua individu macan tutul di koridor antara Gunung Halimun dan Gunung Salak. Macan tutul yang berada di koridor berasal dari habitat Gunung Salak dan Gunung Halimun. Macan tutul menggunakan koridor sebagai tempat mencari makan (feeding area). Terdapat 8 jenis satwa mangsa macan tutul di koridor antara Gunung Halimun dan Gunung Salak, surili (*P. aygula aygula*), lutung (*T. cristatus sondaicus*), babi hutan (*S. scrofa*), pelanduk (*T. javanicus*), muntjak (*M. muntjak*), trenggiling (*M. javanica*), landak jawa (*H. brachyura*) dan owa jawa (*H. moloch*) 2. Lutung merupakan mangsa dengan populasi terbesar di koridor. Lutung populasinya ±197 individu yang dapat dijumpai secara langsung di koridor. Populasi mangsa terbesar ke-2 surili ±111 individu .Babi hutan diduga memiliki populasi terbesar ke-3, berjumlah 85 individu tinggal di sepanjang koridor. Populasi landak 50 individu, tinggal pada daerah yang dijumpai gowa batu. Jenis yang hanya tinggal di ujung barat dan timur adalah owa jawa dengan populasi dugaan sebesar ±37 individu. Populasi trenggiling berada di wilayah yang banyak tumbuhan pakis, diduga populasi trenggiling berjumlah ±43 individu. Jenis mangsa yang diduga paling sedikit populasinya adalah muntjak dan kancil, muntjak 6 ekor dan kancil 5 ekor. 3. Permasalahan koridor sebagai tempat mencari makan adalah akses manusia yang begitu tinggi, yang membatasi mobilitas macan tutul untuk menangkap mangsa. Sebagai feeding area dan habitat satwa koridor sangat terganggu karena penebangan liar dan perkebunan, semak belukar meluas dan proses regenerasi pepohonan terganggu. Proses regenerasi pohon yang terganggu menyebabkan berkurangnya sumber pakan dan diskontinuitas tajuk sehingga menghambat pergerakan primata terutama owa jawa.	1. Dilakukan pemulihan areal dengan penaman jenis lokal untuk mengatasi permasalahan proses regenerasi pohon yang terganggu misalnya jenis rasamala, saninten, pasang, ramogiling, kanyere dan jenis-jenis lainya yang diidentifikasi sebagai pakan satwa. 2. Perlunya kunjungan rutin oleh petugas Taman Nasional ke kampungkampung sekitar hutan untuk membina hubungan baik dengan penduduk. 3. Pemberdayaan masyarakat sebagai satuan pengaman hutan. 4. Menghimbau kepada penduduk setempat dan pengelola perkebunan the untuk menggunakan bahan-bahan biologis yang ramah lingkungan untuk menghindari biomagnifikasi terhadap satwa-satwa di koridor

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
			3. Permasalahan koridor sebagai tempat mencari makan adalah akses manusia yang begitu tinggi, yang membatasi mobilitas macan tutul untuk menangkap mangsa. Sebagai feeding area dan habitat satwa koridor sangat terganggu karena penebangan liar dan perkebunan, semak belukar meluas dan proses regenerasi pepohonan terganggu. Proses regenerasi pohon yang terganggu menyebabkan berkurangnya sumber pakan dan diskontinuitas tajuk sehingga menghambat pergerakan primata terutama owa jawa.	
17	Adhi Rachmat Hariyadi;2006;Jurnal	Assessment Of Halimun-Salak National Park As A Potential Site For Establishing The Second Population Of Javan Rhinoceros (*Rhinoceros Sondaicus*)		In order to set up a second Javan rhinoceros population, new habitat in Halimun-Salak NP must be prepared both ecologically and anthropologically (working with local people).. - Untuk mendirikan populasi badak Jawa kedua, habitat baru di NP Halimun-Salak harus disiapkan baik secara ekologis maupun antropologis (bekerja sama dengan masyarakat setempat)..
18	Dewi M. Prawiradilaga;2006;Jurnal	Ecology and conservation of endangered Javan Hawk-eagle (*Spizaetus bartelsi*)		
19	Helianthi Dewi,dkk;2007;Jurnal	Pemetaan Kesesuaian Habitat Owa Jawa (*Hylobates moloch* Audebert 1797) di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	1. Habitat dengan tingkat kesesuaian rendah (846,27 Ha), letaknya terpencar di seluruh kawasan TNGHS, terutama di koridor barat dan timur, sebelah utara perkebuan the Nirmala, dan di sebelah barat dan utara perkebunan the Cianten. Daerah ini terutama diciri-kan dengan jenis penutupan non hutan, dengan ketinggian antara 500-1.250 m dpl, berjara jauh dari sungai, dan berjarak dekat hingga sedang dari jalan. 2. Habitat dengan tingkat kesesuaian sedang (12.311,9 Ha). Daerahnya menyebar di seluruh taman nasional. Ciri umumnya adalah terdapat pada penutupan lahan yang bervariasi, ketinggian bervariasi, jarak yang jauh dari jalan, dan berjarak sedang hingga jauh dari sungai. 3. Habitat dengan tingkat kesesuaian tinggi (24.624,2 Ha). Ciri utama daerahnya berupa hutan primer, kemiringan lereng curam hingga sangat curam, berjarak jauh dari jalan, dan terutama terdapat di sepanjang aliran sungai.	Fragmentasi habitat yang terjadi tidak hanya mengancam kehidupan owa jawa di TNGHS, tetapi juga bagi satwa maupun tumbuhan yang lain. Upaya rehabilitasi pada daerah koridor (barat dan timur) perlu dilakukan untuk mempersempit luas habitat dengan tingkat kesesuaian rendah.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
20	Wim Ikbal Nursal;2007;Tesis	Stand-alone GIS Application for Wildlife Distribution and Habitat Suitability (Case Study: Javan Gibbon, Gunung Salak, West Java)	1. Penelitian ini menunjukkan pengembangan sistem pemetaan yang digunakan untuk menghasilkan informasi kesesuaian habitat dalam format grid berbasis vektor. Hal ini didukung oleh transformasi grid berbasis vektor, alat dasar geo-processing, pembuatan data ekogeografis, pemetaan distribusi spesies, perhitungan bobot berdasarkan data keberadaan spesies, dan perhitungan skor kesesuaian. Melalui SUITSTAT, pengguna dapat secara dinamis memilih data spasial yang mewakili faktor habitat, memodifikasi kriteria dan kendala, dan menghitung skor. 2. Berdasarkan model kesesuaian habitat yang dikelompokkan menjadi 5 kelas, kawasan Gunung Salak didominasi oleh kelas yang sesuai. Luas wilayah dengan nilai lebih dari kelas sesuai sedang meliputi 52,39 km2 atau 39,5% dari total luas 132,78 km2. 3. Dua kelompok owa jawa masing-masing berada pada kesesuaian habitat yang kurang dan rendah, 13 kelompok pada kesesuaian habitat yang sedang, 9 kelompok pada habitat yang sesuai dan 3 kelompok pada kesesuaian habitat yang tinggi.	Penelitian ini merekomendasikan beberapa ide untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem ini: 1) Mengembangkan sistem modular yang dapat menggabungkan banyak algoritma dalam menentukan kesesuaian habitat. 2) Sistem yang dapat membaca atau mengintegrasikan berbagai format data spasial dapat menjanjikan karena tidak ada format tunggal yang dapat mewakili data habitat. 3) Pengembangan lebih lanjut lebih mungkin dibangun dengan lebih baik di bawah perangkat lunak GIS open-source yang tersedia (sebagai ekstensi) mempertimbangkan efektivitas biaya, pemanfaatan kerangka modular, dan ketersediaan fungsi geo-prosessing yang komprehensif. Beberapa software GIS open source yang dapat digunakan adalah Quantum GIS (http://qgis.org) dan Jump Project. 4) Sistem yang akan datang adalah penyediaan informasi melalui internet (informasi kesesuaian berbasis web) bisa menjadi tantangan terbesar. Setidaknya, harus menerapkan utilitas internet yang paling relevan, yaitu pengambilan data dari banyak penyedia data yang datanya digunakan sebagai input untuk model kesesuaian. 5) Terkait dengan konservasi owa jawa, beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah: 1. Menyediakan database spasial untuk data sebaran siamang untuk memudahkan pemantauan spesies ini di Gn. Salak. 2. Otoritas pengelola disarankan untuk mulai mengembangkan rencana pemantauan untuk kelompok owa jawa yang tinggal di daerah rendah sesuai.
21	Roni Koneri,dkk;2007;Disertasi	Bioekologi dan Konservasi Kumbang Lucanid (Coleoptera : Lucanidae) di Hutan Gunung Salak Jawa Barat	Gangguan terhadap hutan di Gunung Salak berpengaruh terhadap struktur dan komposisi vegetasi. Pada hutan terganggu terjadinya penurunan kerapatan, luas bidang dasar dan penutupan tajuk pohon serta volume jatuhan kayu lapuk. Terjadinya perubahan vegetasi dan jatuhan kayu lapuk berpengaruh terhadap struktur komunitas kumbang lucanid (kelimpahan, kekayaan, nilai keanekaragaman dan kemerataan spesies). Terdapat kecenderungan semakin terganggu habitat maka kelimpahan, kekayaan dan nilai keanekaragaman spesies kumbang lucanid semakin rendah. Berdasarkan ketinggian tempat nilai kelimpahan, kekayaan dan keanekaragaman spesies kumbang lucanid semakin rendah dengan bertambahnya ketinggian tempat. Faktor lingkungan yang paling berpengaruh terhadap struktur komunitas kumbang lucanid adalah volume jatuhan kayu lapuk, sedangkan distribusi spesies kumbang lucanid dipengaruhi oleh tebal serasah.	1. Mengingat begitu seriusnya pengaruh perburuan, kerusakan habitat dan keberadaan lampu penerangan PLTP Gunung Salak terhadap keberadaan kumbang lucanid di hutan Gunung Salak, maka diharapkan kepada pihak terkait hendaknya menerapkan apa yang dihasilkan oleh penelitian ini. 2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang: a) fluktuasi populasi kumbang lucanidae di alam dan yang dijual, b) biologi kumbang Lucanid yang bernilai ekonomis tinggi (Allotopus rosenbergi), dan c) pengaruh jenis kayu lapuk dan makanan terhadap perkembangan larva kumbang lucanid pada kondisi laboratorium dan di alam.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
			Fluktuasi populasi kumbang lucanid di lapang secara umum tertinggi pada bulan April dan Mei, sedangkan hasil pengumpulan oleh masyarakat untuk dijual tertinggi bulan Oktober dan Nopember. Waktu yang dibutuhkan oleh kumbang lucanid (*Odontolabis bellicosa*) mulai dari telur menjadi dewasa antara 13 -23 bulan dan waktu terlama pada fase larva instar 3 (10-17 bulan). Perdagangan kumbang lucanid mengakibatkan penurunan yang drastis bagi beberapa spesies kumbang lucanid terutama pada jenis-jenis yang digemari dan bernilai ekonomis tinggi. Untuk menaikan jumlah populasi kumbang lucanid maka perlu dilakukan upaya-upaya konservasi kumbang lucanid seperti: pelarangan perburuan dan perdagangan, penangkaran kumbang lucanid (in-situ dan ex-situ), mengembangkan unit-unit usaha produktif yang terdapat pada masyarakat di kawasan perburuan dan perdagangan kumbang lucanid dan pengurangan kekuatan cahaya lampu penerangan yang terdapat di lapangan panas bumi Unocal Gunung Salak.	
22	Tri Atmowidi, dkk;2007;Jurnal	Diversity of Pollinator Insects in Relation to Seed Set of Mustard (*Brassica rapa L.*: Cruciferae) (Keanekaragaman Serangga Penyerbuk dalam Kaitannya dengan Benih (*Brassica rapa L.*: Cruciferae))	This study provides insights into the importance of pollinator insects to help plant pollination, included mustard, an importance crop in the tropic. Our results indicate a diversity and abundance of pollinator insects, especially bees, plays a significant role in fruit set of mustard. Enhancement of pollinator insects as part of crop management should be considered by farmers. This could be done by a reduced use of pesticides, providing nesting sites for solitary bees, and improving pollen and nectar availability for bees. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya serangga penyerbuk untuk membantu penyerbukan tanaman, termasuk mustard, tanaman penting di daerah tropis. Hasil kami menunjukkan keragaman dan kelimpahan serangga penyerbuk, terutama lebah, yang memainkan peran penting dalam set buah mustard. Peningkatan serangga penyerbuk sebagai bagian dari pengelolaan tanaman harus diperhatikan oleh petani. ini dapat dilakukan dengan pengurangan penggunaan pestisida, Menyediakan bersarang untuk lebah soliter, dan meningkatkan serbuk sari serta ketersediaan nektar untuk lebah.	
23	TRI ATMOWIDI;2007;Jurnal	Diversity of Pollinator Insects in Relation to Seed Set of Mustard (*Brassica rapa L.*: Cruciferae)	In conclusion, this study provides insights into the importance of pollinator insects to help plant pollination, included mustard, an importance crop in the tropic. Our results indicate a diversity and abundance of pollinator insects, especially bees, plays a significant role in fruit set of mustard. Enhancement of pollinator insects as part ofcrop management should be considered by farmers. This could be done by a reduced use of pesticides, providing nesting sites for solitary bees, and improving pollen andnectar availability for bees.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
24	Hary Sutrisno;2008;Jurnal	Moth Diversity at Gunung Halimun-Salak National Park, West Java	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu pengumpulan setahun dengan empat lokasi pengambilan sampel hanya tercatat sekitar 86% dari nilai perkiraan di taman ini (846 dari 983 spesies). Keragaman indeks berdasarkan Fisher tinggi. Selain itu, jumlah famili yang tercatat juga tinggi, 29 famili, atau sekitar setengah dari famili ngengat yang ada di wilayah Indo-Malayan. 2. Citiis merupakan area tertinggi dalam hal indeks keanekaragaman ngengat dibandingkan dengan area lainnya di TNGHS, sedangkan Gunung Botol merupaka area yang terendah. Kedua area ini memiliki beberapa spesies yang sama. Secara umum, Geometridae, Noctuidae, dan Pyralidae mendominasi di semua lokasi. 3. Temuan penting lainnya dari penelitian ini adalah spesies dari famili Dudgeoneidae yang sangat langka ditemukan di lokasi Citiis selama penelitian ini (2 jantan dan 2 betina).	Penemuan spesies dari famili Dudgeoneidae yang sangat langka ini belum tercatat dari Indonesia karena kurangnya penelitian tentang genus ini. Informasi tentang biologi genus ini juga sangat minim. Namun untuk memastikan spesies ini baru dalam ilmu pengetahuan, studi yang lebih komprehensif dengan membedah alat kelamin akan segera dilakukan.
25	Rusna Sukandar;2008;Skripsi	Keanekaragaman Ordo Hymenoptera Di Daerah Tepi "Hutan Koridor" Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	Hymenoptera yang dikoleksi dari daerah tepi hutan koridor TNGHS sebanyak 25 famili. Pada daerah pertanian ditemukan 21 famili da pada daerah hutan ditemukan 21 famili. Famili Hymenoptera yang dominan di daerah tepi hutan koridor TNGHS adalah famili Formicidae, Apidae, Anthoporidae, Ichneumonidae, Vespidae, dan Colletidae. Kelimpahan Hymenoptera di daerah pertanian lebih rendah dibandingkan daerah pinggir hutan. Kesamaan Hymenoptera antara daerah pertanian tepi hutan dengan daerah pinggir hutan adalah 80%. Suhu berkolerasi positif dengan jumlah famili Hymenoptera dan kelembaban berkolerasi negatif dengan jumlah famili Hymenoptera.	Perlu dilakukan penelitian keragaman Hymenoptera yang ada di dalam hutan koridor TNGHS untuk mengetahui status kawasan tersebut dan penambahan parameter lingkungan yang diamati.
26	Niken Subekti, dkk;2008;Jurnal	Sebaran dan Karakter Morfologi Rayap Tanah Macrotermes glivus Hagen di Habitat Hutan Alam	Genus Macrotermes memiliki sebaran yang luas hampir di 100% lokasi penelitian yaitu ditemukan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan ketinggian 600-700 mdpl dan 900-1000 mdpl, Cagar Alam Yanlappa Bogor 200-300, dan Taman Nasional Ujung Kulon 0-100 mdpl. Analisis hubungan kekerabatan antar jenis Genus Macrotermes berdasarkan karakter morfologi menunjukkan bahwa di kawasan hutan alam ditemukan 1 jenis rayap dari Genus Macrotermes yaitu species Macrotermes gilvus Hagen.	
27	Hari Sutrisno;2008;Jurnal	Rekaman Baru Gunda ochracea Walker (Lepidoptera: Bombycidae) dari Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Jawa Barat	This finding is a new record for Java. So, there are at least two species of Gunda that distributed to Java i.e. *G. javanica* and *G. ochracea.* The male is a variegated, rich, rufous brown with an oblique, dark discal bar on the falcate forewing and a process from the hindwing tornus (Fig.1). The female of *G. ochracea* is a more or less uniform yellow brown with the forewings deeper, only slightly falcate (Fig. 2). The biology of this species has never been reported except its habitat preference. The species is rare in various lowland forest types. The reported species here was collected at 1000 m in Gunung Halimun-Salak National Park, while Holloway (1987) noted that his species sample has been collected at 1050 m in Mt. Kinabalu.	
28	Wim Ikbal, dkk;2008;Jurnal	Habitat Suitability of Javan Gibbon in Gunung Salak, West Java (Kesesuaian Habitat Owa Jawa di Gunung Salak, Jawa Barat)	1. Based on habitat suitability model which grouped into 5 classes, Mt. Salak area was dominated by suitable class. The area with score more than the moderate suitable class covered 52.39 km2 or 39.5% from total area 132.78 km2. 2. Two Javan gibbon groups were located for each low and less and suitable habitat, 13 groups in moderate suitable, 9 groups in the suitable habitat, and 3 groups were living in the high suitable habitat. 1. Berdasarkan model kesesuaian habitat yang dikelompokkan menjadi 5 kelas, kawasan Gunung Salak didominasi oleh kelas yang cocok. Area dengan skor lebih dari kelas rata-rata kesesuaian mencakup 52,39 km2 atau 39,5% dari total area 132,78 km2 2. Dua kelompok Owa Jawa terletak di habitat rendah dan kurang dan cocok, 13 kelompok dalam kondisi cocok sedang, 9 kelompok di habitat yang cocok, dan 3 kelompok tinggal di habitat yang sangat cocok	1. providing spatial database for gibbon distribution data for easier to monitor this species in Mt. Salak 2. management authority was suggested to begin developing monitoring plan for javan gibbon groups which living in low suitable areas. 1. menyediakan basis data spasial untuk data distribusi gibbon agar lebih mudah memantau spesies ini di Gunung Salak 2. Disarankan untuk mulai mengembangkan rencana pemantauan untuk kelompok gibbon jawa yang tinggal di daerah yang tingkat kesesuaiannya rendah

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
29	Tri Atmowidi;2008;Tesis	Keanekaragaman dan Perilaku Kunjungan Serangga Penyerbuk Serta Pengaruhnya dalam Pembentukan Biji Tanaman Caisin (*Brasia rapa* L.:Brassicaceae)	Serangga penyerbuk dominan pada pertanaman caisin adalah *A. cerana*, *A. dorsata* dan *Ceratina sp*. (Apidae: Hymenopotera). Kelimpahan lebah penyerbuk pada pertanaman caisin ditemukan tinggi dipagi hari yang berkaitan dengan tingginya serbuksari dan nektar dan kondisi cuaca yang optimum. Lebah *A. cerana*, *A. dorsata* dan *Ceratina sp*. mengunjungi lebih banyak bunga per menit dan melakukan pencarian pakan yang lebih lama dibandingkan *Xylocopa spp*. sehingga tiga spesies tersebut diduga mempunyai efektifitas penyerbukan yang tinggi pada pertanaman ciasin. Serangga penyerbuk meningkatkan hasil panen pertanaman caisin	Perlu dilakukan penelitian tentang keanekaragaman seranga penyerbuk pada spesies tanaman pertanian dan perannya dalam pembentukan bii/buah. Perlu dilakukan penelitian tentang keanekaragaman serangga penyerbuk pada berbagai spesies tanaman pertanian yang berkaitan dengan fenologi bunga secara lebih detail, meliputi struktur bunga dan serbuksari, waktu anthesis, dan reseptif dan volume nektar dalam bunga. Perlu analisis kualitas buah/biji hasil penyerbukan serangga, diantaranya kandungan gula, protein, minyak, vitamin dan kandungan lainnya sesuai dengan komoditas masing-masing tanaman. Perlu dilakukan Penelitian tentang efetivitas penyerbukan masing-masing spesies penyerbuk pada berbagai spesies tanaman. Perlu penelitian lanjutan tetang self-incompatibilitas tanaman caisin.
30	Rian Haries;2008;Skripsi	Keragaman dan Distribusi Spesies Cicak Anggota Famili Gekkonidae di Taman Naisonal Gunung Halimun Salak	Empat spesies berhasil di indetifikasi darib 50 individu yang ditangkap di TNGHS Sukabumi, Jawa Barat yaitu *Hemidactylus marmoratus*, *Gehyra mutilata*, *Cyrtodactylus marmoratus* dan *Cytodactylus fumosus*. Habitat utama dari spesies *H. Frenatus* dan *G. Mutilata* yaitu di bangunan. dan beberapa diantaranya ditemukan di pohon dan semak. Sedangkan *C. marmoratus* dan *C. fumosus* habitat utamanya di dalam huutan seperti di pohon, semak dan batuan	
31	Alamanda SP;2009;Skripsi	Pola Penggunaan Ruang Owa Jawa (*Hylobates moloch,* Audebert,1798) Berdasarkan Perilaku Bersuara Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Provinsi Jawa Barat	1. Pohon Rasamala (*A.excelsa*) digunakan oleh betina dewasa untuk melakukan aktivitas bersuara sebanyak 15 pohon. Untuk model arsitektur pohon suara, 17 pohon diantaranya memiliki model Scarrone. Untuk posisi individu betina dewasa saat melakukan female song bout hanya ditemukan di posisi AI dan AII. Sedangkan untuk tipe suara border conflict call bout di posisi AI, BI dan BII. Posisi horizontal III dan vertikal C hanya digunakan oleh betina dewasa untuk harasssing call bout. 2. Individu jantan dewasa menggunakan tiga pohon Ki haji (*Dysoxylum alliaceum*) untuk bersuara dan lima pohon dengan model arsitektur Rauh. Posisi AII hanya ditempati jantan dewasa saat melakukan tipe suara border conflict call bout. Sedangkan untuk tipe suara harasssing call bout di posisi CIII. Posisi BI, BII dan CII ditempati saat melakukan tipe suara male song bout. 3. Pohon Kimokla (*Knema cinerea* (Poir.) Warb.) dengan model arsitektur Massart digunakan sebanyak lima pohon oleh individu betina pra-dewasa untuk bersuara. Posisi individu saat bersuara di AII dan AIII digunakan untuk tipe female song bout dan harasssing call bout. Posisi BI, BII dan BIII digunakan oleh individu betina pra-dewasa untuk tipe suara harassing call bout.	1. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai pola penggunaan ruang untuk semua perilaku *H. moloch* di TNGHS. 2. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai pola penggunaan ruang untuk semua perilaku *H. moloch* di TNGHS.
32	Rahayu Oktaviani;2009;Skripsi	Studi Perilaku Bersuara Owa Jawa (*Hylobates moloch,* Audebert,1798) Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Provinsi Jawa Barat	1. Rata-rata aktifitas harian Owa Jawa adalah 11 jam dengan empat aktifitas utama yaitu makan, berpindah, diam (istirahat) dan aktifitas sosial seperti berkutu-kutuan (grooming), bermain dan bersuara. Owa Jawa dominan melakukan aktfitas bersuara di pagi hari pada pukul 10.00 WIB. 2. Terdapat lima tipe suara yang dikeluarkan oleh Owa Jawa yaitu suara betina dewasa (female song bout), suara jantan dewasa (male song bout), suara akibat gangguan (harassing call bout), suara akibat konflik batas wilayah (border conflict call bout), dan suara anakan (infant song bout).	1. Perlu dilakukan penelitian mengenai perilaku bersuara Owa Jawa di musim yang berbeda (musim hujan). 2. Perlu dilakukan kegiatan pengamanan kawasan yang lebih baik untuk menanggulangi kerusakan habitat yang dapat mengancam kelestarian Owa Jawa di TNGHS. 3. Waktu terbaik pengamatan perilaku bersuara Owa Jawa adalah pada pagi hari antara pukul 07:00-10:00 WIB.

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Saran
			3. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bersuara Owa Jawa di TNGHS adalah ukuran kelompok, keberadaan kelompok Owa Jawa lain di sekitarnya, faktor cuaca, ketersediaan atau kelimpahan pohon pakan, adanya gangguan atau bahaya yang dianggap mengancam keberadaan Owa Jawa, dan kerusakan habitat.	
33	Aswan;2009;Tesis	Studi Komparasi Metode Inventarisasi Dalam Pendugaan Ukuran Populasi Owa Jawa Di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	1. Metode inventarisasi yang paling efektif untuk pendugaan ukuran populasi owa jawa di TNGHS adalah metode line transect 2. Metode inventarisasi yang biayanya paling rendah dalam pendugaan kepadatan populasi owa jawa di TNGHS adalah metode variable circular plot 3. Metode inventarisasi yang paling optimal untuk pendugaan ukuran populasi owa awa di TNGHS adalah metode line transect	1. Inventarisasi owa jawa sebaiknya dilakukan pada pagi hari saja untuk menghindari hasil pendugaan kepadatan populasi yang lebih rendah dari keadaan sebenarnya. 2. Perlu pelatihan yang intensif bagi para pengamat lapangan guna meminimalkan kesalahan pengambilan data akibat kondisi topografi yang berat, vegetasi yang rapat, dan sifat owa jawa yang seringkali sulit terdeteksi 3. Perlu dilakukan penelitian yang sama pada populasi owa jawa yang lain di lokasi berbeda dan waktu yang berbeda guna memvalidasi hasil penelitian ini.
34	Reisky Maulana;2009;Skripsi	Komunitas Serangga Penyerbuk Pada Habitat Dan Jarak Yang Beragam Dari Tepi Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Tidak semua serangga pengunjung bunga caisin merupakan serangga penyerbuk, karena beberapa diantaranya terdapat serangga-serangga pemangsa, pemakan bangkai, parasit, parasitoid, pemakan tumbuhan, dan pemakan sisa-sisa metabolisme 2. Kondisi habitat di luar kawasan hutan TNGHS yang beragam, memberikan dampak pada struktur komunitas serangga penyerbuk. Setiap habitat memiliki struktur komunitas serangga penyerbuk yang berbeda-beda yang tersusun oleh spesies-spesies yang berasal dari masing-masing tipe habitat. 3. Penyerbaran serangga penyerbuk sangat dibatasi oleh faktor jarak dari habitatnya, sehingga lokasi yang lebih dekat ke tepi hutan memiliki nilai keanekaragaman spesies yang lebih tinggi karena struktur komunitasnya tersusun atas peraduan spesies-spesies dari habitat hutan dan non-hutan. 4. Faktor jarak dari tepi hutan tidak mempengaruhi kelimpahan dan keanekaragaman serangga penyerbuk meskipun demikian kelimpahan serangga penyerbuk mengalami penurunan dari jarak 120 meter hingga 520 meter dari tepi hutan, dan kemudian kembali meningkat. Faktor yang sangat mempengaruhi jumlah spesies dan kelimpahan serangga penyerbuk adalah jumlah pemekaran bunga yang berkorelasi positif dan sangat signifikan (berbeda nyata). Faktor suhu dan kelembaban pada suatu lokasi tidak memberi pengaruh besar (tidak berbeda nyata)	1. Untuk penelitian lebih lanjut tentang pengaruh jarak dari tepi hutan terhadap nilai keragaman spesies, sebaiknya dilakukan di lokasi pada kondisi luar hutan yang memiliki tipe habitat seragam (homogen) 2. Faktor jumlah pemekaran bunga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi jumlah kelimpahan serangga penyerbuk, sehingga pada pelaksanaan penelitian serupa sebaiknya dilakukan penyeragaman jumlah bunga pada tiap-tiap titik pengamatan.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
35	Nety Virgo Erawati,dkk;2010;Jurnal	Keanekaragaman dan Kelimpahan Belalang dan Kerabatnya (Orthoptera) pada Dua Ekosistem Pegunungan di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	1. Keanekaragaman belalang dan kerabatnya di Gunung Kendeng lebih tinggi (20 jenis dan 8 famili) daripada Gunung Botol (15 jenis dan 7 famili), tetapi kelimpahannya lebih tinggi di Gunung Botol (278 individu) daripada Gunung Kendeng (136 individu). Jenis yang melimpah di Gunung Kendeng adalah *Blatta orientalis*, *Rhaphidophora sp* 1, *Pycnocelus sp.*, *Phlaeoba sp.*, dan *Itara microchepala*, sebaliknya di Gunung Botol adalah *Nemobius sp.*, *Rhaphidophora sp* 1, dan *Pycnocelus sp.* 2. Jenis-jenis yang termasuk famili Phasmidae tidak ditemukan di Gunung Kendeng, sebaliknya yang termasuk Gryllotalpidae dan Tettigonidae tidak ditemukan di Gunung Botol. 3. Kelompok belalang dan kerabatnya yang dominan di Gunung Kendeng dan Botol adalah jenis-jenis yang berperan sebagai herbivora daripada omnivora, scavenger, dan predator	
36	Sanha Kim,dkk;2010;Jurnal	Diet And Ranging Behavior of The Endangered Javan Gibbon (*Hylobates moloch*) In a Submontane Tropical Rainforest	Penelitian ini mengenai pola makan, pola aktivitas, dan perilaku jelajah tiga kelompok owa jawa di hutan pegunungan/pegunungan bawah (950–1.100 m dpl) di TNGHS dari April 2008 hingga Maret 2009. Rerata wilayah jelajah berukuran 37 ha dan rata-rata panjang jalan harian adalah 1.180 m. Kelompok studi menghabiskan 36% waktu makan, 41% istirahat, 15% bepergian, 6% terlibat dalam perilaku sosial, dan 2% dalam interaksi agresif. Buah adalah makanan yang paling penting (63% dari waktu makan) diikuti oleh daun (24%), dan bunga (12%). Owa jawa di habitat dataran tinggi memiliki wilayah jelajah yang jauh lebih besar daripada populasi dataran rendah, meskipun memiliki kesamaan yang luas dalam anggaran aktivitas dan makanan mereka.	Pengelola konservasi harus mempertimbangkan efek ketinggian dan kualitas habitat terhadap perilaku owa-owa saat mengembangkan koridor habitat, memilih lokasi untuk proyek translokasi atau reintroduksi, dan menetapkan dan mengelola kawasan lindung
37	Hari Sutrisno;2010;Jurnal	The Impact of Human Activities to Dynamic of Insect Communities: a Case Study in Gunung Salak, West Java	Perubahan habitat akibat aktivitas manusia telah mengubah tidak hanya keanekaragaman ngengat tetapi juga strukturnya di dalam komunitas. Jumlah jenis ngengat menurun secara signifikan serta jumlah taksa (famili) yang lebih rendah di hutan terganggu (hutan sekunder, hutan Agathis, dan kawasan transisi) dalam kisaran: 20-50 dan 10-20%. Komposisi dua famili utama, Geometridae dan Noctuidae juga menunjukkan perubahan besar, famili Geometridae menurun dalam kisaran 10-50% di daerah yang terganggu tetapi Noctuidae meningkat hingga 50% di daerah tersebut. Memang, hilangnya habitat karena aktivitas manusia seperti pembalakan liar, perubahan penggunaan lahan dan pembukaan lahan adalah ancaman utama untuk mengurangi keanekaragaman ngengat makro dan mengubah struktur ngengat di masyarakat.	
38	Dewi Ratna Kurniasari;2010;Tesis	Analisis Kesesuaian Habitat Preferensi Surili di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Jawa Barat	Kebradaan surili pada satu habitat dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik pada habitat tertentu. Komponen dominan yang paling berpengaruh terhadap keberadaan surili adalah penutupan tajuk dan kemiringan lereng. Semakin datar kemiringan lereng dan semakin tinggi nilai penutupan lahan tajuk, maka habitat tersebut semakin disukai oleh surili. Model persamaan yang diperoleh untuk memebangun peta model kesesauaian habitat, yaitu Y = 0,2181 x1 - 0,6826 + 0,2110 X3 - 0,0329 x4 + 0,1811 X5 - 0,0245 X6. Model persamaan tersebut menghasilkan nilai minimum sebesar -1,498 dan nilai maksimum sebesar 1,0806, nilai mean sebesar -0,0821 dan standar deviasi sebesar 0,7231. Berdasarkan anaslisis spasail, lias kawasan untuk tingkat kesesauaian rendah sebesar 21,767,04 ha (20,42%), tingkat kesesuaian sedang sebesar 58.805,01 ha (55,17%) dan tingkat kesesuaian tinggi sebesar 26.019,36 ha (24,41%)	Perlu dilakukan perbaikan habitat sebagai uapaya pelestarian surili yaitu dengan membangun koridor yang menghubungkan antara dua tingkat kesesauaian. Tingkat kesesuaian yang dihubungkan yaitu dari tingkat kesesuaian rendah menjadi kesesuaian tinggi. Upaya pembinaan habitat pada lokasi-lokasi yang terfragmentasi dapat dilakukan dengan memperkaya jenis tumbuhan terutama jenis yang dimanfaatkan surili. Penyuluhan bagi masyarakat sekitar hutan juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konservasi.

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Saran
39	Ika Rezza Reksanty;2010;Skripsi	Inventarisasi Tungau Ektoparasit Kadal Eutropis Multifasciata Di Ipbdramaga Dan Gunung Salak Endah	Tungau yang menginfestasi kadal *E. multifasciata* di daerah IPBDramaga dan Gunung Salak Endah adalah Famili: Trombiculidae, Paramegistidae, Erythraeidae, Microgyniidae, Ixodorhynchidae, dan tungau yang masih dalam fase larva serta nimfa yang tidak teridentifikasi. Tungau yang dominan menginfestasi kadal *E. multifasciata* adalah famili Trombiculidae. Bagian tubuh kadal yang dominan terinfestasi oleh tungau adalah bagian kaki belakang dan perut.	Penelitian mengenai tungau pada inang di hewan masih jarang dilakukan di Indonesia. Diharapkan penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui tungau hingga tingkat spesies, siklus hidup, distribusi, dan biogeografi.
40	HARI SUTRISNO;2010;Jurnal	The Impact of Human Activities to Dynamic of Insect Communities: a Case Study in Gunung Salak, West Java	The results showed that the habitat changes due to human activities had changed not only to the moth diversity but also to their structure within communities. The number of moth species decreased significantly as well as the number of lower taxa (family) in the disturbed forest (secondary forest, Agathis forest, and transition area) within ranges: 20-50 and 10-20%. The composition of the two main families, Geometridae and Noctuidae also showed a major change, family Geometridae decreased within ranges 10-50% in the disturbed area but Noctuidae increased up to 50% in those areas. Indeed, habitat lost due to human activities such as illegal logging, change of land use and land clearing is the main threats to decrease on macro-moth diversity and change their structures within communities	
41	Richard Noske, dkk;2011;Jurnal	Understorey birds of Cikaniki Research Station, Gunung Halimun-Salak National Park, West Java: Report of the Indonesian Bird Banding Scheme Training Programme	Temuan dari kegiatan Pelatihan untuk Pelatih yang pertama yang dilaksanakan oleh Skema Pencincinan Burung Indonesia di Stasiun Penelitian Cikaniki (1000-1100 m asl) selama Juli 2009 dan membandingkannya dengan hasil studi pencincinan sebelumnya yang dilaksanakan di lokasi yang sama oleh staf PPB-LIPI sejak 1996. Lebih dari tujuh hari, sebanyak 97 individu burung yang mewakili 29 spesies tertangkap dan kebanyakan dari burung itu dicincin. Burung muda dari 13 spesies meliputi 28% dari semua individu burung yang tertangkap, dan kondisi awal gugur bulu primer ditemukan pada 32% individu burung dewasa mengindikasikan banyaknya spesies di kawasan itu baru saja melalui masa berbiak.	
42	Erlina Yanti;2011;Skripsi	Kajian Karakteristik Habitat Dan Pola Sebaran Spasial Macan Tutul Jawa (*Panthera pardus melas* Cuvier, 1809) Di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	1. Karakteristik habitat yang utama bagi macan tutul jawa di TNGHS yaitu suatu habitat yang memiliki kelimpahan jenis dan frekuensi jenis satwa mangsa yang tinggi. Faktor pendukung karakteristik habitat macan tutul jawa adalah keberadaan sumber air yang mengalir sepanjang tahun, memiliki cover dengan tajuk yang rapat, tersedia tumbuhan bawah secara melimpah, dan jauh dari pusat aktivitas manusia. 2. Kepadatan relatif dan tingkat perjumpaan tertinggi macan tutul jawa berada di hutan pegunungan bawah primer. Macan tutul jawa di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak memiliki pola sebaran homogen mengikuti pergerakan satwa mangsanya.	1. Monitoring macan tutul jawa oleh pihak BTNGHS sebaiknya mulai dilakukan rutin berkala lebih dari satu kali per tahun dengan melibatkan para peneliti dari berbagai aspek kajian. 2. Perlu adanya pengamanan kawasan yang menjadi lokasi konsentrasi jelajah macan tutul jawa di TNGHS, khususnya lokasi yang menjadi kawsan wisata dan dekat dengan pemukiman. 3. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai populasi absolut untuk mengetahui dugaan populasi menyeluruh di TNGHS

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
43	Hadi Surono;2012;Skripsi	Jenis Pakan dan Pola Pemanfaatan Tajuk Berdasarkan Aktivitas Makan Owa Jawa (*Hylobates moloch* Audebert,1798) Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Provinsi Jawa Barat	1. Owa jawa mengkonsumsi sebanyak 47 jenis pakan, yang terdiri dari 46 jenis tumbuhan dan satu jenis serangga. Owa jawa lebih banyak mengkonsumsi buah yaitu sebesar 77,8%, daun sebesar 21,02%, bunga sebesar 1,18%, dan serangga sebesar 0,002%. 2. Penggunaan tajuk pohon oleh owa jawa berdasarkan aktivitas makan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pohon sebagai sumber pakan dan pohon sebagai tempat makan. Aktivitas makan owa jawa pada pohon sumber pakan lebih sering terlihat pada ruang tajuk pohon bagian CII. Sedangkan pada pohon yang hanya dijadikan tempat makan owa jawa sering berada pada ruang tajuk bagian AIII yaitu pada pohon rasamala dengan posisi tubuh menggantung. Owa jawa menggunakan empat model arsitektur pohon dalam melakukan aktivitas makan yaitu model arsitektur attims, massart, rauh, dan scarrone. Model aristektur pohon attims lebih sering digunakan oleh owa jawa saat aktivitas makan.	Perlu adanya pengelolaan jenis tumbuhan pakan pada habitat owa jawa. Selain itu perlu mengkaji lebih dalam tentang pola pemanfaatan tajuk bagi owa jawa dari beberapa aktivitas prilaku harian owa jawa.
44	Diena Nurul Fatimah;2012;Skripsi	Aktivitas Harian dan Perilaku Menelisik (Grooming) Owa Jawa (*Hylobates moloch* Audebert,1798) Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Provinsi Jawa Barat	1. Aktivitas harian owa jawa dibagi menjadi 4 aktivitas utama, yaitu makan, istirahat, bergerak dan sosial serta aktivitas tidak terlihat. Rata-rata aktivitas harian owa jawa adalah 11 jam yaitu mulai pukul 06.20 - 17.25 WIB. Aktivitas makan merupakan aktivitas harian dominan yang dilakukan owa jawa (36,1%). Aktivitas makan pada indidivu betina (34,0%) lebih besar dari individu jantan (38,0%), sedangkan pada individu dewasa dan anak aktivitas makan memiliki presentase sama (36,0%). Pada keseluruhan aktivitas harian, aktivitas sosial memiliki presentase sebesar 14,2%. Perilaku sosial ini antara lain main (9,2%), dan menelisik yaitu allogrooming (3,3%) dan menggaruk (1,7%). 2. Terdapat 2 tipe perilaku menelisik, yaitu menelisik sendiri atau autogrooming (garuk dan selisik sendiri) dan menelisik pasangan atau allogrooming. Perilaku autogrooming lebih sering terjadi (600 kali) daripada allogrooming (333 kali). Perilaku autogrooming individu jantan (395 kali) dan individu dewasa (489 kali) lebih sering terjadi daripada perilaku autogrooming individu betina (205 kali) dan individu anak (111 kali). Sedangkan perilaku allogrooming individu jantan (368 kali) dan individu dewasa (540 kali) lebih sering terjadi daripada allogrooming individu betina (138 kali) dan individu anak (126 kali). Pohon yang dominan digunakan owa jawa untuk menelisik adalah rasamala (*Altingia excelsa*) yang merupakan pohon telisik dengan strata tajuk dominan yaitu strata A. 3. Faktor yang mempengaruhi tingginya intensitas perilaku menelisik owa jawa yaitu jenis kelamin, kelas umur, cuaca, jenis pohon dan ketinggiannya, durasi waktu aktif, serta gangguan lain seperti ribut dengan kelompok owa jawa lain, playback suara owa jawa oleh peneliti dan gangguan akibat kehadiran manusia dalam jumlah besar.	1. Penelitian perilaku menelisik perlu dilakukan pada kelompok owa jawa, musim dan habitat yang berbeda dan jauh dari keberadaan manusia, serta penambahan jam pengamatan. 2. Pengelolaan habitat perlu dilakukan salah satunya dengan pemeliharaan pohon tempat perilaku menelisik yaitu pohon rasamala (*Altingia excelsa*). 3. Perlindungan kawasan hutan dan pembatasan aktivitas manusia di sekitar wilayah jelajah owa perlu ditingkatkan untuk menjaga kelestarian populasinya. 4. Pendidikan konservasi mengenai satwaliar khususnya owa jawa perlu dilakukan oleh pihak-pihak TN dengan sasaran warga sekitar kawasan. 5. Waktu terbaik untuk pengamatan perilaku menelisik owa jawa adalah pada pagi hari antara pukul 07.00 sampai 11.00 WIB.
45	Sanha Kim,dkk;2012;Jurnal	Responses Of Javan Gibbon (*Hylobates moloch*) Groups In Submontane Forest To Monthly Variation In Food Availability : Evidence For Variation On A Fines Spatial Scale	Makanan yang disukai didefinisikan sebagai makanan yang dipilih secara berlebihan relatif terhadap kelimpahannya, sedangkan jenis makanan penting adalah makanan yang mencakup >5% dari waktu makan. Semua jenis yang disukai juga penting. Musim dan perhitungan ketersediaan bunga dan buah mempengaruhi waktu makan buah, daily path lengths (DPL), dan luas pakan.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
			Untuk satu kelompok, buah dan kelimpahan buah yang disukai memiliki efek terkuat pada diet dan DPL pada model yang dipilih, sementara kelompok lain lebih responsif terhadap perubahan ketersediaan bunga. Variasi temporal dalam konsumsi bagian tanaman tidak berkorelasi dalam kelompok lainnya. Hasil menunjukkan bahwa faktor lokal skala halus merupakan penentu penting dari strategi mencari makan owa jawa.	
46	Maharadatunkamsi;2012;-Jurnal	Small Mammals Diversity in Kawah Ratu Resort, Mount Salak, West Jawa, Indonesia	Banyaknya spesies yang tercatat di daerah penelitian menunjukkan bahwa Kawah Ratu Resort merupakan habitat penting bagi mamalia kecil, termasuk spesies endemik dan spesies yang tercantum dalam Appendix CITES. Beberapa jenis kelelawar (*Chironax melanocephalus* dan *Cynopterus brachyotis*) terindikasi tersebar luas di Resor Kawah Ratu, sedangkan tikus tertentu (*Maxomys bartelsii*) menunjukkan keterbatasan. Dalam distribusi mereka. Perlu dicatat untuk memasukkan program konservasi mamalia kecil yang potensial dalam rencana pengelolaan taman nasional yang berharga ini untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang kaya dalam hal spesies, ekosistem dan genetik.	Penelitian ini menyarankan adanya perubahan sebaran mamalia kecil khususnya megachiroptera di antara vegetasi alami dan kawasan terganggu di Resor Kawah Ratu
47	Dalfit;2012;Skripsi	Keanekaragaman Jenis Ikan Air Tawar di Sungai-Sungai ynag berasal dari Gunung Salak	Sebanyak 218 jenis ikan diperoleh dari 11 titik sampling yang dikelompokan ke dalam 6 ordo, 9 famili dan 13 spesies. Sepuluh jenis diantaranya merupakan ikan asli dan 3 spesies lainnya adalah ikan hasil introduksi. Indeks keanekaragaman antar titik sampling tergolong rendah	Penangkapan ikan berlebihan oleh masyarakat denghn menggunakan racun haris dilakukan pengawasan yang lebih intensif, karena dapat merusak ekosistem perairan sungai. Ikan introduksi seperti *Hypostomus plecostomus* dan *Poecilia reticulata* sangat mendominasi pada beberapa sungai, jika dibiarkan maka ikan asing ini akan menyebabkan kepunahan ikan air tawar asli. Identifikasi ikan secara morfologi mungkin bisa terjadi kesalahan, untuk memastikan spesies maka harus dilanjutkan dengan identifikasi DNA Barcode
48	Yumarni;2012;Tesis	Konservasi Koridor Taman Nasional Gunung Halimun Salak Untuk Habitat Owa Jawa (*Hylobates moloch* Audebert 1797)	1. Formulasi model konservasi koridor TNGHS untuk habitat owa jawa memperhatikan aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang ada di koridor TNGHS. Aspek perlindungan dilakukan dengan bergeser dari sekuriti ke partisipasi dengan melibatkan penduduk setempat secara partisipatif. Aspek pengawetan dilakukan dengan penanaman jenis-jenis asli dan dibutuhkan oleh owa jawa, untuk membuat penghubung (konektifitas) antar habitat owa jawa yang terputus di koridor TNGHS. Sementara konektifitas alami belum berfungsi secara optimal, dibangun konektifitas buatan (artificial connectifity) berupa tiang-tiang dari kayu dan dihubungkan dengan tali. 2. Aspek pemanfaatan berorientasi pada peningkatan ekonomi penduduk setempat berbasis sumberdaya hutan non kayu, hal ini dapat dilakukan melalui agroforestri dengan sistem tumpangsari. Diidentifikasi sembilan kelompok dengan 28 individu owa jawa di koridor TNGHS. Kelompok owa jawa yang diidentifikasi terdistribusi hampir pada semua lokasi penelitian, kecuali di lokasi Cipanas. Komposisi kelompok owa jawa di koridor TNGHS lengkap, terdiri dari sepasang induk dengan anak remaja dan bayi. 3. Kelompok owa jawa yang teridentifikasi di koridor TNGHS semuanya berada pada tingkat kesesuaian habitat yang sesuai, tidak ditemukan kelompok owa jawa pada tingkat kesesuaian habitat sangat sesuai dan tidak sesuai. Tingkat kesesuaian habitat yang sesuai luasannya sudah sedikit, kehidupan owa jawa di koridor TNGHS sekarang sudah terdesak pada areal yang sempit.	1. Supaya melibatkan penduduk setempat secara partisipatif dalam konservasi koridor TNGHS untuk habitat owa jawa. Kegiatan ini untuk menjaga sumberdaya alam dan lingkungan yang ada di koridor TNGHS, dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi PAM swakarsa. 2. Perlu dilakukan penanaman jenis-jenis asli yang dapat dimanfaatkan oleh owa jawa sebagai pohon pakan dan pohon tidur, seperti jenis rasamala (*Altingia excelsa*), puspa (*Schima wallichii*), manii (*Maesopsis eminii*), saninten (*Castanopsis argentea*). Ini bertujuan agar luasan habitat yang sesuai untuk kehidupan owa jawa dapat ditingkatkan dan untuk membentuk konektifitas antar habitat owa jawa di koridor TNGHS, sehingga fungsi koridor sebagai habitat dan jalur pergerakan owa jawa dapat tercapai. Sementara konektifitas alami belum dapat berfungsi optimal supaya dibangun konektifitas buatan berupa tiang-tiang dari kayu yang dihubungkan dengan tali, untuk menghubungkan habitat owa jawa yang terputus di koridor TNGHS. 3. Perlu penelitian lebih lanjut untuk membangun konektifitas buatan (artificial connectifity) baik bentuk dan ukurannya. 4. Harus ada monitoring populasi owa jawa di koridor TNGHS secara ketat, agar populasinya tidak berkurang dan diharapkan dapat berkembang biak. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah kepunahan primata endemik Pulau Jawa ini.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
			4. Ditemukan 77 jenis vegetasi di koridor TNGHS yang terdiri dari 42 jenis vegetasi tingkat pohon, 40 jenis vegetasi tingkat tiang, 51 jenis vegetasi tingkat pancang, dan 45 jenis vegetasi tingkat semai. Vegetasi tingkat pohon yang mempunyai INP tinggi adalah rasamala (*Altingia excelsa*), puspa (*Schima wallichii*), manii (*Maesopsis eminii*), dan saninten (*Castanopsis argentea*). Vegetasi tingkat pohon yang ada sekarang, sebahagian besar merupakan jenisjenis yang dimanfaatkan oleh owa jawa sebagai pohon pakan dan pohon tidur. 130 INP tertinggi permudaan vegetasi yaitu: Tingkat tiang adalah kisireum, manii, dan huru hiris. Tingkat pancang adalah manii, kopinango, dan mara bereum. Tingkat semai adalah pasang batarua, manii, dan pasang. Permudaan vegetasi yang ada sekarang, sebahagian besar bukan merupakan jenis-jenis yang dimanfaatkan oleh owa jawa sebagai pohon pakan dan pohon tidur. 5. Keadaan sosial ekonomi penduduk di koridor TNGHS secara umum adalah rendah, dicirikan dengan jumlah penduduk yang tinggi (diproyeksikan 28.608 jiwa pada tahun 2020), 76,58% penduduk berpendidikan SD sampai SLTP, 52,64% penduduk berumur 19 sampai 59 tahun, 63,29% penduduk bekerja sebagai petani, 83,4% penduduk memiliki lahan kurang dari 0,25 ha, dan 86,7% penduduk berpenghasilan dibawah Rp. 74.000,-/kapita/bulan.	
49	Age Kridalaksana;2012;Jurnal	Population Status of the Javan Leopards (*Panthera pardus melas*) Trapped by the Cameras in Gunung Halimun-Salak National Park	Some JICA's data were used as references because JICA was the first that conducted a camera trap research on the Cikaniki Research Station. Overall all of species recorded by camera traps declined when our data compared JICA's data. Of course, the declination was not good in any reason although the camera days and the observation periods might be given the obvious influences, but some main leopard preys (i.e. otter and barking deer) were still available. The availabilities of leopard's prey were such good news because the Javan leopard could rely to the Cikaniki Research Station to provide some resources. Furthermore camera traps successfully recorded both of spotted leopards and black panthers. 655 hectares of the Cikaniki Research Station were occupied by one spotted leopard and two black panthers, and the density was 2.18 kilometers2 per individual on this site. Camera trap data also provided some characteristics that described several behaviors of the Javan leopard. The Javan leopard tended to appear in the daytime (diurnal) although some information from local communities explained that the Javan leopard was nocturnal, and in this case (nocturnal/diurnal) we blamed that behavioral adjustments were happened because of specific factors such the internal competition of each leopard on the Cikaniki Research Station. Other camera trap data ensured us to believe that the Cikaniki Research Station was used as a breeding site for the Javan leopard, and the October-November were the breeding time of the Javan leopard on the Cikaniki Research Station. Regarding the leopard's habitat, actually forest conditions; structures; types and species on the Cikaniki Research Station were almost similar because this area might be covering a small area. The interesting point was that this site contains several landscape types (such as: a pristine forest, a secondary forest, a tea plantation, and a community settlement), and in the forest the Javan leopards didn't like to be moving on an area that had dense scrub over the ground.	Sequence data are very important when we conduct an ecological research especially on a species likes the Javan leopard. This research conducted one month observation, and data that had been collected should not be adequate to see the ecological patterns of the Javan leopard. However our data were great because the data could show some different behaviors of the Javan leopard on the Cikaniki Research Station, but pattern of behaviors had never been seen clearly. The long-term monitoring of the Javan leopard is still needed on the Cikaniki Research Station to describe the patterns of the Javan leopard's behaviors.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
50	Asep Zanuansyah;2013;Skripsi	Studi Lokomotor Dan Postur Owa Jawa (*Hylobates moloch* Audebert,1798) Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Tipe lokomotor yang memiliki frekuensi dan durasi terbesar pada kelompok A secara berturut-turut yaitu tipe lokomotor berayun dan postur duduk sebesar 46,07 – 64,60% dan 72,78 – 84,12% serta 1,29 – 1,84 jam dan 8,73 – 10,90 jam. Sedangkan pada kelompok B frekuensi dan durasi terbedar secara berturut-turut yaitu tipe aktivitas beristirahat sebesar 58,38 – 61,82% dan 75,17 – 79,33% serta 2,42 – 3,50 jam dan 4,94 – 13,10 jam. 2. Berdasarkan plot sample, pohon yang teridentifikasi yaitu sebanyak 47 individu pohon dari 24 jenis digunakan untuk lokomotor (pergerakan) owa jawa sedangkan pohon yang digunakan sebagai tempat postur owa jawa adalah sebanyak enam belas jenis pohon yang sebagian besar merupakan pohon pakan. Penutupan tajuk pada salah satu plot sample menunjukan bahwa sebagian besar areal plot sample memiliki persentase penutupan tajuk sebesar 62,2 %. Fase pohon dalam plot sample dengan persentase terbesar yaitu fase pohon masa datang yaitu sebesar 48,9 %. 3. Kelompok B memiliki rata-rata daily range dugaan sebesar 1.278,18 m atau 1,28 km sedangkan kelompok A memiliki rata-rata daily range dugaan sebesar 641,96 m atau 0,641 km. Radius maksimum pada kelompok A mencapai rata-rata 432,55 m sedangkan kelompok B mencapai rata-rata 532,73 m. Perbedaan lokasi tempat tidur (night position shift) pada kedua kelompok studi owa mencapai rata-rata 397,90 m dan 343,90 m untuk kelompok B. Perhitungan dengan FK 95% memberikan rata-rata luas wilayah jelajah 50,27 ha sedangkan dengan metode MCP 100% memberikan rata-rata luas wilayah jelajah sebesar 24,38 ha. Analisis dengan Digital Elevation Model (DEM), luas wilayah jelajah kelompok studi memiliki rata – rata sebesar 25,65 ha untuk hasil analisis dengan MCP dan sebesar 53,25 ha untuk hasil analisis dengan FK 95%. Sedangkan overlap yang muncul memiliki luas dugaan sebesar 0,14 ha untuk hasil analisis dengan MCP dan 7,00 ha untuk hasil analisis dengan metode FK 95%.	1. Hasil penelitian dapat menjadi masukan dan rekomendasi terhadap pengelola konservasi eks-situ owa jawa terutama dalam desain kandang dan pengkayaan lingkungan (enrichment) dengan berdasarkan pergerakan alamiah lokomotor dan postur owa jawa di habitat aslinya. 2. Peta pergerakan harian dan wilayah jelajah owa jawa dapat digunakan sebagai data pendukung untuk atraksi objek ekowisata minat khusus, pendidikan dan penelitian. Selain itu, dapat menjadi acuan pengelola taman nasional dalam memonitoring keberadaan owa jawa dengan pengontrolan habitat. 3. Perlu adanya monitoring berkala mengenai ukuran populasi dan sebaran owa jawa beserta habitatnya agar dapat diketehaui keberlanjutan populasi owa jawa.
51	Agus Setiawan ;2013;Skripsi	Kelimpahan Jenis Mamalia Menggunakan Kamera Jebakan Di Resort Gunung Botol Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Mamalia yang ditemukan sebanyak 23 jenis dengan 12 famili yakni Felidae, Cervidae, Vivveridae, Mustelidae, Hylobatidae, Cercopithecidae, Sciuridae, Scandentia, Muridae, Suidae, Prionodontidae, dan Mephitidae melalui kamera jebakan, perangkap hidup, dan pengamatan langsung di Resort Gunung Botol TNGHS. 2. Kelimpahan jenis mamalia paling tinggi diperoleh pada kijang (*Muntiacus muntjak*) dengan nilai 31.25 %. Kemudian tertinggi kedua diperoleh pada musang luwak (*Paradoxurus hermaphroditus*) dengan nilai 21.87 % dan tikus (Rattus sp) dengan nilai 12.5 %. Nilai terendah diperoleh pada tikus belukar (*Rattus tiomanicus*), tupai kekes (*Tupaia javanica*), bajing kelapa (*Callosciurus notatus*), teledu sigung (*Mydaus javanensis*), kucing hutan (*Prionailurus bengalensis*) dan linsang (*Prionodon linsang*) yaitu 3.12 %.	1. Perlu dilakukan monitoring lanjutan terhadap satwaliar khususnya mamalia di TNGHS. 2. Perlu dilakukan pemasangan kamera jebakan di titik lokasi pengamatan yang berbeda dengan sebelumnya. 3. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai populasi terutama mamalia yang kritis seperti owa jawa, surili, lutung, dan macan tutul.
52	Alya Faryanti Purbahapsari ;2013;Skripsi	Penggunaan Habitat Koridor Halimun Salak oleh Elang ular bido (*Spilornis cheela* Latham, 1790) di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Penggunaan habitat KHS oleh elang ular bido untuk berlindung paling banyak di tutupan lahan hutan, namun untuk berburu elang ini juga menggunakan ladang, sawah dan semak belukar yang dekat dengan hutan. Elang ular bido cenderung memakan jenis-jenis reptil. Potensi pakan berupa reptil di KHS mencakup jenis A*haetulla prasina, Dendrelaphis pictus, Bronchocela cristatella, Bronchocela jubata, Gonocephalus chamaeleontinus, Draco volans, Eutropis multifasciata* dan *Takydromus sexlineatus*. Nilai-nilai fungsi pendukung yang paling dipilih elang ular bido berada pada area terbuka yang dekat dengan hutan.	Aktivitas penebangan pohon dan pembukaan hutan di KHS harus dicegah, karena elang membutuhkan pohon berukuran besar dan tinggi untuk berlindung. Area bekas penebangan dan perambahan pada hutan KHS sebaiknya ditanami jenis-jenis pohon yang potensial digunakan oleh elang ular bido untuk berlindung yaitu ki putri (*Podocarpus sp.*), pasang (*Quercus sp.*), rasamala (*Altingia excelsa*), puspa (*Schima wallichii*) dan ki hujan (*Engelhardia spicata*). Selain itu, area terbuka di KHS yang berada dekat dengan hutan perlu diawasi secara ketat dari gangguan.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
53	Puta Wibowo Malau;2013;Skripsi	Kesesuaian Habitat Macan Tutul Jawa (*Panthera pardus melas* G. Cuvier) Di Resort Gunung Botol Taman Nasional Gunung Halimun Salak Provinsi Jawa Barat	1. Model kesesuaian habitat Panthera pardus melas di Resort Gunung Botol Taman Nasional Gunung Halimun Salak adalah Y = (1.428 x Ketersediaan pakan) + (2.954 x Ketinggian) + (2.954 x NDVI) + (1.428 x Kemiringan lereng) + (1.039 x Jarak dari sungai) + (2.954 x Jarak dari jalan) + (1.428 x Jarak dari punggung gunung). 2. Faktor habitat yang paling berpengaruh terhadap kesesuaian habitat Panthera pardus melas adalah faktor ketinggian, NDVI, sedangkan faktor gangguan yang memiliki pengaruh besar adalah jarak dari jalan. 3. Habitat P*anthera pardus melas* di Resort Gunung Botol yang mempunyai tingkat kesesuaian tinggi sebesar 3225.84 ha, tingkat kesesuaian sedang sebesar 2801.67 ha, tingkat kesesuaian rendah sebesar 2258.44 ha dan tidak ada data sebesar 2244.25 ha.	1. Perlu dilakukan penelitian kesesuaian habitat Panthera pardus melas di seluruh kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 2. Perlu dilakukan pengambilan titik koordinat geografis sebaran Panthera pardus melas secara merata di Resort Gunung Botol Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 3. Pembinaan habitat Panthera pardus melas dengan tingkat kesesuaian habitat sedang dan rendah. 4. Perlu dilakukan pengawasan pada habitat Panthera pardus melas dengan tingkat kesesuaian habitat tinggi dari perburuan satwa mangsa yang berpotensi sebagai pakan Panthera pardus melas dan pembukaan lahan sehingga kelestarian Panthera pardus melas dapat terjaga.
54	Susanti M,dkk;2014;Jurnal	Species Diversity of Butterflies at Suaka Elang (Raptory Sanctuary) at Gunung Halimun Salak National Park In West Java	1. Di lokasi pengamatan di Curug Cibadak dan semak belukar terbuka di Suaka Elang ditemukan 170 individu kupu-kupu yang terdiri dari 40 spesies berbeda dan empat famili: Nymphalidae (22 jenis), Pieridae (8 jenis), Papilioni-dae (8 jenis), jenis) dan Lycaenidae (2 jenis). 2. Curug Cibadak dan semak belukar terbuka memiliki indeks keanekaragaman spesies, indeks kemerataan spesies dan indeks dominasi yang berbeda. Curug Cibadak memiliki indeks keanekaragaman H' = 2,39 (kategori sedang); indeks kemerataan E = 0,862 (sedang); indeks kekayaan R = 3,875 (rendah); dan indeks dominasi C = 0,12 (tinggi). Sedangkan semak belukar terbuka memiliki indeks keanekaragaman H' = 3,05 (tinggi), indeks kemerataan E = 0,865 (tinggi), indeks kekayaan R = 6,869 (tinggi) dan indeks dominasi C = 0,071 (rendah). 3. Curug Cibadak dan semak belukar terbuka memiliki Indeks Kesamaan Komunitas CS = 0,365 atau 36,5% kupu-kupu serupa di dua lokasi pengamatan yang berbeda.	1. Disarankan agar penelitian serupa dilakukan pada musim kemarau dan musim hujan untuk mendapatkan data keanekaragaman kupu-kupu yang lebih beragam. 2. Penelitian tentang tanaman inang favorit kupu-kupu juga perlu dilakukan untuk mendapatkan data tanaman yang menjadi sumber makanan kupu-kupu. 3. Lingkungan Suaka Elang harus dilestarikan agar kupu-kupu dapat berkembang biak dan menghasilkan spesies baru. 4. Kupu-kupu yang terancam punah di Suaka Elang harus dilindungi agar tidak punah.
55	Jang Ha-Neul;2014;Tesis	Visiting Behavior Of Javan GibbonS (*Hylobates moloch*) To Preferred Plant Species With The Use Of Phenological Knowledge	Owa jawa di Citalahab menggunakan kekuatan kognitif untuk melacak dan mengingat keadaan buah-buahan individu dengan pengetahuan fenologis tentang buah spesies tanaman yang disukai dan menggunakan pengetahuan tentang sinkronisasi. Hal ini mungkin karena faktor ekologis seperti lingkungan musiman yang kurang tanpa kelangkaan makanan, area rangkaian rumah kecil, kepadatan pohon yang lebih rendah, dan pentingnya spesies ara dalam diet Owa jawa.	
56	Dharmawan PP;2014;Jurnal	Studi Populasi Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi* Sresemann, 1924) di Gunung Salak	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa populasi Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi*) di kawasan Gunung Salak adalah 13 individu dengan kepadatan yaitu 0,183ekor/km2 (1ekor/6km2), kelimpahan yaitu 2 pada kategori "tidak umum" dan pola sebaran pada kategori "seragam". Tipe habitat yang digunakan Elang Jawa adalah hutan dan perbukitan, tetapi habitat yang sering terlihat perjumpaan dengan Elang Jawa adalah hutan. Elang jenis lain yang menjadi kompetitor Elang Jawa di antaranya adalah Elang Hitam (*Ictinaetus malayensis*), Elang Ular – bido (*Spilornis cheela*), Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*) dan Sikep Madu Asia (*Pernis ptilorhynchus*). Lokasi penyebaran Elang Jawa di antaranya di lokasi Loji, Tapos, Curug Nangka, Curug Seribu dan Kawah Ratu dengan ketinggian berkisar antara 797 – 1.383m dpl.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
57	Risma Angeliza;2014;Skripsi	Perilaku Harian Kukang Jawa (*Nycticebus javanicus* Geoffroy 1812) di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Jawa Barat	Perilaku harian dua invidu *N. javanicus* paling dominan berturut-turut berpindah tempat (37.9%), makan (21.8%), aktif (12.5%) dan mencari makan (12.3%). Perilaku harian yang banyak dilakukan di malam hari menunjukkan bahwa kukang termasuk hewan nokturnal. Jenis pakan alami N. javanicus yang paling diminati berturut-turut adalah nektar (79.9%), getah (16.6%), serangga (3.0%) dan buah (0.5%). Fase bulan memiliki pengaruh paling besar terhadap perilaku harian *N. javanicus*. Korelasi aspek iklim dan fase bulan di TNGHS Jawa Barat terhadap perilaku harian N. javanicus adalah sebesar 59.3%.	
58	Narsi, dkk;2014;Jurnal	Studi Perkembangan Perilaku Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi* Stresemann 1924) di Pusat Rehabilitasi Suaka Elang, Bogor	Berdasarkan hasil penelitian tentang perkembangan perilaku elang Jawa di Pusat Rehabilitasi Suaka Elang dapat disimpulkan bahwa perilaku yang diamati selama tahapan observasi, sosialisasi dan habituasi yaitu berupa aktivitas bertengger, terbang, bersuara, berburu dan makan. Perkembangan perilaku pada tahapan observasi di nilai mengalami peningkatan perilaku yaitu perilaku terbang, mampu mengenali pakan mati/hidup dan mampu memanfaatkan makanan dengan total nilai perilaku 117 hingga 129, sedangkan pada tahapan sosialisasi, perlakuan di nilai dapat meningkatan perilaku elang Jawa di dalam kandang dengan total nilai 117 hingga 123. Elang Jawa mampu memanfaatkan tenggeran untuk terbang dan berburu serta mampu memanfaatkan mangsa dengan baik. Pada tahapan habituasi, memperoleh nilai sebesar 117 hingga 121. Perilaku elang Jawa di dalam kandang terpantau belum begitu banyak melakukan aktivitas. Hal ini di duga elang Jawa masih memerlukan waktu untuk beradaptasi pada kondisi lingkungan pelepasliaran.	
59	Eka Arismayanti;2014;Skripsi	Daerah Jelajah dan Penggunaan Ruang Kukang Jawa (*Nycticebus javanicus*) di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Daerah jelajah kukang jawa berada di ketinggian 941.66 hingga 1361.1 m dpl. Luas daerah jelajah sebesar 5.58 ha hingga 5.44 ha. Vegetasi yang ada pada ketinggian tersebut didominasi oleh kaliandra, bungbuai, dan kisampang. Stratum ketinggian pohon yang digunakan oleh kukang jawa adalah kanopi bawah dengan ketinggian dua hingga 15 meter, dan stratum pohon kanopi tengah dengan ketinggian 15 hingga 22 meter. Perubahan luas daerah jelajah terjadi akibat ketersediaan sumber pakan dan kebutuhan terhadap rasa aman untuk melahirkan. Luas daerah tumpang tindih yang kecil (10%) menunjukkan interaksi yang sedikit antara dua kukang. Penggunaan ruang dipengaruhi oleh jenis tumbuhan, ketinggian posisi dan ukuran cabang.	Penelitian mengenai daerah jelajah kukang jawa perlu dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama, sekitar satu tahun untuk mengetahui perbedaan luas daerah berdasarkan musim dan fenologi vegetasi. Perlu dilakukan habituasi yang lebih lama antara kukang liar dengan keberadaan pengamat.
60	Abdul Haris Mustari, dkk;2015;-Jurnal	Kelimpahan Jenis Mamalia Menggunakan Kamera Jebakan Di Resort Gunung Botol Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Secara keseluruhan jumlah jenis mamalia yang ditemukan menggunakan kamera jebakan, perangkap hidup, dan pengamatan langsung di Resort Gunung Botol TNGHS adalah 23 jenis, termasuk kedalam 12 famili. Kelimpahan jenis mamalia tertinggi yaitu kijang (*Muntiacus muntjak*) dengan nilai 31,25%, kemudian disusul oleh musang luwak (*Paradoxurus hermaphro-ditus*) dengan nilai 21,87% dan tikus (*Rattus sp*) dengan nilai 12,5%. Kelimpahan terendah terdapat pada tikus belukar (*Rattus tiomanicus*), tupai kekes (*Tupaia javanica*), bajing kelapa (*Callosciurus notatus*), teledu sigung (*Mydaus javanensis*), kucing congkok (*Prionai-lurus bengalensis*) dan linsang (*Prionodon linsang*) yaitu 3,12%.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
61	Kanthi Hardina ;2015;Skripsi	Kriteria Habitat Sebagai Tempat Pelepasliaran Elang Brontok (*Nisaetus cirrhatus*, Gmelin 1788) Di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Ketersediaan pakan yang cukup baik jenis ataupun jumlah yakni sebesar 1.23-1.97 kg per individu. Potensi pakan elang brontok berupa mamalia, burung, reptil dan amfibi. Pakan aktual elang brontok adalah jenis mamalia berupa bajing dan tupai serta jenis reptil berupa kadal kebun dan bunglon surai. Pada daerah Loji dan Pongkor ketersediaan pakan aktual mencukupi kebutuhan pakan elang brontok. 2. Ketersedian tempat bersarang dan tempat berburu. Tempat bersarang elang brontok adalah pohon yang lebih tinggi dari pohon lainnya (emergent tree). Pada daerah Loji jenis pohon yang dijadikan pohon sarang adalah jenis randu (*Ceiba petandra*) dengan tinggi 35 m, sedangkan pada daerah Pongkor pohon sarang adalah jenis rasamala (*Altingia excelsa*) dengan tinggi 32 m. Lokasi pohon sarang berada pada punggungan bukit dengan kelerengan curam. Tempat berburu elang brontok adalah daerah yang relatif terbuka. Pada daerah loji terdapat habitat berburu elang brontok yaitu hutan yang berbatasan dengan kebun teh, sedangkan pada daerah Loji adalah hutan yang berbatasan dengan sawah. 3. Interaksi elang brontok dengan yang lainnya tidak terlihat secara langsung, namun interaksi elang brontok dengan sesamanya terlihat pada daerah Pongkor. Pada lokasi Loji dan Pongkor terdapat penggunaan habitat elang brontok oleh jenis elang lain seperti elang jawa, elang hitam dan elang ular bido. Penggunaan habitat ini biasanya untuk aktivitas soaring. Tempat pelepasliaran elang brontok yang dipilih merupakan habitat hutan yang belum dihuni oleh jenis elang lain. Pada daerah Loji dan Pongkor terdapat jenis elang lain, namun jenis-jenis tersebut memiliki relung dan preferensi yang berbeda sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup elang brontok. 4. Ditemukan gangguan dan ancaman pada habitat elang brontok di Loji dan Pongkor. Gangguan dan ancaman tersebut berasal dari aktivitas manusia dan termasuk kedalam gangguan tak langsung . Gangguan dan ancaman yang ada di daerah Loji berupa penyadapan getah pinus. Di daerah Pongkor berupa aktivitas pertambangan dan pencemaran air sungai akibat aktivitas tersebut. Tempat pelepasliaran elang brontok yang dipilih merupakan kawasan yang dilindungi dan terisolasi sehingga elang brontok terhindar dari gangguan dan ancaman. Pada daerah Loji dan pongkor terdapat gangguan daan ancaman, meskipun demikian gangguan dan ancaman tersebut tidak mengganggu keberadaan elang brontok.	1. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut pada setiap kriteria habitat terutama pada kriteria pakan elang brontok. Sehingga diketahui jenis pakan aktual elang brontok. 2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai habitat elang brontok yang berada pada daerah dataran rendah agar dapat diketahui kriteria habitat elang brontok didaerah dataran rendah. Kriteria-kriteria tersebut akan memudahkan pencarian tempat pelepasliaran elang brontok yang ideal.
62	Ega Mulya Putri;2015;Skripsi	Keanekaragaman Kumbang Sungut Panjang (Coleoptera : Cerambycidae) Di Kawasan Resort Salak 2-Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Keanekaragaman Kumbang Sungut Panjang di tiga habitat di TNGHS tergolong sedang, yaitu dengan rentang nilai H'=1,2-1,69 2. Pola sebaran sungut panjang pada tiga habitat (Hutan Rasamala, Hutan Pinus, dan Hutan Alam Yaitu seragam dan berkelompok)	Perlu dilakukan penelitian mengenai tanaman inang yang spesifik di kunjungi oleh kumbang sungut panjang. Berkurangnya aktifita manusia akan berdampak baik terhadap kumbang sungut panjang
63	Aditya Nurcahyani;2015;Skripsi	Aktivitas Harian dan Wilayah Jelajah Kukakng Jawa (*Nycticebus javanicus* Geoffroy 1812) di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Aktivitas harian kukang jawa tertinggi berturut-turut adalah aktivitas makan, berpindah tempat, menelisik, mencari makan, aktif, in-aktif, dan sosial. Selama penelitian kukang jawa tidak teramati melakukan aktivitas abnormal 2. Perhitungan dengan metode FK memberikan rata-rata luas wilayah jelajah 4.13 ha dengan dua daerah inti seluas 1 ha, sedangkan dengan metode MCP memberikan rata-rata luas wilayah jelah 8.16 ha.	1. Perlu adanya monitoring berkala mengenai aktivitas harian, wilayah jelajah, dan potensi pohon tidur kukang jawa agar menghasilkan data yang berkelanjutan (time series). 2. Diperlukan penelitian dengan obyek kukang jawa liar jantan, agar dapat mengetahui keberlanjutan dari populasi kukang jawa di TNGHS.

NO	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
			3. Kukang jawa memiliki jelajah harian rata-rata sebesar 558.33 m, radius maksimum rata-rata sebesar 167.30m, dan perbedaan lokasi tempat tidur rata-rata sebesar 172.61m. 3. Komposisi vegetasi pada habitat kukang jawa terdiri atas 22 jenis tumbuhan. Pohon tidur kukang jawa yang teramati adalah kokosan monyet dan liana cangkore pada pohon reungas.	2. Bubuay dapat dijadikan pengayaan pakan alami kukang selama masa rehabilitasi. 3. Diperlukan pemeliharaan kondisi vegetasi karena di TNGHS berpotensi sebagai habitat kukang jawa dengan sumber pakan yang cukup beragam
64	Rizky Amalia Aztiatti;2015;Skripsi	Keberhasilan Pelepasliaran Kukang Jawa (*Nycticebus javanicus* Geoffroy, 1812) di Tinjau dari Aktivitas Harian di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Aktivitas harian tertinggi pada kukang jawa rehabilitan adalah aktivitas berpindah tempat, sedangkan aktivitas harian tertinggi pada kukang jawa liar adalah aktivitas makan. 2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara aktivitas harian kukang rehabilitan dan kukang liar sehingga pelepasliaran kukang jawa di TNGHS diasumsikan belum berhasil. Namun, asumsi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hasil akhir penilaian keberhasilan pelepasliaran kukang karena pengamatan dilakukan kurang dari masa stabil kukang. Perbedaan aktivitas harian tersebut juga diduga diakibatkan oleh karakteristik habitat lokasi pelepasliaran yang berbeda dengan habitat asal lokasi kukang. 3. Hutan TNGHS mampu mendukung kehidupan kukang jawa karena menyediakan tempat tidur maupun tempat makan. Kukang jawa menggunakan pohon dan liana sebagai tempat tidur. Terdapat 30 jenis tumbuhan di habitat kukang jawa di TNGHS.	1. Bungbuay dapat dijadikan sebagai jenis pengayaan pakan alami selama masa rehabilitasi untuk menumbuhkan dan melatih insting liar kukang. 2. Diperlukan penelitian dengan kurun waktu yang lebih lama untuk mengetahui keberhasilan pelepasliaran kukang, sekurangnya sama dengan masa yang diperlukan kukang untuk stabil. Kegiatan pelepasliaran juga sebaiknya mempertimbangkan habitat lokasi pelepasliaran berdasarkan asal lokasi kukang. 3. Vegetasi yang mendukung kelangssungan hidup kukang perlu dijaga agar fungsinya sebagai habitat tidak terganggu dan sehingga berpotensi untuk dilakukan kegiatan pelepasliaran.
65	Alya Farianti, dkk;2015;Jurnal	Kesesuaian Habitat Elang Ular Bido (*Spilornis cheela* LATHAM, 1790) DI KORIDOR HALIMUN SALAK (Habitat Suitability of Crested serpent eagle (*Spilornis cheela* Latham, 1790) in Halimun Salak Corridor)	1. Peubah utama yang mempengaruhi kesesuaian habitat elang ular bido ialah ketinggian tempat dari permukaan laut (x1), jarak dari sungai musim (x2), jarak dari sungai permanen (x3), suhu permukaan (x4), kemiringan lahan (x5) dan jarak dari pemukiman (x6). 2. Persamaan Skor Kesesuaian Habitat (SKH) yang diperoleh yaitu SKH = 0.849 x1 + 0.846 x2+ 0.748 x3 – 0.871x4 + 0.810 x5 + 0.719 x6. 3. Luas area kesesuaian habitat rendah mencakup 27% luas wilayah KHS (1.568 ha), area kese-suaian sedang mencakup 38% (2.194 ha) dan area kesesuaian tinggi men-cakup 35% (2.001 ha). 4. Keberadaan potensi pelindung danpakan menunjukkan bahwa wilayah KHS masih dapat mendukung keberlangsungan hidup elang ular bido	1. Untuk memahami lebih jauh mengenai kesesuaian habitat elang ular bido, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang mempertimbangkan faktor kekayaan jenis mangsa serta tingkat aksesibilitas dan detektabilitas terhadap mangsa. 2. Berkaitan dengan preferensi elang ular bido yang tinggi terhadap daerahdaerah terbuka dan area tepi hutan, pengelola kawasan KHS dipandang perlu memberikan perhatian khusus pada area tersebut untuk menekan tingkat gangguan terhadap elang ular bido dan jenis-jenis mangsanya.
66	Afroh Manshur;2015;Tesis	Model Habitat Trenggiling Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. *M. javanica* memilih habitat yang memiliki 9 karakteristik khusus yang dikelompokkan menjadi 6 ciri utama, yaitu: 1) kerapatan tutupan tajuk atas dengan kategori tinggi yang dicirikan dengan nilai kerapatan yang sangat tinggi pada tumbuhan tingkat tiang (498.67±150.14 individu / ha) dan jarang pada tumbuhan tingkat pohon (160.33±113.25 individu / ha), 2) jumlah jenis tumbuhan yang digunakan sebagai sarang pakan dengan kategori cenderung jarang (5.13 ± 1.41 jenis / ha), 3) keberadaan pakan yang sangat dekat di sekitar sarang M. javanica (118.66 ± 156.46 m), 4) kecenderungan tidak ada kompetitor (426.86 ± 366.25 m) dan predator di sekitar sarang M. javanica(2,492.90 ± 1,484.24 m), 5) kelerengan lahan sangat curam (72.23 ± 17.93%) dan 6) tekstur tanah pada lokasi yang cenderung dikategorikan sedang (tekstur lempung).	1. Areal-areal yang memiliki karakteristik habitat tersebut di TNGHS dapat dipertahankan sebagai areal pengelolaan M. javanica. 2. Melakukan inventarisasi M. javanica untuk mengetahui populasinya dengan dasar stratifikasi plot berdasarkan kelas kesesuaian habitat M. javanica di TNGHS. 3. Memperhatikan faktor pakan, suhu, kelembaban, tekstur tanah manajemen 4. kandang ketika penangkaran M. javanica hendak dilakukan. 5. Mengembangkan model pengelolaan berbasis sosial ekologi (Co-adaptive 6. management) di TNGHS.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
			2. Terdapat 8 komponen habitat yang mempengaruhi kehadiran M. javanica di suatu lokasi, yang terdiri dari 3 komponen biotik (jumlah jenis dan dominasi jenis tumbuhan sarang pakan serta jarak dari kompetitor) dan 5 komponen abiotik (suhu udara, kelembaban relatif, ketinggian tempat, besaran fraksi debu dan rataan kelerengan lahan). 3. Sifat selektif M. javanica diketahui dari 3 fungsi habitat, yakni habitat makan yang berkorelasi positif dengan jumlah jenis tumbuhan sarang mangsanya, habitat istirahat yang berkorelasi negatif dengan persentase fraksi debu, ketinggian tempat dan keberadaan kompetitornya serta habitat reproduksi dan mengasuh anak yang berkorelasi positif dengan suhu udaranya. 4. Model terbaik dalam pendugaan kehadiran *M. javanica* disuatu lokasi lebih dipengaruhi oleh komponen biotiknya dengan model regresi y= 1.467 - 0.093 *ZJumlah jenis tumbuhan sebagai sarang mangsa - 0.091*ZDominasi tumbuhan sarang mangsa pada tingkat pohon - 0.089*ZJarak terhadap kompetitor (r =0.472, sig.= 0.076).	
67	Andi Nugraha Cahyana;2015;Tesis	Pemodelan Spasial Kesesuaian Habitat Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi* Stresemann, 1924) Di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	1. Model kesesuaian habitat EJ yang terbentuk menunjukkan areal dengan kelas KT bagi EJ sebagian besar (94.43%) berada pada kawasan TNGHS. Hal ini mengindikasikan bahwa TNGHS merupakan areal yang sangat penting bagi keberadaan EJ. 2. Variabel yang mempengaruhi sebaran EJ di lokasi penelitian adalah ketinggian, FCD, curah hujan, suhu, jarak dari jalan, jarak dari pemukiman, dan kepadatan penduduk. EJ di lokasi penelitian cenderung menyukai habitat hutan perbukitan yang cukup basah dan sejuk dengan tingkat gangguan atau aktifitas manusia yang relatif sedikit dibandingkan dengan lokasi lainnya.	1. TNGHS merupakan areal yang sangat penting bagi keberadaan EJ. Guna menjaga kelestarian populasi EJ, maka areal-areal yang merupakan habitat utama bagi EJ khususnya di dalam kawasan TNGHS perlu tetap dipertahankan dan dilestarikan. 2. Terdapat empat patch areal dengan kesesuaian habitat tinggi bagi EJ di areal TNGHS yang saling terpisah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menghubungkan tiap kantung habitat tersebut agar keragaman genetik EJ tetap terjaga. Salah satu upaya yang mungkin dilakukan adalah dengan pengkayaan jenis vegetasi pada areal dengan kesesuaian habitat sedang dan rendah mengingat vegetasi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi sebaran EJ 3. Model kesesuaian habitat EJ yang telah terbentuk diperoleh dari variabel dengan skala ukur yang luas sehingga model serta inoformasi yang didapatkan hanya bisa diaplikasikan pada skala makro. Untuk mendapatkan informasi dan model yang spesifik seperti areal berburu atau area bersarang maka perlu dilakukan kajian dengan skala mikro habitat dengan variabel yang lebih spesifik.
68	Richard S. Moore;2015;Jurnal	Factors influencing stereotypic behaviours of animals rescued from Asian animal markets: A slow loris case study	Our study assessed the prevalence of stereotypic behaviour in captive Indonesian slow lorises at CPC. We described the behaviours witnessed and attempted to predict the occurrence of stereotypies by testing hypotheses. We found sex composition and numbers of conspecificsto be associated with stereotypic behaviour. The association between stereotypic behaviour and extrinsic variables is complex and this study indicates that numerous interconnecting factors are responsible for the existence of stereotypic behaviours. A genetic disposition to stereotypies is observed in some animals (Schwaibold and Pillay, 2001), which may explain the difficulty in identifyingspecific factors. Uncovering the causes behind the manifestation of stereotypies is of vital importance to measuring welfare levels in captivity and predicting how animals will cope once reintroduced into the wild. It will prove difficult to survey the necessary factors during their time in the wildlife trade, therefore, future research should focus into the genetic predisposition of stereotypic behaviours inrescue centre animals	

NO	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
69	Mia Clarissa Dewi;2016;Tesis	Analisis Karakteristik Wilayah Jelajah Owa Jawa (*Hylobates moloch*) Di Resor Cikaniki Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Rerata luas jelajah harian dan wilayah jelajah owa jawa di Resot Cikaniki adalah 12.19 ha/hari dan 33.41 ha dengan areal tumpang tindih 2.31 ha dari 3 kelompok. Luas wilayah tersebut tidak jauh beda dengan penelitian sebelumnya (2007 - 2015). 2. Rerata daerah inti sebesar 3.02 ha dan daerah teritori sebesar 0.57 ha. Nilai kerapatan dan keragaman pohon pakan di daerah teritori lebih besar dibandingkan daerah lainnya yaitu 116.7 ind/ha dan 76.7 ind/ha). Keadaan sumber pakan yang melimpah menyebabkan owa jawa berusaha untuk mempertahankannya 3. Karakteristik habitat owa jawa memiliki strata yang lengkap dan tajuk yang menyambung dengan selang ketinggian pohon yang aktif digunakan adalah 21-30 m (42.17%). Owa jawa paling sering memanfaatkan lokasi 3B dalam strata pohon sebesar 68.62% yang dipengaruhi oleh keberadaan liana sebagai sumber pakan.	1. Kondisi habitat yang stabil diperlukan pemeliharaan melalui aktivitas pengawasan secara rutin dan partisipatif oleh petugas TNGHS dan masyarakat terhadap kerusakan habitat. 2. Monitoring wilayah jelajah secara rutin perlu dilakukan sebagai bahan evaluasi dalam kebijakan penggunaan lahan rendah emisi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 3. Perlu dilakukan penelitian karakteristik wilayah jelajah pada ketinggian habitat yang berbeda sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam kegiatan translokasi atau reintroduksi owa jawa.
70	Gunawan,dkk;2016;Jurnal	New Homes on Misty Mountains : Javan Hawk-Eagle *Nisaetus bartelsi* and Changeable Hawk-Eagle *Nisaetus cirrhatus* Nesting in Gunung Halimun Salak National Park, West Java, Indonesia	Kami menemukan bahwa menemukan sarang Elang Jawa lebih sulit daripada menemukan sarang Elang Brontok. Elang Jawa membuat sarangnya di pohon yang lebih tinggi, dengan ketinggian yang lebih tinggi, di lereng yang lebih curam, dan lebih dekat ke sumber air. Berdasarkan pemantauan selama tiga tahun terhadap 7 sarang Elang Brontok dan l5 sarang Elang Jawa di Taman Nasional. Keberhasilan perkembangbiakan Elang Brontok ditemukan lebih tinggi daripada Elang Jawa.	
71	Mia Clarissa Dewi,dkk;2016;-Jurnal	Wilayah Jelajah dan Teritori Owa Jawa (*Hylobates moloch*) di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Dari 3 kelompok, rerata luas jelajah harian dan wilayah jelajah Owa Jawa di Resor Cikaniki adalah 12,19 ha/hari dan 33,41 ha dengan rerata daerah teritori sebesar 0,57 ha. Kondisi habitat Owa Jawa di Resor Cikaniki cukup stabil dari 2007-2015, meskipun terjadi kerusakan habitat dalam skala kecil. Rerata kerapatan dan keragaman pohon pakan di daerah teritori lebih besar dibandingkan wilayah jelajah yaitu 116,7 ind/ha dan 76,7 jenis/ha. Keadaan sumber pakan yang melimpah menyebabkan Owa Jawa berusaha untuk memper-tahankannya.	Pelestarian terhadap kawasan yang sudah diketahui sebagai habitat Owa Jawa perlu dilakukan. Penelitian tentang wilayah jelajah Owa Jawa juga perlu dilaksanakan pada ketinggian habitat yang berbeda sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam kegiatan translokasi atau reintroduksi Owa Jawa.
72	Ivanna Febrisa;2016;Skripsi	Aktivitas Harian Owa Jawa Remaja (*Hylobates moloch* Audebert,1798) Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Rata-rata aktivitas harian owa jawa remaja adalah 9 jam 56 menit dengan empat aktivitas utama yaitu makan, berpindah, istirahat dan aktivitas sosial seperti berkutu-kutuan (grooming), bermain dan bersuara yang dimulai pukul 06.00 –07.00 WIB dan diakhiri pada sore hari menjelang malam yaitu sekitar pukul 16.30 – 17.00 WIB. 2. Persentase rata – rata aktivitas harian dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah aktivitas istirahat (36.21%), aktivitas makan (33.33%), bergerak (23.05%), sosial (4.94%) dan tidak terlihat (2.47%). 3. Terdapat 12 spesies yang dijadikan pakan oleh owa jawa. Spesies yang berhabitus pohon berjumlah 10 spesies dan berhabitus liana berjumlah 2 spesies. Bagian tumbuhan pada pohon pakan yang digunakan berupa buah matang sebanyak 7 spesies, buah mentah sebanyak 1 spesies dan daun muda sebanyak 4 spesies. 4. Terdapat 4 spesies pohon yang dijadikan sebagai pohon tidur. Jenis pohon tersebut adalah saninten, rasamala, pasang, dan puspa. Strata pohon tidur didominasi oleh strata A (lebih dari 30 m).	1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait sensitivitas individu muda owa jawa di Cikaniki – Citalahab. 2. Perlu adanya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan agar tetap menjaga habitat owa jawa sehingga populasinya tetap lestari.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
73	Soojung Ham,dkk;2016;Jurnal	Song Functions In Nonduet-ting Gibbons : Evidence From Playback Experiments On Javan Gibbons (*Hylobates moloch*)	Owa jawa lebih cepat bergerak ke arah rekaman suara yang disiarkan di tengah wilayah, rekaman suara asing, dan rekaman suara individu yang tidak berpasangan daripada rekaman suara di perbatasan, suara kelompok lain, dan suara dari individu yang berpasangan. Hasil ini menunjukkan bahwa owa jawa dapat melokalisasi suara, dan owa jawa mengirimkan informasi tentang identitas dan status pasangan pemanggil. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa suara owa jawa yang tidak berpasangan cenderung berfungsi untuk pertahanan wilayah dan menunjukkan ikatan pasangan seperti duet pada primata lainnya.	Untuk memahami sepenuhnya fungsi-fungsi suara dalam duetting dan nonduetting Owa jawa, studi mengenai konteks perilaku bersuara spontan di Alam. Pendekatan ini dapat membantu dalam mengeksplorasi fungsi-fungsi suara dalam primata yang berpasangan dan juga dapat menjelaskan pola evolusi suara dalam primata monogami secara sosial.
74	Yunita MA;2016;Tesis	Variasi Komunitas Makroavertebrata di Hulu Sungai Cisadane Berdasarkan River Continuum Concept	Perubahan kondisi fisik sungai (orde sungai, penutupan kanopi vegetasi, dan tata guna lahan) di hulu Sungai Cisadane mempengaruhi struktur dan fungsi komunitas makroavertebrata, serta menunjukkan kesesuaian dengan river continuum concept. Begitu juga dengan nilai-nilai atribut penting ekosistem hulu Sungai Cisadane menunjukkan kesesuaian dengan river continuum concept. Keberadaan Taman Nasional Gunung Halimun-Salakmemiliki peran penting dalam mempertahankan diversitas dan mendukung kondisi ekologi yang baik di hulu Sungai Cisadane.	Analisis lebih lanjut mengenai bahan organik CPOM, TFPOM, dan BF-POM perlu dilakukan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dari pengukuruan langsung dengan yang menggunakan rasio FFG. Selain itu juga penggunaan masing-masing metode tersebut akan dapat dibandingkan kelebihan dan kekurangannya
75	Rani Wulan Suci;2016;Jurnal	Serangga Air Sebagai Indikator Biologis Cemaran Air Di Sungai Cikaniki, Desa Citalahab, Tn. Gunung Halimun Salak, Jawa Barat	Pencemaran organik dapat dilihat melalui nilai BMWP (Biological Monitoring Working Party) yang bernilai 46	
76	Dewi M. Prawiradilaga;2016;-Jurnal	Birds Of Halimun-Salak National Park, West Java, Indonesia: Endemism, Conservation And Threatened Status	Gunung Halimun-Salak National Park as a part of the Endemic Bird Area 160 has the highest bird species richness in the Java-Bali region, especially in terms of endemic restricted range species. However, only some of the restricted range bird species recorded in the area have been protected	
77	Gunawan,dkk;2017;Jurnal	Nest Cycle and Nestling Development of a Pair of Changeable Hawk-Eagles (*Nissaetus cirhatus)* in Gunung Halimun Salak National Park, West Java	Monitoring sarang Elang Brontok (*Nisaetus cirrhatus*) di TNGHS saat musim berbiak pada bulan Juli dimana Masa pengeraman dan pengasuhan anak secara berurutan diperkirakan selama 50 dan 62 hari, tetapi karena saat bertelur dan saat menetas tidak teramati langsung, ada kemungkinan bahwa periode pertama kelebihan dan periode kedua kurang dari perkiraan. Gabungan periode tersebut (112 hari) sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa perkiraan minimum adalah 108 hari. panjang tubuh anakan (termasuk ekor) pada tahun 2013 bertambah sekitar 6 cm setiap minggu. Dari 21 jenis pakan yang dibawa indukan, 13 (62%) adalah reptil dan hanya tiga diantaranya adalah mamalia	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
78	Soojung Ham,dkk;2017;Jurnal	Female Songs of The Nonduetting Javan Gibbons (*Hylobates moloch*) Function For Teritrorial Defense	Owa jawa betina dapat mempertahankan wilayahnya dengan mengumumkan batas wilayah di daerah tumpang tindih melalui aktivitas bersuara dan dengan memimpin gerakan jelajah harian yang mencakup kunjungan ke daerah yang diperebutkan. Sebaliknya, owa jawa jantan jarang bersuara tetapi memiliki tanggung jawab utama untuk mengejar pejantan tetangganya selama pertemuan antarkelompok (Kappeler 1984).	Penelitian lebih lanjut tentang perbedaan jenis kelamin dari berbagai jenis perilaku teritorial dapat membantu menjelaskan fungsi bersuara dan hilangnya duet pada Owa Jawa.
79	Haneda NF,dkk;2017;Jurnal	Spread of Collembola at Different Altitudes and Their Response to the Environment at Gunung Halimun-Salak National Park	Kelimpahan individu Collembola tertinggi berada pada ketinggian 1.100 m dpl. Kondisi habitat 1.100 m dpl masih baik karena jauh dari pemukiman. Entomobryidae cenderung dekat dengan ketinggian 1.300 m dpl. Faktor lingkungan yang paling berpengaruh terhadap kelimpahan Collembola dari data korelasi adalah ketebalan serasah.	
80	Mirza Dikari Kusrini ;2017;Jurnal	Morphological And Ecological Observations On Chiromantis Vittiger (Anura: Rhacophoridae) In Mount Halimun - Salak National Park, Indonesia		
81	Gunawan,dkk;2017;Jurnal	Nest cycle and nestling development of a pair of Changeable Hawk Eagles *Nisaetus cirrhatus* in Gunung Halimun-Salak National Park,West Java		
82	Achmad Reza Maulana;2018;Skripsi	Persebaran Dan Preferensi Pohon Tidur Owa Jawa (*Hylobates moloch* Audebert 1798) Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai persebaran, didapatkan 13 pohon tidur pada kelompok A, 7 pohon tidur pada kelompok B, dan 10 pohon tidur pada kelompok S. Kelompok B memiliki rata-rata NPS, DR, dan MR terbesar dibandingkan kelompok A dan S. 2. Rasamala (*Altingia excelsa*) merupakan jenis pohon yang paling sering digunakan oleh owa jawa sebanyak 20 kali. Cabang dengan sudut < 45° dan ketinggian 31-40 m menjadi cabang yang paling sering digunakan untuk aktivitas istirahat owa jawa. Jarak antara pohon tidur dan tumbuhan pakan terbanyak ialah jarak 100-200 m, sementara jarak rata-rata pohon tidur terakhir di sore hari lebih kecil dibandingkan jarak rata-rata pohon tidur pertama pada pagi hari. Lolo menjadi jenis yang paling banyak ditemui berada di sekitar pohon tidur, sementara liana ficus besar menjadi jumlah individu terbanyak yang ada di sekitar pohon tidur.	1. Perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut mengenai jenis-jenis tumbuhan yang digunakan oleh owa jawa. 2. Perlu dilakukan pembatasan kegiatan manusia di areal penelitian.
83	Rahayu Oktaviani,dkk;2018;-Jurnal	Nutrient Composition Of The Diets Of Javan Gibbon *(Hylobates moloch*)	Terbukti dari data ini bahwa owa jawa betina dan jantan memiliki pola makan yang sama dalam hal komposisi keseluruhan. Perbedaan komposisi zat gizi berkorelasi dengan asupan makanan. Data nutrisi yang diberikan di sini tidak mendukung prediksi bahwa betina memiliki waktu makan yang lebih lama daripada jantan. Kesimpulan ini didasarkan pada satu tahap reproduksi betina dan oleh karena itu harus dianggap sebagai awal dan harus diselidiki lebih lanjut secara lebih komprehensif di masa depan.	Penelitian mengenai tentang komposisi nutrisi antara betina dan jantan dalam tahap reproduksi yang berbeda selama siklus tahunan akan memperluas pengetahuan kita tentang diet owa jawa dan membantu menentukan apakah perbedaan perilaku yang terkait dengan strategi penghematan energi ditunjukkan oleh betina di seluruh periode reproduksi dan non-reproduksi.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
84	Kanthi Hardina,dkk;2018;-Jurnal	Komunitas Burung pada Pegunungan Bawah dan Sub Pegunungan Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Jumlah jenis, keanekaragaman jenis, dan kekayaan jenis burung menunjukkan tren yang berbeda yakni meningkat seiring dengan bertambahnya ketinggian. Hal yang tidak biasa ini dipicu oleh kondisi habitat hutan pada daerah pegunungan bawah yang mengalami gangguan habitat lebih banyak dibandingkan dengan daerah sub-pegunungan. Perbedaan antara daerah pegunungan bawah dan sub-pegunungan sebesar 800 mdpl mengakibatkan keanekaragaman jenis burung berbeda nyata yang dibuktikan dengan indeks kesamaan komunitas (IS) sebesar 5% saja. Komposisi guild pada kedua ketinggian memiliki kesamaan yakni tipe guild insektivora terestrial/arboreal merupakan tipe guild yang paling banyak dijumpai pada dua ketinggian tersebut.	
85	Shyntia Apriliadewi;2018;Skripsi	Aktivitas Harian dan Pola Penggunaan Ruang Induk Betina Owa Jawa (*Hylobates moloch* Audebert 1789) di Citalahab, TNGHS	1. Aktivitas harian induk betina owa jawa terdiri atas bergerak, makan, isitirahat, dan sosial. Rata-rata induk betina owa jawa memulai aktivitas pada pagi hari sekitar pukul 5.55 dan berakhir pukul 16.30 - 17.20. Durasi aktivitas harian Ayu dan Keti didominasi oleh aktivitas makan (39.74% dan 36.68%), sementara pada Surti aktivitas istirahat lebih dominan. 2. Induk betina owa jawa dominan menggunakan ruang B2 dan arsitektur pohon yang memiliki arah pertumbuhan cabang orthotropik untuk melakukan aktivitasnya karena ruang tersebut berada di tengah-tengah bagian tajuk dan memiliki ruang di bagian tengah yang agak tertutup, sehingga dapat melindungi induk betina owa jawa dari cuaca buruk maupun predator. Contoh pohon dengan arah pertumbuhan cabang orthotropik yaitu rasamala, pohon ara, dan hamirung.	1. Perlu dilakukan pengamatan lebih lanjut terhadap induk betina kelompok A terkait aktivitas sosialnya yang rendah. 2. Penanaman jenis pohon rasamala dan pohon ara sangat penting bagi habitat alami owa jawa. 3. Area habitat penelitian perlu dijaga dari gangguan kegiatan manusia.
86	Menlinda Agustina;2018;Skripsi	Morfologi Dan Beberapa Aspek Biologi Dan Ekologi Nyamuk Puru Pandan, Trishormomyia pandani Felt (Diptera: Cecidomyiidae)	Karakteristik morfologi larva T. pandani adalah tubuh berwarna kuning transparan hingga merah cerah. Larva awalnya berwarna terang, semakin tua larva maka warna larva semakin gelap. Pada fase pupa sudah dapat dibedakan antara bakal imago jantan dan betina berdasarkan ukuran tubuh dan selubung pupa dan terminalia. Pupa dan imago jantan memiliki panjang dan lebar tubuh lebih kecil daripada pupa dan imago betina. Larva T. pandani terdiri dari empat kelompok ukuran yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa larva nyamuk puru pandan ini memiliki empat instar larva. T. pandani ditemukan hanya menginfestasi spesies pandan P. furcatus dan tidak ditemukan pada spesies pandan yang lain. Gejala puru pada daun pandan tidak ditemukan pada pandan yang tumbuh diketinggian di bawah 1000 mdpl. Parasitoid T. pandani yang menyerang T. pandani adalah Famili Torymidae, Platygasteridae, dan Eupelmidae.	Untuk melengkapi informasi tentang sebaran geografis, morfologi, biologi, dan ekologi nyamuk puru pandan T. pandani, disarankan untuk dilakukan penelitian serupa di daerah lain di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa.
87	Ayu Savitri Nurinsiyah,dkk;2019;Jurnal	Diveristy And Ecology of Land Snails In Gunung Halimun Salak National Park (GHSNP) In Java, Indonesia	Telah dilakukan survey keong darat di kawasan TNGHS pada musim kering (Juni-Juli 2015) yang terkonsentrasi pada empat resort yaitu Cikaniki, Gunung Botol, Cisarua (kawasan Halimun) dan Cidahu (kawasan Salak). Sebanyak 399 spesimen dari 43 spesies telah dikoleksi. Sebelum survei ini dilakukan, tercatat 48 spesies keong darat diketahui berada di TNGHS. Berdasarkan survei terdapat 15 catatan baru keong darat untuk TNGHS, sehingga total 63 spesies keong darat tercatat di taman nasional ini. Angka ini merepresentasikan 25% dari total spesies keong darat yang ada di Jawa. 21 spesies endemik Jawa ditemukan di TNGHS. Kekayaan spesies pada plot di TNGHS memiliki korelasi terhadap pH tanah, sementara komposisi komunitas keong darat ditemukan berkorelasi terhadap elevasi, rata-rata suhu udara tahunan dan jumlah kayu lapuk (kayu mati).	Studi mengenai habitat terdegradasi di TNGHS diperlukan untuk menyelidiki efek degradasi pada komunitas siput asli. Hal ini juga penting untuk menilai sebaran spesies introduksi di TNGHS karena bukaan tutupan tajuk mendukung spesies siput introduksi dengan toleransi kekeringan yang lebih tinggi (Nurinsiyah et al. 2016).

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
88	Ikhwal Riza Ardiansyah;2019;Skripsi	Penggunaan Koridor Sebagai Habitat Macan Tutul Jawa (P*anthera pardus melas,* Cuvier 1809) Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Areal koridor masih digunakan oleh macan tutul jawa sebagai wilayah jelajahnya. Ada empat individu macan tutul jawa yang ditemukan diantaranya dua tutul dan dua kumbang. Struktur umur macan tutul jawa yang ditemukan yaitu tiga individu dewasa dan satu individu dewasa muda (sub-adult), serta semua berjenis kelamin jantan. Keempat individu tersebut saling overlap di tempat yang sama namun menggunakan waktu yang berbeda. 2. Ada 18 satwa mangsa yang ditemukan diantaranya 13 jenis kelompok mamalia dan 5 jenis kelompok burung. Satwa mangsa utama di areal koridor adalah babi hutan, kucing hutan, kijang, kancil, surili, owa jawa, lutung jawa, dan monyet ekor panjang. Jumlah jenis satwa paling banyak ditemukan di hutan lahan kering sekunder dengan kerapatan vegetasi semai dan tumbuhan bawah 72250 individu/hektar, pancang 960 individu/hektar, tiang 410 individu/hektar, dan pohon 178 individu/hektar. Ketersediaan air masih tersebar diseluruh kawasan koridor. 3. Hasil overlay lima variabel yang digunakan diketahui bahwa kesesuaian kelas rendah memiliki luas 291,79 ha atau sebesar 11%, kelas sedang memiliki luas 1019,11 ha atau sebesar 40%, dan kelas tinggi memiliki luas 1247,41 ha atau sebesar 49%. Perjumpaan macan tutul jawa paling banyak berada pada kelas kesesuaian sedang disebabkan keberadaan satwa mangsa yang cukup melimpah. 4. Gangguan terhadap habitat yang ditemukan adalah aktivitas masyarakat seperti penebangan liar, perburuan, pembukaan lahan, aktivitas mencari rumput serta kegiatan motorcross dalam kawasan. Gangguan paling banyak ditemukan adalah aktivitas masyarakat masuk hutan untuk berburu dan mencari rumput.	Penelitian yang telah dilakukan sebatas mengetahui keberadaan macan tutul jawa di koridor, sehingga jumlah dan waktu aktif kamera jebakan yang dipasang memiliki kekurangan dalam proses identifikasi individu. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan mengenai populasi macan tutul jawa khususnya pada kawasan Gunung Halimun dan Gunung Salak yang berdekatan dengan koridor untuk memastikan jumlah individu macan tutul jawa yang menggunakan koridor sebagai lintasannya.
89	Michael Hilgert, dkk;2019;Jurnal	The Myriapoda of Halimun-Salak National Park (Java, Indonesia): overview and faunal composition	Sebanyak 980 spesimen Myriapoda dikumpulkan dengan tangan oleh 3-4 peneliti dari tiga lokasi berbeda di taman nasional, di mana 796 spesimen ditentukan ke tingkat taksonomi yang lebih tinggi (kelas, ordo, famili) dan 617 spesimen ditentukan untuk morfospesies. Di antaranya, 27 adalah Symphyla (4%) (dikecualikan dari analisis lebih lanjut), 226 Chilopoda (28%) dan 543 Diplopoda (68%). Scolopendromorpha (64% dari semua lipan yang diidentifikasi) dan Polydesmida (69% dari semua Diplopoda yang diidentifikasi) adalah ordo yang paling terwakili dalam sampel penelitian ini.	
90	Noor Farikhah Haneda,dkk;2019;Jurnal	Arthropod community at different altitudes in Gunung Halimun-Salak National Park, Western Java, Indonesia	the attributes of soil arthropod community in GHSNP were correlated with the environmental parameters and the species diversity of soil arthropods was negatively correlated with the temperature	
91	Ewi Irfani;2019;Tesis	Komunitas Arthropoda Pada Beberapa Ketinggian Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Total jumlah individu Arthropoda pada tujuh ketinggian yang teramati adalah 7100 individu dengan 22 ordo. Indeks keanekaragaman dan kekayaan jenis Arthropoda tertinggi berada pada ketinggian 1500 mdpl. Jumlah Collembola paling tinggi ada pada ketinggian 1300 mdpl. Indeks kesamaan komunitas Arthropoda tertinggi berada antara ketinggian 700 dan 900 mdpl serta antara ketinggian 1300 dan 1500. 2. Uji korelasi menunjukkan bahwa jumlah morfospesies Arthropoda berkorelasi negatif dengan suhu dan pH dan memiliki berkorelasi positif dengan C-organik, N-total, kelembaban, ketebalan serasah, dan kerapatan vegetasi 3. Peran Arthropoda paling mendominasi adalah Arthropoda predator. Arthropoda predator didominasi oleh famili Formicidae.	Pada penelitian ini terdapat indikasi perubahan trend distribusi Athropoda tanah. Indikasi perubahan trend ini perlu dibuktikan dengan melakukan penelitian lebih lanjut secara berkala.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
92	Kanthi Hardina;2019;Tesis	Komunitas Burung Pada Beberapa Ketinggian Di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	1. Kekayaan jenis burung pada tujuh ketinggian (500, 700, 900, 1100, 1300, 1500 dan 1700 m dpl) sebanyak 87 jenis yang terdiri dari 30 suku. Keanekaragaman jenis burung (H') berbeda-beda pada setiap ketinggian yakni berkisar antara 2.22-3.05. Keanekaragaman jenis burung tertinggi berada di titik tengah rentang ketinggian yakni 1100 m dpl. Keanekaragaman jenis yang tinggi pada titik tengah ketinggian menunjukkan bahwa habitat hutan pada ketinggian ini dapat menyediakan kebutuhan hidup burung. Kesamaan jenis burung tertinggi yakni antara ketinggian 500 dan 700 m dpl. Pada tujuh ketinggian terdapat enam tipe guild dengan tipe guild yang mendominasi pada setiap ketinggian adalah tipe guild insektivora terestrial/arboreal. 2. Perbandingan bobot tubuh dan jumlah salah lintang pada ketinggian 900 dan 1700 m dpl mendapati bahwa bobot tubuh lebih besar serta jumlah salah lintang lebih sedikit pada ketinggian 900 m dpl. 3. Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman jumlah jenis burung tidak berkorelasi dengan jumlah jenis tumbuhan, tutupan tajuk (LAI) dan intensitas cahaya. Jumlah jenis burung hanya berkorelasi dengan suhu (hipotesis 6 diterima).	Penelitian mengenai komunitas burung berdasarkan ketinggian menambahkan sedikit gambaran dan informasi mengenai keanekaragaman, kesamaan komunitas, guild, perbandingan bobot tubuh dan salah lintang di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Hasil penelitian menemukan adanya indikasi perubahan tren. Indikasi perubahan tren ini perlu dibuktikan dengan melakukan penelitian lebih lanjut secara berkala. Selain itu, penggunaan metode jala kabut perlu dilakukan pada setiap ketinggian agar data yang didapatkan lebih baik. Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan habitat hutan pegunungan terluas yang masih tersisa di Jawa Barat. Keberadaan TNGHS sangat penting bagi keberlangsungan hidup jenis burung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamanan dan perlindungan serta peran masyarakat untuk menjaga kelestariannya.
93	M. Deo Bramanrthyo;2019;Skripsi	Pemetaan Area Prioritas Restorasi Habitat Elang Jawa Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Perbandingan nilai flow dapat menujukkan area prioritas restorasi habitat elang jawa. Semakin besar perbedaan nilai flow, maka semakin penting areatersebut untuk direstorasi. Area prioritas restorasi dicirikan dengan tutupan lahan bukan hutan yang memiliki nilai flow rendah dan selisih nilai flow lebih dari 0,000407282. Lokasi yang memiliki tingkat prioritas tinggi adalah Desa Malasari (Perkebunan Teh Nirmala), Sinargalih, Cipeuteuy, Cihambali, Cisarua, dan Pasir Nangka.	Pencatatan dalam monitoring elang jawa perlu dilakukan secara obyektif agar data perjumpaan menunjukkan posisi elang jawa yang sebenarnya. Validasi lapang lanjutan terhadap skenario restorasi dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitasrestorasi. Skenario restorasi dapat digunakan sebagai acuan dalam program restorasi di TNGHS.
94	Rizka Iwanda;2019;Skripsi	Pemetaan Area Restorasi Prioritas Untuk Koridor Habitat Owa Jawa (*Hylobates Moloch* . Audebert 1798) Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Jalur koridor potensial owa jawa ditentukan berdasarkan nilai flow hasil skenario reflow dari Condatis. Semakin besar nilai flow maka semakin penting habitat tersebut bagi konektivitas habitat owa jawa, perubahan nilai flow juga dapat dijadikan acuan untuk mempertimbagkan kawasan restorasi prioritas untuk konektivitas habitat owa jawa, dalam hal ini dibagi menjadi tiga kelas yaitu kelas kepentingan restorasi tinggi (high), kelas kepentingan restorasi menengah (mid) dan kelas kepentingan restorasi rendah (low).	Saran dalam penelitian dengan menganalisis beberapa skenario restorasi yang akan dilakukan di TNGHS sebagai pembanding dengan skenario yang sudah dijalankan. Selain itu juga untuk dapat mengetahui efek dan dampak skenario tersebut terhadap spesies khusunya owa jawa. Penelitian lebih lanjut untuk spesies lain selain owa jawa juga penting untuk dilakukan terutama spesies kunci, guna mendapatkan hasil koridor satwa tidak hanya owa jawa tetapi spesies lain. Studi ekologi satwa yang mendalam juga penting untuk dilakukan guna menduga parameter spesies yang lebih akurat.
95	Noor Farikhan Haneda, dkk;2019;-Jurnal	Arthropod community at different altitudes in Gunung Halimun-Salak National Park, Western Java, Indonesia	This study concluded that the attributes of soil arthropod community in GHSNP were correlated with the environmental parameters and the species diversity of soil arthropods was negatively correlated with the temperature.	
96	Agmal Qodri,dkk;2020;Jurnal	Checklist On Fauna Diversity Gunung Halimun Salak National Park : Cikaniki-Citalahab	Kawasan Cikaniki dan Citalahab TNGHS, meskipun terletak di dekat pemukiman, namun jumlah spesies yang menghuni kawasan tersebut masih tinggi. Berdasarkan penelitian lapangan terbaru, koleksi MZB dan studi literatur tercatat 821 spesies. 123 spesies endemik Jawa menghuni daerah tersebut. Selanjutnya, lima spesies ditetapkan sebagai terancam punah, tiga spesies sangat terancam punah oleh IUCN, dan 34 spesies termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi berdasarkan P.106/MEN-LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.	Penelitian lebih lanjut dan komprehensif tentang keanekaragaman hayati fauna di TNGHS masih diperlukan. Inventarisasi dan pemantauan spesies wajib dilakukan sebagai bagian dari konservasi keanekaragaman hayati pada khususnya dan konservasi kawasan pada umumnya. Selain itu, meningkatkan kesadaran dan menegakkan upaya konservasi di kawasan ini sangat penting untuk melindungi spesies dan habitatnya.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
97	Ivanna Febrisa,dkk;2020;Jurnal	Aktivitas Harian Owa Jawa Remaja (*Hylobates moloch* Audebert,1798) Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Tidak ada indikasi perubahan perilaku pada owa jawa remaja di Citalahab TNGHS. Persentase aktivitas harian dari yang tertinggi hingga terendah adalah istirahat (36,21%), makan (33,33%), bergerak (23,05%), bersosialisasi (4,94%) dan tidak terdeteksi (2,47%).	
98	Yoonjung Yi;2020;Jurnal	Fighting For What It's Worth : Participation And Outcome of Inter-Group Encounters In A Pair-Living Primate, The Javan Gibbon (*Hylobates moloc*h)	Faktor sosio-ekologi mempengaruhi partisipasi individu dalam konflik antar kelompok. Jantan berpartisipasi terutama dengan mengejar lawan untuk melindungi pasangan dan bayi. Jantan tidak berpartisipasi dalam melindungi sumber makanan. Betina sebaliknya, berpartisipasi terutama dalam bersuara, kemungkinan besar untuk menujukkan status reproduksi mereka. Probabilitas memenangkan pertemuan antar kelompok hanya lebih tinggi ketika ada betina yang berkeliaran di sekitar. Intensitas penggunaan ruang atau tingkat agresi tidak berpengaruh pada hasil pertemuan antar kelompok. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertahanan pasangan dan bayi sangat penting untuk owa jawa jantan, terutama mengingat sistem pasangan-hidup mereka, interval antar kelahiran yang panjang, dan perkembangan bayi yang lambat.	
99	Yoonjung Yi,dkk;2020;Jurnal	Impacts Of Intergroup Interactions On Intragroup Behavioral Changes In Javan Gibbons (*Hylobates moloch*)	Studi ini memberikan wawasan tentang strategi perilaku dalam menanggapi interaksi antarkelompok dalam Owa Jawa. Peneliti menemukan perubahan aktivitas yang berkaitan dengan potensi mencari makan-kewaspadaan selama intergroup encounters (IGE) dan pemilihan pohon tidur mungkin merupakan salah satu mekanisme untuk menghindari potensi IGE agresif. Adanya penurunan perilaku afiliasi pada pasangan Owa Jawa setelah IGE, tidak seperti temuan untuk spesies hewan lainnya termasuk manusia di mana perilaku afiliasi meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IGE memiliki berbagai efek pada perilaku intragroup Owa Jawa: langsung (selama pertemuan), segera (dalam 1 jam setelah pertemuan), dan mungkin lebih lama (pada akhir hari dengan pertemuan).	Studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana konflik antarkelompok mempengaruhi perilaku hewan sehubungan dengan faktor-faktor termasuk studi sosial dan IGE.
100	Yoonjung Yi,dkk;2020;Jurnal	Information Transfer Through Food From Parents To Offspring In Wild Javan Gibbons	Penelitian dilakukan dengan mengamati 83 kasus transfer makanan dari induk Owa Jawa ke bayinya (infant) dalam tiga kelompok selama periode 19 bulan di TNGHS. Infant memulai semua ajakan yang ditujukan kepada induk betina dan satu ajakan kepada induk jantan. Tingkat permintaan makanan menurun seiring bertambahnya usia infant dan berhenti sebelum disapih. Seperti yang diprediksi oleh hipotesis informasi, infant meminta lebih banyak makanan yang sulit diperoleh dan disukai oleh induknya. Berlawanan dengan hipotesis nutrisi, infant lebih sering meminta makanan berkualitas rendah daripada makanan berkualitas tinggi. Induk tidak mengubah kemungkinan transfer makanan sesuai dengan karakteristik makanan atau usia infant. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi utama transfer makanan dari ibu ke bayi Owa Jawa tampaknya adalah transfer informasi daripada bantuan nutrisi, mirip dengan Apes.	
101	Ikhwal Riza Ardiansyah,dkk;2020;Jurnal	Analisis Kesesuaian Koridor Halimun Salak Sebagai Perluasan Habitat Macan Tutul Jawa (*Panthera pardus melas*) Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Areal koridor Halimun Salak dapat menjadi perluasan habitat macan tutul jawa dibuktikan dengan temuan empat individu macan tutul jawa (*Panthera pardus melas*) yang masih menggunakan areal koridor sebagai wilayah jelajahnya, diantaranya satu tutul dan tiga kumbang. 2. Keempat individu tersebut saling overlap di tempat yang sama, namun menggunakan waktu aktivitas yang berbeda. Perbedaan waktu aktivitas diduga untuk menghindari pertengkaran antar individu jantan.	Meningkatkan pengamanan melalui patroli di area koridor untuk mencegah perusakan habitat macan tutl jawa (perburuan dan pembukaan lahan garapan)

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
101			3. Perjumpaan macan tutul jawa berada pada kelas sedang karena keberadaan satwa mangsa yang cukup melimpah, yaitu antara lain : babi hutan, kucing hutan, kijang, kancil,surili, owa jawa, lutung jawa, dan monyet ekor panjang. 4. Gangguan habitat yang paling banyak dijumpai adalah aktivitas berburu di dalam hutan.	
102	Wardi Septiana;2020;Jurnal	Distribution and Characteristic of Javan Hawk Eagle Nesting Trees in Gunung Halimun Salak National Park, Indonesia	This study has found 10 active Javan Hawk Eagle nesting trees consisting of 5 tree species which are: Rasamala (*Altingia excels*), Huru (*Litsea sp.*), Damar (*Agathis damara*), Lengsar (*Nephelium juglandifolium*), and Manggong (*Macaranga pasticularis*) with four trees architecture models, which are "Rauh", Massart, Scarrone and Aubreville. These canopy models are easier for Javan Hawk Eagle to build the nests and better nest protection from the rain or predator attacks. The nesting trees' height is ranging from 26 to 55 m and the nest height is ranging from 18 to 41 m. In general, the Javan Hawk Eagle nesting trees grow in the primary, secondary, and plantation forest with the altitude of about 670 to 1259 asl at the steep to extremely steep slopes at the distance of less than 100 m from streamlines and mostly at less than 600 m from ecotone	To complement this research results, which is about the distribution and characteristic of Javan Hawk Eagle nesting trees, further research about Javan Hawk Eagle parents behavior while nesting period and the development of the Javan Hawk Eagle Juvenile from eggs period until growing as the independent individual should be conducted to provide more data needed in implementing the Javan Hawk Eagle Conservation Action Plan in Gunung Halimun Salak National Park.
103	Nur Arif Rohman,dkk;2021;-Jurnal	Analisis Keanekaragaman Fauna Study Kasus Pada 24 (Dua Puluh Empat) Taman Nasional Indonesia	1. Terdapat 10 jenis fauna di TNGHS pada ketinggian 500-1500 mdpl, yaitu owa jawa,kancil, surili, lutung budeng, kijang, macan tutul, anjing hutan, elang jawa, cica matahari, poksai kuda. 2. 10 jenis fauna di TNGHS dilindungi oleh PermenLHK No.106 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas P.20 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. 3. terdapat 1 jenis yang dilindungi oleh CITES 2019	Karena penyebaran keanekaragaman jenis fauna dipengaruhi oleh faktor ketinggian tempat yang mempengaruhi keberadaan spesies dan kesamaan jenis. Maka oleh sebab itu disarankan perlu ditindak lanjuti kesesuaian di lapangan dari hasil penelitian studi kasus tersebut.
104	Akhmad Fikri Hassan;2001;Skripsi	Peta Dan Tipe Vegetasi Rinci Di Gunung Kendeng Taman Nasional Gunung Halimun Jawa Barat	1. Vegetasi di gunung Kendeng pada ketinggia 1.200 m dpl terbagi dalam beberapa asosiasi, yaitu asosiasi Fagara-Dysoxylum, asosiasi Calamus-Dysoxylum, asosiasi Pandanus-Dysoxylum, asosiasi Pavetta-Dysoxylum, asosiasi Actinodaphine-Notaphoebe-Diplazium, dan asosiasi Ficus-Diplazium. Asosiasi Calamus-Dysoxylum dan Notaphoebe-Diplazium merupakan asosiasi yang dominan. Dalam vegetasi dijumpai chablis yang disebabkan oleh tumbangnya Altingia excelsa. 2. Hasil analisis vegetasi menunjukkan Altingia excelsa sebagai spesies pohon dominan, spesies subdominan terdiri dari Bridelia glauca , Quercus spp., Ardista zollingeri, dan Myristica glauca.Tumbuhan pada lapisan semak didominasi oleh Achasma coccineum, Daemonorops melanochaete, dan Diplazium esculentum. Tumbuhan pada lapisan bawah didominasi famili Araceae. Cococasia gigantea merupakan spesies dominan, spesies subdominan terdiri dari *Homalomena caerulescens*, *Epiprenum elengans*, dan *Begonia corlaceae*. 3. *Ardisia zollingeri* (ki rawa), *Notaphoebe umbelliflora* (ki kawat), dan *Laportea stimulans* (pulus) merupakan spesies pohon yang mempunyai daya regenerasi tinggi, sedangkan *Lasianthus constrictus* (kokopian) kemungkinan merupakan spesies pendatang baru dalam komunitas.	Sebagai pembanding masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan syntaxa yang lebih lengkap serta peta dan tipe vegetasi rinci pada semua mintakat.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
105	Rugayah;2001;Jurnal	Species Diversity of Trichosanthes In Gunung Halimun National Park	Ada tujuh spesies yang tercatat terdapat di TNGH yaitu, *T. montana, T. ovigera, T. pubera, T. quinquangulata, T. tricuspidata, T. villosa, d*an *T. wawrae.* Keanekaragaman spesies genus ini di TNGH kaya dibandingkan dengan spesies Jawa Trichosanthes (dengan 10 spesies), sekitar 70% ditemukan di daerah tersebut. Namun, keanekaragaman spesies tidak mudah dipantau setiap tahun. Spesies ini banyak ditemukan di daerah lembab di tepi hutan, atau di sepanjang tepi sungai. *T. wawrae* hanya ditemukan di Cikaniki, sedangkan enam spesies lainnya ditemukan di koridor Cianten. *Trichosanthes quinquangulata* tersebar luas.	Studi fenologi perlu dilakukan untuk mengetahui siklus hidup spesies Trichosanthes.
106	Tahan Uji;2002;Jurnal	Keanekaragaman dan Potensi Flora di Gunung Halimun dan Sekitarnya Di Taman Nasional Gunung Halimun	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari 275 jenis tumbuhan yang dikoleksi di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun, 6 jenis diantaranya termasuk tumbuhan langka dan 10 jenis lainnya merupakan tumbuhan "new record". Tiga dari 6 jenis tumbuhan langka yang status kelangkaannya rawan (rotan leles, rotan cacing dan rotan sampai) perlu diprioritaskan dalam usaha pelestariannya. Ada dua kelompok jenis tumbuhan berpotensi penting di kawasan taman nasional, masing-masing adalah kelompok tumbuhan yang berpotensi sebagai tumbuhan obat dan kelompok tumbuhan yang berpotensi sebagai penghasil kayu bangunan.	
107	Harry Wiriadinata,dkk;2002;-Jurnal	Kekayaan Begonia Taman Nasional Gunung Halimun	Kawasaan hutan Taman Nasional Gunung Halimun kaya akan jenis-jenis Begonia yang tersebar secara tidak merata. Begonia robusta dan B. multangula umumnya sangat mendominasi lantai bawah hutan beberapa kawasan seperti HM 13-24 loop Cikaniki, gunung Botol. Begonia bracteata dan B. muricata dapat dijumpai di bawah canopi trail Cikaniki. Begonia isoptera dijumpai di tepi sungai kecil Citalahap dan hutan Panenjoan, Sirnarasa. Begonia longifolia sangat jarang, jenis ini dijumpai di kaki gunung Batu, Ciptarasa dan 7 KM sebelum Cikaniki. Dijumpai juga jenis yang diduga merupakan Begonia petennania yang sangat dekat dengan B. isoptera. Umumnya tumbuhan Begonia tersebut mempunyai daya tarik untuk dikembangkan sebagai tanaman hias.	
108	Muhammad Mansur;2002;Jurnal	*Nepenthes gymnamphora* Di Taman Nasional Gunung Halimun Dan Penyebarannya di Indonesia	Puncak dua dan tiga dari G. Kendeng merupakan habitat dari jenis *Nepenthes gymnamphora;* populasinya pada saat ini semakin berkurang. Konservasi in-situ perlu dilakukan sedini mungkin agar jenis ini tumbuh lestari dan masih tetap menjadi salah satu kebanggaan Taman Nasional Gunung Halimun. Beberapa cara yang dapat dilakukan agar jenis tersebut hidup lestari dan masih bisa dinikmati keindahannya oleh generasi mendatang, di antaranya adalah: melindungi habitat aslinya di alam, menghindari adanya kebakaran hutan dan semak belukar, menjaga kelestariannya dengan tidak mengambil sembarangan, mengusahakan perbanyakan dan mengembalikan lagi ke habitatnya.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
109	Machiko Kimura,dkk;2002;Jurnal	Allometry and life history of a forest understory palm Pinanga coronata (Arecaceae) on Mount Halimun, West Java	1. Vegetative growth : Pinanga coronata has a monopodial shoot and cannot produce branches to increase the crown size. To support the increasing mass of total above ground parts (stem mass plus crown mass), the stem of P. coronata undergoes internal change to increase the specific gravity in the lower part of the stem. 2. Reproductive traits : the sexual reproductive ability of P. coronata was not significantly different between sprouting adult shoots and non-sprouting adult shoots; therefore, the sexual reproductive performance of individual shoots of P. coronata was not enhanced even if they produced sprouting shoots. 3. Spatial distribution : Many seedlings of P. coronata formed clumps on ridges. Clonal shoots of P. coronata cannot disperse new shoots effectively away from the parent shoot and dispersal is dependent on seed. The seedlings on the ridges were probably germinated from the feces of frugivorous animals. 4. In summary, the present results suggest that a population of P. coronata in a forest understory habitat is maintained by: (i) architectural adaptation to low light conditions; (ii) effective dispersal of fruits; and (iii) clonal growth of stem. Although the distribution of P. coronata is limited by the availability of soil or water and/or nutrients.	
110	Atit Kanti,dkk;2002;Jurnal	Cellulolytic Yeast Isolated From Soil Gunung Halimun National Park	Many soil yeast were isolated from soil of Gunung Halimun National park. Some of them were cellulolytic. Common occurrence of soil yeast and their capacity to breakdown polymeric substances implying that they play significant role on biotransformation of organic substances in soil.	
111	Syamsul Hidayat,dkk;2002;Jurnal	Pemanfaatan Tumbuhan Secara Tradisional Di Taman Nasional Gunung Halimun	1. Nilai-nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa rasamala (*Altingia e.xcelsa*) memiliki indek nilai penting jenis (INP) tingkat pohon maupun indeks nilai guna jenis (UV1) tertinggi, tetapi INP untuk anakannya cukup rendah. Sedangkan kianak (*Castanopsis acuminatissiina*) memiliki INP tingkat pohon maupun tingkat anakan tinggi, tetapi UV1 nya sangat kecil. Sementara itu jenis maja {Magnolia macklottii) meskipun memiliki nilai UVl tinggi, tetapi sayangnya memiliki nilai INP sangat rendah baik untuk tingkat pohon maupun anakan. Dengan demikian perlu pcrhatian terhadap jenis-jenis yang memiliki kegunaan tinggi di dalam kehidupan masyarakat sekitar Halimun tetapi memiliki potensi tegakan yang mulai rawan didasarkan indeks nilai pentingnya yang rendah seperti rasamala dan maja. 2. Nilai-nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa rasamala (*Altingia e.xcelsa*) memiliki indeks nilai penting jenis (INP) tingkat pohon maupun indeks nilai guna jenis (UV1) tertinggi, tetapi INP untuk anakannya cukup rendah. Sedangkan kianak (*Castanopsis acuminatissiina*) memiliki INP tingkat pohon maupun tingkat anakan tinggi, tetapi UV1 nya sangat kecil. Sementara itu jenis maja (*Magnolia macklottii*) meskipun memiliki nilai UVl tinggi, tetapi sayangnya memiliki nilai INP sangat rendah baik untuk tingkat pohon maupun anakan.	Dengan demikian perlu pcrhatian terhadap jenis-jenis yang memiliki kegunaan tinggi di dalam kehidupan masyarakat sekitar Halimun tetapi memiliki potensi tegakan yang mulai rawan didasarkan indeks nilai pentingnya yang rendah seperti rasamala dan maja.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
112	Johanis P Mogea;2002;Jurnal	Rotan Di Taman Nasional Gunung Halimun Dan Prosper Budidayanya Di Desa Cisungsang Lebak Banten	1. Di dalam TNGH terdapat 13 jenis rotan yang terdiri atas Calamus (7 jenis), Daemonorops (4 jenis), Korthalsia (1 jenis), dan Plectocomia (1 jenis). Persebarannya tidak merata, G. Botol hanya memiliki 2 jenis, tetapi G. Pameungpeuk memilikim semua jenis yang ada di TNGH yaitu 13 jenis. Kerapatannya relatif masih rendah, *C. heteroideus* kerapatannya 208 bt/ha, jenis-jenis yang lain kerapatannya lebih rendah dari 90 bt/ha. *C. rhomboideus, C. ornatus, C. asperrimus,* dan *K. junhuhnii* berturut-turut hanya memiliki nilai kerapatan 1, 2, 3, dan 4 bt/ha. Dibandingkan dengan luas TNGH yang 40.000 ha, maka pengamatan populasi rotan dalam makalah ini masih belum sepenuhnya mewakili keberadaan rotan di TNGH ini. 2. Rotan di pulau Jawa dicatat ada 25 jenis, 9jenis di antaranya endemik. Dari 9 jenis yang endemik ini, iga di antaranya terdapat pula di TNGH yaitu C. *asperrimus, C. melanoloma*, dan *D.rubra.* Nama-nama lokal rotan di Jawa Barat sebagian besar tidak konsisten penggunaannya termasuk yang di TNGH, karena itu penerapan nama lokal langsung ke nama botani sangat tidak tepat. Spesimen perlu diikutsertakan dalam proses identifikasi.	1. Pengamatan lebih lanjut terutama pada lokasi hutan terpilih berketinggian antara 500 - 900 m kiranya akan bermanfaat untuk mengetahui keberadaan populasi rotan di TNGH lebih komprehensif. 2. Pembudidayaan rotan lokal untuk pemanfaatan yang lestari di Desa Cisungsang cukup potensial. Pada saat awal kegiatannya, pengetahuan mengenai pengenalan jenis-jenis rotan yang akurat dan penelitian perbanyakan perlu dilakukan dengan seksama.
113	Irfan Cahyadi;2003;Tesis	Analisis Spasial Struktur Dan Fungsi Koridor Hutan Antara Taman Nasional Gunung Halimun Dengan Hutan Lindung Gunung Salak	1. Areal berhutan koridor salak - halimun selama kurun waktu 11 tahun telah mengalami perubahan penutupan lahan yang cukup besar yaitu 347,523 Ha. 2. Koridor G. Salak - G. Halimun secara umum mengalami fragmentasi pada tiga titik yang membagi koridor menjadi 2 pulau habitat. Fragmentasi titik 1 berupa jalan setapak dengan total lebar fragmentasi 1.5 m, fragmentasi titik 2 berupa jalan umum dengan total lebar fragmentasi 3 m, da pada titik 3 berupa jalan setapak dengan total lebar fragmentasi 1.5 m. 3. Pulau habitat koridor yang terbentuk akibat fragmentasi terdiri dari dua yaitu pulau habitat 1 dengan luas 185,286 Ha dan pulau habitat 2 dengan luas 133,699 Ha. 4. Penutupan lahan koridor pada saat ini terdiri dari semak/belukar, hutan sekunder, Kaliandra, Agathis, dan Puspa. 5. Topofragi koridor memiliki kelerengan berkisar antara 0% s/d 90% dengan ketinggian 892 mdpl - 1144 mdpl. Kelerengan topografi koridor didominasi oleh kelerengan 0%-30%. 6. Struktur vegetasi koridor merupakan struktur vegetasi dengan penutupan tajuk yang terbuka dan jarang, banyaknya rumpang di dalam area hutan koridor 7. Koridor G. Salak - G. Halimun berfungsi sebagai tempat mencari makan bagi satwa dan sebagai habitat 8. Fragmentasi telah menurunkan fungsi koridor G. Salak - G. Halimun sebagai saluran pergerakan satwa terutama bagi satwa yang bersifat arboreal 9. Hasil perbandingan komunitas vegetasi antara Pulau habitat 1 dengan Habitat 2 menunjukkan bahwa komunitas vegetasi kedua pulau habitat berbeda, begitu juga dengan komunitas vegetasi antara pulau habitat 1 dengan patch G. Halimun dan komunitas vegetasi antara pulau habitat 2 dengan patch G. Salak	1. Perbandingan komunitas vegetasi antar Pulau Habitat koridor dan antar Pulau Habitat koridor dengan patch G. Salak - G. Halimun perlu diverifikasi dengan plot contoh yang lebih besar dan lebih merata sehingga dapat lebih mewakili kondisi vegetasi sebenarnya 2. Rehabilitasi rumpang pada areal hutan koridor dengan menggunakan jenis - jenis lokal yang merupakan bagi satwa dan menjadikan koridor sebagai habitat seperti Owa Jawa, Lutung, dan Surili 3. Rehabilitasi untuk memperkecil jarak antar patch pada gap koridor baik secara terestrial maupun arboreal dengan menggunakan jenis cepat tumbuh, sehingga memperbesar peluang pergerakan satwa melintasi gap koridor 4. Studi untuk menentukan teknik yang sesuai dan aplikatif dalam memfasilitasi pergerakan primata arboreal melintasi gap koridor 5. Memperbanyak kegiatan penelitian dan membangun stasiun pengamatan atau menara pengawasan pada areal koridor 6. Memperbanyak pemasangan tanda - tanda larangan penebangan dan perburuan 7. Penyuluhan konservasi sumberdaya hutan terhadap masyarakat dan perlindungan hutan koridor dengan melibatkan lembaga yang ada di sekitar koridor 8. Memperbaiki tata batas wilayah terutama areal yang merupakan kawasan TN Gunung Halimun.
114	Laili Kamila;2003;Skripsi	Pencirian Selulolitik Isolat Khamir R*hodotorula sp.* Dari Tanah Hutan Taman Nasional Gunung Halimun	1. Isolat Khamir *Rhodotorula sp* memberikan Uji yang positif terhadap Substrat CMC 0,5% dengan terbentuknya zona bening di sekitar koloni Khamir 2. Enzim aviselase memiliki aktivitas yang tertinggi 3. Kondisi optimum untuk aktivitas enzim aviselase pada pH 4,8 dan suhu 35 derajat celcius selama 10 menit	Isolat Khamir *Rhodotorula sp* dapat digunakan untuk produksi enzim selulase

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
115	R. Subekti Purwantoro,dkk;2004;-Jurnal	Analisis Kluster Argostemma (Rubiaceae-Rubioidae) di Gunung Gede Pangrango, Gunung Halimun dan Gunung Salak Berdasarkan Karakter Anatomi	1. Berdasarkan analisis kluster pada karakter anatomi daun dan tangkai daun dapat disimpulkan bahwa Argostemma di Kawasan Gn. Gede Pangrango, Gn. Halimun, dan Gn. Salak terdiri atas 2 kelompok kluster yaitu *A. uniflorum* dan *A. montanum*, A11-A15, *A. borragineum* A21-A15, dan A31-A35 dengan nilai kesamaan 0.438. Kluster kedua terbagi menjadi anak kluster, A. borragineum dan A. montanum, A11-A15, A21-A25, A31-A35 dengan nilai kesamaan 0.451. 2. Berdasarkan analisis CPA pada karakter anatomi, Argostemma dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu A. uniforum, A. borragineum, dan A. montanum. 3. Berdasarkan karakter anatomi, kelompok yang diduga hibrid oleh Backer & Bakhuizen van de Brink Jr. (1965) dan Van Steenis (1972) dapat dipastikan masih termasuk jeis A. montanum. Karakter anatomi penting dalam klasifikasi Argostemma meliputi diameter tangkai daun, tinggi stomata terhadap permukaan daun, bentuk sel palisade, jumlah lapisan palisade, dan jumlah lapisan bunga karang.	
116	Razali Yusuf;2004;Jurnal	Keanekaragaman Jenis Pohon Pada Hutan Terganggu di Daerah Koridor Taman Nasional Gunung Halimun	Berdasarkan pencuplikan data lapangan dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan kondisi hutan di daerah koridor telah terganggu. Terganggunya kawasan hutan (daerah koridor) akibat tekanan masyarakat menyebabkan sebagian besar kawasan hutan didominasi oleh jenis-jenis hutan sekunder dan jenis pendatang (Maesopsis eminii) sedangkan beberapa jenis hutan primer yang merupakan sisa tumbuhan hutan sebelumnya masih tetap eksis meskipun dalam populasi relatif kecil. Tekanan masyarakat baik berupa pembalakan maupun pembukaan areal hutan untuk perladangan perlu mendapat perhatian guna keutuhan dan kelestarian kawasan.	
117	Johanis P Mogea;2004;Jurnal	Palem Di Taman Nasional Gunung Halimun	Di TNGH terdapat 21 jenis palem, terdiri atas 8 jenis Calamus, 4 jenis Daemonorops, 2 jenis Pinanga, 2 jenis Caryota, dan masing-masing 1 jenis Korthalsia, Licuala, Nenga, Salacca, dan Plectocomia. Empat jenis yang berada di luar TNGH adalah sagu, kelapa, aren, danpinang sirih. Nama-nama lokal telah berhasil dibakukan. Fenomena yang merapakan catatan yang baru ialah adanya pertunasan tumbuhan muda pada ujung batang rusak Calamus heteroideus, pada rotan ini ditemukan juga 2 - 4 tunas muda yang tumbuh di ujung perbungaan jantannya, dan tunas tumbuhan muda ini juga ditemukan tumbuh pada batang-batang merambat *C. ciliaris*.	
118	Mulyati Rahayu,dkk;2004;Jurnal	Peran Tumbuhan Dalam Kehidupan Tradisional Masyarakat Lokal Di Taman Nasional Gunung Halimun Jawa Barat	Hubungan antar budaya masyarakat lokal di TNGH dengan lingkungannya sangat erat dimana mereka memiliki pengetahuan dan mengenal serta memanfaatkan tumbuhan yang ada disekitarnya untuk kebutuhan lahiriah dan batinniah melaui upacara adat.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
119	R. Subekti Purwantoro,d-kk;2005;Jurnal	Gatra Taksonomi Argostemma wall. (Rubiaceae-Rubioidae) di Gunung Gede-Pangrango, Gunung Halimun, dan Gunung Salak Berdasarkan Karakter Morfologi	Berdasarkan identifikasi dengan menggunakan karakter morfologi kelompok Argostemma yang diduga hibrid oleh author sebelumnya masih teridentifikasi sebagai *A. montanum*. Bakal buah pada *Argostemma* terdiri dari 2-3 ruang, bakal buah beruang 2 ditemukan pada *A. montanum* dan *A. borragineum,* sedangkan *A. uniflorum* bakal buahnya beruang 3. Jumlah bunga *A. montanum* tidak berkisar antara 3-8, tetapi berkisar antara1-8. Dari studi morfologi Argostemma juga dapat disimpulkan bahwa di Gunung Gede-Pangrango, Gunung Halimun maupun Gunung Salak terdapat 3 jenis Argostemma, yaitu *A. uniflorum Blume ex DC, A. borragineum Blume ex DC,* and *A. montanum Blume* ex DC. Penyebaran Argostemma secara vertikal di Gunung Gede-Pangrango, Gunung Halimun, dan Gunung Salak berkisar antara 560-2.600 m dpl. Dengan pusat penyebaran pada ketinggian 1.000-2.000 m dpl.	
120	Wardah;2005;Jurnal	Pemanfaatan Tumbuhan Pada Masyarakat Kasepuhan Desa Cisungsang Di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Kabupaten Lebak Banten	1. Perubahan pola sistem pertanian perladangan berpindah kepola sistem persawahan merupakan suatu wujud nyata bahwa warga Kasepuhan desa Cisungsang masih sangat peduli terhadap kawasan konservasi TNGH. 2. Pengetahuan dan kearifan tradisional yang dimiliki warga Kasepuhan juga tampak dari kepemilikan pola asli yang unik terhadap pembagian tata ruang (zonasi) hutan. Berlaku zonasi pemanfaatan, pengelolaan, dan perlindungan hutan, yang dikenal dengan leuweung titipan (hutan cadangan), leuweung sempalan (hutan bukaan), sawah, dan talun. 3. Tercatat 113 jenis tumbuhan (meliputi 60 marga) yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kasepuhan Desa Cisungsang untuk kehidupan sehari-harinya, termasuk sebagai lalab dan sayur (30 jenis), bahan pangan (28 jenis), tumbuhan obat (30 jenis), bahan kerajinan (2 jenis), tanaman bias (2 jenis), dan bahan pewarna (Ijenis) serta 20 kultivar padi lokal.	
121	Made Suwena;2006;Disertasi	Bioprospeksi Tumbuhan Liar Edibel Dalam Kehidupan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Gunung Salak	1. Di kawasan hutan Gunung Salak ditemukan tumbuhan liar dan tanaman budidaya sebanyak 595 dari 140 suku. Tumbuhan liar sebanyak 513 jenis dari 121 suku dengan indeks keanekaragaman sangat tinggi dan indeks kemerataan jenis yang tinggi. Tumbuhan liar edibel sebanyak 185 dari 65 suku dengan indeks keanekaragaman dan kemerataan yang tinggi. Jenis tumbuhan liar yang mendominasi adalah Digitaria radicosa. 2. Pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan tumbuhan liar dan pelestarian lingkungan berkorelasi positif dengan kelas usia. Semakin bertambahnya usia, semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki dan sebaliknya. Pengetahuan kaum laki- laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. 3. Jumlah jenis tumbuhan liar edibel yang berfungsi sebagai buah sebanyak 29 jenis dari 15 suku, sayur 68 jenis dari 36 suku, obat sebanyak 92 jenis dari 40 suku, penyedap sebanyak 11 jenis dari 10 suku, dan sebagai sumber karbohidrat sebanyak 10 jenis dari 8 suku. Tumbuhan liar edibel yang paling berpotensi untuk dikembangkan adalah canar susu (Smilax macrocarpa) 4. Habitat tumbuh canar susu (Smilax macrocarpa Bl.) adalah hutan produksi dan hutan alam pada ketinggian >800 m dpl. Hasil buah dapat mencapai 500 kg/rumpun. Keunggulan buah yang dimiliki diantaranya kandungan kalsium (Ca) yang tinggi (0.30%), tanin (positif sangat kuat) dan saponin (positif kuat). Apabila dibudidayakan, secara finansial dapat memberikan keuntungan bersih sebesar Rp. 22.500.000 pada panen pertama (tahun III) dan sebesar Rp. 67.500.000 pada panen kedua (tahun IV) dalam 1 ha.	1. perlu dipertahankan keberadaan biodiversitas tumbuhan yang ada di kawasan hutan Gunung Salak sekarang ini, baik melalui kebijakan regulasi maupun pendekatan penyuluhan secara langsung ke masyarakat 2. Perlu dilakukan bioprospeksi lebih jauh terhadap tumbuhan obat-obatan mengingat jenis tumbuhan ini menduduki jumlah tertinggi dibandingkan dengan jenis sayuran, buah-buahan, penyedap maupun sumber karbohidrat. 3. Perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai teknik budidaya, teknik pengolahan hasil, pemasaran, analisis ekonomi, pengujian bahan fitokimia yang terkandung serta promosi tumbuhan canar susu

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
122	Alal Huda Jaya.S;2006;Tesis	Implikasi Eksistensi *Chromolaena odorata* (L.) King & Robinson (Asteraceae) Dan Agens Hayatinya Cecidochares connexa Macquart (Diptera: Tephritidae) Terhadap Struktur Komunitas Serangga Dan Tumbuhan Lokal	1. Persebaran spesies tumbuhan eksotik invasif *C. odorata* di Jawa Barat khususnya daerah Bogor sudah sangat luas. C. odorata dapat tumbuh pada berbagai tipe habitat meliputi habitat perkebunan, hutan buatan, ladang dataran rendah, maupun ladang dataran tinggi dengan kelimpahan yang berbeda. Kelimpahan populasinya cenderung menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian suatu lokasi. 2. Keberadaan *C. odorata* diikuti pula dengan keberadaan musuh alaminya yaitu lalat puru C. connexa pada semua lokasi pengamatan, kecuali di Gunung Halimun dan Cianjur. Ada dua titik pelepasan lalat puru *C. connexa* yaitu di Parung Panjang-Jasinga, Bogor dan Pakuwon-Parung Kuda, Sukabumi. Lalat puru *C. connexa* saat ini telah mapan keberadaannya dan menyebar secara alami serta memiliki kemampuan persebaran yang cukup jauh baik dari titik pelepasannya di Parung Panjang-Jasinga, Bogor maupun dari titik pelepasan di Pakuwon-Parung Kuda, Sukabumi. 3. Lalat puru *C. connexa* mampu hidup pada berbagai ketinggian tempat yang berbeda, namun kelimpahan populasinya menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian suatu tempat. Distribusi lalat puru *C. connexa* dibatasi oleh adanya barier berupa pegunungan. Kelimpahan populasinya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan inangnya yaitu C. odorata. 4. Komunitas serangga yang diperoleh pada habitat *C. odorata* di Parung Panjang, Setu, Darmaga, dan Gunung Bunder secara keseluruhan terdiri dari 24.213 individu serangga yang termasuk ke dalam 14 ordo, 132 famili, dan 568 spesies. Ordo Hymenoptera, Diptera, dan Hemiptera merupakan tiga ordo terbesar yang ditemukan dengan kelimpahan individu (species abundance) dan kekayaan spesies (species richness) paling tinggi. 5. Introduksi tumbuhan eksotik invasif *C. odorata* dan agens hayatinya *C. connexa* telah menyebabkan terjadinya asosiasi dengan serangga-serangga lokal. 6. Komunitas tumbuhan yang diperoleh pada habitat *C. odorata* di Parung Panjang, Setu, Darmaga, dan Gunung Bunder secara keseluruhan terdiri dari 131.132 individu tumbuhan yang termasuk ke dalam 21 famili dan 44 spesies. 7. Kelimpahan populasi *C. odorata* pada lokasi penelitian di Parung Panjang, Setu, dan Darmaga mendominasi berdasarkan perhitungan Indeks Nilai Penting (INP) kecuali di Gunung Bunder. Implikasi dari keberadaan spesies tumbuhan eksotik invasif *C. odorata* pada tiga habitat tersebut telah menyebabkan terjadinya pengambilalihan atau pergantian skala ruang, yaitu tempat atau ruang yang seharusnya ditempati oleh spesies-spesies tumbuhan lokal kemudian diambil alih keberadaannya oleh tumbuhan eksotik invasif *C. odorata*. Selain itu, kehadiran tumbuhan eksotik invasif *C. odorata* pada empat lokasi penelitian menyebabkan terjadinya penurunan keanekaragaman spesies tumbuhan yang berada disekitarnya.	1. Ditemukannya famili Tephritidae dan Cecidomyiidae yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut, mengingat bahwa spesies-spesies dari famili Tephritidae dan Cecidomyiidae sebagian besar anggotanya juga bisa menyebabkan terbentuknya puru pada tanaman. 2. Asosiasi antara lalat puru *C. connexa* dengan parasitoid dari ordo Hymenoptera famili Braconidae, Eucoilidae, Eupelmidae, dan Ormyridae dapat dipelajari lebih mendalam pada penelitian selanjutnya seperti uji biologi parasitoid tersebut serta identifikasi sampai pada tingkat spesies.
123	Benito C. Tan,dkk;2006;Jurnal	Mosses Of Gunung Halimun National Park, West Java, Indonesia	Lumut TNGHS : Untuk pertama kalinya dilaporkan bahwa terdapat 150 jenis lumut daun yang termasuk ke dalam 74 marga dan 25 suku dari TNGHS Terdapat tiga lumut daun yang tercatat baru untuk flora Indonesia (*Distichophyllum collenchymatosum*, *D. malayense* dan *Fissidens kinabaluensis*), dan empat jenis lainnya untuk Jawa (*Dicranodontium asperulum, Daltonia armata*, *Glossadelphus bilobatus* dan *Syrrhopodon semiliber*). Sebagai tambahan, tujuh jenis lainnya dikategorikan sebagai lumut daun yang tidak umum ditemukan untuk daerah Malesia. Hal ini menunjukkan bahwa hutan di Taman Nasional Gunung Halimun pantas mendapatkan prioritas perlindungan tidak hanya untuk pulau Jawa, tapi juga untuk Indonesia dan Malesia.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
124	Wartika Rosa Farida,dkk;2006;-Jurnal	Habitat distribution and diversity of plants as feed resources for mouse deer (*Tragulus javanicus*) and barking deer (*Muntiacus muntjak*) in Gunung Halimun National Park	This research concludes that the mouse deer exists in all Gunung Kendeng foot areas up to 1,150 m above sea level, but does not exist in the foot areas of Gunung Botol, whereas the barking deer is distributed in both areas. The types of habitats preferred by the mouse deer are dense, protected areas such as under tea bushes, holes in tree trunks, holes in rocks and nearby rivers, whilst the barking deer prefers protected bushes in forests and non–irrigated fields. This research also resulted in a documentation of 50 species including 22 families of forest plants selected by mouse and barking deer as diet resources.	This condition will greatly facilitate the effort of supplying and selecting the types of alternative feed should (ex situ) captive breeding programs – for both research and commercial purposes – ever be established for these animals.
125	Roni Koneri,dkk;2007;Jurnal	Struktur dan Kompisisi Pohon Pada Berbagai Tingkat Gangguan Hutan Di Gunung Salak, Jawa Barat	1. Total spesies pohon yang ditemukan pada tiga tipe habitat di hutan Gunung Salak 70 spesies yang terdiri dari 27 famili dan 59 genus. 2. Fagaceae merupakan famili yang dominan ditemukan pada tiga tingkat gangguan hutan. 3. Rata-rata kekayaan, keanekaragaman dan kemerataan spesies cenderung lebih tinggi pada hutan terganggu daripada hutan tidak terganggu, sedangkan kerapatan, luas bidang dasar dan penutupan tajuk pohon tejadi sebaliknya. 4. Hasil analisis multidimensional scaling (MDS) dan dendogram pengelompokkan menunjukkan bahwa komposisi spesies pada hutan sangat terganggu lebih mirip dengan hutan kurang terganggu	
126	Suharno,dkk;2007;Jurnal	Efisiensi Penggunaan Nitrogen pada Tipe Vegetasi yang Berbeda di Stasiun Penelitian Cikaniki, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat	1. Hasil analisis vegetasi pohon di TNGHS, Jawa Barat dijumpai 24 jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan diantaranya mempunyai nilai indeks nilai penting tinggi yakni *Altingia excelsa* (64,657), *Castanopsis javanica* (39,698), *Platea latifolia* (27.684), *Garcinia rostrata* (21.151), *Schima walichii* (16,049), *Eugenia lineata* (13,967), *Melanochyla caesa* (12.241), *Quercus lineata* (10.766), dan *Platea excelsa* (10.766). 2. Kandungan nitrogen daun dewasa pada beberapa jenis tumbuhan menunjukkan bahwa tipe vegetasi emergen mengandung nitrogen lebih tinggi dibandingkan dengan underlayer. Efisiensi penggunaan nitrogen tertinggi dijumpai pada tanaman A. excelsa yang mencapai 39.10%, disusul dengan tumbuhan *E. lineata* (34.04%), *Q. lineata* (22.29%) dan *G. rostrata* (17.29%). Walaupun tidak signifikan, tumbuhan dengan tipe vegetasi emergen mempunyai NUE rata–rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe bawah naungan (underlayer).	
127	Irwan Hermawan;2008;Skripsi	Deteksi Perubahan Penutupan Lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Menggunakan Citra Landsat Multiwaktu	1. Penutupan dan penggunaan lahan di TNGHS dapat diklasifikasikan ke dalam 8 kelas tutupan dan penggunaan lahan, yaitu hutan, pemukiman, rumput/tanah kosong, tubuh air, sawah, kebun/perkebunan, tegalan/ladang, dan semak/belukar. 2. Pada tahun 1991, luas hutan di TNGHS mencapai 60.825,78 ha. Kelas hutan mengalami penurunan jumlah luasannya menjadi 49.234,23 ha atau sekitar 11,04 % pada tahun 1997. Pada saat yang sama, kelas yang mengalami peningkatan adalah kelas semak/belukar dari 17.699,94 ha pada tahun 1991 menjadi 27.302,13 ha pada tahun 1997. Sedangkan pada tahun 2001 jumlah luas hutan semakin berkurang menjadi 42.552,9 ha. Areal hutan banyak dikonversi menjadi semak/belukar, rumput/tanah kosong, pemukiman, kebun/perkebunan, dan tegalan/ladang yang telah menuju ke arah TNGHS. 3. Kelas sawah mengalami penurunan pada kurun waktu 1997-2001, yaitu sebesar 3.249,81 ha atau 3,15 %. Penurunan jumlah luasan ini sejalan dengan penggunaan areal sawah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan perumahan, dimana areal sawah ini banyak yang dijadikan pemukiman. Terjadi penambahan luas areal untuk kelas pemukiman sebesar 911,61 ha.	1. Data atau informasi perubahan tutupan dan penggunaan lahan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pengelolaan TNGHS. 2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tutupan dan penggunaan lahan di TNGHS

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
128	Muhammad Wiharto,dkk;2008;-Jurnal	Distribusi Kelas Diameter Pohon Pada Berbagai Tipe Vegetasi di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat	Pola distribusi kelas diameter pohon pada aliansi 1 yang merupakan hutan alam campuran memperlihatkan jumlah individu pohon terbanyak pada kelas diameter kecil. dan semakin berkurang dengan bertambahnya ukuran kelas diameter. Hal yang sama juga ditemukan pada aliansi 3 yang merupakan hutan tanaman. Struktur tegakan di kedua aliansi ini memperlihatkan struktur tegakan J terbalik. Pada aliansi 2 yang didominasi oleh spesies bambu. pola distribusi kelas diameter memperlihatkan kenaikan jumlah individu pohon pada kelas diameter tertinggi. Jumlah individu pohon pada kelas diameter kecil di aliansi 2 lebih sedikit dibanding yang ada di aliansi 1 dan 3. Jumlah individu pohon pada kelas diameter terbesar: aliansi 2 selalu lebih bannyak dibanding aliansi 1 dan 3.	
129	Andik Wijayanto;2009;Skripsi	Biodiversitas, Etnobotani, dan Kemampuan Antioksidan Selaginella spp., Asal Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)	1. Terdapat delapan spesies Selaginella yang ditemukan di TNGHS yaitu *S. willdenovii*, *S. ornata*, *S. plana*, *S. intermedia*, *S. involvens*, *S. alutacia*, *S. subalpina* dan satu spesies belum teridentifikasi. *S. willdenovii* dan *S. ornata* merupakan spesies *Selaginella* yang dominan. 2. Masyarakat sekitar TNGHS (masyarakat desa Citalahab Sentral, desa sekitar Gunung Bunder, dan desa Kasepuhan Adat Banten Kidul) memanfaatkan Selaginella untuk lalapan, perawatan pasca persalinan, pengobatan luka, dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 3. Dari ketiga spesies Selaginella yang diuji aktifitas penghilangan radikal hidroksilnya, *S. plana* paling berpotensi sebagai antioksidan diikuti *S. ornata*, dan *S. willdenovii*, *S. plana* dengan konsentrasi 75 µg/ ml adalah solusi yang tepat untuk efisiensi pemakaian ekstrak dan kemampuan antioksidan terbaik	1. Pemilihan jalur eksplorasi keanekaragaman dan etnobotani selaginella yang berbeda misalnya ke Suku Badui. 2. Penggunaan spesies Selaginella dan jenis Reactive Oxygen Spesies (ROS) yang lain dalam ujian antioksidan serta uji antioksidan secara in vivo. 3. Penggunaan akar Selaginella sebagai ekstrak dalam uji antioksdan sehingga diketahui perbandingannya dengan eksrak dari batang dan daun Selaginella
130	Billaluddin Khalil;2009;Skripsi	Analisis Perubahan Penutupan Lahan Di Hutan Adat Kasepuhan Citorek, Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	1. Wewengkon Kasepuhan Citorek memiliki batas berupa unggungan bukit yang mengelilingi kasepuhan dengan acuan Pasir Soge di sebelah Selatan, Gunung Nyungcung di sebelah Barat, Gunung Keneng di Sebelah Utara, dan Bukit Mempeg Cimadur di sebelah Timur. Pengetahuan mengenai batas-batas wewengkon diketahui oleh 65,98% responden. Wewengkon dibagi menjadi leuweung garapan, leuweung tutupan, dan leuweung titipan. Pengetahuan mengenai pembagian wewengkon hanya diketahui 35,42% responden. Pengelolaan wewengkon dilakukan oleh perangkat adat berdasarkan peraturan adat secara turun temurun. Pengetahuan mengenai peraturan pengelolaan hutan adat secara umum diketahui 79,38% responden. 2. Penutupan lahan wewengkon Kasepuhan Citorek dapat diklasifikasikan ke dalam sembilan tipe penutupan lahan, yaitu: hutan, kebun campuran, semak belukar, ladang, sawah, lahan terbuka, lahan terbangun, badan air, dan penutupan lahan lain. 3. Tipe penutupan lahan yang mengalami penurunan luas wilayah adalah hutan, kebun campuran, ladang, dan lahan terbuka. Tipe penutupan lahan yang mengalami peningkatan luas wilayah adalah sawah, lahan terbangun, semak belukar, dan badan air. 4. Perubahan penutupan lahan dipengaruhi oleh terjadinya perubahan sosial ekonomi masyarakat, tradisi bertani masyarakat kasepuhan, dan lunturnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan adat khususnya pembagian wewengkon. Faktor sosial ekonomi yang berpengaruh diantaranya adalah pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.	1. Perlu adanya pembuatan dan sosialisasi piagam kesepakatan adat khususnya aturan adat mengenai pengaturan sumberdaya alam sehingga pengetahuan masyarakat mengenai peraturan adat meningkat. 2. Perlu adanya pemetaan partisipatif batas-batas pembagian wewengkon sehingga didapatkan peta pembagian wewengkon yang disepakati oleh semua pihak. 3. Perlu adanya pembuatan rencana tata ruang kawasan TNGHS berdasarkan kesepakatan (RTRK) 4. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak perlu melakukan penyuluhan mengenai teknik pengolahan lahan pertanian tepat guna untuk meningkatkan produktivitas lahan. 5. BTNGHS perlu meningkatkan kegiatan penyadartahuan masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat Kasepuhan Citorek dalam menjaga keutuhan TNGHS 6. BTNGHS perlu meningkatkan pelibatan Kasepuhan Citorek dalam kegiatan yang dilakukan khususnya dalam perencanaan kegiatan. 7. BTNGHS perlu melakukan pemantauan penutupan lahan secara berkala dan terus-menerus.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
131	Anshary Maruzy;2009;Skripsi	Jenis-jenis Dari Suku Zingiberaceae Di Sekitar Stasiun Penelitian Cikaniki, Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)	Zingiberaceae yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah *Alpinia malaccensis* (Burm. f.) *Roscoe, A. scabra* (Blume) *Náves, Amomum aculeatum Roxb., A. hochreutineri Val., Etlingera coccinea* (Blume) *S. Sakai & Nagam., E. elatior* (Jack) *R.M. Sm., Hornstedtia paludosa* (Blume) *K. Schum., H. pininga* (Blume) V*aleton, Hedychium roxburghii Bl., Zingiber acuminatum Valeton, Z. odoriferum Blume, Z. officinale Roscoe, dan Z. zerumbet* (L.) Sm.	1. Perlu dilakukan pengambilan sampel Zingiberaceae di Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan pada musim yang berbeda sehingga dapat diketahui keanekaragaman Zingiberaceae secara lengkap di TNGHS. 2. Perlu dilakukan pengambilan data DNA, distribusi, dan etnobotani jenis Zingiberaceae di Taman Nasional Gunung Halimun Salak sehingga dapat diketahui validitas identitas jenis, peranan secara ekologi, dan pengetahuan kegunaan jenis dari penduduk lokal untuk diubah menjadi pengetahuan ilmiah, universal, dan bermanfaat.
132	Muhammad Wiharto;2009;Disertasi	Klasifikasi Vegetasi Zona Sub Pegunungan Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat	1. Di zona sub pegunungan Gunung Salak ditemukan 3 tipe vegetasi tingkat aliansi. Secara fisiognomi struktural ketiga aliansi ini berbeda, yakni aliansi 1 merupakan hutan alam campuran berdaun lebar yang didominasi oleh puspa. Aliansi 2 merupakan hutan bambu yang didominasi oleh bambu tali, sedangkan Aliansi 3 merupakan hutan tanaman yang bercampur dengan hutan berdaun lebar yang didominasi oleh pinus. 2. Setiap aliansi dibedakan oleh faktor abiotik yang khas, yakni unsur N total tanah, debu tanah, dan arah lereng untuk Aliansi 1, unsur P untuk Aliansi 2, serta unsur C organik tanah sangat masam dan 50% lainnya masam. Pada seluruh blok pengamatan di Gunung Salak ditemukan kategori unsur P tanah yang sangat rendah 3. Pada Aliansi 1 ditemukan 72 spesies pohon dengan jumlah total individu sebanyak 9046. Spesies yang memiliki jumlah individu terbanyak adalah puspa. Pada Aliansi 2 ditemukan 71 spesies pohon dengan total jumlah individu sebanyak 3124. Spesies yang memiliki jumlah individu terbanyak adalah pinus. Jumlah spesies pohon di Aliansi 3 adalah 56 dengan total individu sebanyak 1527. Spesies pinus memiliki jumlah individu terbanyak. 4. Berturut-turut ditemukan di Aliansi 1, 2, dan 3 sejumlah 20, 23, dan 11 spesies dominan pada strata pohon yang memiliki preferensi terhadap berbagai faktor biotik.	1. Kawasan Aliansi 1 da 3 seharusnya ditetapkan sebagai zona inti, demikian juga kawasan Aliansi 2 dengan kelerengan > 15 %. Hal ini disebabkan, Pertama, karena mewakili formasi biota tertentu. Kedua, karena kelestarian formasi ini memerlukan usaha konservasi. 2. Untuk kawasan Aliansi 2 dengan kelerengan lebih kecil 15% sebaiknya dilakukan pengendalian terhadap penyebaran spesies bambu, karena tumbuhan ini dapat menjadi kompetitor yang sangat kuat terhadap spesie selain bambu . 3. Metode klasifikasi citra dengan klasifikasi terbimbing yang memanfaatkan nilai-nilai spektral dari piksel-piksel blok pengamatan sebaiknya dikembangkan lagi sehingga dapat diperoleh nilai akurasi yang lebih tinggi.
133	Wardah,dkk;2009;Jurnal	Palms Diversity, Composition, Density and Its Utilization in The Gunung Halimun Salak National Park, West Java-Indonesia With Special Reference To The Kasepuhan Ciptagelar	Pohon palem di Kasepuhan Ciptagelar terdiri dari 15 spesies, meliputi lima spesies palem pohon dan sepuluh spesies palem panjat (rotan). Ada tiga spesies palem yang ditambahkan ke flora palem di Taman Nasional Gunung Halimun Salak: *C. polystachys, C. burckianus,* dan *A. laciniosa*. Penggunaan Daemonorops rubra sebagai bahan baku kain tradisional Baduy Dalam, penggunaan pecahan rotan Calamus javensis untuk gelang dan cincin, serta penggunaan tanaman Plectocomia elongata sebagai hiasan merupakan data baru.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
134	Sri Rahayu;2010;Disertasi	Sebaran dan Keragaman Genetik Populasi *Hoya multiflora Blumme* (Asclepiadaceae) Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Dan Sukamantri Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Keberadaan populasi H. multiflora di Bodogol TNGGP dan Sukamantri TNGHS dijumpai pada ketinggian 700-900 m dpl. Jenis tumbuhan ini dapat dijumpai pada berbagai tipe hutan alam maupun hutan tanaman dengan kerapatan jarang hingga rapat (75 - 425/Ha), tutupan tajuk jarang hingga rapat (30 - 90%) dan intensitas cahaya rendah hingga tinggi (30-80 %). 2. Keberadaan populasi *H. multiflora* ditentukan oleh faktor pemencaran biji dan kondisi habitat. Berdasarkan hasil analisis komponen utama, faktor habitat penting bagi keberadaan *H. multiflora* adalah kerapatan pohon dan suhu. Pemencaran biji *H. multiflora* dapat dibagi berdasarkan jangkauan jarak yaitu penyebaran jarak jauh dan penyebaran jarak dekat yang bergantung pada arah, kecepatan dan ketinggian angin pada saat buah pecah. Pola sebaran populasi dalam jarak dekat juga bergantung pada keberadaan populasi semut, pada umumnya berpola mengelompok. 3. Terdapat karakter morfologi tertentu yang tidak menyebar di semua populasi yaitu karakter warna bunga dan pinggir mahkota tidak melengkung. Karakter pembalikan mahkota yang kuat merupakan karakter langka yang hanya terdapat pada populasi 1 (Bodogol). 4. Analisis keragaman morfologi menunjukkan tingkat keragaman di dalam populasi lebih rendah dari keragaman total. Analisis diskriminan terhadap karakter morfologi menunjukkan pengaruh lingkungan tutupan tajuk terhadap keragaman morfologi. 5. Populasi *H. multiflora* di Bodogol dan Sukamantri memiliki diferensiasi genetik tinggi, ditunjukkan dengan nilai Gst = 0.2287. Diferensiasi genetik yang tinggi memberikan implikasi bagi pengelolaan konservasi in situ dan ex situ dengan mempertahankan keberadaan populasi dan habitatnya, serta pengambilan sampel dari setiap populasi untuk konservasi ex situ 6. Berdasarkan analisis jarak genetik menggunakan karakter morfologi dan AFLP serta mempertimbangkan jarak populasi, tiga populasi Bodogol dianggap sebagai dua populasi yang berbeda, yaitu populasi 1 dan 2 merupakan populasi yang sama, sedangkan populasi 3 merupakan populasi yang berbeda. Populasi 4, 5 dan 6 di Sukamantri masing-masing merupakan populasi yang berbeda.	1. Strategi konservasi bagi H. multiflora dengan diferensiasi genetik yang tinggi memerlukan konservasi in situ dengan mempertahankan keragaman habitat yang ada (statis), sehingga proses evolusi alami tetap berjalan dengan mempertahankan keberadaan serangga penyerbuk di lokasi 2. Konservasi secara ex-situ perlu dilakukan mengingat habitat hutan dataran rendah mengalami penyusutan yang cukup signifikan. Berdasarkan diferensiasi genetik yang tinggi, pengambilan sampel untuk konservasi ex-situ hendaknya berdasarkan perbedaan populasi, yaitu berasal dari habitat yang berbeda. Adanya koleksi sampel dalam pengelolaan konservasi ex-situ juga dapat dijadikan sebagai cadangan jika terjadi kelangkaan di alam serta sebagai bahan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan secara lestari. 3. Terkait penentuan status konservasi H. multiflora, dapat di pertimbangkan sebagai tumbuhan yang perlu diteliti lebih lanjut populasinya di kawasan lain di Indonesia.
135	Shanti Susanti;2010;Skripsi	Studi Penyebaran Jenis Tumbuhan Eksotik Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penggantiannya Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Studi Kasus di Stasiun Penelitian Cikaniki)	1. Jumlah jenis tumbuhan eksotik yang ditemukan di lokasi penelitian sebanyak lima jenis, meliputi harendong bulu (*Clidemia hirta*), ki rinyuh (*Eupatorium pallescens*), kecubung (B*rugmansia suaveolens*), kaliandra (*Calliandra calothyrsus*), dan seuseureuhan (*Piper aduncum*). Penyebaran jenis tumbuhan eksotik mengelompok. 2. Jenis tumbuhan eksotik yang dimanfaatkan oleh masyarakat diantaranya adalah kaliandra (*Calliandra calothyrsus*), sesuseureuhan (*Piper aduncum*), pinus (*Pinus merkusi*), ki rinyuh (*Eupatorium pallescens*), teh (*Camellia sinensis*), sengon (*Paraserianthes falcataria*), dan kayu afrika (*Maesopsis eminii*). Jenis-jenis tersebut dimanfaatkan untuk kayu bakar, obat, dan pakan ternak. 3. Persepsi masyarakat terhadap jenis tumbuhan eksotik menyebar secara merata yaitu rendah (0-2), sedang (3-5) dan tinggi (6-8) sebesar 33,33%. Masyarakat sebagian besar (53,33%) menyatakan setuju jika dilakukan penggantian jenis tumbuhan eksotik.	1. Perlu dilakukan penggantian jenis tumbuhan eksotik dengan jenis tumbuhan asli seperti saninten (*Castanopsis argentea*), pasang (*Lithocarpus sp*), Ficus spp, ki seueur (*Antidesma sp*), puspa (*Schima wallichii*), dan harendong (*Melastoma malabathricum*), agar kawasan tersebut tetap terjaga keaslian ekosistemnya. 2. Pelibatan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan jenis tumbuhan eksotik sangat diperlukan karena masyarakat banyak berinterkasi dengan jenis tumbuhan eksotik tersebut. 3. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap jenis tumbuhan eksotik secara menyeluruh salah satunya melalui penyuluhan, agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan jenis tumbuhan eksotik**.**

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
136	Hari Priyadi,dkk;2010;Buku	Five Hundred Plant Species In Gunung Halimun Salak National Park, West Java	Buku ini merupakan produk dari proyek 'Pemanfaatan Berkelanjutan dari Beragam Manfaat Lingkungan Hutan'. Kami melakukan kerja lapangan di beberapa lokasi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dari tahun 2007-2009. Secara geografis, taman terletak antara 106º 12' 58" BT – 106º 45' 50" BT dan 06º 32' 14" LS - 06º 55' 12" LS, (lihat Gambar 1) dan terletak di tiga distrik administratif : Bogor dan Sukabumi di Jawa Barat dan Lebak di Provinsi Banten. Pengumpulan data dari 990 pohon.	
137	Inge Larashati;2011;Jurnal	Composition of Under-Shrubs Species In Mount Salak National Park, West Java	Berdasarkan hasil pencacahan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa kawasan hutan TNGHS khususnya resort Cidahu didominasi oleh jenis tumbuhan bawah Athyrium dilalatum; S*tenochlaena palustris; Calamus javensis; Curculigo latifolia* dan *Strobilanthes blumei*. Dari lima jenis yang melimpah hampir seluruhnya dapat dimanfaatkan baik sebagai bahan pangan, obat-obat an dan peralatan rumah tangga.	Tumbuhan bawah merupakan komponen dari suatu ekosistem hutan yang berperan baik sebagai alat regenerasi maupun dalam proses daur karbon yang patut dijaga kelestariannya
138	Nunik S.A, dkk;2011;Jurnal	Contrasting Arboreal and Terrestrial Bryophytes Communities of The Mount Halimun Salak National Park,West Java	Keanekaragaman jenis lumut di hutan primer TNGHS terdiri dari 150 spesies lumut hati dan lumut yang ditemukan di berbagai substrat terestrial dan arboreal. Keanekaragaman jenis lumut arboreal pada ketinggian 900- 1730 m lebih tinggi dibandingkan dengan lumut terestrial. Hutan pada elevasi yang lebih tinggi cenderung memiliki kekayaan jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan elevasi yang lebih rendah. Sebaliknya, kelimpahan bryophyta lebih tinggi di dataran tinggi dibandingkan dengan di dataran rendah.	
139	Asep Sadili;2011;Jurnal	Keanekaragaman, Persebaran dan Pemanfaatan Jenis-jenis Anggrek (Orchidaceae) di Resort Citorek, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat	Keanekaragaman jenis anggrek dari lima kawasan hutan di Resort Citorek TNGHS relatif tinggi dengan persebaran setiap lokasi penelitian berbeda-beda. Jenis-jenis anggrek Citorek sebagian besar belum dimanfaatkan untuk tanaman hias, tetapi ada beberapa marga yang sudah dijadikan sebagai induk silangan dan obat.	
140	Laode Alhamd,dkk;2011;Jurnal	Komposisi Jenis dan Struktur Vegetasi di Hutan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak-Sukabumi	Hasil pengamatan menunjukkan kerapatan mencapai 691 pohon/ha. Hutan tersebut memiliki regenerasi yang baik dengan dominasi pohon muda 44,57% dari total individu, jumlah pohon menurun pada kelas fungsi diameter (kurva berbentuk J). Menurut Indeks Nilai Penting (INP), komposisi didominasi oleh puspa (*Schima wallichii*; 64,3), kironyok (*Castanopsis acuminatissima*; 19,0), rasamala (*Altingia excelsa*; 17,3), pasang batarua (*Quercus gemelliflora*; 17 ,0), dan kisireum gede (*Syzygium gracilis*; 15,6-INP). Sebaran puspa, kironyo, dan rasamala yang tinggi menunjukkan bahwa hutan tersebut masih relatif terjaga kelestariannya.	
141	Sanou faye;2011;Tesis	Correlation Between Tree Architecture Models, Soil and Water Conservation At Gunung Halimun-Salak National Park	Ditemukan korelasi positif yang signifikan antara parameter konservasi tanah dan arsitektur pohon model Stone dan Petit. Korelasi relatif dari masing-masing variabel menunjukkan bahwa curah hujan dan limpasan jauh lebih penting daripada curah hujan dan aliran batang untuk menjelaskan variasi erosi tanah. Aliran batang untuk Castanopsis argentea (4,73 mm) sedikit lebih kecil dari aliran batang untuk Michelia montana (6,20 mm). Nilai throughfall masing-masing menunjukkan 657,82 dan 640,91 mm untuk Castanopsis argentea dan Michelia montana. Limpasan diukur adalah 49,32, 15,74 dan 10,87 mm untuk Kontrol, *Castanopsis argentea* dan *Michelia montana*, masing-masing. Kehilangan tanah dihitung dalam 1,98, 0,82 dan 0,76 ton ha-1tahun-1 untuk Kontrol, *Castanopsis argentea* dan *Michelia montana* masing-masing. Tingkat Infiltrasi diamati lebih tinggi dengan *Michelia montana* dibandingkan dengan Castanopsis argentea. Hasil ini menunjukkan bahwa Michelia montana lebih baik daripada *Castanopsis argentea* untuk dikembangkan dalam konservasi tanah dan air.	Disarankan agar memperhatikan posisi dan bentuk individu model arsitektur pohon dalam studi erosi tanah. Informasi tersebut penting karena memberikan gambaran yang lebih tepat tentang bagaimana atau dengan cara apa curah hujan diterima dan didistribusikan dalam suatu ekosistem.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
142	Muhammad Mansur;2011;Jurnal	Laju Fotosintesis Jenis-jenis Pohon Pionir Hutan Sekunder di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak Jawa Barat	Jenis Trema orientalis memiliki laju fotosintesis lebih tinggi daripada lima jenis pohon pionir lainnya. Demikian pula apabila dibandingkan dengan *Schima wallichii*, *Peronema canescens* dan *Agathis dammara*, bahwa jenis Trema orientalis masih memiliki nilai tertinggi dalam proses asimilasi CO2 pada daun. Umumnya nilai fotosintesis dan jumlah klorofil pada daun tua lebih tinggi daripada daun muda untuk seluruh jenis yang diukur. Dari hasil pengukuran di lapangan, Ada empat jenis yang memiliki daya penyerapan CO2 cukup tinggi, yakni; *Trema orientalis*, *Macaranga triloba*, *Omalanthus populneus* dan *Mallotus paniculatus*. Untuk itu, keempat jenis tersebut dapat dipilih sebagai jenis untuk reboisasi hutan yang rusak ataupun pada lahan-lahan marginal. Selain itu, keempat jenis tersebut memiliki kontribusi dalam mengurangi emisi gas CO2 di udara yang dianggap sebagai pemicu terjadinya pemanasan global pada akhir-akhir ini.	
143	Marinda Sari Sofiyana;2011;Skripsi	Lumut Hati Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat	Studi mengenai lumut hati di TNGHS mencatat 120 jenis lumut hati yang termasuk ke dalam 46 marga dan 20 suku. Satu jenis di antaranya, yaitu Radula multiflora merupakan catatan baru untuk flora lumut hati di Jawa. Tiga suku dengan keanekaragaman jenis tertinggi adalah Lejeuneaceae, Lepidoziaceae, dan Plagiochilaceae. Keanekaragaman jenis lumut hati lebih tinggi dijumpai di jalur Curug Piit dan Gunung Botol dengan ketinggian lebih dari 1200 m. Indeks Similaritas Sorensen tertinggi dijumpai pada jalur Citalahab-Pintu Gerbang TNGHS dengan jalur Curug Piit. Kebanyakan lumut hati yang diidentifikasi merupakan lumut hati epifit (tumbuh pada substrat pangkal pohon), sebagian lainnya merupakan lumut hati epifil dan terestrial (tumbuh pada substrat batu, tanah, dan kayu lapuk).	
144	Muhammad Mansur,dkk;2011;Jurnal	Struktur dan Komposisi Vegetasi Pohon Serta Estimasi Biomassa, Kandungan Karbon dan Laju Fotosintesis Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Tercatat ada 337 individu pohon (diameter batang di atas 10 cm) per hektar dari 71 jenis, 50 marga dan 32 suku. Atingia excelsa tercatat sebagai jenis pohon yang paling dominan. Estimasi biomassa pohon di atas permukaan tanah adalah sebesar 304,5 ton berat kering per hektar dan kandungan karbon 152,3 ton/ha dari Luas Bidang Dasar sebesar 28,89 m2/ha. Tingkat asimilasi CO2 cukup bervariasi di antara 1,480 – 31,388 µmol/m2/s. Quercus oidocarpa tercatat memiliki tingkat fotosintesis tertinggi, yakni sebesar 31,388 µmol/m2/s. Jenis-jenis lainnya yang juga memiliki fotosintesis tinggi adalah; *Litsea noronhae*, *Saurauia nudiflora*, *Castanopsis argentea*, dan *Altingia excelsa*. Sedangkan laju transpirasi tertinggi dimiliki oleh jenis *Macaranga triloba*, *Sandoricum koetjape*, *Prunus arborea*, *Urophyllum corymbosum* dan *Altingia excelsa*.	
145	Wibowo Mangunwardoyo,dkk;2011;Jurnal	Screening Cellulose Activity of Yeast Isolated from Soil, Sediment and Water River from Taman Nasional Gunung Halimun, West Java, Indonesia	Screening of 245 isolate yeast from TNGH using substrate cellulose-azure 0.2 % were obtained sixteen isolate have positive of cellulase activity. The selected strain further screened using specific substrate (CMC, avicel, and cellobiose), out of seven isolate produced CMCase, six isolate produced cellobiase, two isolate produced CMCase and cellobiase, and one isolate produced CMCase, avicelase and cellobiase. Isolate S 4121 produced the highest CMCase (3,867) was molecular identify as *T. sporotrichoides*.	
146	Destri;2011;Skripsi	Epigeneium (Orchidaceae) Of Java And Sumatra	The study indicated that there are five species Epigeneium in Java and 14 species in Sumatra. *Epigeneium geminatum* is a new record from Sumatra and two species were proposed as new spesies: *Epigeneium longibulbon* and *E. sikijangensis*. Based on distribution area analysis, *E. geminatum* has the widest distribution from Java to Peninsular Malaysia but in Java this species only found in two location (Mt. Salak and Mt. Halimun), meanwhile *E. triflorum, E. arjunoense* so far only found in Java. In Sumatra *E. dempoense*, *E. exilifolium*, *E. gracilipes*, *E. laurifolium, E. longibulbon*, *E. pulchellum*, *E. quinquecallosum*, *E. sikijangensis,* and *E. wichersii*, were endemic. More comprehensive exploration and taxonomic study on this genus is needed to find new species especially from Sumatra.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
147	Purwaningsih;2012;Jurnal	Diversitas Flora di Kawasan Koridor Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	Penelitian diversitas flora dan rehabilitasi hutan di kawasan koridor Taman Nasional gunung Halimun-Salak diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi usaha untuk mengembalikan kondisi fisik hutan dan lahan dalam bentuk kegiatan penghijauan melalui rehabilitasi. Pelestarian hutan mutlak harus diperhatikan karena memiliki nilai koservasi bagi kehidupan berbagai jenis tumbuhan dan kelangsungan hidup hewan seperti Elang jawa (*Spizaetus bartelsi*), elang ular (*Spilornis cheela)*, Puyuh gonggong (*Arborophylla javanica*), Owa jawa (*Hylobates moloch*), Lutung (*Trachypithecus auratus*), Surili (*Presbytis comata*), Kucing hutan (*Felis bengalensis*), Macan (*Panthera pardus melas*), dan Musang luwak (*Paradoxurus hermaproditus*). Musang luwak seperti diketahui adalah hewan pemencar biji Aren paling utama.	
148	Hilda Akmal;2012;Tesis	Diversitas Lumut Epifit di Tiga Perkebunan Teh Jawa Barat	Keanekaragaman lumut epifit yang ditemukan di tiga perkebunan the di Jawa Barat sebanyak 90 jenis, meliputi 42 jenis lumut hati dan 48 jenis lumut sejati yang termasuk dalam 48 marga dan 25 suku. Lejeuneaceae merupakan suku dengan jumlah jenis tertinggi (26 jenis), diikuti Sematophyllaceae (9 jenis) dan Frullaniaceae (7 jenis). Perkebunan teh Rancabali memiliki diversitas lumut paling tinggi , diikuti Nirmala, dan Gunung Mas. Pada penelitian ini ditemukan lumut sejati *Sematopyllum tristiculum* sebagai jenis lumut epifit yang dominan di Gunung Mas, Lumut hati *Lejeunea anisophylla* dominan di Nirmala, dan lumut hati *Acanthocoleus javanicus* dominan di Rancabali	
149	Ruddy Polosakan,dkk;2012;-Jurnal	Keanekaragaman dan Komposisi Jenis Pohon di Hutan Pameumpeuk-Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Sukabumi	1. Kawasan lokasi penelitian menggambarkan kondisi hutan alamnya sudah tidak utuh lagi, Hal ini tampak dengan melimpahnya beberapa jenis sekunder yang mendominasi di kawasan tersebut antara lain *Ostodes paniculata*, *Macaranga triloba* dan *Antidesma tetandrum*. Namun dikawasan tersebut juga tampak sedang terjadi proses pemulihan pembentukan hutan kearah yang lebih baik, dengan dijumpai beberapa anak pohon dan seedling dari beberapa jenis primer antara lain *Schima wallichi*i dan *Castanopsis aciminatissima*. 2. Keanekaragaman jenis pohon tergolong cukup tinggi, yaitu tercatat sebanyak 71 jenis pohon yang tergolong dalam 49 marga dari 31 suku dengan kerapatan pohon mencapai 649 individu per hektar. Komposisi jenis pohon yang terpenting antara lain *Ostodes paniculata* (Nilai Penting = 28.21 %), *Castanopsis argantea* (NP = 24.31 %), *Sloanea sigun* (NP = 23.06 %), *Ardisia sanguinolenta* (NP = 20.87 %) dan *Macaranga triloba* (NP = 20.73 %). Suku-suku yang paling kaya jumlah jenisnya untuk jenis pohon antara lain Euphorbiaceae (11 jenis), Lauraceae (8 jenis) dan Rubiaceae (5 jenis).	
150	Edy Nasriadi Sambas;2012;Disertasi	Klasifikasi Vegetasi Gunung Endut, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Banten	1. Di Gunung Endut ditemukan empat tipe vegetasi tingkat aliansi, yaitu: 1) Aliansi hutan *Castanopsis acuminatissima-Schima wallichii/Freycinetia javanica* (aliansi vegetasi 1); 2) Aliansi hutan *Castanopsis argentea-Dendrocnide stimulans/Schismatoglottis calyptrata* (aliansi vegetasi 2); 3) Aliansi hutan *Coffea canephora var. robusta-Quercus lineata/F.javanica* (aliansi vegetasi 3); dan 4) Paraserianthes *falcataria-Coffea canephora var. robusta/Oplismenus compositus* (aliansi vegetasi 4). Secara fisiognomi struktural, keempat aliansi ini berbeda, yaitu aliansi vegetasi 1 dan 2 merupakan hutan campuran dengan jenis-jenis tumbuhan asli, aliansi vegetasi 3 merupakan hutan campuran jenis tumbuhan asli dan tanaman, dan aliansi vegetasi 4 merupakan hutan tanaman yang didominasi oleh sengon dan kopi. 2. Hirarki unit-unit vegetasi pada tingkat fisiognomi di Gunung Endut adalah sebagai berikut : 1). Kelas : Hutan, 2). Sub Kelas : Hutan Selalu Hijau, 3). Kelompok : Hutan Hujan Tropis Selalu Hijau, 4). Formasi : (a) Hutan Hujan Tropis Sub Pegunungan, (b) Hutan Hujan Tropis Lahan Pamah, dan (c) Hutan Tanaman Lahan Pamah. 3. Enam belas jenis berhasil dideteksi preferensinya terhadap berbagai faktor abiotik. Diantaranya, sepuluh jenis memiliki preferensi baik terhadap faktor tanah maupun topografi, tiga jenis hanya memiliki preferensi terhadap faktor tanah, dan tiga jenis memiliki preferensi terhadap faktor topografi. Untuk faktor topografi, jenis-jenis tumbuhan yang berdistribusi pada blok-blok penelitian di seluruh aliansi vegetasi memiliki preferensi paling banyak terhadap ketinggian rata-rata petak penelitian, yaitu sebanyak tujuh jenis, diikuti preferensi terhadap kecuraman lereng (lima jenis pada lereng sangat curam, empat jenis pada lereng datar, tiga jenis pada lereng agak curam, serta masingmasing dua jenis pada lereng landai dan curam).	Ekosistem hutan Gunung Endut selayaknya dilestarikan dari gangguan degradasi dan deforestasi karena telah mengakibatkan penurunan kekayaan dan keanekaragaman jenis tumbuhan. Penelitian ini disarankan untuk dilanjutkan untuk studi dinamika hutan dengan membuat petak-petak permanen. Sebagai laboratorium lapangan, Gunung Endut cukup mewakili untuk penelitian hutan lahan pamah dan sub pegunungan serta mengamati dampak lingkungan akibat penebangan liar dan perambahan hutan. Studi ekologi tumbuhan lainnya yang disarankan adalah kajian produktivitas vegetasi dan autekologi jenis-jenis dominan di Gunung Endut.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
151	Sunaryo,dkk;2012;Jurnal	Komposisi Jenis dan Potensi Ancaman Tumbuhan Asing Invasif Di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Jawa Barat	Ditemukan empat jenis flora asing invasif (IAS) yang mengancam kelestarian ekosistem dan keberadaan flora asli di kawasan hutan Cidahu di TNGHS, yaitu *Calliandra calothyrsus* (Mimosaceae), *Piper aduncum* (Piperaceae), *Austroeupatorium inulaefolium* (Asteraceae), dan *Clidemia hirta* (Melastomataceae). Dari hasil analisis potensi ancaman jenis-jenis tumbuhan invasif yang ada maka *C. calothyrsus* merupakan jenis yang paling perlu dikendalikan. Jenis ini didapati tumbuh di petak pengamatan pohon maupun anak pohon. Meskipun nilai penting jenis pada petak pengamatan pohon berada pada urutan 9, tetapi pada petak pengamatan anak pohon *C. calothyrsus* berada pada urutan 3. Hal ini memberikan peringatan bahwa jenis *C. calothyrsus* perlu diwaspadai perkembangannya pada masa-masa mendatang,	Perlu adanya usaha pengendalian pada keempat jenis tumbuhan invasif yang telah mengancam kelestarian ekosistem dan keberadaan flora asli di kawasan hutan Cidahu di TNGHS. Pengendalian dapat dilakukan dengan penanaman jenis-jenis tumbuhan asli di kawasan-kawasan terbuka dan mempercepat penutupan kanopi hutan. Apabila tumbuhan invasif sudah menguasai luasan areal tertentu maka tindakan pemberantasan dengan cara pencabutan dan pembakaran di luar kawasan hutan merupakan tindakan yang harus dilakukan.
152	Sigit Nugroho;2012;Disertasi	Metode Deteksi Degradasi Hutan Menggunakan Citra Satelit Landsat Di Hutan Lahan Kering Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Metode klasifikasi yang terbaik deteksi degradasi hutan menggunakan 3 kelas degradasi hutan dengan indikator kerapatan tegakan adalah metode FCD dengan overall accuracy 68% dan akurasi kappa 54%. Tingkat akurasi deteksi menggunakan 2 kelas degradasi hutan mampu meningkatkan akurasi menjadi overall accuracy 74% dan akurasi kappa 63%. Deteksi terbaik dengan akurasi lebih besar dari 85% terdapat pada deteksi kelas degradasi berat. 2. Identifikasi degradasi hutan di lapangan dapat menggunakan indikator kerapatan tegakan, kerapatan tegakan di lapangan dapat diduga dengan baik menggunakan peubah kerapatan kanopi dengan koefisien determinasi 67%. 3. Tingkat akurasi klasifikasi menggunakan 4 kelas kerapatan hutan menggunakan indikator kerapatan tegakan pada kelas diameter lebih atau sama dengan 5cm yang paling tinggi dari empat metode adalah menggunakan metode FCD yaitu dengan overall accuracy sebesar 61 % dan akurasi kappa 46%. Tingkat akurasi klasifikasi menggunakan metode maximum likelihood yaitu overall accuracy 57% dan akurasi kappa 40%. Metode fuzzy mempunyai tingkat akurasi dengan overall accuracy 49% dan akurasi kappa 31%. Metode belief-dempster shafer mempunyai tingkat akurasi overall accuracy 45% dan akurasi kappa 27%. 4. Tingkat akurasi klasifikasi menggunakan 3 kelas kerapatan hutan menggunakan indikator kerapatan tegakan adalah FCD sebesar overall accuracy sebesar 72% dan akurasi kappa 50%. Tingkat akurasi klasifikasi maximum likelihood yaitu overall accuracy 67% dan akurasi kappa 45%. Metode fuzzy mempunyai tingkat akurasi dengan overall accuracy 63% dan akurasi kappa 40%. Metode belief-dempster shafer mempunyai tingkat akurasi overall accuracy 55% dan akurasi kappa 32%.	1. Diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan klasifikasi FCD untuk daerah lain yang mempunyai struktur tegakan yang berbeda dengan lokasi penelitiannya. 2. Penggunaan indikator degradasi hutan lain seperti biomasa dan carbon perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendukung MRV REDD.
153	Inge Larashati Subro;2012;Jurnal	Struktur Komunitas Tumbuhan Bawah Di Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat	Kawasan hutan TNGHS khususnya resort Cidahu masih cukup baik dan alami didominasi oleh jenis tumbuhan bawah *Alocasia sp*, *Begonia multangula*, *Psychotria viridiflora*, *Athyrium dilalatum*, *Strobilanthes blumei*, *Alocasia longifolia*, *Blechnum sp* dan *Clidemia hirta*. Dibandingkan dengan jenis lainnya Strobilanthes blumei dan Blechnum sp memiliki kandungan klorofil tertinggi. Meskipun masih dalam proses pertumbuhan, vegetasi tumbuhan bawah mempunyai kontribusi pada siklus karbon dalam upaya mengurangi pemanasan global dan berperan sebagai alat regenerasi dalam suatu ekosistem hutan sehingga patut dijaga kelestariannya.	Perlu penelitian lanjutan guna mendapatkan data jenis-jenis tumbuhan bawah yang memiliki daya serap tinggi terhadap gas karbondioksida (CO2) dan data informasinya dapat melengkapi hasil-hasil penelitian yang dilakukan terhadap pohon yang berdiameter lebih besar.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
154	Muhammad Wiharto, dkk;2012;Jurnal	Tree Species Diversity of Various Vegetation Types at The Alliance Level In Sub Montane Forest of Mount Salak, Bogor, West Java	Terdapat 72 jenis pohon yang ditemukan pada aliansi 1, dan Schima wallichii merupakan jenis dengan jumlah individu terbanyak. Kami mengidentifikasi 71 spesies pohon di aliansi 2, dan Pinus merkusii adalah spesies dengan jumlah individu terbesar. Aliansi 3 memiliki 56 jenis pohon, dan P. merkusii memiliki jumlah individu terbanyak. Hutan campuran alam aliansi 1 memiliki nilai H' tertinggi (kisaran: 2.666-3.391) dan hutan bambu aliansi 2 memiliki nilai terendah (1.163-3.233). Aliansi 1 memiliki kemerataan spesies tertinggi (1,136-1,403) dan aliansi 2 terendah (0,551-1,331). Aliansi 1 memiliki kekayaan spesies tertinggi (1,691-2,662), diikuti oleh aliansi 2 (0,621-2,829) dan aliansi 3 (1,051-2,588).	
155	Iyan Robiansyah,dkk;2013;-Jurnal	Pengaruh Jalan Terhadap Keragaman Jenis Tumbuhan Bawah dan Habitatnya di Koridor Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat	Kawasan koridor TNGHS memiliki 117 jenis tumbuhan bawah dan 9 jenis diantaranya adalah jenis eksotik. Daerah pinggir jalan sampai dengan jarak 5 m memiliki komunitas tumbuhan yang berbeda dengan komunitas yang terdapat di dalam hutan. Jenis tumbuhan eksotik dan rumput-rumputan lebih dominan di daerah dekat jalan, sementara tutupan kanopi di pinggir jalan sampai jarak 10 m relatif rendah daripada tutupan kanopi di daerah interior hutan. Kekayaan jenis tidak bervariasi secara signifikan terhadap jarak, namun jarak dari jalan merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi kekayaan jenis tumbuhan eksotik; jarak 0 m memiliki keanekaragaman jenis eksotik paling tinggi dibandingkan jarak lainnya.	Untuk mengendalikan penyebaran jenis eksotik dan menghindari biaya tinggi untuk merestorasi hutan secara keseluruhan, berdasarkan penelitian ini, pengelola kawasan koridor TNGS hendaknya mempertimbangkan beberapa hal dalam pengelolaan kawasan, yaitu: 1) meminimalisir kepadatan jalan di kawasan koridor 2) menghindari pembangunan jalan baru di daerah dengan kawasan hutan yang masih utuh 3) mengontrol jumlah kendaraan yang melewati jalan, dan 4) membatasi aktifitas manusia di hutan.
156	Soraya Nurul Ichwani;2013;Skripsi	Penyebaran spatial Dan Potensi Pemanfaatan Aren (*Arenga pinnata Merr.*) Di Resort Gunung Bedil Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Aren dapat tumbuh dengan baik dengan kriteria berada pada ketinggian 500-1000 mdpl, kemiringan lereng 25-40%, pada NDVI sekitar 0 – 0,32, dan jarak dari sungai ≤ 200 m. 2. Model kesesuaian habitat aren dibuat berdasarkan analisis PCA. Modelyang dihasilkan yaitu : P = (2,009 * elv + 2,009 * slp + 2,009 * js + 1,010 * ndvi). Dari hasil validasi diketahui bahwa Resort Gunung Bedil memiliki kelas kesesuaian habitat sedang. 3. Pemanfaatan aren di Resort Gunung Bedil cukup tinggi. Pemanfaatan dilakukan dimulai dari bagian daun sampai akar aren diantaranya yaitu pembuatan gula aren, ijuk, sapu, tepung aren, obat tradisional, upacara adat, rumah, pengaduk dodol, sayur, pematik api, membangun/menggeser rumah, kolang kaling dan rokok. 4. Tingkat regenerasi aren di kawasan Resort Gunung Bedil TNGHS tergolong rendah karena terdapat banyak pemanfaatan oleh masyarakat Kasepuhan pada tingkat aren muda menuju aren dewasa serta pada tingkat aren dewasa dalam perkecambahannya untuk aren semai.	1. Melakukan inventarisasi aren secara menyeluruh di kawasan sehingga tidak terjadi kekurangan data. 2. Sampai saat ini pengelolaan aren masih dilakukan secara individual sehingga perlu bantuan dari pihak pengelola taman nasional agar pemanfaatan aren di kawasan TNGHS tetap lestari.
157	Edy Nasriadi Sambas, dkk;2013;Jurnal	Preferensi Ekologis Jenis-jenis Tumbuhan Dominan di Gunung Endut, Banten	Tiga belas spesies berhasil dideteksi preferensinya terhadap berbagai faktor abiotik. yang terdiri atass enam spesies memiliki preferensi baik terhadap faktor tanah maupun topografi, empat spesies hanya memiliki preferensi terhadap faktor tanah, dan satu spesies yang hanya memiliki preferensi terhadap faktor topografi. Faktor abiotik tanah seperti Mg, KB, Ca dan Na merupakan unsur penting dalam kaitannya dengan persebaran beberapa species utama. Begitu juga ketinggian rata-rata dan kelerengan merupakan faktor abiotik topografi yang penting.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
158	Rahmadian Harli;2013;Skripsi	KEANEKARAGAMAN SELAGINELLA DI JAWA BARAT	Berdasarkan penelitian ditemukan sebanyak 18 jenis Selaginella di Jawa Barat, yaitu *S. aristata, S. biformis, S. ciliaris, S. frondosa, S. intermedia, S. involvens, S. mayeri, S. opaca, S. ornata, S. plana, S. remotifolia, S. rothertii, S. subalpina, S.subspinulosa, S. uncinata, S. willdenovii, S. zollingeriana, dan Selaginella sp 1*. Lima belas jenis merupakan catatan lama dan tigajenis merupakan catatan baru yaitu *S. uncinata, S. mayeri, dan Selaginella sp 1*. Selaginella di Jawa Barat dapat dijumpai mulai dari ketinggian 20 hingga 2500 m dpl. Jenis Selaginella yang hidup di ketinggian terendah yaitu *S. ciliaris* (20 m dpl) dan pada ketinggian tertinggi yaitu *S. remotifolia* (2500 m dpl). Persebaran Selaginella hampir merata di wilayah Jawa Barat, dengan dominasi temuan yaitu di daerah Bogor dan Bandung. Ada beberapa karakter morfologi meliputi habitus, pola percabangan, posisi rizofor, bentuk daun, bentuk ujung daun, bentuk pangkal daun, tepi daun dan bentuk strobilus. Ciri pembeda utama pada tiap jenis Selaginella dapat dilihat dari pola percabangan serta susunan dan bentuk daun lateral Selaginella.	Perlu dikembangkan penelitian lanjutan pada *S. ciliaris* dan *S. subspinulosa* untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai jenis-jenis Selaginella tersebut. Berdasarkan penelitian, kedua jenis ini memiliki banyak kesamaan morfologi yaitu pada tinggi batang, perakaran, pola percabangan, dan ukuran daun. Perbedaannya hanya terdapat pada bentuk daun lateral. Dibutuhkan identifikasi lanjut pada *Selaginella sp* 1 untuk mengetahui jenis Selaginella tersebut.
159	Decky IJ,dkk;2014;Jurnal	Exotic Plants In Halimun Salak Corridor: Micro-Environment, Detection And Risk Analysis of Invasive Plants	1. Terdapat 11 jenis tumbuhan eksotik di kawasan koridor Halimun-Salak yang terdiri dari tiga jenis pohon berkayu dan delapan jenis herba/perdu. Lantana camara merupakan spesies eksotik yang memiliki nilai WRAP terbesar (24) dan Camellia sinensis merupakan spesies eksotik dengan nilai WRAP terendah (-4). Spesies pohon eksotis memiliki preferensi lingkungan yang serupa. Clidemia hirta merupakan spesies eksotik yang memiliki variabel lingkungan yang relatif berbeda dibandingkan dengan spesies eksotik lainnya yang ditemukan di koridor Halimun-Salak. 2. Berdasarkan penilaian risiko invasif dan observasi lapangan yang dilakukan, beberapa rekomendasi pengelolaan jenis tumbuhan eksotik invasif di koridor Halimun-Salak adalah: 1) pengelolaan jenis invasif dapat dilakukan dengan beberapa pilihan, namun lebih cepat pelaksanaannya maka semakin murah biaya pengelolaan dan semakin sederhana cara pengelolaannya, 2) dapat dilakukan pemberantasan terhadap jenis tumbuhan eksotik yang populasinya belum melimpah tetapi memiliki nilai WRAP yang relatif tinggi seperti Bellucia pentamera dan Cinchona pubescens. Bila memungkinkan, pemberantasan harus dimulai dari individu yang ada di dalam hutan dan berlanjut ke arah luar hutan, 3) Pemberantasan atau pengendalian secara bertahap adalah dua opsi pengelolaan yang memungkinkan untuk jenis tumbuhan eksotik yang memiliki nilai WRAP yang sangat tinggi. seperti Ageratina riparia, Chromolaena odorata dan Lantana camara.	Kajian selanjutnya sebaiknya difokuskan pada bagaimana melakukan implementasi pengelolaan IAS yang memberikan dampak terkecil terhadap ekosistem koridor Halimun-Salak. Penting untuk melakukan studi ekologi habitat mikro spesies eksotik serta menyelidiki dampak spesies eksotik tersebut terhadap ekosistem koridor Halimun-Salak.
160	Ilham Pratama Noviandi;2014;Skripsi	Pemanfaatan Tumbuhan Obat Pada Masyarakat Kasepuhan Di Kampung Ciptarasa dan Ciptagelar Sukabumi	1. Tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kasepuhan di Kampung Ciptarasa, teridentifikasi sebanyak 54 jenis, seperti contoh jukut bau (*Ageratum conyzoides*), ki manila (*Cassia alata*) dan ki kumat (*Polygala paniculata*). Tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kasepuhan di Kampung Ciptagelar sebanyak 51 jenis tumbuhan obat, seperti contoh koneng gede (*Curcuma xanthorrhiza*) dan koneng lalap (*Curcuma mangga*). Tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah jenis tumbuhan obat liar, dikarenakan masyarakat belum mampu membudidayakannya. 2. Cara pengolahan tumbuhan obat yang dilakukan di Kampung Ciptarasa dan Ciptagelar yaitu direbus, diremas, ditumbuk, dijemur, dikukus, diparut, direndam, dipanggang dan digoreng. Cara pengolahan yang banyak dimanfaatkan dengan cara pengolahan direbus dikarenakan cara pengolahannya yang mudah. Cara penggunaan tumbuhan obat yang dilakukan pada kedua kampung yaitu dimakan, dilumaskan, dibalurkan, diminum, dibasuhkan, ditempelkan, digosok-gosokkan dan diteteskan. Cara penggunaan yang banyak digunakan, yaitu diminum karena tumbuhan obat dengan cara diminum memiliki berbagai macam khasiat.	1. Pengembangan pembudidayaan pada beberapa tumbuhan obat yang menurut masyarakat kampung keberadaanya sudah sulit untuk ditemukan dan diperlukan karena memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti contoh ki koneng (*Fibraurea tinctoria*) dan ki barera (*Tetrastigma dichotomum*). 2. Pihak TNGHS memberikan pelatihan pembudidayaan tumbuhan obat kepada masyarakat pada tiap-tiap kampung, karena banyak masyarakat yang ingin melakukan pembudidayaan tumbuhan obat akan tetapi selalu kurang baik hasilnya dalam pembudidayaan tumbuhan obat tersebut.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
161	Erlin Rachman,dkk;2014;Jurnal	Penelitian Nyali Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat, Indonesia	Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keragaman bentuk dan jenis nyali di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Halimun Salak adalah hampir sama, hanya komposisi suku tumbuhan inangnya saja yang sedikit berbeda. Meski begitu, secara umum terdapat lima suku tumbuhan yang paling sering ditemukan dengan nyali yaitu Elaeocarpaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, Melastomataceae, Moraceae dan Rubiaceae.	Untuk kajian keragaman nyali yang berhubungan dengan keragaman serangga di suatu lokasi dianjurkan untuk melanjutkan survei menurut rekomendasi diatas. Kajian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih lengkap guna melihat lebih jauh interaksi fisiologis dan ekologis antara tumbuhan dan organisme pembentuk nyali.
162	Devi Aristyanti ;2014;Skripsi	Pengaruh Kadar Kimia Tanah Terhadap Kandungan Flavonoid Daun Tabat Barito (*Ficus deltoidea Jack*.)	Berdasarkan hasil uji kuantitatif kadar flavonoid diperoleh data bahwa kandungan flavonoid daun tabat barito di sekitar pusat informasi (TNGGP) lebih tinggi, yaitu sebesar 3.54% dibandingkan dengan yang tumbuh di Kawah Ratu(TNGHS) yang hanya sebesar 2.41%. Hal ini diduga karena adanya perbedaan kadar kimia tanah dari kedua lokasi tersebut. Kadar kimia tanah utama yang mempengaruhi kadar flavonoid tabat barito, yaitu N, P, K, dan Ca. Perbedaan ini mungkin saja dapat dijadikan penyebab perbedaan dikarenakan fungsi dari unsur kimia tersebut meskipun tabat barito yang berada di TNGGP berupa epifit. Hal ini dikarenakan sifat epifit yang tidak bergantung hidup pada makanan yang berasal dari tanaman induknya.	Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah perlu dilakukannya penelitian mengenai : 1. Pengaruh suhu, kelembaban dan kondisi fisik serta biologi tanah di TNGHS dan TNGGP terhadap kandungan flavonoid daun tabat barito 2. Pengaruh struktur tubuh lainnya dari tabat barito (semak, epifit dan liana) pada berbagai tipe ekosistem di TNGHS dan TNGP terhadap kandungan flavonoid daun tabat barito
163	Edi Mirmanto;2014;Jurnal	Permudaan Alami Kawasan Hutan Resort Cidahu, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat	Tiga pola komunitas teridentifikasi dan masing-masing secara nyata berkaitan dengan kondisi lingkungan khususnya penutupan kanopi. Pola ini diikuti dengan pengelompokan jenis-jenis pohon menurut keterkaitannya dengan kondisi penutupan kanopi. Dengan demikian untuk sementara telah diketahui beberapa jenis indikator yaitu *Castanopsis argentea, Castanopsis acuminatissima* (kanopi rapat), *Symplocos fasciculata,* dan *Ostodes panniculata* (kanopi agak terbuka) dan *Calyandra calothyrsus*, dan *Piper aduncum* kanopi sangat terbuka) sebagai bahan untuk penelitian lanjutan.	Untuk itu perlu pengamatan ulang atau monitoring untuk mengetahui konsistensi kecenderungan keterkaitan suatu jenis terhadap kondisi lingkungan.
164	Aditya Hani,dkk;2014;Jurnal	Potensi dan Pengembangan Jenis-jenis Tanaman Anggrek dan Obat-obatan Di jalur Wisata Loop Trail Cikaniki-Citalahab Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	Jalur wisata loop trail Cikaniki-Citalahab di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ditumbuhi sekitar 68 jenis anggrek yang terdiri dari 57 jenis anggrek epifit dan 11 jenis anggrek tanah. Jumlah tumbuhan obat yang ditemukan sejumlah 14 jenis yang biasa digunakan oleh masyarakat hutan untuk pengobatan secara tradisional.	Potensi tanaman hias dan obat-obatan yang terdapat di TNGHS perlu dilestarikan dan dikembangkan melalui konservasi eksitu. Kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat mengenai teknik budidaya tanaman anggrek dan obat.
165	Solecha Rahmawati;2014;Skripsi	Tumbuhan Bawah dan Potensi Jenis Invasif Di Gunung Bunder Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Bogor	Tumbuhan bawah yang ditemukan di TNGHS Gunung Bunder ada 52 jenis dengan keanekaragaman tertinggi pada blok Sinar Miring (H'=3.1). Pada blok Sinar Miring ditemukan 29 jenis dengan 13 jenis merupakan paku-pakuan. Tingginya keanekaragaman disebabkan rendahnya gangguan,kondisi teduh dan tinginya keragaman iklim mikro, sehingga mendukung pertumbuhan paku dan memberi relun hidup lebih banyak untuk pertumbuhan. Tumbuhan bawah potensi invasif ada empat jenis yaitu *Digitaria ciliaris* (Poaceae), *Panicum dichotomiflorum* (Poaceae), *Clidemia hirta* (Melastomataceae), dan *Setaria verticillata* (Poaceae). Keempat jenis tersebut tumbuh mengelompok dan tersebar secara acak. Semak Clidemia hirta ditemukan di ketiga blok dan memiliki INP rata-rata 33.2%. Jenis *C. hirta* memiliki potensi tertinggi sebagai jenis invasif di waktu mendatang. Tingginya potensi disebabkan penyebaran yang luas, pertumbuhan cepat, dan seringnya *C. hirta* dijumpai di jalur pendakian yang memudahkan persebarannya.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
166	Denny, dkk;2014;Jurnal	The association among dominant tree species in mount Halimun Salak National Park	Spesies terdiri dari 32 famili pada tingkat bunga, 61 spesies, 28 famili, 35 generasi dan 53 spesies pada tingkat pancang, 24 famili, 19 genus dan 43 spesies pada tingkat semai. Jenis yang dominan pada tingkat pohon adalah Rasamala (*Altingia excelsa*), Puspa (*Schima walichi*), Damar (*Agathis damara*), dan Kihujan (*Engelhardia spicata*). Pada pancang, jenis yang dominan adalah Puspa (S*chima walichii*), Rasamala (*Altingia excelsa*), Huru (*Litsea sp*.), dan Mara (*Macaranga triloba*). Pada tingkat semai, jenis yang dominan adalah Puspa (*Schima walichii*), Kiuhut (*Aporosa frutescens*), Pasang (*Quercus sundaica*) dan Mara (*Macaranga triloba*). Asosiasi negatif yang signifikan terjadi antara Damar (*Agathis damara*) dan Rasamala (*Altingia excelsa*), serta damar (*Agathis damara*) dan Kihujan (*Engelhardia spicata*).	Disarankan untuk melakukan pemantauan secara berkala untuk memungkinkan pengamatan dinamika perubahan floristik di ekosistem pegunungan ini dan untuk mengetahui dampak perubahannya terhadap lingkungan.
167	R. Arya Darmansyah;2014;Skripsi	Penilaian Kondisi Kesehatan Tegakan di Areal Pasca Tambang PT. ANTAM Tbk, UPBE Pongkor Jawa Barat.	Dari hasil data yang telah diolah didapat nilai kesehatan hutan pada klaster plot tahun 2003 dan 2006 tergolong dalam klasifikasi rendah sedangkan pada klaster plot tahun 2001 tergolong dalam klasifikasi sehat, sama seperti klasifikasi hutan alam. Hal ini menunjukkan bahwa PT Antam Tbk UBPE Pongkor telah melakukan evaluasi pada areal-areal reklamasinya namun nilai kesehatan hutan yang masih di klasifikasikan rendah pada tahun 2003 dan tahun 2006 menunjukkan bahwa tindakan pemeliharaan dan evaluasi penanaman pada areal tersebut harus lebih di sesuaikan dengan jenis tanaman agar dapat menghasilkan nilai kesehatan hutan yang lebih baik di masa yang akan datang.	1. Melakukan kegiatan evaluasi dengan metode yang sama secara berkelanjutan guna mengetahui perkembangan kesehatan hutan 2. Pengamatan kesehatan hutan dilakukan di klaster plot yang sama sehingga dapat mempermudah dalam mengetahui perkembangan kesehatan hutan. 3. Pihak manajemen perlu melakukan kegiatan pemeliharaan terhadap tanaman reklamasi agar nilai kesehatan terus meningkat, dengan cara melakukan penjarangan terhadap tegakan yang terkena hama dan penyakit serta penanaman dengan menggunakan jenis lokal. 4. Melakukan kegiatan lateral root manipulation untuk tanaman stagnan dibawah 3 tahun, jika tanaman berumur lebih 3 tahun stagnan maka lebih baik diganti tanaman baru. 5. Pemberian kompos secara berkelanjutan, agar tanaman dapat tumbuh dengan sehat.
168	Entin Kartini;2015;Tesis	Karakteristik Vegetasi dan Tanah Serta Cadangan Karbon Pada Lahan Tambang Di Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat	1. Struktur dan komposisi vegetasi di lokasi Gunung Pongkor, pada lahan tambang underground tidak berbeda dengan lahan tidak terganggu, namun secara signifikan lebih lengkap dari lahan PETI. 2. Sifat fisika, kimia dan biologi tanah pada lahan underground pada umumnya sama dengan lahan tidak terganggu dan secara signifikan lebih baik dari lahan PETI (fraksi liat lebih tinggi dari pasir, C-organik dan KTK tinggi, rasio Ca>Mg, keanekaragaman dan kekayaan spesies makrofauna tanah tinggi). 3. Cadangan karbon di atas permukaan tanah di lahan tidak terganggu (288.94 ton C/ha) lebih tinggi dibandingkan lahan underground (192.74 ton C/ha) namun secara statistik tidak berbeda, sedangkan lahan PETI secara signifikan lebih kecil yaitu 0.06 ton C/ha. 4. Jenis-jenis tumbuhan yang adaptif di lokasi penelitian yang berpotensi sebagai pionir yang dapat digunakan untuk reklamasi lahan antara lain *Altingia excelsa* (Rasamala), *Castanopsis argentea* (Saninten), *Vernonea arborea* (Hamirung), *Lithocarpus sp* (Pasang), *Lithocarpus sundaicus* (Parengpeng), *Mallotus paniculatus* (Calik angina), *Schima wallichii* (Puspa), *Ziziphus mauritiana* (Kidara), *Vitex pubescens* (Laban), *Syzygium lineatum* (Ki sireum), *Eurya acuminata* (Saketi), *Ficus fistulosa* (Beuying), *Ficus benjamina* (Beringin), *Ficus Montana* (Amis mata). Jenis paku pakuan seperti Selaginella doederleinii (paku rane) dan juga kacang kacangan dapat dijadikan sebagai spesies pionir karena dapat tumbuh pada kondisi kering dan di batu. 5. Terdapat 99 jenis tumbuhan yang memiliki fungsi yang penting secara sosial ekonomi seperti sebagai tumbuhan obat (54 jenis), bahan bangunan, kontruksi, furnitur (23 jenis), kerajinan (4 jenis), pakan ternak (4 jenis) dan tumbuhan yang memiliki manfaat ganda (14 jenis).	Penanaman jenis pionir lokal teridentifikasi namun tidak bersifat Invasif sangat disarankan untuk mendukung kegiatan restorasi di lahan Taman Nasional Gunung Halimun Salak maupun rehabilitasi lahan terganggangu PT Antam UBPE Pongkor.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
169	Asmanah Widarti,dkk;2015;-Jurnal	Keragaman Jenis Pakan Ternak dan Ketersediaannya di Wilayah Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Penelitian dilakukan di desa-desa sekitar kawasan yaitu desa Cihamerang dan Cipeuteuy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternak kambing yang dimiliki masyarakat bervariasi antara 7-9 ekor kambing, dengan kebutuhan pakan ternak sebanyak 6-7 karung atau 180-210 kg rumput. Sebagian besar masyarakat mendapatkan pakan ternak dari lahan kering, lahan basah, bantaran sungai, tepi jalan dan zona pemanfaatan TNMH. Berdasarkan analisis vegetasi tumbuhan bawah diketahui bahwa hanya 76% yang merupakan pakan ternak dan sisanya merupakan gulma. Akan tetapi gulma dapat digunakan untuk tujuan lain seperti kompos dan penutup tanah yang dapat mengurangi banjir.	Perlu upaya penyediaan lahan sebagai sekat bakar oleh pihak pengelola TNGHS disamping untuk pengamanan hutan juga untuk meningkatkan ketersediaan pakan ternak melalui pembuatan sabuk bakar hijau dengan vegetasi hidup dari pohon-pohon yang merupakan sumber pakan ternak. Dengan meningkatnya daya dukung penyediaan pakan ternak pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan peternak dan keamana kawasan hutan TNGHS.
170	Sri Ulie Rakhmawati,dkk;2016;-Jurnal	*Balonophora spp.* Di Resort Cikaniki, Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Hasil penelitian dan pengamatan morfologi telah mengidentifikasi dua jenis Balanophora yang dapat ditemukan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yaitu *Balanophora elongata var. elongata* dan *Balanophora fungosa ssp. indica var. globosa.* Tumbuhan inang Balanophora elongata var. elongata yaitu Schima wallichii, sedangkan tumbuhan inang *Balanopora fungosa ssp. indica var*. globosa yaitu *Ficus fistulosa*.	
171	Sudarmono;2016;Jurnal	Decreasing Population of *Scutellaria discolor Colebr.* And P*lectranthus galeatus Vahl.* (Lamiaceae) on Mount Salak And Telaga Warna, West Java Province, Indonesia	Populasi *Scutellaria discolor* dan Plectranthus galeatus di Gunung Salak pada ketinggian antara 1100 – 1300 m dpl populasi antara bibit dan induknya seimbang. Demikian pula populasi *S. discolo*r di Telaga Warna masih berjalan baik antara induk dan bibitnya pada ketinggian 1526 -1587 m dpl, namun pada spesies *P. galeatus* (ketinggian 1444 sd 1599 m dpl) jumlah bibit menurun.	
172	Salman Alghifari;2016;Skripsi	Keanekaragaman Jensi Paku Terestrial di Kawasan Gunung Bunder Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Bogor, Jawa Barat	Paku terestrial di kawasan jalur pendakian kawah ratu ditemukan sebanyak 26 jenis yang termasuk dalam 15 famili. Famili yang paling banyak ditemukan yaitu Dennstaedtiaceae dengan 4 spesies. Jenis paku terestrial yang sering ditemukan adalah *Pteris mertensioides* dan *Christella dentata* yang ditemukan di empat lokasi yang berbeda. Kedua spesies ini dapat hidup pada habitat terbuka dan ternaungi. Pada lokasi HM 52- 56 ditemukan sebanyak 4 spesies, dua spesies tumbuhan paku terestrial yang tumbuh di lokasi ini tidak ditemukan di lokasi lain, yaitu *Oleandra musifolia* dan *Arachnioides haseltii.*	Tumbuhan paku memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan menjadi bahan obat, bahan makanan, dan tanaman hias. Perlu dilakukan eksplorasi yang lebih luas di kawasan Gunung Bunder melalui jalur lain, sehingga dapat melengkapi data keanekaragaman tumbuhan paku yang terdapat di kawasan Gunung Bunder.
173	Mega Ayu Putri;2016;Skripsi	Keanekaragaman spesies Tumbuhan Paku Epifit dan Pohon Inangnya Di Kawasan Hutan Gunung Bunder Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Bogor, Jawa Barat	Di kawasan hutan Gunung Bunder TNGHS ditemukan tumbuhan paku epifit sebanyak 20 spesies yang tergolong kedalam 10 famili. Spesies tumbuhan paku epifit yang tergolong dominan yaitu Nephrolepis biserrata (48.80%) danGoniophlebium persicifolium (33,18%). Pohon inang yang ditemukan sebanyak 8 spesies dan tergolong kedalam 8 famili. Spesies pohon inang yang paling banyak dihuni oleh tumbuhan paku epifit yaitu pohon rasamala (*Altingia excelsa*). Keanekaragaman spesies tumbuhan paku epifit di kawasan hutan Gunung Bunder TNGHS tergolong sedang (H'= 2.05). Faktor lingkungan yang berkorelasi positif terhadap keanekaragaman spesies tumbuhan paku epifit di habitat alaminya terdiri atas kelembapan udara, kecepatan angin dan intensitas cahaya. Sedangkan parameter suhu berkorelasi negatif terhadap keanekaragaman spesies tumbuhan paku epifit. Komposisi vegetasi hutan, ketinggian tempat, asosiasi antara spesies tumbuhan paku epifit dan kelimpahan setiap spesies diketahui berpengaruh positif terhadap keanekaragaman spesies tumbuhan paku epifit, namun hal ini kurang berpengaruh terhadap spesies tumbuhan paku Pyrrosia lanceolata.	Saran untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan pengamatan keanekaragaman spesies tumbuhan paku epifit di kawasan hutan Gunung Bunder dengan ketinggian yang berbeda dan telah di tentukan sebelumnya. Masih banyaknya spesies tumbuhan paku epifit yang ditemukan di kawasan hutan Gunung Bunder mengindikasikan bahwa daerah ini masih sangat baik kondisi lingkungannya, hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat untuk terus melestarikan hutan Gunung Bunder sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
174	Florentina Indah Windadri;2017;-Jurnal	Lumut Sejati Dihutan Alam Pameungpeuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat [Mosses Pameungpeuk Primary Forest, Mount Halimun Salak National Park, West Java]	1. Dari hasil eksplorasi dan inventarisasi keanekaragaman lumut sejati di Hutan Alam Pameungpeuk, Cidahu, Sukabumi dapat disimpulan bahwa keanekaragaman lumut sejatinya cukup tinggi dan tercatat sebanyak 78 jenis yang tergolong dalam 47 marga dan 20 suku. 2. Keragaman jenis lumut sejati tertinggi di lokasi penelitian ada pada suku Dicranaceae yang mengidikasikan bahwa lokasi penelitian secara umum mempunyai tingkat keasaman yang rendah. 3. Sebanyak 27 jenis lumut sejati di lokasi penelitian dikategorikan sebagai rekaman baru bagi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, 7 jenis diantaranya sebagai rekaman baru bagi Indonesia dan satu jenis sebagai rekaman baru bagi Pulau Jawa.	Munculnya jenis-jenis yang dikategorikan sebagai rekaman baru menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan pada lokasi-lokasi yang belum pernah diekplorasi akan menyumbangkan informasi baru yang sangat berguna dalam pengungkapan keanekaragaman jenis flora di Indonesia.
175	Bahrul Septian Dwi Cahyo;2017;Skripsi	Keanekaragman Spesies dan Kondisi Habitat Balonophora Di Gunung Salak Satu dan Dua Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Balanophora yang ditemukan di lokasi penelitian berjumlah dua jenis, yakni *Balanophora fungosa ssp*. indica var globosa yang terdiri dari 28 individu dan satu individu *Balanophora elongata*. *Balanophora fungosa ssp. indica var globosa* ditemukan menginfeksi akar dari *Schima wallichi*i sedangkan *Balanophora elongata* menginfeksi akar *Scheffera aromatica*. Menurut ketinggiannya, Balanophora di lokasi penelitian berhabitat di hutan hutan pegunungan karena di temukan di ketinggian 1647 – 2059 m dpl. Kondisi vegetasi tingkat pohon, pancang, dan tiang didominasi oleh *Schima wallichii*. Sementara tingkat semai di dominasi oleh Bishofia javanica dan tingkat tumbuhan bawah didominasi oleh pakuan dengan jenis Asplenium unilaterale. Strukur vegetasi yang tumbuh di habitat Balanophora berada pada strata B, C, D, dan E. Kondisi iklim berada pada suhu 17.16℃-20.33℃, kelembapan 85.91-9.34%, dan intensitas cahaya 462.25-2103.33 lux. Balanophora ditemukan tumbuh di tempat curam sampai sangat curam.	Perlu dilakukan kajian mengenai struktur jaringan akar pohon inang. Untuk mengetahui cara Balanophora dalam menginfeksi akar inang. Berdasarkan hasil analisis vegetasi, pengukuran iklim, dan topografi, peneitian selanjutnya diharapkan memperluas area contoh sehingga didapatkan hasil yang lebih representatif. Kajian kondisi habitat pada peneitian ini hanya terbatas pada lokasi yang ditumbuhi Balanophora, sehingga belum bisa memberikan informasi perbedaan terhadap lokasi yang tidak ditemukan Balanophora.
176	Putri Novita Sari;2017;Skripsi	Penyebaran dan Karakteristik Habitat Jenis Rasamala (*Altingia excelsa Noronha*) Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Rasamala (*Altingia excelsa Noronha*) di kawasan Taman Nasional Gunung Salak memiliki pola penyebaran mengelompok, baik di Resort Cikaniki maupun Resort Kawah Ratu. Faktor lingkungan berupa ketinggian, kelerengan, suhu, kelembaban, kandungan C-organik tanah, dan N-total berpengaruh nyata terhadap keberadaan rasamala (*A. excelsa*) di Resort Kawah Ratu dan tidak berpengaruh nyata di Resort Cikaniki dengan faktor yang paling berpengaruh adalah kandungan N-total pada tanah.	Perlunya memerhatikan pola penyebaran dan faktor lingkungan berupa ketinggian, kelerenan, suhu, kelembaban, C-organik, dan kandungan N-total tanah bagi pihak yang ingin membudidayakan jenis rasamala mengingat karakteristik tempat tumbuhnya berbeda dengan jenis yang lain. Serta perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam mengidentifikasi hubungan dengan jenis lain (jenis lokal maupun jenis asing).
177	Muhamad Muhaimin, dkk;2017;-Jurnal	Mycoheterotrophic Plants of Gunung Halimun-Salak National Park, West Java, Indonesia	Based on this study, there are 33 species (7 families, 22 genera) of mycoheterotrophic plants in the Gunung Halimun Salak National Park. This represents about half of the total species in Java, with 33 out of 67. *Gastrodia crispa*, a species endemic to Java, can be found in this area. We concluded that this National Park provides important habitats for mycoheterotrophic plants species on Java. Continuous protection of the Gunung Halimun Salak National Park is essential to ensure the future existence of mycoheterotrophic plants Berdasarkan penelitian ini, terdapat 33 spesies (7 keluarga, 22 genera) tanaman *mycoheterotrophic* di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ini mewakili sekitar setengah dari total spesies di Jawa, dengan 33 dari 67. *Gastrodia crispa*, spesies endemik Jawa, dapat ditemukan di daerah ini. Kami menyimpulkan bahwa Taman Nasional ini menyediakan habitat penting bagi spesies tanaman mycoheterotrophic di Jawa. Perlindungan berkelanjutan dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak sangat penting untuk memastikan keberadaan tanaman mycoheterotrophic di masa depan	Continuous protection of the Gunung Halimun Salak National Park is essential to ensure the future existence of mycoheterotrophic plants Perlindungan berkelanjutan dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak sangat penting untuk memastikan keberadaan tanaman mycoheterotrophic di masa depan

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
178	Dyah R Panuju, dkk;2018;Jurnal	BI-Temporal Analysis of Vegetative Cover By Using Alos Palsar: Halimun Salak National Park, Indonesia	1. Employing microwave satellite images is an option for monitoring areas with poor accessibility that are severely affected by persistent cloud cover. Employing the difference of log images of dual polarisation ALOS radar backscatter demonstrated the potential of monitoring such areas. Differencing of HH, HV backscatter and MAD variates pointed to the location of change with the clearest indication being demonstrated by the difference of HV. Filtering the second MAD variate produced a similar result to differencing of log HV. 2 2. The employment of post-classification change analysis informs "form-to" change. Dual layers of ALOS FBD images may limit capabilities for classification of complex classes, hence injecting synthetic images enriches information that may improve the accuracy. In post-classification change detection, error detection is proliferated by each classification. The increment of accuracy by data injection was demonstrated by employing GBT. The greatest accuracy was yielded from texture injection comprising of GLCM layers, i.e. mean, variance and correlation. However, a limited number of classes across a three-year time span could not indicate any change occurrence in the location. Google Earth imagery assisted in the interpretation of binary change detection. The different tone resulted from differencing and IRMAD indicated subtle changes due to the change of vegetation type or growth phases such as from juvenile to maturing oil palm or unvegetated to vegetated paddy fields.	
179	Rachma Fauziah,dkk;2018;-Jurnal	Komposisi dan Struktur Vegetasi di Resort Gunung Salak II Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)	Vegetasi Resort Gunung Salak 2 memiliki 44 famili; 88 spesies; 1527 individu. Keanekaragaman spesies di Resort Gunung Salak 2 TNGHS sedang sebesar 2,3 pada tingkat semai dan tumbuhan bawah; 1,6 pada tingkat pancang; 1,82 pada tingkat tiang: 1,85 pada tingkat pohon. Kemerataan spesies yang tinggi sebesar 0,75 pada tingkat semai dan tumbuhan bawah; nilai kemerataan 0,69 dimiliki oleh tumbuhan pada tingkat pancang, tiang dan pohon. Pola pelapisan tajuk di hutan Resort Gunung Salak 2 dikelompokkan ke dalam empat stratum (A, B, C, dan D).	
180	Edy Nasriadi Sambas,dkk;2018;-Jurnal	Vegetation Analysis And Population Structure of Plants At Mount Endut Forested Area, Gunung Halimun Salak National Park, Banten, Java, Indonesia	1. Lereng Utara, Selatan, Timur dan Barat Gunung Endut, TNGHS masing-masing ditempati oleh komunitas *Castanopsis acuminatissima – C.argentea, C. acuminatissima – Schima wallichii,* dan *Altingia excelsa – C. acuminatissima. C. acuminatissima* dan *S. wallichii* adalah dua spesies pohon terpenting di sebagian besar transek dan menunjukkan banyak korelasi positif dengan unsur hara tanah. 2. Jenis pancang utama di empat lereng Gunung Endut adalah *Castanopsis acuminatissima, Garcinia rostrata, Schima wallichii, Symplocos cochinchinensis* dan *Prunus arborea*. Untuk bibit, spesies yang dominan adalah *Cyathea contaminans, Pinanga coronata, Castanopsis acuminatissima, Garcinia rostrata,* dan *Ophiorrhiza marginata.* 3. Keanekaragaman jenis tumbuhan di kawasan Gunung Endut relatif rendah terutama di lereng Utara. Kepadatan pohon di seluruh wilayah ini juga relatif rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh pembalakan liar dan perambahan oleh budidaya. 4. Tanah Gunung Endut umumnya masam. Rasio C/N adalah rendah hingga sedang. Kapasitas tukar kation berkisar dari rendah hingga sedang dan sedang hingga tinggi. Kandungan total C organik dan N (kasus lereng Timur) cenderung semakin tinggi menuju elevasi yang lebih rendah. Kandungan P, Ca, Mg, K, dan Na, semuanya bervariasi dalam gradien ketinggian.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
181	Ramdhani I,dkk;2019;Jurnal	Isolasi dan Identifikasi Jamur Makro Asal Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Isolat murni jamur makro diperoleh dari isolasi jaringan tubuh buah pada media PDA+ antibiotik. Sebanyak 14 isolat jamur makro anggota filum Basidiomycota dan Ascomycota telah berhasil diisolasi dari 38 spesimen jamur makro dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Namun, hanya sebanyak 8 dari 14 isolat yang dapat diidentifikasi molekuler dengan baik. Kedelapan spesimen jamur makro tersebut tergolong ke dalam 2 filum, 2 kelas, 4 marga, dan 7 suku. Sebanyak 3 isolat dapat diidentifikasi molekuler dengan baik hingga tingkat spesies yakni *Xylaria schweinitzii*, *Agaricus flocculosipes*, dan *Fomitopsis feei*. Kelima isolat lainnya hanya dapat diidentifikasi hingga level genus yakni *Ganoderma sp., Pleurotus sp., Rigidoporus sp., Gymnopus sp.,* dan *Agaricus sp.*	Isolat yang diperoleh selanjutnya dapat dilakukan penapisan untuk mendapatkan isolat yang potensial dan dapat dimanfaatkan dalam bioprospeksi.
182	Akira Wijayanie;2019;Skripsi	Karakterisasi Struktur Vegetasi Di Koridor Taman Nasional Gunung Halimun Salak Dengan Teknologi Drone dan Sistem Informasi Geografis	Area restorasi koridor Taman Nasional Gunung Halimun Salak memiliki struktur vegetasi yang terdiri dari tingkat semai, pancang, tiang dan pohon. Lapisan tajuk koridor TNGHS terdiri dari lima lapisan tajuk, yaitu strata A (>30 m), B (20 -30 m), C (4 – 20 m), D (1 – 4 m), dan E (0 – 1 m). Spesies pohon terpenting pada area restorasi yaitu puspa (*Schima wallichii*) dengan nilai penting (INP) sebesar 97.76% dan damar (*Agathis dammara*) dengan nilai penting (INP) sebesar 97.50%. Spesies tiang terpenting adalah puspa (*Schima wallichii*) dan damar (*Agathis dammara*) dengan nilai penting (INP) masing-masing sebesar 83.12% dan 55.76%. Spesies penting pada tingkat pancang adalah jambu tangkalak (Bellucia axinanthera) dengan nilai sebesar 35.33% dan jenis mara (*Macaranga triloba*) dengan nilai sebesar 35.05%. Spesies penting tingkat semaiyaitu mara (*Macaranga triloba*) dengan nilai penting sebesar 68.38%. Indeks vegetasi yang efektif untuk melihat perbedaan struktur vegetasi suatu area adalah indeks vegetasi NDVI dan RVI.	Perlu adanya data sebelum dilakukan restorasi seperti trend tutupan lahan. Data dapat menggunakan data satelit untuk dapat monitoring perkembangan area restorasi hingga tahun ini yang menggunakan citra resolusi tinggi. Sehingga dapat membantu pengelola untuk memantau area restorasi.
183	Muhammad Ilham Alfaridzi;2019;Skripsi	Keanekaragaman dan Pola Sebaran Spesies Tumbuhan Asing Invasif Di Resort Gunung Butak Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 24 spesies tumbuhan asing invasif, 22 spesies ditemukan pada petak pengamatan analisis vegetasi dan 2 spesies ditemukan pada hasil eksplorasi di luar petak pengamatan analisis vegetasi. Teridentifikasi 5 spesies yang masuk ke dalam daftar 100 spesies asing yang paling berbahaya, diantaranya Clidemia hirta, Lantana camara, Mikania micrantha, Imperata cylindrica, dan Sphagneticola trilobata. Pola sebaran tumbuhan asing invasif di Resort Gunung Butak memiliki pola penyebaran mengelompok (clumped).	Perlu adanya kegiatan monitoring untuk mengetahui sejauh mana perkembangan spesies asing invasif guna mengurangi resiko dampak negatif dari adanya spesies tumbuhan asing invasif di Resort Gunung Butak TNGHS, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar sektor dalam menangani spesies asing tumbuhan invasif untuk tercapainya pengelolaan yang intensif sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan, serta perlu adanya pembinaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar taman nasional melalui penyebaran informasi dalam bentuk penyuluhan karena dapat membantu masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menyadari potensi ancaman dan bahaya dari penyebaran spesies asing invasif.
184	Azwar Azmillah Sujaswara;2019;Skripsi	Pemetaan Tutupan Vegetasi Berbasis Objek Di Area Restorasi Koridor Taman Nasional Gunung Halimun Salak Dengan Teknologi Drone	1. Tutupan vegetasi yang berhasil dipetakan di area restorasi koridor adalah seluas 91.50 ha. Berdasarkan klasifikasi berbasis objek menunjukan tutupan vegetasi paling dominan merupakan kelas pohon seluas 70.74 ha atau 77.31 % dari total area yang dipetakan. Sedangkan untuk kelas semak, rumput, serta tanah dan pertanian masing masing seluas 12.81 ha, 5.71 ha, 2.24 ha. Nilai Overall Accuracy dari klasifikasi yang digunakan adalah 73.11 %. 2. Pemetaan tutupan vegetasi berbasis objek dengan bantuan informasi spektral dan CHM belum menunjukan hasil yang baik dalam memetakan kelas semak, rumput serta tanah dan pertaninan. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya CHM yang dihasilkan oleh drone dengan metode SfM. Selain itu efek bayangan juga membuat nilai reflektan suatu objek menjadi tidak sesuai.	1. Untuk penelitian lebih lanjut, kualitas informasi spektral dan struktural perlu ditingkatkan dengan cara kalibrasi kamera multispektral dan penggunaan GCP yang lebih banyak. Mempertimbangkan kondisi cuaca saat pengambilan citra agar tidak terdapat banyak bayangan. Penggunaan UAV yang dapat memetakan area yang lebih luas seperti Fixed wing. 2. Taman nasional perlu melakukan pengambilan data secara berkala sehingga sebaran tutupan vegetasi dan pertumbuhan vegetasi dapat dimonitoring secara berkelanjutan. Monitoring berkelanjutan juga bisa dibantu dengan citra satelit yang bebas awan.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
185	Istomo,dkk;2019;Jurnal	Penyebaran dan Karakteristik Habitat Jenis Rasamala (*Altingia excelsa Noronha*) Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Rasamala (*A. excelsa*) di kawasan Taman Nasional Gunung Salak memiliki pola penyebaran mengelompok, baik di Resort Cikaniki maupun Resort Kawah Ratu. Faktor habitat berupa ketinggian, kelerengan, suhu, kelembaban, kandungan C-organik tanah, dan N total berpengaruh nyata terhadap keberadaan rasamala (*A. excelsa*) di Resort Kawah Ratu dan tidak berpengaruh nyata di Resort Cikaniki.	
186	Azwar Azmillah Sujaswara;2019;Skripsi	Pemetaan Tutupan Vegetasi Berbasis Objek Di Area Restorasi Koridor Taman Nasional Gunung Halimun Salak Dengan Teknologi Drone	Tutupan vegetasi yang berhasil dipetakan di area restorasi koridor adalah seluas 91.50 ha. Berdasarkan klasifikasi berbasis objek menunjukan tutupan vegetasi paling dominan merupakan kelas pohon seluas 70.74 ha atau 77.31 % 19 dari total area yang dipetakan. Sedangkan untuk kelas semak, rumput, serta tanah dan pertanian masing masing seluas 12.81 ha, 5.71 ha, 2.24 ha. Nilai Overall Accuracy dari klasifikasi yang digunakan adalah 73.11 %. Pemetaan tutupan vegetasi berbasis objek dengan bantuan informasi spektral dan CHM belum menunjukan hasil yang baik dalam memetakan kelas semak, rumput serta tanah dan pertaninan. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya CHM yang dihasilkan oleh drone dengan metode SfM. Ketiga kelas tersebut memiliki batasan CHM yang sangat dekat, batasan ini lebih kecil dari standar deviasi CHM yang dihasilkan yaitu 7.2367 m. Selain itu efek bayangan juga membuat nilai reflektan suatu objek menjadi tidak sesuai.	Untuk penelitian lebih lanjut, kualitas informasi spektral dan struktural perlu ditingkatkan dengan cara kalibrasi kamera multispektral dan penggunaan GCP yang lebih banyak. Mempertimbangkan kondisi cuaca saat pengambilan citra agar tidak terdapat banyak bayangan. Penggunaan UAV yang dapat memetakan area yang lebih luas seperti Fixed wing. Taman nasional perlu melakukan pengambilan data secara berkala sehingga sebaran tutupan vegetasi dan pertumbuhan vegetasi dapat dimonitoring secara berkelanjutan. Monitoring berkelanjutan juga bisa dibantu dengan citra satelit yang bebas awan.
187	Giry Marhento,dkk;2020;Jurnal	Biodiversitas Lumut Epifit di Gunung Kendeng Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Jawa Barat	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman jenis lumut (*Bryophytes*) yang ter-dapat di Gunung Kendeng di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak tergolong sedang dengan nilai Indeks keanekaragaman yaitu 2,149. Keanekaragaman jenis lumut (*Bryophytes*) pada berbagai substrat yang terdapat di Gunung Kendeng tergolong sedang, baik pada substrat terestrial (nilai indeks keanekaragaman 1,276) maupun arboreal (nilai indeks keanekaragaman 1,851). Hal ini menunjukkan keane-karagaman pada substrat arboreal lebih tinggi dibandingkan pad substrat terestrial. Lumut sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan terutama kelembaban udara. Manfaat dari lumut diantaranya adalah sebagai indikator lingkungan yaitu dengan melihat bentuk fisik dan warnanya dan lumut juga dimanfaat-kan sebagai bahan obat-obatan.	
188	Yelin Adalina,dkk;2020;Jurnal	Vegetation analysis, physi-co-chemical properties and economic potential of damar (*Agathis dammara*) in Mount Halimun Salak National Park,West Java, Indonesia	1. Vegetasi hutan di Resort Kawah Ratu seluruhnya didominasi oleh tanaman damar. Kondisi hutan damar di kawasan ini masih bagus dengan tingkat kerapatan pohon yang tinggi. Kualitas kopal dari Resor Kawah Ratu, Kabupaten Sukabumi memenuhi standar SNI dalam parameter seperti kadar abu, titik lunak dan titik leleh, sedangkan angka penyabunan di atas standar SNI. Kadar kotoran dalam bongkahan kopal memenuhi standar SNI dan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan kopal dalam bentuk bubuk. 2. Tanaman damar di TNMH Resort Kawah Ratu selain memiliki manfaat dari segi ekologi juga memiliki manfaat ekonomi dan sosial budaya yang cukup besar. Dari aspek ekonomi, merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Damar/ Gum damar (copal) menyumbang 63,08% dari total pendapatan rumah tangga petani penyadap. Perkiraan potensi ekonomi damar/gum damar (copal) di Resort Kawah Ratu adalah sekitar Rp 596.920.000/bulan.	
189	Fandri Sofiana Fastanti, dkk;2020;Jurnal	A Preliminary Study of Lichen Diversity In Gunung Halimun Salak National Park	Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman lichen yang ditemukan sebanyak 30 jenis. Jenis terbanyak berasal dari suku Graphidaceae. Lichen yang ditemukan di TNGHS didominasi oleh lichen bertalus crustose dan tumbuh epifit pada ranting pohon.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
190	Rindita, dkk;2020;Jurnal	Exploration, phenolic content determination, and antioxidant activity of dominant pteridophytes in Gunung Malang Village, Mount Halimun Salak National Park, Indonesia	In conclusion, this research shows that all ferns tested gave significant antioxidant activity and was influenced by environmental factors. This research is also expected to be the initial data in the search for sources of compounds that are pharmacologically efficacious. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa semua yang diuji memberikan aktivitas antioksidan yang signifikan dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi data awal dalam pencarian sumber senyawa yang berkhasiat secara farmakologis	
191	Dee Dee Al Farishy;2021;Jurnal	Asteraceae Diversity and A New Record For Java at Citalahab Village, Gunung Halimun-Salak National Park	Numbers of Asteraceae family has been recorded with some potential ivansive threat in Gunung Halimun-Salak National Park. Regular population control and treatment are recommended in order to protect native species in the conservation area.	Regular population control and treatment are recommended in order to protect native species in the conservation area.
192	Dee Dee Al Farishy;2021;Jurnal	Asteraceae Diversity and A New Record For Java at Citalahab Village, Gunung Halimun-Salak National Park	In conclusion, numbers of Asteraceae family has been recorded with some potential ivansive threat in Gunung Halimun-Salak National Park. Regular population control and treatment are recommended in order to protect native species in the conservation area.	
193	Suciatmih,dkk;2002;Jurnal	Arbuscular Mychorrhizal Fungi At Different Ecosystems Of Gunung Halimun National Park	Seven species of arbuscular-mycorrhizal fungi were identified from three kinds o." ecosystems in Ciptarasa, GHNP. They were *Acaulospora foveata, A. morrowiae, Glomus cf. aggregatum, G. etunicatum, G. cf. glomerulatum, G. cf multisubtensum,* and *Scutellospora projecturata*.	
194	Hesti L Tata, dkk;2013;Jurnal	Diversity of Macro-Fungi from Halimun-Salak National Park and Its Prospect as Nutriceutical and Medicines	Polyporus dan Ganoderma merupakan genus cendawan tanah yang paling dominan di resor Cikaniki dan Citalahab. *Ganoderma sp.* yang teridentifikasi yaitu *G. lucidum* yang merupakan jamur obat. Analisis pirolisis menunjukkan dua galur *G. lucidum* memiliki senyawa bioaktif sebagai nutrisi dan obat. Empat spesies mengandung senyawa antibiotik dan antijamur. *Polyporus sp.* mengandung indole yang dapat melindungi sel tumor dan kanker.	Jamur obat dan jamur yang dapat dimakan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai industri rumah tangga. Masyarakat sekitar Taman Nasional Halimun Salak wajib mendapatkan pelatihan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang budidaya jamur serta pengolahan, pengemasan dan pemasarannya.
195	Nicho Nurdebyandaru;2013;Tesis	Endophytic Fungi of Wild Zingiberaceae From Mount Halimun Salak National Park	Sebelas isolat jamur endofit diperoleh dari tanaman sehat Zingiberaceae di TNGHS yaitu 9 isolat *Colletotrichum spp., Diaporthe infecunda* dan *Guignardia mangiferae*. Spesies Colletotrichum terdiri dari 1 isolat Colletotrichum kahawae sub sp. kahawae dari akar *Etlingera punicea*, salah satu isolat *Colletotrichum aff.* siamense dari akar *Alpinia malaccensis*, dan 7 isolat spesies Colletotrichum yang tidak teridentifikasi baik dari akar *Alpinia malaccensis*, pseudostem dan daun *Ammomum gracile*, dan dari akar *Zingiber odoriferum*. 1 isolat *Diaporthe infecunda* diisolasi dari batang semu *Alpinia malaccensis* dan 1 isolat *Guignardia mangiferae* dari batang semu *Zingiber odoriferum*. Seluruh temuan ini merupakan rekor baru pada jamur endofit dari spesies liar Zingiberaceae. Spesies Colletotrichum yang berbeda mungkin bersarang di satu tanaman individu.	
196	Ivan Permana Putra;2014;Tesis	Dampak Domestikasi Zingeberaceae di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Terhadap Keragaman Cendawan Endofitnya	Berdasarkan analisis cendawan yang dapat dikulturkan, domestikasi dua spesies Zingiberaceae di kawasan Taman Nasional Halimun Salak (*Alpinia malaccensis* dan *Horstendia conica*) mengindikasikan adanya dampak yang signifikan terhadap keragaman cendawan endofitnya. Tanaman domestikasi memiliki populasi endofit yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesies yang sama pada ekosistem alaminya. Zingiberaceae liar memiliki keragaman cendawan endofit yang lebih tinggi dibandingkan dengan Zingiberaceae yang telah didomestikasi. Beberapa spesies cendawan hanya ditemukan pada tanaman yang didomestikasi dan beberapa lainnya hilang sebagai akibat domestikasi. Namun, domestikasi Zingiberaceae di TNHS tidak mempengaruhi keberadaan endofit dominan, Co. boninense.	Penelitian lebih lanjut dengan penambahan jumlah sampel Zingiberaceae serta analisis molekuler cendawan endofit dengan tambahan gen diperlukan untuk mengkonfirmasi dampak domestikasi Zingiberaceae dan keragaman endofitnya.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
197	Ivan Permana Putra,dkk;2015;-Jurnal	Impact of Domestication on The Endophytic Fungal Diversity Associated With Wild Zingiberaceae at Mount Halimun Salak National Park	Studi saat ini mencatat spesies yang baru ditemukan pada tanaman domestikasi, sementara beberapa spesies lainnya mungkin hilang karena domestikasi. Secara umum, ada lima dari 14 spesies yang hilang dari ekosistem alam. Jumlah spesies baru terbanyak ditemukan pada HCD dan daun. Dampak antropogenik pada semua tingkat organisasi biologis dalam sistem pertanian yang terjadi melalui fragmentasi dan penyederhanaan ekosistem alam telah dibahas oleh Thrall et al. (2011). Meskipun indikasi kuat dampak pada kumpulan jamur endofit yang terkait dengan domestikasi dua tanaman zingiberaceous (AM dan HC) ditunjukkan dalam penelitian ini.	Studi lebih lanjut yang melibatkan pendekatan metagenomik dalam skala waktu diperlukan untuk mengkonfirmasi hasil saat ini. Lebih banyak sampel (pengambilan sampel berulang) harus dipertimbangkan untuk meminimalkan bias interpretasi, termasuk jumlah individu tanaman (sebagai replikasi). Teknik isolasi juga harus dipertimbangkan untuk mengurangi kesalahan selama analisis.
198	Ahmad NA,dkk;2017;Jurnal	Biodiversitas dan Potensi Jamur Basidomycota di Kawasan Kasepuhan Cisungsang, Kabupaten Lebak, Banten	Terdapat 34 spesies dari 21 marga, 16 keluarga, dan 5 bangsa jamur Basidiomycota yang ditemukan di sawah, pekarangan, kebun, talun atau dudukan, hutan di wilayah Kasepuhan Cisungsang, Banten. Jamur yang banyak ditemukan adalah anggota dari bangsa Agaricales (10 keluarga, 12 marga, 18 spesies) dan bangsa Aphylloporales (4 keluarga, 5 marga, dan 8 spesies). Jamur yang sedikit ditemukan adalah bangsa Auriculariales (1 keluarga, 1 marga, dan 4 spesies), bangsa Boletales (2 keluarga, 2 marga, dan 3 spesies) dan bangsa Dacrymycetales (1 keluarga, 1 marga, dan 1 spesies). Terdapat 7 marga jamur yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh warga di wilayah ini dalam kehidupan seharihari, yaitu Supa ceuli, Supa amis, Supa beas, Supa tiram, Supa jerami, Suung tunggal, dan Supa kebo. Data ini menunjukkan tingginya biodiversitas jamur Basidiomycota di daerah masyarakat adat wilayah ini dan potensinya sebagai sumber makanan.	
199	RS Hasibuan,dkk;2018;Jurnal	Distribution of Mushrooms in The Resort Cikaniki at Mount Halimun Salak National Park	Terdapat 50 jenis jamur, 35 jamur diketahui nama spesiesnya dan 15 jamur tidak diketahui nama. Jamur yang digunakan sebagai penghasil makanan antara lain *Agaricus bisporus, Auricularia polytricha, Agarics, Auricularia delicate,* dan T*ramella fuciformis, Bovista plumbea, Lycoperdon perlatum, Volvariella volvaceae*. Jamur yang digunakan sebagai obat antara lain *Ganoderma applanatum, Ganoderma lucidum, Laetiporus sp., Phellinus linteus, Agaricus repandum, Agaricus silvaticus, Clavaria sp,* dan *Coprinus sp*. Penyebaran Jamur di Resor Cikaniki dari ketinggian 900 sampai 1.500 m dpl. Dari dataran rendah zona hutan colline sampai zona hutan Montana. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jamur adalah cahaya, suhu, kelembaban, pH tanah, unsur hara dan kadar air.	
200	Endang Nugraheni;2002;Tesis	Sistem Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional	1. Proses pengembangan ekowisata di TNGH dilakukan dengan perencanaan yang didasarkan pada konsep ekowisata yang menggabungkan wisata alam, konservasi alam dan lingkungan, partisipasi aktif, serta manfaat bagi masyarakat lokal 2. Persepsi masyarakat merupakan indikator dampak sosial kegiatan ekowisata terhadap masyarakat lokal. Dampat sosial negatif ternyata dapat minimal dalam kasus TNGH, bahkan terlhat adanya dampat positif dari interaksi masyarakat dengan pengunjung. Persepsi masyarakat terhadap pengunjung dan kegiatan ekowisata secara umum baik dan mendukung 3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekowisata telah dimulai sejak perencanaan kegiatan melalui wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). 4. Atraksi ekowisata yang beragam, baik atraksi alam, flora, fauna, dan kebudayaan masyarakat lokal, merupakan daya tarik utama ekowisata. Dari tiga lokasi TNGH yang diteliti terdapat perbedaan yang menjadi kekhasan masing - masing dan menjadi daya terik bagi pengunjung. 5. Ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai juga merupakan daya tarik bagi pengunjung 6. Cara pemasaran yang tepat akan dapat menjangkau calon pengunjung dengan lebih efektif.	1. Praktek ekowisata berbasis masyarakat di TNGH masih perlu ditingkatkan lagi dengan cara mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dengan dukungan semua stakeholder. Kelemahan meliputi cara pengelolaan keuangan, cara melibatkan pengunjung lebih aktif dalam konservasi, dan penambahan pelatihan kepada pengelolaan pondok wisata. 2. Dalam pengembangan ekowisata di TNGH selanjutnya, keterlibatan masyarakat harus ditingkatkan terutama dalam pengambilan keputusan jangka panang. 3. Pengembangan fasilitas pendukung ekowisata perlu dilakukan secara merata di semua area dengan memperhatikan ciri khas dan kelebihan masing-masing lokasi. 4. Promosi dan pemasaran ekowisata perlu dibantu pihak lain.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
201	Sudhiani Pratiwi;2008;Tesis	Model Pengembangan Institusi Ekowisata Untuk Penyelesaian Konflik Di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	1. ada empat penyebab konflik di lokasi studi yaitu perbedaan sistem nilai yang berimplikasi pada ketidaksepakatan status lahan dan tata batas serta ketidakpastian akses. Penyebab konflik tersebut mengindikasikan bahwa konflik di lokasi studi adalah persoalan hak dan akses. 2. Berdasarkan pengamatan di empat lokasi studi, konflik hak dan akses baik keduanya menimbulkan tipe konflik yang sama yaitu sudah sampai pada tahap konflik terbuka. Hal ini disebabkan karena baik persoalan hak maupun akses mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal. 3. Mengacu pada teori kebutuhan manusia, teori hubungan komunikasi masyarakat, dan teori perbedaan sistem nilai, fenomena konflik di lokasi studi dipengaruhi oleh empat faktor. Keempat faktor tersebut yaitu hubungan para pihak yang tidak harmonis, perbedaan struktural dalam pengambilan keputusan, perbedaan informasi dan referensi yang digunakan serta perbedaan kepentingan antara individu versus organisasi. 4. Mengacu pada teori konflik yang dikembangkan oleh Randall Collins, secara empiris konflik di lokasi studi terjadi karena masing-masing pihak berupaya mengoptimalkan "status subyektifnya" sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan. Studi ini juga mendukung teori konflik oleh Lewis Coser yang menyebutkan bahwa konflik dapat mengaktifkan peran individu atau kelompok di masyarakat yang tadinya tidak berfungsi. 5. dari aspek institusi, penunjukan kawasan TNGH tidak ditentukan oleh persepsi kolektif sehingga kurang mendapat dukungan para pihak. Selain itu, peraturan perundangan penetapan taman nasional dan implementasinya tidak dapat menjamin kepastian hak dan akses bagi masyarakat lokal. Hal ini disebabkan diantaranya karena kendala pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundangan itu sendiri, keterbatasan sumberdaya serta persoalan administrasi dan birokrasi pembangunan. 6. mengacu pada konsep Institutionalist Tenure Security, konflik terjadi karena institusi yang ada gagal menyepakati aturan main mengenai status kepemilikan atas lahan (regime property) yang sesuai dengan masing-masing lokasi. Hal ini disebabkan oleh karena faktor pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik (kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi) dan hubungan antar aktor yang berkonflik. Dari enam faktor yang mempengaruhi relasi antar aktor, faktor sejarah kekuasaan, sistem nilai, dan rejim hukum yang berlaku (peraturan perundangan) merupakan faktor yang cukup berpengaruh. 7. secara empiris, ekowisata terbukti dapat berperan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik ketidakpastian akses. Peran ini belum optimal karena konsep ekowisata yang digunakan di lokasi studi belum memenuhi kriteria kecukupan ekowisata yang ideal. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh institusi ekowisata yang ada belum dapat mendukung pemenuhan kriteria ekowisata tersebut karena faktor kebijakan yang belum lengkap dan kapasitas stakeholder yang masih rendah. 8. pengembangan ekowisata dapat menjadi stimulan untuk penyelesaian konflik lainnya. Pentingnya kepastian status lahan dan tata batas untuk kejelasan manajemen pengelolaan dan keamanan investasi pengembangan ekowisata dapat mendorong penyelesaian konflik lahan dan tata batas.	1. Konflik perlu diselesaikan dengan membangun kepercayaan antar para pihak, meningkatkan komunikasi agar perbedaan persepsi dapat dikurangi, dan melakukan negosiasi dengan melibatkan mediator yang independen. 2. Penunjukkan taman nasional perlu ditetapkan berdasarkan persepsi kolektif para pihak dan proses penetapannya dilakukan sesuai dengan tahapan dalam peraturan perundangan. Dengan melibatkan secara aktif para pihak, terutama stakeholders utama dan kunci, mulai di tingkat lokal sampai nasional baik dalam penetapan dan pengelolaan taman nasional akan mendapat dukungan dari para pihak tersebut. 3. Melakukan evaluasi terhadap program pengembangan ekowisata yang sudah ada. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mungkin dapat menjadi penghambat atau pendukung dalam proses pengembangan ekowisata selanjutnya. 4. Menambahkan ketersediaan dan kesiapan institusi (organisasi dan aturan main) sebagai salah satu kriteria kecukupan ekowisata. 5. Studi ini mengindikasikan perlunya peningkatkan peran serta stakeholder yang lebih luas untuk membantu pengembangan ekowisata di lokasi studi. Peran stakeholder yang diharapkan terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana, promosi, manajemen pengelolaan, fasilitasi konflik dan peningkatan kapasitas pelaku wisata. Peningkatan peran ini perlu didukung dengan membuat pengaturan ruang untuk kejelasan manajemen pengelolaan, optimalisasi pembagian peran dan kewenangan untuk para pihak yang terlibat. 6. Kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi para pihak dalam merespon persoalan di lapangan mengindikasikan perlunya penguatan organisasi dengan membentuk komisi / forum untuk komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian konflik baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. 7. Adanya perbedaan karakteristik budaya di masyarakat sekitar kawasan TNGH mengindikasikan perlunya membuat kesepakatan-kesepakatan di tingkat lokal untuk merealisasikan program pengembangan ekowisata yang sesuai dengan karakteristik budaya tersebut. 8. Penelitian lanjutan yang diperlukan diantaranya mengenai bentuk aturan main dan organisasi (institusi) yang dapat menjembatani para pihak di tingkat lokal dengan para pihak di tingkat nasional. Topik penelitian lainnya yang direkomendasikan ialah pengaruh faktor budaya, dan dampak produk ekowisata dalam mengubah persepsi dan perilaku pengunjung maupun masyarakat terhadap program konservasi di TNGH. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan fondasi dalam mendukung pengembangan ekowisata selanjutnya serta memberikan implikasi yang positif terhadap penyelesaian konflik dan program konservasi di TNGH.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
202	Miwa Kataoka;2009;Disertasi	Bird Respone to the Human Impact in and around Gunung Halimun-Salak National Park, West Java, Indonesia : Implications for forest Management	1. Burung digunakan sebagai indikator untuk mengukur keanekaragaman dan kelangsungan ekosistem hutan. Berdasarkan hasil survei lapangan di TNGHS, Penyebab hilangnya kesinambungan ekologi adalah penyederhanaan struktur bentang alam akibat pola penggunaan lahan oleh masyarakat di desa tersebut, terlihat jelas bahwa kelestarian ekologi tetap terjaga tanpa adanya konversi. Peranan lanskap pedesaan seperti sawah dan perkebunan dominan digunakan sebagai habitat burung, kombinasi dari habitat mikro yang diciptakan sebagai hasil dari aktivitas manusia dan keberadaan lingkungan sekitar digunakan oleh burung. Kontinuitas sumber daya yang tersedia untuk burung disebabkan oleh beragam spesies pohon dan struktur vegetasi, sehingga kontinuitas struktural dan temporal komponen lanskap sangat penting untuk fungsi ekologi 2. Untuk memperjelas pembagian ekosistem hutan dilakukan survei di perkebunan the sebagai bentuk penggunaan lahan intensif yang berbatasan dengan hutan. Meskipun ada pembagian ekologis yang jelas antara lingkungan tunggal perkebunan the dan hutan, perbatasan antara hutan sekunder dan semak belukar penting sebagai zona penyangga bagi banyak burung. Sebagian besar burung menggunakan pohon yang ditanami sebagai pohon peneduh di perkebunan teh saat bergerak di antara hutan. Keberadaan hutan sekunder dan semak belukar serta pohon peneduh sangat penting untuk dijaga.	Pemanfaatan dan pemeliharaan hutan sekunder oleh penduduk secara aktif sangat penting, menjaga dan mengelola sumber daya secara fleksibel seperti jenis pohon kayu dan menurunkan pertumbuhan horizontal di lahan milik warga untuk menaga kelestarian ekologi.
203	Nurul Hidayati;2009;Jurnal	Mercury and Cyanide Contaminations in Gold Mine Environment and Possible Solution of Cleaning Up by Using Phytoextraction	This study shows that plants which accumulate cyanide above 20 ppm are *Centrocema pubescens, Cleome aspera, Jussiena peruviana, Mucuna pruriens, Solanum torvum, Ipomoea sp., Mikania cordata, Cromolaena odorata, Ludwigia peruviana, Cyperus monocephala, Paspalum conjugatum.* Plants which accumulate mercury above 20 ppm are *Paspalum conjugatum, Ipomoea batatas, Commelina nudiflora, Digitaria radicosa* (Presl) Miq, *Lindernia crustacean* (L.) F, *Zingiber sp.* Plant with high tolerance and high biomass production (rapid growth): *Saccharum spontaneum.* Plants that are dominant in the sites: *Mimosa pigra, Crotalaria juncea, Calopogonium mucunoides,Saccharum spontaneum* As we know that identifying or engineering a suitable plant species is only one step in developing a phytoextraction strategy for contaminaned site. Other important factors that may limit the potential success of phytoextraction are contaminant bioavailability and the poor understanding of molecular mechanism involved in metal hyperaccumulation. A better understanding of those factors may help in developing of superior plants for phytoextraction of pullutant metals. A series of research on this field is therefore required It can be concluded that most of the rivers and other aquatic environments under study were affected by gold mine activities. Some plant species growing on the contaminated aquatic environments were found to be potentially effective in accumulating heavy metals in their roots and above ground portions. These plants could be utilized as accumulators forcleaning up contaminated soils and waters.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
204	Afini Juwitasari;2009;Skripsi	Pengembangan Cluster Wisata Alam Kabupaten Bogor Menggunakan Sistem Informasi Geografis	Wisata alam di Kabupaten Bogor dapat dikelompokkan menjadi beberapa cluster wisata alam menggunakan sistem informasi geografis. Berdasarkan data dari lokasi penelitian, didapatkan pengelompokkan (cluster) wisata alam/ ekowisata yang terdiri dari 3 cluster yaitu berdasarkan ketinggian, variasi topografi, dan naturalness (kealamian). Wisata alam yang termasuk kedalam cluster variasi topografi monoton adalah Goa Langkob dan dan Goa Gudawang. Sedangkan yang termasuk kedalam variasi topografi variatif adalah Taman Wisata Alam Gunung Pancar, Wana Wisata Curug Cilember, Taman Wisata Alam Telaga Warna, dan Kawah Ratu. Hal tersebut didapat dari adanya variasi dalam topografi, kelas miring (slope) dan curah hujan. Berdasarkan ketinggian lokasi wisata alam / ekowisata dapat diklasifikasikan kedalam dua cluster, yaitu wisata pegunungan dan wisata non pegunungan. Yang termasuk Wisata pegunungan adalah Kawah Ratu – Gunung Salak Endah . Sedangkan yang diklasifikasikan kedalam wisata non pegunungan adalah Goa Goa Langkob, Goa Gudawang sebagai kelas dataran rendah. TWA. Telaga Warna, TWA. Gunung Pancar dan PPKAB digolongkan kepada cluster non pegunungan karena berada di kelas perbukitan. Sifat alamiah suatu obyek wisata alam dapat diklasifikasikan kedalam tiga cluster, yaitu lebih alami dan dominan campur tangan manusia. Cluster wisata yang lebih alami dapat ditemukan di kawasan Kawah Ratu dan Goa Langkob, karena didominasi oleh hutan dan sarana dan prasarana yang masih sederhana. Taman Wisata Alam Gunung Pancar, Wana Wisata Curug Cilember, Taman Wisata Alam Telaga Warna dan Goa Gudawang termasuk kedalam cluster yang lebih didominasi oleh campur tangan manusia, disebabkan oleh berkurangnya estetika dan kealamian kawasan karena telah disediakan fasilitas – fasilitas yang dibuat oleh pengelola demi memberikan kepuasan pengunjung.	Dengan adanya pengelompokan wisata alam, diharapkan pengunjung dapat memilih jenis wisata yang sesuai dengan minat mereka dan diharapkan dapat menjaga lingkungan sekitar kawasan hutan.
205	Eva Rachmawati;2010;Tesis	Sistem Sosial Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Gunung Salak Endah	1. Masyarakat yang terlibat dalam pengembanga wisata alam di GSE hanya 0.4% dan 6.3 % dari jumlah masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan adanya dominasi oleh kelompok masyarakat tertentu dan mekanisme pelibatannya yang masih didasarkan pada hubungan dekat (saudara). 2. Peran yang dilaksanakan oleh suatu pihak belum sesuai dengan status yang dimiliki sehingga kelengkapan struktur sosial masih kurang. Selain itu norma yang berlaku belum dapat mengatur perilaku pada stakeholder. Hal tersebut menyebabkan struktur sosial pengembangan wisata alam di GSE tidak berjalan dengan baik. 3. Interaksi antar individu di Desa Gunung Sari lebih bervariasi mulai dari yang bersifat primer positif sampai sekunder negatif dibandingkan interaksi antar individu yang terjadi di Desa Gunung Bunder 2 yaitu interaksi primer positif dikarenakan lebih beragamnya kondisi latar belakang masyarakat. 4. Interaksi yang terjadi antar individu dengan kelompok di kedua desa umumnya bersifat primer positif 5. Interaksi yang teradi antar kelompok lebih pada kepentingan ekonomi jangka pendek dari kegiatan wisata alam dari pada pengembangan jangka panjang 6. Unsur-unsur sistem sosial yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan wisata alam di kawasan GSE adalah unsur perasaan, kekuasaan dan wewenang, status dan peran, norma dan sanksi sosial.	1. Dilakukan upaya untuk menyamakan persepsi para pihak terkait dengan pengembangan wisata alam dan kemudian menyusun norma - norma dan mekanisme yang didasarkan pada harapan bersama para pihak. 2. Meningkatkan pengetahuan dan persepsi para pihak terkait status dan peran yang mereka miliki dalam pengembangan wisata alam sehingga para pihak terebut melakukan peran sesuai dengan statusnya.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
206	Muhammad Mansur;2012;-Jurnal	Laju Penyerapan CO2 Pada Kantong Semar (*Nepenthes gymnamphora Nees*) Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat	Laju penyerapan CO2 pada Nepenthes gymnamphora di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak tercatat rata-rata 11,07 µmol/m2/s. Laju penyerapan CO2 optimum terjadi pada jam 10:00 pagi dan terendah pada jam 14:00 siang. Pada umumnya daun tua memiliki kemampuan penyerapan gas karbondioksida (CO2), transpirasi dan kandungan klorofil lebih tinggi dari pada daun muda. Melalui proses fotosintesis, Nepenthes gymnamphora sebagai tumbuhan bawah di lantai hutan memiliki kontribusi di dalam mengurangi konsentrasi gas karbondioksida (CO2) di udara yang merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global.	
207	Muhammad Mansur;2012;-Jurnal	Potensi Serapan Karbondioksida (CO2) Pada Beberapa Jenis Tumbuhan Lantai Hutan Dari Suku Araceae Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat	Gunung Halimun-Salak, Resort Cidahu ditemukan ada lima jenis tumbuhan lantai hutan dari Suku Araceae, yaitu *Schismatoglottis calyptrata, Schismatoglottis rupestris, Alocasia longiloba, Arisaema filiforme* dan *Colocasia esculenta. Colocasia esculenta* memiliki kemampuan penyerapan CO2 lebih tinggi (14,288 µmol/m2/s) dari pada A*risaema filiforme* (8,614 µmol/m2/s), *Alocasia longiloba* (7,599 µmol/m2/s), *Schismatoglottis rupestris* (7,078 µmol/m2/s) dan *Schismatoglottis calyptrata* (5,260 µmol/m2/s). Pada umumnya daun tua dari seluruh jenis yang diukur, memiliki kandungan klorofil dan kemampuan penyerapan CO2 lebih tinggi dari pada daun muda. Tingginya kandungan klorofil daun di antara jenis tumbuhan tidak selalu diikuti dengan tingginya penyerapan CO2. Namun di dalam satu jenis, tingginya klorofil daun akan diikuti pula dengan tingginya penyerapan CO2 di udara.	
208	Caroline Pustpita Dewi;2012;Skripsi	Kegiatan Proses Perancangan Lanskap Untuk Pengembangan Wisata Alam Di Pt Idea	Berdasarkan hasil kegiatan magang selama 3,5 bulan di PT IdeA, mahasiswa magang mendapat tambahan wawasan dan pengetahuan tahap kegiatan perancangan lanskap sampai pada tahap pengembangan desain. Wawasan dan pengetahuan yang diperoleh antara lain mempelajari desain arsitektural bagi pengembangan fasilitas untuk wisata alam, memahami alat dan bahan seperti pengambilan data dengan GPS kemudian diolah dengan sistem komputerisasi, serta mengasah kemampuan teknik hand drawing dengan marker, pensil, dan pensil warna. Selain itu, wawasan kemampuan berkomunikasi dengan klien dan rekan kerja juga diperoleh. Selama mengikuti kegiatan proses perancangan pengembangan wisata alam di PT IdeA mahasiswa meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi dan kendala suatu tapak, khususnya dalam pengembangan wisata alam di lanskap alami. Cara pemecahan masalah dalam pengembangan lanskap yang dipelajari terkait dengan melakukan studi pendekatan prinsip konservasi, prinsip eco-design, prinsip ekowisata, dan pembelajaran regulasi atau peraturan mengenai penataan lanskap alami. Mahasiswa magang juga mengetahui bahwa PT IdeA sebagai konsultan arsitektur lanskap dalam penyediaan jasa pengembangan wisata alam di kawasan konservasi masih memiliki beberapa kekurangan dan ketidaksesuaian dengan melewatkan tahapan standar dalam proses perancangan lanskap menurut Booth (1983), yaitu seperti pembuatan produk pada tahap desain konsep dalam proyek di Resort PTNW Kawah Ratu, Hutan Diklat Jampang Tengah, dan Hutan Diklat Rumpin. Memperhatikan bahwa pentingnya presentasi produk berupa siteplan dapat membantu klien untuk memahami penataan ruang dan pengembangan fasilitas kawasan seharusnya menjadi pertimbangan utama perusahaan dalam menyediakan produk tersebut.	Sistem manajemen dalam PT IdeA dapat terus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Bentuk manajemen tersebut seperti sistem komunikasi yang sudah ada dalam perusahaan sebaiknya tetap dipertahankan untuk menjaga hubungan internal dan hubungan dengan klien, bahkan pihak-pihak yang berkaitan dengan arsitektur lanskap untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam proyek dan mengembangkan jaringan kerja. Sehingga kepercayaan klien dan kualitas produk dapat terus meningkat. Eksistensi perusahaan diharapkan dapat terus dipertahankan dengan cara tersebut. Dalam pengerjaan proyek ini tidak dibuat siteplan detail secarakeseluruhan. Hal ini perlu dievaluasi oleh perusahaan, karena pembuatan siteplan secara detail keseluruhan sangat diperlukan untuk membantu klien dalam memahami desain dari tapak yang dibuat perusahaan. Selain itu perhatian terhadap kesesuaian dengan budaya dan standar penyediaan fasilitas di sekitar kawasan juga perlu menjadi perhatian sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Fasilitas studio berupa komputer perlu ditambahkan sehingga dapat menambah produktivitas kerja pegawai dalam pengerjaan proyek. Fasilitas lainnya berupa ruang kerja studio perlu diperluas untuk menambah kenyamanan dalam bekerja.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
			Penerapan pendekatan dan metode yang dilakukan pada proses perancangan untuk pengembangan wisata alam di lanskap alami dengan perhatian terhadap kondisi eksisting dan regulasi, serta penerapan prinsip eco-design sehingga menciptakan lanskap berkelanjutan yang baik secara 100 fungsional dan estetika telah dilakukan dengan baik. Namun, masih memiliki kekurangan dalam perhatian penyediaan fasilitas sesuai dengan budaya masyarakat di sekitar kawasan. Pengerjaan proyek perancangan lanskap tersebut dilakukan dengan teknik hand drawing dan komputerisasi yang didukung dengan alat dan bahan yang berfungsi dengan baik. Namun, kuantitas dari alat pendukung berupa komputer masih kurang untuk membantu meningkatkan produktivitas pengerjaan proyek. Beberapa proyek harus menyesuaikan dengan kondisi proyek yang berkaitan dengan deadline proyek yang singkat dan kondisi tapak. Secara garis besar, kegiatan magang sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya pengetahuan dan informasi baru yang tidak didapat sebelumnya dalam bangku perkuliahan.	
209	Yuriko Kono;2012;Jurnal	Using native epiphytic ferns to estimate the atmospheric mercury levels in a small-scale gold mining area of West Java, Indonesia	Atmospheric Hg levels near mercury-polluted ASGM sites in Indonesia can be estimated using the native epiphytic fern Asplenium nidus complex as a biomonitor. A. nidus is a practical biomonitor of Hg pollution because it is common in the tropics of the Old World and can easily be collected in natural forests and village areas. The results show that a significant amount of atmospheric Hg can leach at least 1 km away from the villages where ASGM operations are conducted. Biomonitoring can measure the average concentration of atmospheric Hg, even if the mining processes and/ or weather conditions cause short-term fluctuations in the atmospheric Hg concentration.	
210	Rully Dora Carolyn,dkk;2013;Jurnal	Analisis Degradasi Untuk Penyusunan Arahan Strategi Pengendaliannya Di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak Provinsi Jawa Barat	Pada kurun waktu antara tahun 2003 hingga 2007 terjadi degradasi dengan luas total sebesar 5.005,71 ha, yang terbagi ke dalam tingkat degradasi ringan seluas 2.764,80 ha, selanjutnya deforestasi sebesar 1.493,46 ha, dan degradasi berat sebesar 747,45 ha. Sedangkan interpretasi terhadap perubahan kelas kerapatan antara tahun 2003 hingga 2011 menunjukkan telah terjadinya degradasi ringan sebesar 6.197,13 ha, degradasi berat sebesar 1.200,15 ha, dan deforestasi sebesar 189,9 ha. Namun interpretasi antara tahun 2003 hingga 2011 ini tidak cukup baik karena tutupan awan pada sebagian besar wilayah penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi adalah laju pertumbuhan penduduk, laju perubahan luas lahan non pertanian, jarak desa dengan kecamatan, dan persentase perubahan jumlah keluarga pertanian. Strategi yang paling penting untuk pengendalian degradasi adalah strategi penyelarasan RTRWK Bogor dengan Surat Penunjukan Kawasan TNGHS. Langkah awal agar strategi berjalan efektif maka sosialisasi kawasan merupakan kondisi pemungkin yang harus dilakukan sehingga pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor sosial yang telah disebut di atas dapat dikendalikan dan tidak memberikan ancaman yang berarti terhadap kawasan TNGHS.	1. Terkait degradasi kawasan, perlu dilakukan monitoring terhadap indikator lain seperti sediaan air dan kondisi kualitas tanah hutan 2. Perlu dilakukan kajian terhadap dampak dinamika regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan kawasan TNGHS dan wilayah Kabupaten Bogor terhadap kondisi ekosistem TNGHS. 3. Pemantapan kawasan TNGHS harus segera dilakukan untuk meminimalisir konflik akibat ketidakjelasan sistem tenurial. Dalam prosesnya, koordinasi dan sosialisasi dengan para pihak perlu ditingkatkan.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
211	Rully Dora Carolyn;2013;Tesis	Strategi Pengendalian Degradasi Hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Penutupan tajuk kawasan TNGHS mengalami perubahan kerapatan sejak tahun 2003 hingga 2011. Berdasarkan hasil analisis terhadap perubahan kelas kerapatan hutan TNGHS tersebut disimpulkan bahwa antara tahun 2003 – 2007 telah terjadi degradasi dengan luas total sebesar 5005,71 ha, yang terbagi ke dalam 3 kelas degradasi. Degradasi hutan dengan luasan paling besar adalah tingkat degradasi ringan seluas 2764,80 ha, selanjutnya deforestasi sebesar 1493,46 ha, dan degradasi berat sebesar 747,45 ha. Sedangkan interpretasi terhadap perubahan kelas kerapatan antara tahun 2003 – 2011 menunjukan telah terjadinya degradasi ringan sebesar 6197,13 ha, degradasi berat sebesar 1200,15 ha, dan deforestasi sebesar 189,9 ha. Namun interpretasi antara tahun 2003 – 2011 ini tidak cukup baik karena tutupan awan pada sebagian besar wilayah penelitian. 2. Degradasi hutan TNGHS terjadi dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor. Berdasarkan teknik regresi diketahui bahwa faktor laju pertumbuhan penduduk, laju perubahan luas lahan non pertanian, jarak desa dengan kecamatan, dan persentase perubahan jumlah keluarga pertanian merupakan faktor yang memberikan pengaruh terhadap luas degradasi hutan. 3. Memperhatikan pengaruh faktor – faktor sosial tersebut terhadap degradasi, maka hasil analisis AHP menyimpulkan bahwa strategi yang paling penting untuk dijadikan langkah awal pengendalian degradasi adalah strategi penyelarasan RTRWK Bogor dengan Surat Penunjukan kawasan TNGHS. Untuk itu dibutuhkan komitmen Kementerian Kehutanan dalam implementasi regulasi, yang dapat diwujudkan melalui pengukuhan kawasan TNGHS. Langkah awal yang penting agar strategi berjalan efektif maka sosialisasi kawasan merupakan kondisi pemungkin yang harus dilakukan sehingga pengaruh yang diberikan oleh faktor – faktor sosial yang telah disebut di atas dapat dikendalikan dan tidak memberikan ancaman yang berarti terhadap kawasan TNGHS.	Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut : a. Degradasi hutan tidak hanya dapat dilihat dari perubahan penutupan tajuk, karenanya perlu dilakukan monitoring terhadap indikator lain seperti sediaan karbon, sediaan air, dan kondisi kualitas tanah hutan. b. Pemantapan kawasan TNGHS harus segera dilakukan untuk meminimalisir konflik akibat ketidakjelasan sistem tenurial. Dalam prosesnya, koordinasi dan sosialisasi dengan para pihak perlu ditingkatkan.
212	Arief Juniarto;2013;Skripsi	Pengelolaan Kawasan Hutan (Kasus Kawasan Hutan Sekitar Desa Gunung Sari di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor)	1. Tingkat persepsi masyarakat Desa Gunung Sari terhadap keberadaan hutan tergolong baik. Persepsi ini ditimbulkan arus informasi dan pengetahuan yang diterima masyarakat melalui program-program pelestarian hutan. Namun, persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan hutan sebagai sumber kayu dan tambahan pendapatan rumah tangga masih rendah. Hal ini dikarenakan kondisi hutan yang sudah menjadi kawasan Taman Nasional sehingga pemanfaatan kayu sesuai aturan dan sanksi atas penebangan. Selanjutnya, motivasi masyarakat ikut dalam mengelola hutan terbesar berdasar teori Maslow (1943) adalah kebutuhan rasa aman (safety needs). Hal ini dikarenakan masyarakat menginginkan kondisi Desa Gunung Sari tetap sejuk dan segar serta perlindungan keadilan dari pembongkaran villa-villa yang berdiri di Desa Gunung Sari. Motivasi berdasar teori Gerungan (2004) terbesar adalah motif bergabung. Hal ini ditimbulkan karena bergabung dalam kelompok pemerhati pariwisata. 2. Perilaku masyarakat dalam memanfaatkan kayu sebesar 27,27% dan sebesar 72,73% tidak menggunakan kayu. Kayu yang dimanfaatkan sebagai kayu bakar karena kebutuhan bahan bakar untuk rumah tangga sudah berganti menjadi bahan bakar gas. Selanjutnya, seluruh masyarakat menggantungkan air dari kawasan hutan sebagai kebutuhan sehari-hari. Sedangkan, perilaku masyarakat dalam menjaga nilai fungsi ekologis hutan khususnya turut serta menjaga keindahan dan kesejukan kawasan hutan sebesar 69,70%. Selain itu, perilaku masyarakat yang turut serta untuk menjaga hutan sebagai pengendali banjir dan erosi hanya sebesar 63,64%. Perilaku yang ditunjukkan berupa penanaman tanaman kehutanan dan gotong royong warga dalam kerja bakti lingkungan.	1. Saat ini orientasi lapangan kerja masyarakat masih sekitar usaha warung makan dan minum. Oleh karena itu perlu diarahkan pada usaha-usaha produktif berkaitan barang dan jasa dari hutan, serta Perlunya meningkatkan pemberdayaan masyarakat bersama pemerintah desa dan Taman Nasional dalam program-program kerja kelestarian hutan yang berkelanjutan dan berkala. 2. Perlu penelitian lebih lanjut variabel perilaku budaya masyarakat setempat dalam konteks kearifan lokal.
213	Takashi Tomiyasu;2013;Jurnal	The distribution of mercury around the small-scale gold mining area along the Cikaniki river, Bogor, Indonesia	Highly contaminated mining waste was transported by river water and deposited along the Cikaniki River. The mercury concentration of the river water near the mining site was 9 times higher than the environmental standard in Indonesia. A higher mercury concentration was also observed in the forest soil, where it was approximately 20 times higher than the maximum permitted level of mercury in the soils of Indonesia. Organic matter at the soil surface retained the mercury deposited from the atmosphere; thus, the mercury at the surface layer cannot move toward a deeper layer. The mercury can elute into the runoff water and become a source for water systems. Higher mercury concentrations found in the fish farm and paddy fields are a matter of concern for the health of those living around the village. Under anoxic conditions, mercury can easily be converted into methyl mercury by microbiological activity. The impact of mercury released from ASGM on biological systems can be examined by tracing the concentrations and chemical forms of mercury at eachdispersion step.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
214	Yelin Adalina,dkk;2014;Jurnal	Harvesting of Non-Timber Forest Products by The Local Communities in Mount Halimun-Salak National Park, West Java, Indonesia	1. Kondisi hutan damar dan pinus di kawasan TNGHS masih baik dengan tingkat kerapatan pohon yang tinggi, namun memiliki keanekaragaman jenis yang rendah. Pinus (*P. merkussi*), karet (*H. brasiliansis*) dan damar (*A. dammara*) yang ada di TNGHS berperan tidak hanya dalam aspek ekologi, tetapi juga dalam aspek ekonomi dan sosial. 2. Dari aspek ekologi, ekosistem hutan memiliki fungsi dan peran dalam mendukung kelestarian ekosistem. Dari aspek ekonomi, dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat hutan. Dari aspek sosial, masyarakat dilibatkan dalam pemanfaatan sumber daya hutan. 3. Kontribusi pendapatan dari penyadapan karet lebih tinggi dari nira damar dan pinus terhadap total pendapatan rumah tangga petani.	Pemanenan getah pinus, karet dan damar di TNHS dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan
215	Ruddy Polosakan,dkk;2014;Jurnal	Estimasi Biomasa dan Karbon Tersimpan Pada Pinus merkusii Jungh. & de Vriese di Hutan Pinus Gn Bunder, TN. Gn. Halimun Salak	Di kawasan hutan pinus Gunung Bunder - TNGHS, dimana kerapatan dan total luas bidang dasar pohon pinus berumur 17 tahun lebih besar dibandingkan dengan yang berumur 30 tahun. Estimasi biomasa dan karbon tersimpan dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan alometrik, dan biomasa, C-tersimpan dan sekuestrasi karbon dioksida (CO2) pada tegakan pinus berumur 30 tahun lebih besar dibandingkan dengan yang berumur 17 tahun, baik per satuan luas maupun per individu pohon. Penyerapan CO2 untuk Jasling & Mineralnya mencapai US$ 1.847,09– 2.054,22.	
216	Virni Budi Arifanti,dkk;2014;Jurnal	Potensi Cadangan Karbon Tegakan Hutan Sub Montana Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Persamaan alometrik yang dikembangkan oleh Chave et. al (2005) dapat digunakan untuk menduga biomassa atas permukaan di hutan primer di TNGHS. 2. Hutan primer dengan kerapatan tajuk tinggi memiliki biomassa dan cadangan karbon tegakan total yang lebih tinggi dibandingkan dengan hutan primer dengan kerapatan tajuk rendah. 3. TNGHS memiliki potensi yang sangat besar sebagai penyerapan karbon tegakan di atas permukaan sebesar 139,326 tonC/ha, tumbuhan bawah sebesar 1,971 tonC/ha dan nekromas sebesar 5,77 tonC/ha. 4. Biomassa dan cadangan karbon tegakan rata-rata di hutan primer di TNGHS secara berturut-turut adalah sebesar 364,503 tonC/ha dan 185,177 tonC/ha. 5. Strategi pengelolaan cadangan karbon perlu memperthatikan berbagai faktor : 1) Penetapan zonasi pengelolaan kawasan TNGHS, 2) adanya kerjasama dengan berbagai sektor untuk mencegah terjadinya perambahan hutan, 3) adanya insentif dari pemerintah dan instansi terkait untuk pemeberdayaan masyarakat di sekitar hutan, 4) dilakukannya restorasi dan rehabilitasi kawasan terdegradasi dalam TNGHS dan, 5) diterbitkannya regulasi yang menjamin kepastian kawasan TNGHS.	1. Perlu dilakukan stratifikasi lapangan yang lebih detil untuk melakukan sampling untuk seluruh tipe tutupan lahan yang dada di TNGHS dan perlu dibangun persamaan alometrik biomassa yang khusus untuk TNGHS dengan metode non-destruktif. 2. Perlu dibangun petak ukur permanen dan database untuk pengukuran karbon di TNGHS agar monitoring potensi karbon dapat dilakukan secara periodik. 3. Perlu dirumuskan model kelembagaan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan Monitoring, Reporting, dan Verification (MRV) di tingkat tapak TNGHS agar cadangan karbon yang ada bisa termonitor baik secara berkala
217	Iffah Rahmaniyah;2014;skripsi	Perencanaan Lanskap Agrowisata Dusun Muara Satu Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor	Dusun Muara Satu Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan Agrowisata. Potensi utama pengembangan kawasan berupa lahan pertanian dan kondisi masyarakaT di sekitar kawasan yang berorientasi pada kegiatan pertanian, didukung juga dengan adanya upacara adat "seren taun". Pengembangan lanskap wisata pertanian di Dusun Muara Satu dibagi dalam zona integratif aktifitas wisata berdasarkan tipe aktifitas dan pemanfaatan. Zona tersebut meliputi zona intensif, non intensif dan konservasi dan dibagi lagi menjadi ruang agrowisata pendukung sebesar 0,47 Ha, ruang agrowisata utama 3,58 Ha, ruang konservasi 5,4 Ha, ruang masyarkat 1,6 Ha dan ruang penyangga dan hutan 7,6 Ha. Pola sirkulasi dibagi menjadi sirkulasi primer berbentuk linear untuk kendaraan bermotor dan sirkulasi sekunder berbentuk loop untuk pejalan kaki. Tata hijau yang direncanakan dibagi fungsinya yaitu fungsi budidaya, konservasi atau penyangga, dan fungsi estetik. Pengembangan aktivitas wisata di Dusun Muara Satu memadukan antara kegiatan wisata, budidaya dan pendidikan. Konsep perencanaan yaituwisata budaya pertanian masyarakat lokal dengan mempertahankan kondisi alam melalui konservasi yang diikuti oleh aktivitas wisata. Kegiatan wisata merupakan fungsi pendukung yang menguatkan fungsi kawasan sebagai lahan pertanian dan pusat kawasan pariwisata dengan memperhitungkan daya dukung kawasan agar dapat terjaga dan tidak merusak lingkungan.	Perencanaan kawasan Dusun Muara Satu Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak serta melibatkan masyarakat setempat. Salah satu usaha untuk menjaga keberlanjutan wisata pada kawasan adalah melalui pengusahaan pertanian dan perlunya melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan dan penataan kawasan wisata, berharap agar masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dan pengontrol lingkungan untuk menjaga keberlanjutan kawasan wisata tetap terjaga.Program pengembangan, pengelolaan dan promosi yang baik akan menambah keberlanjutan kegiatan ini. Pembangunan infrastruktur perlu dilakukan untuk menunjang kegiatan wisata.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
218	Meti Ekayani,dkk;2014;Jurnal	Wisata Alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak: Solusi Kepentingan Ekologi dan Ekonomi	Pembayaran jasa lingkungan wisata alam di TNGHS dapat sebagai alternatif solusi benturan kepentingan antara konservasi dan pemenuhan ekonomi masyarakat, sepanjang wisata alam dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kondisi ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut: 1) Jasa lingkungan berupa wisata alam di TNGHS memiliki nilai ekonomi tinggi, artinya TNGHS memiliki arti penting sebagai penyedia jasa wisata alam yang mengandalkan kelestarian dan keindahan alam. Oleh karena itu sumber daya alam tersebut harus dijaga karena tingginya nilai ekonomi wisata alam TNGHS sangat bergantung dari terjaganya kelestarian alam; 2) Tarif tiket wisata sesuai kesediaan membayar pengunjung (rataan WTP) menunjukkan bahwa pengunjung masih bersedia membayar lebih dari tarif yang berlaku. Nilai surplus konsumen menunjukkan wisatawan mendapat kepuasan lebih dari harga yang dibayarkan. Hal ini menunjukkan adanya nilai ekonomi potensial yang masih dapat direalisasikan sebagai tambahan manfaat bagi masyarakat dan TNGHS sebagai penyedia jasa wisata; 3) Wisata alam TNGHS memberikan kontribusi penting bagi konservasi berupa dana konservasi dan pemenuhan ekonomi masyarakat berupa penyerapan tenaga kerja dan dampak ekonomi bagi perekonomian lokal. Kontribusi ini dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan surplus konsumen, salah satunya dengan menaikkan tarif tiket dan memaksimalkan belanja pengunjung; 4) Masyarakat akan turut serta menjaga kelestarian kawasan konservasi jika mendapat manfaat ekonomi dari kegiatan wisata alam. Kelestarian kawasan diperlukan untuk kelangsungan wisata alam, yang artinya adalah kelangsungan pendapatan masyarakat itu sendiri.	
219	Anjar Hafidhun;2015;Skripsi	Karakteristik Mineralogi Andisol Di Wilayah Gunung Bunder Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor	1. Mineral yang banyak ditemukan disetiap horison pada profil A dan B berdasarkan susunan fraksi pasir total adalah kuarsa jernih, diikuti plagioklas, hipersten, augit, lapukan, lapukan gelas volkan, gelas volkan, hornblende dan konkresi besi. Berdasarkan susunan mineralnya kedua profil memiliki bahan induk andesitik berasosiasi hipertsten. 2. Pelarutan selektif menunjukkan bentuk amorf sebagai oksida yang dominan. 3. Berdasarkan susunan mineral dan analisis pelarutan selektif horison BC2b pada profil A berasal dari bahan induk yang berbeda.	
220	Hefni Effendi;2015;Jurnal	Water quality status of Ciambulawung River, Banten Province, based on pollution index and NSF-WQI	Water quality conditions in Ciambulawung River have been classified as good. However, there are some parameters reaching out of the GR No. 82/2001 (class II). Those parameters were pH at station 2, BOD at Station 1 and 2, COD in station 2. Based on the pollution index and NSF-WQI, water quality in Ciambulawung River has been categorized as good. This condition showed that the activities of the people and micro-hydro had no negative effect on the water quality of upper part of Ciambulawung River	
221	Stephan Bose-O'Reilly;2016;-Jurnal	A preliminary study on health effects in villagers exposed to mercury in a small-scale artisanal gold mining area in Indonesia	Further research is needed to test the hypothesis that mercurycontaminated rice from small-scale gold mining areas might causemercury intoxication. A well-designed environmental epidemio logical study is required. Additional environmental samples, such as soil, water, air, fish and especially rice need to be analysed. Speciation of specimens is needed to distinguish between the impact of inhaling elemental mercury vapour and in-digesting methyl mercury burdened fish and rice. If the results confirm the previous high readings, efforts to control and limit ongoing mercury exposure will be a major undertaking. Furthermore, medical treatment of existing patients with confirmed mercury intoxication will need to be considered, necessitating medical infrastructure in Cisitu. The village of Cisitu may not be unique – rice farming is a dominant form of agriculture in Indonesia and in other parts of Asia. ASGM activities also take place alongside farming in some areas. If our findings are confirmed, other high-risk areas of Indonesia and elsewhere should be identified. It may be necessary to test the mercury content in seeds from those areas prior to planting or consuming the rice. Furthermore, mercury use in gold mining processing activity should be stopped and remediation of contaminated soil and ponds need to be done. These measures should be considered in order to help prevent and reduce the environmental and health burdens in Cisitu as well as those in settings similar to Cisitu	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
222	Vurie Ayu;2017;Skripsi	Kajian Konservasi Air Dengan Kolam Retensi Dan Budidaya Daun Potong Di Sub-Sub Das Cipeuncit Kecamatan Cicurug, Sukabumi	Kolam retensi yang dibangun di Sub-sub DAS Cipeuncit mampu meresapkan air sebesar 51 018.47 m3/tahun karena sebagian lubang resapan tertutup sedimen dengan efektifitas resapan hanya 43.8%. Apabila kolam retensi dipelihara maka total volume air yang diresapkan adalah 116 480.525 m3/tahun. Pola pemanfaatan lahan dengan budidaya tanaman hias daun potong mampu meningkatkan pendapatan petani sebesar Rp 30 325 900/ha/tahun untuk jenis Cordyline dan Rp 27 668 750/ha/tahun untuk jenis Phillodendrom selloum sekaligus meningkatkan konservasi lahan dan air menjadi lebih baik. Program konservasi air tersebut terwujud melalui kolaborasi antara perusahaan sebagai 18 pengguna jasa dan penyandang dana dengan penyedia jasa, yaitu LALI (LSM), Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), kelompok tani Gempal, lembaga desa dan masyarakat di wilayah Sub-sub DAS Cipeuncit. Stakeholder dapat dipetakan berdasarkan kepentingan dan pengaruh menjadi key player, crowd dan subjects.	Perlu adanya imbal jasa dari perusahaan kepada pemilik lahan agar kolam retensi dapat dirawat secara berkala, sehingga sedimen berkurang dan kolam retensi dapat digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, perlu dibangun 6 unit kolam retensi untuk meningkatkan resapan air di Sub-sub DAS Cipeuncit.Peningkatan kapasitas petani melalui pendampingan dan pelatihan budidaya daun potong sangat diperlukan untuk memperluas pengetahuan, keterampilan dan strategi pasar sebagai salah satu faktor keberlanjutan program konservasi air. Perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak lagi seperti perusahaanperusahaan AMDK lainnya dalam kegiatan konservasi air, mengingat banyaknya perusahaan AMDK yang memanfaatan sumber mata air di wilayah Sub-sub DAS Cipeuncit.
223	Meidiana PG;2018;Skripsi	Variabel Potensial Daya Dukung Psikologis Kegiatan Berrkemah di Resort Gn Salak II Taman Nasional Gunung Halimun Salak Jawa Barat	1. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 51 atribut daya dukung psikologi yang diteliti yang tergolong sangat penting dalam kegiatan berkemah sebanyak 41.18%, 19.61% tergolong penting, dan 31.37% tergolong cukup penting 2. Prinsip daya dukung psikologis yang sangat penting adalah prinsip manajemen ramah lingkungan dan sosial, kemudian prinsip kealamiahan sumberdaya alam yang tergolong penting, dan prinsip kesunyian pengalaman sosial hanya tergolong cukup penting. 3. Prinsip manajemen ramah lingkungan dan sosial dicirikan oleh atribut jarak tempuh dari pintu masuk ke tempat kemah, keamanan dan kenyamanan jalan dari pintu masuk ke tempat kemah, petunjuk arah, MCK, tempat parkir, tempat mendirikan tenda, tempat sampah, tempat ibadah, media informasi, personil tiketing, personil keamanan, dan personil kebersihan. Prinsip kealamiahan sumberdaya alam dicirikan oleh atribut berupa tanah liat, pepohonan, semak belukar, dan rerumputan; keberadaan burung dan kupu-kupu, mata air, sungai dan sumur, pemandangan pegunungan, lembah, sungai dan air terjun; dan kawah dan air terjun. Atribut kesunyian pengalaman sosial yang penting dalam berkemah yaitu banyaknya pengunjung, artinya jumlah pengunjung dapat mempengaruhi kesunyian berkemah, semakin sedikit pengunjung maka semakin sunyi. Semua sub-atribut manajemen ramah lingkungan dan sosial juga penting dalam kegiatan berkemah yang terdiri dari sikap ramah, rapi, tanggap, cerdas, dan berseragam 4. Indeks kepuasan pengunjung terhadap variabel daya dukung psikologi adalah sebesar 74 % yang berarti bahwa pengunjung merasa puas berkemah di Gunung Bunder. 5. Pengelola perlu memperhatikan prinsip manajemen yang ramah lingkungan dan sosial karena prinsip tersebut berada pada kuadran I IPA sehingga menjadi prioritas utama untuk diperhatikan, dan mempertahankan kinerja dan kualitas dari prinsip kealamiahan sumberdaya alam.	1. Untuk meningkatkan kepuasan pengunjung berbasis daya dukung psikologis di perkemahan Resort Gn Salak II, pengelola hendaknya memperhatikan prinsip manajemen ramah lingkungan dan sosial baik unsur jalan akses, fasilitas berkemah, maupun personil, dengan atribut-atribut yang perlu diperhatikan adalah jarak tempuh dari pintu masuk menuju tempat kemah, kenyamanan jalan dari pintu masuk ke tempat kemah, petunjuk arah, media interpretasi (informasi), tempat sampah, tempat ibadah, tempat membuat api unggun, personil tiketing, pemandu, dan personil kebersihan. 2. Pengelola dapat melakukan perbaikan pada majemen berupa penyediaan tempat sampah, perbaikan tempat ibadah, dan menambah papan informasi atau interpretasi. 3. Alangkah lebih baik jika pembayaran untuk segala fasilitas dan sarana kegiatan berkemah dilakukan pada satu loket sekaligus sehingga pengunjung tidak perlu berkali-kali melakukan pembayaran di loket tiket yang berbeda. 4. Diperlukan penelitian lanjutan mengenai perilaku Campers. 5. Diperlukan penelitian lanjutan untuk membuat standar bagi indikator atribut prioritas.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
224	Haki Yusdinar;2018;Tesis	Analisis Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Hasil Air DAS Citatih	Berdasarkan hasil penelitian analisis dampak perubahan penggunaan lahan pada DAS Cicatih secara umum telah menghasilkan perubahan terhadap karakteristik hidrologi, yang dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut: Perubahan penggunaan lahan DAS Cicatih pada rentang waktu 2006-2016 menunjukan pergeseran pola perubahan penggunaan lahan dari jenis penggunaan hutan ke pertanian, perkebunan, dan berlanjut pada permukiman yang berakibat pada hilangnya daya resap tanah. Perubahan terjadi pada penggunaan lahan hutan, sawah, semak belukar dan tegalan yang berubah menjadi kawasan pemukiman, lahan terbuka dan perkebunan. Penurunan terbesar terjadi pada tutupan lahan tegalan sebesar 0.55%, sementara peningkatan terbesar terjadi pada tutupan lahan pemukiman yakni sebesar 1,48%. Perubahan penggunaan lahan pada DAS Cicatih yang lebih kepada pengembangan pusat bisnis dan industri, kawasan berikat (kriteria pemukiman) telah memberikan dampak negatif terhadap respon hidrologi. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan lahan tahun 2016 dimana terjadi kecenderungan peningkatan pada volume hasil air dan debit puncak dari tahun tahun sebelumnya, serta hasil analisis karakteristik hidrologi berdasarkan pada indikator besaran nilai KRA yang lebih besar dari 50 dan KAT lebih dari 0.5 yang menunjukan bahwa kondisi umum DAS Cicatih sudah mulai terganggu. Dampak dari laju konversi lahan ini telah menyebabkan aliran air hujan yang jatuh tidak terserap oleh tanah dan langsung mengalir diatas permukaan tanah sehingga aliran permukaan menjadi besar dan tak terkendali. Simulasi perubahan penggunaan lahan berdasarkan model HEC-HMS di DAS Cicatih telah mempengaruhi karakteristik hidrologi DAS, terutama pada penerapan skenario ke empat yakni Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi periode 2012-2032 yang merupakan respons hidrologi terbaik berdasarkan pada hasil air dan debit puncak paling rendah dibandingkan dengan skenario lainnya, serta kedua indikator hidrologi yang menunjukan klasifikasi pada range yang lebih baik ($0.3 < KAT \leq 0.4$) dan ($20 < KRA \leq 50$). Hal ini terjadi mengingat luas kawasan hutan pada skenario ke empat lebih besar dibandingkan pada skenario lainnya yakni sebesar 31.9% yang diterapkan sebagai kawasan hutan konservasi dan sebagai kawasan hutan produksi tetap	1. Penentuan kandungan air tanah sebelumnya sebaiknya berdasarkan pada keadaan tanah setempat yakni pada tingkat kondisi air tanah sebelumnyavv (AMC III). 2. Penentuan karakteristik DAS dilakukan berdasarkan pada ke dua kriteria yang dikeluarkan oleh Dirjen RLPS (2014), yaitu selain kriteria Hidrologi juga terhadap kriteria penggunaan lahan. 3. Diperlukan Penelitian lanjutan terhadap model pada rentang waktu yang lebih panjang (longterm simulation), untuk mengetahui trend limpasan selama kurun waktu tersebut dengan konsistensi model yang teruji sebagai evaluasi terhadap model dan sebagai prediksi banjir pada periode ulang tertentu, sejalan dengan perkembangan model pada bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang semakin baik dan sangat diperlukan dimasa mendatang
225	Dita Tryfani;2018;Skripsi	Pengembangan Wisata Alam Di Gunung Salak Endah, Kabupaten Bogor	Obyek wisata alam di Gunung Salak Endah, Kabupaten Bogor memiliki 5 kategori dengan jumlah 14 obyek berupa : 1) Pemandian air panas yaitu Air Panas Ciparay, curug (air terjun) meliputi: Curug Cigamea, Curug Seribu, Curug Kondang, Curug Pangeran, Curug Goa Lumut, Curug Ngumpet, Curug Batu Ngampar, Curug Cihurang, dan Curug Nangka, bumi perkemahan yaitu Bumi Perkemahan Gunung Bunder, kawah yaitu Kawah Ratu, obyek pemandangan meliputi: Puncak Mustika Manik dan Ranggon Hill. Hasil penilaian menggunakan ADO-ODTWA terhadap 14 obyek di Gunung Salak Endah, Kabupaten Bogor menghasilkan 5 obyek sangat potensial yaitu Curug Nangka, Curug Kondang, Curug Pangeran, Curug Goa Lumut dan Curug Ngumpet. 2) Obyek wisata tersebut diprioritaskan untuk dilakukan pengembangan. Akomodasi untuk Curug Nangka harus ditingkatkan sehingga pengunjung dapat beristirahat dengan nyaman. Sarana dan prasarana pengunjung di masing-masing obyek harus diperhatikan, agar dapat disesuaikan dengan aktivitas pengunjung. Pengembangan yang dapat dilakukan diantaranya (1) peningkatan akomodasi untuk Curug Nangka dan (2) peningkatan sarana dan prasarana untuk pengunjung di masing-masing obyek.	Nilai hasil obyek daya tarik bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola untuk pengembangan pengelolaan di Gunung Salak Endah.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
226	Andrianto Kusumoarto,dkk;2019;-Jurnal	Ecotourism Management Structuring At The Salak Mountain II Resort, Halimun Salak National Park	1. Terdapat beberapa kendala yang menjadi pendorong kuat kendala lainnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan profesional dalam mengelola ekowisata serta perubahan status dari zona pemanfaatan menjadi zona ekowisata. Kegiatan pemasaran merupakan kendala yang sangat bergantung pada kendala lainnya 2. Terdapat program kegiatan yang dapat dikembangkan dan dikelola di kawasan ekowisata ini, yaitu agrowisata, atraksi budaya dan seni lokal, ekowisata, dan rekreasi alam. Keempat aktivitas tersebut merupakan penggerak yang sangat kuat dan memiliki keterkaitan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Penginapan home stay dan penjualan souvenir hasil alam dan budaya sangat bergantung pada kegiatan lain. 3. Terdapat beberapa pihak seperti tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, dan investor yang memiliki faktor motivasi yang sangat kuat dan tidak bergantung pada pihak lainnya.	Perguruan Tinggi berperan dalam mendukung kelembagaan di tingkat pusat dan musyawarah pimpinan daerah dalam memberikan kebijakan, arahan dan peraturan perundang-undangan di pengelolaan kawasan ekowisata yang akan dimanfaatkan oleh instansi di daerah Perguruan Tinggi berperan memberikan dukungan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh institusi di daerah untuk memberikan arahan dan kebijakan kepada institusi lokal di daerah yaitu Kantor Resort Gunung Salak II TNGHS dan Badan Koperasi Khalifah.
227	Maulana Rasta Yuraga;2019;Skripsi	Tinjauan Terhadap Pengukuhan Kawasan Hutan Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Sebagian besar wilayah yang saat ini diperuntukan sebagai TNGHS telah memiliki kepastian hukum atas kawasan hutan. Kepastian hukum tersebut tercapai ketika pengelolaan pada masa Hindia Belanda. Akan tetapi, masih terdapat wilayah yang belum memiliki kepastian hukum atas kawasan hutan, yaitu: wilayah yang ditunjuk oleh Menteri sebagai kawasan hutan pada tahun 1999.	Perlu segera dilakukan penetapan terhadap wilayah yang belum memiliki kepastian hukum atas kawasan hutan. Selain itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
228	Ramdhani;2019;Skripsi	Variabel Potensial Daya Dukung Psikologis Kegiatan Berrkemah di Blok Loji Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Jawa Barat	1. Berdasarkan 51 atribut daya dukung psikologis yang diteliti sebanyak 35 atribut (68,63%) teridentifikasi sebagai variabel potensial daya dukung psikologis berkemah. Atribut yang tergolong sebagai variabel potensial yang tersedia di Blok Loji adalah kondisi tumbuhan berupa pepohonan dan rerumputan, keberadaan burung dan kupu-kupu, keberadaan batu bongkahan, ketersediaan sumber air dari mata air, pemandangan alam berupa pegunungan dan lembah, keberadaan gejala alam berupa air terjun, pengunjung yang bermain musik dan tertawa-tawa, banyaknya pengunjung, jarak antar tenda yang memudahkan pengunjung dilihat dan didengar oleh pengunjung lain, jarak tempuh, keamanan dan kenyamanan dari pintu masuk ke tempat kemah, fasilitas kemah berupa petunjuk arah, media interpretasi, MCK, tempat sampah, tempat ibadah, tempat parkir, tempat mendirikan tenda, tempat memasak, dan tempat menyalakan api unggun, serta keberadaan personil tiketing, keamanan, dan kebersihan di kawasan kemah. Sementara itu, variabel potensial kegiatan berkemah yang tidak tersedia di Blok Loji adalah ketersediaan sumber air dari sungai dan sumur, keberadaan pemandangan alam berupa sungai, air terjun, dan persawahan, serta personil yang bertugas sebagai pemandu. 2. Indeks Kepuasan Pengunjung terhadap variabel potensial daya dukung psikologis adalah sebesar 82,68%, artinya pengunjung merasa sangat puas terhadap kualitas variabel kegiatan berkemah yang disediakan oleh pengelola Blok Loji. 3. Variabel-variabel potensial daya dukung psikologis kegiatan berkemah di Blok Loji memiliki nilai kepuasan yang tinggi. Sementara itu, hanya personil yang bertugas sebagai pemandu yang perlu diprioritaskan dalam pengelolaannya karena berada di kuadran I diagram Importance Performance Analysis.	1. Kegiatan berkemah merupakan kegiatan rekreasi unggulan dalam pengelolaan wisata alam di Blok Loji, TNGHS. Hasil penelitian menunjukan bahwa seluruh variabel potensial daya dukung psikologis yang tersedia di Blok Loji memiliki nilai kepuasan yang tinggi, sehingga pengelola perlu mempertahankan kualitas kinerja pengelolaan variabel tersebut. Sementara itu, pengelola hendaknya memperhatikan atribut pemandu sebagai atribut yang diprioritaskan dalam penyediaan dan pengelolaannya di perkemahan Blok Loji karena atribut 1. tersebut dianggap penting oleh pengunjung. 2. Diperlukan penelitian lanjutan mengenai perilaku campers dan penelitian tentang kemungkinan variabel potensial daya dukung hasil penelitian ini untuk dijadikan indikator dan standar bagi pengelolaan daya dukung psikologis kegiatan berkemah.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
229	Mochamad FF;2019;Skripsi	Variabel Potensial Daya Dukung Psikologis Kegiatan Berrkemah di Blok Sukamantri Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. 33 variabel atribut (64.71%) yang tergolong variabel potensial. Variabel-variabel atribut potensial kealamiahan sumberdaya alam yang tergolong potensial adalah pepohonan, rerumputan, keberadaan satwa burung, primata, mata air, sumur, pegunungan, lembah, air terjun, dan keberadaan satwa kupu-kupu. Keberadaan sungai, pemandangan kawah, pemandangan sungai,dan keberadaan gua alam juga merupakan variabel atribut potensial tetapi tidak tersedia di Blok Sukamantri. Variabel-variabel tribut potensial prinsip kesunyian pengalaman sosial yang tergolong potensial adalah tertawa-tawa dan banyaknya pengunjung. Sementara itu, variabel atribut potensial dalam prinsip manajemen ramah lingkungan dan ramah sosial yang tergolong potensial adalah jarak tempuh dari pintu masuk ke tempat kemah, keamanan dan kenyamanan jalan dari pintu masuk ke tempat kemah, petunjuk arah, media interpretasi (informasi), MCK, tempat sampah, tempat ibadah, tempat parkir, tempat mendirikan tenda, tempat api unggun, personil tiketing, personil keamanan, personil kebersihan, tempat memasak, dan personil pemandu. 2. Indeks kepuasan pengunjung terhadap variabel potensial daya dukung psikologi sebesar 74.39% yang artinya bahwa pengunjung sudah puas berkemah di Blok Sukamantri. Variabel penting atau variabel potensial yang kinerjanya rendah pada level atribut yaitu keberadaan primata, keberadaan kupu-kupu, keberadaan air terjun, pemandangan air terjun, keamanan jalan kemah, kenyamanan jalan kemah, dan personil pemandu. 3. Variabel potensial yang kinerjanya rendah pada level unsur yaitu kondisi tanah, keberadaan gejala alam, dan jalan akses. Variabel potensial yang kinerjanya rendah pada level prinsip yaitu kealamiahan sumberdaya alam. Variabel potensial yang kinerjanya rendah pada level subatribut manajemen ramah lingkungan dan ramah sosial yaitu personil tiketing (berseragam), keamanan (berseragam), dan pemandu (rapi, tanggap, cerdas, dan berseragam).	Blok Sukamantri merupakan destinasi wisata alam yang fokus kepada kegiatan berkemah dikawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pengelola Blok Sukamantri sebaiknya meningkatkan variabel penting atau variabel potensial yang kinerjanya rendah. Variabel potensial pada level atribut yaitu keberadaan primata, keberadaan kupu-kupu, keberadaan air terjun, pemandangan air terjun, keamanan jalan kemah, kenyamanan jalan kemah, dan personil pemandu. Variabel potensial pada level unsur yaitu kondisi tanah, keberadaan gejala alam, dan jalan akses. Variabel potensial pada level prinsip yaitu kealamiahan sumberdaya alam. Variabel potensial pada level sub-atribut manajemen ramah lingkungan dan ramah sosial yaitu personil tiketing (berseragam), keamanan (berseragam), dan pemandu (rapi, tanggap, cerdas, dan berseragam). Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perilaku pengunjung berkemah dan standar untuk variabel atribut prioritas pengelolaan
230	Nadia Astriani,dkk;2020;Jurnal	Pengelolaan Sumberdaya Air Berdasarkan Kearifan Tradisional : Perspektif Hukum Lingkungan	Indonesia sebagai negara yang menganut pluralisme hukum, mengakui kearifan tradisional sebagai bagian dari hukum Indonesia. Pengelolaan sumber daya air yang dilakukan berdasarkan kearifan tradisional dilandaskan pada falsafah hidup yang selaras, serasi dan seimbang dengan alam. Oleh karena itu, praktik pengelolaan sumber daya air berdasarkan kearifan tradisional sesuai dengan prinsip pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Lebih lanjut, beberapa praktik kearifan tradisional ini dapat diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan dan diintegrasikan ke dalam kebijakan pemerintah sebagaimana hasil penelitian diatas. Peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kearifan tradisional lebih mudah diterima oleh masyarakat karena sejalan dengan nilai-nilai kehidupan yang dijalankan sehari-hari dan pada akhirnya peraturan tersebut berjalan lebih efektif karena sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.	Peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kearifan tradisional lebih mudah diterima oleh masyarakat karena sejalan dengan nilai-nilai kehidupan yang dijalankan sehari-hari dan pada akhirnya peraturan tersebut berjalan lebih efektif karena sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
231	T. Maya Safira;2020;Tesis	Kinerja Pengelolaan Wisata Alam Kegiatan Berkemah Dan Mendaki Di Gunung Bunder Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Pada wisata alam kegiatan berkemah di Bumi Perkemahan Gunung Bunder, dari 65 indikator yang diteliti teridentifikasi sebanyak 60 indikator potensial dan 47 indikator yang baik. Pada kegiatan mendaki di Kawah Ratu, dari 57 indikator yang diteliti teridentifikasi 56 indikator potensial dan 49 indikator yang baik. Nilai indeks kepuasan pengunjung terhadap indikator yang baik pada kegiatan berkemah adalah 68% artinya pengunjung merasa puas melakukan kegiatan berkemah di Bumi Perkemahan Gunung Bunder dan 70% pada kegiatan mendaki artinya pengunjung juga merasa puas melakukan kegiatan mendaki di Kawah Ratu. Berdasarkan analisis kinerja indikator yang baik untuk kegiatan berkemah terdapat tujuh indikator kinerja rendah, yaitu ketersediaan media informasi, ketersediaan toilet pria dan wanita, ketersediaan tempat sampah, ketersediaan tempat sampah organik dan non-organik, pendistribusian tiket kepada pengunjung, cepat tanggap petugas kebersihan, dan harga tiket sesuai dengan ketentuan. Kemudian tiga indikator kinerja rendah pada kegiatan mendaki, yaitu ketersediaan tempat sampah organik dan non-organik, ketersediaan tempat sampah tertutup, dan pemandu bersertifikat. Dari 7 indikator berkemah yang berkinerja rendah tersebut, terdapat 5 indikator sudah dimuat dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan standar yang berhubungan dengan kegiatan wisata alam, yaitu ketersediaan media informasi, ketersediaan toilet pria dan wanita, ketersediaan tempat sampah, ketersediaan tempat sampah organik dan non-organik, dan pendistribusian tiket kepada pengunjung. Selanjutnya dari 3 indikator kegiatan mendaki yang berkinerja rendah, 2 diantaranya sudah dimuat dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan standar yang berhubungan dengan kegiatan wisata alam, yaitu, ketersediaan tempat sampah organik dan non-organik serta ketersediaan tempat sampah tertutup. Dari 7 indikator berkemah yang berkinerja rendah, 4 indikator yaitu ketersediaan toilet pria dan wanita, ketersediaan tempat sampah, ketersediaan tempat sampah organik dan non-organik, dan cepat tanggap petugas kebersihan. Kemudian dari 3 indikator kegiatan mendaki yang berkinerja rendah, 2 indikator yaitu ketersediaan tempat sampah organik dan non-organik serta ketersediaan tempat sampah tertutup sudah dijelaskan standar pengelolaannya oleh Douglass dan Bell tentang rekreasi.	1. Sebanyak 7 indikator kegiatan berkemah di Bumi Perkemahan Gunung Bunder dan 3 indikator kegiatan mendaki yang berkinerja rendah perlu ditingkatkan pengelolaanya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan standar wisata alam yang berlaku dan/atau mengikuti standaryang dirumuskan oleh Douglass dan Bell 2. Penelitian lanjutan perlu dilakukan mengenai edukasi dan partisipasi para pihak terhadap kawasan wisata alam pada kegiatan berkemah dan mendaki.
232	Titien Suryanti Rostian,dkk;2021;-Jurnal	Perencanaan Lanskap Kawasan Kampung Adat Ciptagelar Dan Sekitarnya Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Tnghs) Dengan Pendekatan Ekowisata	1. Kawasan Kampung Adat Ciptagelar di Zona Khusus TNGHS berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai ekowisata. Kampung Adat Ciptagelar memiliki potensi fisik yaitu terletak pergunungan, kondisi visual tapak yang sangat bervariasi. perencanaan Zona Khusus TNGHS ini mampu dikembangkan menjadi beberapa kegiatan yaitu: wisata, konservasi, dan pendidikan. Kegiatan ekowisata juga disokong oleh minat serta dukungan masyarakat lokal yang baik serta pengunjung yang meningkat disetiap tahunnya. 2. Arahan Penggunaan lahan untuk pengembangan ekowisata di Kampung Adat Ciptagelar dan sekitarnya adalah kawasan budidaya dan kawasan ekowisata dengan luasan 97,55 ha dibagi menjadi dua yaitu budidaya tanaman semusim dan permukiman seluas 16,65 ha dan budidaya kebun campuran dan persawahan tahunan seluas 80,9 ha. Kawasan penyangga memiliki luas 58,4 ha dengan usulan lindung berupa area penyangga seluas 11,7 ha dapat dimanfaatkan menjadi kawasan penyangga berupa hutan produksi terbatas dan semak belukar terhadap kawasan lindung.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
232	Syarifah Rizqi Ramadhani;2021;Skripsi	Perencanaan Lanskap Kawasan Ekowisata Desa Malasari, Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Lanskap Desa Malasari memiliki karakteristik topografi bergelombang dengan kondisi kelerengan dominan agak curam hingga curam, sifat tanah yang tergolong kaya, memiliki permeabilitas dan porositas yang baik, namun peka terhadap erosi. Penutupan lahan desa didominasi oleh hutan pada wilayah TNGHS dan hutan lindung, selain itu juga terdapat kebun teh, kebun bunga, dan tambang pada wilayah enklave, sedangkan permukiman terbagi pada wilayah utara dan selatan desa dengan persawahan tidak jauh dari lokasi permukiman. 2. Potensi objek dan daya tarik ekowisata di Desa Malasari sebanyak 28 titik tersebar di seluruh penjuru desa dengan ODTW budaya terpusatkan pada wilayah utara desa serta ODTW alam terpusat pada wilayah selatan desa. Beberapa potensi ODTW utama yang menjadi keunikan desa yaitu acara Seren Taun, sejarah Bupati Bogor pertama, fauna seperti owa jawa dan elang jawa, flora seperti supalumar dan kantong semar, serta lokasi campground dan homestay yang memiliki pemandangan kebun teh, sawah, dan gunung. 3. Rencana Lanskap Kawasan Ekowisata Desa Malasari dikembangkan berdasarkan kerangka kerja ECOS dan prinsip dasar ekowisata. Rencana ini terdiri dari rencana ruang, rencana aktivitas dan fasilitas, rencana sirkulasi, serta rencana vegetasi. Arahan peruntukan lahan direncanakan berupa ruang konservasi, ruang lindung, ruang ekowisata, ruang budidaya, dan ruang permukiman atau bangunan. Berdasarkan potensi objek dan daya tarik dapat disusun rencana jalur ekowisata (Touring Plan) secara tematik ke dalam lima paket, yaitu Jalur Wisata Pendidikan Alam, Jalur Wisata Budaya, Jalur Wisata Curug Piit, Jalur Wisata Pendidikan Teh dan Bunga, dan Jalur Wisata Minat Khusus.	1. Pengembangan rencana lanskap kawasan ekowisata Desa Malasari disarankan agar disesuaikan dengan tata ruang yang ada dan peraturan TNGHS serta hutan lindung yang berlaku. Jumlah wisatawan harus dibatasi dan diberi pemahaman lingkungan untuk meningkatkan kesadartahuan konservasi alam dalam meminimalisir kerusakan sumber daya. Objek wisata dan akomodasi yang bersifat alami, rustic, dan bersejarah merupakan daya tarik kuat bagi pengunjung sehingga perlu ditingkatkan dan dimanfaatkan dalam pemasaran ekowisata desa. Pengelolaan ekowisata desa memerlukan kerjasama antar pengelola TNGHS dan masyarakat sebagai operator/penanggung jawab untuk meningkatkan rasa memiliki dan menghindari tindak kejahatan. 2. Pemberdayaan masyarakat sebagai media jasa ekowisata untuk meningkatkan fasilitas pelayanan dilakukan dengan menyediakan pelatihan pengelolaan desa wisata, pengembangan kreativitas masyarakat, dan pemahaman dalam menjaga lingkungan. Pemasaran kegiatan ekowisata dan hasil produksi desa disebarluaskan dengan menyediakan info lengkap, mudah dipahami, dan terbaru, di internet dengan kontak personel serta pilihan bahasa internasional. Selain itu diharapkan adanya penelitian dan desain tapak pada masing – masing ODTW yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
234	Kazuhiro Harada;2003;Jurnal	Attitudes of local people towards conservation and Gunung Halimun National Park in West Java, Indonesia	The results of the survey can be summarized as follows. Firstly, the local community does not have enough information about the park and, consequently, people only follow the compulsory laws. Secondly, local conservation knowledge and the global objectives of park management cannot be harmonized because of the lack of information and agreement concerning the park between local people and government authorities. People do not have certain incentives to conserve biodiversity, as they cannot get any benefits from the park. Thirdly, in spite of these adverse findings, it largely depends on the government authorities' capabilities whether the integrated park management can succeed or not, because people still have positive attitudes towardslocal participation.	
235	Kanenori Miura;2004;Jurnal	A Challenge for A Model National Park Management Gunung Halimun-Salak Management Project	Proyek ini mengakui bahwa salah satu aset penting yang ditinggalkan Biodiversity Conservation Project (BCP) adalah sumber daya dan jaringan dengan para ilmuwan, LSM. "Manajemen taman ilmiah" adalah ideologi BCP, yang juga harus dicari oleh proyek ini. Apa yang kita harus dilakukan sekarang akan bertemu dengan orang-orang. kami menghargai kolaborasi yang lebih besar dengan mereka organisasi, individu, dan siapa pun yang tertarik pada TNGHS	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
236	Gamma Galudra ;2005;Jurnal	History Of Land-Use Policies And Designation Of Mount Halimun-Salak National Park	Dari hasil dan pembahasan studi ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian penataan batas kelompok-kelompok hutan di atas sudah dilakukan dan diselesaikan pada masa Hindia Belanda. Sebagian lagi penataan batas ini dilakukan pada masa pendudukan Jepang dan masa Republik Indonesia. Namun, usaha penataan batas ini seringkali menghadapi permasalahan dengan keberadaan kawasan pertanian dan pemukiman masyarakat di dalam kawasan yang akan ditata batas. Pemerintah Hindia Belanda kadangkala terpaksa membeli kawasan pertanian dan pemukiman tersebut, namun di lain pihak, mengeluarkan kawasan-kawasan tersebut dari bagian kelompok hutan yang akan ditetapkan. Keberadaan kawasan pertanian dan pemukiman ini di kawasan Halimun-Salak disebabkan kawasan ini sempat dijadikan kawasan perkebunan, dimana pihak perkebunan memerlukan penduduk untuk bekerja di kawasan perkebunan mereka.	
237	Kiki Amandha;2006;Skripsi	Perubahan Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat akibat Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (Studi Kasus di Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor)	1. Pemberlakuan SK Menteri Kehutanan RI No. 175 tahun 2003 tentang penunjukan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas pada kelompok hutan Gunung Halimun dan kelompok hutan Gunung Salak seluas ± 113.357 hektar di provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak membawa pengaruh yang kurang baik untuk masyarakat sekitar hutan karena masyarakat sekitar hutan menjadi kehilangan mata pencahariannya sehingga memicu terjadinya pengangguran, urbanisasi dan turunnya pendapatan. 2. Akibat dari tertutupnya lahan, menyebabkan terjadinya perubahan mata pencaharian yang semula bertani dan menjual kayu, kini hanya mengandalkan pertanian. 3. Pengelolaan tempat wisata yang belum jelas, menutup peluang munculnya jenis usaha baru. 4. Tertutupnya akses masyarakat ke hutan menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat Desa Ciasihan dimana sebelum penutupan akses, sebesar 33.33% memiliki tingkat pendapatan antara Rp 500.000,00 – Rp 800.000,00; 30% memiliki tingkat pendapatan antara Rp 250.000,00 – Rp 500.000,00; dan 16.67% memiliki tingkat pendapatan ≥ Rp 1.200.000,00. Sementara setelah penutupan akses, 53.33% masyarakat memiliki tingkat pendapatan Rp 250.000,00 - Rp 500.000,00 dan 33.33% memiliki tingkat pendapatan ≤ Rp. 250.000,00.	1. Adanya sikap bijak bagi pengelola taman nasional dan pemerintah daerah setempat dengan melihat potensi peran serta masyarakat yang tinggi dalam mendukung pembangunan kehutanan sehingga lahan yang dimiliki bisa diberikan dimanfaatkan dengan sistem pengelolaan hutan kemasyarakatan guna menunjang keberadaan hutan yang menyumbangkan publik. 2. Perlu adanya peningkatan teknologi pengolahan hasil hutan demi meningkatkan nilai hasil hutan tanpa meninggalkan prinsip kelestarian 3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai dampak perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak terhadap faktor lainnya, seperti
238	Aditya Hani,dkk;2007;Jurnal	Tingkat Keberhasilan Model Restorasi Di Pondok Injuk Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak : Studi Kasus Kampung Cimapag, Sebagai Model Kampung Konservasi	1. Kerusakan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di kawasan Pondok Injuk diakibatkan oleh aktivitas pe-nebangan liar dan penggunaan lahan/ 1. perambahan untuk lahan pertanian masyarakat setempat. Kawasan ini se-dang mengalami tekanan penduduk akibat dari desakan kebutuhan akan lahan dan hasil hutan. 2. Pembentukan Masyarakat Kampung Konservasi (MKK) Cimapag pada ta-hun 2004 ditujukan untuk mencegah perladangan dan penebangan liar pa-da kawasan TNGHS. 3. Kegiatan Restorasi dilakukan oleh enam kelompok masyarakat meliputi kegiatan pengadaan bibit tanaman, penanaman, dan pemeliharaan. Sam-pai saat ini luas kawasan hutan yang ditanam adalah 49,5 ha dengan jum-lah tanaman sebanyak 19.817 pohon yang terdiri dari jenis rasamala (Alti-ngia excelsa Noronha), puspa (Schi-ma wallichii Reinw), dan huru (Litsea javanica BL). 4. Model restorasi yang diterapkan di Kampung Cimapag belum sepenuh-nya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat akan kayu, hasil hutan lain-nya, produk pertanian, kayu bakar, dan pakan ternak, akan tetapi dapat mengurangi aktivitas perladangan dan penebangan liar di kawasan TNGHS.	Untuk meningkatkan keberhasilan restorasi hutan maka diperlukan koor-dinasi dan sinkronisasi instansi pelaksana antara Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan Pemerintah Da-erah Sukabumi terutama untuk mencipta-kan kegiatan ekonomi alternatif dan me-ngurangi ketergantungan masyarakat ter-hadap kawasan hutan.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
239	Gamma Galudra, dkk;2008;-Jurnal	The Last Remnants of Mega Biodiversity in West Java and Banten: An-In Depth Exploration of RATA (Rapid Land Tenure Assesment) in Mounth Halimun-Salak National Park, Indonesia	Konflik penguasaan lahan di antara para pemangku kepentingan di kawasan Gunung Halimun-Salak dapat diringkas menjadi empat kategori: 1. Konflik penggunaan hak. Konflik ini ditemukan ketika beberapa masyarakat lokal meneruskan aspek penghidupan dan kegiatan pertambangan sebagai klaim hukum mereka ke taman nasional yang ditunjuk. 2. Konflik hak akses. Konflik ini dapat terjadi di dalam wilayah yang diklaim oleh masyarakat adat. 3. Konflik hak keamanan. Mekanisme bagi hasil secara informal diakui oleh otoritas kehutanan sebelumnya. Namun ketika kawasan tersebut berubah status menjadi taman nasional, mekanisme ini tidak dapat digunakan; oleh karena itu, konflik meletus. 4. Konflik hak penguasaan/kepemilikan. Jenis konflik ini dapat ditemukan antara klaim Bupati Lebak dan Departemen Kehutanan yang saling bertentangan.	Berdasarkan temuan ini, ada banyak pilihan kebijakan dan intervensi yang dapat diberikan untuk membantu menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Namun, penyelesaian konflik ini bergantung pada jenis konflik tenurial lahan apa yang diperebutkan oleh para pemangku kepentingan ini. Penyelesaian konflik antara Bupati Lebak dan Departemen Kehutanan akan ditelaah secara mendalam pada publikasi berikutnya.
240	Febri Sastiviani PC;2008;Skripsi	Relasi Gender dalam Pemilikan dan Penguasaan Sumberdaya Agraria (Kasus Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat)	1. Masyarakat desa Cipeuteuy secara adil mengakui tingkat akses dan kontrol anggota rumah tangga petani laki-laki dan perempuan atas sumberdaya agraria dengan beranggapan bahwa anak laki-laki dan perempuan merupakan dua entitas yang berbeda, dimana keduanya harus diperlakukan secara adil, Sistem tersebut telah mengkonstruksikan peran-peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga maupun pembagian peran pada kegiatan usahatani sedari dini. 2. Cara pembagian alokasi sumberdaya melalui pewarisan ini tergantung kepada kebijakan keluarga yang tentunya dipengaruhi oleh bagaimana keluarga tersebut memposisikan anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga 3. Masyarakat/komunitas ikut mengakui adanya hubungan antara sistem nilai status anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga/rumah tangga dengan pola penguasaan sumberdaya agraria pada rumah tangga petani. Adanya pengakuan komunitas dan desa terhadap kepemilikan laki-laki dan perempuan atas sumberdaya agraria secara tidak langsung mempengaruhi akses keduanya terhadap kepemilikan lahan. 4. Merujuk pada pola-pola kepemilikan dan penguasaan lahan 5. diperoleh bentuk-bentuk kepemilikan atas individu yang telah diakui oleh komunitas hingga tingkat desa, yakni kepemilikan laki-laki/suami,dan kepemilikan perempuan/istri secara individu, serta kepemilikan bersama, yakni kepemilikan secara gono-gini (guna kaya). 6. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama 7. untuk membeli secara individu. Namun jika dilihat dari distribusi lahannya, tingkat akses anggota rumahtangga petani perempuan lebih rendah dibandingkan tingkat akses anggota rumahtangga petani laki-laki. 8. Kondisi lahan yang semakin sempit kurang memungkinkan para petani untuk memiliki lahan sendiri, sehingga petani tidak hanya memiliki sumberdaya agraria melalui waris, hibah dan membeli, namun juga menguasai dengan cara menggarap, sewa, gadai dan bagi hasil. Penguasaan sumberdaya agraria ini juga dipengaruhi oleh aksesibilitas terhadap lahan TNGHS dan eks HGU PT. Intan Hepta yang cukup tinggi 9. Relasi gender dalam rumahtangga petani atas kepemilikan dan penguasaan sumberdaya agraria dipengaruhi pula oleh tingkat akses dan kontrol terhadap manfaat dari pengelolaan usahatani	1. Pengakuan pemerintah atas kepemilikan dan penguasaan laki-laki dan perempuan yang tertera pada Undang-undang Pokok Agraria Pasal 9 ayat 2 sebaiknya didukung oleh ketersediaan data yang terpilah gender. 2. Kajian mengenai agraria sebaiknya juga mengikutsertakan aspek relasi gender di dalamnya, karena permasalahan yang berhubungan dengan agraria, tidak hanya menjadi masalah dalam tataran rumah tangga, namun juga individu laki-laki dan perempuan. 3. Program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan di pedesaan sebaiknya melihat kebutuhan perempuan secara partisipatif sedangkan program yang berkenaan dengan usaha tani, sebaiknya juga melibatkan perempuan, khususnya yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan konservasi 4. lingkungan, mengingat Desa Cipeuteuy masih beririsan dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan masih sedikit sekali perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan TNGHS.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
241	Jorge A. Acuna;2008;Jurnal	Reservoir management at Awibengkok geothermal field, West Java, Indonesia	Awibengkok is a geothermal field that was developed in stages with incomplete knowledge of the resource size and characteristics. Extensive drilling, reservoir monitoring and field testing have gradually led to a clearer understanding of the reservoir and its response to production, and of critical resource management issues. Numerical simulation has been used by integrating mostlikely, pessimistic and optimistic models (Acuna et al., 2002 ˜) to evaluate alternative developmentopportunities and injection and production scenarios. Monitoring programs and reservoir simulation have been used successfully to improve and refine the initial reservoir exploitation strategy, while making the best of the well configuration available at any given time. Improvements in prediction of field performance and drilling efficiency have been driven by technical innovation and process improvement Maintaining a balance between pressure support and thermal breakthrough has been, and will continue to be critical to the successful management of the Awibengkok field. Current efforts are focused on the long-term plan of relocating injection to deeper or more distal locations along the field margins, in order to expand the current area of commercial production and stimulate steam cap expansion. This strategy has been determined to be the most economic means of maintaining the current generation capacity as it will expand the area available for production, lead to growth of the steam cap and lower overall steam capacity decline rates. Challenges remain in identifying alternative injection locations, anticipating changes in the production field that major changes in the injection configuration will create, and modifying the current field facilities at an acceptable cost	
242	Herry Yogaswara;2009;Jurnal	Taman Nasional Dalam Wacana Politik Konservasialam:Studi Kasus Pengelolaan Taman Nasional Gunung-Halimun Salak	1. Pengelolaan TNGHS dapat merupakan suatu contoh dimana perspektifkolonial tentang pengelolaan hutan masih dijalankan, melalui wacana konservasi yang didukung oleh lembaga-lembaga pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan juga omop yang tidak melakukan advokasi. Ciri utamanya adalah berbasis science dan mengabaikan keberadaan kelompok masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan taman nasional. Taman nasional dikonstruksikan sebagai suatu lingkungan alam yang hanya terdiri dari flora dan fauna eksotis dan endemis. Kenyataan bahwa masyarakat telah lama bermukim di wilayah TNGHS tidak diterima sebagai bagian integral dari TNGHS, melainkan harus berada diluar kawasan. 2. Sebaliknya, omop yang melakukan advokasi di TNGHS mempunyai aliran ekopopulis yang demikian kuat. Peran negara hanya ditempatkan sebagai pengatur birokrasi saja, dan tidak diboleh-kan untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam. Asumsinya adalah masyarakat dianggap telah mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Ketika kedua aliran ini berada pada dua titik ekstrim yang berbeda, tidak ada ruang dialog yang dapat digunakan oleh kedua aliran ini. 3. Namun demikian, proses negosiasi masih berjalan di tingkat lapangan. Munculnya konsep-konsep seperti Kampung dengan Tujuan Konservasi dan penataan wilayah adat (wewengkon) di Cibedug dan Citorek melalui eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten Bogor, Sukabtimi dan Banten untuk mendapatkan Peraturan Daerah (Perda) yang melindungi "hak adat" masyarakat, merupakan sebuah celah negosiasi antara negara da masyarakat untuk saling mengakui hak dan kewenangannya.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
243	Agustina Nurhaeni;2009;Skripsi	Implikasi Penunjukan Areal Konservasi Terhadap Pengelolaan Hutan Dan Luas Lahan (Studi Kasus Taman Nasional Gunung Halimun-Salak Desa Cirompang, Kec. Sobang, Kab. Lebak, Jawa Barat)	1. Aksesibilitas masyarakat terhadap hutan saat ini memang terbilang lemah namun hal ini tidak berpengaruh terhadap pengelolaan hutan karena hutan di Desa Cirompang masih terbilang lestari. Masyarakat tidak lagi memiliki akses terhadap hutan, namun masyarakat masih memiliki kesadaran untuk menjaga alamnya dengan jalan menanami lahan garapannya dengan buah-buahan dan kayu-kayuan serta tidak mengkonversikannya menjadi areal persawahan. 2. Luas lahan garapan di Desa Cirompang yang meliputi lebih dari setengah luas desa berkolerasi namun tidak signifikan terhadap pendapatan petani. Luas lahan keseluruhan apabila dihubungkan dengan pendapatan petani juga berkolerasi namun tidak kuat, karena terdapat pendapatan non-pertanian yang jumlahnya dapat berpengaruh besar terhadap pendapatan petani sehingga luas lahan keseluruhan bukan faktor utama dalam menentukan pendapatan petani. Namun lahan tersebut saat ini digunakan petani sebagai pengganti hutan untuk menyeimbangkan ekosistem. 3. Pemetaan partisipatif dipilih sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa di Desa Cirompang. Adanya peta yang disetujui semua pihak yang terkait dengan tata ruang Desa Cirompang menjadi dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan pengelolaan lahan mereka sehingga mereka dapat mengelola lahan tersebut walaupun menggunakan aturan dari Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Kasepuhan berperan untuk mengurusi masalah internal, sementara hubungan eksternal ditangani oleh kepala desa.	
244	Nandang Mulyana;2009;Tesis	Pengembangan Masyarakat Sebagai Pendekatan Pengembangan Kawasan Perdesaan (Studi Kasus Pada Industri Geothermal Di Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat)	1. Program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh CHV antara lain meliputi bidang Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, lingkungan, infrastruktur serta komunikasi dan hubungan sosial dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh CHV dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode sebelum tahun 2000 dan periode setelah tahun 2000. Program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh CHV telah mengalami pergeseran, beberapa program telah berusaha untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, masyarakat mulai di libatkan walaupun baru diwakili oleh orang–orang tertentu saja, namun secara umum realisasi program masih berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat derma (karitatif). Hasil analisis menunjukan bahwa pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh CHV belum sesuai dengan best practice dalam pengembangan masyarakat, komitmen perusahaan terhadap pengembangan masyarakat masih rendah, Komitmen yang rendah itu tercermin dari: a. Struktur organisasi perusahaan, dimana bagian yang bertanggung jawab a. terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan masyarakat hanya setingkat manager. b. Pelaksanaan program bersifat tidak berkelanjutan, bantuan yang diberikan kebanyakan berupa pembangunan fisik/infrastruktur. c. Laporan pelaksanaan program pengembangan yang di buat tidak transparan, sehingga sulit untuk mengukur peningkatan pelaksanaan program pengembangan masyarakat dari tahun ketahun. pertumbuhan perkotaan.	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, perlu di perhatikan hal-hal sebagai berikut: Untuk Pengembangan IImu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan Pelaksanaan program pengembangan masyarakat sangat di pengeruhi oleh kondisi dari sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dimana program tersebut dijalankan, sehingga dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat tidak hanya dititik beratkan pada programnya saja tetapi harus ada komunikasi yang baik dengan masyarakat. Program yang berhasil di suatu daerah belum tentu berhasil jika di terapkan di tempat lain,sehingga pola penanganan program pengembangan masyarakat di setiap daerah juga berbeda-beda. 1. Pihak Perusahaan harus meningkatkan lagi komitmen-nya terhadap pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah di mana perusahaan beroperasi. Dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat, perusahaan harus 2. melibatkan partisipasi Masyarakat dan stakeholders lain dalam, penyusunan, pelaksanaan serta pengawasan program, sehingga program yang dijalankan benar-benar merupakan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta untuk menghindari konflik dan benturan kepentingan. 3. Perlu di bentuk sebuah lembaga yang berfungsi menjembatani kepentingan perusahaan dan masyarakat dimana di dalamnya terdapat wakil-wakil masyarakat, LSM, pemerintah serta perusahaan sehingga dapat menyatukan seluruh potensi yang ada dan juga dapat berfungsi sebagai media untuk saling berkomunikasi antar stakeholders, agar terdapat keterpaduan antar stakeholder serta keterpaduan proses mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan dan pengembangan sampai kepada membangun jejaring yang efektif.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
			2. Pelaksanaan program pengembangan masyarakat dapat menjadi penggerak bagi pengembangan wilayah, melalui pelaksanaan program pengembangan masyarakat, perusahaan dapat membantu wilayah untuk berkembang. Terdapat kontribusi dari pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh industri panas bumi Gunung Salak terhadap pengembangan wilayah, tetapi kontribusi tersebut masih sangat rendah dan belum sesuai dengan harapan, hal ini terjadi karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan program (lihat matriks 5.4 dan matriks 6.4). Kontribusi yang masih rendah terhadap pengembangan wilayah ini terlihat dari Struktur perekonomian Kabupaten Sukabumi, dimana sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat besar dalam perekonomian di bandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Disamping itu kehadiran industri geothermal di Kecamatan Kabandungan belum banyak memberikan perubahan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di lingkar perusahaan hal ini terlihat dari masih banyaknya keluarga miskin yang ada di Kecamatan Kabandungan yang mencapai 61,06 %, dan merupakan jumlah presentase keluarga miskin terbesar se-Kabupaten Sukabumi. Meskipun keberadaan industri geothermal memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat setempat, namun masih dalam jumlah yang kecil (kurang dari 20%), sebagian besar karyawan perusahaan berasal dari luar daerah. 3. Pengordinasian dan pengintegrasian program dengan program lain masih lemah serta perusahaan masih pasif menunggu usulan program dari masyarakat. Program pengembangan masyarakat yang dilakukan juga mempunyai dampak negatif yaitu terjadinya ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan serta terdapatnya kelompok-kelompok dalam masyarakat dan menimbulkan konflik yang melibatkan kelompok-kelompok tersebut. 4. Program pengembangan masyarakat hanya dilakukan di daerah tertentu saja yang dekat dengan lokasi perusahaan dan pelaksanaannya belum merata., Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Christaller (1930) dalam Rustiadi et.al (2005) tentang pembangunan wilayah dalam hubungannya dengan lokasi industri dan pertumbuhan perkotaan.	4. Perusahaan harus menyelaraskan serta mengintegrasikan program pengembangan masyarakat yang dilakukannya dengan program-program pembangunan dilaksanakan di kecamatan Kabandungan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga lainnya. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan program lainnya, disamping itu untuk mendapatkan pengakuan dari masyarkat serta pemerintah setempat. Dalam hal ini perusahaan dapat menggunakan kegiatan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan sebagai media untuk mengordinasikan program dan menjaring aspirasi masyarakat mengenai program-program yang dibutuhkan. 5. Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat harus lebih ditingkatkan dengan melibatkan komponen komponen masyarakat, sehingga program yang dilaksanakan tepat sasaran dan berdampak sesuai dengan harapan, serta dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Pihak Pemerintah Daerah Sukabumi 1) Menciptakan payung hukum (perda tentang pengembangan masyarakat) yang dapat memayungi program kemitraan antara pemerintah daerah, industri dan masyarakat. 2) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat oleh perusahaan dengan melibatkan masyarakat, sehingga program yang dilaksanakan berdampak sesuai dengan harapan, serta selaras dengan program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan wilayah. Pihak Desa dan Kecamatan Kabandungan Mensinergikan antara program pembangunan pemerintah dengan program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga program yang dilaksanakan dapat saling mendukung dan menguatkan. Pihak Masyarakat 1 Menciptakan iklim yang baik bagi kelangsungan dunia usaha melalui kerjasama dengan perusahaan dalam usaha peningkatan kesejahteraan dan pengembangan wilayah. 2 Membentuk sikap mental mandiri dan tangguh untuk menolong diri sendiri (self help) karena perusahaan bukanlah satu-satunya sumber, upaya pengembangan masyarakat bukan hanya tanggung jawab perusahaan saja, melaikan merupakan tanggung jawab bersama. Bertindak amanah (committed) serta tidak memanfaatkan program-program bantuan untuk kepentingan pribadi/kelompok dengan mengatasnamakan masyarakat. 3 Bersama stakeholder lain melakukan Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat sehingga program yang dilaksanakan berdampak sesuai dengan harapan, serta dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program.
245	Hideyuki Kubo,dkk;2010;Jurnal	From fence-and-fine to participatory conservation:mechanisms of transformation in conservation governance at the Gunung Halimun-Salak National Park,Indonesia	The result of this analysis indicates that while the dominant discourse of participatory conservation assumes a primary importance of satisfying local economic needs for conservation, what should be emphasized is the process of trust-building and learning between frontline staff and local resource users without which the durability of a conservation institution is questionable. The analysis also reveals both challenges and limitations of a trust-building approach: while the approach effectively functions to halt forest degradation, it might not lead to the rehabilitation of forest ecosystem.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
246	Allan Rosehan;2010;Tesis	Uji Standar Kinerja Pengelolaan Taman Nasional pada Prinsip Kelestarian Fungsi Sosial Budaya (Kasus Taman Nasional Gunung Halimun Salak)	1. Nilai indikator aktual kinerja pengelolaan TNGHS pada kriteria tergalangnya hubungan harmonis budaya lokal dengan sumberdaya alam di dalam kawasan bernilai baik pada satu indikator dan sedang pada empat indikator. Empat indikator sisanya tidak dinilai karena masih ditemui penggunaan istilah yang tidak tepat, kesulitan dalam menyimpulkan norma dan keterbatasan data pengelolaan 2. Delapan dari sembilan indikator (90%) yang diujicobakan valid karena sesuai dengan kondisi objektifnya dan mencerminkan hubungan dengan kriteria. 3. Berdasarkan rumusan standar pengelolaan taman nasional, capaian kinerja indikator-indikator pengelolaan taman nasional Gunung Halimun Salak pada prinsip kelestarian fungsi sosial budaya yang dapat dinilai telah memenuhi standar minimal kinerjanya. 4. Rumusan standar pengelolaan taman nasional masih harus disempurnakan karena pada kenyataannya di lapangan masih ada ditemukan kesulitan dalam pengukuran verifier dan penilaian indikator. Kesulitan tersebut disebabkan inkonsitensi dalam penggunaan istilah, ketiadaan definisi operasional, deskripsi norma (baku mutu) masih lemah secara operasional dan masih ada verifier yang kurang sesuai dengan kondisi obyektifnya. Kesulitan penilaian juga disebabkan oleh unit manajemen yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan data pengelolaan untuk penilaian kinerja khususnya pada prinsip kelestarian fungsi sosial budaya.	Mengingat rumusan standar pengelolaan taman nasional bersifat umum untuk semua taman nasional di Indonesia, sebaiknya dilakukan pengujian serupa pada sejumlah taman nasional lain dengan karakteristik yang berbeda khususnya taman nasional dengan ekosistem lautan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk merekomendasikan hal-hal yang bersifat khusus, misalnya pertimbangan untuk penyusunan standar pengelolaan berdasarkan beberapa tipologi taman nasional.
247	Johanes Wiharisno;2010;-Tesis	Evaluasi Ketersediaan Data dan Informasi Ekologi Untuk Penilaian Kinerja Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Tidak semua kebutuhan data dan informasi untuk penilaian kinerja pengelolaan taman nasional (indikator-indikator pada prinsip kelestarian fungsi ekologi) dapat dipenuhi oleh TNGHS. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa tujuh indikator belum tercukupi kebutuhan datanya untuk dapat dilakukan penilaian kinerja. Dalam dimensi manajemen ke tujuh indikator tersebut masuk dalam manajemen sumberdaya alam. Data dan informasi yang belum memenuhi syarat untuk penilaian kinerja pengelolaan taman nasional meliputi: data dugaan populasi spesies (flora dan fauna), debit air, kualitas air, kualitas udara, erosi, dampak pemanfaatan kawasan dan pemantauan pengelolaan spesies dan ekosistem. Sedangkan data-data yang telah cukup memenuhi syarat untuk penilaian kinerja pengelolaan taman nasional meliputi: data citra/photo udara, tutupan lahan, peta kondisi/ruang kawasan, data gangguan kawasan, data keuangan, kepegawaian, dan kelembagaan. Kekurangan data dan informasi ekologi tersebut disebabkan kapasitas manajemen TNGHS yang terbatas. Selain itu, belum adanya standar ketersediaan dan kualitas data serta mekanisme untuk mengevaluasinya, menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan data dan informasi tersebut. Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati memiliki kecenderungan hanya memenuhi kelengkapan administrasi (keproyekan), sehingga kualitas data yang dihasilkan menjadi tidak maksimal. Peran pihak luar (peneliti, civitas akademika, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat) belum maksimal terintegrasi dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di TNGHS.	a. Perlu segera dibuat standar ketersediaan dan kualitas data ekologi serta mekanisme untuk mengevaluasinya b. Meningkatkan peran pihak luar (lembaga penelitian, civitas akademika, dan LSM) dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, dengan lebih meningkatkan peran pihak TNGHS di setiap aktivitasnya. c. Pengelola taman nasional perlu mempersiapkan diri untuk mencari dana secara mandiri (seperti mekanisme trust fund), mengingat masih rendahnya ketersediaan anggaran pemerintah untuk keanekaragaman hayati. d. Mengembangkan suatu jaringan sistem data dan informasi ekologi dengan institusi lainnya. Sistem data dan informasi taman nasional seharusnya terhubung dengan sistem data dan informasi lembaga lain seperti Pusat Informasi Konservasi Alam (PIKA), lembaga penelitian (LIPI) dan civitas akademika.
248	Sapto Aji Prabowo;2010;-Jurnal	Konflik Tanpa Henti: Permukiman dalam Kawasan Taman Nasional Halimun Salak	Implementasi kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan pada masa lalu hingga masa kini berimplikasi pada penurunan secara signifikan akses masyarakat dan peningkatan konflik atas kawasan TNGHS. Kebijakan pemerintah tersebut tidak berdasarkan pada realitas sosial di tingkat lapangan, sehingga tidak dapat memecahkan masalah yang ada, sebaliknya meningkatkan permasalahan. Masyarakat menempuh jalur hubungan-hubungan sosial dengan petugas untuk tetap menjamin akses pada sumber daya hutan yang menjadi gantungan hidup mereka. Terdapat 3 tipe akses masyarakat pada sumber daya TNGHS, yaitu penggarapan kawasan TNGHS untuk lahan pertanian, penggunaan kawasan TNGHS untuk sebagian lahan pertanian dan permukimannya, dan penggunaan kawasan TNGHS untuk seluruh lahan pertanian dan permukimannya. Balai TNGHS menyelenggarakan program-program model kampung konservasi (MKK) untuk pemberdayaan masyarakat, adopsi pohon dan alokasi zona khusus sebagai upaya manajemen konflik; dan melakukan penegakan hukum secara bertahap mulai dari pre-emtif dan preventif sampai dengan langkah penindakan secara represif.	Alternatif solusi yang dapat ditempuh dalam mengatasi konflik pada kawasan TNGHS adalah (1) pemberian hak pengelolaan sebagian kawasan konservasi dengan pola HKm untuk Kampung Sukagalih, (2) penetapan zona khusus di Kampung Cililin dan Sirnasari, dan (3) pemberian hak kelola hutan adat kepada masyarakat adat Kasepuhan di Kampung Ciptagelar. Balai TNGHS perlu merumuskan kesepakatan bersama masyarakat yang memuat hak dan kewajiban masingmasing pihak di zona khusus dalam proses zonasi kawasan TNGHS. Balai TNGHS disarankan melibatkan tokoh-tokoh(pimpinan) informal dalam proses konsultasi publik. Balai TNGHS juga disarankan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat supaya perilaku berpindah pemukiman pada masyarakat Kasepuhan Ciptagelar tetap dapat menjagakelestarian taman nasional.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
249	Syifa Maharani;2011;Skripsi	Struktur Agraria Masyarakat Desa hutan dan Implikasinya terhadap Pola Pemanfaatan Sumberdaya Agraria (Studi Kasus: Masyarakat Kampung Pel Cianten, Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)	Struktur penguasaan dan manajemen sumberdaya agraria oleh PTP. Nusantara VIII dan TNGHS, membuat warga tidak mempunyai ruang gerak yang cukup untuk memperbaiki kondisi hidup. Kondisi warga menjadi sangat tergantung terhadap pihak perkebunan dan Taman Nasional. Meski begitu, kegiatan pertanian masih dipertahankan. Hingga saat ini, tanah masih mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan warga setempat. Kegiatan pertanian yang dilakukan warga masih sangat dipengaruhi oleh tradisi yang dipertahankan sejak masa dulu. Sejarah panjang ini yang membuat warga mempunyai ciri agraris yang kuat dan tetap bertahan hingga saat ini, meski dalam kondisi tanpa akses tanah yang cukup.	
250	Zuhaida Khoirun N;2011;Skripsi	Strategi Nafkah Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan strategi nafkah akibat berubahnya akses sumberdaya alam pada masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi dikarenakan perluasan TNGHS. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ditolak, dengan alasan: Pertama, terjadi perubahan akses masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi terhadap sumberdaya alam dikarenakan perluasan TNGHS. Kedua adalah perubahan akses sumberdaya alam pada masyarakat kasepuhan, tidak membuat masyarakat melakukan perubahan bentuk-bentuk strategi nafkah atau dengan kata lain beralih dari kegiatan pertanian. 2. Data menunjukkan bahwa sebelum adanya perluasan TNGHS, masyarakat kasepuhan tidak menunjukkan adanya perubahan strategi nafkah. Sejauh ini akses sumberdaya alam yang terbatas, tidak membuat masyarakat kasepuhan beralih dari sektor pertanian. Tidak adanya perubahan strategi nafkah dikarenakan sistem pertanian sudah menjadi bagian dari budaya tradisi leluhur yang sudah seharusnya dijaga dan dilestarikan. 3. Dalam kaitannya dengan upaya kolaboratif sebagai peluang alternatif sumber nafkah, program MKK (Model Kampung Konservasi) yang dilaksanakan di Kampung Cimapag dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi. Salah satu kegiatan dalam program MKK adalah pembentukan kelompok MKK.	Hendaknya dalam pengelolaan sumberdaya alam yang melibatkan masyarakat kasepuhan di dalamnya perlu adanya pengakuan hukum adat yang sudah ada sebagai salah satu upaya untuk menghindari adanya tumpang tindih peraturan yang sampai sekarang masih berlanjut. Hal ini dilakukan demi keberlanjutan kawasan konservasi dan kesejahteraan masyararakat kasepuhan.
251	Bambang Supriyanto,dkk;2010;-Jurnal	Perubahan Tatakelola Taman Nasional: Studi Kasus Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Makalah ini menguji perubahan tata kelola TN dan dampaknya pada sikap dan perilaku para penggunasumber daya di TNGHS untuk merespon perubahan kebijakan pengelolaan taman nasional sebagaimana diamanatkan melalui dua Peraturan Menteri Kehutanan tentang Kolaborasi dan Zonas TN. Pelaksanaan perubahan tata keola TN memerlukan pendekatan baru dari pendekatan memagari dan menghukum menjadi pendekatan konservasi partisipatif. Dari analisis terlihat bahwa pelaksanaan konservasi partisipatif dilakukanmelalui beberapa tingkatan interaksi antara Kepala Balai Taman Nasional dan petugas lapangan, dan antara petugas lapangan dan masyarakat setempat. Proses perubahan meliputi tiga tahap penting: 1) pemberian panduan kebijakan yang jelas dan sederhana tentang konservasi partisipatif yang diberikan oleh Kepala Balai kepada petugas lapangan,	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
			2) pengembangan hubungan melalui interaksi yang aktif antara petugas lapangan dan masyarakat lokal, dan 3) timbulnya rasa percaya yang alami antara petugas lapangan dan masyarakat setempat dan praktek konservasi oleh masyarakat setempat. Bersamaan dengan proses ini, petugas lapangan mulai menyampaikan kebijakan tata kelola TN yang baru yang memungkinkan pemanfataan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan mata pencaharian masyarakat lokal. Hasil penelitian Analisis ini juga menunjukkan bahwa perubahan tata kelola TN ini mampu mengurangi bahkan menghentikan degradasi sumber daya lebih lanjut di tingkat kampung yang diikuti dengan rehabilitasi ekosistem hutan. 2. Pembelajaran perubahan tata kelola TN melalui pendekatan konservasi partisipatif di TNGHS melalui proses uji coba dan proses pembelajaran dari seluruh resort TNGHS sejumlah 14 resort menunjukkan hasil yang positif namun masih dijumpai beberapa pertanyaan untuk menjawab pengelolaan taman nasional yang lebih baik lagi. Yang pertama, pertanyaan mengenai bagaimana meningkatkan jumlah kampung di mana petugas lapangan bekerja secara langsung masih belum terjawab. Jumlah total kampung yang menjadi sasaran adalah 314 kampung, di mana harus dikelola oleh 14 kantor resort yang berarti masing-masing resort mengelola 22 kampung. Karena kapasitas dari petugas lapangan untuk menangani pengembangan hubungan dengan masyarakat setempat terbatas pada hanya beberapa lokasi pada satu waktu, mendatangi seluruh kampung yang menjadi sasaran adalah proses yang memakan banyak waktu; dan kemungkinan degradasi hutan akan terus berlanjut ketika petugas lapangan mencoba untuk menangani seluruh kampung. Lebih lanjut, bahkan setelah rasa saling percaya terbangun, pada suatu waktu, komunikasi terus-menerus diperlukan untuk memelihara hubungan yang telah terbina. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa-masa mendatang, petugas lapangan diharuskan untuk memusatkan fokus mereka pada pekerjaan membangun kepercayaan di kampung yang baru sementara secara bersamaan mengalokasikan waktu dan energi mereka untuk memelihara tingkat kepercayaan kampung di mana mereka telah membangun hubungan sebelumnya. Mengelola secara efisien kedua aktivitas tersebut menjadi tantangan bagi petugas lapangan. Yang kedua, diperlukan pengamatan lebih lanjut tentang kegunaan pemakaian strategi pengawasan partisipatif, dan juga fungsinya sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan modal sosial di antara pelaku yang berpartisipasi (Becker et al.,2005) supaya jumlah masyarakat lokal yang memiliki hubungan yang baik dengan petugas lapangan meningkat, dan interaksi aktif di antara keduanya dapat terpelihara. Yang terakhir, mekanisme yang efektif untuk berbagi pengalaman pendekatan partisipatif TNGHS di tingkat taman nasional perlu dikembangkan untuk operasionalisasi kebijakan nasional konservasi yang baru ke seluruh negeri. Walaupun TNGHS masih menghadapi tantangantantangan yang sulit dalam mencapai tujuan konservasinya, metode yang sederhana dan jelas yang diterapkan di TNGHS memiliki potensi yang tinggi dan dapat dilaksanakan di berbagai taman nasional di Indonesia.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
252	Akira Bena Yassiranda M;2011;Skripsi	Strategi Komunikasi Pemasaran Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (Kasus: Taman Nasional Gunung Halimun-Salak)	1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, jika dilihat dari rancangan pesan, maka komunikasi pemasaran ekowisata berbasis masyarakat di TNGHS sudah cukup efektif, hal ini terlihat dari hasil uji regresi logistik biner yang menyatakan bahwa variabel rancangan pesan signifikan dengan kefektivitasan komunikasi pemasaran yang ada. Walaupun begitu masih banyak yang harus dibenahi agar komunikasi pemasaran dapat lebih optimal. 2. Melihat dari hasil uji regresi logistik biner mengenai ragam media komunikasi pemasaran dan frekuensinya, variabel ragam media dan frekuensi penyampaiannya sudah cukup efektif, namun terdapat beberapa media yang patut ditingkatkan penggunaannya agar pemasaran dapat berjalan lebih optimal. Media tersebut adalah humas. Untuk itu sesuai dengan saran yang ada di matrik SWOT sebelumnya TNGHS dan stakeholder pemasaran lainnya harus lebih sering mengikuti event-event yang tersedia. 3. Strategi komunikasi pemasaran yang cocok diterapkan yaitu usaha pembangunana kerjasama dikalangan swasta, LSM, Pemerintah Kabupaten, dan Dinas Pariwisata. Tidak lupa juga pendistribusian alat komunikasi pemasaran seperti brosur di tempat-tempat yang dianggap potensial 4. Banyak upaya yang telah dilakukan TNGHS untuk mempromosikan ekowisata berbasis masyarakat, yaitu dengan pembuatan brosur, booklet, poster, serta banner. YEH dan Yayasan Ekowisata Bogor juga memberi peran yang besar dalam mempromosikan ekowisata di TNGHS yaitu dengan mengikuti beragam pameran baik berskala nasional maupun internasional.	1. Kerjasama yang baik antar stakeholder sangat diperlukan. TNGHS sebagai pemangku kepentingan utama dapat membagi perannya sebagai pengembang ekowisata dan pelindung keanekaragaman hayati yang ada. Oleh karena itu penting sebaiknya jika diadakan pertemuan antara seluruh stakeholder baik LSM maupun pemerintah daerah secara kontinyu 2. Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam hal rancangan pesan adalah untuk tidak melupakan materi atau isi dari setiap brosur atau leaflet yang digunakan. Karena calon pengunjung yang berasal dari mancanegara ataupun pengunjung yang sama sekali belum pernah singgah di TNGHS akan membaca isi brosur tersebut lebih seksama untuk mendapatkan informasi dan menggambarkan kondisi yang ada sehingga dapat mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. 3. Aspek lain yang harus diperhatikan adalah penyampaian serta distribusi media komunikasi pemasaran harus sampai ke tangan konsumen, atau dalam hal ini calon pengunjung. 4. Perbaikan dan perawatan sarana-prasarana juga harus selalu diusahakan. TNGHS memiliki masyarakat yang berada dalam kawasan, oleh karena itu kebutuhan masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, dan informasi patut dipenuhi. Penggalian potensi juga harus terus dilakukan, mengingat TNGHS merupakan kawasan yang sangat luas. Paket-paket wisata yang ada juga sebaiknya selalu diperbaharui dengan tidak lepas kemungkinan mencari potensi-potensi baru yang dapat dikembangkan seperti wisata melihat matahari terbit di pagi hari atau mountain bike.
253	Adhitya Permadi;2011;Skripsi	Sistem Kelembagaan dan Nilai Kebersediaan Membayar Masyarakat Terhadap Keberlanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro: Kasus Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi	1. PLTMH Cisalimar memiliki kelembagaan pengelolaan yang terdapat aktor dan aturan didalamnya. Aturan dan aktor yang terdapat dalam kelembagaan PLTMH membantu dalam pengelolaan PLTMH Cisalimar. PLTMH Cisalimar dan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS) memiliki keterkaitan dalam keberlanjutan PLTMH Cisalimar. 2. Kebersediaan membayar masyarakat Desa Cipeuteuy untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar dengan nilai rata-rata kebersediaan membayar masyarakat untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar sebesar Rp 10.400,00 dan total kebersediaan membayar masyarakat untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar per bulannya yakni sebesar Rp 312.000,00. Nilai total WTP masyarakat pengguna PLTMH Cisalimar adalah sebesar Rp 2.995.200,00 per bulan. 3. Untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar harus ditetapkan kebijakan agar masyarakat dapat memanfaatkan terus menerus. Kebijakan yang dilakukan yakni dengan melakukan penambahan biaya atau retribusi pada masyarakat yang memanfaatkan PLTMH Cisalimar. Retribusi ini digunakan untuk pengelolaan hutan yang berada di dalam kawasan taman nasional.	1. Diperlukannya aturan yang jelas dalam sistem kelembagaannya dan diharapkan pengelolaan kelembagaan dapat ditunjang dengan sistem kelembagaan yang lebih baik. 2. Diperlukannya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat menjaga, merawat dan melindungi hutan yang berada di dalam kawasan taman nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya kegiatan konservasikonservasi yang melibatkan masyarakat. 3. Diperlukannya penelitian lebih lanjut tentang sistem kelembagaan yang lebih mendalam dan adanya kebijakan-kebijakan lain yang dapat ditetapkan untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar dan menjaga ekosistem taman nasional. 4. Perlu adanya diskusi antara masyarakat dengan pemerintah agar pemerintah dapat membantu untuk penyediaan jaringan listrik di Desa Cipeuteuy dan untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar.
254	Sudiyah Istichomah;2011;Skripsi	Perubahan Interaksi Masyarakat dengan Hutan di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	1. Perubahan pola interaksi masyarakat di Desa Cipeuteuy adalah perubahan dari pola tanpa interaksi menjadi penggunaan lahan sebesar 39,3%, perubahan dari pola penggunaan lahan menjadi tanpa interaksi sebesar 35,7%, perubahan dari pola pemanfaatan hasil hutan menjadi penggunaan lahan sebesar 11,9%, perubahan dari pola pemanfaatan hasil hutan menjadi tanpa interaksi sebesar 3,6%, perubahan dari pola penggunaan lahan menjadi pemanfaatan hasil hutan sebesar 2,4%, dan sisanya adalah mereka yang tidak berubah interaksi sebesar 7,1%.	1. Diperlukan kajian terpadu dari segala aspek untuk menentukan tindakan terbaik bagi masyarakat desa yang masih memiliki interaksi tinggi dengan hutan agar interaksi yang terjalin tidak merugikan salah satu pihak. 2. Dalam setiap kebijakan pihak pengelola hutan yang terkait kehidupan masyarakat harus secara aktif melibatkan masyarakat agar kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
			2. Faktor-faktor pendorong perubahan pola interaksi masyarakat Dusun Pandan Arum dan Dusun Cisarua Desa Cipeuteuy adalah faktor internal, yaitu: kondisi fisik lahan hutan dan gangguan alami, luas lahan pertanian di luar, faktor usia, pendapatan, kebutuhan hidup, pekerjaan pertanian dianggap lebih menguntungkan, jarak dari tempat tinggal, dan perubahan gaya hidup dan faktor eksternal, yaitu: adanya pengambil-alihan lahan perkebunan di dalam desa, perubahan pengelola hutan, serta pengawasan dan penertiban oleh aparat pengelola. 3. Faktor sosial ekonomi berpengaruh nyata sebesar 30,1% terhadap luas pengunaan lahan hutan oleh masyarakat dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.	
255	Ina Marina;2011;Skripsi	Analisis Konflik Sumberdaya Hutan di Kawasan Konservasi, (Studi Kasus Kampung Sinar Resmi, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)	1. Sejarah konflik sumberdaya alam di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dimulai ketika kawasan Gunung Halimun dikelola oleh erhutani pada tahun 1970-an. Saat itu, pihak Kasepuhan dianggap telah menyerobot lahan Perhutani dengan membuka hutan utuh untuk ladang dan sawah warga. Namun,permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, dengan menggantikan lahan yang terlah dibuka dengan tanah milik Abah Anom. Selain itu, warga pun diizinkan untuk menanam dengan sistem tumpang sari di lahan Perhutani. Selain masalah penyerobotan lahan, konflik dengan Perhutani pun terjadi ketika ada tumpang tindih antara hutan adat dan hutan produksi Perhutani. Konflik semakin parah ketika pengelolaan Gunung Halimun dialihkan ke Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Wilayah pemukiman dan pertanian warga diklaim sebagai zona rimba dan zona rehabilitasi taman nasional. Pihak taman nasional menakuti-nakuti akan mengusir warga dari tempat tinggalnya. Selain itu, terjadi penangkapan terhadap warga yang sedang berada di kebunnya, dan dituduh sebagai perambah hutan dan melakukan illegal logging. Pihak taman nasional pun memasang papan pengumuman mengenai pelarangan masuk kawasan konservasi di kebun dan di depan rumah warga. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak adalah Perhutani yang kemudian digantikan oleh Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak melalui SK. Menhut No. 175 Tahun 2003, serta masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi. Penyebab konflik kehutanan yang terjadi di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak disebabkan oleh empat sumber perbedaan, yaitu: perbedaan persepsi, kepentingan, tatanilai, dan akuan hak kepemilikan. Selain itu, pada tataran perundang-undangan terjadi perbedaan dalam meninterpretasikan maknanya. Misalnya dalam UU No. 41 Tahun 1999 pasal 1 tertulis bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Berdasarkan pernyataan tersebut tersirat jelas bahwa hutan adat adalah hutan negara, yang pengaturan dan pengelolaannya dilakukan oleh negara karena berada dalam penguasaan negara. Berdasarkan pernyataan itu pula, tersirat juga bahwa tidak adanya pengakuan hak ulayat masyarakat adat, sehingga dianggap tidak memiliki hak atas hutan. 2. Konflik yang terjadi antara masyarakat Kasepuhan dengan pihak taman nasional terjadi pada basis kehutanan dan lahan. Sejak diterbitkannya SK. Menteri Kehutanan No.175 Tahun 2003 lahan garapan masyarakat telah menjadi kawasan zona rimba dan zona rehabilitasi oleh taman nasional. Tata batas yang kurang jelas antara kawasan taman nasional dan kawasan adat Kasepuhan menyebabkan banyak lahan yang saling tumpang tindih. Seperti kawasan adat Kasepuhan Sinar Resmi, di mana huma, sawah, kebun, hutan tutupan dan hutan titipan, diklaim telah masuk dalam kawasan taman nasional. Kedalaman konflik yang terjadi tidak sampai pada pertumpahan darah. Namun, telah terjadi penangkapan terhadap masyarakat Kasepuhan ketika sedang mengambil kayu di kebunnya sendiri. Setelah itu, warga menjadi ketakutan jika ingin ke kebun, karena takut ditangkap oleh polisi kehutanan 3. Konflik di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak bukan tidak pernah berusaha untuk diselesaikan. Telah ada upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak Kasepuhan sendiri untuk meredam konflik yang terjadi. Upaya yang telah dilakukan adalah negosiasi, nemun tidak sampai pada kesepakatan. Diperlukan proses mediasi dan mediator untuk mengakomodasi keinginan pihak-pihak yang berkonflik.	1. Bagi pemerintah pusat, diharapkan dapat mengeluarkan undang-undang mengenai pengakuan hak adat, dan meninjau ulang perundang-undangan yang terkait dengan konservasi dan hak-hak masyarakat. 2. Diperlukan kesepahaman antara pihak Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dan masyarakat adat Kasepuhan, mengenai klaim yang sama atas Gunung Halimun, dan diperlukan kejelasan mengenai pihak mana yang berhak atas Gunung Halimun agar tidak terjadi tumpang tindih klaim kembali. 3. Akademisi, diharapkan dapat memdampingi masyarakat dalam menyelesaikankonflik, dan menjadi mediator ketika konflik terjadi.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
256	Isma Rosyida;2011;Skripsi	Partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan dampaknya terhadap komunitas perdesaan (study kasus anggota Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Kartini, DesaCihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat)	Penyelenggaraan LKMS Kartini merupakan salah satu wujud penyelenggaraan program CSR Perusahaan Geothermal yang berfokus pada area pemberdayaan ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota kelompok simpan pinjam di Desa Cihamerang dalam penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal berhubungan dengan dampak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga jika partisipasi anggota kelompok simpan pinjam dalam penyelenggaraan program tinggi, maka dampak sosial dan ekonomi juga akan tinggi. Sejauhmana dampak sosial ekonomi diperoleh anggota kelompok simpan pinjam juga ditentukan oleh partisipasi dari stakeholder lain yang terkait. Jika dilihat dari klasifikasi kategori sosial yang ada, masyarakat dengan kategori sosial farm/buruh memiliki tingkat partisipasi yang paling rendah diantara kategori sosial yang lain. Keikutsertaan anggota kelompok simpan pinjam kategori sosial tersebut, sejalan dengan kondisi taraf hidup anggota kelompok simpan pinjam karena tidak ada nilai peningkatan taraf hidup setelah mengikuti kegiatan simpan pinjam. Meskipun demikian, tingkat partisipasi pada kategori sosial tersebut memiliki hubungan terhadap tingkat pendapatan, tingkat tabungan, dan kekuatan modal sosial. Untuk kategori anggota kelompok simpan pinjam non-farm/pengusaha, dan farm/pengusaha tingkat partisipasi mereka tergolong sedang, namun data menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat pada kategori sosial tersebut tidak diikuti oleh peningkatan tingkat pendapatan, tingkat tabungan serta kekuatan modal sosial, kecuali untuk variabel taraf hidup, karena data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan taraf hidup pada masyarakat kategori non-farm/pengusaha Penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal secara langsung dan langsung membawa dampak pada kondisi sosial ekonomi anggota kelompok simpan pinjam pada khususnya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh sejauhmana anggota kelompok simpan pinjam turut berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.Dalam hal ini, tingkat keterlibatan masing-masing stakeholder memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan program ini didominasi oleh peran dan fungsi Perusahaan Geothermal sebagai penyandang dana sekaligus pengambil keputusan pada awal pendirian. Stakeholder lain memiliki derajat keterlibatan yang rendah dengan peran dan fungsi yang berbeda. Masyarakat, yang dalam hal ini seharusnya secara aktif terlibat sebagai subjek dalam program, belum sepenuhnya terlibat sebagaimana mestinya. Begitu pun dengan pihak pemerintah lokal yang seharusnya dapat turut berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan program, sejauh ini tidak terlibat secara langsung. Dominansi keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan program mempengaruhi sejauhmana program pemberdayaan berlangsung. Sejauhmana partisipasi anggota kelompok simpan pinjam berhubungan dengan dampak sosial ekonomi yang diperoleh juga dipengaruhi oleh faktor keterlibatan stakeholderlain	1. Sebaiknya Perusahaan Geothermal melakukan pendekatan partisipatif terhadap masyarakat dan pemerintah, begitu pun pemerintah dan masyarakat terhadap Perusahaan Geothermal sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis, saling mempercayai satu sama lain dan dapat membangun kerjasama yang baik. 2. LKMS Kartini sebaiknya mulai diarahkan untuk mengubah orientasi kegiatan yang hanya berfokus pada tingkat pengembalian dalam pembiayaan LKMS, melainkan orientasi perlu diarahkan pada sejauhmana pencapaian perguliran dana masing rumah tangga dalam pemanfaatan modal usaha. 3. Kebijakan pemerintah lokal dapat disinergikan dengan keberadaan perusahaan, sehingga penyelenggaraan program yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat tidak tumpang tindih dan secara penuh melibatkan stakeholder terkait

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
257	Titania Aulia;2011;Skripsi	Pengelolaan Sumberdaya Hutan Oleh Pemerintah Vs Komunitas Lokal: Upaya Mencari Titik Temu (Kasus: Kampung Cisangku Dan Kampung Nyungcung, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)	Pola pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di Kampung Cisangku dan Kampung Nyungcung adalah sistem pengelolaan hutan "campuran". Peran pemerintah memberikan batasan bahwa kawasan hutan produksi mengalami perubahan dari hutan produksi menjadi hutan konservasi karena perluasan kawasan TNGHS pada tahun 2003. Pengelolaan sumberdaya hutan menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 56 /MenhutII/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional merinci sistem dan kriteria zonasi dalam TN. Masyarakat Kampung Cisangku membagi lahan menjadi leuweung tutupan, leuweung dudukuhan, dan leuweung bukaan, sedangkan masyarakat di Kampung Nyungcung membagi lahan menjadi leuweung larangan, leuweung dudukuhan, leuweung sarerea, dan lahan lembur (kampung). Pemahaman tersebut sangat selaras dengan pembagian zonasi oleh pemerintah. Persepsi pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya hutan adalah lahan yang menjadi perluasan TNGHS merupakan lahan negara. Lahan negara tidak dapat dijadikan hak milik masyarakat, sehingga masyarakat hanya memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang belum dianggap kuat secara hukum. Persepsi masyarakat menganggap bahwa hutan tersebut telah diwariskan sejak nenek moyang mereka untuk digarap dan dimiliki. Tidak semua masyarakat mengetahui zona versi pemerintah karena masyarakat memiliki zona versi masyarakat sendiri yang diberitahukan secara turun temurun. Persepsi LSM, perluasan kawasan TNGHS belum terdapat batas yang jelas antara lahan pemerintah dan lahan yang digarap oleh masyarakat. Peta partisipatif dibuat oleh masyarakat dengan didampingi pihak LSM untuk menunjukkan batas wilayah antara pemerintah dan masyarakat agar terlihat jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih lahan. LSM mengganggap bahwa pemerintah ingin mengusir secara perlahan masyarakat yang berada dalam kawasan konservasi. Persepsi pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya hutan menghasilkan program Model Kampung Konservasi (MKK), sedangkan persepsi masyarakat di 81 Kampung Nyungcung dengan difasilitasi LSM menghasilkan Kampung Dengan Tujuan Konservasi (KDTK). Perbedaan antara MKK dan KDTK terletak pada idealisme setiap pemangku kepentingan, sehingga terbentuk perbedaan model pengelolaan kolaboratif. Kolaborasi dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan. Program MKK termasuk top down (bekerjasama dengan pihak TNGHS) karena belum adanya partisipasi dari masyarakat Cisangku dalam membuat kegiatan dari mulai perencanaan hingga evaluasi walaupun pada awalnya LSM telah masuk ke wilayah ini. Kampung Dengan Tujuan Konservasi (KDTK) diinisiasi oleh masyarakat Kampung Nyungcung. Pihak LSM (RMI) sebagai pihak yang menjembatani permasalahan yang terjadi antara masyarakat Kampung Nyungcung dan pemerintah (TNGHS). Model KDTK ini termasuk bottom up karena adanya partisipasi masyarakat kampung Nyungcung dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hasil kesepakatan yang ditandatangani antar pemangku kepentingan dinamakan MoU (Memorandum of Understanding).	Perlu adanya upaya menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan (pemerintah, komunitas lokal, dan LSM) untuk menghindari terjadinya konflik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi pemerintah tentang aturan yang berlaku di TNGHS dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Dengan demikian, diperlukan juga penambahan SDM dari pemerintah agar sosialisasi dapat berjalan dengan baik mengingat selama ini, masalah sosialisasi terkendala oleh jumlah SDM yang kurang memadai. Pandangan LSM yang berbeda dengan kebijakan pemerintah dapat diatasi melalui perundingan antara pemangku kepentingan. Peran tokoh masyarakat dan aparat desa perlu ditingkatkan agar model pengelolaan kolaboratif antara pemerintah dan komunitas lokal berjalan dengan baik. Selain itu, pemerintah seharusnya cepat tanggap dalam menandatangani perjanjian kesepakatan (MoU) walaupun model pengelolaan kolaboratif bersifat bottom up dengan meninjau kembali isi perjanjian yang telah dibuat oleh komunitas lokal. Bila terdapat pernyataan dalam perjanjian yang kurang sesuai, maka pemerintah dapat meninjau dan memperbaiki perjanjian tersebut dengan cara merundingkan bersama komunitas lokal.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
258	Windra Kurniawan,dkk;2012;Jurnal	Analisis Konflik Pemanfaatan Lahan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Pengelolaan TNGHS menghadapi kendala terkait dengan masih luasnya kawasan hutan yang berpotensi konflik dengan tata ruang tiga kabupaten di sekitar TNGHS. Belum adanya kesepakatan paduserasi tata ruang antara Kementerian Kehutanan dengan ketiga kabupaten tersebut menyebabkan pencapaian tujuan pengelolaan kawasan konservasi menghadapi kendala besar 2. Luas ketidaksesuaian zonasi di wilayah administratif Kabupaten Lebak adalah seluas 46.450,2 Ha atau sekitar 43,30% dari luas Kawasan TNGHS di 3 (tiga)wilayah administratif kabupaten. Luas ketidaksesuaian zonasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor masing-masing eluas 1.395,3 Ha (1,2%) dan 3.023,7 Ha (2,7%). 3. Zona yang diperuntukan sebagai Kawasan Budidaya (KB) Hutan Produksi Terbatas merupakan zona terluas pada RTRW Kabupaten Sukabumi yang tidak sesuai dengan zonasi TNGHS, yaitu seluas 1.292,1 Ha. Begitu juga dengan wilayah yang telah ditetapkan sebagai Hutan Lindung pada RTRW Kabupaten Sukabumi seluas 558,7 Ha tidak sesuai dengan zonasi TNGHS. Zona-zona RTRW Kabupaten Sukabumi yang lainnya yang tidak sesuai dengan TNGHS seluruhnya mencapai luas 386,6 Ha di luar luas lahan enclave 4. Permasalahan konflik lahan di TNGHS menjadi kendala bagi pengelola TNGHS dan pemerintah kabupaten. Adanya berbagai aktifitas masyarakat dan pembangunan di kawasan tersebut menjadi kendala besar dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan. Pemerintah kabupaten menilai bahwa dengan ditetapkannya wilayah yang didiami masyarakat menjadi taman nasional tidak memungkinkan untuk mengalokasikan kegiatan pembangunan daerahnya di wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang dikelola UPT Pusat (Kementerian Kehutanan) karena akan dinilai melanggar ketentuan perencanaan pembangunan dan sistem anggaran daerah yang tidak memperbolehkan untuk mengalokasikan kegiatan dan anggaran di wilayah kerja yang dibiayai APBN. 5. Pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik karena masih adanya konflik pemanfaatan ruang antara RUTR Kabupaten di sekitar TNGHS dengan penunjukkan kawasan hutan Gunung Halimun Salak sebagai kawasan konservasi. Oleh karena itu model pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi harus dapat dilaksanakan dengan baik.	1. Perlu dilakukan kegiatan sinkronisasi dan „paduserasi“ antara Kementerian Kehutanan dengan ketiga kabupaten di sekitar TNGHS terutama mengenai kebijakan tata ruang. 2. Pemberdayaan disesuaikan dengan zonasi TNGHS dilakukan dengan pola kolaborasi berupa pengembangan potensi sumberdaya hutan berupa hasil hutan non kayu, sumber genetik dan penunjang budidaya lainnya sepanjang tidak mengganggu fungsinya sebagai hutan konservasi. Implementasi pemberdayaan masyarakat disarankan meliputi keterwakilan tiga aspek vital yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan.
259	Titania Aulia,dkk;2012;Jurnal	Pengelolaan Sumberdaya Hutan Oleh Pemerintah Vs Komunitas Lokal : Upaya Mencari Titik Temu	1. Pola pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di Kampung Cisangku dan Kampung Nyungcung adalah sistem pengelolaan hutan "campuran". Peran pemerintah memberikan batasan bahwa kawasan hutan produksi mengalami perubahan dari hutan produksi menjadi hutan konservasi karena perluasan kawasan TNGHS pada tahun 2003. Pengelolaan sumberdaya hutan menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 56 /Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional merinci sistem dan kriteria zonasi dalam TN. Masyarakat Kampung Cisangku membagi lahan menjadi tiga bagian, yaitu leuweung tutupan, leuweung dudukuhan, dan leuweung bukaan, sedangkan masyarakat di Kampung Nyungcung membagi lahan menjadi empat bagian, yaitu leuweung larangan, leuweung dudukuhan, leuweung sarerea, dan lahan lembur (kampung). Pada dasarnya, pemahaman tersebut sangat selaras dengan pembagian zonasi yang dilakukan oleh pemerintah.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
259			2. Persepsi pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya hutan adalah lahan yang menjadi perluasan TNGHS merupakan lahan negara. Lahan negara tidak dapat dijadikan hak milik masyarakat, sehingga masyarakat hanya memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang belum dianggap kuat secara hukum. Persepsi masyarakat menganggap bahwa hutan tersebut telah diwariskan sejak nenek moyang mereka untuk digarap dan dimiliki. Tidak semua masyarakat mengetahui zona versi pemerintah karena masyarakat memiliki zona versi masyarakat sendiri yang diberitahukan secara turun temurun. Persepsi LSM, perluasan kawasan TNGHS belum terdapat batas yang jelas antara lahan pemerintah dan lahan yang digarap oleh masyarakat. Peta partisipatif dibuat oleh masyarakat dengan didampingi pihak LSM untuk menunjukkan batas wilayah antara pemerintah dan masyarakat agar terlihat jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih lahan. LSM mengganggap bahwa pemerintah ingin mengusir secara perlahan masyarakat yang berada dalam kawasan konservasi. 3. Persepsi pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya hutan menghasilkan program Model Kampung Konservasi (MKK), sedangkan persepsi masyarakat di Kampung Nyungcung dengan difasilitasi LSM menghasilkan Kampung Dengan Tujuan Konservasi (KDTK). Perbedaan antara MKK dan KDTK terletak pada idealisme setiap pemangku kepentingan, sehingga terbentuk perbedaan model pengelolaan kolaboratif. Kolaborasi dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan. Program MKK termasuk top down (bekerjasama dengan pihak TNGHS) karena belum adanya partisipasi dari masyarakat Cisangku dalam membuat kegiatan dari mulai perencanaan hingga evaluasi walaupun pada awalnya LSM telah masuk ke wilayah ini. Kampung Dengan Tujuan Konservasi (KDTK) diinisiasi oleh masyarakat Kampung Nyungcung. Pihak LSM (RMI) sebagai pihak yang menjembatani permasalahan yang terjadi antara masyarakat Kampung Nyungcung dan pemerintah (TNGHS). Model KDTK ini termasuk bottom up karena adanya partisipasi masyarakat kampung Nyungcung dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hasil kesepakatan yang ditandatangani antar pemangku kepentingan dinamakan MoU (Memorandum of Understanding).	
260	Agung Kurniawan;2012;Skripsi	Analisis Kelembagaan Masyarakat Adat Kasepuhan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, Studi Kasus Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Aturan adat Kasepuhan Cibedug dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di TNGHS memiliki banyak kesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, masih ada ketidaksesuaian yaitu dalam hal alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman, serta pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat adat Kasepuhan Cibedug. Walaupun ketidaksesuaian tersebut hanya sedikit dibandingkan kesesuaiannya,namun jika tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi mengancam kelestarian kawasan dan penurunan sumberdaya hutan di TNGHS 2. Terdapat tiga aktor penting terkait dengan sistem pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat adat Kasepuhan Cibedug, yaitu : 1) Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS), 2) pemerintah Desa Citorek Barat dan 3) lembaga swadaya masyarakat RMI. BTNGHS merupakan pengelola resmi kawasan TNGHS yang bertanggung jawab terhadap kelestarian kawasan TNGHS. Balai TNGHS berperan sebagai pembina dan pengawas masyarakat adat Kasepuhan Cibedug dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di kawasan TNGHS. Pemerintahan Desa Citorek Barat merupakan mitra TNGHS dan pemerintah setempat yang membawahi Kasepuhan Cibedug. Pemerintah Desa Citorek Barat berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara BTNGHS dan masyarakat Kasepuhan Cibedug. RMI (Rimbawan Muda Indonesia) merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang membantu masyarakat Kasepuhan Cibedug dalam mendokumentasikan aturan-aturan yang ada di Kasepuhan Cibedug. 3. Ko-manajemen yang telah terbentuk antara Kasepuhan Cibedug dan BTNGHS telah mencapai tingkat konsultatif walaupun masih bersifat informal. Pengambilan keputusan dalam pemanfaatan SDH di TNGHS masih bersifat ditentukan oleh BTNGHS. Namun bentuk ko-manajemen ini perlu ditingkatkan.	1. Perlu adanya peningkatkan kerjasama dalam hal pengawasan wilayah hutan taman nasional dengan merekrut masyarakat Kasepuhan Cibedug sebagai pasukan pengaman hutan terkait keberadaan kasepuhan di dalam zona tradisional. 2. Melakukan pembinaan serta pengarahan dari taman nasional kepada masyarakat Kasepuhan Cibedug tentang pemanfaatan lain dari sumberdaya hutan seperti wisata budaya atau wisata alam di dalam kawasan Kasepuhan Cibedug serta merubah pola tanam masyarakat kasepuhan yang sebelumnya hanya tanaman pertanian untuuk diselingi dengan tanaman kehutanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kasepuhan Cibedug. 3. Pembentukan MOU kerjasama kemitraan yang disepakati dan ditandatangani dari pihak Kasepuhan Cibedug dan TNGHS sebagai bentuk ko-manajemen yang legal dalam menjaga kawasan hutan untuk meminimalisir potensi ancaman terhadap sumberdaya hutan taman nasional. 4. Perlu adanya penelitian lanjutan dengan kajian yang lebih luas dan dalam terutama mengenai kenapa belum turun peraturan daerah untuk penetapan Kasepuhan Cibedug sebagai wilayah adat.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
261	Sri Desti Purwatiningsih;2012;Tesis	Efektivitas Komunikasi Pembangunan Pada Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Pemahaman masyarakat sekitar hutan dalam meningkatkan produktivitas fisik dalam kategori sangat paham, artinya masyarakat sangat memahami bagaimana memperbaiki rasio produktivitas, dengan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Pemahaman masyarakat sekitar hutan dalam mengoptimalkan lahan dalam kategori sangat paham, yang artinya masyarakat sangat memahami dalam meningkatkan sumberdaya lahan menjadi lahan usahatani yang lebih produktif. Pemahaman masyarakat sekitar hutan dalam memperbaiki kualitas lingkungan dalam kategori sangat paham, artinya masyarakat sangat memahami perlunya memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pemahaman masyarakat sekitar hutan dalam memaksimumkan pendapatan usaha dalam kategori sangat paham, artinya masyarakat sangat memahami bagaimana meningkatkan pendapatan dari hasil pemanfaatan hasil hutan TNGHS. 2. Daya tarik petugas kehutanan dengan pemahaman masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS, memiliki hubungan yang sangat lemah, hal ini menunjukkan bahwa petugas kehutanan mempunyai penampilan kurang menarik, masyarakat juga menilai bahwa petugas kehutanan merupakan orang yang berpenampilan kurang rapi dan kurang sopan, memiliki gaya bicara yang kurang menarik, serta memiliki kepribadian yang kurang menarik dalam menyampaikan informasi pemanfaatan dan pelestarian hutan kepada masyarakat. Tetapi masyarakat menilai petugas kehutanan memiliki kharisma dalam mengajak masyarakat untuk memanfaatkan dan melestarikan hutan konservasi TNGHS, dan menyampaikan pesan (informasi) secara jujur, baik hati, dan tidak sombong serta memiliki wibawa dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS. Informasi 152 konservasi hutan yang diinformasikan oleh petugas kepada masyarakat termasuk informasi yang relatif baru mereka dengar. Masyarakat menilai informasi mengenai pemanfaatan dan pelestarian hutan TNGHS merupakan informasi yang masih baru mengenai tata cara pengelolaan hutan. Informasi yang disampaikan oleh petugas kehutanan cukup bervariasi dan tidak diulang-ulang.	1. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan perlu adanya kemampuan yang perlu ditingkatkan pada diri seorang petugas kehutanan dalam hal (1) kedekatan dengan masyarakat, (2) mempunyai kesamaan dan daya tarik sosial dan fisik (3) dikenal kredibilitasnya dan otoritasnya, (4) memiliki kepandaian dalam cara penyampaian pesan, (5) dikenal status, kekuasaan dan kewenangannya. 2. Pesan informasi yang disampaikan kepada masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat sekitr hutan dalam pemanfaatan dan elestarian hutan hendaknya memperhatikan (1) pesan dikemas dalam konteks tertentu, (2) pesan Dibangun diatas beragam aturan, (3) Pesan bermakna berbeda berdasar kesan yang diberikan, (4) Pesan beragam tingkat kesopanannya, (5) pesan berupa pesan langsung dan tidak langsung (sindiran). 3. Meningkatkan kualitas penggunaan saluran komunikasi dalam penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat sekitar hutan yang dilihat dari segi (1) ketersediaan saluran komunikasi, (2) jenis saluran komunikasi, (3) kemudahan mengakses saluran dan (4) ketepatan penggunaan saluran.
262	Ira Mirawati, S.Sos., M.Si;2012;-Jurnal	Media and Community Empowerment Communication: Case Study in Halimun Salak National Conservation Park Indonesia (Media Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Taman Konservasi Nasional Halimun Salak Indonesia)	GHSNP Management realizes they only can motivate people to act only when they can show them they do the same thing, to safe the world. This is llike what Burgess said, public will respond the evidence sustainable conservation practices (J. Burgess, 1998, p. 1445). So, GHSNP use community media and social media to show their active activity in conservate the forest. GHSNP Management use facebook as social media to communicate with people. The page is ecotourism Gunung Halimun Salak National Park and its address is http://www.facebook.com/pages/Ecoutourism-Gunung-Halimun-Salak NationalPark/212251775369. With 1796 people who like the page, it became a most popular national park facebook page in Indonesia. The largest age group of people taking this page is about 25 - 34 years old. Admin of the page is Employee of GHSNP Management, Mr. Senjaya M. and Mr. Ahmad Suryadarma. People who likes GHSNP facebook page have a various background: environmental activist, mountain hiker, researcher, university student, and people who lived around GHSNP area. People who lived around GHSNP area is rural people. Rural people articulate far fewer friends online, and those friends live much closer to home(Eric Gilbert, 2008, p. 1603). GHSNP Management use facebook to publish their agenda, their year report, and their photos or videos. They also, as facilitator in Conservation Village, use facebook to shareknowledge and motivation with others environment activist, so they can improve their knowledge and drive their spirit to facilitate the programme. Meanwhile, people use the page to ask question about the national park, especially about hiking track. People also use the page to give their support to management to always spirit in keep the forest preservation.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
263	Bayu Gagat Prasasti; 2013;Skripsi	Strategi Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan di Lokapurna Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Persepsi masyarakat terhadap BTNGHS dalam hubungan kerjasama tergolong agak buruk dan persepsi BTNGHS terhadap masyarakat dalam hubungan kerjasama juga tergolong agak buruk. Penilaian masyarakat terhadap BTNGHS juga tergolong agak buruk sedangkan BTNGHS menilai masyarakat sedang. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dengan TNGHS karena terjadi perbedaan persepsi dan penilaian. Konflik yang terjadi di Lokapurna saat ini merupakan jenis konflik terbuka karena telah ada upaya penyelesaian namun belum menemukan kesepakatan. 2. ingkat kepentingan masyarakat dan BTNGHS atas lahan di Lokapurna untuk tujuan konservasi, ekonomi, maupun sosial tergolong agak baik. Kondisi ini dapat menjadi peluang munculnya upaya penyelesaian konflik karena masyarakat dan TNGHS telah memahami pentingnya konservasi dalam kehidupan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. 3. Ada empat alternatif strategi penyelesaian konflik penguasaan lahan yaitu melakukan pemindahan masyarakat secara keseluruhan (relokasi), mengembangkan wisata di Lokapurna, mengoptimalkan Lokapurna sebagai zona khusus dan melakukan kerjasama kolaboratif antara TNGHS dengan masyarakat.	Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai strategi kolaboratif yang dilakukan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai solusi permasalahan penguasaan lahan. Selain itu juga diperlukan kajian mengenai nilai penting lain yang menjadi motivasi pihak yang ingin menguasai lahan di Lokapurna.
264	Muhammad Ilyas;2014;Tesis	Analisis Spasial Perubahan Penggunaan Lahan Dalam Kaitannya Dengan Pemanfaatan Zonasi Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Perubahan penggunaan lahan di kawasan TNGHS dalam periode 2000-2010 adalah : penggunaan lahan hutan mengalami penurunan luas sebesar 5,5%. Hal ini di ikuti dengan peningkatan luas kawasan ladang, sawah, semak, kebun campuran, lahan terbangun dan kebun teh masing-masing sebesar 2,2%, 1,64%, 0,63%, 0,60%, 0,34%, dan 0,32%. Pola perubahan lahan di kawasan TNGHS yang paling utama adalah dari lahan hutan menjadi kebun campuran, ladang dan semak. 2. Faktor yang mempengaruhi perubahan hutan menjadi non hutan adalah kepadatan penduduk, kepadatan tenaga pertanian, formasi geologi, elevasi, kemiringan lereng, curah hujan, jarak ke jalan, dan jarak ke kota terdekat. 3. Hasil prediksi penggunaan lahan tahun 2026 menggunakan CLUE-S dengan berbagai skenario menunjukan peningkatan luas penggunaan lahan hutan terjadi pada skenario 2 dan 3. Penggunaan lahan kebun campuran, ladang, sawah dan semak meningkat pada prediksi dan skenario 1. Penggunaan lahan lahan terbangun meningkat pada seluruh skenario. Penggunaan lahan badan air dan penggunaan kebun teh tetap pada seluruh skenario. Model CLUE-S yang disimulasikan dalam penelitian ini memiliki ketelitian sebesar 88,53%. 4. Arahan kebijakan penggunaan lahan di kawasan TNGHS adalah kebijakan restorasi hutan pada zona inti, zona rimba dan zona rehabilitasi, yaitu dengan melakukan upaya restorasi hutan dari penggunaan lahan kebun campuran, ladang, sawah, dan semak. Kebijakan ini dapat mengurangi ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan zonasi pada tahun 2026 menjadi 9,23%.	1. Perlunya rencana pengelolaan TNGHS yang bersifat partisipatif dari berbagai pihak sebagai strategi pengendalian perubahan penggunaan lahan di kawasan TNGHS. 2. Perlu adanya perbandingan antar model perubahan penggunaan lahan yang berkembang saat ini, sehingga dapat diketahui model yang paling baik.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
265	Dian Rosleine,dkk;2014;Jurnal	The Effect Of Land Use History On Natural Forest Rehabilitation At Corridor Area Of Gunung Halimun Salak National Park, West Java Indonesia	1. Koridor Taman Nasional Gunung Halimun Salak mengalami degradasi dan fragmentasi habitat yang cukup serius akibat aktivitas manusia. Sebanyak 22 plot (11 plot berukuran 10 × 10 m2 di bekas hutan tanaman dan 11 plot berukuran 20 × 20 m2 di hutan sekunder) disebar untuk menganalisa struktur vegetasi dan melihat proses pemulihan lahan hutan yang dihubungkan dengan sejarah penggunaan lahan yang berbeda-beda di kawasan ini. 2. DCA (Detrended correspondence analysis) mengelompokkan tiga tipe komunitas yang ditemui di kawasan koridor, yaitu komunitas *Swietenia macrophylla – Agathis dammara* di lahan bekas hutan tanaman, *Maesopsis eminii – Cyathea spp.* di hutan yang sangat terganggu, dan Fagaceae – Schima wallichii di hutan sekunder yang mengalami sedikit gangguan. Jenis-jenis tumbuhan yang toleran terhadap cahaya, gulma, rumput dan paku Dicranopteris linearis mendominasi lantai hutan tanaman yang telah ditinggalkan, namun beberapa tumbuhan eksotis yang dapat mengancam keanekaragaman hayati ditemukan di hutan sekunder yang terganggu. Sisa hutan alami berada di lokasi yang jauh dengan pemukiman penduduk dan masih didominasi oleh tumbuhan asli hutan pegunungan.	rehabilitasi hutan di kawasan yang sangat rusak sebaiknya dibantu oleh manusia dengan menanam jenis-jenis tumbuhan asli untuk menghindari masuknya tumbuhan invasif, sehingga mampu mempercepat proses pemulihan hutan.
266	Kasfy Allama;2014;Skripsi	Dampak Penetapan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Terhadap Sistem Penghidupan Masyarakat Kasepuhan Cipta Mulya	Penetapan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) mempersulit akses masyarakat Kasepuhan Cipta Mulya terhadap lahan garapan adat. Meski sama-sama berada dalam pengawasan Negara, masyarakat cenderung merasa lebih mudaht mengakses sumber daya hutan yang berstatus hutan produksi. Hal ini disebabkan oleh keberadaan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan saat oleh Perum Perhutani. Masyarakat turut dilibatkan sebagai kuli dalam penanaman hingga pemanenan. Selain itu masyarakat juga diberi kesempatan membuka lahan untuk ditanami berbagai tanaman kayu dan padi ladang. Bertentangan dengan hal itu, pengelolan oleh Balai TNGHS yang berlandaskan prinsip konservasi, tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Keberadaan masyarakat adat yang semakin bertambah dikhawatirkan mengganggu keseimbangan ekosistem taman nasional meski sebenarnya pihak taman nasional mengakui keberadaan masyarakat adat sejak dulu. Pertentangan masyarakat dan pihak TNGHS sebenarnya sudah diusahakan untuk diselesaikan melalui zonasi yang turut melibatkan partisipasi perwakilan masyarakat Kasepuhan.Wilayah pemukiman masyarakat Kasepuhan Cipta Mulya kini berada pada zona khusus sehingga kegiatan penggarapan lahan diperbolehkan. Meski demikian, masyarakat tetap saja sulit mengambil hasil berupa tanaman kayu untuk keperluan perbaikan rumah karena pihak TNGHS tidak dapat mentoleransi kegiatan penebangan kayu. Terkait dengan aktivitas nafkah, masyarakat tetap menanam padi yang merupakan kewajiban masyarakat kasepuhan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada aktivitas nafkah masyarakat umumnya disebabkan oleh faktor-faktor di luar penetapan TNGHS, seperti status perkawinan, perubahan komposisi rumah tangga, dan motif ekonomi.	Masalah pertentangan antara TNGHS dan masyarakat kasepuhan harus diselesaikan secara komprehensif. Upaya-upaya penyelesaian perlu melibatkan berbagai stakeholder agar kepentingan masing-masing pihak dapat terakomodasi. Pembangunan di sektor kehutanan harus kembali pada prinsip keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial. Perlu diadakan komunikasi yang lebih intensif antara TNGHS dengan masyarakat kasepuhan agar keduanya dapat mengurangi ketidakpastian yang selama ini menimbulkan prasangka. Selain itu, perlu ada pengkajian lebih lanjut mengenai masyarakat kasepuhan untuk mengetahui tingkat keterdedahan masyarakat kasepuhan terhadap modernisasi dan dampaknya terhadap kelembagaan lokal yang selama ini diterapkan. Pengkajian tersebut dapat membantu menjawab keraguan Bupati Kabupaten Sukabumi dan pihak TNGHS sehingga dapat dibuat keputusan mengenai pengakuan masyarakat adat kasepuhan.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
			Sebagian besar masyarakat mengalami peningkatan pendapatan yang tidak signifikan sehingga beberapa masih tergolong dalam kategori pendapatan rendah. Jumlah masyarakat yang termasuk dalam kategori tingkat pendapatan rendah meningkat setelah penetapan TNGHS. Sejalan dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan dari segi aktivitas dan pendapatan, sebagian besar masyarakat bersikap netral terhadap penetapan TNGHS. Hasil korelasi menggunakan tabulasi silang dan rank spearman menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara sikap dengan luas lahan garapan, status kepemilikan lahan garapan, dan tingkat pendapatan.	
267	Siti Nurika Sulistiani;2014;Skripsi	Kajian Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Oleh Masyarakat Sekitar	1. Pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat di sekitar TNGHS khususnya di kampung hanjawar, desa majasari dan desa kutajaya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pangan, papan, obatobatan, peralatan rumah tangga, kayu bakar dan pakan ternak. Terdapat 103 jenis hasil hutan yang dimanfaatkan. Pemanfaatan hanya dilakukan oleh masyarakat lokal. Lokasi pemanfaatan masyarakat masuk ke dalam 5 zona yaitu zona rimba, zona khusus, zona rehabilitasi, zona pemanfaatan dan zona tradisional. Intensitas pemanfaatan untuk jenis yang dimanfaatkan bagi keperluan obat-obatan, peralatan rumah tangga, dan bahan bangunan dilakukan secara insidental sedangkan untuk kebutuhan pangan, kayu bakar, dan pakan ternak dilakukan secara regular. 2. Nilai hasil hutan yang dimanfaatkan dari ketiga lokasi mencapai Rp. 296.219.800 dengan kontribusi rata-rata terhadap penghasilan untuk kampung hanjawar adalah 42,63%, desa majasari mencapai 78,84% dan desa kutajaya sebesar 24,95%.	1. Diadakannya MoU dengan masyarakat ketiga lokasi terkait pemanfaatan hasil hutan yang selama ini sudah dilakukan untuk mengontrol aktivitas tersebut. 2. Pengembangan pemanfaatan aren bagi masyarakat Desa Majasari 3. Pemanfaatan getah damar di Desa Kutajaya
268	Muhamad Randy Wiguna Semesta;2014;Skripsi	Partisipasi Stakeholder Dalam Implementasi Program Green Corridor Initiative (Gci), Pt Chevron Geothermal	Berdasarkan hasil deskripsi profil desa, profil program GCI, analisis hubungan penguatan prinsip kemitraan dengan tingkat partisipasi stakeholder, analisis hubungan tingkat partisipasi stakeholder dengan tingkat partisipasi masyarakat dan analisis hubungan tingkat partisipasi masyarakat dengan sikap masyarakat terhadap perusahaan maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 1. Proses Implementasi program GCI pada tahun pertama belum berjalan secara efektif. 2. Terdapat hubungan antara variabel tingkat penguatan prinsip kemitraan dengan tingkat partisipasi stakeholder. 3. Tidak Terdapat hubungan antara variabel tingkat partisipasi stakeholder dengan tingkat efektivitas Program GCI. 4. Terdapat hubungan antara variabel tingkat efektivitas Program GCI dengan sikap masyarakat terhadap perusahaan.	Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau saran diantaranya sebagai berikut: 1. Program GCI harus tetap dijaga keberlanjutannya, karena para stakeholder yang terlibat merasakan manfaatnya. 2. Komunikasi dan koordinasi menjadi hal yang penting untuk ditingkatkan dalam proses implementasi program GCI pada tahun berikutnya. 3. Frekuensi pihak Chevron untuk turun kemasyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih mengenal dan mempengaruhi sikap masyarakat. 4. Kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan, mengingat kapasitas masyarakat yang masih belum mandiri. 5. Baik pemerintah, LSM dan perusahaan diharapkan dapat memperhatikan kondisi di wilayah ini mengingat minimnya sarana dan prasarana yang ada, khususnya sarana air bersih. 6. Pembangunan sarana air bersih perlu dilakukan mengingat dapat meningkatkan efektivitas Program GCI dan mempengaruhi sikap positif masyarakat terhadap Chevron.
269	Gita Saraswati;2014;Jurnal	Development Directives In Disaster- Prone Areas Based on Identification Level Vulnerability Using Geographical Information System Applications in Bogor Regency	GIS software is one of effective tools to develop spatial information in order to prevent disaster impact. Natural mitigation effort in formulating the direction of area development, meant to actualize a safe comfortable and productive urban environment creation and also coul be a useful input in making decision about disaster management. The highest risk disaster area in Bogor Regency is District Ciomas. The effort of disaster risk reduction in District Ciomas is conducted through space utilization spatial control aspects	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
270	Neng Virly Apriliyani, dkk;2015;-Jurnal	Pengembangan Kelembagaan Tata Kelola Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Skor rata-rata hasil penilaian responden adalah 3,84 yang artinya berada pada klasifikasi penilaian Baik, dengan demikian penilaian terhadap pengembangan kelembagaan tata kelola hutan taman nasional gunung halimun salak sudah dilakukan dengan baik. Dimensi kepemimpinan sebagai dimensi pertama berada pada penilaian baik, begitupun dengan dimensi lainnya seperti dimensi doktrin, program, sumber-sumber daya, struktur intern, kaitan memungkinkan, kaitan fungsional, kaitan normatif dan kaitan tersebar, 2. Meskipun klasifikasi penilaian terhadap semua dimensi pengembangan kelembagaan berada pada kategori baik, akan tetapi menurut hasil wawancara dengan responden masih ada beberapa dimensi yang harus ditingkatkan lagi dalam pengembangan kelembagaan tata kelola hutan taman nasional gunung halimun salak seperti dimensi sumber-sumber daya program, kaitan normatif dan kaitan tersebar.	1. Pengembangan kelembagaan tata kelola hutan taman nasional gunung halimun salak pada dasarnya sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada yang perlu untuk di tingkatkan. Hal yang kiranya harus mendapatkan perhatian yang lebih adalah dimensi sumber-sumber daya, program, kaitan normatif dan kaitan tersebar. 2. Harus adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Balai TNGHS, peningkatan kualitas pegawai bisa dengan cara uji kompetensi dan pembinaan untuk setiap pegawai. Serta dengan didukungnya sumber dana yang memadai. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang seperti mess pegawai, kantor resort, pondok jaga, sarana pelaksanaan tugas lapangan sudah tidak layak pakai sehingga perlu perbaikan dan atau pergantian seperti alat transportasi, alat komunikasi, dan alat pemadam kebakaran hutan. 4. Meningkatkan pelaksanaan program yang sudah dilakukan oleh TNGHS, pihak Taman Nasional harus lebih aktif lagi turun kelapangan untuk melakukan pengawasan setiap pelaksanaan program jangan sampai mulus dilaporan tapi gagal di lapangan. Terus melakukan sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat. 5. Harus meningkatkan koordinasi mengenai hutan konservasi dengan pemerintahan setempat, bekerjasama mensosialisasikan tentang hutan konservasi kepada masyarakat. 6. Diharapkan pihak Taman Nasional bisa lebih meningkatkan hubungan dengan masyarakat dengan cara membuat jadwal pertemuan rutin, duduk bersama membicarakan jalan keluar tentang permasalahan-permasalahan yang ada, karena dengan adanya pengakuan dan dukungan dari masyarakat pelaksanaan dalam setiap pengelolaan pun akan berjalan maksimal..
271	Fahmi Hakim;2015;Tesis	Strategi Kebijakan dalam Restorasi Koridor Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Sukabumi)	1. Pemangku kepentingan (stakeholders) dalam aksi restorasi Koridor Halimun-Salak teridentifikasi 26 aktor yang terdiri dari 13 kantor di Pemerintah Pusat, 3 SKPD di Pemerintah Provinsi dan 10 SKPD di Pemerintah Kabupaten. Teridentifikasi 15 aktor pada kelompok BUMN/Swasta, 4 Aktor kelompok lembaga pendidikan dan 11 aktor organisasi non pemerintah/LSM, sehingga total stakeholders yang teridentifikasi dalam aksi restorasi ekosistem di TNGHS pada wilayah sukabumi adalah 56 pemangku kepentingan (stakeholders). Terpetakan 2 aktor yang menjadi aktor kunci (keyplayers) dengan kepentingan dan pengaruh yang tinggi sehingga untuk restorasi jangka panjang perlu secara aktif dikelola, berkoordinasi dan dijaga hubungannya agar dapat terus mendukung tujuan yang diharapkan. 30 aktor yang menjadi subject dengan kepentingan tinggi dan pengaruh rendah oleh karena itu penting secara rutin diberikan informasi mengenai aksi restorasi dan berkoordinasi. 20 aktor tergolong context setter dengan kepentingan rendah dan pengaruh tinggi sehingga perlu dipantau dan dikelola agar tetap memiliki hubungan baik, karena berpotensi memberikan resiko negatif terhadap tujuan yang ingin dicapai dan 4 aktor menjadi crowd dengan kepentingan dan pengaruh rendah yang tidak dapat diabaikan sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.	Penelitian ini melihat tindakan kebijakan yang dapat dilakukan dalam mewujudkan restorasi ekosistem berkelanjutan di Koridor Halimun-Salak. Pandangan dari bidang keilmuan yang lain dan penguatan hubungan antar pihak akan semakin mempertajam implementasi serta memperkaya rekomendasi bagi pihak taman nasional. Kaitannya dengan restorasi ekosistem di Koridor Halimun Salak, saran yang dapat disampaikan antara lain: 1. Revitalisasi strategi komunikasi antara pengelola taman nasional dengan pemangku kepentingan yang lain untuk memperkuat pengelolaan TNGHS. 2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat keberhasilan implementasi restorasi yang telah berjalan sebagai bahan evaluasi.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
			2. Opsi strategi kebijakan yang disusun setelah mengetahui persoalan konsep dan kebijakan restorasi ekosistem, masalah tenurial dan tata kelola hutan serta efektivitas peran para pihak dalam implementasi restorasi ekosistem di Koridor Halimun Salak, adalah dengan menyusun konsep, kebijakan dan regulasi tingkat nasional yang akan menjadi acuan dalam implementasi restorasi ekosistem yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Opsi berikutnya adalah melakukan penguatan tata kelola kemitraan dengan berbagai pihak dan kebijakan tenurial di TNGHS sehingga fungsi esensial kawasan KHS tetap terjaga. Kemudian, menyusun strategi mobilisasi sumber daya para pihak dalam restorasi ekosistem agar terdapat sinergisitas, efektivitas dan duplikasi kegiatan serupa sehingga aksi restorasi ekosistem di KHS dan TNGHS pada umumnya akan berkesinambungan.	
272	Sri Desti Purwatiningsih;2015;-Jurnal	Communication strategy for Better Understanding Community on Conservation Forest at National Park Halimun Salak (Strategi komunikasi untuk Pemahaman Masyarakat tentang Konservasi yang Lebih Baik Hutan di Taman Nasional Halimun Salak)	Developing and working with stakeholders and social networking in developing and expanding natural attractions can increase income communities around Conservation Forest agreement between the governing forestry TNGHS. Mengembangkan dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan membangun jejaring sosial dalam mengembangkan dan memperluas objek wisata alam dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar perjanjian Hutan Konservasi antara TNGHS. Membuat (BTNGHS) dengan mengadopsi peraturan hutan masyarakat dan undang-undangyang jelas dalam upaya untuk mengatasi pelanggaran dalam pemanfaatan dan konservasi TNGHS pengelolaan hutan.	Improve the quality and quantity of the Department of Forestry in the Department of Forestry outreach efforts in the community empowerment in the management of Conservation Forest TNGHS tailored to regional extents. And expand access to public information in obtaining information about forest utilization and conservation of forest TNGHS. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Dinas Kehutanan di Dinas Kehutanan dalam melakukan upaya penjangkauan di lingkungan pemberdayaan masyarakat di pengelolaan Hutan Konservasi TNGHS disesuaikan dengan wilayah regional. Dan memperluas akses ke publik sehingga informasi pemanfaatan hutan dan konservasi TNGHS hutan.
273	Zakiyyah;2016;Tesis	Sikap Masyarakat dan Stimulus Konservasi Pakis Sayur (Dyplazium esculentum (Retz.) Sw) di Desa Gunung Bunder II, Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Sikap konservasi masyarakat terhadap pakis sayur dinyatakan belum terwujud karena terjadi bias sikap pada stimulus alamiah, stimulus manfaat, dan stimulus rela. Bias sikap ialah informasi atau sinyal tri stimulus amar tidak terbentuk menjadi sikap masyarakat. Stimulus alamiah pakis sayur mengenai lama pertumbuhannya belum dipahami bagi masyarakat sehingga stimulus yang seharusnya bisa menjadi sikap tidak terjadi. Stimulus manfaat pakis sayur sebagai obat sakit diare dan asma serta mencegah longsor belum diketahui oleh masyarakat sehingga stimulus manfaat tersebut tidak menjadi sikap konservasi bagi masyarakat. Stimulus rela pada masyarakat tidak menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menanam pakis sayur. 2. Faktor yang mempengaruhi stimulus rela masyarakat untuk mewujudkan aksi konservasi pakis sayur yakni: • Tidak adanya kerelaan masyarakat untuk melakukan penanaman kembali pakis sayur • Keterbatasan lahan garapan untuk menanam di lahan pribadi • Jaminan akses bagi masyarakat lokal untuk dapat memungut pakis sayur di hutan belum dapat dirasakan karena adanya ketidaksejalanan antara pihak taman nasional dan masyarakat. • Tidak adanya pengawasan dan pembinaan bagi masyarakat lokal untuk melakukan penanaman kembali di area hutan • Keterampilan menanam dan membudidayakan pakis sayur di hutan belum dimiliki oleh masyarakat 3. Aksi konservasi pakis sayur oleh masyarakat belum terwujud secara nyata sepenuhnya. Aksi konservasi yang sudah terwujud di antaranya adalah memanen sebagian pakis sayur yang ada di area terbanyak, memanen kembali pakis sayur dalam jangka waktu kurang dari dua minggu, dan tidak memanen kembali pakis sayur dengan mencabutnya hingga akar.	1. Perlu dilakukan penyuluhan dan pendampingan mengenai stimulus alamiah budidaya pakis sayur oleh Kementarian Pertanian dan stimulus manfaat pakis sayur sebagai tumbuhan obat oleh Kementerian Kesehatan. 2. Membangun kerjasama antara petani lokal pemungut pakis sayur dengan Kementarian perdagangan. Petani lokal pemungut pakis sayur ialah sekolompok pembudidaya pakis sayur di hutan yang telah terdidik dan tercatat sebagai pemungut lestari oleh Kementarian Kehutanan. 3. Menyempurnakan kebijakan yang berlaku dengan menerapkan konsep pemahaman stimulus alamiah dan stimulus manfaat bagi masyarakat lokal sekitar taman nasional. 4. Melakukan perubahan kelembagaan dengan pembangunan taman nasional sebagai unit operasional pengelolaan hutan yang dikelola dan dikontrol secara efektif dengan melibatkan masyarakat lokal.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
274	Bayu Gagat Prasasti;2016;Tesis	Faktor Penentu Keberlanjutan dan Strategi Pemanfaatan Lahan di Lokasi Purnawirawan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Hasil AHP terhadap persepsi pakar menunjukkan bahwa faktor yang paling memengaruhi pemanfaatan lahan di Lokapurna adalah faktor lingkungan, diikuti faktor sosial dan terendah yaitu faktor ekonomi. Variabel yang paling memengaruhi faktor lingkungan yaitu kelestarian tata air dan kelestarian ekosistem. Pada faktor sosial, variabel yang paling memengaruhi adalah keadilan dan sejarah kawasan. Variabel yang paling berpengaruh pada faktor ekonomi adalah ketersediaan akses dan potensi wisata 2. Alternatif strategi pemanfaatan lahan di Lokapurna berdasarkan faktor – faktor penentu keberlanjutan pemanfaatan lahan adalah pengembangan wisata secara kolaboratif.	1. Perlu dilakukan pendampingan dari BTNGHS, Pemda, dan LSM kepada masyarakat dalam pengembangan kawasan Lokapurna. 2. Pengelola TNGHS berperan aktif dalam keberlanjutan pemanfaatan lahan di Lokapurna. 3. Perlu ada nota kesepahaman antara pengelola TNGHS dengan masyarakat dalam pemanfaatan lahan di Lokapurna.
275	Nurman Hakim;2016;Jurnal	Konflik Penggunaan Lahan Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kabupaten Lebak	Analisis spasial preferensi penggunaan lahan dapat memberikan informasi mengenai pengetahuan dan nilai seseorang atau kelompok dalam memandang suatu lahan. Identifikasi konflik penggunaan lahan melalui analisis konflik preferensi memberikan informasi dimana saja area yang mengalami konflik pengetahuan dan nilai. Informasi tersebut meliputi komposisi (jenis tipologi dan luasannya) dan konfigurasi (sebaran dan posisi relatifnya terhadap satu sama lain). Pendekatan ini memiliki batasan yakni mensyaratkan adanya verifikator data spasial pada setiap kriteria yang digunakan. Sebagai kawasan yang difungsikan untuk konservasi, area TNGHS mengandung preferensi penggunaan lahan untuk tujuan non konservasi baik untuk pertanian, permukiman atau pertambangan. Tipologi A (Tutupan bukan hutan, preferensi non konservasi dominan) dan tipologi B (Tutupan bukan hutan, preferensi konservasi dominan) memberikan gambaran aktual konflik penggunaan lahan. Tipologi A dan B mengindikasikan kemampuan masyarakat mengakses manfaat hutan dengan berbagai cara dan prosesnya, sedemikian rupa mampu merubah tutupan hutan menjadi bukan hutan. Tipologi C (Tutupan hutan preferensi non konservasi dominan) dan tipologi D (Tutupan hutan preferensi konservasi dominan) memberikan gambaran lokasi potensial konflik karena kandungan manfaatnya untuk penggunaan non konservasi Terdapat 11 isu dalam 3 agenda yang satu sama lain saling berhubungan. Agenda tenurial dan lingkungan, serta agenda pembangunan wilayah memiliki pengaruh terhadap kebijakan penggunaan lahan dan fisik tutupan lahan. Agenda mitigasi merupakan konsekuensi yang harus disiapkan terhadap apapun yang diputuskan atau disepakati pada kedua agenda sebelumnya. Dari keseluruhan isu yang ada, persoalan tenurial dan kerusakan lingkungan merupakan agenda yang paling prioritas untuk ditangani	Disadari bahwa solusi-solusi yang terkesan konkret namun simplistik tidaklah sederhana dan mudah dalam pelaksanaannya. Terlebih dalam konteks pengelolaan wilayah dimana kebutuhan ruang untuk konservasi, produksi dan permukiman harus terpenuhi. Pernyataan klasik yang diajukan Odum (1969), "how do we determine when we are getting too much of good thing" merupakan hal pertama yang harus dijawab oleh masingmasing pihak sebelum memutuskan tindakan yang berakibat kepada konflik lahan. Saran yang diajukan oleh penelitian ini kepada pihak terlibat konflik adalah menyelenggarakan sebanyak mungkin ruang dialog. 11 isu strategis dan peta konflik preferensi diajukan sebagai materi yang dibicarakan dalam forum tersebut untuk menentukan prioritas isu per lokasi dan pembagian peran
276	Christian Lund, dkk;2017;Jurnal	Indirect Recognition, Frontiers and Territorialization around Mount Halimun-Salak National Park, Indonesia	In the case of conservation in the Mount Halimun-Salak National Park, we find that rather than one overarching recognition of a single direct spatial claim to property, a web of direct and indirect claims for recognition emerges between and among claimants and institutions. If direct claims to resources are impossible to pursue, people lodge indirect claims. In everyday situations, indirect recognition can perform important legal and political work. After the authoritarian New Order regime, in particular, claims to citizenship worked as indirect property claims, and indirect recognition of such claims are important because they serve as pragmatic proxies for formal property rights. Two case studies examine how people struggle over the past, negotiating the constraints of social propriety for legitimation and indirect recognition of their claims.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
277	Agus Rusmana;2017;Jurnal	Pengembangan Kelembagaan Tradisonal Masyarakat Daerah Sebagai Penyangga Hutan Untuk Pelestarian Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)	1. Masyarakat dalam hal ini masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pembangunan pedesaan di Kecamatan Cisolok ternyata memainkan peranan yang sangat signifikan, berupa pemunculan ide-ide, identifikasi dan perumusan masalah, pelaksanaan hingga evaluasi yang terkadang dilaksanakan bersama-sama dengan lembaga desa seperti LKMD dan BPD. 2. Media sosial sebagai suatu media komunikasi yang hidup dan berkembang di masyarakat, memungkinkan terjadinya integrasi antara pihak-pihak yang berkomunikasi sehingga dapat juga sebagai media komunikasi pembangunan. 3. Menipisnya kepercayaan kepada pengurus desa menjadi penghambat terciptanya komunikasi yang dialogis. Media pertemuan di tingkat desa yang tidak secara rutin terselenggara dan sistem perwakilan (memungkinkan terjadinya distorsi pesan) menyebabkan masyarakat merasa enggan untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 4. Dalam peta pembangunan, Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) berada pada ranah perencanaan sosial. Model ini tidak lagi berbasiskan inisiatif lokal, tetapi dibangun atas perencanaan sosial yang dilakukan oleh berbagai kekuatan formal maupun informal. Keduanya menjalin sinergi yang harmonis dalam mendinamiskan peran sosial TNGHS.	
278	Hanifa Rakhmawati;2017;Tesis	A Spatial Ecological Assessment of Fragmentation and Disturbance Effects of Infrastructure Construction and Land Conversion in Gunung Halimun Salak National Park, Indonesia	Berdasarkan hasil yang diperoleh dan analisisnya, kesimpulannya sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil analisis tutupan lahan, selama masa studi lima belas tahun, area kelas pertanian dan pembangunan meningkat, sementara hutan dan padang rumput menurun. Hutan dan Pertanian mengalami penurunan dan kenaikan terbesar sebesar 35,36% dan 463,74% masing-masing. 2. Di antara tiga zona hutan di TNGHS, zona Collin mengalami 3. berkurangnya luas lahan, sebesar 44,93%, yang menunjukkan bahwa mayoritas deforestasi dan perambahan hutan terjadi terutama di hutan submontane (hutan pegunungan bawah) yang terletak di ketinggian antara 500–1000 m. 4. Berdasarkan analisis metrik lanskap hutan, selama periode studi lima belas tahun, terdapat angka penurunan signifikan sekitar 30% untuk kawasan kelas hutan, diikuti oleh metrik lainnya yang juga mengalami penurunan, yaitu Mean Patch Size (MPS), S), Patch Size Coefficient of Variation (PSCoV), Mean Shape Index (MSI), Mean Core Area (MCA) dan Mean Proximity index (MPI). Sebaliknya, Number of Patch (NP) dan Edge Density (ED) meningkat secara substansial masing-masing sebesar 35,49% dan 25,07%. 5. Berdasarkan analisis metrik lanskap pada tiga zona hutan di TNGHS, terdapat penurunan signifikan dalam ukuran MPS di zona hutan Collin dan Pegunungan Hutan bawah, masing-masing sebesar 70,47% dan 65,51%. Sebaliknya, NP dan ED meningkat secara substansial di kedua zona ini, dengan peningkatan tertinggi 6. terjadi di zona submontane: 175% untuk NP dan 51,22% untuk ED. Dengan demikian, dua zona ditemukan jauh lebih terfragmentasi dibandingkan dengan zona montane yang ditemukan menjadi hutan yang paling tidak terfragmentasi di TNGHS 7. Di antara tiga zona hutan, proporsi hutan zona Collin yang lebih besar (37,14% untuk mamalia dan 4,91% untuk burung) dan hutan zona submontane (20,17% untuk mamalia dan 2,91% untuk burung) terletak di zona dengan intensitas gangguan jalan tertinggi dengan prediksi Mean Species Abundance (MSA) < 0,5,. Dengan demikian, disarankan bahwa hutan zona Collin paling dipengaruhi oleh efek gangguan jalan. Sebagai tambahan, Zona Collin dan zona submontane secara proporsional lebih sering dilalui ea mamalia dan burung, daripada hutan pegunungan (Montane) 6. Mengabaikan efek fragmentasi dan gangguan pada mamalia dan burung, keberdadaan mamalia hutan-padang rumput (area yg tinggi dan area menengah), mamalia hutan (area yang berada di bawah 1500 m dan di atas 1500 m) dan jenis burung di kawasan hutan adalah sama, kecuali mamalia kecil yang membutuhkan luas hutan yang berada di bawah 1500 m. 7. Penilaian ekologi berbasis GIS telah terbukti efektif dalam menghasilkan informasi dan prediksi kasar tentang kemungkinan konsekuensi infrastruktur pengembangan. Dengan demikian, hasil dari pendekatan ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan 8. langkah-langkah konservasi yang tepat, serta untuk mengembangkan mitigasi dan manajemen strategi dalam TNGHS	Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, berikut saran untuk penelitian di masa depan dibuat: 1. Studi lanjutan dengan citra satelit resolusi lebih baik harus dilakukan untuk 1. mencapai pemetaan pada tingkat yang lebih rinci, memberikan kesan jangka panjang tentang tutupan lahan perubahan dan peningkatan inventaris sumber daya tanah di GHSNP untuk perencanaan danPemantauan 2. Eksplorasi pendekatan klasifikasi lain yang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik, pertimbangan kompleksitas jenis tutupan lahan di TNGHS harus dilakukan. 3. Dalam analisis saat ini, pilihan metrik yang digunakan tampaknya memberikan hasil yang terbaik atau interpretasi optimal dari perubahan struktur lanskap. Hasil l lengkap dan menyeluruh uji metrik lanskap yang dipilih atau potensial (dan lainnya saat dikembangkan atau tersedia) harus dilakukan untuk mengungkapkan metrik yang paling sensitif terhadap jenis perubahan yang ditemui di lanskap yang sedang dipelajari 4. Data kesesuaian habitat yang lebih menyeluruh dari setiap profil ekologis harus dikumpulkan juga sebagai pengukuran lapangan kelimpahan spesies rata-rata (MSA) dari setiap profil ekologis. demikian data kemudian dapat dibandingkan dengan MSA mamalia dan burung oleh Benítez-López dkk. (2010) atau model efek jalan lainnya. 5. Tersedia kebutuhan umum (tetapi kuat) dari verifikasi dan kalibrasi spasial yang relevan dengan model dan metode ekologis, khususnya model penyebaran dan gerakan, spesies model distribusi dan model kesesuaian habitat 6. Pemodelan koridor migrasi untuk spesies hewan yang diprioritaskan bisa menjadi topik penelitian yang baik seperti prediksi kelompok hewan mana yang kemungkinan besar terkena dampak sekarang dapat diketahui.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
279	M.Q. Huy;2017;Jurnal	Devising a Guideline for Conservation Education for Secondary Students	The guideline proposed herein is incomplete as students are likely to do best with what they are equipped with. The key to using any guideline rests with the need and context itself, as the previously published guideline was not consistent with what was needed, especially at Thua Thien Hue Province, as they have already promoted youth and students toward biodiversity management, but this guideline will only help them to organize better. The interviews conducted among stakeholders indicate that many of the issues could be better managed with a dialog, which is something additional the facilitator should promote. Designing a guideline for nature conservation education is important in the way it equips necessary preconditions for successful implementation in schools. This can be a good reference material for environmental managers, conservationists, environmental researchers, lecturers, and students of natural resource management. This guideline aids in solving difficulties encountered by educators due to the lack of guiding material. However, this guideline needs to be further improved in a way that nature and human psychology are dynamic and associated issues that vary concomitantly. This guideline serves only as general supervisory material; facilitators/educators must improve other training materials based on local needs and demand. The use of local and regional environmental materials needs to be encouraged. Specifically, educators should initiate new ideas to organize attractive and effective conservation ideas. The implementation of conservation education requires active participation of key stakeholders in the provinces and districts. A network should be established and coordinated with suitable representatives from relevant organizations	
280	Rido Agusman;2019;Skripsi	Perubahan dan Keselarasan Tutupan/ Penggunaan Lahan terhadap Rencana Pola Ruang dan Fungsi Kawasan Hutan di Desa Malasari	1. Di Desa Malasari terdapat 13 jenis tutupan/penggunaan lahan yaitu badan air, emplasmen, hutan kerapatan Tinggi, hutan kerapatan rendah, kebun campuran, lahan terbuka, pemukiman penduduk padat, pumukiman penduduk sedang, perkebunan teh, sawah, semak belukar, tegalan, villa. Dari 13 jenis tutupan/penggunaan lahan di Desa Malasari tutupan/penggunaan lahan terbesar adalah hutan kerapatan tinggi seluas 4,424.98 ha (72.48%) dan terendah adalah badan air seluas 1.94 ha (0.03%). Selama rentang waktu dari tahun 2010-2019 ada 30 kombinasi pola perubahan tutupan/penggunaan lahan di Desa Malasari. Perubahan tutupan/penggunaan lahan terbesar adalah hutan kerapatan tinggi menjadi hutan kerapatan rendah seluas 10.21 ha. 2. Desa Malasari hanya memiliki 4 rencana pola ruang yaitu enclave kawasan hutan, hutan lindung, hutan konservasi, dan kawasan peruntukan perkebunan. Luas tutupan/penggunaan lahan yang selaras dengan rencana pola ruang adalah sebesar 4,986.73 ha (81.75%), luas tutupan/penggunaan lahan yang tidak selaras dengan rencana pola ruang adalah sebesar 1,088.10 ha (17.84%), dan luas tutupan/penggunaan lahan yang berstatus transisi dengan rencana pola ruang adalah sebesar 24.86 ha (0.41%). Selain itu, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak mengalami perubahan status kawasan dan batas kawasan. Pada tahun 2016 Desa Malasari mengalami penambahan fungsi sebagai hutan lindung seluas 483.24 ha dan penambahan luasan areal penggunaan lain seluas 666.41 ha.	1. Agar ketidakselarasan rencana pola ruang di Desa Malasari tidak terjadi maka diperlukan adanya pemaduserasian antara penggunaan lahan dengan rencana pola ruang dan status kawasan hutan. 2. Penyusunan rencana tata ruang perlu mengikutkan peran masyarakat maupun pihak aparat desa sehingga rencana pola ruang dan status kawasan hutan dapat sesuai dengan realita lapangan.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
280			3. Fungsi kawasan hutan di Desa Malasari ada 3 fungsi kawasan yaitu kawasan konservasi, kawasan lindung, dan kawasan areal penggunaan lain. Fungsi kawasan hutan yang selaras dengan tutupan/penggunaan lahan seluas 5,854.40 ha (95.90%) dan tidak selaras seluas 250.52 (4.10%). Hasil analisis keterkaitan tutupan/penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang dan status fungsi kawasan hutan menunjukkan seluas 4,986.73 ha tutupan/penggunaan lahan, rencana pola ruang, dan fungsi kawasan selaras. Di sisi lain, persentase ketidakselarasan ketiganya sekitar 15%. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakselarasan antara peraturan tata ruang kabupaten dengan fungsi kawasan hutan.	
281	Iwan Kurniawan;2019;Tesis	Delinasi dan Arahan Penggunaan Lahan Daerah Penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Perubahan penggunaan/penutupan lahan di dalam kawasan TNGHS wilayah Kabupaten Bogor dan kecamatan penyangganya antara tahun 2005-2015 berupa penurunan luasan: hutan lahan kering primer seluas 937 ha (-2.45%), hutan lahan kering sekunder seluas 735 ha (-3.23%), kebun campuran seluas 938 ha (-9.47%), dan lahan pertanian seluas 886 ha (-4.11%) serta kenaikan luasan: perkebunan seluas 219 ha (4.17%), permukiman seluas 3,027 ha (75.21%) dan semak belukar seluas 249 ha (25.31%). 2. Penggunaan/penutupan lahan di dalam kawasan TNGHS wilayah Kabupaten bogor dan kecamatan penyangganya pada tahun 2025 diprediksi berupa hutan lahan kering primer seluas 36,570 ha (35.43%), hutan lahan kering sekunder seluas 21,091 ha (20.43%), kebun campuran seluas 7,946 ha (7,70%), perkebunan seluas 5,724 ha (5,55%) , permukiman seluas 10,223 (9.90%), lahan pertanian seluas 19,669 ha (19.05%), semak belukar seluas 1,477 ha (1.43%) dan tubuh air seluas 527 ha (0.51%). Lahan yang rentan atau sensitif mengalami perubahan antara tahun 2005-2015 adalah lahan-lahan pada kawasan hak guna usaha (HGU), batas kawasan TNGHS, batas kawasan hutan lindung dan hutn produksi serta lahan pertanian dan kebun campuran. Tren perubahan penggunaan/penutupan lahan antara tahun 2015-2025 yang perlu diwaspadai dan segera dikendalikan karena cenderung mengancam keberadaan kawasan TNGHS adalah tren perubahan penggunaan/penutupan lahan menjadi hutan lahan kering sekunder di Kecamatan Sukajaya dan Nanggung; tren perubahan penggunaan/penutupan lahan menjadi perkebunan di Kecamatan Jasinga dan Sukajaya; tren perubahan penggunaan/penutupan lahan menjadi lahan pertanian di Kecamatan Nanggung, Leuwiliang, dan Pamijahan; serta tren perubahan penggunaan/penutupan lahan menjadi semak belukar di Kecamatan Nanggung dan Pamijahan. 3. Daerah penyangga potensial kawasan TNGHS wilayah Kabupaten Bogor seluas 41,646 hektar yang tersebar pada 74 desa di 10 kecamatan berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi dan areal hutan lainnya yang secara geografis berbatasan dan atau terhubungkan dengan kawasan TNGHS di wilayah Kabupaten Bogor seluas 17,028 ha; areal penyebaran satwa liar dan tumbuhan dilindungi di luar kawasan TNGHS yang secara geografis berbatasan dan atau terhubungkan dengan kawasan TNGHS di wilayah Kabupaten Bogor seluas 7,962 ha; Desadesa yang secara geografis wilayahnya berbatasan dan atau terhubungkan dengan kawasan TNGHS di wilayah Kabupaten Bogor sehingga penggunaan lahan dan aktivitas masyarakatnya berpotensi mempengaruhi kawasan TNGHS seluas 10,174.69 ha; kawasan lindung non hutan yang secara geografis berbatasan dan atau terhubungkan dengan kawasan TNGHS di wilayah Kabupaten Bogor seluas 25,614 ha, serta wilayah yang memenuhi nilai skoring sebagai hutan lindung dan hutan produksi terbatas serta secara geografis berbatasan dan atau terhubungkan dengan kawasan TNGHS di wilayah Kabupaten Bogor seluas 11,029 ha 4. Arahan penggunaan lahan pada daerah penyangga kawasan TNGHS di wilayah Kabupaten Bogor terdiri dari l4 tipe arahan penggunaan lahan yaitu: hutan lindung seluas 3,640 ha (8.74%), hutan produksi terbatas seluas 75 ha (0.18%), hutan produksi tetap seluas 28 ha (0.07%), hutan rakyat seluas 4,080 ha (9.80%), kawasan industri seluas 897 ha (2.15%), perkebunan seluas 7,301 ha (17.53%), permukiman perdesaan seluas 606 ha (1.46%), permukiman perkotaan kepadatan rendah seluas 993 ha (2.38%), permukiman perkotaan kepadatan sedang seluas 202 ha (0.49%), permukiman perkotaan kepadatan tinggi seluas 140 ha (0.34%), pertanian lahan basah seluas 3,723 ha (8.94%), pertanian lahan kering seluas 2,420 ha (5.81%), tanaman tahunan seluas 17,262 ha (41.67%) dan tubuh air seluas 279 ha (0.67%).	1. Perlu dilakukan penelitian tentang sosial ekonomi masyarakat pada daerah penyangga potensial kawasan TNGHS wilayah Kabupaten Bogor yang telah dideliniasi oleh penelitian ini sehingga dapat dirumuskan strategi pemanfaatan lahan yang lebih terperinci seperti pemilihan komoditas pertanian, tanaman tahunan dan perkebunan yang sesuai dikembangkan pada daerah penyangga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan TNGHS. 2. Apabila pada masa yang akan datang diadakan penelitian prediksi perubahan penggunaan/penutupan lahan pada wilayah penyangga kawasan TNGHS, perlu ditambahkan data faktor-faktor pendorong perubahan penggunaan/penutupan lahan yang terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat antara lain berupa kondisi sebaran kepadatan tenaga pertanian, kondisi mata pencaharian utama penduduk, dan sebagainya yang belum digunakan dalam penelitian ini.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
282	Flamora Gresafira Cahya;2020;Skripsi	Dampak Penetapan Taman Nasional Gunung Halimun Salak: Perubahan Startegi Penghidupan Masyarakat Konservasi (Studi Kasus: Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat)	Masyarakat tepian kawasan konservasi TNGHS secara turun-menurun telah mengakses SDH kawasan konservasi TNGHS selama kurang lebih 58 tahun yakni sejak tahun 1961 hingga saat ini. Meski telah berubah status menjadi kawasan konservasi, masyarakat tepian konservasi di Desa Cihamerang masih dapat mengakses hutan TNGHS dengan mendapatkan toleransi dari pihak balai dan keputusan pemerintah pusat karena sudah mengakses hutan secara turun-menurun sebelum ditetapkannya kebijakan taman nasional. Tingkat akses terbagi atas tiga dimensi yakni perolehan aliran manfaat, pemeliharaan aliran manfaat, dan pengendalian aliran manfaat. Dimensi tingkat perolehan aliran manfaat pada masyarakat Desa Cihamerang berdasarkan data penemuan lapang menunjukkan bahwa tidak ada satupun masyarakat Desa Cihamerang yang tinggi akses perolehan manfaatnya, yakni 20 responden atau 66.7 persen pada tingkat rendah dan sebanyak 10 responden atau 33.3 persen berada pada tingkat sedang. Kemudian pada dimensi pemeliharaan aliran manfaat hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas berada pada tingkat sedang yakni sejumlah 29 responden dan satu responden memiliki pemeliharaan aliran manfaat yang rendah. Terakhir pada dimensi pengendalian aliran manfaat, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Cihamerang berada pada tingkat sedang yakni sebanyak 16 responden atau 53.3 persen, selanjutnya tingkat rendah sebanyak 13 responden atau 43.3 persen, \dan terakhir satu responden atau 3.3 persen pada tingkat tinggi. Petani penggarap lahan kawasan konservasi dalam memepertahankan akses terhadap SDH di lahan konservasi, selain memang keterlanjuran secara turun-menurun, yakni melalui hubungan-hubungan sosial dengan petugas pengelola kawasan. Hubungan sosial ini dalam bentuk sebuah sosialisasi aturan dan sangsi yang berlaku oleh pengelola yang berisi bahwasanya masyarakat masih diizinkan beraktivitas pertanian dengan syarat tidak boleh membuka lahan baru dan menanam pohon untuk penghijauan. Apabila terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut, maka pihak balai akan meminta pelanggar untuk mengeluarkan surat pernyataan yang berisi agar tidak mengulangi tindakannya dan mengembalikan lahan pada kondisi semula. Sebagai respon atas dinamika rezim hutan yang merupakan sumber penghidupan namun kini menjadi hutan konservasi taman nasional, maka masyarakat tepian konservasi membentuk strategi penghidupan. Penghidupan masyarakat tepian kawasan konservasi dalam penemuan lapang menjelaskan bahwa telah terjadi peningkatan positif pada tingkat rekayasa sumber penghidupan yang dilakukan petani penggarap lahan konservasi TNGHS di Desa Cihamerang. Hal tersebut terbukti bahwa terdapat 27 responden atau 90 persen yang mengalami peningkatan dalam merekayasa sumber penghidupan. Selain itu, meningkatnya rekayasa sumber penghidupan yang dilakukan petani penggarap dibuktikan dengan perbandingan rata-rata skoring pada data sebelum ditetapkannya taman nasional dan data setelah ditetapkannya taman nasional masingmasing yaitu 1.83 dan 2.83. Berbeda hal dengan strategi penghidupan lainnya yakni usaha penghidupan ganda, berdasarkan penemuan lapang, mayoritas responden tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 24 responden atau 80 persen. Rata-rata skoring pada data sebelum ditetapkannya taman nasional adalah 1.53 dan rata-rata skoring pada data setelah ditetapkannya taman nasional sebesar 1.37. Tidak adanya perubahan pada penghidupan ganda juga dibuktikan pada p.value antara tahun sebelum dan sesudah penetapan taman nasional yaitu sebesar 0.16 pada uji beda non-parametrik Wilcoxon 61 Signed Ranks Test. dimana angka tersebut menunjukkan lebih dari batas kritis 0.05 yang artinya tidak terjadi perubahan signifikan. Seluruh dimensi tingkat akses masyarakat tepian konservasi terhadap sumber daya hutan dihubungkan dengan dua bentuk strategi penghidupan. Hubungan perolehan aliran manfaat dengan rekayasa sumber penghidupan tergolong pada hubungan moderat dengan nilai 0.316 namun tidak signifikan. Selanjutnya, hubungan lemah dan tidak signifikan terdapat pada subvariabel lainnya seperti pemeliharaan aliran manfaat dengan rekayasa sumber penghidupan bernilai korelasi -0.083, pengendalian aliran manfaat dengan rekayasa sumber penghidupan bernilai korelasi -0.183, perolehan aliran manfaat dengan penghidupan ganda bernilai korelasi -0.279, dan pemeliharaan aliran manfaat dengan penghidupan ganda bernilai korelasi 0.111. Sedangkan hubungan antara pengendalian aliran manfaat dan penghidupan ganda berhubungan kurang berarti dan tidak signifikan dengan nilai korelasi 0.018.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
283	Astrid Damayanti;2020;Jurnal	Development of Population Activities In Sukarame Village In The Strict Regulations of The Mount Halimun Salak National Park: Case Study of Sukarame Village, Cisolok Sub-District, Sukabumi Regency	In Sukarame Village, it can be seen that accessibility and development are minimal, but it cannot be denied that economic activity can still develop due to PETI. Social movements can even improve with the existence of active social organization activities. Wisdom created by the customary order of the community also enriches activities that can occur in the Mount Halimun Salak National Park area. In Langkob Hamlet the community has a dynamic characteristic, in hamlet two it has a variety of activities, in hamlet three it has an adaptive community characteristic, and in Pamokoan Hamlet, it has the features of a community that is still strongly influenced by customs and culture. So it can be concluded that the development and accessibility in Sukarame Village located in the national park area are indeed limited, but human activity can still develop depending on the local community accepting the path of modernization and exploiting the potential and existing local wisdom	
284	Rizmoon Nurul Zulkarnaen, dkk;2020;Jurnal	Efektivitas pengelolaan lanskap Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan lanskap Taman Nasional Gunung Halimun Salak tergolong efektif. Keberadaan lanskap TNGHS juga mendukung habitat tumbuhan dan satwa asli TNGHS	
285	Adhitiya Muktafa Adnan Musaddad;2021;Jurnal	Perubahan Penguasaan Lahan Sesudah Penetapan Hutan Adat (Kasus : Kasepuhan Karang, Banten)	1. Perjuangan masyarakat adat Kasepuhan Karang dimulai sejak era Perum Perhutani tahun 1978. Saat itu Perum Perhutani tidak membatasi akses masyarakat terhadap hutan, namun memungut pajak sebesar 1/10 dari hasil pertanian yang didapat. Setelah Perhutani, pada tahun 1992, wilayah Kasepuhan Karang berada dibawah Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang pada tahun 2003 diperluas hingga 113.357 ha. Taman nasional memang tidak meminta pungutan kepada masyarakat, namun secara langsung membatasi akses masyarakat atas kawasan hutan garapan. Masyarakat yang tertangkap tangan mengambil ranting pun dibawa ke kantor taman nasional dan diminta ganti rugi oleh pihak taman nasional. Rasa takut akan menggarap pun mulai melonjak. Namun masih ada beberapa masyarakat yang menggarap lahan secara sembunyi-sembunyi. Titik balik ketakutan tersebut terjadi pada pertemuan antara RMI dan kepala desa pada tahun 2011. Semenjak itu, perjuangan semakin menemukan titik terang dan pada tahun 2013, seluruh gugatan masyarakat disahkan melalui Putusan MK. Nomor 35/PUU-X/2012. 2. Pada karakteristik masyarakat adat, mayoritas responden berada pada rentang usia 40 tahun hingga 50 tahun. Responden yang memiliki posisi dalam masyarakat adat didominasi oleh baris kokolot. Hal ini dikarenakan baris kokolot memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan posisi-posisi masyarakat adat yang lain, karena baris kokolot sudah ditugaskan oleh Abah untuk menyampaikan keperluan informasi tertentu mengenai masyarakat adat Kasepuhan Karang. Mayoritas jumlah anggota rumah tangga yang sudah bekerja berada pada 1-2 jiwa dengan jumlah 13 anggota rumah tangga bekerja. Hal tersebut dikarenakan masyarakat adat Kasepuhan Karang memiliki kecenderungan untuk mementingkan pekerjaan dibandingkan dengan pendidikan. Pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kasepuhan Karang tersentralisasi pada rentang 5,001-10,000 m2 dan 10,001-20,000 m2. Sebanyak 27,6% lahan yang dimiliki responden berturut-turut berlokasi di luar hutan adat (sawah dan kebun/lahan kering), serta di luar hutan adat (kebun/lahan kering). Sementara itu, jumlah sawah di dalam hutan adat hanya sebanyak 5 sawah. Seluruh lahan tersebut berada di dalam Desa Jagaraksa. Masyarakat lebih memilih untuk menggarap lahan yang dimiliki oleh mereka sendiri. Jenis lahan terbanyak di dalam hutan adat yakni sawah serta kebun/lahan kering, sementara di luar hutan adat kebun/lahan kering memiliki jumlah terbanyak. Padi serta durian menjadi tanaman yang paling banyak digarap oleh responden. Masyarakat memperoleh lahannya secara warisan turun temurun dari keluarganya. Lahan tersebut rata-rata diperoleh pada periode tahun 1994-2003. Mayoritas lahan tersebut diakui secara sah melalui risalah tanah, dan nama yang paling banyak tercantum pada bukti kepemilikan tersebut adalah nama dari suami kepala rumah tangga.	Berdasarkan hasil dari penelitian ini, terdapat saran yang dapat diambil dari penelitian ini untuk dijadikan masukan. Beberapa saran tersebut yakni: 1) Pendampingan pasca penetapan hutan adat menjadi hal yang penting untuk dilakukan baik oleh pemerintah, maupun LSM terkait. Pendampingan tersebut dapat berwujud penerangan kepada pihak-pihak terkait yang ada di Desa Jagaraksa mengenai implikasi dari penetapan hutan adat, serta membersamai masyarakat adat Kasepuhan Karang dalam melaksanakan pengelolaan lahan hutan agar sejalan dengan nilai-nilai yang mendasari penetapan hutan adat. Hal tersebut juga dapat memastikan bahwa keadilan serta 1) Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | Vol. 05 (02) 2021 | 292 1) kesejahteraan agraria dapat dirasakan oleh masyarakat baik secara agregat maupun pada skala rumah tangga; 2) Bekerja bersama masyarakat mengenai pengembangan lahan pertanian yang optimal dalam rangka pengembangan sistem penghidupan (livelihood) yang berkelanjutan perlu dilaksanakan. Hal ini guna membantu masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang mereka miliki dan meningkatkanpenghidupannya; dan 3) Penelitian mengenai pola penguasaan ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi seperti kesejahteraan rumah tangga petani, kesejahteraan dan penguasaan lahan, posisi masyarakat adat dan kesejahteraan, atau posisi masyarakat adat dan penguasaan lahan.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
286	Dhona Indah K;2016;Skripsi	Struktur Komunitas Perifiton Di Bagian Hulu Sungai Cisadane, Kawasan Taman Nasonal Gunung Halimun Salak, Jawa Barat	Hulu sungai Cisadane Taman Nasional Gunung Halimun Salak dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Stasiun tutupan kanopi rapat didominasi oleh perifiton kelas Bacillaryophiceae dengan 6 genera, sedangkan Stasiun tutupan kanopi sedang-terbuka didominasi oleh Bacillaryophiceae dengan 12 genera. Perifiton yang banyak ditemukan di kedua kelompok tersebut adalah ordo Pennales dengan jenis Navicula sp. .	
287	I Made Sudiana,dkk;2001;Jurnal	Cellulolytic Bacteria Of Soil Of Gunung Halimun National Park	High diversity of ACB was observed in both forest floor and soil rhizosphere indicating that ACB play role in decomposition of organic materials in forest ecosystem.	
288	Sri Widawati,dkk;2001;Jurnal	The Population Of Nitrogen Fixing Bacteria And Phosphate Solubilizing Bacteria In The Rhizosphere From Gunung Halimun National Park	1. The highest population of N-fixing and P solubilizing bacteria at Cikaniki (1100 asl.) are in the plant rhizosphere of *Schima wallichii* at Suzuki plot A I and *Altingia exelsa* at Suzuki plot A III, at Gunung Botol was faounded is in 1000 m asl., and at Ciptarasa area is in 600m asl. 2. The number of N fixing and P solubilizing bacteria at Gunung Halimun was influenced by the different vegetation type, soil pH and the elevation of area. 3. Nitrogen fixing bacteria (*Rhizobium, Azotobacter, and Azospirillum*) and *P solubilizing* (*Pseudomonas sp, and Bacillus megaterium*) are most dominant at 600 m (Ciptarasa), 1000 m (Gn. Botol), and 1100 m asl (Cikaniki).	
289	I Made Sudiana;2002;Jurnal	Characteristic Of Cmcase Of Bacillus Sp. Isolated From Soil Of Gunung Halimun National Park	Bacillus sp. is common bacteria encountered in soil. They play important role in biotransformation of organic substrate in soil.	
290	I Made Sudiana;2002;Jurnal	Phosphatase Activity Of *Bacillus Sp.* Isolated From Forest Soil Of Gunung Halimun National Park	*Bacillus sp* diisolasi dari tanah Taman Nasional Gunung Halimun. Dalam media tumbuh yang mengandung Ca3 (PO4)2 bakteri membentuk zona bening disekitar koloni. Glukosa digunakan dengan cepat selama kultivasi. Tinggi konsentrasi fosfat terlarut yang dibebaskan selama fase pertumbuhan menunjukkan bahwa bakteri mampu memacu pelarutan Ca3(PO4)2. Selama fase pertumbuhan terjadi hidrolisa organik fosfat (*phenyl phosphate*) menghasilkan phenol dan fosfat hal ini menunjukkan, bahwa Bacillus sp mampu menggunakan organik fosfat. Selama kultivasi terjadi penurunan pH sejalan dengan pelarutan Ca3 (PO4)2.	
291	Atit Kanti;2002;Jurnal	Cellulolytic Yeast Isolated From Soil Gunung Halimun National Par	Many soil yeast were isolated from soil of Gunung Halimun National park. Some of themwere cellulolytic. Common occurrence of soil yeastand their capacity to breakdown polymericsubstances implying that they play significant role on biotransformation of organic substances in soil	
292	I Made Sudiana;2002;Jurnal	Phosphatase Activity Of *Bacillus Sp.* Isolated From Forest Soilof Gunung Halimun National Park		

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
293	Iman Hidayat;2004;Jurnal	Skrining Aktivitas Enzim Bacillus Sp. Yang Diisolasi Dari Taman Nasional Gunung Halimun	Lima puluh isolat Bacillus sp. (Bacillus sp. AR 023 - AR 072) diperoleh dari hasil identifikasi Bacillus sp. yang diisolasi dari tiga daerah ketinggian yaitu 600m, 1000m, dan 1500m. 37 isolat menunjukkan hasil positif pada screening aktivitas amilolitik, 46 isolat pada aktivitas proteolitik, 3 6 isolat pada aktivitas selulolitik, 3 isolat pada screening aktivitas fosfatase, dan 3 isolat mampu menghasilkan enzim ligninase. Perbedaan kemampuan masing-masing isolat Bacillus sp. yang diisolasi dari TNGH pada ketinggian yang berbeda dalam menghasilkan enzim ekstraselular yang diujikan menunjukkan bahwa perbedaan ketinggian mempengaruhi keanekaragaman jenis dari Bacillus sp. dalam menghasilkan enzim-enzim tertentu.	
294	Kazuhiro Harada;2003;Jurnal	Attitudes of local people towards conservation and Gunung Halimun National Park in West Java, Indonesia	1. The local community does not have enough information about the park and, consequently, people only follow the compulsory laws. 2. Local conservation knowledge and the global objectives of park management cannot be harmonized because of the lack of information and agreement concerning the park between local people and government authorities. People do not have certain incentives to conserve biodiversity, as they cannot get any benefits from the park. 3. In spite of these adverse findings, it largely depends on the government authorities' capabilities whether the integrated park management can succeed or not, because people still have positive attitudes towards local participation. 4. It was clear that local people wanted to stay in their own villages without any relocation programs, participating in the park management with related stakeholders. The local residents were not refusing to collaborate with the government; quite the opposite, they were eager to be involved in the park administration and to overcome over the difficulties.	Local people may be interested in conserving biodiversity only if certain rights to the use lands and forests are allocated to them. Government authorities have to think about mechanisms through which the local people can share adequate benefits with the park management, and both the park and local people can coexist together.
295	Gamma Galudra;2003;Paper	Masyarakat Kasepuhan dan Interaksi Sosiobudaya Mereka terhadap Hutan	1. Kegiatan pemanfaatan hutan yang dipraktekkan oleh masyarakat kasepuhan di kawasan Gunung Halimun merupakan hasil adaptasi dengan kondisi lingkungan tempat hidup masyarakat kasepuhan dan dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional serta pengetahuan lokal warisan leluhur masyarakat ini yang tetap dipertahankan untuk kemudian diwariskan kembali secara turun temurun kepada generasi berikutnya. 2. Interaksi yang terjadi antara masyarakat kasepuhan dengan hutan memiliki nilai-nilai sosiobudaya dan keagamaan yang kuat sehingga terbentuk suatu pengetahuan terhadap hutan yang berfungsi memelihara keseimbangan lingkungan dan sosial. Interaksi seperti ini bukan merupakan ancaman bagi kelestarian hutan di kawasan Gunung Halimun. Namun demikian, pihak kehutanan sudah saatnya untuk sungguh-sungguh memahami dinamika masyarakat yang dilandasi nilai, norma dan persepsi yang dianut masyarakat kasepuhan yang bermukim di sekitar kawasan Gunung Halimun. Upaya pihak kehutanan yang menempatkan masyarakat kasepuhan sebagai ancaman kelestarian hutan, sengaja dan/atau tanpa sengaja, menyebabkan konflik, sehingga menjadikan hutan lebih terancam kelestariannya. Minimnya pengakuan pihak kehutanan terhadap interaksi masyarakat kasepuhan dengan hutan di dalam konteks pengelolaan hutan telah menyurutkan peluang untuk memanfaatkan sistem pengetahuan masyarakat kasepuhan yang semakin luntur untuk melestarikan hutan.	Apabila pihak kehutanan benar-benar ingin menjaga kelestarian hutan di kawasan Gunung Halimun, upaya memahami dan mengakui dinamika masyarakat kasepuhan melalui pengembangan kelembagaan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan agar konflik yang timbul di sekitar kawasan Gunung Halimun dapat terhindari.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
296	M Ekayani;2003;Jurnal	Economic benefits of natural tourism: driving community's participation for conservation in Halimun Salak National Park, Indonesia	Economic benefits of natural tourism to society in the area surrounding HSNP is high. This research finds that 66% of total income from local business owners and employees comes from tourism activities. Income from the tourism activity meets 91% of household expenditures. All stakeholders involved in tourism activities expressed the importance of preserving natural resources in the HSNP area and more than 60% of the respondents in both location stated the need for additional funding to provide these activities. This condition indicates the stakeholders know well the link between the conditions of natural resources in the area of HSNP with the natural tourism activities, in order to support their income contribution from tourism activities	
297	Wawan Gunawan;2004;Tesis	Analisis Pengelolaan Koridor Antara Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Dengan Kawasan Hutan Lindung Gunung Salak Berdasarkan Kondisi Masyarakat Sekitar	1. Masyarakat di Desa Purwabakti dan Desa Cipeteuy yang berbatasan dengan kawasan koridor pada umumnya memiliki kondisi dan karakteristik rumah tangga yang berpotensi tinggi terhadap kegiatan pemanfaata SDA di koridor TNGHS. 2. Masyarakat di desa Purwabakti dan Desa Cipeteuy memiliki tipologi yang berbeda. Masyarakat Desa Purwabakti merupakan masyarakat yang hidup di daerah perkebunan dengan matapencaharian pokok sebagian besar masyarakatnya sebagai pekerja kebun, sedangkan masyarakat Desa Cipeteuy merupakan masyarakat yang agraris yang hidup di daerah pertanian dan sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian pokok bertani/bercocok tanam 3. Masyarakat Desa Purwabakti dan Desa Cipeteuy pada umumnya memiliki tingkat persepsi terhadap keberadaan koridor yang tergolong sedang. 4. Pemanfaatan SDA di koridor TNGHS oleh masyarakat Desa Purwabakti pada umumnya tergolong tinggi. Sedangkan pemanfaatan SDA di koridor TNGHS oleh masyarakat Desa Cipeteuy pada umumnya tergolong sedang 5. Variabel karakteristik rumahtangga dan tingkat persepsi responden di Desa Purwabakti dan Desa Cipeteuy secara statistik seluruhnya memiliki hubungan yang tidak terlalu erat dengan variabel tingkat pemanfaatan SDA di koridor TNGHS. 6. Kegiata pelestarian SDA di koridor TNGHS oleh masyarakat Desa Purwabakti dan Desa Cipeteuy pada umumnya dilakukan dengan frekuensi yang masih jarang, tergantung pada ada atau tidaknya sponsor dalam kegiatan tersebut. 7. Para stakeholders yang di dalam visi dan misinya masing-masing memiliki kepedulian terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan di sekitarnya dan memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. 8. Kawasan koridor TNGHS yang termasuk dalam wilayah kerja pengelolaan BTNGHS dan Perum Perhutani yang berdasarkan evaluasi fungsi kawasan hutan sebagian besar tergolong Hutan Produksi Terbatas dan sebagian kecil lainnya tergolong Hutan Lindung, hingga saat ini belum mendapat perhatian dan pengelolaan secara khusus sebagai koridor TNGHS. 9. Kegiatan pengelolaan koridor TNGHS yang dapat dilakukan secara optimal adalah melalui kegiataan pengelolaa baik di dalam maupun di sekitar kawasan koridor. Kegiatan pengelolaan dalam kawasan koridor meliputi kegiatan penataan dan pengamanan kawasan, pembinaan habitat, dan pembatasan kegiatan pemanfaatan SDA. Sedangkan kegiatan pengelolaan di sekitar kawasan koridor meliputi kegiatan pengembangan daerah penyangga dengan tipe penyangga hutan di Desa Purwabakti dan pegembangan daerah penyangga dengan tipe penyangga ekonomi di Desa Cipeteuy	1. Hubungan antara variabel karakteristik rumahtangga dan tingkat persepsi responden dengan tingkat pemanfaatan SDA di koridor TNGHS perlu diverifikasi dengan menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak agar lebih mewakili kondisi masyarakat sebenarnya. 2. Untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan pemanfaatan SDA di koridor TNGHS maka perlu digunakan variabel-variabel yang memiliki sensitifitas tinggi. 3. Kegiatan pengelolaan koridor TNGHS baik di dalam maupun di sekitar kawasan koridor perlu dilakukan secara terpadu oleh para stakeholders yang ada dengan memperhatikan kondisi masyarakat sekitar, demi keberhasilan tujuan pengelolaan kawasan koridor yaotu dapat berfungsinya koridor secara optimal bagi satwaliar, kebutuhan masyarakat sekitar dapat terpenuhi tanpa menggangu fungsi koridor dan kepentingan stakeholders dapat terakomodasikan. 4. Penelitian lanjutan tentang pola pergerakan satwaliar antara kawasan TNGHS dan model rehabilitasi koridor TNGHS berdasarkan spesies target perlu dilakukan untuk melengkapi penelitian yang telah ada, sehingga dapat disusun suatu desain pengembanga kegiatan pengelolaan kawasan koridor TNGHS secara holistik.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
298	Kazuhiro Harada;2004;Jurnal	Dependency of local people on the forests of Gunung Halimun National Park, West Java, Indonesia	The data presented here suggest that people living near or in GHNP need to use resources within the park to supplement the products from gardens, mixed gardens and tree gardens for their daily needs for food, fuelwood, medicine, construction material, and so forth.	In the case of GHNP, national park authorities and relevant stakeholders, such as the State Forestry Corporation and plantation companies, must support the local communities and formally recognize village resource use, so that they can obtain benefits and positively participate in the management of the park. The cooperation of the relevant stakeholders here is indispensable to achieve the integrated management of the national park.
299	Widada;2004;Tesis	Nilai Manfaat Ekonomi dan Pemanfaatan Taman nasional Gunung Halimun Bagi Masyarakatt		
300	Almaviva Nurjanah;2006; Skripsi	Studi Lanskap Budaya Kampung Ciptagelar, Kabupaten Sukabumi dan Upaya Pelestariannya	1. Tatanan lanskap Kampung Ciptagelar dapat diidentifikasi berdasarkan konsep ruang makro, meso dan mikro. Tata ruang makro terdiri dari ruang hutan, ruang pemukiman, ruang pertanian dan sungai, yang tersusun dari atas ke bawah. Tata ruang meso merupakan area pemukiman masyarakat adat dengan area sesepuh girang berada pada topografi paling atas. Tata ruang mikro adalah tata ruang baik secara vertikal maupun horizontal pada skala rumah. Elemen-elemen pada area pemukiman (meso) maupun makna dari tata letaknya terdiri dari elemen alami dan elemen buatan. Elemen alami terdiri dari hutan, talun, sawah, sungai dan elemen lunak (tanaman). 1. Sedangkan elemen buatannya terdiri dari bangunan-bangunan seperti imah rurukan yang berada di ruang sesepuh girang. Imah gede, pangkemitan, leuit, leuit si jimat, podium, bale sesepuh, kamar mandi permanen, panyayuran, ajeng wayang golek, ajeng jipeng, ajeng siaran, pasanggrahan, mushola di topografi atas tepatnya di ruang fasilitas adat. Rumah masyarakat (imah), ajeng topeng dan beberapa tampian di topografi tengah atau di ruang incu putu. Sedangkan tampian dan kandang ternak di topografi bawah. Elemen lunak di pekarangan rumah masyarakat adat Kampung Ciptagelar memiliki fungsi pangan, estetik, fisik, ekonomi dan adat. Jenis elemen lunak yang paling dominan adalah tanaman hanjuang (Dracaena fragrans). 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan dan keberlanjutan pemukiman Kampung Ciptagelar terdiri atas faktor internal yaitu faktor kepercayaan (konsep hidup yang dilakukan berdasarkan aturan yang berasal dari leluhur melalui kepala adat), faktor sosial budaya (aktivitas yang berhubungan dengan adat) dan alam (iklim yang sejuk dan topografi yang berbukit-bukit) serta faktor eksternal, yaitu pengaruh luar (aktivitas wisata, teknologi dan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat) dan kebijakan pemerintah 3. Upaya untuk melindungi keberlanjutan lanskap dan masyarakat Kampung Ciptagelar serta ekosistem Taman Nasional Gunung Halimun-Salak yaitu dengan menyusun rencana pengelolaan pelestariannya berdasarkan konsep umumnya yaitu melindungi keberadaan masyarakat adat kasepuhan Kampung Ciptagelar beserta budaya dan karakter pemukimannya (pada posisi dan skala ruang yang sama), serta tetap mempertahankan dan memelihara kawasan di sekitarnya sebagai kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Untuk mewujudkan konsep pengelolaan pelestarian perlu dilakukan koordinasi dan kesepakatan antara tiga stakeholders yaitu pihak pengelola TNGHS, LSM dan masyarakat adat. Diusulkan pula konsep zonasi lanskap untuk disepakati oleh masyarakat adat dan pengelola TNGHS. Zonasi lanskap yang direncanakan dibuat dengan menetapkan kawasan Kampung Cipagelar berada di zona pemanfaatan TNGHS. Perlu juga diusulkan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan pengelola TNGHS dalam pelestarian kawasan. Pemda juga diharapkan perhatian dan peranannya baik melalui kebijakan maupun tindakan atau program-program untuk membantu keberlanjutan masyarakat adat (khususnya Kampung Ciptagelar) dan juga kelestarian Taman Nasional. Pemda juga perlu mengakomodir dan membantu masyarakat adat yang mencari penghidupan di luar Taman Nasional.	Penentuan batas kampung dan kesepakatan zona pengelolaan antara masyarakat adat dan pengelola Taman Nasional. Kesepakatan tersebut seyogyanya termasuk jenis-jenis alat pengelolaan lanskap yang tidak merusak, baik Kampung Cipagelar maupun kawasan TNGHS. Sesepuh girang diharapkan tetap berpegang pada komitmennya mengenai pengelolaan hutan berdasarkan adat. Konsep zonasi yang direncanakan masih perlu dijabarkan dan direncanakan secara detil pada kondisi kawasan yang sesungguhnya. Selanjutnya sosialisasi zonasi yang direncanakan kepada masyarakat adat perlu dilakukan secara persuasif agar diperoleh kesepakatan-kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak, yaitu pihak masyarakat adat Kampung Ciptagelar dan pihak pengelola TNGHS. Perlu juga dibuat perencanaan detil ruang/ lanskap wisata dan fasilitas-fasilitas yang sesuai. Selain itu, perlunya perbaikan manajemen pengelolaan yang holistik dan terintegrasi antara pihak Pemda, TNGHS dan mayarakat adat. Intervensi LSM dapat diakomodir sepanjang tidak merusak masyarakat adat dan keberlanjutan TNGHS.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
301	Moh. Ilham;2006;Skripsi	Analisa Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Sekitar Hutan	1. Karakteristik pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan sumberdaya alam di Desa Curugbitung sangat beragam. Adapun pihak-pihak yang terlibat konflik di Desa Curugbitung antara lain: PT. Hevindo dan masyarakat Desa Curugbitung, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, pemerintahan desa, pengusaha bangunan dan peternakan, LSM RMI, LSM HuMa, KCP, KPN, mantan lurah, Mandor, Polsek Nanggung, pemerintahan Kecamatan Nanggung, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bogor, Dinas Tata Ruang Kabupaten Bogor. Masing-masing pihak ada yang melibatkan diri secara terang-terangan dan ada juga yang hanya sebagai pengamat. Hal tersebut tergantung pada intensitas hubungan yang dilakukan antara masing-masing pihak terhadap konflik dan subjek utama konflik. 2. Penyebab konflik pengelolaan sumberdaya alam yang terjadi di Desa Curugbitung lebih disebabkan oleh perbedaan kepentingan, pemahaman, peningkatan jumlah penduduk, pembatasan akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya, keterpurukan ekonomi, juga karena perubahan iklim politik setelah reformasi dan krisis moneter. Kekuatan masing-masing pihak dan dukungan dari pihak lain, menjadikan konflik yang terjadi bertahan lama. Anggapan masyarakat yang timbul waktu itu, mereka bebas mengajukan keinginan kepada pemerintah dan bebas menyuarakan aspirasi mereka. Kebutuhan akan lahan pertanian menjadi salah satu penyebab munculnya konflik di desa ini, selain perbedaan pemahaman, perbedaan kepentingan, dan kehadiran pihak ketiga, seperti LSM menjadi pemicu mencuatnya konflik, karena masyarakat mulai disadarkan pada apa pentingnya tanah bagi kehidupan di masa yang akan datang. Selain itu berbagai bentuk perlawanan juga dilakukan, baik yang bermotif ekonomi maupun yang bermotif non-ekonomi. 3. Karakteristik konflik pengelolaan sumberdaya alam yang terjadi di Desa Curugbitung dilihat dari wujud dan level konflik. Menurut wujudnya, konflik yang terjadi cenderung tertutup (laten) dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal tersebut terjadi karena kecakapan para elit lokal (tokoh masyarakat) untuk meredam terjadi konflik hingga tidak dapat terbaca oleh pihak-pihak di luar wilayah tersebut, meskipun pernah mencuat dan terbuka. Menurut levelnya, konflik vertikal dialami antara masyarakat dengan PT. Hevindo, sedangkan konflik horizontal terjadi antara pihak PT. Hevindo dengan TNGHS, dengan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, LSM, dan pemerintah lokal.	1. Pihak-pihak yang berkonflik dan yang terlibat dalam konflik bersama-sama untuk memperbaiki hubungan koordinasi, dan melakukan pertemuan secara resmi agar dapat dilakukan upaya penyelesaian konflik sampai pada akarnya. Kegiatan ini bisa menggunakan pihak pemerintah daerah sebagai pihak ketiga yang netral dan dipercaya oleh kedua belah pihak (arbitrasi). Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi adanya konflik laten yang terjadi diantara masing-masing pihak. 2. Upaya-upaya penyelesaian konflik, sebaiknya tidak menggunakan pendekatan paksaan dan keamanan (coercive), karena akan selalu berbenturan dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat, sehingga sumber utama konflik menjadi tidak tersentuh. 3. Pendekatan yang lebih persuasif melalui pendekatan kesejahteraan, seperti pemberian modal usaha, pengkoordiniran para penggarap dan membaginya ke dalam kelompok-kelompok wilayah tertentu, serta membuat perjanjian dengan semua penggarap melalui kelompok tersebut untuk menggarap di wilayah-wilayah tertentu saja, menjadi salah satu alternatif penyelesaian konflik. 4. Setiap bentuk-bentuk upaya penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat, penggarap, tokoh pemuda, koramil, pemerintahan kecamatan, polsek, tokoh desa, LSM yang terlibat, serta Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan asumsi tidak menambah perbedaan kepentingan antar pihak-pihak yang berkonflik. 5. Pengawasan pemerintahan desa, pemberian pengetahuan kepada masyarakat dalam mengelola konflik yang ada melalui pendampingan, serta peran serta yang lebih nyata dari Pemda Kabupaten Bogor atau dinas-dinas terkait untuk membantu menyelesakan konflik yang terjadi dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6. Perusahaan hendaknya lebih berhati-hati dalam menanggapi tuntutan masyarakat, agar tidak memicu konflik yang kembali laten tersebut. Kekuatan sosial yang dimiliki mampu mendorong mobilisasi massa hingga tindakan-tindakan radikal atau recliming. 7. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang peran organisasi lokal, khususnya KPC dan PPN dalam menentukan arah perjuangan petani petani di masa yang akan datang.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
302	Budiman Sitepu;2006;Skripsi	Peranan Hutan Dalam Kehidupan Rumagh Tangga Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Kampung Nyungcung, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)	1. Bentuk pemanfaatan hutan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kampung Nyungcung di dalam hutan, khususnya di dalam hutan lembur (Garapan) dapat beruypa berladang, sawah, berkebun talun dan lain lain. Masyarakat Kampung Nyungcung menganggap pertanian merupakan pokok mata pencaharian mereka, dimana mereka dapat mempertahankan hidup dari hasil pertanian tersebut 2. Mayarakat Kampung Nyungcung sangat merasakn manfaat hutan bagi kehidupan mereka. Hutan merupakan sebagai sumber kayu bakar, sebagai sumber kayu bangunan, sebagai sumber pakan ternak, sebagai sumber tanaman obat dan sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari - hari dan untuk keperluan pertanian. 3. Untuk menjaga agar keberadaan hutan tetap lestari, makan masyarakat kampung Nyungcung melakukan baebagai usaha-usaha yaitu : (1) Klasifikasi lahan hutan oleh masyarakat Kampung Nyungcung (2) Kampung dengan tujuan konservasi (KDTK) 4. Sistem penguasaan lahan yang ada di masyarakat Kampung Nyungcung adalah (1) Grapan, (2) Bagi Hasil, (3) Garapan sistem tat guna lahan yang ada di masyarakat Kampung Nyungcung adalah (1) Sawah, (2)Tegalan, (3) Kebun Talun	Penelitian ini merupakan penelitian awal, dan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini belum tercapainya sepenuhnya. Untuk lebih mengetahui bagaimana peranan hutan bagi kehidupan rumah tangga dan masyarakat kampung Nyungcung diperlukan penelitian lanjutan. Pada penelitian lsnjutsn diharapkan lebih menggalin potensi ekonomi kehutanan dan nilai-nilai ekonomi hutan bagi masyarakat kampung Nyungcung agar peranan hutan lebih nyata di dalam masyarakat Kampung Nyungscung
303	Siti Mariah Ulfa;2007;Skripsi	Identifikasi Konflik Dalam Pengelolaan Wisata Di Kawasan Gunung Salak Endah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor	1. Konflik yang terjadi di antara stakeholder dalam pengelolaan maupun pemanfaatan di GSE menjadi kawasan wisata berdasarkan wujud konflik termasuk dalam konflik tertutup dan mencuat ditandai dengan adanya perselisihan di antara stakeholder namun belum ada proses penyelesaian. 2. Isu konflik termasuk dalam konflik pengelolaan wisata di GSE adalah ketidakjelasan status pengelolaan dan lemahnya koordinasi antar stakeholder. 3. Stakeholder yang memeiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang sama tinggi adalah TNGHS, Perum Perhutani, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan Pamijahan, Desa Gunung Sari, masyarakat veteran dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan wisata di GSE.	1. Perlu dibentuk unit pengelolaan wisata untuk mengatasi konflik pengelolaan wisata yang terjadi di GSE yang disepakati oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam konflik. 2. Perlu dioptimalkan peran Forum Pariwisata GSE dalam proses penyelesaian konflik kepentingan di GSE. 3. Pembinaan masyarakat secara intensif perlu dilakukan agar tercipta masyarakat yang bertanggungjawab dalam menjaga kelestarian kawasan wisata alam di GSE.
304	Eka Trisnawati ;2007;Skripsi	Implikasi Perubahan Struktur Agraria Terhadap Potensi Konflik Agraria	1. Perubahan struktur agraria di Kampung Parigi lebih banyak disebabkan oleh masuknya Perum Perhutani Unit III, swasta dan Taman Nasional. Jadi penyebab perubahan struktur agraria bukan disebabkan oleh dinamika perubahan pola penguasa dan pemanfaatan lahan garapan. 2. Penyebab mencuatnya potensi konflik agraria pada tahun 2003 adalah karena beredarnya isu-isu di kalangan masyarakat terkait pelarangan kegiatan masyarakat di kawasan Taman Nasional. Penyebab lain adalah kurangnya sosialisasi pihak BTNGHS kepada masyarakat terkait perluasan Taman Nasional. MEncuatnya potensi konflik ini ditandai oleh adanya resistensi dari masyarakat, dan aksi-aksi pencabutan pohon yang ditanam oleh TNGHS. 3. Upaya penyelesaian potensi konflik agraria dilakukan walaupun konflik di Parigi baru sampai pada tahapan prakonflik. Bentuk upaya ini adalah diadakannya suatu perecanaan komunitas.	1. Pola pemanfaatan masyarakat Parigi, negara dan swasta terhadap laha Parigi mencerminkan keragaman pemanfaatan. Hal tersebut akan mempengaruhi kelestarian hutan dan ekosistem Halimun-Salak. Untuk itu, dalam memanfaatkan lahan perlu dipertimbangkan kelestariannya. 2. Tata batas kawasan TNGHS belum juga ditetapkan oleh Badan Perencanaan Kehutanan. Oleh karena itu, masyarakat Parigi harus selalu memberi saran, informasi, dan pertimbangan terkait dengan penetapan tata batas sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006. 3. Untuk menghindari beredarnya kembali isu-isu terkait TNGHS, komunikasi antara pihak TNGHS dengan masyarakat Parigi harus tetap terjalin
305	Didik Suharjito,dkk;2008;-Jurnal	Modal Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Pada Masyarakat Kasepuhan, Banten Kidul	Unsur modal sosial masyarakat kasepuhan adalah kepercayaan, aturan, dan peranan dan jejaring sosial. Hubungan sosial berlangsung dengan intensitas yang tinggi dalam jejaring yang luas dengan pola umum dan melibatkan barang barang yang material dan non-material	Intervensi pemerintah melalui program pembangunan harus memperhatikan potensi lokal dan modal sosial masyarakat.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
306	Veronica BR Pandia;2008;Skripsi	Analisis Pengelolaan Objek Wisata Curug Cigamea Berbasis Daya Dukung Sumber Daya di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah ; a. Potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkugan yang dimiliki oleh Curug Cigamea cukup banyak, diantaranya yaitu keindahan pemandangan alam, air terjun, serta keberadaan flora dan fauna. Potensi sumber daya manusia terdiri dari pihak pengelola objek wisata, masyarakat dan pemerintah setempat. b. Isu dan permasalahan yang terdapat di Curug Cigamea belum terlalu banyak mempengaruhi kondisi kawasan, namun perlu ditangani secvara serius karena dapat mengancam kelestarian alam Curug Cigamea. Isu dan permasalahan tersebut adalah berkurangnya penutupan vegetasi di lokasi Curug Cigamea, pencemaran perairan dan lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan, terjadinya longsor dan isu pengelolaan. c. AIternatif strategi pengelolaan yang tepat untuk pengembangan kegiatan pariwisata dan kelestarian alam yang berkelanjutan di Curug Cigamea terdiri dari tiga prioritas yaitu: pertama, menyusun rencana pengelolaaan wisata alam dengan melibatkan masyarakat setempat dan pengunjung. keduaa, memanfaatkan potensi Curug Cigamea untuk wisatawan datang ke curug cigamea, dan Ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana serta perawatan dan pemelihraan semua aset dan fasilitas obje wisata Curug Cigamea untuk mengembangkan kawasan dengan tetap terjaga kelestarian alamnya	1. Perlu penataan jumlah pengunjung yang datang sesuai dengan daya dukung kawasan curug cigamea untuk setiap areal kegiatan yang disediakan 2. Perlu meningkatkan koordinasi dan aksi yang lebih baik antar semua pihak yang berperan dalam pengelolaan kawasan curug cigamea 3. Melengkapi serta memperbaiki fasilitas-fasilitas penunjang wisata
307	Arif Aprianto;2008;Skripsi	Komparasi Kearifan Tradisional Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug Dengan Aturan Formal Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Terdapat kelembagaan yang jelas dan lengkap dengan organisasi yang melakukan dan menegakkan norma-norma/aturan yang berlaku (rule of the game) dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kondisi jarak antar kampung yang berjauhan, untuk memperkuat pengaruh adat dilakukan desentralisasi kekuasaan. Mekanisme sanksi yang berlaku adalah mekanisme "kabendon". Bilamana menyangkut kepentingan umum maka akan berlaku peradilan adat. 2. Kearifan tradisional Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug sangat terkait dengan konsep tata ruang wilayah Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug dan aturan-aturan/norma yang ada di dalamnya. Tata ruang wilayah meliputi : wewengkon dan pemukiman, leuweung (hutan), reuma, lahan garapan, tutupan dan titipan. Sedangkan aturan yang berlaku di Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug mengatur mengenai kehidupan dan badan. Aturan tersebut meliputi aturan umum, aturan di leuweung kolot dan leuweung titipan, aturan mengenai leuweung cadangan, aturan di lahan garapan, aturan mengenai masyarakat dan aturan hak atas tanah. 3. Aturan Adat Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug sangat konsisten dengan aturan formal pengelolaan TNGHS dalam hal asas, tujuan dan zonasi. Inkonsistensi terdapat dalam hal penggunaan kawasan dan pemanfaatan SDA, secara khusus menyangkut keberadaan masyarakat adat di zona inti TNGHS. Namun demikian karena adanya pengakuan zona khusus dalam taman nasional (Permenhut No 56/2006), maka permasalahannya menjadi permasalahan proses zonasi TNGHS, dimana wewengkon masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug masuk dalam zona inti TNGHS. 4. Permasalahan utama dalam pengelolaan TNGHS dengan keberadaan Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug adalah bagaimana memperlakukan Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug agar terintegrasi dengan pengelolaan TNGHS. Hal ini dimungkinkan bilamana terdapat pengakuan dan status hukum yang jelas dari pemerintah terhadap Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug dan kearifan tradisional.	1. Perlu adanya penelitian mengenai kriteria yang digunakan Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug dalam pengaturan alokasi tata ruang wilayahnya 2. Perlu adanya penelitian mengenai pemetaan batas wilayah adat (wewengkon) Kasepuhan Cibedug 3. Perlu adanya pengakuan dan status hukum yang jelas dari pemerintah terhadap Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug dan kearifan tradisional dalam bentuk Peraturan Daerah agar mereka dapat berperan dalam pengelolaan SDA sesuai dengan hak dan kewajibannya. 4. Perlu penyesuaian ulang zonasi TNGHS dengan menempatkan Wewengkon Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug sebagai zona khusus.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
308	Haryanto Yatap;2008;Tesis	Pengaruh Peubah Sosial Ekonomi terhadap Perubahan Penggunaan dan Penutupan Lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Ketidakpastian kepemilikan pemerintah terhadap sumber daya alam di kawasan TNGHS, dan adanya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat yang bermukim pada wilayah desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan TNGHS, adalah penyebab utama terjadinya perubahan penggunaan dan penutupan lahan di kawasan TNGHS. 2. Kebijakan pemerintah terhadap perluasan TNGHS tidak didasarkan pada kajian terpadu terhadap sejarah pengelolaan dan keberadaan masyarakat yang berada pada daerah perluasan TNGHS, serta tidak didukung oleh kegiatan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan secara tegas. 3. Peubah sosial ekonomi yang berpengaruh dominan terhadap perubahan penggunaan dan penutupan lahan di TNGHS adalah: kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, luas kepemilikan lahan, perluasan pemukiman, dan perluasan lahan pertanian. 4. Pada desa-desa non-tradisional dan non-enclave, terdapat kecendrungan bahwa: a. Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk dan laju perubahan luas kepemilikan lahan, maka laju penurunan luas hutan alam semakin tinggi. b. Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk dan luas areal pemukiman, maka persentase luas hutan alam semakin rendah. 5. Pada desa-desa tradisional dan non-enclave, terdapat kecendrungan bahwa semakin tinggi luas areal pemukiman, maka persentase luas hutan alam semakin rendah. 6. Aksesibilitas masyarakat yang bemukim pada desa-desa di dalam dan di sekitar kawasan TNGHS terhadap sumber daya alam di kawasan TNGHS, tidak berpengaruh terhadap laju perubahan penggunaan dan penutupan lahan di kawasan TNGHS. Tetapi kegiatan pembangunan jalan menuju pusat perekonomian dan pemerintahan merupakan salah satu penyebab penurunan luas hutan alam di kawasan TNGHS. 7. Tidak semua sistem nilai yang masih berlaku pada masyarakat tradisional berpengaruh positif terhadap kelestarian sumber daya alam di kawasan TNGHS. 8. Untuk mencapai tingkat hidup layak, anggota masyarakat yang bermukim pada desa-desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan TNGHS membutuhkan lahan garapan seluas 0.54 hektar per orang. Semakin besar tekanan penduduk terhadap lahan pertanian, maka laju penurunan luas hutan alam di kawasan TNGHS semakin tinggi. 9. Nilai manfaat langsung kawasan TNGHS yang diambil masyarakat adalah sebesar Rp 237.68 milyar per tahun. Dari tahun ke tahun nilai manfaat langsung tersebut cenderung semakin menurun.	1. Segera dilakukan proses penetapan kawasan TNGHS yang baru, terutama pelaksanaan penatabatasan kawasan di lapangan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat dan pemerintah daerah kabupaten. 2. Diperlukan kajian terpadu dari aspek ekologi, ekonomi, sosial-budaya, sejarah, hukum, dan politik, untuk menentukan bentuk kompensasi terbaik bagi masyarakat yang berada pada daerah perluasan TNGHS. Sehingga masyarakat dapat tetap memenuhi kebutuhan hidup layak, dan kelestarian alam tetap terjaga.
309	Y. Aris Purwanto;2009;Jurna (Prosiding)	Model Desa Energi Berbasis Mikrohidro di Sekitar Taman Nasional	Konsep Desa Mandiri Energi berbasis mikrohidro berawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan di kawasan yang masih terisolir yang berbatasan dengan Taman Nasional. Dalam penerapannya, penambangan IT. Model Desa Mandiri Energi ini harus melalui pendekatan baik secaro adat maupun budaya kepada masyarakat Untuk keberlangsungannya, pembentukan kelembagaan yang dispepakati oleh seluruh elemen masyarakat merupakan suatu keharusan.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
310	Riska Wibawanti;2009;Skripsi	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyadapan Getah Pinus Di Resort Gunung Bongkok Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Stimulansia yang terbaik digunakan di Blok Cikawah dan Blok Wates adalah stimulansia campuran ETRAT dan H2SO4 (10%), dengan produktivitas rata-rata yang diperoleh di Blok Cikawah sebesar 38,63 g/quarre/hari dan Blok Wates sebesar 12,77 g/quarre/hari. Rata-rata pendapatan penyadap sebagai buruh \sadap dengan menggunakan stimulansia terbaik sebesar Rp 25.762.347/tahun di Blok Cikawah dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 126 % dan Rp 16.549.920/tahun di Blok Wates dengan presentase kontribusi sebesar 113%. Pendapatan sebagai pengelola sebesar Rp 168.151.180 /tahun. Pendapatan ratarata yang diperoleh penyadap dengan mengelola dan menyadap sendiri getah pinus sebesar Rp 63.509.592 /tahun di Blok Cikawah dengan rata-rata presentase kontribusi pengeluaran rumah tangga sebesar 311%, sedangkan pada Blok Wates pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 33.712.120/tahun dengan presentase kontribusi sebesar 230 %	1. Penyadapan getah pinus di Resort Gunung Bongkok TNGHS menggunakan stimulansia campuran ETRAT dan H2SO4 (10%) dengan sadapan 2 quarre/pohon di Blok Cikawah dan 1 quarre/pohon di Blok Wates. 2. Perlu adanya pembinaan dan pelatihan dari pihak Taman Nasional kepada penyadap untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. 3. Perlu adanya pembinaan agar penyadap mampu menjadi pengelola serta mengetahui cara pemasaran getah pinus.
311	Rini Soemarwoto,dkk;2010;Jurnal	Gold Mining And Changing Perceptions Of Risk In West Java	Despite many reports of mercury poisoning and tunnel accident victims, Kasepuhan are still prepared to accept the risks of mining. Most are young, between the ages of 16 and 40. They need to acquire cash, and farming is regarded as increasingly inadequate. They argue that farming only provides food, while their needs are greater than just food.	
312	Meutia Esti Handini;2010;Skripsi	Analisis Perubahanpenutupan Dan Pola Pemanfaatan Lahan Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Mengunakan Sistem Informasi Geografi (Studi Kasus : Kampung Adat Lebak Picung)	1. Tipe penutupan lahan yang ada di Kampung Lebak Picung dikelompokan menjadi 9 (Sembilan),yaitu hutan, kebun campuran, semak, ladang, sawah, lahan terbuka, lahan terbangun, badan air, dan tidak ada data. 2. Penutupan lahan di Kampung Lebak Picung mengalami perubahan pada periode 1989-2007. Secara umum, beberapa tipe penutupan lahan mengalami fluktuasi luasan. Fluktuasi luas terjadi pada tipe penutupan lahan hutan, kebun campuran, semak, dan lahan terbuka. Pada tahun 1997, terjadi peningkatan luas hutan sebesar 20,47 ha yang diikuti oleh penurunan kebun campuran sebesar 41,93 ha dan semak sebesar 3,27 ha. Pada tahun 2007, tipe penutupan lahan hutan mengalami penurunan luas sebesar 19,28 ha yang diikuti oleh peningkatan semak sebesar 2,50 ha. Tipe penutupan lahan yang mengalami penurunan luas pada periode 19892007 adalah sawah. Sementara itu, peningkatan luas terjadi pada tipe penutupan lahan ladang dan badan air. 3. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penutupan lahan di Kampung Lebak Picung adalah faktor manusia. Faktor ini terkait dengankondisi sosial masyarakat meliputi mata pencaharian, jumlah penduduk, status lahan garapan, pola pengelolaan dan penggunaan lahan garapan menggunakan sistem berpindah, pemanfaatan hasil hutan, pengetahuan masyarakat terhadap hutan dan taman nasional, serta persepsi masyarakat terhadap hutan. 4. Luas penggunaan dan sistem pengelolaan lahan garapan oleh masyarakat saat ini sudah mencukupi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan alokasi ruang masyarakat dalam sistem zonasi taman nasional.	1. Antisipasi terhadap pembukaan kawasan hutan yang baru oleh masyarakat dapat dilakukan melalui pembinaan masyarakat seperti penerapan sistem agroforestry. 2. Sistem pertanian berpindah yang dilakukan oleh masyarakat di daerah perbatasan TNGHS perlu dibatasi, agar tidak merambah masuk ke dalam kawasan hutan. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan serta sosialisasi lebih lanjut ke masyarakat. 3. Pengelolaan kawasan sebaiknya perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan, mengingat adanya ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam yang ada di dalam hutan.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
313	Mia Clarissa Dewi;2011;Skripsi	Analisa Dampak Perluasan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi (Studi Kasus Di Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)	1. Pihak TNGHS memberikan alternatif pendapatan bagi masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi sebagai pengganti usahatani dengan cara ladang berpindah (huma) 2. Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi bertanggapan negatif terhadap upaya TNGHS dalam meningkatkan produksi padi dalam luas areal yang sama tampa membuka areal yang baru 3. Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi tetap mempertahankan adat istiadat mereka yang bertentangan dengan kebijakan perluasan kawasan TNGHS 4. Dampak perluasan TNGHS menunjukan adanya penurunan pendapata per kapita, namun pendapatan tersebut masih diatas nilai pendapatan per kapita berdasarkan garis kemiskinan Sayogjo. Penurunan pendapatan yang sedikit tersebut disebabkan adanya program Model Kampung Konservasi (MKK). Program tersebut belum sepenuhnya berhasil karena masih terdapat konflik antara pihak TNGHS dan Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi.	1. Pihak TNGHS tetap menjalankan program MKK sebagai solusi adanya perluasan Kawasan TNGHS 2. Pemerintah daerah menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antara pihak TNGHS dengan Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi. 3. Pemerintah daerah sebaiknya menjelaskan lebih lanjut menyenai program MKK sebagai alternatif pendapatan kepada Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi.
314	Resti Meilani ;2011;Tesis	Persepsi Guru Dalam Penerapan Pendidikan Lingkungan Hidup Di Sekolah Dasar Sekitar Hutan Kawasan Gunung Salak Endah Kabupaten Bogor	1. Guru pada SD sekitar hutan memiliki persepsi lingkungan yang terbatas berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan rubrik Draw-An-Environment-Test (DAET). Hal tersebut diduga karena guru kurang memiliki kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran dalam bentuk gambar maupun tulisan. Penggunaan gambar dan tulisan sebagai bentuk ekspresi pemikiran memang belum membudaya sebagai sebuah perilaku yang penting dalam pendidikan di masyarakat Indonesia, sehingga instrumen DAET yang digunakan perlu lebih disesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesia 2. Hasil Analisis Faktor menunjukkan bahwa persepsi guru tentang penyelenggaraan PLH dibangun dari tiga faktor utama, yaitu efektivitas pengajaran PLH, manfaat PLH dan luaran pengajaran PLH. Faktor pertama – efektivitas pengajaran PLH – dibentuk dari empat peubah, yaitu kompetensi, efektivitas-diri, beban/tekanan, dan pilihan. Faktor kedua – manfaat PLH – dibentuk oleh tiga peubah, yaitu minat/kesenangan, upaya/arti penting, dan nilai/manfaat PLH. Faktor ketiga – luaran pengajaran PLH– terbentuk dari satu peubah, yaitu luaran pengajaran PLH yang diharapkan oleh guru. Analisis statistik lebih lanjut tidak menunjukkan ada nilai yang berbeda nyata, sehingga faktor yang mempengaruhi persepsi guru tentang luaran pengajaran PLH tidak dapat ditentukan. 3. Guru membutuhkan peningkatan/penguatan kapasitas, motivasi, kompetensi dan efektivitas diri melalui berbagai kegiatan PLH agar dapat melakukan pengajaran PLH yang efektif.	1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas guru pada SD sekitar hutan berkaitan dengan PLH, sehingga guru dapat memenuhi standar pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat mengajar PLH secara efektif. 2. Peningkatan kapasitas guru membutuhkan dukungan/fasilitasi dari berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan, Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan, serta pengelola kawasan hutan (misalnya pada lokasi penelitian pengelola kawasan hutan adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Perum Perhutani), Perguruan Tinggi, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang PLH, serta para pelaku PLH lainnya. 3. Materi-materi mengenai lingkungan hidup dan praktek pengajaran/metode instruksional yang efektif untuk mengajarkan materi tersebut seharusnya diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan pada perguruan tinggi yang mempersiapkan para calon guru. 4. Faktor-faktor yang dapat membangun motivasi guru untuk secara mandiri mengembangkan kompetensi dirinya perlu diperhatikan dan ditelaah lebih lanjut, sehingga guru akan mampu menggunakan kesempatan yang ada dan bahkan mencari sendiri kesempatan untuk melakukan pengembangan diri. 5. Penggunaan instrumen DAET perlu disesuaikan, khususnya pada rubrik yang digunakan untuk melakukan penilaian (scoring) terhadap gambar. Salah satu langkah penyesuaian yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan komponen gambar dan definisi sebagai satu kesatuan yang diberi skor.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
315	Hablinur Al-Kindi;2011;Skripsi	Analisis Tekno Ekonomi Mikrphidro Untuk Desa Mandiri Energi Di Kampung Lebakcipung, Hegawrnmanah, Cibeber Dan Lebak Provinsi Banten	1. Program pengadaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kampung Lebak picung merupakan program CSR dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) IPB. 2. Daya maksimal mikrohidro sebesar 7 kW dengan lama penyalaan 15 jam maka energi yang dihasilkan 105 kWh. 3. Biaya energi adalah Rp 1.015/kWh, sedangkan masyarakat Kampung Lebakpicung hanya membayar sekitar Rp 239/kWh. 4. Menghitung NPV, IRR, dan Payback Period dengan mengasumsika tarif PLN sebagai pemasukan dan tarif PLTMH sebagai pengeluran. Tujuan pengasumsian adalah untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat Kampung Lebakpicung dibandingkan dengan tarif reguler PLN. 5. Pengasumsian dibandingkan dengan golongan tarif pelayanan sosial dan golongan tarif rumah tangga. Dengan menyamakan pemakaian sebesar 105 kWh. Untuk golongan tarif pelayanan sosial 2200 VA, NPV sebesar Rp 11.1272.88, IRR 10, 6 % dan Payback period tahun ke antara tahun ke 17 dan 18. Golongan tarif rumah tangga 1300 VA, NPV sebesar Rp 86.216.920, IRR sebesar 14,5 % dan Payback Period antara tahun ke 10 dan 11. Golongan tarif rumah tangga 2200 VA, NPV sebesar Rp 88.898.693, IRR sebesar 14,6 % dan Payback Period antara tahun ke 10 dan 11 6. Potensi daya mikrohidro pada musim hujan adalah 74 kW dan pada musim kemarau sebesar 25 kW. 7. Pengadaan unit pengolahan kopi untuk menciptakan desa mandiri energi dengan memanfaatkan daya listrik untuk pengolahan kopi. Mesin yang dibeli adalah mesin sangrai dan pembubuk kopi. 8. Harga kopi yang dijual adalah Rp 2.500 /kg dengan produksi kopi 1 ton per tahun. Payback period antara tahun ke 1 dengan NPV pada tahun ke 20 sebesar Rp 29.9805143.	1. Sebaiknya tarif yang telah ditetapkan diperbaharui agar dana perbaikan kerusakan PLTMH cukup. 2. Pengadaan unit pengolahan kopi dirawa bersama-sama setiap masyarakat Kampung Lebakpicung.
316	Wulandari;2011;Skripsi	Implementasi Manajemen Kolaboratif Dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Kampung Citalahab Sentral - Cikaniki, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat)	1. Pelaksanaan Kolaborasi dalam program ekowisata berbasis masyarakat di Kampung Citalahab telah berada pada tahap ke tiga yaitu melaksanakan kesepakatan. Namun, kolaborasi hanya sebatas pelaksanaan saja dan belum diadakan kegiatan mereview kesepakatan. Selain itu juga belum adanya pelibatan stakeholder lain seperti dinas pariwisata dan swasta dalam pengembangan kesepakatan. Apabila di analisis dengan menggunakan tujuh prinsip kolaborasi yang dikemukakan oleh Borrini- Feyerabend, et al (2000) maka pelaksanan kolaborasi tersebut dapat dikatakan telah memenuhi prinsip pertama sampai kelima yaitu: (1) Mengakui perbedaan nilai, kepentingan dan kepedulian para stakeholder; (2) terbuka bagi berbagai model hak pengelolaan SDA; (3) terciptanya transparansi dan kesetaraan; (4) masyarakat sipil mendapatkan peranan dan tanggung jawab yang lebih punya arti; (5) memperkuat kapasitas dan keunggulan komparatif dari berbagai aktor kelembagaan yang terlibat. Sedangkan penerapan prinsip kolaborasi yang ke enam dan ketujuh belum dapat dilihat dari kegiatan ekowisata berbasis masyarakat di Kampung Citalahab ini. Hal ini karena belum pernah diadakannya kaji ulang kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat kesepakatan. Oleh karena itu tidak ada petikan pelajaran yang dapat diambil untuk melakukan perbaikan pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat di Kampung Citalahab. 2. Manfaat pengelolaan kolaboratif ekowisata berbasis masyarakat di Kampung 63 Citalahab meliputi manfaat ekonomi, sosial dan manfaat ekologis. Manfaat ekonomi yang dirasakan yaitu adanya penyerapan tenaga kerja lokal sebagai penyedia home stay, pemandu lokal, porter dan juru masak. Selain itu juga membuka peluang usaha bagi masyarakat lain untuk membuka warung disekitar tempat wisata. Manfaat sosial yaitu mencakup meningkatnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang ekowisata, pelestarian budaya lokal khususnya budaya sunda dan terjadi pula transfer informasi antara masyarakat dan para wisatawan. Kemudian manfaat ekologis dari kegiatan ekowisata ini yaitu masyarakat ikut membantu taman nasional untuk menjaga sumberdaya alam yang ada dalam kawasan.	1. Mengkaji ulang Kesepakatan yang ada antara KSM Warga Saluyu dan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan kemudian dibentuk kesepakatan yang baru dengan melibatkan multi stakeholder dari berbagai kalangan seperti pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata, pemerintah desa, biro perjalanan wisata, LSM dan Perguruan tinggi. Selain itu harus ada payung hukum yang pasti dalam kesepakatan tersebut sehingga bila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak yang telah melakukan. Hal ini diperlukan agar kegiatan ekowisata di kampung ini dapat berkembang dengan baik dan memiliki manajemen yang dikelola dengan baik pula. Dengan demikian ekowisata bisa dijadikan mata pencaharian yang menjanjikan bagi masyarakat lokal. 2. Adanya usaha penguatan kelembagaan KSM oleh Balai Taman Nasional Halimun Salak melalui pembinaan dan pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan. 3. Adanya upaya pembagian hasil usaha ekowisata agar semua anggota KSM merasa mendapat keuntungan yang sama. Contohnya seperti berikut: adanya potongan pendapatan tiap rumah yang diambil dari hasil usaha ekowisata, kemudian dalam jangka waktu tertentu misalnya satu bulan maka hasil potongan tersebut dibagikan secara merata kepada masing-masing rumah.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
317	Febriany Sakina Tinambunan;2011;Skripsi	Pengetahuan Masyarakat Tentang Konservasi Sumberdaya Hutan Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Sukabumi, Jawa Barat	1. Pengetahuan masyarakat tentang konservasi terwujud dari adanya aturan atau larangan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, baik larangan yang tumbuh dengan sendirinya maupun larangan yang disosialisasikan oleh BTNGHS. Larangan-larangan tersebut yaitu larangan memasuki kawasan cagar alam, larangan menggarap lahan, larangan menebang pohon, dan larangan menjual hasil hutan. 2. Dalam interaksinya dengan hutan, masyarakat masih terus melakukan pemanfaatan kawasan berupa budidaya pertanian, menebang pohon, mengambil kayu bakar dan mengambil rumput untuk pakan ternak. Meskipun telah ada aturan yang melarang kegiatan pemanfaatan tersebut masyarakat tidak serta merta dapat meninggalkan aktivitas tersebut. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak memiliki keahlian lain yang dapat dijadikan mata pencaharian. Oleh karena itu sampai saat ini masyarakat tetap melakukan kegiatan pemanfaatan dengan berusaha meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan.	Pengelolaan suatu kawasan khususnya Taman Nasional untuk menjaga kondisi agar tetap lestari dibutuhkan keterlibatan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan. Perhatian dan dukungan yang cukup dari pemerintah atau petugas BTNGHS sangat diharapkan agar dapat mengkondisikan masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengelolaan TNGHS. Akan tetapi karena kebutuhan masyarakat yang terus berjalan dan tidak adanya keahlian lain yang dimiliki masyarakat menjadikan masyarakat tidak siap atas aturan-aturan yang dikeluarkan. Meskipun pada umunya mereka memahami mengapa dilakukan pembatasan akses terhadap kawasan TNGHS. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah untuk membuat program-program yang dapat meningkatkan keahlian masyarakat dibidang-bindang yang tidak bertentangan dengan pelestarian kawasan hutan. Dengan demikian pengelolan 36 kawasan TNGHS akan lebih mudah dilaksanakan karena adanya dukungan dari masyarakat.
318	Septian Wiguna;2012;Skripsi	Analisis Sumberdaya Sosial Dalam Pengelolaan Kawasan Taman Nasional (Studi Kasus : Kasepuhan Citorek Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, Provinsi Banten)	1. Unsur-unsur sumberdaya sosial masyarakat Kasepuhan Citorek adalah tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga adat dan sesama masyarakat Citorek masing-masing 90% dan 97%, serta tingkat kepercayaan sedang terhadap pihak luar dengan 71%. Tingkat jaringan sosial yang tinggi adalah inisiatif penyelesaian konflik masyarakat Kasepuhan Citorek dengan 96% dan terendah terhadap lembaga formal dengan 72%. Tingkat norma yang dimiliki masyarakat Kasepuhan Citorek tinggi pada norma agama dengan 93% dan menyatakan rendah terhadap norma aturan pemerintah dengan 24%. 2. Faktor sumberdaya sosial yang dapat dimobilisisi terhadap pengelolaan kawasan adalah tingkat kepercayaan yang tinggi, norma sosial yang ada di masyarakat Kasepuhan Citorek dengan kegiatan pertanian dan perkebunannya, dan jaringan sosial yang kuat antar masyarakat Kasepuhan Citorek. 3. Faktor sumberdaya sosial yang dapat didayagunakan untuk pengelolaan kawasan adalah kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kawasan taman nasional, lembaga adat, dan norma adat yang berkaitan dengan konservasi seperti pembagian hutan menurut fungsinya, dan kedekatan dari jaringan sosial yang ada dapat dimobilisasi dengan pendekatan terhadap lembaga adat sebagai mobilisator masyarakat Kasepuhan Citorek.	1. Peningkatan jumlah sumberdaya manusia TNGHS dalam pengelolaan kawasan taman nasional yang berbasis masyarakat. Peningkatan jumlah SDM dapat dilakukan dengan merekrut tenaga honorer dari masyarakat KasepuhancCitorek dengan sistem kontrak tahunan. 2. Peningkatan hubungan kerja antara TNGHS dengan lembaga adat Kasepuhan Citorek sebagai mobilisator masyarakat ke arah pengelolaan taman nasional. 3. Peningkatan hubungan kerja antara TNGHS dengan pemerintah daerahcKabupaten Lebak dan perusahaan yang terkait dengan kawasan tamancnasional untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam halcsumberdaya manusia dan sumber dana. 4. Sosialisasi intensif kepada masyarakat atas program-program TNGHS untukcmemenuhi kesadaran masyarakat atas pentingya program pemberdayaan masyarakat yang diberikan.
319	Kurniawan Gilang Widagdyo;2012;Jurnal	Analysis Of Strtegic Management For Ecotourism Development Toward Community Involvement And Natural Conservation At Tn Gunung Halimun Salak	Regarding to determine how correlation between ecotourism and natural conservation appear, interview result and questionnaire distribution provide similar result where those method explained there are positive significant correlation between ecotourism and natural conservation. It means that ecotourism bring positive impact (Determinant Coefficient 32%) toward natural conservation and biodiversity protection, it shown in several ecotourism activities that representing education toward natural protection.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
320	Hermanto,dkk;2012;Jurnal	FILOSOFI HIDUP SEBAGAI BASIS KEARIFAN LOKAL (Studi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul)	Filosofi hidup masyarakat adat kasepuhan dilandasi doktrin "Pancer pangawinan" yaitu mempersatukan manusa jeung kemanusaanna (manusia dan kemanusiaannya) pembinaan moral "Ngaji diri"(mawas diri) tercermin dalam semboyan "Tilu sapamulu, dua sakarupa nu hiji eta keneh"mempunyai arti; tiga kesesuaian/menyatu, dua serupa dan yang satu itu juga, pilar kehidupan tekad, ucap jeung lampah (kemauan/niat, perkataan dan perilaku), nyanghulu ka hukum nyanghunjar ka nagara mufakat kudu sarerea (taat pada hukum dan berlindung pada negara mufakan harus keseluruhan)yang tercermin dalam sistem kepercayaan, kemasyarakatan dan kelembagaan sebagai tatali paranti karuhun mampu mempertahankan kearifan lokal mereka.	
321	Yuni Yudiarti;2012;Tesis	Dampak Kegiatan Wisata Alam Kawasan Gunung Salak Endah Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	1. Perubahan fungsi kawasan dan pengelola kawasan, masih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dalam kawasan TNGHS. Usaha dan jasa wisata yang dilakukan dikedua desa meliputi usaha sarana prasarana pariwisata dan jasa wisata, yang didominasi oleh usaha jasa wisata sebesar 84% dan 16% usaha sarana prasarana. Cara keterlibatan dalam usaha didominasi oleh berusaha sendiri sebesar 70% artinya aktif berpartisiasi dan terdapat kecenderungan merasa memiliki akan asset dan lahan yang digunakan. Sebanyak 15% dilibatkan oleh penyelenggara wisata karena adanya unsur kepercayaan; 8% dilibatkan oleh keluarga sebagai pewarisan usaha dan sisanya 7% dilibatkan aparat desa dan pemilik warung. 2. Perubahan fungsi kawasan dan pengelola kawasan, telah memberikan peningkatan perilaku konservasi masyarakat walaupun didasari oleh motif. Kegiatan wisata GSE secara sosial memberikan dampak positif diantaranya adalah peningkatan sarana prasarana umum dikedua desa yaitu - fasilitas jalan, penerangan dan informasi, sarana pendidikan-; keterbukaan kepada pendatang, dan bantuan pendanaan, namun juga meningkatkan konflik sosial, perubahan alokasi waktu bekerja; terjadi penurunan kegiatan sosial, dan adanya efek peniruan dikalangan muda 3. Kegiatan wisata GSE meningkatkan jumlah orang yang terlibat dalam wisata, meningkatkan jumlah dan jenis pekerjaan/mata pencaharian. Peluangpeluang mata pencaharian yang tercipta dari kegiatan wisata memberikan kekenyalan bagi masyarakat yang terlibat dalam wisata. Masyarakat yang tidak terlibat lebih didominasi pada sektor pertanian, sedangkan yang terlibat dalam wisata pada sektor perdagangan dan jasa.	1. Pihak BTNGHS perlu mensosialisasikan peraturan penyelengaraan usaha dan jasa wisata di kawasan konservasi. Hal ini untuk memberikan kepastian dan legalitas usaha dan jasa wisata alam baik masyarakat, perusahaan daerah, perusahaan Negara dan pelaku usaha lainnya. Bagi pelaku usaha dan jasa oleh masyarakat diperlukan diversifikasi usaha dan jasa wisata, terutama penyediaan makanan khas setempat dan kerajinan khas berdasarkan potensi sumberdaya yang ada. Karena beberapa pengunjung menyatakan makanan yang diperjualbelikan masih umum dan dapat dijumpai dimana saja. 2. Pihak-pihak yang terkait langsung dengan penyelengaaraan wisata alam di kawasan GSE, harus terus menerus melakukan monitoring terhadap dampak sosial ekonomi dengan melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai potensi, peran dan peluang masyarakat untuk meningkatkan keberhasilan penyelengaraan wisata di kawasan GSE 3. Pengembangan wisata di GSE harus mempertimbangkan perencanaan sosial dan sesuai dengan semangat partisipatif masyarakat. Strategi sosial ekonomi sangat diperlukan untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan sosial terkait dengan pengembangan wisata di GSE.
322	Zainul Fuad Akbar;2013;Skripsi	Pelaksanaan Dan Capaian Pendidikan Konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Program pendidikan konservasi yang dilaksanakan oleh pengelola TNGHS diantaranya kegiatan pembinaan kader konservasi, pameran, pembuatan media informasi (buletin, leaflet, film), kegiatan Bina Cinta Alam bagi siswa, program Adopsi Pohon serta PK di Suaka Elang Loji sebagai sarana pendidikan konservasi bagi masyarakat umum. 2. CoE Riset dan Pendidikan Konservasi masih dalam tahap pengembangan periode I (2013-2017) dan belum mencapai ke arah pelaksanaan program yang nyata. Namun telah ada 3 luaran yang tercapai, dari 8 luaran yang ditetapkan, sampai dengan Juni 2013. 3. Pengetahuan dan sikap masyarakat Desa Malasari, baik anggota MKK maupun non MKK tidak berbeda secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pesan-pesan konservasi sudah menyebar di masyarakat Desa Malasari. Salah satu manfaat dengan adanya program pendidikan konservasi bagi masyarakat adalah meningkatnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan, serta menurunnya gangguan terhadap kawasan hutan.	1. Reward bagi anggota MKK yang aktif perlu diberikan sebagai penguatan motivasi masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan konservasi kawasan. 2. Pihak TNGHS sebaiknya terlebih dahulu mengkaji program keterampilan yang diberikan kepada anggota MKK agar sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat. 3. Optimalisasi peran website dan pengembangan media perlu dilakukan untuk dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. 4. Optimalisasi peran guru untuk menjamin keberlanjutan PK di sekolah dengan melakukan ToT dan menyediakan media pengajaran.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
323	Robinson;2013;Skripsi	Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Konservasi Hutan Pada Siswa Sekolah Dasar Di Sekitar Hutan Kawasan Gunung Salak Endah Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Kondisi fisik, fasilitas, sarana-prasarana di SDN Gunung Bunder 03, SDN Gunung Bunder 04 dan SDN Gunung Picung 06 hampir sama, namun SDN Gunung Sari 01 paling baik dibandingkan ke tiga sekolah contoh lainnya yang memiliki kelebihan berupa fasilitas penunjang perpustakaan dan ruang kesehatan sekolah. Penerapan pendidikan konservasi hutan di SDN Gunung Sari 01 dilakukan melalui kegiatan kokurikuler apotek hidup sekolah dalam mata ajaran PLH dan kegiatan esktrakurikuler, sedangkan di ketiga sekolah contoh lainnya hanya melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah. 2. Pengetahuan, sikap dan perilaku konservasi hutan pada siswa sekolah dasar di keempat sekolah dasar contoh sebagian besar tergolong dalam kategori sedang. Tingkat pengetahuan dalam kategori tinggi terbesar di SDN Gunung Sari 01 (46,2 %), tingkat sikap baik terbesar di SDN Gunung Sari 01 (30,8 %) dan tingkat perilaku baik terbesar di SDN Gunung Bunder 03 (41,2 %). Skor rata-rata pengetahuan, sikap dan perilaku tertinggi dicapai oleh responden dari SDN Gunung Sari 01. 3. Proses pembelajaran tentang konservasi hutan di SDN Gunung Sari 01 yang menyampaikan materi tentang konservasi hutan lebih banyak dan didukung sarana-prasarana yang lebih baik, media/alat bantu pembelajaran lebih beragam, alokasi waktu pembelajaran materi maupun praktek lebih panjang, telah dapat memberikan capaian skor rata-rata pengetahuan, sikap dan perilaku terbaik diantara ketiga sekolah contoh lainnya. Namun, proses pembelajaran tentang konservasi hutan di SDN Gunung Bunder 03 yang lebih banyak dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat menghasilkan persentase responden terbesar yang memiliki tingkat perilaku dalam kategori baik.	1. Perlu adanya inisiatif dari sekolah contoh dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak (stakeholder), yaitu masyarakat sekitar, TNGHS, LSM, dan pihak lainnya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 2. Perlu adanya penguatan materi mengenai status dan fungsi kawasan hutan Gunung Salak di SDN Gunung Sari 01, sedangkan di SDN Gunung Bunder 03, tidak hanya materi tentang status dan fungsi kawasan hutan Gunung Salak, namun juga hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan hutan, dampak kerusakan hutan bagi kehidupan, serta peran siswa dalam menjaga hutan. Sementara, di SDN Gunung Bunder 04 dan SDN Gunung Picung 06 penguatan materi juga perlu dilakukan tidak hanya tentang pengetahuan mengenai status dan fungsi kawasan hutan Gunung Salak, namun juga tentang kegiatan yang tidak boleh dilakukan di hutan dan peran siswa untuk ikut serta menjaga hutan. Metode yang lebih beragam dan/atau alokasi waktu yang lebih panjang, serta media yang bervariasi dapat meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan baik di SDN Gunung Bunder 03, SDN Gunung Bunder 04 dan SDN Gunung Picung 06, sedangkan alokasi waktu pembelajaran melalui kegiatan nonkurikuler sebaiknya ditambah di SDN Gunung Sari 01, SDN Gunung Bunder 04 dan SDN Gunung Picung 06, supaya siswa lebih banyak berinteraksi dengan hutan sehingga dapat mengenal hutan lebih baik dan mempraktekkan pengetahuan yang didapatkan di kelas, yang lebih lanjut dapat menumbuhkan perilaku positif.
324	Laela Nur Baity;2013;Skripsi	Penilaian Kinerja Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dalam Mewujudkan Ruang Kelola Masyarakat	1. Capaian kinerja setiap indikator pengelolaan TNGHS dalam mewujudkan ruang kelola masyarakat yaitu, bernilai baik untuk indikator pertama (terbentuknya zona yang menyediakan ruang kelola masyarakat) dan kedua (terkendalinya konflik pemanfaatan sumberdaya alam di dalam kawasan), serta bernilai sedang untuk indikator ketiga (berkembangnya pemanfaatan lestari di dalam ruang kelola masyarakat guna menopang kehidupan sehari-hari). Ketiga indikator tersebut telah memenuhi standar minimal kinerjanya. 2. Rekomendasi yang diberikan kepada pihak pengelola TNGHS yaitu pada sistem pengelolaan data dengan melakukan pembenahan database dan mengakomodasi kegiatan yang disyaratkan dalam standar kinerja, memfokuskan dan meningkatkan intensitas kegiatan pemantauan sumberdaya alam di dalam ruang kelola masyarakat, membuat SOP berkaitan dengan pemanfaatan ruang kelola dan sumberdaya alam, serta melakukan upaya pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam.	1. Perbedaan lokasi studi kasus, akan menentukan pula hasil penilaian kinerja pengelolaannya, sehingga perlu dilakukan kajian dengan lokasi studi kasus yang berbeda pada kawasan zona khusus TNGHS. Semakin banyak lokasi yang dievaluasi, diharapkan akan semakin banyak memberikan gambaran tentang kondisi kinerja pengelolaan taman nasional. 2. Terjaminnya ruang kelola masyarakat hanya satu dari tiga kriteria untuk mewujudkan kelestarian fungsi sosial budaya dalam pengelolaan kawasan taman nasional, sehingga perlu dilakukan analisis kinerja untuk kriteria yang lain, sehingga didapatkan hasil penilaian secara lebih komprehensif sebagai masukan bagi unit manajemen.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
325	Nuryanto,dkk;2013;Jurnal	Kajian Pola Kampung Dan Rumah Tinggal Pada Arsitektur Tradisional Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptarasa Di Kab. Sukabumi-Jawa Barat	1. Kepercayaan warga KasepuhanCiptarasa terhadap batas nu teu ka deuleu atau nu teu karampa pada kampung dan rumah merupakan bukti adanya pandangan kosmologis Warga Ciptarasa. Hal tersebut secara tidak langsung juga sebagai bukti pengakuan terhadap hal-hal yang tidak kasat mata (sakral), sehingga memunculkan perasaan kagum dan tunduk pada objek-objek yang disakralkan dan menjadi landasan hubungan yang kuat dengan yang disakralkan. Hubungan tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan berbagai ritual adat 2. Bentuk panggung, pembagian komponen lelemahan, pangadeg dan suhunan simbol suku, awak, hulu serta pemahaman makna tangtungan jelema pada rumah merupakan bentuk kesetiaan warga Kasepuhan Ciptarasa kepada leluhurnya. Demikian juga pada organisasi denah rumah dengan adanya pembagian daerah tepas, tengah, pawon, penggunaan material rumah, bentuk, bahan serta ragam hias pada atap 3. Pandangan kosmologis warga Kasepuhan Ciptarasa terhadap tatali paranti karuhun semakin jelas pada orientasi bumi ageung yang diletakan pada sumbu utara-selatan, sesuai pemahaman warga terhadap makna simbolik selatan sebagai tempat bersemayamnya Nyi Sanghyang Sri Pohaci (Dewi Padi). Rumah serta fasilitas lain harus menghadap bumi ageung atau disesuaikan dengan kontur tanah dan tidak boleh ngalangkangan kepada bumi ageung, karena pamali dengan tetap berorientasi pada sumbu tersebut. Di samping itu, pelaksanaan berbagai upacara pada proses mendirikan kampung dan rumah, baik sebelum, selama maupun sesudah serta ritual adat lainnya merupakan wujud syukur kepada Sang Murbehing Alam sekaligus sebagai 'persembahan' kepada para leluhur	1. Keberadaan Kasepuhan Ciptarasa dan Ciptagelar, terutama upacara adat seren taun, ngaruwat bumi serta ritual adat berkala lainnya, hendaknya dijadikan daya tarik bagi wisatawan, baik domestik maupun manca negara untuk meningkatkan pendapatan daerah 2. Dibuatkan peraturan daerah yang khusus mengatur kampung dan rumah adat di Jawa Barat yang dilindungi pemerintah dan dijadikan benda cagar budaya yang harus dijaga serta dilestarikan keberadaannya, sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang 3. Para perancang bangunan dan kota, arsitektur kampung dan rumah kedua kasepuhan tersebut dapat dijadikan sumber inspirasi bagi konsep disain. terutama yang bernuansakan arsitektur tradisional Sunda, seperti bentuk kampung galudra ngupuk, satria lalaku, gajah katunan, pancuran emas, pola bengkung ngariung bongkok ngaronyok, panggung, ngupuk, julang ngapak. 4. Para pendidik dibidang arsitektur, adanya jenis kampung sa adat saparipolah, saadat teu saparipolah dan teu saadat teu saparipolah di kalangan komunitas Kasepuhan Kesatuan Adat Banten Kidul dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pengetahuan tentang jenis-jenis kampung yang taat adat (sakral) dan yang tidak taat adat (profan).
326	Nuhrison M. Nuh;2013;Jurnal	Paham Keagamaan Lokal (Studi Kasus Di Kasepuhan Ciptagelar)	1. Kepercayaan Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar masih tetap dapat eksis, karena diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi, dan adanya keyakinan barang siapa yang melanggar aturan adat akan memperoleh tulah (musibah) dari leluhur (karuhun) 2. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar secara formal mengaku beragama Islam, tetapi dalam kenyataannya terjadi sinkretisme antara ajaran Islam dengan kepercayaan karuhun. Bahkan sebagian besar masyarakat lebih banyak mengamalkan ajaran karuhun daripada syariat Islam. 3. Relasi sosial antara masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dengan masyarakat sekitar dan pemerintah terjalin dengan baik, karena mereka menjalankan ajaran leluhur yang menekankan hidup selaras dengan Tuhan, manusia dan alam sekitar. 4. Pelayanan hak-hak sipil warga kasepuhan, sudah diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya mereka berharap agar pemerintah dapat membangunkan jalan, bangunan sekolah SMP dan tambahan guru SD yang dirasakan masih kurang.	1. Karena mereka sudah mengakuberagama Islam, dan masih mengamalkan ajaran yang dianggap sinkretis, maka perlu menugaskan seorang penyuluh agama bertugas di daerah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan budaya, dalam arti upacara-upacara yang dilakukan diberi warna Islam. 2. Agar pemerintah setempat memperhatikan tuntutan ereka, agar mereka tidak merasa kurang diperhatikan, bila ibandingkan dengan masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
327	Chatrina Clara Raisa Sihombing;2013;Skripsi	Analisis Stakeholders Dan Ekonomi Pusat Konservasi Keanekaragaman Hayati (PKKH) Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) (Studi Kasus : Desa Puraseda Dan Malasari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)	1. Estimasi nilai manfaat non guna (penelitian dan pendidikan, warisan, dan perlindungan habitat dan ekosistem) ialah Rp 1.088.772.227/tahun. Jika dikonversikan ke 25 tahun mendatang menggunakan metode compounding maka didapat Rp 19.597.970.210,117/tahun. Berdasarkan nilai tersebut, dapat dilihat meski hanya berdasarkan preferensi 2 desa (Puraseda dan Malasari), nilai hutan TNGHS sangat tinggi berdasarkan manfaat nonguna. Hal ini akan terus terjaga jika TNGHS tetap dalam ekosistem aslinya dan pepohonan tidak ditebang. 2. Kegiatan Pusat Konservasi Keanekaragaman Hayati sebaiknya tetap dilanjutkan. Namun diperlukan perencanaan yang matang dalam pembuatan master plan PKKH ini, karena hutan tersebut melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang vital dan dapat menyinggung isu budaya, ekonomi, dan politik. 3. Stakeholders sudah cukup terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan PKKH serta stakeholders cukup dilibatkan dalam penngambilan keputusan, meskipun tidak semua stakeholders.	1. Diperlukan sosialisasi untuk program PKKH baik dari dinas pemerintahan ataupun Balai TNGHS. Sehingga para stakeholders yang lain dapat mengerti tujuan dari PKKH dan tindakan yang akan dilakukan sehingga masyarakat apat mendukung program ini. 2. Berdasarkan perhitungan proxy WTP untuk mengestimasi nilai PKKH maka program ini dianggap baik untuk tetap dijalankan. Jika berhasil, kegiatan ini akan memungkinkan datangnya investasi yang menguntungkan daerah namun tidak merusak habitat dan ekosistem asli TNGHS. 3. Demi mensukseskan pelestarian TNGHS diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan masyarakat desa penyangga hutan serta menggunakan hukum adat desa sebagai salah satu hukum yang berlaku untuk menjaga keamanan hutan. 4. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti akan dampak wisata jika PKKH ini diadakan karena salah satu tujuan dari PKKH ini juga adalah wisata alam yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
328	Novia Fridayanti;2013;Skripsi	Analisis Struktur Dan Strategi Nafkah Rumah Tangga Petani Sekitar Kawasan Hutan Konservasi Di Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi	Pola kepemilikan lahan di Desa Cipeuteuy antara lain kepemilikan melalui warisan dan jual beli. Kepemilikan lahan melalui sistem waris lebih banyak dibandingkan melalui jual beli karena rata-rata masyarakat tidak menjual lahan, melainkan menggunakannya untuk kegiatan pertanian. Sedangkan pola penguasaan lahan di desa ini antara lain sistem pinjam-pakai yang digunakan pada lahan di dalam kawasan TNGHS, sistem bagi hasil yang digunakan untuk lahan milik orang luar desa, dan juga lahan eks HGU PT. Intan Hepta. Khusus untuk lahan di kawasan TNGHS, terdapat sistem zonasi yang mengatur kawasankawasan yang boleh dimanfaatkan dan yang dilarang dimanfaatkan untuk kegiatan diluar konservasi. Akibat sistem zonasi yang berubah setelah perluasan kawasan TNGHS, lahan-lahan pertanian masyarakat yang awalnya aman berada di zona pemanfaatan harus beralih posisi ke zona rehabilitasi, zona inti, atau zona rimba. Hal ini berakibat pada status penguasaan lahan yang tidak aman bagi para petani pemanfaat lahan dan berpengaruh pada strategi nafkah yang mereka jalankan. Sumbangan sektor pertanian dan sektor non-pertanian terhadap pendapatan rata-rata rumahtangga responden per tahun dari semua golongan pendapatan hampir seimbang. Pendapatan yang diperoleh oleh responden dari sektor nonpertanian adalah sebesar 43 persen dan dari sektor pertanian sebesar 57 persen. Secara spesifik, golongan pendapatan tinggi kontribusi farm sekitar 48 persen dan non-farm sebesar 52 persen. Pada golongan pendapatan sedang, kontribusi farm sebesar 62 persen sedangkan non-farm sebesar 38 persen. Terakhir pada golongan pendapatan rendah, kontribusi farm sebesar 73 persen dan non-farm sebesar 27 persen. Pengeluaran pangan menjadi penyumbang terbesar terhadap total pengeluaran rumahtangga yakni lebih dari 60 persen dan berdasarkan tingkat pendapatan dan pengeluaran, dapat dianalisis tingkat kemampuan menabung (saving capacity) yang mana semua golongan pendapatan baik strata tinggi, sedang, dan rendah mampu melakukan saving.	Saranyangdapatdiberikanolehpenelitiadalahprosespeneguhandalam persoalan penguasaan lahan masyarakat di Desa Cipeuteuy. Pasalnya, perjanjian pinjam pakai lahan di TNGHS masih berupa perjanjian lisan tanpa ada bukti surat keterangan. Hal ini tentu bisa menjadi bibit konflik masa depan jika tidak diselesaikan dari dasarnya. Perjanjian tertulis disarankan agar kedua belah pihak bisa dengan tenang menjalankan aktivitasnya masing-masing. Terutama bagi para petani pemanfaat lahan dimana perjanjian dan aturan tertulis bisa memberikan rasa aman bagi mereka untuk bercocok tanam dengan tenang meskipun bukan di lahan milik mereka sendiri. Jika petani dapat memiliki rasa aman tersebut, tentu saja petani dapat lebih memaksimalkan sektor pertanian yang menjadi basis nafkah mereka sejak dulu.
329	Popie Susanty;2013;Tesis	Komunikasi Partisipatif Pada Pelaksanaan Program Pendidikan Lingkungan Hidup Green School Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi	1. Komunikasi partisipatif pada pelaksanaan program PLH Green School tergolong tinggi, hal ini bisa ditunjukkan dengan arah komunikasi, saluran komunikasi dan partisipasi peserta yang tinggi pada pelaksanaan program PLH Green School 2. Usia, pendidikan, motivasi dan kepemilikan media tidak berhubungan nyata dengan komunikasi partisipatif. Kejujuran fasilitator tidak berhubungan nyata dengan komunikasi partisipatif, sedangkan keahlian dan daya tarik berhubungan sangat nyata dengan arah komunikasi. Keakraban fasilitator berhubungan nyata dengan saluran komunikasi dan partisipasi. Dukungan kelembagaan tidak berhubungan nyata dengan arah, saluran dan partisipasi pada pelaksanaan program PLH Green School. 3. Komunikasi partisipatif dengan indikator arah dan saluran komunikasi pada pelaksanaan program PLH Green School berhubungan sangat nyata dengan perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) peserta. 4. Perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) peserta program PLH Green School berhubungan sangat nyata dengan praktek peserta.	1. Program pendampingan masyarakat harus mempersiapkan fasilitator yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga tujuan program dapat dicapai. 2. Perlu keberlanjutan program pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis masyarakat dalam pencegahan dan pelestarian Daerah Aliran Sungai sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
330	Nia Kurniasih;2013;Skripsi	Pengembangan Produk Wisata Di Kawasan Wisata Terpadu Tamansari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	Kawasan Wisata Terpadu Tamansari yang memiliki keindahan bentang alam khas dipadu dengan keragaman seni, budaya, religi dan keunikan sejarah masa lalu yang tinggi serta kekhasan sosial masyarakat memiliki daya tarik masing-masing yang dapat dikembangkan menjadi produk wisata. Pengembangan produk meliputi aktivitas, fasilitas, dan barang. Pengembangan produk berupa aktivitas dilakukan melalui pengemasan produk dalam bentuk program wisata berupa pengembangan wisata konservasi Tamansari, wisata pendidikan industri Tamansari, Mulih ka Lembur Tamansari, dan wisata religibudaya Tamansari. Pengembangan produk berupa fasilitas berupa pembangunan Warsita, penyediaan kendaraan khusus wisata, demplot tanaman dan tempat pengolahan souvenir wisata konservasi serta penyediaan demplot tanaman aromatik. Pengembangan produk berupa barang dilakukan dengan melakukan penganekaragaman souvenir berupa kerajinan tangan (miniatur pura, bangunan adat, pakakas Sunda, miniatur jamur, aneka motif khas sepatu dan sandal, aneka olahan getah pinus dan hasil kerajinan dari bunga dan daun kering) dan makanan (fortifikan susu dari limbah ulat sutera, dan aneka jamur konsumsi).	1. Diperlukan adanya kerjasama yang erat antara berbagai pihak dalam mengelola dan mengembangkan produk wisata Kawasan Wisata Terpadu Tamansari secara terintegrasi. Pihak pemerintah dapat berkontribusi dalam menyediakan sarana prasarana, memasarkan produk, dan melakukan pengawasan di segala sektor yang mendukung kegiatan wisata. Pengelola disetiap lokasi wisata secara terintegrasi harus memberikan pelayanan yang unggul dalam pengembangan produk. Masyarakat ikut terlibat aktif secara positif dengan berperan sebagai pemandu wisata danpenyedia produk khas. 2. Diadakan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan produk wisata dan peningkatan pelayanan wisatawan.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
331	Meti Ekayani,dkk;2014;Jurnal	Tantangan Membangun Wisata Alam Berbasis Masyarakat Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Perubahan status kawasan mengharuskan penyesuaian pemanfaatan dan pengelolaan kawasan wisata tersebut sesuai UU No 5 tahun 2009 tentang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. Peralihan tersebut mengakibatkan posisi dan peran masyarakat secara langsung dalam pengelolaan TNGHS menjadi tidak jelas. Peralihan kewenangan memerlukan waktu sehingga konsep dan ketentuan pemanfaata kawasan menjadi tidak jelas. PErum PErhutani dan Dinas Pariwisata sudah tidak berwenang atas pengelolaan pemanfaatan kawasan wisata tersebut, sedangkan BKSDH belum memiliki kepastian jenis pemanfaatan kawasan wisata terkait dengan masalah penataan zonasi kawasan TNGHS.	Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, perlu segera di dorong kebijakan yang mengarah pada penguatan kelembagaan, kejelasan legalitas, sinergitas kebijakan antara semua stakeholder yang berkepentingan
332	Meti Ekayani,dkk;2014;Jurnal	Wisata Alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak : Solusi kepentingan ekologi dan ekonomi	1. Jasling & Mineral berupa wisata alam di TNGHS memiliki nilai ekonomi tinggi, artinya TNGHS memiliki arti penting sebagai penyedia jasa wisata alam yang mengandalkan kelestarian dan keindahan alam. Oleh karena itu sumber daya alam tersebut harus dijaga karena tingginya nilai ekonomi wisata alam TNGHS sangat bergantung dari terjaganya kelestarian alam. 2. Tarif tiket wisata sesuai kesediaan membayar pengunjung (rataan WTP) menunjukkan bahwa pengunjung masih bersedia membayar lebih dari tarif yang berlaku. Nilai surplus konsumen menunjukkan wisatawan mendapat kepuasan lebih dari harga yang dibayarkan. Hal ini menunjukkan adanya nilai ekonomi potensial yang masih dapat direalisasikan sebagai tambahan manfaat bagi masyarakat dan TNGHS sebagai penyedia jasa wisata 3. Wisata alam TNGHS memberikan kontribusi penting bagi konservasi berupa dana konservasi dan pemenuhan ekonomi masyarakat berupa penyerapan tenaga kerja dan dampak ekonomi bagi perekonomian lokal. Kontribusi ini dapat ditingkatkan dengan memanfaat-kan surplus konsumen, salah satunya dengan menaikkan tarif tiket dan memaksimalkan belanja pengunjung 4. Masyarakat akan turut serta menjaga kelestarian kawasan konservasi jika mendapat manfaat ekonomi dari kegiatan wisata alam. Kelestarian kawasan diperlukan untuk kelangsungan wisata alam, yang artinya adalah kelangsungan pendapatan masyarakat itu sendiri.	
333	Dinda Satya Upaja Budi,dkk;2014;Jurnal	Angklung Dogdog Lojor pada Upacara Seren Taun	1. Kehadiran ADL bagi masyarakat KC dalam upacara Seren Taun bukan semata-mata hanya untuk kepentingan pertunjukan seperti pertunjukan dalam paradigma Barat atau kelengkapan ritual saja. Kehadiran ADL bagi para pemainnya dijadikan sebagai salah satu media do'a yang dibangun secara bersamaan dalam sebuah atmos!r doa bersama pada upacara ritual Seren Taun. 2. Kehadiran ADL dalam upacara ritual Seren Taun merupakan ekspresi budaya masyarakat KC. Hal ini tersirat dari pola ritmis yang repetitif dari instrumen angklung serta pola tabuh Dogdog Lojor yang begitu sederhana.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
334	Sahda Handayani;2014;Skripsi	Analisis Strategi Nafkah Masyarakat Kampung Sukagalih Terhadap Hasil Hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Khusus untuk lahan di kawasan TNGHS, terdapat sistem zonasi yang mengatur kawasan-kawasan yang boleh dimanfaatkan dan dilarang dimanfaatkan untuk kegiatan di luar konservasi. Saat ini kondisi Kampung Sukagalih terancam ekspansi perkebunan teh dan sawit, mulai banyaknya perkebunan sawit yang masuk membuat warga Sukagalih merasa takut dan tidak tenang. Karena perjanjian lahan dengan pihak TNGHS dan eks HGU telah habis kontrak.	Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah proses dalam persoalan pengelolaan lahan oleh masyarakat, seharusnya pemerintah melihat dengan benar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, jangan membuat peraturan tanpa melihat keadaan sekitar. Warga Sukagalih yang sejak dulu berada tinggal di dalam kawasan konservasi merasa hak-hak mereka terenggut. Perjanjian pinjam pakai lahan di TNGHS sudah habis, seharusnya pemerintah cepat menyelesaikan perpanjangan kontrak, jika tidak dapat membuat masyarakat tidak tenang. Inti permasalahan yang ada segera diselesaikan dengan cara pemerintah harus mengetahui sebenarnya program yang dibutuhkan masyarakat itu apa, bukan membuat program demi kekuasaan semata. Selain itu, pemerintah harus melindungi dan melihat bahwa masyarakat sukagalih berhak untuk mendapatkan hak dan kesejahteraan untuk hidup. petani membutuhkan rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas nafkah, jika petani telah mendapatkan rasa aman tersebut, tentu saja petani dapat lebih memaksimalkan sektor pertanian yang menjadi basis nafkah mereka sejak dulu.
335	Ali Khomsa, Dkk;2014;Buku	Aspek Sosio-Ekonomi, Pangan, dan Gizi Masyarakat Kasepuhan Adat Cipta Gelar di Jawa Barat		
336	La Ode Muhammad Ma'Ruf Asir;2014;Skripsi	Dampak Ekonomi dan Pengelolaan Wisata Aalam Pemandian Air Panas Gunung Salak Endah TNGHS, Kabupaten Bogor	1. Penilaian pengunjung terhadap kondisi alam objek wisata Pemandian Air Panas dinilai baik. Penilaian pengunjung terhadap fasilitas di objek wisata Pemandian Air Panas GSE dinilai sedang. Pengelola diharapkan dapat meningkatkan fasilitas objek wisata Pemandian Air Panas GSE agar wisatwan lebih merasa nyaman namun tetap memperhatikan kelestarian SDAL. 2. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari objek wisata Pemandian Air Panas GSE dinilai cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari pengeluaranpengunjung per kunjungan di lokasi wisata mencapai Rp 46 149. Nilai Keynesian Income multiplier adalah sebesar 1,41, nilai Ratio Income Multiplier tipe I adalah sebesar 1,86 dan nilai Ratio Income Multiplier tipe II adalah sebesar1,58. Nilai n Keynesian Income multiplier pada penelitian ini lebih dari satu (> 1), membuktikan bahwa adanya objek wisata Pemandian Air Panas GSE memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar objek wisata tersebut. Oleh karena itu adanya objek wisata ini memiliki arti penting bagi perekonomian masyarakat sehingga SDA yang ada di objek wisata Pemandian Air Panas GSE harus dilestarikan, agar masyarakat akan dapat terus merasakan dampak ekonomi apabila wisata alam Pemandian Air Panas GSE juga berlanjut 3. Masa peralihan pengelolaan objek wisata Pemandian Air Panas GSE menyebabkan masyarakat sekitar memanfaatkan keberadaan objek wisata dengan melakukan pengelolaan di objek wisata tersebut. Pengelolaan seahrusnya dilakukan oleh BTNGHS namun BTNGHS belum melaksanakan peran tersebut karena masyarakat belum mendukung. Pengelolaan yang sudah terbentuk oleh masyarakat saat ini sudah mendukung adanya pembangunan wisata alam berbasis masyarakat (community based tourism) namun pengelolaan tersebut masih memiliki kekurangan karena sebatas untuk memanfaatkan keberadaan onjek wisata.	1. Secara umum pengunjung menilai bahwa kondisi sumber daya alam di wisata Pemandian Air Panas GSE baik. Hal ini menunjukan bahwa, kegiatan wisata belum berdampak negatif terhadap sumber daya alam di TNGHS. Di sisi lain pengunjung menilai fasilitas wisata di Pemandian Air Panas GSE masih sedang. Hal ini perlu menjadi perhatian pengelola objek wisata untuk mengembangkan objek wisata Pemandian Air Panas GSE dengan memperhatikan kelestarian SDAL. 2. Dampak ekonomi dari kawasan objek wisata Pemandian Air Panas GSE dinilai cukup tinggi bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu diharapkan pengelolaan yang dilakukan dapat tetap melibatkan masyarakat dengan meningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat untuk menjaga SDAL sekitar kawasan agar dampak ekonomi dan keberlanjutan wisata dapat terus dirasakan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan pelestarian alam, gotong royong dalam kebersihan dan kelestarian lingkungan di objek wisata dan penanaman pohon di sekitar objek wisata 3. Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS) sebagai pemegang wewenang perlu melakukan upaya melakukan koordinasi dengan masyrakat pengelola terkait pengelolaan objek wisata Pemandian Air Panas GSE. Upaya tersebut dapat dilakukan untuk menyamakan persepsi para pihak terkait pengembangan objek wisata yang dapat mendukung konservasi dengan maksud untuk menyusun peraturan-peraturan terkait wewenang dan peran yang dimiliki, sehingga para pihak dapat melakukan peran sesuai dengan wewenang dan mekanisme yang jelas berdasarkan harapan bersama para pihak terkait. 4. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai carrying capacity kawasan objek wisata Pemandian Air Panas GSE sebagai salah satu indikator yang akan mempengaruhi keberlanjutan wisata tersebut

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
337	Rizqiyyah Yasmin Khoirunnisaa;2014;Skripsi	Estimasi Nilai dan Dampak Ekonomi Serta Prospek Pengembangan Wisata Gunung Bunder Pasca Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Terdapat dua faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap fungsi permintaan kawasan wisata Gunung Bunder. Faktor-faktor tersbut tersebut adalah umur dan lama mengetahui objek wisata. 2. Hasil perhitungan menunjukkan surplus konsumen pengunjung kawasan Gunung Bunder per kunjungan adalah sebesar Rp 115 027 per individu sehingga didapatkan nilai ekonomi kawasan wisata Gunung Bunder adalah sebesar 3 163 231 383 per tahun. 3. Nilai dampak ekonomi langsung kawasan wisata Gunung Bunder yaitu sebesar Rp 36 051 670, dampak ekonomi tidak langsung adalah sebesar Rp 32 791 338 dan dampak ekonomi lanjutan adalah sebesar Rp 18 603 332. Nilai keynesian income multiplier adalah sebesar 1.77. Nilai ratio income multiplier tipe I adalah sebesar 1.91 dan ratio income multiplier tipe II adalah sebesar 2.43. Berdasarkan hasil yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa kawasan wisata Gunung Bunder memiliki nilai ekonomidan dampak ekonomi yang besar pengaruhnya terhadap masyarakat lokal karena dapat memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar sehingga wisata Gunung Bunder harus terus dipertahankan. 4. Kawasan wisata Gunung Bunder berpotensi dikembangkan untuk kawasan wisata alam yang harus dijaga keberlanjutannya. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan daya tarik yang paling diminati oleh pengunjung yaitu pemandangan indah dan udara segar, selain itu keberadaan wisata Gunung Bunder juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar yaitu dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.	1. Pihak pengelola diharapkan dapat meningkatkan upaya promosi kawasan wisata Gunung Bunder sebagai kawasan wisata di taman nasional. Kegiatan promosi dapat berupa pemberian leaflet, peningkatan papan informasi mengenai keragaman biodiversitas dan informasi mengenai perubahan status kawasan ataupun melakukan aktivitas yang mendukung konservasi seperti penanaman pohon. 2. Agar kondisi alam dan sumberdaya yang ada didalamnya terjaga, pengelola kawasan diharapkan mampu menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga sarana dan prasarana yang ada harus dirawat, ditingkatkan dan ditambah terutama dengan memperbanyak tempat sampah dan papan informasi. Hal tersebut dirasa sangat penting karena berhubungan langsung dengan aktivitas pengunjung. 3. Pihak pengelola perlu meningkatkan pemberdayaan terhadap unit usaha, tenaga kerja maupun masyarakat yang terlibat dalam aktivitas wisata untuk mengenal dan mengetahui lebih lanjut mengenai prinsip wisata alam yang berkelanjutan agar keberlanjutan kawasan wisata yang lestari dapat terjaga. Oleh karena itu dukungan dari masing-masing pihak terkait perlu ditingkatkan 4. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian mengenai daya dukung lingkungan kawasan wisata Gunung Bunder agar dapat mendukung keberlanjutan wisata dan menghindari adanya kerusakan sumberdaya alam.
338	Fernando Sinaga;2014;Skripsi	Estimasi Nilai dan Dampak Ekonomi Wisata Aalam Curug Cigamea di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Secara umum pengunjung menilai bahwa kondisi sumber daya alam dan fasilitas wisata di Curug Cigamea baik. Hal ini menunjukan bahwa, kegiatan wisata belum berdampak negatif terhadap sumber daya alam di TNGHS. Disisi lain pengunjung menilai tingkat kebersihan di Curug Cigamea masih kurang. Hal ini perlu menjadi perhatian pengelola karena jika tidak dikelola dengan baik dikhawatirkan dapat merusak lingkungan dan mengganggu keberlanjutan wisata. 2. Objek wisata Curug Cigamea memiliki nilai dan dampak ekonomi yang cukup besar. Hal ini menunjukan keberadaan objek wisata Curug Cigamea di TNGHS memiliki arti penting bagi perekonomian masyarakat, sehingga perlu dipertahankan agar masyarakat dapat terus merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan wisata Curug Cigamea. 3. Penerapan tarif masuk optimum sesuai WTP pengunjung dapat digunakan untuk mengontrol jumlah kunjungan dan dapat menambah penerimaan pengelola dari peningkatan tarif masuk tersebut. Peningkatan tarif masuk tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dana pelestarian sumber daya alam, pengembangan fasilitas wisata alam, serta untuk menghindari over carrying capacity di objek wisata Curug Cigamea.	1. Keberlanjutan wisata Curug Cigamea harus terus dipertahankan karena dapat memberi dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar. Wisata tersebut dapat berkelanjutan dengan menjaga kelestarian sumber daya alam di TNGHS yang merupakan salah satu modal dari wisata alam Curug Cigamea. Salah satu langkah kongkritnya adalah dengan mengajak pengunjung turut serta dalam penjagaan sumber daya alam dan lingkungan di Curug Cigamea di TNGHS seperti mengikuti program tanam pohon asuh di TNGHS 2. Pengelolaan objek wisata Curug Cigamea harus ada campur tangan dari pihak TNGHS agar dalam pengembangan wisata tersebut tetap memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak TNGHS. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan adanya pendampingan maupun sosialisasi dari pihak TNGHS kepada masyarakat untuk tetap mengutamakan kelestarian sumber daya alam dalam pengembangan wisata Curug Cigamea. 3. Pengelola diharapkan dapat meningkatkan fasilitas yang tersedia di objek wisata Curug Cigamea terutama menambah jumlah tempat sampah dan papan informasi yang berisi saran selama melakukan aktivitas wisata dan informasi biodiversitas di TNGHS. Gangguan dari hewan liar, seperti monyet juga dapat diminimalisir dengan adanya informasi untuk tidak terlihat membawa bungkusan makanan di depan monyet. 4. Tarif masuk optimum di Curug Cigamea dapat diterapkan saat ini guna meningkatkan dana konservasi dan perbaikan fasilitas penunjang wisata alam, maupun jika sudah terjadi over carrying capacity guna mengontrol jumlah pengunjung. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lanjutan tentang carrying capacity untuk mengetahui seberapa besar kapasitas dari objek wisata Curug Cigamea.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
339	Yelin Adalina;2014;Tesis	Implikasi Modal Sosial Masyarakat Terhadap Pengelolaan Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Gunung Halimun Salak)	Kondisi hutan tanaman Agathis dammara dan Pinus merkusii di kawasan TNGHS masih relatif baik dengan tingkat kerapatan pohon yang tinggi, namun memiliki keanekaragaman spesies yang rendah. Pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) flora berupa pemungutan getah pinus, karet dan damar di Zona Pemanfaatan Tradisional oleh masyarakat sekitar hutan memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat sekitar hutan. Kontribusi pendapatan dari hasil sadapan getah karet lebih tinggi dari getah damar dan pinus terhadap total pendapatan rumah tangga petani yang melakukan penyadapan. Tanaman pinus, damar dan karet yang terdapat di kawasan TNGHS merupakan jenis eksotik. Untuk menunjang pendapatan masyarakat sekitar hutan, maka jenis tanaman ini dapat dimanfaatkan sampai daurnya habis, kemudian dilakukan restorasi melalui penanaman dengan jenis tanaman MPTS Masyarakat di sekitar kawasan TNGHS memiliki tingkat modal sosial pada kategori sedang dan cenderung memiliki tipe modal sosial yang yang mengikat (bonding). Modal sosial masyarakat berhubungan nyata dengan unsur-unsur pembentuknya, yaitu kepercayaan, jaringan, norma sosial, tindakan proaktif dan tingkat kepedulian terhadap lingkungan tetapi modal sosial tidak berhubungan nyata dengan tingkat kepedulian terhadap sesama Tingkat modal sosial masyarakat berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi dalam pengelolaan TNGHS. Semakin tinggi tingkat modal sosial semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pengelolaan TNGHS. Walaupun tingkat modal sosial masyarakat di sekitar kawasan TNGHS pada kategori sedang, namun tingkat partisipasinya pada kategori tinggi, diantaranya ditunjukkan dengan partisipasi yang bersifat sukarela. Semakin tinggi tingkat modal sosial masyarakat di sekitar kawasan TNGHS maka tingkat degradasi hutan cenderung semakin rendah. Anomali terlihat di Desa Mekarnangka dan Desa Cipeuteuy dimana degradasi hutan yang cukup tinggi terjadi pada kondisi tingkat modal sosial masyarakat yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan secara historis pada saat masa transisi pengelolaan ada problem kelembagaan, adanya kondisi open akses dan ketersediaan infrastruktur jalan yang mudah dan adanya investor yang masuk sehingga tingkat degradasi tinggi. Masyarakat adat Kasepuhan Sinarresmi memiliki tingkat modal sosial dengan kategori sedang, namun memiliki skor modal sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat non adat yang berada di dalam dan di luar kawasan. Pada lahan masyarakat adat cenderung terjadi perubahan tutupan lahan yang lebih luas dari masyarakat non adat yang bertempat tinggal di dalam dan di luar kawasan hutan dan anomali terlihat pada Desa Mekarnangka dan Desa Cipeuteuy. Hal ini disebabkan oleh adanya problem kelembagaan pada masa transisi pengelolaan, adanya peng aruh budaya agraris pedesaan yang bertumpu pada sektor pertanian sawah yang dibatasi satu tahun sekali masa panennya, sehingga aturan adat dalam konteks ini justru mendorong terjadinya ekstensifikasi lahan pertanian, dan adanya pengaruh modal sosial individu pemimpin adat(Abah) yang lebih kuat daripada modal sosial kelompok/komunal. Ada kecenderungan semakin tinggi tingkat modal sosial masyarakat maka semakin tinggi tingkat pendapatan responden berdasarkan pekerjaan utama. Namun pendapatan masyarakat berdasarkan pekerjaan utama tergantung dari luas lahan yang dikelola, jenis/bentuk penggunaan lahan dan tergantung dari jenis komoditi yang diusahakan. Tingkat modal sosial tidak berhubungan dengan tingkat pendapatan berdasarkan pekerjaan sampingan. Hal ini karena mayoritas masyarakat mempunyai pekerjaan sampingan yang bervariasi. Pendapatan sampingan tertinggi diperoleh masyarakat di Desa Malasari karena sebagian besar warga memiliki pekerjaan sampingan yang tidak sustainable yaitu, sebagai buruh tumbuk tanah yang mengandung emas, dan hal ini merupakan ancaman bagi keberadaan TNGHS. Berdasarkan analisis SWOT, strategi terpilih dalam pembangunan pengelolaan TNGHS adalah strategi ST (Strength-Threat), yakni dengan mempertahankan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang tidak menguntungkan. Strategi ST yang dapat dilakukan adalah:1) Melaksanakan sosialisasi intensif kepada pihak terkait tentang pengelolaan TNGHS; 2) Melaksanakan pengenalan potensi kawasan kepada masyarakat; 3) Melaksanakan sosialisasi mengenai wilayah pengelolaan dan pemanfaatan lahan garapan masyarakat di kawasan TNGHS, 4) Mendorong pemanfaatan SDA secara lestari dengan pihak terkait dan 5) Pengendalian pemanfaatan sumber daya hutan. Berdasarkan hasil analisis QSPM strategi prioritas alternatif yang terpilih adalah melaksanakan sosialisasi mengenai wilayah pengelolaan dan pemanfaatan lahan garapan masyarakat di kawasan TNGHS.	Agar masyarakat bersedia berpartisipasi dalam pengelolaan TNGHS yang berkelanjutan maka perlu penguatan modal sosial masyarakat melalui penguatan kelembagaan di masyarakat. Unsur modal sosial yang perlu diperkuat adalah kepercayaan keluar (bridging social capital) dengan cara membangun jejaring kerja secara kolektif. Kondisi saat ini zona inti berada di luar perluasan kawasan TNGHS dan masyarakat tidak ada yang masuk zona inti. Namun demikian dalam penentuan zonasi pada areal perluasan TNGHS eks Perum Perhutani perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kebutuhan masyarakat.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
340	Adrian Soemantadiredja;2014;Skripsi	Pemimpin Adat Dan Pembangunan Partisipatif Di Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi	Abah U merupakan pemimpin adat yang menjalankan fungsi peranannya sebagai pemimpin dengan baik. Abah U selalu mendahulukan apa yang menjadi kepentingan warganya. Pemimpin bagi masyarakat adat di Kasepuhan Ciptagelar merupakan simbol relasi, yang memiliki kaitan erat dalam menjalankan tradisi yang ada. Pemimpin dipercaya mampu berhubungan secara alam transendetal, termasuk berhubungan dengan leluhur, ia menjalankan segala sesuatunya berasal dari restu semesta. Perintah pemimpin bersifat absolut (murni) untuk diikuti dan dijalankan. Sekali seseorang diangkat menjadi pemimpin, maka seluruh atribut sosial akan melekat kepadanya. Pemimpin adat merupakan sosok yang dipercaya mampu mengajak masyarakat untuk mau terlibat dalam kegiatan partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan relatif tinggi, khususnya dalam kegiatan bertani. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang di wariskan oleh leluhur mereka dan masih tetap berjalan hingga saat ini. Kegiatan tersebut memberikan pengaruh dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kasepuhan. Bagi masyarakat di Kasepuhan, ukuran tingkat kesejahteraan yang paling berpengaruh adalah dengan melihat jumlah leuit (lumbung padi) yang dimiliki oleh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan akan tetap terjaga apabila mau berpartisipasi dalam kefgiatan tersebut. Kondisi kesejahteraan masyarakat yang relatif tinggi terjadi dikarenakan masyarakat mau mengikuti aturan adat dalam berproduksi dan mendistribusi hasil pertanian tersebut. Hasil pertanian hanya boleh di distribusikan di lingkup dalam Kasepuhan, sehingga kesejahteraan masyarakat dalam hal pangan tetap terjaga. Dapat disimpulkan bahwa sistem aturan adatternyata dapat menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aturan dan sistem adat yang mengatur kegiatan bertani tentu tidak terlepas dari peranan seorang pemimpin adat. Abah U memainkan peranannya dengan baiksehingga kegiatan bertani yang diatur dengan aturan adat masih dapat berjalan dan diikuti oleh masyarakat di zaman yang serba modern ini. Tanpa adanya peranan Abah U, mungkin saja kegiatan dan aturan tersebut akan luntur termakan oleh zaman. Namun Abah U telah berhasil mengorganisasikan masyarkatnya untuk mau berpartisipasi dalam kegiatan dan melestarikan nilai adat leluhur. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin baik peranan pemimpin maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi dan tingginya partisipasi akan berpengaruh terhadap tingginya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil uji statistik yang telah dilakukan, dimana terdapat korelasi kuat antara peranan pemimpin dengan partisipasi dan antara partisipasi dengan kesejahteraan masyarakat.	1. Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan keberadaan Masyarakat Adat yang merupakan masyarakat asli Indonesia yang juga seharusnya diperjuangkan hak-hak nya. 2. Pemerintah harus dapat mencontoh apa yang telah dilaksanakan oleh Masyarakat Adat berkaitan dengan permasalahan kedaulatan dan ketahanan pangan di Indonesia demi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat di Indonesia. 3. Pemerintah harus mengkaji ulang dan mempertimbangkan dengan sebaikbaiknya bersama instansi-instansi terkait seperti TNGHS dalam mengeluarkan kebijakan.Sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan sebelah pihak.
341	Muhammad Mahdi;2014;skripsi	Peranan Nilai Adat Dalam Modernisasi Di Kampung Ciptagelar Cisolok Sukabumi	Nilai adat yang merupakan objek dari perubahan modernisasi ternyata mampu berakulturasi secara positif dikarenakan nilai adat merupakan sesuatu Yang dinamis dan selalu mengalami perubahan serta mampu melakukan penyesuaian dengan baik terhadap kondisi lokal maupun global. Nilai adat yang menjadi dasar di dalam kehidupan masyarakat Ciptagelar terbukti mampu menjadi fasilitator dan katalisator bagi proses modernisasi yang masuk dan berkembang di tengah masyarakat. Disamping keterbukaannya terhadap modernisasi, nilai adat juga memiliki sisi penolakan terhadap modernisasi yang berfungsi sebagai kontrol dari proses modernisasi yang ada. Penolakan tersebut merupakan salah satu peran penting nilai adat didalam prosesnya mengantarkan masyarakat menuju kepada kesejahteraan, sehingga masyarakat mampu terhindar dari beragam dampak negatif yang dibawa oleh modernisasi. Nilai adat yang ada di tengah masyarakat terbukti mampu membawa masyarakat terhadap keterbukaan terhadap modernisasi, hal itu terlihat dari sikap yang merupakan perwujudan dari nilai yang diyakini masyarakat. Nilai yang diyakini tersebut membentuk pola perilaku mereka yang terbuka terhadap beragam proses modernisasi, sehingga proses modernisasi yang berkembang dan menyatu dengan kehidupan adat mereka menjadi ciri khas tersendiri bagi masyarakat adat Kampung Ciptagelar Meski keterbukaan masyarakat adat terhadap modernisasi yang terwujud di dalam sikap mereka sangat tinggi, namun proses modernisasi yang berjalan di Kampung Ciptagelar masih belum maksimal dan terkesan ”seadanya”. Keadaan tersebut disebabkan proses modernisasi yang ada berasal dari swadaya masyarakat tanpa bantuan yang memadai dikarenakan minimnya perhatian pihak terkait khususnya pemerintah, dalam mendorong, memfasilitasi dan membantu proses modernisasi yang ada.	Beberapa saran yang diajukan penulis berdasarkan hasil penelitian ini yaitu pemerintah harus lebih memperhatikan keberadaan Masyarakat Adat tidak hanya dari satu sisi yaitu pandangan teknisi dan ahli-ahli perencanaan pembangunan, namun menggunakan sudut pandang masyarakat tersebut yang merupakan masyarakat asli Indonesia yang juga seharusnya diperjuangkan hakhak nya. Pemerintah juga harus dapat melihat potensi dari nilai adat sebagai modal sosial yang mampu menciptakan gerakan-gerakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang bersifat lokalitas sebagai modal bagi perencanaan pembangunan bangsa. Bukan sebaliknya melihat nilai adat sebagai faktor penghambat bagi pembangunan Pemerintah harus mempertimbangkan dan melindungi aspek-aspek lokal dengan sebaik-baiknya bersama pihak-pihak terkait seperti masyarakat adat dalam mengeluarkan kebijakan, yang merupakan modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
342	Resti Meilani, dkk;2015;Jurnal	Optimasi Keluarga Peserta "Sekolah Rimbawan Kecil" di Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Masyarakat keluarga terdekat peserta didik Serincil sebagian besar merupakan buruh tani yang juga menanam pohon hutan di dalam lahan kawasan TNGHS 2. Program yang dikembangkan berdasarkan kesesuaian dengan keseharian masyarakat dan kebutuhannya yaitu program persemaian pohon hutan, kesehatan kambing/ domba, budi daya ayam, dan dapur hidup. 3. Hasil evaluasi terhadap optimasi masyarakat menunjukkan bahwa optimasi paling intensif dlakukan masyarakat pada kegiatan yang sesuai dengan keseharian masyarakat dan mudah dilakukan (dapur hidup), cukup intensif pada kegiatan kesehatan kambing, dan kurang intensif pada kegiatan budi daya ternak ayam yang memerlukan upaya lebih besar.	Program dapur hidup sudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat, perlu diteruskan dengan pendampingan, sehingga menjadi salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya yang ada di kawasan taman nasional. Kegiatan beternak lebih ditekankan pada kesehatan ternak saja. Praktek langsung juga perlu diberikan kepada masyarakat agar dapat menerapkan materi yang lebih sulit tersebut. Persemaian pohon hutan menjadi prioritas untuk menjembatani hubungan kerja sama yang intensif antara masyarakat dengan pihak TNGHS.
343	Yelin Adalina,dkk;2015;Jurnal	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2012 sampai dengan Mei 2013 dengan mewawancarai sebanyak 297 responden dari delapan desa yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Data penelitian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar TNGHS secara sosial relatif homogen. Seluruh responden beragama Islam dengan etnis Sunda, 88% tergolong usia produktif, tingkat pendidikan formal tergolong rendah (86,9%), namun memiliki tingkat kesehatan yang baik (85,18%). Sebagian besar responden (87,9%) adalah penduduk asli. Rata-rata tingkat pendapatan responden sebesar Rp 1.155.000,-/bulan dan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) baik menurut ketentuan Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Banten. Rata-rata kontribusi pendapata dari lahan TNGHS terhadap total pendapatan rumah tangga responden sebesar 38,65% termasuk kategori sedang.	Pihak pengelola perlu meningkatkan pengawasan supaya tidak terjadi perluasan penggunaan lahan kawasan TNGHS oleh masyarakat.
344	Sri Desti Purwatiningsih;2015;-Jurnal	Communication strategy for Better Understanding Community on Conservation Forest at National Park Halimun Salak	Hasil strategi komunikasi: (1) mengembangkan dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait dan jejaring sosial dalam membangun dan mengembangkan objek wisata alam yang dapat meningkatkan pendapatan konservasi TNGHS masyarakat hutan, (2) kesepakatan antara pengelola kehutanan (BTNGHS) dengan masyarakat hutan dalam penerapan peraturan perundang-undangan jelas merupakan upaya mengatasi pelanggaran dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan konservasi TNGHS, (3) meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat kehutanan dalam upaya advokasi pemberdayaan aparat hutan masyarakat hutan di kawasan konservasi pengelolaan hutan TNGHS disesuaikan kawasan, dan (4) perluasan akses informasi bagi masyarakat sekitar hutan dalam memperoleh informasi pemanfaatan dan pelestarian hutan lindung TNGHS.	
345	N. Supriatna;2015;Jurnal	Local Wisdom in Constructing Students' Ecoliteracy Through Ethnopedagogy and Ecopedagogy	Ecological intelligence, as an aptitude to understand, realize, and actualize the significance of living in harmony with the nature, can be supported by both pedagogical forms. This paper will put forward the local wisdom of Sundanese traditional community in West Java Province consisted in the folklores especially related to the methods of preserving forest's natural condition, water source, and local food consumption. Such local wisdom is promoted and developed as learning materials to provide students with ecological intelligence related to understanding, awareness, and competence for significant preservation of forest and water resource. Local wisdom is also explored and integrated into the curriculum to construct students' awareness as green consumers or those favoring local products over the global ones.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
346	Ken Sugimura;2015;Jurnal	Local people's use of non-timber forest products in the Gunung Halimun Salak National Park, West Java (Pemanfaatabn hasil hutan bukan kayu oleh Masyarakat Sekitar Kawasan di Gunung Halimun Salak Taman Nasional, Java Barat)	The national parks in Indonesia occupy 60% of the conservation areas (Widyaningrum, 2012), which covers around 10% of the land (Jepson, 2002). Local people have utilized natural resources in the national parks long before the parks were established, employing their own knowledge in sustainable way (Setyowati et al. 2008).We describe such a case in the GHSNP area in this paper.It is difficult to determine if their use of forest resources has been sustainable or not. However, this study indicates that many species were used in a variety of ways and that people were highly dependent on these resources. Because these resources were collected within the park area, communications and discussions between local people and national park officers are essential for solving conflicts between them as well as monitoring the distribution and abundance of these resources for ensuring sustainable use.	
347	Ahmad Sahab;2015;Tesis	Penguatan Pengelolaan Taman Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengembangan Peternakan	Kawasan TNGHS Resort Kawah Ratu Kecamatan Cicurug Sukabumi memiliki potensi hijauan makanan ternak sebesar 5880.42 ton/tahun dengan daya tampung sebesar 938.203 ST/tahun dan potensi nilai ekonomi Rp 12.196.639.702 45per tahun. Masyarakat di lokasi penelitian memiliki karakteristik yang mendukung dalam pengelolaan TNGHS dan pengembangan peternakan seperti usia produktif, pengalaman beternak, modal sosial, kesediaan berpartisipasi dalam pengelolaan TNGHS, dan ketergantungan pada sumber daya hutan TNGHS. Pemanfaatan tumbuhan pakan ternak oleh masyarakat saat ini mencapai 24.20% dari total potensi yang ada. Strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan dalam pengelolaan TNGHS adalah strategi Strength-Opportuniy, yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada secara optmal. Sinergi antara konsep Model Kampung Konservasi dan Sekolah Peternakan Rakyat dapat menjadi konsep pemberdayaan masyarakat di sekitar TNGHS untuk mencapai tujuan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.	• Diperlukan pematangan konsep pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan mengintegrasikan antara konsep Model Kampung Konservasi dan Sekolah Peternakan Rakyat. • Pemanfaatan tumbuhan pakan ternak pada kawasan hutan yang memiliki potensi pakan ternak dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar. • Pemanfaatan tumbuhan pakan ternak di kawasan hutan perlu memperhitungkan daya dukung agar pemanfaatannya tidak berlebihan. • Petugas Resort Kawah Ratu TNGHS perlu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, khususnya Desa Pasawahan, Desa Tenjolaya, dan Desa Cisaat. • Diperlukan kolaborasi antar berbagai pihak dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktoran Jenderal PHKA) dan Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) perlu berkoordinasi untuk membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
348	Henly Yuliana,dkk;2016;Jurnal	Community local wisdom of Kasepuhan community at Mount Halimun in conserving natural resources and environment	1. With the adoption of agricultural method of wetland paddy fields, indicating that the nature of culture and customs actually be dynamic, in the sense of willing to make changes within certain limits. 2. Perceptions and attitudes are reflected in the customs rules relating to rice plant is their way of conserving nature. 3. The positive impact that occurs due to still in use of traditional rice varieties is the preservation of traditional rice varieties they own. 4. With the conservation of customs, the population remains Kasepuhan can coexist peacefully with the national park. Traditional wisdom they are adaptive and have been proven in a long period of time, was not in the opposite direction with the conservation policy which is the mission of Mount Halimun National Park.	
349	Himalaya Wana Kelana;2016;Jurnal	Pewarisan Pengetahuan dan Keterampilan Identifikasi Keanekaragaman Tanaman Padi Lokal pada Generasi Muda Kasepuhan Adat Banten Kidul	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pewarisan pengetahuan tanaman padi lokal pada siswa kasepuhan berlangsung secara vertikal yaitu dari orangtua keanaknya secara informal dan berlangsung seumur hidup. Masyarakat kasepuhan mengelompokkan varietas padi lokal dengan cara klasifikasi masyarakat (folk classification) berdasarkan dari morfologi luar seperti warna bulir, bentuk bulir, keberadaan bulu pada ujung bulir. Adanya pengetahuan lokal tentang keanekaragaman padi berkontribusi dalam konservasi keanekaragaman hayati tingkat genetic terhadap salah satu tanaman endemic Indonesia..	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
350	Dean Yulindra Affandi;2016;Disertasi	The Struggle over Adat Forest Rights in Upland Banten, Indonesia	1. In 2013, the Constitutional Court ruled that the state had wrongly appropriated forests and should return them. One of the big questions prompted by the Court's decision is how an adat community might be able to go beyond the decision to the next substantive step of acquiring official recognition for themselves in Indonesia. Despite the historic nature of this decision, some scholars expressed their scepticism on the impact that the ruling would bring to the forest-dwelling adat communities (e.g.,Butt 2014, Colchester, Anderson et al. 2014). Their scepticism is valid for at least two reasons. First, the judgement continues to invoke the Constitutional provision that adat peoples' rights should be recognised 'as long as they still exist'. This is the same mantra that has always led to the subjugation of adat communities' rights in the past. Second, the local government must, under Article 67 (2) of the revised Forestry Law, issue a by-law (PERDA) to legally recognise the adat community exists before that community can exercise any of these rights. It is only after the passing of the bylaw that the Ministry of Environment and Forestry can issue a decree declaring that the state legally recognises and protects the hak ulayat of an adat community. 2. Therefore, as is the case with decentralisation policies generally in contemporary Indonesia, the main battle over adat recognition is being fought at the kabupaten/kota level. This causes a dilemma, for some local governments are notorious for their lack of responsiveness to the needs of their constituents. It scarcely needs to be mentioned that adat communities are likely to have particular difficulties convincing their local government to pass a bill if the local government itself wishes to give concessions over the very land that those communities use. 3. I spent six months in the southern part of Banten Province in order to gain a picture of the difference the decision might make. This research has captured the current 'transition period' for adat communities in Indonesia regarding their forest and land claims. To put it in simpler terms, this study has explored how the community has attempted to secure its right to adat forest on the ground. It sets out to answer the core research question: have adat communities been able to capitalise and advance their traditional rights forward after the Constitutional Court's ruling? To answer this research question, I focused on the Kasepuhan community in Lebak, Banten which was one of the plaintiffs for the judicial review. Three research sub-questions were addressed: 1) How have Kasepuhan community worked towards and responded to the changing range of possibilities? 2) How have Kasepuhan people mobilised their claim to rights through representation, advocacy, media and the appropriation of contemporary legal and political forms of expression? 3) How do interactions – conflicts, accommodations and exchanges - between Kasepuhan groups and other actors in changing circumstances affect forest access and control? 4) This chapter presents and discusses the study's main findings by highlighting the current dynamics of forestry politics in the Halimun-Salak region, and by singling out the key contributions the findings make to our understanding on the state of adat communities' rights to forest tenure. First, it assesses the implications of MK 35 for the Kasepuhan community and how the Kasepuhan community differ from the general trend. Second, it will explain the contributing factors behind Kasepuhan success in capturing the current political-legal landscape in Indonesia. Then I will explain the current state of indigenous peoples' rights in general and the reasons behind the limited success of other communities in efforts to replicate the Kasepuhan community's gains.	1. Meanwhile for the Kasepuhan community, their rights recognition implicates three things for their forest governance. First, it clarifies their legal standing in claiming their rights to resources in the eyes of the state. Their claim is now legitimate. However, law enforcement in Indonesia is notoriously sketchy (e.g., Nordholt and van Klinken 2007; Bakker 2009; Aspinall and Mietzner 2010; Hadiz 2010), to say the least, meaning the passage of a law does not necessarily lead to direct implementation on the ground. I imagine that a few logging companies that are now operating on a small scale within the vicinity would not be so keen to give up their access to resources in the area. There is also uncertainty about how the social and political dynamics between the national park management and the Kasepuhan people, who are now also the managers of the forest area, would play out. These are few of the uncertainties emerging in the wake of the PERDA on Kasepuhan. According to the latest research conducted by the Centre for International Forestry Research (CIFOR) on the relations between land tenure and livelihoods of indigenous communities in 2015, rights security does not end with tenure. It is important to scrutinise further to what extent the strengthening of rights produces new institutional arrangements and who wins and loses from the way land rights are committed on the ground (e.g., Meinzen-Dick and Mwangi 2009, Lawry, Samii et al. 2016). 2. Second, the PERDA clearly gives a bigger mandate for adat institutions in managing many aspects of Kasepuhan peoples' lives, not just regarding access and control to forest resources. This enables the Kasepuhan adat institution to have the autonomy to empower the Kasepuhan people. As I already discussed in the beginning of this thesis, the PERDA on Kasepuhan administers a wider range of adat rights, not just territorial rights. However, the impact of this greater autonomy to the well-being of Kasepuhan people in general is still unclear. In addition, there is also a question on: to whom is the power of autonomy actually being transferred? Would the regulation only be beneficial for the adat elites? According to the same study by CIFOR, advances in land and forest tenure reforms in recent years have not necessarily improved livelihoods for forest-dwelling community. It may lead tonegative social effects, including hindrance of women's access to land, displacements of the poor or others facing social or cultural barriers in the reformed regime. 3. Third, legal recognition puts the Kasepuhan people under the spotlight in regards to their claims to having environmental wisdom to manage forest resources. This subject is an important one for public discussion, because since the very beginning of the adat movement in the country, one of its main arguments has been that adat communities could prevent the 'tragedy of the commons' from happening. Would they really be able to rely on their ancient wisdom in the midst of various outside pressures? I would like to answer yes. But based on the reality that I encountered, I have to say that I have mixed feelings about this issue, particularly regarding gold mining activities that have been part of Kasepuhan life for several years. As I have discussed in chapter five, this activity is not just damaging for the environment, but also hurtful for humans. In addition, there is the problem of the unsustainable practice of swidden farming. I agree that swidden can be sustainable, but as the population grows each year, more and more people are farming in a smaller area. This, in turn, increases the loss of forest cover and the degradation of the remaining forest due to shorter fallow period. Especially now when the PERDA also includes clear forest boundaries, it also means there is only a limited amount of land that can be used. Meanwhile, the PERDA on Kasepuhan provides much in the way of rights, but not so much on the responsibilities. Granting rights without responsibilities can be dangerous. It would be interesting to see the impact of Kasepuhan peoples' forest tenure security upon the forest environment in Halimun-Salak region in upcoming years. 4. My narrative in this thesis have shown that the Kasepuhan people are gaining ground, but as I briefly touch on in the points above, gaining rights to their forest also creates new challenges. That said, I believe that this is just the beginning for the Kasepuhan people to move toward the livelihoods goals that they want to pursue. I believe that once rights recognition has been achieved, both NGOs and the local government must have a strategy – and allocate budget funds – to help the community to implement them. The critical point here is not to over-romanticise or over-simplify the reality that is happening on the ground, and instead to support the development of a solid and reliable self-governing institution and processes in adat communities and territories. To move this forward, it needs commitment from all relevant stakeholders, which I hope that the NGOs and the government officials have on their disposal. Kasepuhan have been lauded as an examplar amongst the adat communities in Indonesia, especially by NGOs. In my narrative I have attempted to unravel the Kasepuhan community's success, connecting their own tellings of their myth, legends and history to their recent successes in securing authority over forest management. I have done so in the hope that the Kasepuhan people not only will continue to inspire other communities and NGOs in action, but also make them aware of the challenges involved in the effort to (re)claim adat rights. My narrative does not celebrate Kasepuhan people as an idyllic adat community, but it does provide an impression of the determined efforts of the adat community in extending their struggle for social justice in Indonesia's ever-changing state-society-nature relationship.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
351	Fauzan Hakim;2016;Skripsi	Analaisis Manfaat Ekonomi Model Kampung Konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Studi Kasus : Kampung Sukagalih, Desa Cipeteuy, Kec, Kabandungan, Kab. Sukabumi)]	1. Persepsi masyarakat terhadap Model Kampung Konservasi di Kampung Sukagalih positif. Dilihat dari pengetahuannya terhadap hak-hak dalam MKK dan masyarakat Kampung Sukagalih menerima kewajiban menjalankan MKK masuk di Kampung Sukagalih. Masuknya MKK di Kampung Sukagalih mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam MKK Sukagalih. Partisapasi masyarakat Kampung Sukagalih cukup tinggi karena adanya tujuan yang sama dengan lembaga setempat yaitu KOPEL. 2. Manfaat yang dirasakan masyarakat Kampung Sukagalih di sektor pertanian yaitu cabe merah dan buncis mendapatkan pendapatan per musimnya pada tahun 2015 sebesar Rp. 9.282.127,95. Dengan R/C didapat sebesar 2,07. Artinya, setiap satu pengeluaran yang dikeluarkan petani Kampung Sukagalih akan menghasilkan penerimaan sebesar 2,07. Nilai R/C sebesar 2,07 lebih besar daripada satu berarti usahatani cabe merah dan buncis yang dijalankan di Kampung Sukagalih dapat dikatakan layak untuk terus dijalankan oleh petani Kampung Sukagalih. 3. Selain itu, MKK Sukagalih memberikan peluang bagi masyarakat Kampung Sukaglih dalam bidang jasa yaitu daya tarik wisata. Pada tahun 2015 terdapat beberapa pengunjung, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Alam Indonesia Jakarta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Diponegoro Jakarta, mahasiswa Institut Pertanian Bogor, mahasiswa Universitas Indonesia, dan mahasiswa Universitas Djuanda. Daya tarik wisata ini memberikan penerimaan tambahan bagi masyarakat Kampung Sukagalih. 4. Masyarakat Kampung Sukagalih dalam menjalankan MKK Sukagalih, sudah melakukan berbagai kegiatan rutin maupung tidak rutin. Kegitan yang dilakukan sesuai dengan 3 pilar MKK yaitu observasi partisipatif, restorasi/ rehabilitasi, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatankegiatan tersebut meliputi pengawasanhutan yang dilakukan 3 hari dalam 1 minggu, penanaman pohon asli TN, mengelola lahan di zona khusus yang sudah ditentukan, dan lain-lain.	1. Dalam menjalankan MKK perlu ada pendampingan dan pelatihan lagi secara berkala untuk masyarakat Kampung Sukagalih. 2. Untuk mengembangkan Model Kampung Konservasi (MKK), perlunya studi banding dengan Model Kampung Konservasi (MKK) atau sejenis yang berada di Taman Nasional se-Indonesia.
352	Dwi Ajeng Nirmala Uriss;2016;S-kripsi	Manfaat Ekonomi Serta Potensi Bahaya Dan Risiko Kegiatan Wisata Alam Di Curug Cigamea,Taman Nasional Gunung Halimun Salak,Kabupaten Bogor	1. Kegiatan wisata di Curug Cigamea memiliki manfaat ekonomi yang besar, terutama bagi pelaku usaha dan tenaga kerja regular dilihat dari nilai share pendapatan wisata dan covering terhadap pengeluaran rumah tangga. 2. Penyebab utama dari potensi bahaya dan resiko (tourism hazards) pada kegiatan wisata alam di Curug Cigamea adalah faktor alam, yang banyak terkena dampak adalah manusia, dan solusi yang dilakukan diutamakan untuk aspek manusia. Hal ini menunjukkan belum ada kesesuaian antara penyebab dengan solusi. Bahaya dan resiko tertinggi (high risk) kegiatan wisata alam di Curug Cigamea terjadi pada musim hujan, di mana kecenderungannya pada saat tersebut adalah peak season. Selama ini belum pernah dilakukan pembatasan jumlah pengunjung di Curug Cigamea pada saat terjadinya peak season yang bersamaan dengan saat high risk. Jika tidak dilakukan pembatasan jumlah pengunjung tersebut, dikhawatirkan dapat memicu terjadinya bahaya dan resiko yang besar. 3. Stakeholder yang berperan sebagai subjek (kuadran I) adalah rescue dan pelaku usaha, sebagai pemain (kuadran II) adalah Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS), Resort II Gunung Salak Endah, Koperasi, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), sebagai penonton (kuadran III) adalah Desa Gunung Sari, sedangkan sebagai aktor (kuadran IV) tidak ada. Berdasarkan kondisi tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder yang ada saat ini, pengelolaan di Curug Cigamea masih dapat dikatakan belum efektif, karena walaupun manfaat ekonomi dari kegiatan wisata sudah dapat dirasakan oleh beberapa stakeholder, namun potensi bahaya dan resiko (tourism hazards) masih belum dapat diminimalisir.	1. Peran stakeholder Desa Gunung Sari dan Resort II Gunung Salak perlu ditingkatkan karena Curug Cigamea berada di dalam wilayah Desa Gunung Sari dan Resort II Gunung Salak. Selain itu, tingkat kepentingan LVRI sebaiknya tidak lebih tinggi dari BTNGHS karena jika tingkat kepentingan LVRI lebih tinggi, dikhawatirkan lebih mementingkan manfaat ekonomi dari pada manfaat ekologi Curug Cigamea. 2. Aspek alam perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan untuk meminimalisir bahaya dan resiko (tourism hazards). Pada saat high risk, perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir potensi bahaya dan resiko (tourism hazards), seperti pembatasan jumlah pengunjung (manajemen buka tutup) pada kegiatan wisata alam di Curug Cigamea. Selain itu, juga perlu dilakukan rehabilitasi terhadap alam sebagai upaya pencegahan untuk meminimalisir bahaya dan resiko (tourism hazards). 3. Diperlukan penelitian lanjutan mengenai bentuk kelembagaan pengelolaan wisata di Curug Cigamea agar kegiatan wisata alam dapat dikelola dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam, sehingga dapat meminimalisir bahaya dan resiko (tourism hazards) sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
353	Maulana Ikhsan;2017;Skripsi	Persepsi Dan Preferensi Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Di Daerah Penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui persepsi responden di Kampung Cisalimar I, Cisalimar II dan Cilodor terhadap program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan agak baik. Di Kampung Cisarua, responden memiliki persepsi sedikit baik terhadap program pemberdayaan masyarakat yang telah diberikan. Di kampung Sukagalih, responden memiliki persepsi yang baik terhadap program pemberdayaan yang telah diberikan. 2. Dalam pengembangan program pemberdayaan, peserta menganggap pembinaan kelompok, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan mutu pendidikan penting dilakukan. Dalam hal penanggulagan kerusakan lingkungan dan pengembangan alternatif usaha masyarakat, peserta menganggap hal itu agak penting dilakukan.	1. Dilakukan penyuluhan mengenai pentingnya program pemberdayaan masyarakat di kampung dengan tingkat preferensi tinggi di Desa Cipeuteuy. 2. Dilakukan koordinasi untuk membangun kesepahaman, terutama dengan Pemerintah Daerah mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran program. 3. Disiapkan fasilitator yang terlatih dan mampu menempatkan diri dengan kondisi masyarakat Desa Cipeuteuy 4. Perlu dilakukan pengembalian fungsi dan penguatan kelembagaan kelompok MKK di Desa Cipeuteuy. 5. Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan. 6. Membangun kemitraan dengan stake holder terkait untuk meningkatkan permodalan dan pasar untuk menunjang tercapainya tujuan program. 7. Dilakukan pengawasan berkala terhadap kebelangsungan program pemberdayaan.
354	Luh Rina Apriani,dkk;2017;-Jurnal	Artikulasi Prinsip Hak Penentuan Nasib Sendiri (Right To Self-Determination) Di Indonesia: Studi Pada Masyarakat Adat Kasepuhan	1. Hak penentuan nasib sendiri merupakan prinsip internasional yang telah diadopsi ke dalam beberapa instrumen international, khususnya yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat adat yaitu United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007), Convention (No.107) Concerning the Protection and Integration of Indigenous and Tribal and Semi-Tribal Population in Independent Countries (1957), serta Convention (No. 169) Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (1989). 2. Hak penentuan nasib sendiri di Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada di Kawasan Tertentu, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan, konsep hak penentuan nasib sendiri menemukan pijakan ke-Indonesiaanya, karena pasal-pasal dalam Perda tersebut mengakui dan menghormati hak asal usul Masyarakat Adat Kasepuhan. Terlepas dari cakupan perda yang hanya meliputi Masyarakat Adat Kasepuhan di wilayah Lebak, serta bersifat limitatif (salah satunya dalam proses penentuan hutan adat), namun secara garis besar Perda ini bisa merangkum konsep hak penentuan nasib sendiri yang awalnya merupakan prinsip dalam tatanan internasional.	
355	Syed Ajijur Rahman;2017;-Jurnal	Finding Alternatives To Swidden Agriculture: Does Agroforestry Improve Livelihood Options And Reduce Pressure On Existing Forest?	Communities in Gunung Salak have created a cultivated landscape which their livelihoods depend on. Their traditional swidden cultivation practices provide various subsistence products, but they can have serious negative environmental consequences by contributing to deforestation and land degradation. Agroforestry is an alternative cultivation strategy that has been adopted by some farmers within the communities. It does increase average farm income, making it more resilient to changes in market and economic conditions, and reduce pressure on adjacent forest for conversion to agriculture and as a source of firewood, fruits, vegetables and other products. These agroforestry systems also enable farmers to secure permanent land tenure and can improve social cohesive in communities. Adoption of agroforestry by farmers in the Salak valley can be increased by the implementation of supportive policies and measures (including capital support and technical assistance) by government and non-government organizations. These measures are most likely to be effective if they are sensitive to the strong local tradition of swidden cultivation and underlying systems of local knowledge.	Effective policies should be propagated not by temporary projects but by permanent, government-backed institutions that are focused on agroforestry practices and the needs for their adaptation to meet new opportunities and constraints (see also Rahman et al. 2008). The successful adoption of durian-and teak-based agroforestry by many farmers in the study area indicates the high potential for success of such a programme.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
356	Wina Erwina,dkk;2017;Proceedings	LOCAL INFORMANT FOR INDIGE-NOUS AGRICULTURE KNOWLEDGE OF IN THE MAKING DOCUMENTARY FILM (Case Studies In The Filming Of "Kasepuhan Nan Bijak")	Make a movie/ film culture has a responsibility to convey the cultural values of the object to be documented. Limitations written information about the object to be documented to be addressed to find information on local sources. Every cultural region proved to have different local sources, both the position and the existing term. To Sources cultural area of West Java in 1997, the subject of Local Agriculture Kasepuhan society both in the community Cipta ISBN: 978-602-439-215-4384 Rasa (Sirnarasa) and Sirnaresmi where now a region of Banten is the Kepala Desa or headman (the head of the villagers)/ Jaro; Sesepuh Girang; Kokolot or Olot Among the non-Kasepuhan members and Conservative Lines Among the Citizen-Kasepuhan (opinion leaders); Ajengan and Ulama (Islamic religious scholars); Kuncen (the janitor of sacred place); Lebé (mosque offi-cial, especially concerning with marriage)/ kokolot/ Olot village in religion; Dalang (the person who has the skill and knowledge of performing traditional wooden puppet show or wayang) / kokolot/ Olot in the field of culture; The wealthy farmers; School teachers; inheritance water management/ irrigation Ulu-ulu; Village head (the head of a village sub-division area)/ Pu'un; Chairman of Rukun Warga (the head of a village sub-sub-division); Chairman of the Neighbor-hood (RT) (the head of a neighborhood area). Knowing the proper local speakers will make a valuable documentation work on the development of knowledge and the preservation of the culture itself.	
357	Rimbo Gunawan;2017;Jurnal	Production, Distribution And Con-sumption Among The Kasepuhan: Values And Cultural Identity Of A Peasant Economy	1. Going back to the discussion on the market and non-market economies that tends to be the opposite, i.e. the open and impersonal of market economy vis-à-vis the personal and embedded-ness of the non-market economy, the account of the Kasepuhan above has shown that these two market systems go along within the Kasepuhan livelihood system, although they live in a remote area. On the one hand, the Kaspuhan's production, distri-bution and exchange systems that mark the local economy as well as representing the non-market economy in which each and every step of activity deeply ingrains the daily life of the people. These activities are truly social relations with economic aspect; the econ-omy is not a separate entity, for it, as Kottak says, is "embedded" in the society. On the other, the development of the eco- and cultural tourism programs as part of the Gunung Halimun National Park conservation campaign signifies the new emerging economy as well as the market economy. The uniqueness, remoteness, and anonymity—less known—of the people really attract people from various places, including people abroad, to come to the area, and this is the hallmark of the market economy. 2. Balancing between the market and non-market economies lead the Kasepuhan to their own worldview: rasa manunggal. Worldview refers to the basic cultural orientation of the members of a society, the way in which people perceive their world (environment). It is a set of beliefs, that is, a 510 system of shared meaning or assumption about the way the world works, which gives the members of a society an ultimate meaning, the relation and nature of self and society. For the Kasepuhan, the universe is a harmonious system where human beings are seen as united with nature (environment) rather than separated from it. Humans only consider themselves as a small part of nature. And as part of nature, they as-sume the responsibility of maintaining the harmony and natural order of things. This view, Adimihardja (1992:36) argues, is a reflection of the Kasepuhan's origin, being the descen-dants of pancer pangawinan. Kawin, the root word of pangawinan, has two meanings. First, it is the union or marriage of two persons and personalities of man and woman in a spiritual bond as husband and wife. Second, and more symbolically, it is the union of the dunia nyata (real world) and the dunia gaib (unseen world), to marry (plant) Nyi Sri (the goddess of rice) to the soil (earth); and to unite the heaven and the earth. In other words, as Adimihardja (1992:36) puts it, "kawin for the Kasepuhan is uniting macrocosmos and microcosmos in order to achieve the so-called rasa manunggal, a condition of oneness in a human being where peace, order, and harmony are maintained" (emphasis added). To achieve rasa manunggal, the Kasepuhan are taught ngaji diri (to observe the inner self) and to synchronize their words and actions. This moral guidance is embodied in the creed: Mipit amit, ngala menta, make suci, mangan halal, nyaur kudu diukur, kalawan ucap kudu sabenerna, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, mufakat jeung balarea. (Picking something requires permission, taking must be asked for, wearing must be clean, eating must be religiously pure, saying must be considerate and in truth, help must be given to those who are needy, and be in accordance with others, and consensus must be for the sake of all.)	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
			3. This creed signifies the Kasepuhan's view that they do not live alone in this world. Aside from humans, other beings--infra or supra--are present, including animals, plants, and spirits. Before any Kasepuhan does anything, he or she will have to ask permission from a fellow human being and from the ancestors, because everything has its guardian, be it human or other beings. After all, the ancestors are believed to be the guardians of the Kasepuhan. Certain tertib ("procedures") in the form of du'a amit or sadu buhun (permission prayers) are observed before taking certain actions such as entering forests, planting and harvesting rice. The purpose of this creed is to ensure that people respect one another's rights and duties in social life. Although the reality can be different, the Kasepuhan believe that any violation of this moral guidance will bring about natural and social disorder, or kabendon (bad luck) will fall not only on the violator but also on the whole community. 4. In the end this study shows that these Kasepuhan's [economic] activities and endeavors in making day-to-day lives constitute their values over life and mark intimate relations with the environment, and eventually form their basic cultural identity.	
358	Yuraeka Dwi;2017;Skripsi	Analaisis Manfaat Ekonomi Model Kampung Konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Studi Kasus : Kampung Cisangku, Desa Malasari, Kabupaten Bogor)	1. Stakeholder yang berperan dalam program atau kegiatan MKK di Kampung Cisangku adalah: 1) Players, yaitu BTNGHS, CV Mitra Kampung Konservasi Cisangku, Pemerintah Desa Malasari, dan Resort Gunung Botol Seksi Wilayah Konservasi II dan 2) Actors, yaitu PT XYZ. Secara umum, stakeholder pada program atau kegiatan MKK sudah mendukung program yang terlaksana dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan namun stakeholder perlu meningkatkan peran dan kapasitas masing-masing. 2. Penilaian persepsi masyarakat Kampung Cisangku secara umum menunjukkan bahwa keberadaan MKK di Kampung Cisangku memberikan dampak ekonomi terhadap seluruh masyarakat. Berdasarkan aspek sosial, masyarakat berpendapat bahwa keberadaan MKK memberikan dampak positif terhadap hubungan sosial. Menurut aspek lingkungan, MKK memberikan dampak positif bagi kelestarian kawasan TNGHS dan keberadaan usahaternak domba tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. 3. Total manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dari program MKK Cisangku adalah Rp 107.273.389. Manfaat ini berasal dari program budidaya domba Garut yaitu Rp 11.178.500 dengan rata-rata share pendapatan 3,72% dan covering terhadap pengeluaran RT 4,69%. Selanjutnya manfaat ekonomi dari program pembibitan tanaman asli TNGHS dan penyerapan tenaga kerja yaitu Rp 62.819.889. Selain itu adalah manfaat ekonomi dari nilai perlindungan tegakan hutan yaitu sebesar Rp 33.275.000. 4. Faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi keputusan masyarakat Kampung Cisangku untuk terlibat dalam program atau kegiatan MKK adalah jenis kelamin, pengetahuan masyarakat terhadap MKK, dan persepsi masyarakat Kampung Cisangku mengenai keberadaan MKK.	1. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara stakeholder terkait, terutama koordinasi antara pihak Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS) dengan masyarakat. 2. Perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat Kampung Cisangku oleh TNGHS sehingga masyarakat lebih mengetahui MKK dan dapat mendorong keterlibatan dalam program MKK di Kampung Cisangku 3. Perlu adanya penyuluhan terkait aspek teknis dari usaha ternak domba Garut. Hal ini untuk meningkatkan hasil produksi sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara signifikan. Selain itu perlu mencari sumber bantuan lain atau CSR selain stakeholder yang sudah terlibat dalam progam MKK Cisangku. 4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengembangan program MKK Cisangku seperti pengembangan potensi wisata alam yaitu curug dan camping ground.
359	A Kusumuarto;2017;Jurnal	E cological Carrying Capacity Analysis Of Ecotourism Objects In Salak II Resort Area, Halimun Salak National Park.	Salak II Resort Area, HSNP has several objects that can be developed as an ecotourism destination. Based on the results of field observations, three kinds of recreational activities that can be done in Salak II resort area, namely play activities, gathering, and taking pictures. Based on the parameter data that have been obtained, it can be obtained the value of physical carrying capacity (PCC) for pemandian air panas 12,306 people/day, curug cigamea 6,900 people/ day, curug kondang 658 people/day, curug alami 168 people/day, curug pangeran 357 people/day, curug ngumpet 192 people / day, curug cihurang 1,001 people/day, curug seribu 1,264 people/day, bumi perkemahan 4,446 people/day, and kawah ratu 77,080 people/day. The value of ecological carrying capacity (RCC) ecotourism object of pemandian air panas 1,303 people/day, curug cigamea 1.461 people/day, curug kondang 212 person/day, curug alami 36 people/ day, curug pangeran 77 people/day, curug ngumpet 42 people/day, curug cihurang 271 people/day, curug seribu 122 people/day, bumi perkemahan 481 people/day, and kawah ratu 13,384 person/day. Value of carrying capacity of ecotourism object of kawah ratu is still very high, that is able to accommodate 13,256 people/day which is a huge income potential.	Based on the results of the estimation calculation, it can be seen that all objects have great potential to be developed as ecotourism destination area because the current destination still has not exceeded the value of ecological carrying capacity. Among all the objects, Kawah Ratu has a very high potential to be developed as a tourist destination because of its very high carrying capacity. Currently, visitors to Kawah Ratu only reaches 123 people per year. With the addition of tourism facilities and utilities, as well as accessibility improvements, it is possible to attract a number of ecotourists, especially when viewed the carrying capacity of Kawah Ratu is still very high, which is able to accommodate 13,256 people per day which is a huge income potential. Berdasarkan hasil perhitungan estimasi, dapat dilihat bahwa semua o

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
360	Salbiah Hanum Hasiibuan;2017;Tesis	Identifikasi Peubah Sosial Ekonomi Penentu Keberhasilan Konservasi Keanekaragaman Hayati	1. peubah penentu penurunan jumlah individu spesies adalah sistem religi & adat; 2. pubah penentu peningkatan perambahan adalah umur dan jarak; 3. peubah penentu peningkatan pencurian sumber daya alam hayati adalah penguasaan lahan milik; 4. peubah penentu peningkatan pelanggaran peraturan adalah tanggungan keluarga; 5. peubah penentu terjadinya interaksi positif antara masyarakat dengan taman nasional adalah umur dan jarak; 6. peubah penentu pemanfaatan sumber daya alam hayati adalah pendidikan.	1. Ketergantungan masyarakat terhadap taman nasional dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya alam hayati untuk kepentingan religi & adat ataupun untuk kebutuhan konsumsi lainnya dapat dikurangi dengan melakukan penanaman jenis-jenis yang dibutuhkan pada lahan-lahan milik masyarakat yang hingga saat ini tidak ditanami secara maksimal. 2. Pendidikan sebagai salah satu peubah penentu keberhasilan konservasi perlu mendapat perhatian pemerintah dengan menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk tingkat pendidikan lanjut yang lebih dekat ke pusat aktifitas masyarakat. 3. Besarnya angka usia produktif dalam masyarakat sekitar taman nasional perlu dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai salah satu modal dalam mencapai keberhasilan upaya konservasi dengan cara melibatkan mereka dalam kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak. \ 4. Untuk dapat mengetahui peubah sosial ekonomi penentu keberhasilan konservasi keanekaragaman hayati di masing-masing taman nasional perlu dikelola data peubah kinerja konservasi pada masing-masing Resort melalui penerapan Resort Base Management (RBM).
361	A Kusumuarto, dkk;2017;-Jurnal	Landscape Potential Analysis For Ecotourism Destination In The Resort 2 Salak Mountain, Halimun-Salak National Park	The Resort II Salak Mountain has the landscape resources that have the potential for development of ecotourism, such as Hot Springs Baths, Curug Cigamea, Curug Ngumpet, Curug Seribu, Curug Pangeran, Curug Muara, Curug Cihurang, Kawah Ratu, Campgrounds, Curug Kondang, and Curug Alami. TAD which has the highest potential are Kawah Ratu, Curug Seribu, Curug Muara, Curug Kondang and Curug Ngumpet. Curug Ngumpet was a shortest distance from the gate. The five potential TAD to be the area of ecotourism development. They have some physical characteristics were still easy to planning and design based on the carrying capacity, the number of tourists who visit are not too many (mass tourism) as well as the merchant only slightly (minimizing conflicts of relocation).	
362	Agus Rusmana, dkk;2017;-Jurnal	Literasi Sosial Budaya Masyarakat Penyangga Hutan Terhadap Pelestarian Taman Nasional Gunung Gede Halimun Salak (TNGHS)	Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat dalam hal ini masyarakat sebagai salah satu stake holder dalam proses pembangunan pedesaan di Kecamatan Cisolok ternyata memainkan peranan yang sangat signifikan. Masyarakat adat memiliki pengetahuan yang cukup tinggi tentang bagaimana mereka harus berperan dan bertindak sebagai anggota sebuah lembaga sosial. Kuatnya kehadiran teknologi informasi berupa alat teknologi komunikasi berbasis Internet telah memaksa masyarakat adat untuk dapat hidup menyesuaikan diri dengan pola dan gaya komunikasi yang baru. Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat dalam hal ini masyarakat sebagai salah satu stake holder dalam proses pembangunan pedesaan di Kecamatan Cisolok ternyata memainkan peranan yang sangat signifikan. Masyarakat adat memiliki pengetahuan yang cukup tinggi tentang bagaimana mereka harus berperan dan bertindak sebagai anggota sebuah lembaga sosial. Kuatnya kehadiran teknologi informasi berupa alat teknologi komunikasi berbasis Internet telah memaksa masyarakat adat untuk dapat hidup menyesuaikan diri dengan pola dan gaya komunikasi yang baru. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat tradisional "Kasepuhan" adalah bahwa pola dan kebiasaan hidup mereka merupakan kepercayaan dan keyakinan yang paling tepat untuk bisa hidup harmonis dengan alam sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak sangatkuat. Hal ini mendorong anggota masyarakat tradisional untuk tetap menggunakan keputusan dari kepala adat sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas sehari-hari, di samping menjalankan peraturan pemerintah. Dengan keterbukaan ini maka masyarakat tradisional Kasepuhan Sinar Resmi dapat menjalankan pola kehidupan sehari-hari sesuai tradisi kehidupan berbasis budaya dan tetap mampu mengikuti semua aturan kehidupan sebagai warga Negara.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
363	Anisa Eka Wulandari;2017;Skripsi	Manfaat Ekonomi Dan Kesesuaian Pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Gunung Salak Endah, Kabupaten Bogor	1. Manfaat ekonomi dari keberadaan Pemandian Air Panas GSE cukup besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata share pendapatan dari wisata terhadap total pendapatan pelaku usaha kurang dari 70% yang artinya pendapatan dari wisata tersebut bukan pendapatan utama. Sedangkan, rata-rata share pendapatan dari wisata terhadap total pendapatan tenaga kerja lebih dari 70% berarti pendapatan dari wisata tersebut merupakan pendapatan utama. Rata-rata covering pendapatan dari wisata terhadap pengeluaran rumah tangga pelaku usaha dan tenaga kerja dikategorikan tinggi artinya pelaku usaha dan tenaga kerja telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan wisata alam, namun untuk pelaku usaha masih memerlukan sumber pendapatan lain. 2. Hasil kajian kesesuaian antara pengelolaan wisata di Pemandian Air Panas GSE dan peraturan untuk aspek zonasi dan aspek aktivitas pemanfaatan sudah sesuai dengan peraturan. Sedangkan aspek aktor dan aspek iuran/tarif belum sesuai dengan peraturan, karena usaha wisata masyarakat belum memiliki izin dan belum berbadan hukum. 3. Hasil analisis stakeholder didapatkan tujuh aktor yang terlibat dalam pengelolaan wisata Pemandian Air Panas GSE yaitu Balai TNGHS, Resort II Gunung Salak, LVRI, Koperasi, Desa Gunung Sari, Rescue dan Pelaku Usaha. Adanya kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi berpotensi menimbulkan kendala dalam mewujudkan pengelolaan wisata Pemandian Air Panas GSE yang sesuai dengan peraturan. Hal ini dapat dihindari jika Balai TNGHS, Koperasi dan Desa Gunung Sari dapat berperan sesuai dengan fungsinya.	1. Pengelolaan wisata di Pemandian Air Panas GSE yang sesuai dengan peraturan harus dilakukan oleh para stakeholder terkait pengelolaan wisata,agar dapat berlanjut secara legal, sehingga tetap dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar sekaligus menjaga kelestarian TNGHS. 2. Pelaku usaha di Pemandian Air Panas GSE perlu menjadi anggota dari koperasi yang berbadan hukum, sehingga pelaku usaha tersebut dapat memiliki izin usaha. 3. Guna meningkatkan peran koperasi, maka koperasi perlu membentuk paguyuban untuk mewadahi pelaku usaha di Pemandian Air Panas GSE agar usaha yang dimilikinya dapat memiliki izin dan berbadan hukum. 4. Desa Gunung Sari perlu membentuk program-program untuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan wisata alam berupa pelatihan pengembangan usaha keterampilan dan kerajinan untuk pembuatan souvenir khas dari Pemandian Air Panas GSE. 5. Perlunya penelitian lebih lanjut untuk membentuk kelembagaan dan tata kelola antar stakeholder terkait pengelolaan wisata Pemandian Air Panas GSE yang dapat mendorong pengelolaan wisata yang sesuai dengan peraturan dengan tetap menjaga kelestaraian TNGHS serta manfaat ekonomi bagi masyarakat.
364	Dimas Jaya Satria;2017;Skripsi	Manfaat Ekonomi Wisata Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	1. Manfaat ekonomi yang di terima responden berupa share wisata dan covering wisata. Rata-rata share wisata terhadap pendapatan total rumah tangga pelaku usaha di Gunung Bunder masih rendah yaitu dibawah 50% , berbeda dengan tenaga kerja dengan share wisata yang sangat tinggi yaitu sebesar 90,74%. Kemudian covering wisata terhadap pendapatan total rumah tangga pelaku usaha dan tenaga kerja masih belum dapat memenuhi pengeluaran rumah tangga 100%, pelaku usaha hanya dapat memenuhi sebesar 42,01% dan tenaga kerja sebesar 89,41%. 2. Berdasarkan persepsi responden, ketergantungan masyarakat Desa Gunung Bunder terhadap sumber mata air sangat tinggi. Akan tetapi debit air tidak selalu tersedia sepanjang tahun seperti pada saat musim kemarau dan musim libur, untuk memenuhi kebutuhan air, masyarakat memiliki alternatif sumber mata air seperti setu. 3. Berdasarkan pemetaan tingkat kepentingan dan pengaruh, stakeholder yang terkait dalam pengelolaan wisata alam di TNGHS adalah Pelaku usaha (subjek), CV Jasa Alam Lestari, volunter, resort, BTNGHS (players), Desa Gunung Bunder (bystanders). Kondisi tersebut belum dapat mendukung pengelolaan wisata alam yang berkelanjutan dalam mendukung ekonomi masyarakat dan kelestarian sumber mata air, karena cenderung mementingkan pemanfaatan air bagi kegiatan wisata dari pada untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat Desa Gunung Bunder.	1. Mengembangkan atraksi wisata yang berbasis lingkungan khususnya terkait sumber daya air yang dapat mendukung kegiatan wisata maupun kebutuhan air masyarakat. 2. Perlu dibuat kelembagaan dan mekanisme untuk pengelolaan sumber daya air dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat dan kegiatan wisata agar dapat berkelanjutan. 3. Meningkatkan peran Desa Gunung Bunder, karena pengaruh desa masih rendah terhadap pengelolaan wisata maupun kelestarian. Selain itu desa sebaiknya dilibatkan dalam pengelolaan sumber mata air di TNGHS. 4. CV Jasa Alam Lestari dan TNGHS sebaiknya memiliki pemahaman yang sama dalam pemanfaatan kawasan TNGHS berbasis konservasi, untuk keberlanjutan kegiatan wisata dalam memanfaatkan kegiatan wisata terhadap pendapatan masyarakat maupun pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat agar dapat berkelanjutan 5. Perlu penelitian lanjutan seperti melihat kebutuhan air masyarakat dan kegiatan wisata. Apakah pengelolaan sumber daya air sudah maksimal dalam pemenuhan kegiatan wisata dan pemenuhan kebutuhan air masyarakat.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
365	Wina Erwina,;2017;Proceeding	Local Informant For Indigenous Agriculture Knowledge Of In The Making Documentary Film	The usage patterns of conventional mass media of Unpad students can be seen from the knowledge and its use in fulfillment of media. Unpad Students consume various newspapers, magazines and tabloids, but the majority read newspapers such as Kompas and Pikiran Rakyat, read Gogirl magazine, Tempo and Bobo, and read the tabloids and television station such as Gaul, Genie and Nova.Similarly, the level of knowledge is high related to the name of radio and television stations, but the radio they listen to is Geronimo and Ardan, while they also watch television stations such as .NET, RCTI, Trans and Metro. The intensity of the use of conventional mass media tends to be low and moderate. Most students of Unpad use the radio only 1-2 hours a week, although there are also students who use it almost every day when driving. While most students watch programs on television every day, it is only 1-2 hours per day The motives of Unpad students in consuming newspapers and magazines is based on their views that the news or information is much deeper, more specific, while the motives of reading tabloids is because it contains interesting content and titles. Interestingly, the novel became a best seller because they were written by familiar authors. Moreover, students watch television with a motive to eliminate stress and only if there is a broadcast of an interesting event	
366	Mia Clarissa Dewi;2018;-Jurnal	Kondisi Ekonomi Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi Akibat Perluasan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Tnghs)	Perluasan kawasan TNGHS mengakibatkan huma masyarakat kasepuhan Sinar Resmi berkurang dari 800m2 menjadi 400 m2. PUT masyarakat juga berubah yaitu dari Rp 940493/bulan menjadi Rp 712188/bulan. Penurunan PUT tersebut ditingkatkan dengan pendapatan dari luar pengelolaan hutan sebagai bentuk strategi nafkah yang terdiri dari beternak, buruh, berdagang, tukang ojeg dan membuat kerajinan.	Pemerintah daerah seharusnya membuat program yang berkelanjutan sebagai alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi.
367	Raymond Maurish ;2018;Skripsi	Analisis Akses Masyarakat Terhadap Sumberdaya Hutan Di Kawasan Taman Nasional	1. Sebelum adanya kebijakan penetapan taman nasioanal masyarakat masih memiliki akses dalam memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada. Karena pada masa ini hutan dikelola oleh Perum Perhutani. Pada masa Perhutani kawasan hutan dijadikan kawasan hutan produksi yang membuat masyarakat bebas keluar masuk dan memaanfaatkan hasil hutan, namun tetap dalam pengawasan dari Perhutani. Warga juga dapat menggarap lahan yang diperbolehkan oleh Perhutani untuk digarap. Selain menggarap lahan di hutan warga juga memanfaatkan hasil hutan sesuai kebutuhan mereka seperti mengambil bambu untuk dijadikan tiang antena TV atau kandang hewan ternak mereka, kayu untuk tiang penyangga gubuk petani di sawahnya, kayu bakar yang dimanfaatkan oleh warga untuk menghemat penggunaan gas LPG, dan masih banyak lagi. Akses yang didapat masyarakat memiliki hubungan dengan sistem penghidupan masyarakat. Masyarakat lebih banyak menggantungkan kehidupan mereka pada hutan. Sistem penghidupan masyarakat sebelum adanya kebijakan penetapan TNGHS mayoritas pada bidang pertanian dan meski demikian ada pula masyarakat yang sistem penghidupannya pada bidang non pertanian, namun tidak terlalu banyak dibandingkan dengan bidang pertanian. Hal ini dikarenakan iklim yang cocok untuk bercocok tanam dan masih banyak lahan yang dapat digarap. 2. Setelah adanya kebijakan penetapan taman nasional, akses terhadap sumberdaya hutan yang didapat oleh masyarakat berkurang. Hal ini dikarenakan kawasan hutan produksi berubah menjadi kawasan konservasi. Hal inilah yang menjadikan aktiviatas warga di dalam hutan dibatasi oleh pemerintah, yang membuat masyarakat merasa akses mereka dipersulit untuk memanfaatkan hasil hutan yang ada. Hal itu membuat sedikit perubahan pada sistem penghidupan masyarakat. Akses masyarakat yang berkurang bedampak pada sistem penghidupan yang dilakukan masyarakat. Sebagian masyarakat yang sudah tidak dapat mengakases hutan kemudian beralih pada bidang non pertanian seperti berdagang, tukang ojek atau angkot, membuka bengkel, dan lainnya.	1. Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebaiknya melakukan suatu usaha atau menciptakan lapangan pekerjaan agar warga yang sebelumnya mengandalkan hasil hutan dan menggarap lahan di dalam hutan sebagai mata pencaharian mereka mendapatkan sumber nafkah pengganti. 2. Warga hendaknya membentuk dan memperkuat organisasi atau lembaga masyarakat agar warga dapat berperan aktif dan berani menyampaikan pendapat serta keluhan mereka terhadap sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh TNGHS agar terjalin hubungan baik antara pengelola dan warga. 3. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan kinerja dari Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan untuk diri sendiri, dan menindak tegas hal tersebut.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
			3. Sistem penghidupan masyarakat sebagian besar masih bergantung pada bidang pertanian. Pertanian masih menjadi mata pencaharian utama warga desa. Namun warga yang memiliki mata pencaharian pada bidang non pertanian meningkat setelah adanya kebijakan penetapan taman nasional yang dikelola oleh balai TNGHS walau perubahannya tidak begitu signifikan. Balai TNGHS juga membuka lokasi ekowisata alam di dalam kawasan hutan yang membuat lokasi tersebut didatangi banyak pengunjung. Hal tersebut membuat sebagian warga memilih untuk beralih profesi menjadi pedagang, tukang ojek atau angkot, penjaga tiket, tukang parkir, dan lain-lain. 4. Respon masyarakat terhadap kebijakan penetapan taman nasional adalah negatif. Karena masyarakat merasa kesulitan untuk memanfaatkan hasil hutan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu balai TNGHS hanya fokus pada keuntungan finansial yang mereka dapatkan dari tiket masuk pengunjung ekowisata alam di sana. Warga yang tidak memiliki akses terhadap sumberdaya hutan memberikan respon negatif kepada kebijakan penetapan TNGHS, karena warga merasa dirugikan dengan kebijakan yang menutup akses warga dalam memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada. Akan tetapi bagi orang-orang yang mengenal penjaga kawasan hutan dapat masuk hutan dan memanfaatkan hasil hutan dengan mudah. Sehingga warga memberikan respon negatif kepada pihak pengelola kawasan karena merasa pihak pengelola tidak menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya dan bertindak tidak adil. Meski demikian masih ada beberapa orang yang memberikan respon positif karena merasa dengan adanya pembatasan akses membuat hutan lebih terjaga dari kegiatan manusia yang dapat merusak hutan.	
368	Nur Widiyanto,dkk;2018;Jurnal	Race without a finish line: tourism and the encounter between Islam-tradition in Kasepuhan Ciptagelar, West Java	The front stage and back stage region in Ciptagelar have functioned as the arena to negotiate between local tradition and external forces including the majority Islamic group, state policies and national park. The encounter between tradition and Islam has also produced several outcomes. Burke (2009) emphasizes three possible outcomes from the encounter; (a) cultural hegemonization, in which a strong culture dominate the weak culture, (b) the cultural diglosia bringing people to life in the double —reality‖, interchangeably move from one situation to the other and (c) the creolization when two cultures produces a new standardized culture. The encounter between Islam and tradition in Ciptagelar has emerged a particular cultural homogenization where local tradition has been succesfuly dominating the —administrative‖ acceptance of Islam. It is proven by various effective controls over the Islamic practices. Islam is accepted as the administrative religion to express the —harmonic‖ worldview by balancing the relationship between mokaha/tradition, nagara/the state and syara/the dominant religion. However, certain limitations are strictly applied, reflected on the obligation to keep Islam should be not too exceed. The further outcome from the adat hegemony over Islam reflected on the existence of various rituals, local values and worldviews rooted from "tatali paranti karuhun". It includes the non-negotiable customary laws which should be obeyed; planting paddy only one time in a year use only local paddy seeds and use only the allowed traditional material in building a house. Maintaining local tradition through controlling every outside element while strategically accepting modern technologies to support their cultural identiy have brought Kasepuhan Ciptagelar as the —new icon‖ representing the authencity of Sundanese culture within this contemporary world. It has brought Ciptagelar to be a new popular destination for people from the city who want to maintain their cultural tie with the Sundanese culture. In this occasion, Ciptagelar has been effectively admitted for having various —tourism resources‖, which have been effectively exerciced as important —bargaining power‖ to strengthern cultural claim over the ancestral land. However, these contemporary developments are temporary outcome, because actually the race has not been over yet.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
369	Yayu Heryatun,dkk;2018;Jurnal	Budaya Masyarakat Kasepuhan Cisungsang		
370	Yonex Meta;2018;Tesis	Efektivitas Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Air (Ipa) Di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa para aktor implementasi kebijakan pemberian IPA di TNGHS memahami tugas, fungsi, tujuan dan isi kebijakan pemberian IPA dengan baik, namun kurang mampu menerapkannya dengan tepat di lapangan. Penyebabnya adalah perbedaan cara pandang para aktor tentang pemanfaatan sumberdaya air sebagai public goods. Perbedaan cara pandang para aktor kebijakan diketahui dari inkonsistensi, ketidakpatuhan, dan diskresi yang terjadi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kondisi normatif dalam regulasi dengan fakta empirisnya. Kesenjangan yang ditemui dalam implementasi pemberian IPA di TNGHS meliputi: (a) masalah komunikasi, yaitu strategi komunikasi yang terbatas, ketidakjelasan informasi dan inkonsistensi sikap FPA dan pengelola; (b) masalah sumberdaya, yaitu terbatasnya jumlah dan kompetensi staf, kurangnya tingkat kepatuhan administratif dan tidak ada insentif tambahan; (c) masalah sikap implementor, yaitu diskresi dan disinsentif; serta (d) masalah struktur birokrasi, yaitu terlalu banyaknya tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan birokrat yang menangani pemanfaatan air di BTNGHS dan tidak adanya SOP kebijakan IPA. Beberapa opsi yang diusulkan untuk peningkatan efektivitas implementasi pemberian IPA di TNGHS adalah: (a) masalah komunikasi, dengan cara penambahan startegi komunikasi dan pendampingan yang intensif bagi kelompok FPA di tiap Resort; (b) masalah sumberdaya, dengan cara memberikan pelatihan capacity bulding serta pemberian insentif tambahan; Inkonsistensi dan ketidakpatuhan yang terjadi, dapat diminimalisir dengan membuat format laporan kegiatan tahunan yang lebih sederhana yang mudah dikerjakan oleh kelompok FPA mengingat pada lampiran Permenhut No. 64 tahun 2013 tidak memuat format laporan tahunan untuk kegiatan pemanfaatan air non-komersil. (c) masalah sikap implementor, dengan cara pemberian penghargaan bagi FPA yang mengimplementasikan IPA dengan efektif; serta (d) masalah struktur birokrasi, dengan cara menetapkan SOP terkait kebijakan pemberian IPA	Rata-rata tingkat pendidikan pada aktor FPA rendah dan penyebaran tenaga pendamping di tingkat resort tidak merata maka penyusunan dan penetapan SOP pemberian IPA di TNGHS sangat penting sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan pemberian IPA sesuai Permenhut No. 64/Menhut-II 2013.
371	N. Dhea Madinah Al Qibthia,dkk;2019;jurnal	Analisis Penggunaan Lahan Berdasarkan Kemampuan Lahan Pada Kampung Adat Ciptagelar Dan Sekitarnya Di Zona Khusus Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Dari analisis kesesuaian lahan terdapat 70,9 Ha lahan di kampung Ciptagelar yang digunakan sebagai kawasan pertanian dan perkebunan yang masuk dalam kelas lahan II. 15,43 ha kelas lahan VII, 9,86 ha kelas lahan VI, dan 1,3 ha kelas lahan IV. Kawasan Budidaya dan pemukiman seluas 16,65 ha dan budidaya kebun campuran dan persawahan seluas 80,9 ha. Kawasan penyangga memiliki luas 58,4 ha.	
372	Ilham Rohman Ramadhan;2019;-Jurnal	The Local Wisdom Values Of Kasepuhan Ciptagelar Community As A Source Of History Learning	The Community of Kasepuhan Ciptagelar are one of the few people in Indonesia who live by the values of local wisdom that they hold firmly. Researchers observed the local wisdom value through governance, customary value systems and forms of acculturation in society. These values are tangible or intangible. The values of local wisdom that emerge in the community are Social solidarity, environmental care, democratic, honest, responsible, and creative. These values are compatible with the Core Competencies (Kompetensi Inti) and Basic Competencies (Kompetensi Dasar) in the 2013 Curriculum at the High School, class X (Ten), 1st Semester, in the subjects of Indonesian History. Thus, the wisdom of local communities Kasepuhan Ciptagelar can be a source of learning alternatives for students of classes X, especially in the subjects of history.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
373	Ninda Darisa Kenria;2019;Skripsi	Dampak Sosial Dan Ekonomi Model Kampung Konservasi Terhadap Masyarakat (Studi Kasus : Kampung Suka Galih, Desa Cipeuteuy)	1. Dampak program MKK di Kampung Sukagalih terhadap sosial masyarakat dinilai dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat baik sesama anggota MKK maupun pihak luar yang terkait program MKK seperti pihak BTNGHS dan LSM JICA. Hadirnya MKK juga meningkatkan jaringan sosial masyarakat, tindakan proaktif dan kepedulian terhadap lingkungan dalam bentuk peran aktif masyarakat serta kerelaan warga sebagai subjek serta pembangunan serta sikap yang menunjukkan perhatian, solidaritasi, dan empati juga meningkat. 2. Manfaat ekonomi yang masyarakat Kampung Sukagalih dapatkan setelah adanya implementasi MKK berupa bantuan pemberdayaan ternak domba ekor gemuk, dan sumber pendapatan baru dari jasa penginapan homestay dan program adopsi pohon. Manfaat ekonomi dari adanya MKK di Kampung Sukagalih Rp 6 551 568/tahunnya. Kontribusi pendapatan dari MKK terhadap masyarakat responden sebesar 65,25% 3. Aspek keberlanjutan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Sukagalih adalah keberhasilan masyarakat yang mampu melakukan restorasi lahan yang semula merupakan lahan garapan menjadi kawasan hutan kembali seluas 10 ha. Lahan yang sudah di rehabilitasi telah diserahkan kembali ke BTNGHS pada tahun 2016.	Agar implementasi MKK dapat berlangsung secara berkelanjutan perlu adanya peran pihak taman nasional yang rutin melakukan monitoring dan evaluasi program MKK. Kontribusi pendapatan dari MKK terhadap pendapatan responden Kampung Sukagalih sudah besar, walaupun sudah besar dan meningkatkan ekonomi masyarakat tetapi masih terdapat responden yang tergolong miskin. Perlu adanya sumber pendapatan yang baru agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat adalah masyarakat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu berupa getah dari pohon Damar. Tegakan damar berada di kawasan bekas Perhutani pohon Damar yang sekarang sudah menjadi kawasan TNGHS, sehingga masyarakat mengharapkan mereka dapat memanfaatkan hasil getah tersebut. Sumber pendapatan yang dapat membantu kondisi ekonomi masyarakat dari pengembangan jasa wisata alam yang terdapat di sekitar Kampung Sukagalih. Restorasi yang selama ini sudah dilakukan oleh pihak MKK Sukagalih bersama pihak TNGHS dan donatur dilakukan pada zona khusus, hal ini tidak sesuai dengan peraturan Perdirjen No.6 tahun 2018 yang seharusnya dilakukan di zona rehabilitasi. Perlu adanya penyesuaian peraturan mengenai penanaman tidak hanya dapat dilakukan di zona rehabilitasi tetapi di zona khusus pun dapat dilakukan
374	Lusi Septianai;2019;Skripsi	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyadapan Getah Pinus Di Resort Gunung Bodas Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Perlakuan menggunakan kadukul dengan lebar 5 cm memiliki produktivitas rata-rata tertinggi sebesar 17,11 g/quarre/hari dengan peningkatan sebesar 137% dan perlakuan menggunakan kadukul dengan lebar 2 cm memiliki produktivitas tertinggi sebesar 11,04g/quarre/hari dengan peningkatan sebesar 111%. Stimulansia yang memiliki produktivitas getah tertinggi dan sesuai diaplikasikan di Resort Gunung Bodas TNGHS menurut penelitian yaitu stimulansia H2SO4 10%+ETRAT. Perlakuan dengan menggunakan kadukul lebar 2 cm dengan 8 quarre dan stimulansia H2SO4 10% + ETRAT dapat meningkatkan produktivitas getah pinus. Produktivitas getah pinus dapat meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga apabila penyadap dapat bertindak sebagai pengelola sekaligus buruh sadap di daerah sadapannya.	1. Penyadap Taman Nasional Gunung Halimun Salak Resort Gunung Bodas dapat menggunakan stimulansia H2SO410% +ETRAT untuk meningkatkan produktivitas getah pinus dan pendapatan. 2. Perlakuan yang disarankan yaitu menggunakan kadukul ukuran 2 cm sebanyak 8 quarre/pohon. 3. Perlu adanya pembinaan dari pihak Taman Nasional kepada penyadap agar dapat menjadi pengelola dan pengelola sekaligus buruh sadap.
375	Vionike Merdeka Yusefi;2019;Skripsi	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyadapangetah Pinus Di Resort Gunung Butak Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Produktivitas tertinggi quarre 2 cm yaitu perlakuan A2B4 dengan rata-rata masing-masing blok sebesar 7.25 g/quarre/hari dan 4.39 g/quarre/hari. Produktivitas tertinggi quarre 5 cm yaitu perlakuan A1B4 dengan rata-rata masingmasing blok sebesar 12.05 g/quarre/hari dan 7.25 g/quarre/hari. Kesetaraan kadukul lebar 2 cm dengan jumlah 2 quarre per pohon maka hasil produktivitasnya kurang lebih sama dengan kadukul lebar 5 cm dengan jumlah 1 quarre per pohon. Stimulansia campuran ETRAT dengan H2SO4 10 % menghasilkan produktivitas getah yang paling tinggi dan paling sesuai diaplikasikan di daerah yang tinggi. Peningkatan produksi getah menggunakan stimulansia campuran pada blok Bakukung quarre 2 cm dan 5 cm sebesar 147.58% dan 220.89%, sedangkan pada blok Pojok Oray sebesar 116.77% dan 92.61%. Apabila penyadap hanya berperan sebagai buruh maka kebutuhan rumah tangganya belum bisa dipenuhi seluruhnya. 24Namun, penyadap yang mengelola areal sendiri dan langsung bekerja di areal sadapannya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya.	1. Resort Gunung Butak dapat menggunakan stimulansia campuran untuk meningkatkan produktivitas getah pinus dan meningkatkan pendapatan 2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bahan organik sebagai pengganti fungsi asam kuat agar lebih ramah lingkungan 3. Perlu adanya pembinaan dari pihak Taman Nasional pada penyadap agar penyadap bisa menjadi pengelola atau pengelola sekaligus buruh. 4. Perlakuan yang direkomendasikan yaitu menggunakan kadukul lebar 2 cm dengan 6 quarre/pohon pada blok Bakukung dan 7 quarre/pohon pada blok Pojok Oray jika tidak ada ruang sadap lagi untuk metode quarre 5 cm

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
376	Muhammad Khairul;2019;Skripsi	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyadapangetah Pinus Di Resort Gunung Koneng Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Produktivitas tertinggi pada metode quarre sebesar 7.64 g/quarre/hari sedangkan metode bor sebesar 3.06 g/lubang/hari. Penggunaan jenis stimulansia campuran (ETRAT + H2SO4 10%) memiliki produktivitas getah pinus tertinggi baik metode quarre maupun metode bor dengan peningkatan berturut-turut sebesar 161.64% dan 157.14%. Metode quarre menunjukkan bahwa, pendapatan dengan pola penyadapan sebagai buruh sebesar Rp 1 492 850/tahun dengan \kontribusi 5.80% dan pendapatan dengan pola penyadapan sebagai buruh sekaligus pengelola sebesar Rp 2 450 432.66/tahun dengan kontribusi 9.28%. sedangkan pada metode bor, pendapatan dengan pola penyadapan sebagai buruh sebesar Rp 1 195 844/tahun dengan kontribusi 4.65% dan pendapatan dengan pola penyadapan sebagai buruh sekaligus pengelola sebesar -Rp 4 141 739.20/tahun dengan kontribusi -17.02%. Hasil kontribusi data penelitian dengan metode quarre lebih besar dibandingkan dengan metode bor. Pola kerjasama tersebut belum mampu memberdayakan masyarakat sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut penyadap melakukan pekerjaan sampingan lainnya seperti berkebun dan memanfaatkan hasil hutan lainnya.	1. Perlu dilakukan adanya pergantian jenis stimulansia seperti stimulansia campuran (ETRAT + H2SO4 10%) untuk meningkatkan produktivitas getah pinus. 2. Metode bor tidak dapat menjadi alternatif apabila penyadapan tetap dilakukan karena biaya produksi yang tinggi, produktivitas yang dihasilkan rendah dan jumlah pohon yang disadap sedikit. 3. Perlakuan yang disarankan yaitu menggunakan metode quarre dengan 3 quarre per pohon dengan mempertimbangkan kondisi pohon
377	Winda Safitri;2019;Skripsi	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyadapan Kopal Di Resort Kawah Ratu Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Tnghs)	Produktivitas tertinggi pada penggunaan stimulansia HCl 8% yang dipakai oleh penyadap dengan rata-rata 4.57 g/quarre/hari di Blok Parigi dan 6.33 g/quarre/hari di Blok Ocah. Pendapatan penyadap melalui penyadapan getah sebagai buruh, pengelola maupun pengelola dan buruh memiliki nilai pendapatan yang berbeda. . Rata-rata pendapatan sebagai buruh dan pengelola pengelola pada blok Ocah sebesar Rp 29 788 366.41/tahun, sedangkan rata-rata pendapatan sebagai buruh dan pengelola pada blok Parigi sebesar Rp 13 352 760/tahun.Kontribusi penyadapan kopal terhadap pengeluaran rumah tangga penyadap jikasebagai buruh di blok Parigi memiliki nilai rata-rata kontribusi yang kecil sebesar 26.22% yang berarti pendapatan dari kegiatan penyadapan belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan jika sebagai pengelola dan buruh pada blok Ocah memiliki nilai kontribusi rata-rata yang besar yaitu 152.67% yang berarti pendapatan dari kegiatan penyadapan sudah bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga.	1. Resort Kawah Ratu dapat menggunakan stimulansia HCl 8% untuk meningkatkan produktivitas kopal dan meningkatkan pendapatan dengan melakukan penyadapan 6 quarre/pohon 2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bahan organik sebagai pengganti fungsi asam kuat agar lebih ramah lingkungan 3. Perlu adanya pembinaan dari pihak Taman Nasional pada penyadap agar penyadap bisa menjadi pengelola atau pengelola sekaligus buruh.
378	Yusuf Dwiutaman;2019;Skripsi	Pencemaran Merkuri Di Sungai Cisuren Hilir Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat	1. Kandungan merkuri akibat aktifitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kampung Cisuren telah menimbulkan pencemaran merkuri pada air Sungai Cisuren, sedimen sungai, sedimen sawah serta pada biota air: udang kali (*Macrobrachium lanchesteri*), katak tegalan (*Fejervarya limnocharis*) dan susuh kura (*Sulcospira testudinaria*). Kandungan merkuri tertinggi terdapat pada sedimen sungai dan sedimen sawah. 2. Tingkatan bioakumulasi merkuri terbesar terjadi pada biota yang hidup di lingkungan air sungai dibandingkan pada lingkungan sawah. Hal ini disebabkan beragamnya jalan masuk merkuri ke dalam tubuh biota pada lingkungan air, baik melalui proses makan memakan, penyerapan lewat kulit, maupun insang, serta interaksi paling banyak dengan air sungai.	1. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan terkait dampak pencemaran merkuri pada udara yang disebabkan aktifitas PETI. 2. Penelitian terkait tumbuhan air yang dapat mereduksi kandungan logam pada sungai cikaniki juga perlu dilakukan agar mengurangi pencemaran merkuri. 3. Perlu diadakan sosialisasi proses penambangan emas tanpa merkuri yang aman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup umumnya. 4. Perlu diadakan pembuatan kolam penampung limbah agar merkuri tidak tercemar ke sungai.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
379	Arnold S;2020;Jurnal	Willingness To Pay Untuk Konservasi Spesies Terancam Punah Di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak: Aplikasi Metode Contigent Valuation.	Rata-rata dari total pengunjung yang bersedia datang ke pusat konservasi satwa pada tingkat harga tarif masuk sebesar Rp. 5.000,- adalah sebanyak 249 pengunjung. Sedangkan pengunjung tidak bersedia membayar apabila rata-rata tarif masuk pusat konservasi satwa dinaikkan menjadi Rp. 42.000,- atau lebih besar. 2. Karakteristik responden, kepedulian dan pengetahuan responden terhadap satwa liar tidak mempengaruhi probabilitas WTP responden. Responden tetap bersedia membayar, seperti apapun karakteristik dan preferensinya. 3. Responden yang memilih Elang Jawa memiliki probabilitas untuk membayar WTP lebih tinggi dibandingkan yang memilih spesies lain.	1. Pengunjung sangat tertarik apabila dibangun suatu pusat konservasi satwa di TNGHS. Nilai willingness to pay (kesediaan membayar) mencerminkan dukungan pengunjung terhadap program ini. Dan sebagian besar pengunjung bersedia membayar lebih mahal untuk dapat masuk ke pusat konservasi tersebut. 2. Walaupun tidak disebutkan dalam kuesioner mengenai rencana pembangunan pusat konservasi Elang Jawa yang sedang berlangsung saat ini, tetapi rencana pembangunan tersebut sesuai dengan preferensi pengunjung terhadap prioritas satwa yang dikonservasi terlebih dahulu. Pengunjung yang memilih Elang Jawa bersedia membayar lebih tinggi dibandingkan yang memilih satwa lain. 3. Pada tingkat harga rata-rata Rp. 42.000,- pengunjung tidak bersedia membayar untuk masuk ke pusat konservasi satwa. Sebagai langkah awal jika pusat konservasi satwa ini sudah dibangun dan karena tujuan utamanya adalah untuk konservasi maka penentuan tarif masuk dapat dibuat lebih murah dari Rp. 42.000,- disesuaikan dengan paket ekowisata yang ditawarkan dan biaya operasionalnya. Apabila suatu saat pengelolaannya sudah dalam taraf yang sangat baik, maka paket ekowisata dapat dikembangkan ke arah yang lebih menarik. Semakin menarik paket ekowisata yang ditawarkan, maka tarif masuknya semakin mahal. Walaupun paket ekowisata yang ditawarkan sangat mahal, pengunjung akan tetap bersedia membayar terutama pengunjung dari luar Indonesia.
380	Ruri Susanti,dkk;2020;Jurnal	Analysis Of Social System Based On Agil Concepts In Ciptagelar Community Communities	1. The Indigenous People of Kasepuhan Ciptagelar has been able to implement the system very well. Based on the analysis of four functions in the form of 1) adaptation (filtering), namely by filtering the modernization adopted with a category that does not harm customs, 2) goal attainment (attainment of goals) as indicated by the philosophy of life as a basic grip with the meaning of life goals to achieve happiness world and the hereafter, 3) integration (integration) of the system in Ciptagelar can make all aspects run well and orderly and are related to each other based on the ties of religious rules (sarang), state (nagara), and customs (mokaha), 4) latency (latency or pattern maintenance) carried out by the Ciptagelar community, namely by implementing the whole system as a whole so that cultural patterns that have been implemented down and down can be implemented optimally. 2. Therefore it can be concluded that the social system, especially in Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar can survive based on the identification of the four functions mentioned above.	
381	Dewi Rahayu,dkk;2020;Jurnal	Kapamalian Di Kasepuhan Ciptagelar	Kapamalian dapat dikategorikan sebagai folklor lisan. Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian langsung kepada masyarakat Kasepuhan Ciptagelar yaitu terdapat beberapa kapamalian yang sudah ada serta terus diwariskan secara turun-temurun. Sampai saat ini masyarakat Kasepuhan Ciptagelar masih memegang teguh keyakinan terhadap adat kapamalian. Berdasarkan klasifikasinya, pamali di Kasepuhan Ciptagelar terbagi menjadi enam, yaitu (1) Jangan memperjualbelikan beras. Hal ini karena adanya kepercayaan masyarakat kesepuhan Ciptagelar terhadap karuhun serta kepercayaan kepada Dewi Sri, sebagai lambang kemakmuran dan kesuburan. (2) Wanita yang sedang datang bulan tidak diperbolehkan ikut memasak di dapur imah gedé, karena imah gede merupakan tempat yang sakral bagi masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dan jika dilanggar akan berdampak secara langsung pada hasil masakannya. (3) Jangan membangun rumah tembok. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar percaya bahwa kapamalian ini merupakan bentuk kasih sayang para leluhur agar terhindar daribencana, karena rumah bilik sangat aman dan tidak mudah roboh ketika terjadi gempa bumi.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
			(4) Laki-laki harus memakai iket. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar meyakini bahwa iket merupakan pengikat dan melambangkan persaudaraan. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan jika memasuki kawasan imah gede mengenakan iket. (5) Peremuan haru memakai samping. Perempuan Sunda jaman dahulu dalam kehidupan sehari-harinya sering menggunakan samping sebagai penutup aurat. Bagi masyarakat Kasepuhan Ciptagelar mengenakan samping juga diyakini dapat melindungi perempuan dari halhal yang dapat menimbulkan musibah. (6) Dilarang berbicara ketika menumbuk padi. Hal ini sebagai perwujudan etika terhadap Dewi Sri. (7) Jangan memperjualbelikan labu dan singkong. Hal ini karena labu dan singkong sama halnya dengan padi, di tanam di tanah, seasal dengan manusia dari saripati tanah. (8) Jangan keluar rumah di malam hari dan pergi ke hutan sendiran. Kepercayaan ini berkaitan dengan sandekala yang dianggap sebagai monster yang dapat menggangu manusia.	
382	Ajeng Fatiyah Azahra,dkk;2020;-Jurnal	Tradisi Upacara Adat Nyimur Di Kasepuhan Ciptagelar	Kebudayaan merupakan hasil cipta, karsa, rasa manusia yang dihasilkan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya. Koentjaraningrat membagi unsur kebudayaan menjadi 7, yaitu 1) bahasa; 2) ilmu pengetahuan; 3) organisasi sosial; 4) sistem peralatan hidup dan teknologi; 5) sistem mata pencaharian; 6) sistem religi; 7) kesenian. Salah satu unsur budaya yang dibahas yaitu sistem ilmu pengetahuan. Sistem ilmu pengetahuan merupakan salah satu unsur penting dalam kebudayaan. Pengetahuan adalah segala hal yang bisa diketahui oleh indera manusia. Salah satu ilmu pengetahuan yang ada di Kampung Adat Ciptagelar yaitu upacara adat nyimur. Nyimur merupakan tradisi adat di Kampung Adat Ciptagelar yang termasuk kedalam rincian upacara adat inisiasi intiation/ initiu (permulaan/daur hidup manusia). Upacara ini terbilang penting dan dilakukan satu tahun sekali dalam waktu satu minggu, lebih tepatnya ketika padi sudah mengembang atau berbunga, atau ketika pohon hiris sudah mulai berbunga. Dalam upacara adat nyimur ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan oleh anak-anak. Upacara ini memiliki tujuan menjaga dan menyembuhkan dari berbagai penyakit. Selain itu, upacara adat nyimur merupakan ciri khas dari Kampung Adat Ciptagelar yang telah diwariskan secara turuntemurun.	
383	Beatrix Gracelia;2020;Skripsi	Interaksi Dan Persepsi Masyarakat Desa Sukaharja Terhadap Hutan Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Dan Sekitarnya	1. Mayoritas masyarakat Desa Sukaharja sebanyak 78.33% masih melakukan interaksi terhadap hutan di kawasan TNGHS dan sekitarnya sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turuntemurun. Bentuk interaksi tersebut didominasi oleh interaksi pemanfaatan hasil hutan sebesar 61.04%, mencakup kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu. 2. Mayoritas responden masyarakat Desa Sukaharja (81.67%) memiliki persepsi positif terhadap hutan dan perilaku yang mendukung konservasi seperti penanaman, patroli hutan, penelitian, serta perlindungan satwa.di Kawasan TNGHS dan sekitarnya. Persepsi dan perilaku masyarakat Desa Sukaraja terbentuk karena adanya kesadaran bahwa mereka memiliki ketergantungan terhadap manfaat Jasling & Mineral dan sumberdaya hutan di Kawasan TNGHS dan sekitarnya. Hasil uji beda Mann-Whitney menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara petani dan bukan petani.	1. Perlu dilakukam penelitian lebih lanjut mengenai kajian spasial terkait lokasi pemanfaatan hutan oleh masyarakat. 2. Mendorong kerja sama antara TNGHS dan masyarakat melalui pengembangan potensi-potensi yang ada di wilayah Desa Sukaharja antara lain; mendukung usaha pembibitan tanaman hias yang dilakukan oleh masyarakat, pemberian izin swakelola penyadapan getah pinus, serta penanaman pohon yang menghasilkan hasil hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
384	Yustika Elia Utami;2020;Skripsi	Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus: Wisata Alam Curug Cigamea, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor)	1. Secara umum persepsi multipihak terhadap kondisi objek wisata Curug Cigamea kurang baik. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan terkait kelembagaan, sehingga kegiatan pengelolaan objek wisata Curug Cigamea belum optimal. Masih terdapat hal yang perlu diperbaiki, yaitu aksesibilitas di dalam objek wisata, kebersihan lingkungan, penataan wisata, keamanan pengunjung, dan beberapa fasilitas wisata. Beberapa hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi pihak pengelola. 2. Manfaat ekonomi dari kegiatan wisata di Curug Cigamea cukup besar. Pendapatan wisata tenaga kerja dan pelaku usaha memiliki peran penting dalam penemuhan kebutuhan rumahtangganya, dilihat dari nilai kontribusi terhadap total pengeluaran rumahtangga yang dikategorikan tinggi. 3. Berdasarkan hasil analisis dengan metode AHP, strategi yang menjadi prioritas utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Curug Cigamea adalah penguatan system kepengelolaan. Hal ini sejalan dengan hasil penilaian pada level kriteria, bahwa kriteria yang menjadi prioritas adalah kelembagaan.	1. Pengelola perlu memperbaiki aksesibilitas dan fasilitas di dalam objek wisata serta perlu memperhatikan pemeliharaannya demi keamanan dan kenyamanan pengunjung 2. Perlu adanya komunikasi yang baik dan pembagian tugas yang jelas antara pihak koperasi dengan pengelola lokal agar dapat menjalin kerja sama yang baik. 3. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai analisis desain kelembagaan serta penelitian mengenai tingkat kerentanan dan resiliensi kegiatan wisata Curug Cigamea terhadap berbagai ancaman.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
385	Toni Mahendra;2021;Skripsi	Analisis Keberlanjutan dan Strategi Pengembangan Wisata di Desa Wisata Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor	1. Manajemen Desa Wisata Malasari dikelola oleh CV Pesona Malasari dengan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam Forum Desa Wisata Malasari. Dalam pengelolaannya CV Pesona Malasari didampingi oleh stakeholders lain yaitu Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Aparat Desa Malasari, Badan Usaha Milik Desa, Highland Indonesia, dan Asosiasi Desa Wisata Kabupaten Bogor. Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan stakeholders yang memiliki pengaruh dan kepentingan tertinggi disebabkan sebagian besar wilayah Desa Malasari masuk dalam kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 2. Wisata di Desa Wisata Malasari dilakukan dengan menggunakan pendekatan community based tourism (CBT). Pendekatan CBT melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengelola objek daya tarik wisata yang ada di daerahnya, namun dalam pengelolaan tersebut ditemukan beberapa kendala salah satunya adalah kualitas dan kuantitas SDM yang rendah (tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat), sehingga berdampak berlangsung pada tata kelola atau manajemen wisata yang ada di Desa Wisata Malasari. 3. Aspek keberlanjutan Desa Wisata Malasari memiliki status cukup berkelanjutan. Dimensi sarana prasarana merupakan dimensi yang memilikinilai keberlanjutan terendah dan satu-satunya dimensi yang masuk dalam kategori kurang berkelanjutan, sehingga perlu menjadi perhatian utampengelola Desa Wisata Malasari. 4. Strategi pengembangan wisata di Desa Wisata Malasari berada pada Sel I dalam matriks IE. Hal tersebut mengindikasikan bahwa strategi pengembangan wisata di Desa Wisata Malasari berada pada kondisi tumbuh dan membangun (grow and build). Strategi yang dapat diterapkan dalam kondisi ini adalah strategi intensif dan strategi integratif. Selain itu kombinasi strategi dari matriks SWOT juga dapat menjadi alternatif strategi pengembangan wisata di Desa Wisata Malasari.	1. Desa Wisata Malasari harus didekati oleh konsep wisata minat khusus dengan nilai-nilai wisata yang ramah lingkungan, budaya dan kearifan lokal sehingga memberikan dampak terhadap keberlanjutan ekologi, ekonomi, sosial budaya, kelembagaan, dan sarana prasarana. 2. Desa Wisata Malasari juga dapat didekati oleh konsep wisatawan umum dengan pembangunan sarana prasarana yang tidak mengancam keberlanjutan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
386	Aldio Dwi Putra, dkk;2019;Buku	Pesona Tersembunyi Gunung Salak Taman Nasional Gunung Halimun Salak		
387	Septi Dewi Cahya DVM, dkk;2019;Jurnal	Nutritional Evaluation of Raptor at Pusat Suaka Satwa Elang Jawa	The present results by evaluating the energy requirement, proximate analysis of all prey given, and by evaluating the body weight and body condition score showed that the nutrition of all raptors at Pusat Suaka Satwa Elang Jawa have been fullfilled.	Evaluate the nutritional status by doing blood test and measuring digestibility of individual raptor. It might be good for the next nutritional evaluation.
388	Giri MMS, dkk;2019;Jurnal	Keanekaragaman Satwa Primata di Wilayah Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Jenis satwa primata yang ditemukan di wilayah operasi pemanfaatan panas bumi Salak Ltd. sebanyak empat spesies dari dua keluarga yaitu owa jawa, surili, lutung, dan monyet ekor panjang. Owa jawa merupakan jenis satwa primata yang paling melimpah di wilayah operasi pemanfaatan panas bumi Salak. Jenis satwa primata paling banyak ditemukan pada ketinggian 1.100-1.300 mdpl.	

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Saran
389	Giri MMS, dkk;2019;Jurnal	Javan Leopard In Segs Concession Area: The Harmony Between Wildlife And Geothermal	Conservation Forrest around the SEGS conssesion area which part of GHSNP is still in good condition. This makes the area a good habitat for P. p. melas. Occupancy rate of P. p. melas as much as 86% in the study area. Some disturbances still occur, detected by the finding of animal snare and the frequency of public activities from local people recorded on the camera.Based on the analysis, that was identified 10 different individuals of P. p. melas. Then the relative density can be calculated in which results in one individual of javan leopard per 5.5 km2 area. Relative density P. p. melas is higher than previous research.Direct encounter P. p. melas quite often around SEGS geothermal facilities. During morning until afternoon is an active working time for geothermal activities, the mobility of personnel at this hour is quite high. On the other side, most frequent camera captured the javan leopard in between activities active in the morning before noon (6:00 - 10:00 am) and afternoon before evening (02:00 - 4:00 pm). This shows that geothermal activities at SEGS consession area does not significantly affect the presence and population of P.p.melas. An environmentally friendly of geothermal development commitment proved by several design facilities that pay attention to the presence of wildlife. The design for pipelines at a distance of one to two meters from the surface with multilevel pipe let P. p. melas easy to crossing operational roads beneath the pipelines. Multilateral and directional well also contribute as a significant factor to minimize land usage and tree cutting. With these types of the above design and commitment, the harmony between wildlife and geothermal activities could maintain in a good relation. The wildlife habitat keep in sustain condition and geothermal activities run in optimal production of electricity.	
390	Astri Zulfa, dkk;2021;Jurnal	Phytochemical Screening On Some Leaves And Fruits Consumed By Javan Gibbons (*Hylobates Moloch*) From Cikaniki Area, Mount Halimun Salak National Park, West Java	The results obtained 23 samples from 22 species of Hylobates moloch food plants in Cikaniki area, Mount Halimun Salak National Park.The results of the phytochemical screening test of the 23 samples proved to contain secondary metabolites. The most common compounds found in the sample were flavonoids (21 samples) and alkaloids (19 sample).Several types of food plants for Hylobates moloch obtained are proven to be used as medicine by the community at Cikaniki area to cure diseases, these species are: D*ysoxylum parasiticum, Euodia latifolia*, and *Cinnamomum parthenoxylon*.	
391	Haneul Jang,dkk;2021;Jurnal	Do Javan Gibbons (*Hylobates Moloch*) Use Fruiting Synchrony As A Foraging Strategy	Across 12 months we collected biweekly phenological data on 250 trees from 10 fruit species and observed Javan gibbons' visits to those species. We found that a fruit discovery in the beginning of fruiting seasons triggered gibbons to visit trees of the same fruit species. However, gibbons' visit rates did not differ between highly synchronous and asynchronous species. Our results suggest that Javan gibbons have knowledge of synchronous characteristics of fruiting trees in general, but they do not differentiate highly synchronous versus asynchronous fruit species. We spec_x005 fulate that Javan gibbons, who live in relatively small ranges with very low tree density of preferred fruit species, are likely able to track and remember fruiting states of individual trees without needing to distinguish fruit species with different synchrony levels. Moreover, gibbons may make little benefit of distinguishing highly synchronous versus asynchronous fruit species, probably due to gibbons' heavy use of asynchronous figs.	











Taman nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Salah satu KPA di Indonesia adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Berdasarkan sejarahnya, bahwa kawasan taman nasional ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi atas pertimbangan nilai-nilai penting dan strategisnya, antara lain sebagai hutan hujan tropis terluas yang tersisa di Pulau Jawa, sebagai habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan endemik Pulau Jawa, pendukung keberlanjutan nilai-nilai budaya masyarakat kasepuhan, sebagai menara air bagi kota-kota besar disekitarnya termasuk Bogor, Sukabumi, Lebak Banten, Jakarta dan Tangerang.

Kawasan TNGHS dengan berbagai tipe ekosistem yang terdapat di dalamnya merupakan habitat dari berbagai jenis satwa langka dan dilindungi. Berdasarkan sejarahnya, kawasan taman nasional pernah menjadi habitat Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*), Harimau Jawa (*Panthera tigris sondaicus*). Di kawasan TNGHS telah diketahui terdapat spesies dari taksa mamalia sebanyak 61 spesies, dimana terdapat spesies-spesies yang endemik Pulau Jawa dan spesies-spesies terancam punah. Selain itu lebih dari 700 spesies tumbuhan berbunga hidup di hutan alam di dalam TNGHS, yang meliputi 391 marga dari 119 suku.

Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di kawasan konservasi termasuk TNGHS patut untuk diprioritaskan sehingga diharapkan potensi yang ada dapat digali dan dikembangkan untuk manfaat yang seluas-luasnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Buku "Grand Strategi Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di TNGHS" diharapkan menjadi pegangan dan memberikan pandangan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya kalangan peneliti tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan di TNGHS.

ISBN 978-623-96033-8-0